



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TAHUN 2027



www.temanggungkab.go.id



info@temanggungkab.go.id



**BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2026**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :

- a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2027 sampai dengan Desember 2027.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2027;
- b. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2027; dan
- c. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I berisi pendahuluan;
- b. bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab III berisi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. bab IV berisi sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. bab VI berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- dan
- g. bab VII berisi penutup.

Pasal 5

Ketentuan mengenai dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 39

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 PROSES PENYUSUNAN.....	I-2
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-5
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-7
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-8
1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 KONDISI UMUM DAERAH.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-23
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-69
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-366
2.1.5 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)	II-381
2.1.6 Penyelenggaraan Pemantauan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	II-385
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD	II-388
2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama	II-388
2.2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)	II-392
2.2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-396
2.2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-420
2.2.5 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-446
2.2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-455
2.2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-458
2.2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-478
2.2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan	II-479
2.2.10 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum.....	II-487
2.2.11 Ringkasan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	II-488

2.2.12 Evaluasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-508
2.2.13 Evaluasi Kinerja Indikator <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	II-513
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	II-527
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-527
2.3.2 Isu Strategis	II-549
2.4 KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	II-559
2.4.1 Kinerja Prioritas Nasional (PN) RKPD 2025 di Daerah	II-559
2.4.2 Pelaporan Program Strategis Nasional (Pro SN)	II-564
2.4.3 Intervensi Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Prioritas Tahun 2025	II-565
2.4.4 Capaian Program Prioritas	II-570
2.5 TELAAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	II-574
2.6 INOVASI DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH	II-574
2.6.1 Program Unggulan Daerah	II-640
2.7 PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN TEMANGGUNG	II-650
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional	III-1
3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional	III-3
3.1.3. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah	III-5
3.1.4. Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	III-6
3.1.5. Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung	III-9
3.1.6 Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung	III-11
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-19
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-21
3.2.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	III-26
3.2.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III-35
3.3. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	III-39
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. VISI DAN MISI	IV-1
4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SERTA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	IV-7
4.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-7
4.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	IV-20
4.3. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2027	IV-33

4.3.1. Tema Pembangunan Tahun 2027	IV-33
4.3.2. Prioritas Pembangunan.....	IV-37
4.4. DUKUNGAN SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH.....	IV-132
4.4.1. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung	IV-132
4.4.2. Dukungan terhadap Program Prioritas dan Program Delegasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung	IV-146
4.4.3. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-157
4.4.4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027.....	IV-161
4.4.5. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan.....	IV-165
4.4.6. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung.....	IV-168
4.4.7. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung.....	IV-169
4.4.8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung	IV-175
4.4.9. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.....	IV-177
4.4.10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur	IV-178
4.4.11. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung	IV-179
4.4.12. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019	IV-181
4.4.13. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur	IV-183
4.4.14. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta	IV-184
4.4.15. Penyelenggaran Satu Data Indonesia	IV-185
4.4.16. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah.....	IV-187
4.4.17. Manajemen Risiko.....	IV-188
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. RENCANA KERJA DAERAH	V-1
5.1.1. Dukungan Program Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 terhadap Prioritas Nasional (PN)..	V-1
5.1.2. Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep <i>Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial</i> (THIS).....	V-59

5.1.3. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah	V-62
5.1.4. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 Terhadap Satu Data Indonesia.....	V-126
5.2. PENDANAAN DAERAH	V-126
5.2.1. Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang	V-126
5.2.2. Pagu Indikatif per Program berdasarkan Urusan dan Bidang	V-143
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..	VI-1
6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	VI-1
6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH	VI-2
6.3 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH...	VI-14
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Tahun 2027.....	I-2
Gambar 1.2 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan ...	I-8
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung ...	II-2
Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kabupaten Temanggung.....	II-3
Gambar 2.3 Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung.....	II-5
Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung	II-6
Gambar 2.5 Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-9
Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung.	II-10
Gambar 2.7 Peta Geologi Kabupaten Temanggung.....	II-11
Gambar 2.8 Gambaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-17
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional.....	II-18
Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2021- 2025	II-19
Gambar 2.11 Grafik Piramida Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-21
Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD	II-25
Gambar 2.13 Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 .	II-27
Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-28
Gambar 2.15 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, ...	II-33
Gambar 2.16 Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Target RKPD	II-35
Gambar 2. 17 Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-35
Gambar 2.18 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025	II-37
Gambar 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-38

Gambar 2.20 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung	II-41
Gambar 2.21 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025	II-42
Gambar 2.22 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung dengan Capaian Provinsi dan Nasional .	II-44
Gambar 2.23 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025	II-45
Gambar 2.24 Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	II-48
Gambar 2.25 Grafik Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-54
Gambar 2.26 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021–2025.....	II-70
Gambar 2.27 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025.....	II-71
Gambar 2.28 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-72
Gambar 2.29 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-78
Gambar 2.30 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ...	II-79
Gambar 2.31 Satuan Pendidikan yang Telah Terakreditasi Minimal B pada Jenjang PAUD, SD, SMP, Maupun Pendidikan Nonformal Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-82
Gambar 2.32 Usia Harapan Hidup Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021–2025	II-97
Gambar 2.33 Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Temanggung	II-98
Gambar 2.34 Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Temanggung	II-100
Gambar 2.35 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-101
Gambar 2.36 Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Temanggung	II-103
Gambar 2.37 Net Death Rate Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	105
Gambar 2.38 Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kabupaten Temanggung	II-106

Gambar 2.39 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-107
Gambar 2.40 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Kabupaten Temanggung	II-126
Gambar 2.41 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025....	II-127
Gambar 2.42 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 ...	II-132
Gambar 2.43 Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-140
Gambar 2.44 Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-148
Gambar 2.45 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-152
Gambar 2.46 Capaian Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-165
Gambar 2.47 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-171
Gambar 2.48 TPAK Perempuan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.....	II-172
Gambar 2.49 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Temanggung	II-177
Gambar 2.50 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Temanggung	II-178
Gambar 2.51 Rasio Peningkatan Pelayanan Dampak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-179
Gambar 2.52 Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-195
Gambar 2.53 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-197
Gambar 2.54 Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-197
Gambar 2.55 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung	II-227
Gambar 2.56 Prevalensi Kontrasepsi Modern Kabupaten Temanggung	II-233
Gambar 2.57 Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-239
Gambar 2.58 Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten	

Temanggung	II-266
Gambar 2.59 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Temanggung.....	II-289
Gambar 2.60 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik) di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-294
Gambar 2.61 Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-312
Gambar 2.62.....	II-322
Gambar 2.63 Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Temanggung Tahun 2021– 2025.....	II-335
Gambar 2.64 Jumlah Hotel di Kabupaten Temanggung 2021– 2025	II-373
Gambar 2.65 Hasil Penilaian Survey Penilaian Integritas.....	II-379
Gambar 2.66 Pemanfaatan Sistem Montoring Evaluasi dan Pengendalian	II-386
Gambar 2.67 Persentase Skala Peringkat Kinerja Indikator Tujuan pada Periode	II-488
Gambar 2.68 Persentase Skala Peringkat Kinerja Indikator Sasaran pada Periode	II-489
Gambar 2.69 Persentase Skala Peringkat Kinerja Indikator Kinerja Daerah pada Periode Triwulan IV Tahun 2025.....	II-492
Gambar 2.70 Persentase Skala Peringkat Kinerja IKUPD pada Periode Triwulan IV	II-498
Gambar 2.71 Persentase Skala Peringkat Kinerja Indikator Kinerja Program pada Periode Triwulan IV Tahun 2025	II-500
Gambar 2. 72 Persentase skala penilaian kinerja pada indikator IKUPD dan Program Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-501
Gambar 2.73 Persentase skala penilaian kinerja pada indikator IKUPD dan Program urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Triwulan IV Tahun 2025	II-502
Gambar 2.74 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD dan Program Urusan Pemerintahan Pilihan Triwulan IV Tahun 2025	II-503
Gambar 2.75 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD dan Program Pendukung Urusan Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2025	II-504
Gambar 2.76 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD dan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2025	II-505
Gambar 2.77 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD dan Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2025	II-506

Gambar 2.78 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD dan Program Unsur Pemerintahan Umum Triwulan IV Tahun 2025	II-507
Gambar 2.79 Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD dan Program	II-508
Gambar 2.80 Status Capaian Indikator TPB Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-514
Gambar 2.81 Dukungan Peran Aktor TPB Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-525
Gambar 2.82 Status Capaian Per Pilar TPB Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-525
Gambar 3.1 Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB	III-15
Gambar 3.2 Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi	III-15
Gambar 4.1 Konsep THIS dalam Kebijakan Pembangunan Kabupaten Temanggung	IV-34
Gambar 4.2 Implementasi Konsep THIS dalam Kebijakan Pembanguna Sesuai Tema Pembangunan Tahunan	IV-35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan	II-2
Tabel 2.2 Kemiringan Lahan di Kabupaten Temanggung	II-4
Tabel 2.3 Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung	II-5
Tabel 2.4 Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung	II-7
Tabel 2.5 Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian.....	II-8
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-8
Tabel 2.7 DAS dan Sub DAS di Kabupaten Temanggung	II-10
Tabel 2.8 Jenis Geologi Kabupaten Temanggung Tiap Kecamatan	II-11
Tabel 2.9 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025	II-16
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021-2025	II-16
Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2025	II-18
Tabel 2.12 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung.....	II-19
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Tahun 2021-2025 dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	II-20
Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025	II-21
Tabel 2.15 Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2025.....	II-22
Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan.....	II-23
Tabel 2.17 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target Daerah dan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2021-2025	II-24
Tabel 2.18 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Miliar Rupiah).....	II-25
Tabel 2.19 Pertumbuhan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 berdasarkan Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2021-2025	II-27

Tabel 2.20 Perbandingan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-29
Tabel 2.21 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKP Kewilayahan	II-30
Tabel 2.22 Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku	II-31
Tabel 2.23 Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK dan PDRB Per Kapita ADHB Daerah dengan Target RKPD Tahun 2021-2025	II-32
Tabel 2.24 Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dengan.....	II-32
Tabel 2.25 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah.....	II-36
Tabel 2.26 Perbandingan TPT Daerah dengan Rata-rata Capaian	II-36
Tabel 2.27 Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025	II-37
Tabel 2.28 Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan	II-38
Tabel 2.29 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-38
Tabel 2.30 Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025	II-40
Tabel 2.31 Rata-Rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-41
Tabel 2.32 Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025	II-43
Tabel 2.33 Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	II-43
Tabel 2.34 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Nasional Tahun 2021-2025	II-43
Tabel 2.35 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Tingkat Kemiskinan) di Kabupaten Temanggung dengan Target RKPD Tahun 2021-2025	II-46
Tabel 2.36 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Target RKP Kewilayahan	II-47
Tabel 2.37 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional.....	II-47

Tabel 2.38 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025	II-47
Tabel 2.39 Perbandingan Perubahan Pencapaian Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Capaian Nasional...	II-48
Tabel 2.40 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin, Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-49
Tabel 2.41 Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-50
Tabel 2.42 Perbandingan Rasio Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional Tahun 2021-2025	II-50
Tabel 2.43 Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan perbandingan perubahan indeks kedalaman kemiskinan dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah	II-51
Tabel 2.44 Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2021-2025.....	II-52
Tabel 2.45 Angka Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-53
Tabel 2.46 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..	II-55
Tabel 2.47 Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional dengan Target RKPD Tahun 2025.....	II-56
Tabel 2.48 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Tahun 2021-2025	II-57
Tabel 2.49 Perbandingan Pertumbuhan IPM Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-57
Tabel 2.50 Perbandingan AHH dengan Target RKPD	II-58
Tabel 2.51 Perbandingan Pertumbuhan AHH Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-59
Tabel 2.52 Perbandingan HLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung	II-59
Tabel 2.53 Perbandingan Pertumbuhan HLS Daerah dengan Capaian Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional.....	II-60
Tabel 2.54 Perbandingan RLS dengan Target RKPD Kabupaten	

Temanggung	II-61
Tabel 2.55 Perbandingan Pertumbuhan RLS Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional.....	II-61
Tabel 2.56 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita dengan Target RKPD	II-62
Tabel 2.57 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 .	II-63
Tabel 2.58 Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Target RKPD Tahun 2021-2025.....	II-65
Tabel 2.59 Perbandingan Rasio Gini pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dengan Capaian Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-65
Tabel 2.60 Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2021-2025	II-66
Tabel 2.61 Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional.....	II-66
Tabel 2.62 Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Target RKP Kewilayahan	II-67
Tabel 2.63 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-67
Tabel 2.64 Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi.....	II-68
Tabel 2.65 Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021-2025	II-73
Tabel 2.66 Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021-2025	II-73
Tabel 2.67 Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021-2025	II-74
Tabel 2.68 Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021-2025	II-74
Tabel 2.69 Persentase Siswa SD Sederajat yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Literasi pada Asesmen Nasional Kabupaten Temanggung	II-75
Tabel 2.70 Persentase Siswa SMP Sederajat yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Literasi pada Asesmen Nasional Kabupaten Temanggung	II-76
Tabel 2.71 Persentase Siswa SD Sederajat yang Mencapai Standar	

Kompetensi Minimum Numerasi pada Asesmen Nasional	II-77
Tabel 2.72 Persentase Siswa SMP Sederajat yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Numerasi pada Asesmen Nasional	II-77
Tabel 2.73 Gambaran Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-81
Tabel 2.74 Iklim Inklusivitas SD Kabupaten Temanggung	II-86
Tabel 2.75 Iklim Keamanan SD Kabupaten Temanggung.....	II-87
Tabel 2.76 Iklim Kebhinekaan SD Kabupaten Temanggung	II-88
Tabel 2.77 Iklim Inklusivitas SMP Kabupaten Temanggung	II-88
Tabel 2.78 Iklim Keamanan SMP Kabupaten Temanggung.....	II-89
Tabel 2.79 Iklim Kebhinekaan SMP Kabupaten Temanggung.....	II-90
Tabel 2.80 Rasio Guru/Siswa PAUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-90
Tabel 2.81 Rasio Guru/Siswa SD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-91
Tabel 2.82 Rasio Guru/Siswa SMP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-92
Tabel 2.83 Rincian Anggaran Program JKN Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-99
Tabel 2.84 Gambaran Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung	II-108
Tabel 2.85 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-110
Tabel 2.86 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 ...	II-111
Tabel 2.87 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-112
Tabel 2.88 Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Temanggung	II-112
Tabel 2.89 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-113
Tabel 2.90 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-114
Tabel 2.91 Prevalensi Wasting Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-115
Tabel 2.92 Insiden Stunting Balita (kasus baru) di Kabupaten Temanggung	II-116
Tabel 2.93 Persentase anemia pada ibu hamil di Kabupaten Temanggung	II-117
Tabel 2.94 Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 –	

2025	II-117
Tabel 2.95 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 s.d 59 Tahun) Sesuai Standardi Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-118
Tabel 2.96 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Warga Usia 60 Tahun Keatas mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung	II-119
Tabel 2.97 Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-120
Tabel 2.98 Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung	II-121
Tabel 2.99 Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-122
Tabel 2.100 Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung	II-123
Tabel 2.101 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung	II-125
Tabel 2.102 Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-128
Tabel 2.103 Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-129
Tabel 2.104 Rincian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-130
Tabel 2.105 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-131
Tabel 2.106 Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung	II-132
Tabel 2.107 Persentase Trotoar Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-135
Tabel 2.108 Kondisi Trotoar Kabupaten Temanggung Tahun 2025	135
Tabel 2.109 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-136
Tabel 2.110 Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung	II-137
Tabel 2.111 Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Temanggung Berdasarkan Fungsinya	II-138

Tabel 2.112 Jalan Kewenangan Kabupaten dengan Lebar Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-138
Tabel 2.113 Persentase Jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung	II-140
Tabel 2.114 Capaian Akses Sanitasi Aman Kabupaten Temanggung	II-142
Tabel 2.115 Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-143
Tabel 2.116 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-146
Tabel 2.117 Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-147
Tabel 2.118 Persentase Kepemilikan Rumah Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-149
Tabel 2.119 Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Temanggung	II-151
Tabel 2.120 Persentase Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Temanggung	II-153
Tabel 2.121 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-155
Tabel 2.122 Gambaran Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-156
Tabel 2.123 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-158
Tabel 2.124 Persentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial Rehabilitasi Sosial PPKS dan PSKS Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-163
Tabel 2.125 Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-164
Tabel 2.126 Gambaran Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-166
Tabel 2.127 Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-167
Tabel 2.128 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-168
Tabel 2.129 Perusahaan yang Memenuhi Kewajiban dalam Memberikan Upah Sesuai UMK di Kabupaten Temanggung Tahun	

2021–2025.....	II-173
Tabel 2.130 Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	II-174
Tabel 2.131 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Temanggung	II-176
Tabel 2.132 Gambaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-179
Tabel 2.133 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung	II-184
Tabel 2.134 Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Temanggung	II-185
Tabel 2.135 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-186
Tabel 2.136 Reforma Agraria yang Difasilitasi Kabupaten Temanggung	II-189
Tabel 2.137 Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-190
Tabel 2.138 Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-191
Tabel 2.139 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ..	II-192
Tabel 2.140 Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung	II-193
Tabel 2.141 Luas Kekritisn Lahan di Kabupaten Temanggung..	II-199
Tabel 2.142 Perhitungan Luas Lahan Kritis Tertangani Kabupaten Temanggung	II-199
Tabel 2.143 Persentase RTH Publik Kabupaten Temanggung yang Terpelihara	II-203
Tabel 2.144 Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan Kabupaten Temanggung yang Terpelihara Tahun 2021 – 2025.....	II-206
Tabel 2.145 Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Kabupaten Temanggung	II-207
Tabel 2.146 Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-207
Tabel 2.147 Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Temanggung	II-209
Tabel 2.148 Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Temanggung	II-211
Tabel 2.149 Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-213

Tabel 2.150 Ketepatan Waktu dalam Proses Penerbitan Dokumen Kependudukan	II-214
Tabel 2.151 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 – 2025	215
Tabel 2.152 Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2025.....	II-215
Tabel 2.153 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung	II-216
Tabel 2.154 Persentase Kepemilikan KK, KTP Elektronik, dan KIA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-216
Tabel 2.155 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-217
Tabel 2.156 Persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-219
Tabel 2.157 Data Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-220
Tabel 2.158 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Temanggung...	II-222
Tabel 2.159 Status Kemandirian Desa di Kabupaten Temanggung	II-223
Tabel 2.160 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-223
Tabel 2.161 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung	II-228
Tabel 2.162 Total Fertility Rate Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-229
Tabel 2.163 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung	II-230
Tabel 2.164 Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-231
Tabel 2.165 Persentase Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.....	II-232
Tabel 2.166 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Perhubungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-237
Tabel 2.167 Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-242
Tabel 2.168 Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	

Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-245
Tabel 2.169 Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-246
Tabel 2.170 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung	II-246
Tabel 2.171 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-247
Tabel 2.172 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-250
Tabel 2.173 Jumlah dan Sebaran UMKM di Kabupaten Temanggung Berdasarkan Skala Usaha Per Kecamatan	II-251
Tabel 2.174 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung	II-252
Tabel 2.175 Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Temanggung	II-253
Tabel 2.176 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-254
Tabel 2.177 Realisasi Investasi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-256
Tabel 2.178 Realisasi Jumlah Proyek Investasi Per Sektor Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	257
Tabel 2.179 Nilai Investasi Per Sektor Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-258
Tabel 2.180 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Perusahaan Per Sektor	259
Tabel 2.181 Realisasi Investasi Kabupaten Temanggung Per Kecamatan.....	II-261
Tabel 2.182 Persentase Layanan yang Memenuhi Standar Waktu Pelayanan	262
Tabel 2.183 Data Perizinan Kabupaten Temanggung Triwulan I Tahun 2026	II-263
Tabel 2.184 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal	II-267
Tabel 2.185 Gambaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung	II-271
Tabel 2.186 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Temanggung	II-273
Tabel 2.187 Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-274
Tabel 2.188 Gambaran Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung	II-276

Tabel 2.189 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	276
Tabel 2.190 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-280
Tabel 2.191 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-280
Tabel 2.192 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Kabupaten Temanggung	II-281
Tabel 2.193 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-282
Tabel 2.194 Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung	II-284
Tabel 2.195 Hasil Audit Internal Kearsipan Tahun 2025.....	II-285
Tabel 2.196 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-286
Tabel 2.197 Identifikasi Data Komposit Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	II-288
Tabel 2.198 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Perikanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-290
Tabel 2.199 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-293
Tabel 2.200 Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Temanggung	II-295
Tabel 2.201 Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-296
Tabel 2.202 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-297
Tabel 2.203 Rasio PDRB Pertanian Kabupaten Temanggung	II-298
Tabel 2.204 Gambaran Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-299
Tabel 2.205 Produktivitas Padi di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-300
Tabel 2.206 Produktivitas Jagung di Kabupaten Temanggung	II-301
Tabel 2.207 Produktivitas Bawang Putih di Kabupaten Temanggung	II-301
Tabel 2.208 Produktivitas Bawang Merah di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-302
Tabel 2.209 Produktivitas Cabai Rawit di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-302
Tabel 2.210 Produktivitas Cabai Keriting di Kabupaten Temanggung	II-303
Tabel 2.211 Produktivitas Tembakau di Kabupaten Temanggung	II-304

Tabel 2.212 Produktivitas Kopi Robusta di Kabupaten Temanggung	II-304
Tabel 2.213 Produktivitas Kopi Arabika di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-305
Tabel 2.214 Jumlah Produksi Daging Ternak Besar Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-306
Tabel 2.215 Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-306
Tabel 2.216 Jumlah Produksi Daging Ternak Unggas	II-307
Tabel 2.217 Jumlah Produksi Telur Kabupaten Temanggung	II-308
Tabel 2.218 Persentase Kecukupan Sarana Alat Mesin Pertanian Pangan Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-309
Tabel 2.219 Persentase Penanganan Penyakit Hewan Kabupaten Temanggung	II-309
Tabel 2.220 Persentase Pengawasan Produk Hewan dan Bahan Asal Hewan dan Bahan Penunjang yang Memenuhi Syarat Kabupaten Temanggung	II-310
Tabel 2.221 Persentase Fasilitasi Pengendalian Bencana Pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-311
Tabel 2.222 Rasio PDRB Perdagangan Kabupaten Temanggung ..	II-313
Tabel 2.223 Disparitas Harga Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-314
Tabel 2.224 Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-315
Tabel 2.225 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-316
Tabel 2.226 Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	II-317
Tabel 2.227 Gambaran Urusan Perindustrian di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-318
Tabel 2.228 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-321
Tabel 2.229 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2025.....	II-325
Tabel 2.230 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-325
Tabel 2.231 Gambaran Fungsi Sekretariat Daerah	II-326
Tabel 2.232 Gambaran Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-334
Tabel 2.233 Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-337
Tabel 2.234 Gambaran Capaian Kinerja Bidang Perencanaan	II-338

Tabel 2.235 Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025	II-340
Tabel 2.236 Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-341
Tabel 2.237 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	II-341
Tabel 2.238 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025	II-342
Tabel 2.239 Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025	II-345
Tabel 2.240 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025	II-346
Tabel 2.241 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025	II-346
Tabel 2.242 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung	II-347
Tabel 2.243 Kapabilitas Inovasi Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-348
Tabel 2.244 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-350
Tabel 2.245 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025	II-351
Tabel 2.246 Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Kabupaten Temanggung	II-352
Tabel 2.247 Gambaran Indikator Kinerja Unsur Pengawasan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025	II-353
Tabel 2.248 Gambaran Indikator Kinerja pada 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025	II-356
Tabel 2.249 Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Tahun 2021-2025	II-357
Tabel 2.250 Capaian Indikator Kinerja Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan	II-358
Tabel 2.251 Capaian Indikator Kinerja Realisasi Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Layak Tahun 2021 - 2025 II-.....	II-358
Tabel 2.252 Capaian Indikator Kinerja Realisasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Terfasilitasi dan Aktif Tahun 2021 - 2025	II-359
Tabel 2.253 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penanganan Laporan Kejadian, Gangguan Kamtibmas, dan Bencana Alam di	

Kecamatan Tahun 2021 – 2025	II-360
Tabel 2.254 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan Tahun 2021 – 2025	II-361
Tabel 2.255 Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu Tahun 2021 – 2025	II-361
Tabel 2.256 Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu Tahun 2021–2025.....	II-362
Tabel 2.257 Gambaran Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025	II-364
Tabel 2.258 Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Tahun (Ribu Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-366
Tabel 2.259 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-367
Tabel 2.260 Perkembangan Pelanggan Listrik di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-368
Tabel 2.261 Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-369
Tabel 2.262 Luas Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-370
Tabel 2.263 Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025.....	II-371
Tabel 2.264 Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2021–2025	II-371
Tabel 2.265 Angka Kriminalitas di Kabupaten Temanggung	II-374
Tabel 2.266 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-375
Tabel 2.267 Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha di.....	II-376
Tabel 2.268 Rasio Lulusan Perguruan Tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025.....	II-377
Tabel 2.269 Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Kabupaten Temanggung	II-378
Tabel 2.270 Capaian Indeks Integritas Nasional Tahun 2021-2025	II-380
Tabel 2.271 Predikat Indeks Satu Data Indonesia.....	II-383
Tabel 2.272 Nilai Domain dan Indeks SDI Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-383
Tabel 2.273 Nilai Indeks Aspek SDI Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-384
Tabel 2.274 Nilai Indikator SDI Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-384

Tabel 2.275 Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-388
Tabel 2.276 Capaian Indikator Kinerja Tujuan	II-388
Tabel 2.277 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada Tahun 2025	II-391
Tabel 2.278 Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Tahun 2025	II-392
Tabel 2.279 Capaian Kinerja IKUPD Pemerintahan Bidang Pendidikan Pada Tahun 2025	II-397
Tabel 2.280 Capaian Kinerja Program Pemerintahan Bidang Pendidikan.....	II-398
Tabel 2.281 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES) Tahun 2025	II-400
Tabel 2.282 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD) Tahun 2025.....	II-401
Tabel 2.283 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Dinkes) Tahun 2025	II-402
Tabel 2.284 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD) Tahun 2025.....	II-404
Tabel 2.285 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum	II-407
Tabel 2.286 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Periode Triwulan IV Tahun 2025	II-408
Tabel 2.287 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Periode Triwulan IV Tahun 2025	II-410
Tabel 2.288 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2025.....	II-411
Tabel 2.289 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	II-412
Tabel 2.290 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-412
Tabel 2.291 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-415
Tabel 2.292 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Pada Tahun 2025. II-416	
Tabel 2.293 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2025.....	II-418

Tabel 2.294 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 419

Tabel 2.295 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2025 II-420

Tabel 2.296 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2025 II-420

Tabel 2.297 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 II-422

Tabel 2.298 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 II-423

Tabel 2.299 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2025 II-424

Tabel 2.300 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2025 II-425

Tabel 2.301 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025 II-426

Tabel 2.302 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025 II-426

Tabel 2.303 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil Pada Tahun 2025 II-428

Tabel 2.304 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2025 II-429

Tabel 2.305 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2025 II-429

Tabel 2.306 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2025 II-430

Tabel 2.307 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Tahun 2025 II-431

Tabel 2.308 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Tahun 2025 II-431

Tabel 2.309 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan II-432

Tabel 2.310 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan II-433

Tabel 2.311 Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi II-434

Tabel 2.312 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi II-435

Tabel 2.313 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan	II-436
Tabel 2.314 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025	II-436
Tabel 2.315 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan	II-437
Tabel 2.316 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2025	II-438
Tabel 2.317 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan	II-439
Tabel 2.318 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan.....	II-440
Tabel 2.319 Capaian Kinerja IKUPD Pemerintahan Bidang Statistik.....	II-440
Tabel 2.320 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.....	II-441
Tabel 2.321 Capaian Kinerja IKUPD Pemerintahan Bidang Persandian.....	II-441
Tabel 2.322 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.....	II-442
Tabel 2.323 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2025	II-443
Tabel 2.324 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.....	II-443
Tabel 2.325 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	II-444
Tabel 2.326 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	II-445
Tabel 2.327 Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	II-445
Tabel 2.328 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	II-446
Tabel 2.329 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	II-446
Tabel 2.330 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	II-447
Tabel 2.331 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2025	II-448
Tabel 2.332 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	II-449
Tabel 2.333 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan	II-450

Tabel 2.334 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	II-450
Tabel 2.335 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan	II-452
Tabel 2.336 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	II-452
Tabel 2.337 Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2025	II-453
Tabel 2.338 Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.....	II-454
Tabel 2.339 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2025	II-455
Tabel 2.340 Capaian Kinerja Program Penyelenggaran Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2025	II-456
Tabel 2.341 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2025	II-457
Tabel 2.342 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2025	II-457
Tabel 2.343 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pada Tahun 2025	II-458
Tabel 2.344 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pada Tahun 2025	II-461
Tabel 2.345 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Pada Tahun 2025	II-463
Tabel 2.346 Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025	II-465
Tabel 2.347 Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025	II-466
Tabel 2.348 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Pada Tahun 2025	II-467
Tabel 2.349 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Pada Tahun 2025	470
Tabel 2.350 Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025.....	II-471

Tabel 2.351 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Pada Tahun 2025	II-472
Tabel 2.352 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pada Tahun 2025	II-474
Tabel 2.353 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Temanggung	II-474
Tabel 2.354 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pada Tahun 2025	II-475
Tabel 2.355 Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Tahun 2025	II-476
Tabel 2.356 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-476
Tabel 2.357 Kapabilitas Inovasi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	II-477
Tabel 2.358 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Tahun 2025	II-478
Tabel 2.359 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-478
Tabel 2.360 Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan Tahun 2025	II-479
Tabel 2.361 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2025	II-487
Tabel 2.362 Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-488
Tabel 2.363 Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-489
Tabel 2.364 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung	II-489
Tabel 2.365 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-493
Tabel 2.366 Capaian Indikator Program Kabupaten Temanggung sampai dengan	II-498
Tabel 2.367 Rata-rata Capaian Kinerja dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD dan Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-500
Tabel 2.368 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD dan Program Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan	

Dengan Pelayanan Dasar	II-502
Tabel 2.369 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-503
Tabel 2.370 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-504
Tabel 2.371 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD dan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-504
Tabel 2.372 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD dan Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan..	II-505
Tabel 2.373 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD dan Program Unsur Pemerintahan Umum.....	II-506
Tabel 2.374.....	II-507
Tabel 2.375 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung	II-508
Tabel 2.376 Capaian Indikator SDGs Tahun 2025	II-513
Tabel 2.377 Tingkat keterisian indikator TPB Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-526
Tabel 2.378 Identifikasi Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-528
Tabel 2.379 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-530
Tabel 2.380 Identifikasi Isu Daerah	II-554
Tabel 2.381 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 1:	II-559
Tabel 2.382 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 2:	II-559
Tabel 2.383 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 3:	II-560
Tabel 2.384 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 4:	II-561
Tabel 2.385 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 5:	II-562
Tabel 2.386 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 6:	II-563
Tabel 2.387 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 7:	II-563
Tabel 2.388 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 8:	II-564
Tabel 2.389 Pelaksanaan Program Strategis Nasional	II-565
Tabel 2.390 Intervensi Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	II-565
Tabel 2.391 Intervensi Daerah dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan.....	II-566
Tabel 2.392 Intervensi Daerah dalam Mendukung Peningkatan Sumber Daya Berkualitas	II-568
Tabel 2.393 Capaian nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Temanggung	II-576
Tabel 2.394 Rekapitulasi Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung	II-576
Tabel 2.395 Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	

Tabel 2.396 Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-578
Tabel 2.397 Jumlah Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung	II-650
Tabel 2.398 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021	II-651
Tabel 2.399 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022	II-652
Tabel 2.400 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	II-655
Tabel 2.401 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II-661
Tabel 2.402 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	II-663
Tabel 3.1 Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional	III-5
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah	III-7
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2027	III-13
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK	III-14
Tabel 3.5 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung	III-16
Tabel 3.6 Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional.....	III-18
Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan 2021-2026, dan Proyeksi Pendapatan 2027 Kabupaten Temanggung	III-24
Tabel 3.8 Komposisi Anggaran untuk pemenuhan <i>Mandatory Spending</i>	III-29
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Tahun 2023-2025, APBD 2026 dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ..	III-30
Tabel 3.10 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah.....	III-31
Tabel 3.11 Persentase Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah.....	III-32
Tabel 3.12 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah.....	III-32
Tabel 3.13 Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah.....	III-33
Tabel 3.14 Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja	III-33
Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2021 s.d 2025, Anggaran	

Pembiayaan Tahun 2026 dan Proyeksi 2027 Kabupaten

Temanggung	III-37
Tabel 3.16 Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2027	III-38
Tabel 4.1 Sinkronisasi Visi dan Misi RPJP/RPJM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	IV-4
Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027	IV-10
Tabel 4.3 Kesesuaian Penetapan Target Indikator Makro Pembangunan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IV-11
Tabel 4.4 Persandingan Keselarasan IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dengan RKP Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IV-12
Tabel 4.5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	IV-22
Tabel 4.6 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	IV-32
Tabel 4. 7 Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	IV-33
Tabel 4.8 Tema/Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Daerah	IV-35
Tabel 4.9 Indikator dan Target Tematik Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	IV-39
Tabel 4. 10 Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan/Isu Strategis, ...	IV-45
Tabel 4. 11 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2027	IV-51
Tabel 4.12 Persandingan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dengan Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Sasaran Prioritas Nasional ..	IV-54
Tabel 4.13 Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dengan	IV-70
Tabel 4.14 Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dengan Sasaran Prioritas Nasional	IV-73
Tabel 4.15 Keterkaitan dan Konsistensi antara Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung	IV-88
Tabel 4.16 Persandingan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Janji	

Tahunan Kepala Daerah	IV-107
Tabel 4.17 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran Prioritas Nasional RPJMN.....	IV-110
Tabel 4.18 Persandingan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan Program Nomenklatur.....	IV-117
Tabel 4.19 Dukungan Program Rill terhadap Program Strategis Nasional.....	IV-132
Tabel 4.20 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional	IV-133
Tabel 4.21 Dukungan terhadap Tematik Pembangunan	IV-145
Tabel 4.22 Dukungan terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah.....	IV-147
Tabel 4.23 Dukungan terhadap Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah.....	IV-148
Tabel 4.24 Dukungan terhadap Program Aksi Provinsi Jawa Tengah.....	IV-149
Tabel 4.25 Dukungan terhadap Program Delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah.....	IV-153
Tabel 4.26 Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM.....	IV-158
Tabel 4.27 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	IV-162
Tabel 4.28 Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan.....	IV-166
Tabel 4.29 Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting.....	IV-168
Tabel 4.30 Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah.....	IV-169
Tabel 4.31 Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung	IV-175
Tabel 4.32 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	IV-177
Tabel 4.33 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur.....	IV-179
Tabel 4.34 Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung	IV-180
Tabel 4.35 Usulan Program/ Kegiatan Kawasan Purwomanggung di Lokasi Kabupaten Temanggung Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019	IV-182
Tabel 4.36 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019	IV-182
Tabel 4.37 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung	

Pembangunan Infrastruktur	IV-183
Tabel 4.38 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta	IV-185
Tabel 5.1 Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Temanggung Tahun 2027 Terhadap Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2027 V-2	
Tabel 5.2 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional 1	V-4
Tabel 5.3 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional 2	V-4
Tabel 5.4 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 3	V-10
Tabel 5.5 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 4	V-12
Tabel 5.6 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 5	V-49
Tabel 5.7 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 6	V-50
Tabel 5.8 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 7	V-51
Tabel 5.9 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 8	V-52
Tabel 5.10 Dukungan Program Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing Prioritas Nasional.....	V-54
Tabel 5.11 Dukungan Program Daerah terhadap Tema Tahunan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan.....	V-55
Tabel 5.12 Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2027 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)	V-60
Tabel 5.13 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung	V-63
Tabel 5.14 Dukungan terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah.....	V-74
Tabel 5.15 Dukungan terhadap Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.....	V-75
Tabel 5.16 Dukungan terhadap Program Aksi Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.....	V-77
Tabel 5.17 Dukungan terhadap Program Delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.....	V-81

Tabel 5.18 Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2027	V-87
Tabel 5.19 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2027.....	V-87
Tabel 5.20 Program Daerah yang Mendukung Penanganan Kemiskinan.....	V-89
Tabel 5.21 Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting.....	V-98
Tabel 5.22 Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	V-101
Tabel 5.23 Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender	V-112
Tabel 5.24 Pemetaan Indikator SDGs dalam Dokumen Perencanaan Daerah.....	V-118
Tabel 5.25 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung.....	V-119
Tabel 5.26 Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi.....	V-121
Tabel 5.27 Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur	V-121
Tabel 5.28 Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung	V-122
Tabel 5.29 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019	V-124
Tabel 5.30 Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Pembangunan Infrastruktur Tahun 2027	124
Tabel 5.31 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta	V-125
Tabel 5.32 Program Daerah yang Mendukung Satu Data Indonesia	V-126
Tabel 5.33 Rekapitulasi Anggaran per Urusan dan per Bidang ..	V-143
Tabel 5.34 Rencana Pembiayaan per Urusan dan Program	V-145
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027	VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027	VI-2
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2027	VI-14
Tabel 6.4 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Temanggung Tahun	

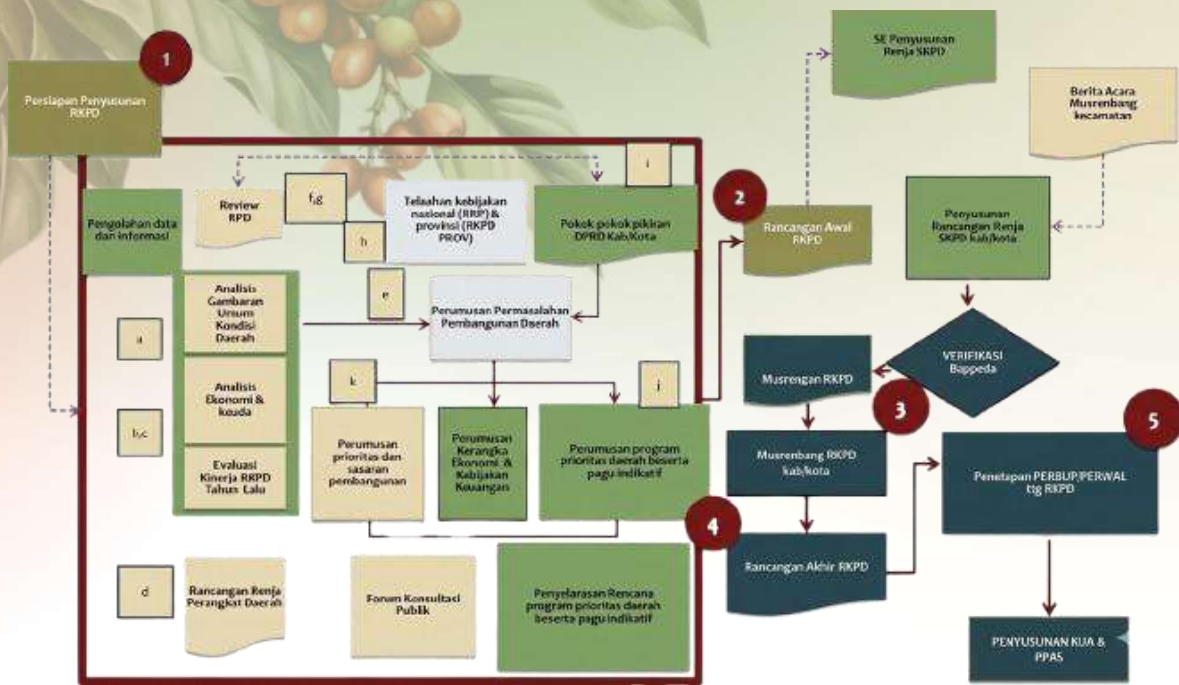
2027	VI-40
Tabel 6.5 Indikator Kinerja Kunci Penunjang Kabupaten Temanggung Tahun 2027	VI-53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sekaligus penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2027 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dilakukan dengan menerapkan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/ bottom-up*, serta holistik-tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2027 dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai dengan perencanaan partisipatif yaitu musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Temanggung yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2027. Secara lebih jelas alur penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dijelaskan pada gambar 1.1 berikut ini.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 1. 1
Alur Penyusunan RKPD Tahun 2027

1.2 PROSES PENYUSUNAN

Secara umum tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Rancangan Awal RKPD

Perumusan dan Penyusunan Rancangan awal RKPD Tahun 2026 dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Rancangan awal RKPD Tahun 2027 berisikan panduan dan koridor perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan pendekatan perencanaan teknokratik.

2. Musrenbang RKPD di Kelurahan

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 di kelurahan dilaksanakan pada tanggal 27 – 31 Oktober 2025. Peserta Musrenbang RKPD pada 23 kelurahan rata-rata diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri lurah dan perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok perempuan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kelurahan, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, pengurus partai politik tingkat kelurahan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan jalannya musrenbang RKPD di kelurahan, Bapperida membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Metode evaluasi yang digunakan dengan pemberian bobot penilaian terhadap beberapa aspek.

3. Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang RKPD di kecamatan berlangsung antara tanggal 26-29 Januari 2026. Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, dan unsur staf kecamatan, pengurus partai politik tingkat kecamatan dan/atau anggota DPRD daerah pemilihan setempat, delegasi dari Desa dan/atau Kelurahan, Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kecamatan, perwakilan kelompok profesi Tingkat Kecamatan, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan penyandang disabilitas, dan perwakilan unsur pendidikan/akademisi.

Sebagaimana Musrenbang RKPD di kelurahan, Bapperida juga mengirimkan Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD di kecamatan. Metode evaluasi yang digunakan dengan memberikan bobot penilaian terhadap beberapa aspek.

4. Forum Internal Perangkat Daerah

Forum Internal Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 12-19 Februari 2026 dengan peserta internal PD dan *stakeholder* terkait. Forum Internal Perangkat Daerah bertujuan untuk mensinergikan prioritas program dan kegiatan hasil Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, mendiskusikan data dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah, dan menentukan lokasi kegiatan dan penerima manfaat baik kelompok dan/atau individu beserta Rencana Anggaran Biaya.

5. Forum Khusus dengan Perangkat Daerah

Forum Khusus dengan Perangkat Daerah dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 25-26 Februari 2026. Pelaksanaannya dibagi menjadi 2 (dua) forum yaitu forum penanganan kemiskinan, dan forum khusus anak, genre, disabilitas dan forum ekonomi kreatif. Forum khusus ini dihadiri

oleh peserta yang terdiri dari perwakilan anak, rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, penyandang penyakit yang rentan penolakan sosial, pemerhati kemiskinan, komite ekonomi kreatif, Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait. Tujuan diadakan Forum Khusus dengan Perangkat Daerah adalah untuk menampung aspirasi dari *stakeholder* terkait dengan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan anak dan penyandang disabilitas serta pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Temanggung.

6. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah (Forum PD) dilaksanakan pada 9 Maret 2026. Forum Perangkat Daerah dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur. Forum Perangkat Daerah diselenggarakan untuk menyepakati isu strategis dan permasalahan pembangunan, mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Rancangan Renja Perangkat Daerah, menyusun prioritas program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah serta alokasi pagu indikatif dengan mengacu pada dokumen rancangan awal RKPD, dan mempertajam target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

7. Musrenbang RKPD di Kabupaten

Musrenbang RKPD di Kabupaten dilaksanakan pada 27 Maret 2026. Peserta Musrenbang RKPD di Kabupaten terdiri dari Forkompimda, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Delegasi Kecamatan, Kepala Instansi Vertikal, unsur kelembagaan dan organisasi tingkat kabupaten, perwakilan kelompok profesi tingkat kabupaten, perwakilan akademisi dan pelaku pendidikan antara lain perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan sekolah, pengurus partai politik tingkat kabupaten, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, LSM/Ormas, Tokoh masyarakat, unsur pengusaha/Investor, penyandang disabilitas, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat tertentu. Musrenbang RKPD di Kabupaten diselenggarakan untuk menyampaikan isu strategis dan permasalahan pembangunan, menyampaikan prioritas program dan kegiatan, menyampaikan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2027.

8. Penyusunan Rancangan RKPD pasca Musrenbang

Tahapan pasca Musrenbang RKPD untuk memperbaiki rancangan RKPD dengan masukan dan saran yang ada juga untuk memberi kesempatan perangkat daerah untuk memastikan lokasi kegiatan yang direncanakan.

9. Reviu Inspektorat

Dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung. Reviu ini dilaksanakan dengan tujuan untuk sinkronisasi antara Kebijakan Pusat, Provinsi, dan Daerah untuk Perencanaan Tahun 2027 di Kabupaten Temanggung.

10. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Hasil dari semua proses yang dilakukan kemudian dirangkum menjadi rancangan Akhir RKPD yang berisi narasi lengkap dari Rancangan Peraturan Bupati, pendahuluan sampai dengan penutup termasuk matriks rencana program dan kegiatan beserta anggarannya.

11. Fasilitasi RKPD dari Provinsi Jawa Tengah

Rancangan Akhir RKPD sebelum ditetapkan harus mendapatkan asistensi/fasilitasi oleh Provinsi Jawa Tengah pada Minggu III Bulan Juni 2026 melalui Surat Fasilitasi Rancangan Akhir Perkada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027 yang disampaikan kepada Kabupaten/Kota dengan mengirimkan surat permohonan fasilitasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi beserta kelengkapannya. Asistensi ini bertujuan untuk sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Kabupaten.

12. Penetapan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati pada akhir bulan Juni 2026.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

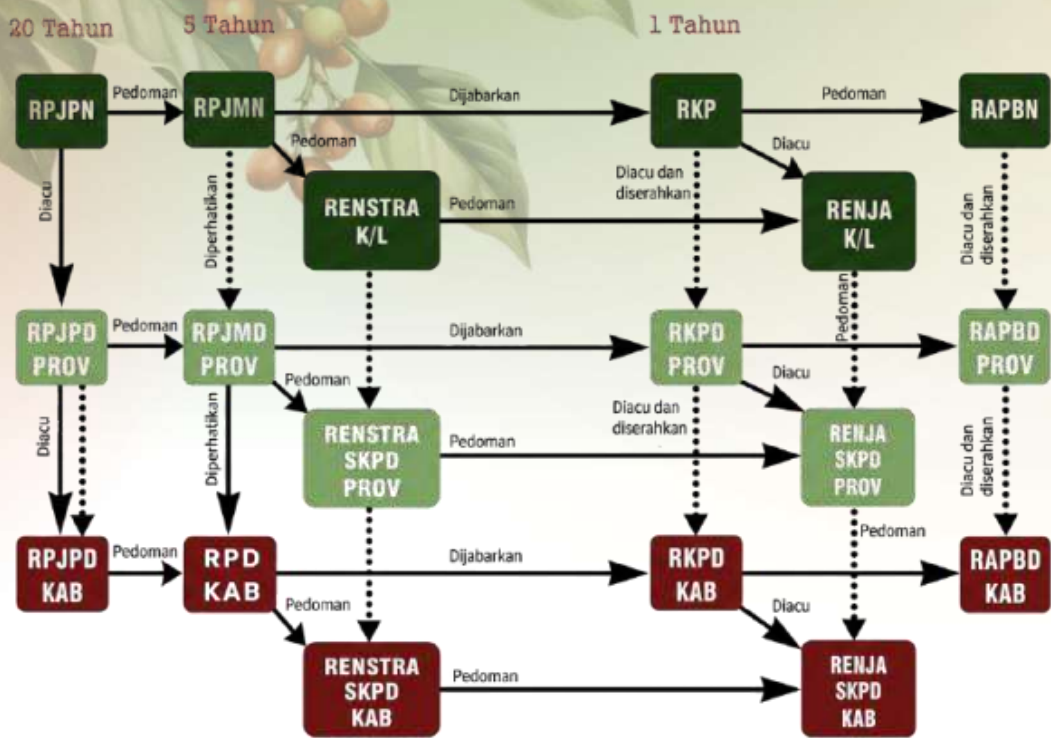
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1/861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 berpedoman pada dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah, dokumen perencanaan sektoral yang ada serta merujuk pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan level pemerintahan desa. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 1. 2
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Dokumen RKPD dalam kaitannya dengan dokumen sektoral seperti SPM, SDGs, Reformasi Birokrasi dan dokumen sektoral lainnya juga dituangkan dalam penyajian capaian-capaian indikator SPM maupun indikator yang berhubungan dengan SDGs dan Reformasi Birokrasi.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah sebagai berikut.

1. Sebagai Pedoman penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2027;
2. Memberikan arah, acuan, dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Menjadi instrumen dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan

1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Proses Penyusunan, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Ringkasan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan dilihat dari kondisi perekonomian global dan nasional, kondisi perekonomian Jawa Tengah, dan kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, PDRB Perkapita serta inflasi.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang Indikator Tujuan, Indikator Sasaran per Misi dengan Urusan/Bidang dan prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat: rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dirumuskan dari indikator tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator sasaran yang kemudian disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan manfaat Dokumen RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

1. Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung terletak di antara 7°32'14" - 7°32'35" Lintang Selatan dan 110°46'23" - 110°46'30" Bujur Timur.

2. Posisi Geografis

Pada kondisi geografis menguraikan mengenai kondisi fisik Kabupaten Temanggung baik dari batas administrasi, aspek topografi, hidrologi, serta penggunaan lahan yang direpresentasikan secara spasial.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 86.483 Ha dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1) Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Kendal

Kecamatan yang berada di perbatasan sebelah Utara adalah Kecamatan Bejen, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Gemawang, dan Kecamatan Candiroto;

2) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Magelang

Kecamatan yang berada di perbatasan sebelah Selatan adalah Kecamatan Kranggan, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo, dan Kecamatan Pringsurat;

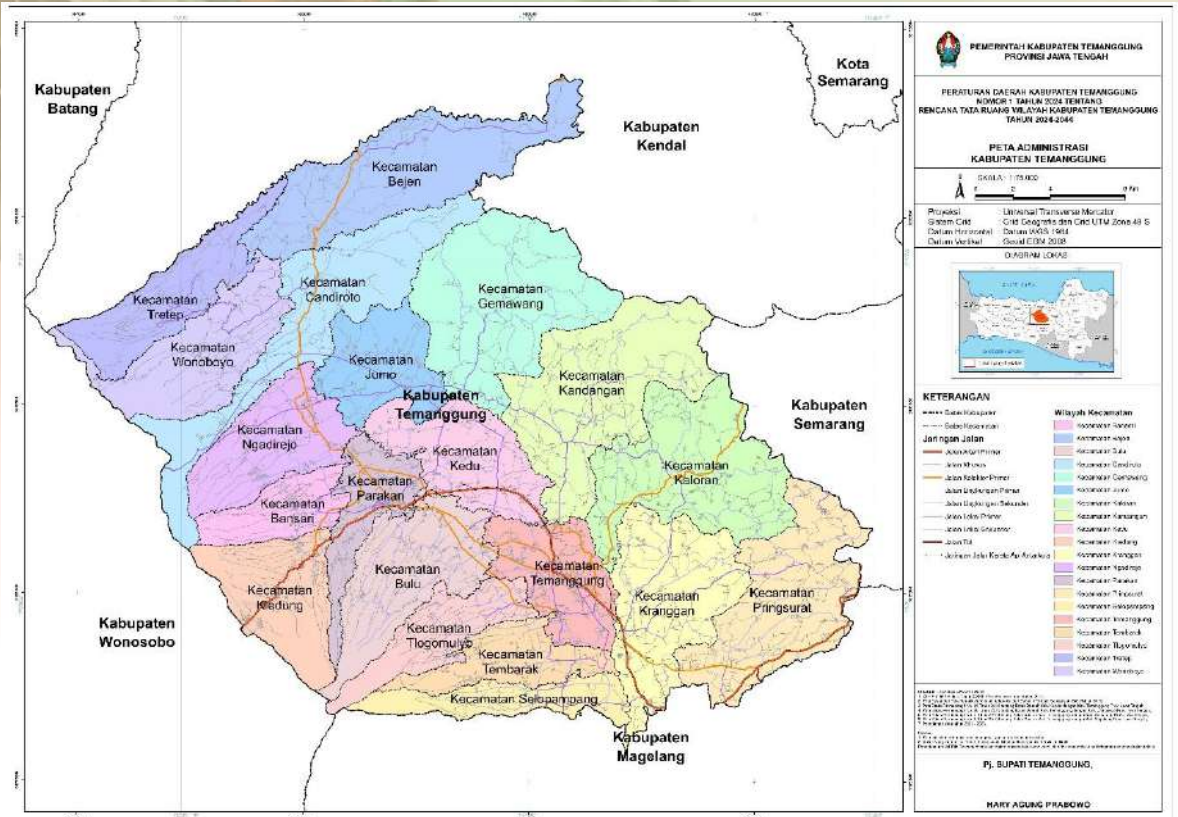
3) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo

Kecamatan yang berada di perbatasan sebelah Barat adalah Kecamatan Kledung, Kecamatan Ngadirejo, dan Kecamatan Wonoboyo;

4) Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Semarang

Kecamatan yang berada di perbatasan sebelah Timur adalah Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Pringsurat.

Peta wilayah administrasi Kabupaten Temanggung disajikan pada gambar 2.1.



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.506 RW, dan 5.921 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Sebaran jumlah desa, kelurahan, RW dan RT menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per kecamatan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

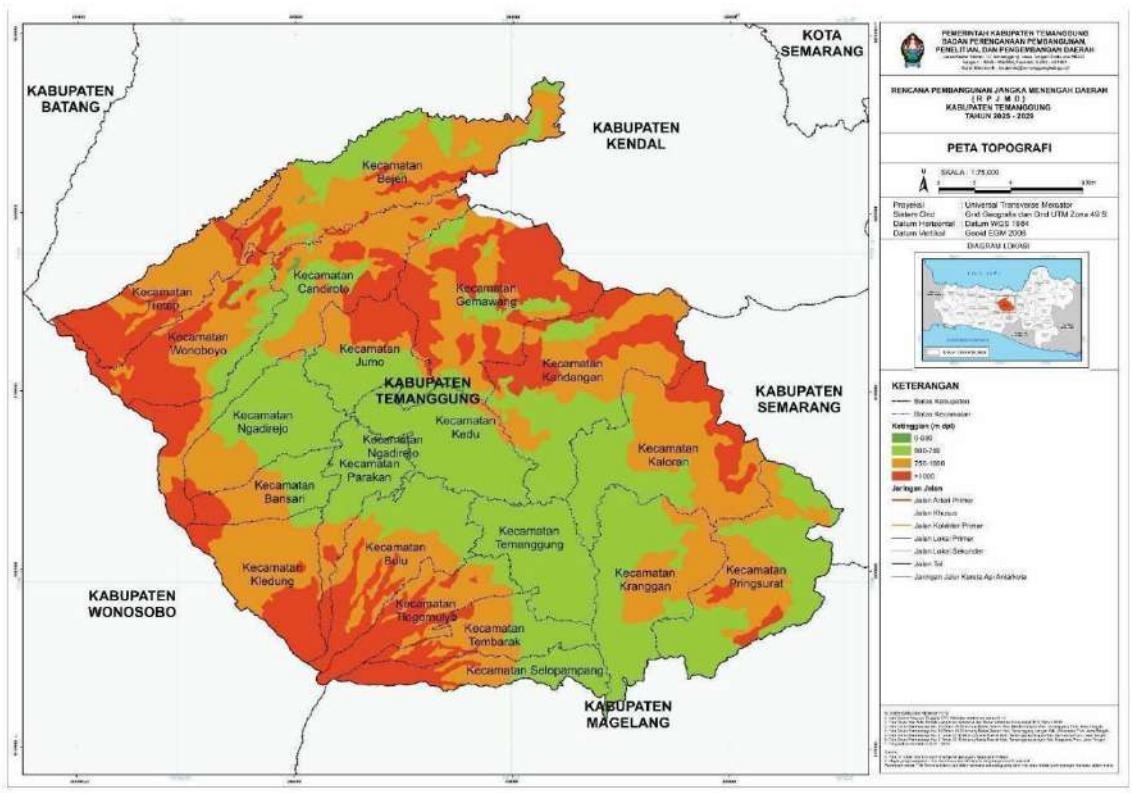
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
1	Bulu	4.528,08	19	0	84	302	0	0	84	302
2	Tembarak	2.456,95	13	0	67	224	0	0	67	224
3	Temanggung	3.223,04	6	19	20	87	119	541	139	628
4	Pringsurat	5.955,16	14	0	113	364	0	0	113	364
5	Kaloran	6.367,29	14	0	111	416	0	0	111	416
6	Kandangan	7.060,93	16	0	101	378	0	0	101	378
7	Kedu	3.714,43	14	0	108	424	0	0	108	424
8	Parakan	2.355,01	14	2	50	239	27	120	77	359
9	Ngadirejo	3.783,09	19	1	97	396	3	30	100	426
10	Jumo	3.095,19	13	0	60	273	0	0	60	273
11	Tretep	3.533,54	11	0	25	141	0	0	25	141
12	Candiroto	6.320,89	14	0	74	275	0	0	74	275
13	Kranggan	5.316,79	12	1	97	358	7	29	104	387
14	Tlogomulyo	2.644,79	12	0	47	156	0	0	47	156
15	Selopampang	2.240,04	12	0	46	128	0	0	46	128
16	Bansari	2.037,44	13	0	46	189	0	0	46	189
17	Kledung	3.704,70	13	0	38	160	0	0	38	160
18	Bejen	6.608,75	14	0	51	170	0	0	51	170
19	Wonoboyo	4.373,40	13	0	53	209	0	0	53	209
20	Gemawang	7.163,90	10	0	62	312	0	0	62	312
Jumlah		86.483.41	266	23	1.350	5.201	156	720	1.506	5.921

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Kecamatan paling luas di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Gemawang dengan luas 7.163,90 ha atau setara dengan 8,28% dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Bansari dengan luas 2.037 ha (2,35%). Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Temanggung dengan 6 desa dan 19 Kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang dengan jumlah 10 desa.

3. Topografi/Kemiringan Lahan

Kabupaten Temanggung termasuk ke dalam wilayah dataran tinggi dengan pola topografi secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, dibatasi oleh dua buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.151 m dpl) di bagian Selatan dan Barat. Bagian Utara Kabupaten Temanggung dibatasi oleh pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Kondisi topografi tersebut menciptakan wilayah Kabupaten Temanggung yang memiliki permukaan sangat beragam ditinjau dari ketinggian yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2. 2
Peta Ketinggian Kabupaten Temanggung

Perbedaan ketinggian yang sangat beragam menghasilkan variasi kelerengn di Kabupaten Temanggung yang diklasifikasikan menjadi lima

kelas yaitu 0-8% (Datar), 8-15% (Landai), 15-25% (Agak curam), 25-40% (Curam), dan >40% (Sangat curam). Kondisi kelerengan pada setiap kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.

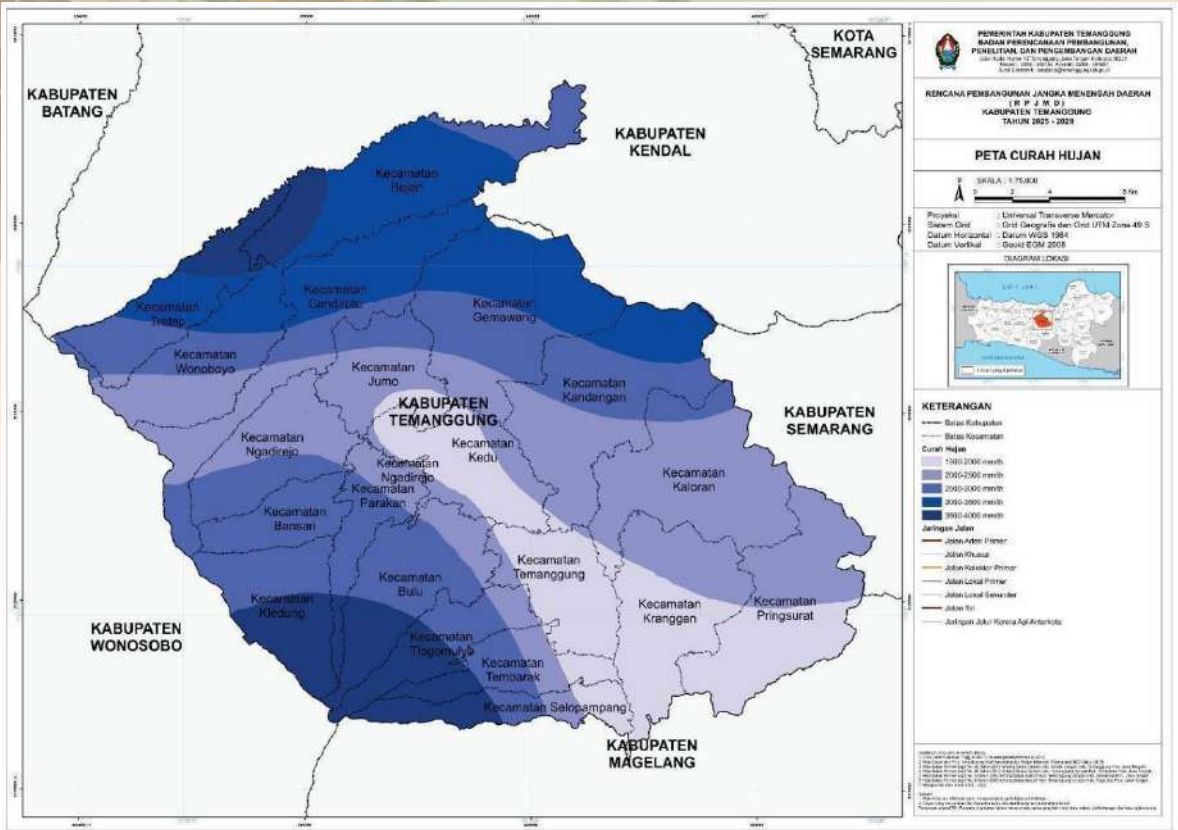
Tabel 2. 2
Kemiringan Lahan di Kabupaten Temanggung

No	KECAMATAN	KELERENGAN				TOTAL LUAS (Ha)
		> 40 %	0-2 %	15-40 %	2-15 %	
1	Bansari	304,09	-	823,16	910,19	2.037,44
2	Bejen	669,28	18,87	4.137,20	1.783,41	6.608,75
3	Bulu	1.046,67	-	1.741,85	1.732,25	4.520,77
4	Candiroto	1.923,96	32,06	2.824,75	1.539,29	6.320,06
5	Gemawang	3.622,14	-	2.632,92	908,84	7.163,90
6	Jumo	820,46	-	612,34	1.662,39	3.095,19
7	Kaloran	1.043,39	-	3.121,45	2.202,45	6.367,29
8	Kandangan	1.822,74	-	2.770,77	2.467,43	7.060,93
9	Kedu		-	144,02	3.573,04	3.717,05
10	Kledung	1.288,82	-	2.267,73	148,14	3.704,70
11	Kranggan		-	1.857,62	3.459,09	5.316,71
12	Ngadirejo	78,21	-	1.052,97	2.651,91	3.783,09
13	Parakan	235,62	-	371,14	1.745,62	2.352,38
14	Pringsurat	275,45	-	2.150,98	3.528,74	5.955,16
15	Selopampang	713,69	-	568,87	957,56	2.240,12
16	Temanggung		-		3.229,02	3.229,02
17	Tembarak	445,69	-	1.051,71	960	2.457,40
18	Tlogomulyo	1.212,78	-	1.169,41	263,49	2.645,67
19	Tretep	1.461,94	-	2.071,60	-	3.533,54
20	Wonobojo	1.949,86	-	1.699,07	725,29	4.374,22
Total Luas (Ha)		18.914,78	50,93	33.069,55	34.448,15	86.483,41

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

4. Klimatologi

Kabupaten Temanggung mempunyai sifat iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Wilayah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin, terutama di Kecamatan Tretep, Bulu (lereng Gunung Sumbing), Tembarak, Ngadirejo, Candiroto, dan Kledung. Kabupaten Temanggung memiliki suhu udara relatif sejuk yaitu antara 22,0 °C – 23,6 °C, karena berada pada kawasan yang relatif tinggi. Peta klimatologi disajikan pada gambar 2.3.



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2. 3
Peta Klimatologi Kabupaten Temanggung

Rata-rata curah hujan lebih dari 2.000 mm/tahun. Curah hujan tertinggi tercatat pada Stasiun Kledung (3.183 mm/tahun) dan terendah adalah Kraman (1.863 mm/tahun). Karakteristik penyebaran curah hujan rerata bulanan berdasarkan klasifikasi Oldeman bervariasi dari yang memiliki bulan basah terpanjang dan bulan kering terpendek (B2) seperti Kledung, Tretep, Candiroto dan Pringsurat sampai yang memiliki bulan basah terpendek dan bulan kering terpanjang (D3) seperti Badran dan Kraman. Sedangkan tipe agroklimate lain yang dijumpai adalah C2 pada stasiun Jumo, Parakan, Ngadirejo, Jumprit, Temanggung, dan Kraman serta C3 adalah Kandangan. Sifat hujan di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh pola musim, curah hujan tertinggi pada bulan Desember-Januari dan periode kering antara bulan Juni-September, dan sebarannya dipengaruhi oleh sifat lokal (orografis). Curah hujan per kecamatan di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3
Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung

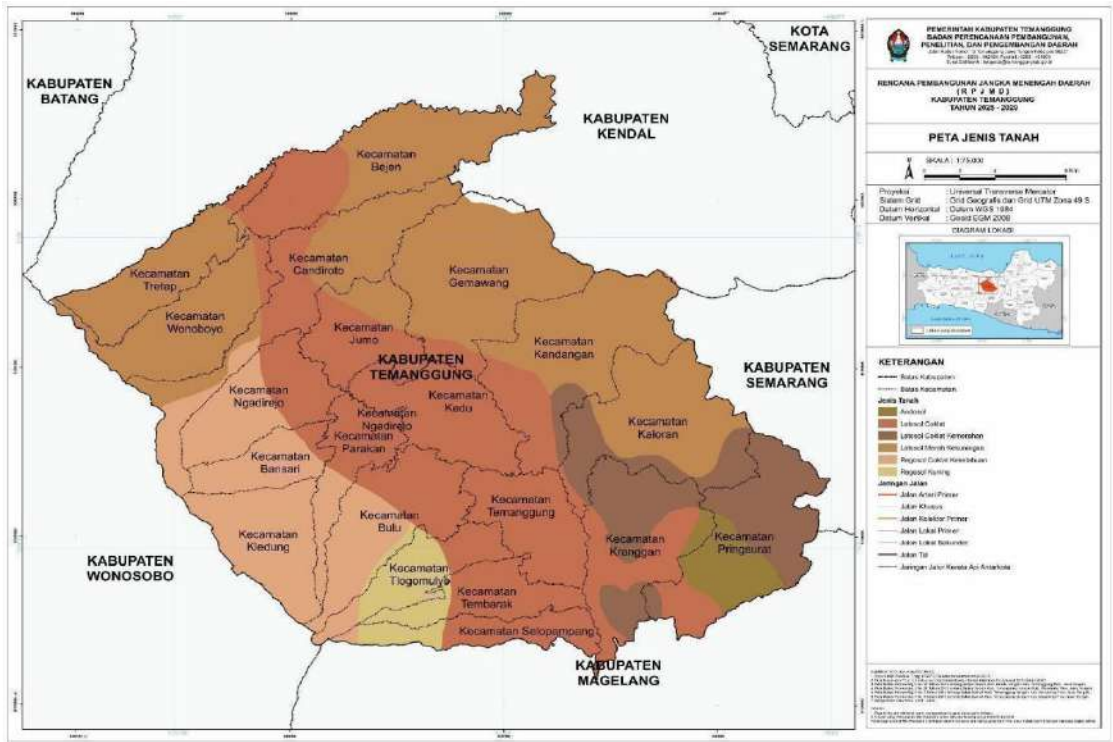
NO	KECAMATAN	SKOR HUJAN	CURAH HUJAN (mm/tahun)					TOTAL LUAS (Ha)
			1500-2000	2000-2500	2500-3000	3000-3500	3500-4000	
1	Bansari	70	-	0,36	2037,07	-	-	2037,44
2	Bejen	140	-	-	1209,45	4239,63	1159,68	6608,75
3	Bulu	140	16,27	896,87	2324,73	-	1282,9	4520,77
4	Candiroto	160	-	1647,41	1477,71	3194,95	-	6320,06
5	Gemawang	140	13,29	954,56	2348,52	3847,53	-	7163,9
6	Jumo	90	499,86	1789,71	805,62	-	-	3095,19
7	Kaloran	90	164,99	5597,74	604,56	-	-	6367,29
8	Kandangan	140	79,07	2862,1	2619,78	1499,99	-	7060,93
9	Kedu	50	2648,21	1068,84	-	-	-	3717,05

NO	KECAMATAN	SKOR HUJAN	CURAH HUJAN (mm/tahun)					TOTAL LUAS (Ha)
			1500-2000	2000-2500	2500-3000	3000-3500	3500-4000	
10	Kledung	90	-	-	1815,26	-	1889,44	3704,7
11	Kranggan	50	3327,48	1989,24	-	-	-	5316,71
12	Ngadirejo	70	-	2236,99	1546,09	-	-	3783,09
13	Parakan	140	26,67	811,85	1254,13	-	259,74	2352,38
14	Pringsurat	50	3182,16	2773	-	-	-	5955,16
15	Selopampang	140	591,93	300,29	401,08	-	946,82	2240,12
16	Temanggung	50	2912,6	316,42	-	-	-	3229,02
17	Tembarak	140	466,9	604,96	839,86	-	545,69	2457,4
18	Tlogomulyo	140	17,29	423,03	906,44	-	1298,91	2645,67
19	Tretop	170	-	93,72	1242,27	1220,95	976,61	3533,54
20	Wonobooyo	170	-	1787,51	1440,96	1114,46	31,3	4374,22
	TOTAL LUAS (Ha)	2230	13.946,72	26.154,59	22.873,52	15.117,50	8.391,08	86.483,41

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

5. Jenis Tanah

Pada wilayah Kabupaten Temanggung memiliki lahan seluas Lahan seluas 86.483 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi latosol merah kekuningan yakni seluas 31.979,81 Ha (36.98%), latosol coklat seluas 28.915,25 Ha (33,43%), regosol coklat keabuan seluas 12.119,95 Ha (14,01%), latosol coklat kemerahan seluas 8.559,87 Ha (9,90%), regosol kuning seluas 2.856,40 Ha (3,30%) dan andosol seluas 2.052,14 Ha (2,37%) dengan sebaran sebagaimana pada gambar berikut ini.



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2. 4
Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung

Jenis tanah Latosol Coklat membentang dari arah barat laut ke tenggara, Latosol Coklat Kemerahan membentang di bagian timur ke tenggara, sedangkan Latosol Merah Kekuningan membentang di bagian timur dan barat dan termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang agak peka terhadap erosi. Sementara itu, jenis tanah Regosol membentang sebagian

di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal. Jenis tanah Andosol ditemui pada sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat dan jenis tanah ini termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang peka terhadap erosi.

Wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran aluvial dan kaki gunung api. Dataran aluvial dan kaki gunung api sendiri memiliki kesuburan tanah yang tinggi karena kaya unsur hara yang berasal dari material erupsi gunung api yang mengandung berbagai mineral. Kemampuan tanah dari dataran ini mampu mengalirkan air dengan baik. Tekstur tanah berupa pasir memiliki ruang antar pori yang menjadi lokasi untuk cadangan air tanah sehingga ketersediaannya tetap terjaga. Tanah aluvium memiliki kemampuan yang baik untuk menyerap dan mengalirkan air. Jenis tanah Kabupaten Temanggung dibedakan menjadi 6 jenis tanah secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4
Jenis Tanah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Andosol	Latosol Coklat	Latosol Coklat Kemerahan	Latosol Merah Kekuningan	Regosol Coklat Kekelabuan	Regosol Kuning	TOTAL (Ha)
Bansari	-	289	-	-	1.748	-	2.037
Bejen	-	2.158	-	4.451	-	-	6.609
Bulu	-	2.153	-	-	2.180	187	4.521
Candiroto	-	1.611	-	3.580	1.129	-	6.320
Gemawang	-	495	-	6.669	-	-	7.164
Jumo	-	2.257	-	838	-	-	3.095
Kaloran	-	162	1.983	4.222	-	-	6.367
Kandangan	-	1.678	436	4.947	-	-	7.061
Kedu	-	3.717	-	-	-	-	3.717
Kledung	-	-	-	-	3.705	-	3.705
Kranggan	253	2.256	2.808	-	-	-	5.317
Ngadirejo	-	1.631	-	-	2.152	-	3.783
Parakan	-	1.560	-	-	792	-	2.352
Pringsurat	1.799	822	3.333	-	-	-	5.955
Selopampang	-	1.551	-	-	88	602	2.240
Temanggung	-	3.229	-	-	-	-	3.229
Tembarak	-	1.897	-	-	0	561	2.457
Tlogomulyo	-	813	-	-	326	1.507	2.646
Tretep	-	302	-	3.232	-	-	3.534
Wonobojo	-	335	-	4.040	-	-	4.374
TOTAL (Ha)	2.052	28.915	8.560	31.980	12.120	2.856	86.483

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

6. Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400- >1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 wilayah ketinggian sebagaimana disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2. 5
Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian

No	Wilayah Ketinggian (meter dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0– 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500– 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonobojo
3	750– 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonobojo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000–1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonobojo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250– 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonobojo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		86,483	100	

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2025

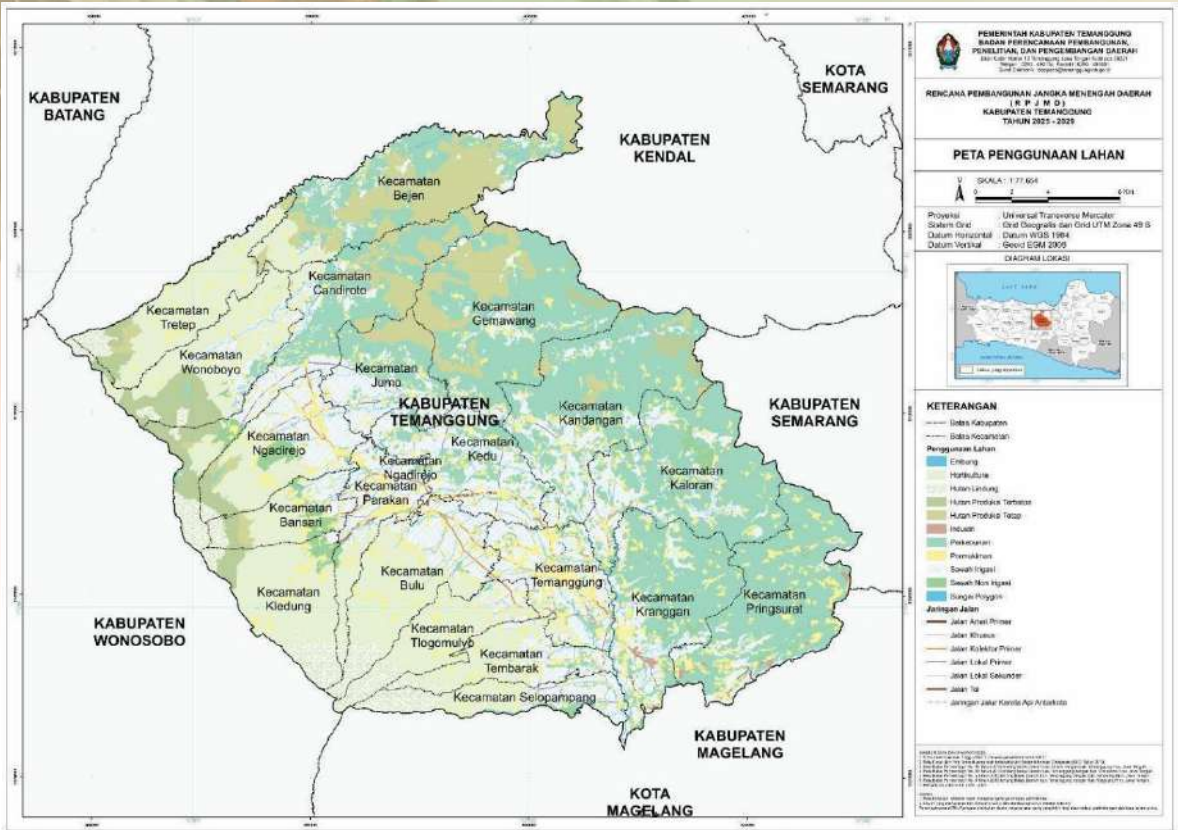
7. Penggunaan Lahan

Pola atau distribusi penggunaan lahan di suatu wilayah atau area tertentu menggambarkan bagaimana suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan. Klasifikasi tutupan lahan dan klasifikasi penggunaan lahan adalah upaya pengelompokan berbagai jenis tutupan lahan ke dalam suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu. Pola penggunaan lahan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagaimana berikut ini.

Tabel 2. 6
Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total (Ha)
1	Bansari	20.23		720.30	148.37	153.38	110.47	0.38	0.00	3.52	238.01	0.01	642.76	2,037.44
2	Bejen	87.28		138.02			3,081.89			2,554.29	244.18	10.07	493.02	6,608.75
3	Bulu	27.68		2,191.74	392.49					21.74	492.91		1,401.51	4,528.08
4	Candiroto	29.81		354.24	413.95	577.52	1,421.85		0.10	2,228.10	281.00	0.70	1,013.61	6,320.89
5	Gemawang	14.05				154.00	1,725.38		0.38	4,541.72	319.14	3.97	405.26	7,163.90
6	Jumo	16.16					417.36		0.62	1,135.88	269.59	1.75	1,253.84	3,095.19
7	Kaloran	42.32		16.91		8.12	5.02		0.30	4,265.48	602.36	11.35	1,415.43	6,367.29
8	Kandangan	22.25	0.50	4.66		381.69	285.17		0.37	4,395.83	584.30	0.41	1,385.77	7,060.93
9	Kedu	48.12							0.77	846.86	610.69	3.20	2,204.78	3,714.43
10	Kledung	4.98		2,410.31	660.00	215.25					207.55		206.61	3,704.70
11	Kranggan	42.98						76.55	4.91	3,327.47	650.22	0.54	1,214.12	5,316.79
12	Ngadirejo	10.17		1,227.42	70.45	236.14	142.26		0.83	66.95	482.95	0.20	1,545.71	3,783.09
13	Parakan	35.30		485.58	86.26			12.41	1.86	131.21	429.98	0.08	1,172.34	2,355.01
14	Pringsurat	12.73	0.18	1.08				89.45	1.13	4,566.60	731.55	0.32	552.13	5,955.16
15	Selopampang	21.52		691.44	461.95				1.00	83.42	190.96	2.42	787.33	2,240.04
16	Temanggung	43.71		34.03				4.13		270.09	1,045.48	3.29	1,822.31	3,223.04
17	Tembarak	7.39		1,115.89	103.47					144.79	284.14		801.26	2,456.95
18	Tlogomulyo	3.67		1,594.49	444.68				0.29	36.53	202.48	0.48	362.17	2,644.79
19	Tretep	4.04		2,484.57	225.44	274.09	191.62		0.06	162.72	185.01	3.14	2.86	3,533.54
20	Wonobojo	13.81		1,300.43	204.07	973.28	10.08		0.07	1,015.03	223.54	0.70	632.38	4,373.40
TOTAL (Ha)		508.21	0.68	14,771.11	3,211.13	2,973.46	7,391.10	182.92	12.68	29,798.24	8,276.05	42.63	19,315.20	86,483.41
TOTAL (%)		0.59	0.00078	17.08	3.71	3.44	8.55	0.21	0.01	34.46	9.57	0.049	22.33	100
Keterangan														
1	Badan Air						7	Industri						
2	Embung						8	Pergudangan						
3	Hortikultura						9	Perkebunan						
4	Hutan Lindung						10	Permukiman						
5	Hutan Produksi Terbatas						11	Peternakan						
6	Hutan Produksi Tetap						12	Sawah						

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2. 5
Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2.6, penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung menunjukkan dominasi pada sektor perkebunan, sawah dan hortikultura, yang masing-masing menyumbang sebesar 34,36%, 22,33% dan 17,08% dari total luas lahan yaitu 86.483,41 Ha. Sektor Perkebunan di Kabupaten Temanggung mencakup tanaman seperti kopi dan tembakau sedangkan lahan sawah mencakup pertanian padi yang menjadi sumber utama pangan bagi masyarakat. Selain itu, tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan tumbuh dengan baik berkat iklim yang mendukung serta ketersediaan tanah yang memiliki kemampuan menyerap air dengan baik. Secara keseluruhan, pola penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung mencerminkan potensi pertanian yang tinggi, didukung oleh kondisi tanah yang subur yang memungkinkan sektor-sektor ini berkembang dengan baik.

8. Daerah Aliran Sungai (DAS)

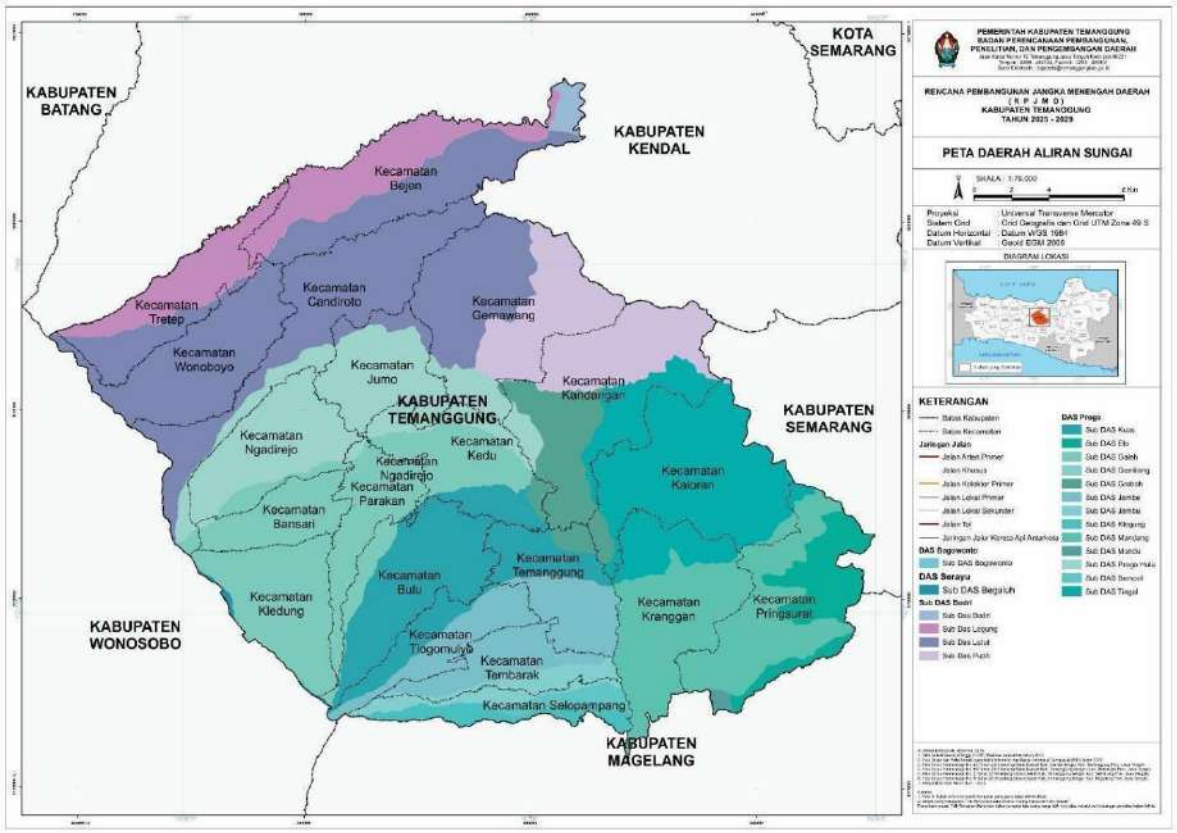
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu hamparan wilayah/Kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara yang mengalirkannya ke anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Pada wilayah Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 4 (empat) DAS yaitu DAS Progo, DAS Bodri, DAS Bogowonto, dan DAS Serayu

yang disajikan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2. 7
DAS dan Sub DAS di Kabupaten Temanggung

No	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)
1	DAS Serayu	Sub DAS Begaluh	202,660
2	DAS Bogowonto	Sub DAS Bogowonto	0,291
3	DAS Progo	Sub DAS Jambu	0,231
		Sub DAS Mundu	68,699
		Sub DAS Klegung	1.063,526
		Sub DAS Gemilang	1.452,229
		Sub DAS Jambe	4.981,127
		Sub DAS Mandang	7.460,122
		Sub DAS Kuas	6.960,700
		Sub DAS Galeh	11.118,928
		Sub DAS Progo Hulu	8.738,768
		Sub DAS Tingal	9.145,620
		Sub DAS Elo	2.231.618
		Sub DAS Sempol	505,020
		Sub DAS Groboh	2.970,655
4	DAS Bodri	Sub DAS Bodri	6.640,630
		Sub DAS Logung	5.509,060
		Sub DAS Lutut	11.392,100
		Sub DAS Putih	6.041,430
Total			86.483,400

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2025



Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, 2025

Gambar 2. 6
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung

9. Geologi

Jenis Geologi Kabupaten Temanggung terdiri dari 11 batuan diantaranya adalah 1) Batuan Gunung Api Gilipetung, 2) Batuan Gunung Api Jembangan, 3) Batuan Gunung Api Merbabu, 4) Batuan Gunung Api Sindoro, 5) Batuan Gunung Api Sindoro Lama, 6) Batuan Gunung Api Sumbing, 7) Endapan Kerucut Gunung Berapi, 8) Formasi Kali Getas, 9)

Formasi Kerek, 10) Formasi Pernyataan, 11) lava Gunung Sumbing. Jenis Geologi kabupaten Temanggung tiap Kecamatan disajikan secara rinci pada tabel dan gambar berikut ini.

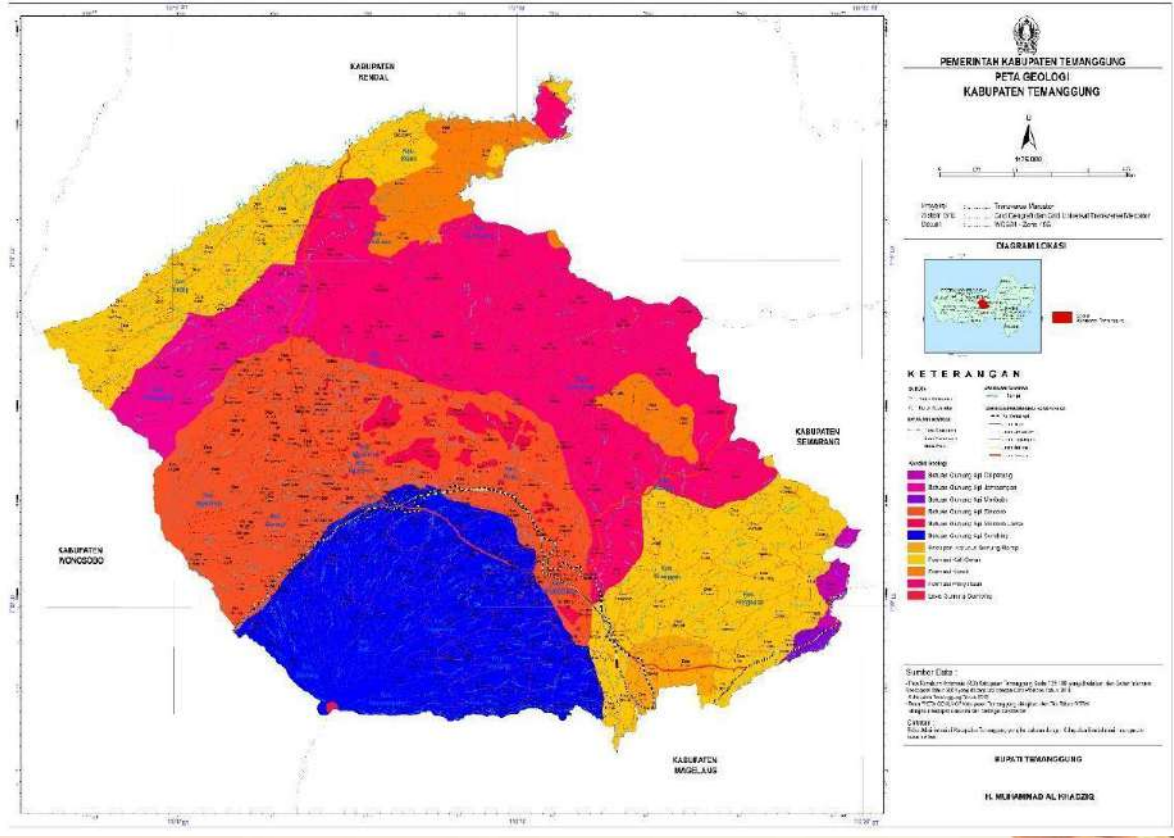
Tabel 2. 8
Jenis Geologi Kabupaten Temanggung Tiap Kecamatan

KECAMATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL LUAS (Ha)
Bansari				2.037								2.037
Bejen								3.087	2.168	1.354		6.609
Bulu				2		4.519						4.521
Candiroto		1.229		1.968				48	871	2.205		6.320
Gemawang				234	40				69	6.821		7.164
Jumo				1.612	52					1.432		3.095
Kaloran				124				1.381	915	3.948		6.367
Kandangan				1.235	276				334	5.216		7.061
Kedu				2.715	815	188						3.717
Kledung				1.817		1.888						3.705
Kranggan							799	3.824		694		5.317
Ngadirejo				3.783								3.783
Parakan				1.105	94	1.154						2.352
Pringsurat	471		271				569	4.644				5.955
Selopampang						2.034		206			0	2.240
Temanggung				1.467	85	1.339		210		128		3.229
Tembarak						2.382		75				2.457
Tlogomulyo						2.621					25	2.646
Tretep		12						3.522				3.534
Wonoboyo		3.116		196				1.063				4.374
TOTAL LUAS (Ha)	471	4.356	271	18.295	1.361	16.124	1.368	18.059	4.357	21.797	25	86.483

Keterangan

1	Batuan Gunung Api Gilipetung	7	Endapan Kerucut Gunung Berapi
2	Batuan Gunung Api Jembangan	8	Formasi Kali Getas
3	Batuan Gunung Api Merbabu	9	Formasi Kerek
4	Batuan Gunung Api Sindoro	10	Formasi Pernyataan
5	Batuan Gunung Api Sindoro Lama	11	Lava Gunung Sumbing
6	Batuan Gunung Api Sumbing		

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2. 7
Peta Geologi Kabupaten Temanggung

10. Karakteristik Wilayah

Kabupaten Temanggung merupakan kabupaten yang terletak di bagian Tengah Provinsi Jawa Tengah dengan keuntungan lokasi strategis yang berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Semarang (77 km), Yogyakarta (64 km) dan Purwokerto (134 km). Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari arah Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Gelangmanggung (Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung) yaitu *Quick-Wins* atau Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan terpadu dengan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan program peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Program unggulan strategis yaitu pengembangan ekonomi kreatif. Sedangkan program unggulan pada sektor peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian seperti kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, susu, telur dan perikanan budidaya.

Iklim di Kabupaten Temanggung cenderung sejuk dan lembab, dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu rata-rata berkisar 20-25°C, yang mendukung pertanian.

Potensi komoditas utama pada Kabupaten Temanggung berasal dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran. Selain tiga sektor tersebut, Kabupaten Temanggung juga memiliki sektor potensial yang juga berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian daerah yaitu sektor pariwisata. Salah satu komoditas utama di Kabupaten Temanggung yaitu sektor pengolahan meliputi industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri makanan dan minuman, dan industri pengolahan tembakau.

Produk hortikultura Tahun 2025 yang terdapat di Kabupaten Temanggung adalah cabai rawit dan cabai besar. Cabai rawit luas lahan panen 7186 hektar, total produksi 51.846,99 kuintal dengan produktivitas 7,22 ton/hektar dan untuk cabai kriting luas panen 3.620,2 ha dengan jumlah produksi 26.0654,4 ton dan produktivitas 7,2 ton/ha. Bawang putih luas panen 963 ha dengan jumlah produksi 6.846,93 ton produktivitas 7,11

ton/ha, sedangkan untuk bawang merah luas panen 2.511,5 ha, jumlah produksi 18.158,15 ton dan produktivitas 7,23 ton/ha

Produk perkebunan Kabupaten Temanggung yang unggul adalah tembakau dan kopi. Varietas tembakau asli Temanggung yaitu varietas Kemloko 1 sampai dengan varietas Kemloko 8 yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Produk unggulan tembakau Temanggung diantaranya Tembakau Srintil yang merupakan tembakau berkualitas terbaik di dunia ditanam dengan kearifan lokal yang dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan kualitas terbaik yang dihargai mahal dan memiliki kandungan nikotin tinggi. Jenis tembakau Srintil banyak dibudidayakan ditanam dengan ketinggian di atas 800 mdpl dan tidak bisa dihasilkan di daerah lain hanya bisa dihasilkan di desa Legoksari, Losari, Pagergunung, Pagersari, Tlilir, Wonosari, Bansari, Wonotirto, banaran, Gandu, Gedegan dan Kemloko. Selain tembakau Srintil, tembakau Kabupaten Temanggung menjadi salah satu supplier pabrik rokok terbesar di Indonesia. Total produksi tembakau pada Tahun 2025 sebesar dengan luas panen 13.280,85 ha, jumlah produksi 9.163,78 ton dan produktivitas 0,69 ton/ha.

Produk unggulan perkebunan yang lain adalah kopi robusta dan kopi arabika, yang mempunyai citra rasa yang berbeda dengan daerah lain. Temanggung menjadi produsen kopi terbesar di Jawa Tengah. Total produksi kopi Robusta Tahun 2025 luas panen 10.071 ha, jumlah produksi 7.251,10 ton dan produktivitas 0,744 ton/ha dan untuk Total produksi kopi Arabika pada Tahun 2025 luas panen 1.016 ha, jumlah produksi 609,34 ton dan produktivitas 0,6 ton/ha

Kabupaten Temanggung kaya akan budaya dengan berbagai tradisi seperti Merti Desa, Ruwat Rigen, Ritua Tebal, Suran Traji, Kupat Sewu dan Jamasan Srobong Gobang, sedangkan seni tari tradisional Kabupaten Temanggung sangat banyak ragamnya diantaranya Jaran Kepang (Kuda Lumping), Topeng Ireng, Cengklungan, Prajurit, Warok, Gatholoco, Wulung Sunu dan kesenian Thethek Bengkek. Kebudayaan dan kesenian tersebut telah mendapatkan Sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. Selain kebudayaan dan kesenian Kabupaten Temanggung juga kaya akan makanan khas diantaranya adalah Buntil, Entho Cothot, Sawut, Sego Jagung, Empis-empis, Sego Gono dan Tempong yang telah mendapatkan Sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tahun 2022, 2023 dan 2024. Sedangkan pada Tahun 2025

sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia RI bertambah 6 yaitu Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Jamasan Sebondong Gobang, Merti Desa Dusun Krecek Desa Getas Kecamatan Kaloran, Ritual Among Tebal, dan Ruwat Rigen.

Pada sektor pariwisata, Kabupaten Temanggung memiliki destinasi wisata berupa kawasan Jumprit yang menjadi lokasi pengambilan air suci pada hari raya Waisak dan situs Liyangan yang merupakan situs peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Selain itu, Temanggung juga menjadi daerah perlintasan bagi wisatawan dari arah Semarang dan Yogyakarta yang ingin mengunjungi Borobudur serta kawasan wisata Dieng yang terletak di Wonosobo. Tempat wisata Temanggung diantaranya wisata alam Posong, Pasar Papringan Ngadiprono, Embung Kledung, Embung Bansari, Jembatan Kaca Sigandung View, Kledung Park dan Pendakian Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang menjadi tujuan wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

11. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan berkelanjutan, yang berasal dari alam dan tidak akan habis jika dimanfaatkan secara bijak. Jenis-jenis EBT meliputi energi surya yang dihasilkan dari sinar matahari, energi angin yang berasal dari hembusan angin, serta energi air seperti pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Selain itu, terdapat pula energi biomassa yang diperoleh dari bahan organik seperti kayu, tanaman, dan limbah, serta energi panas bumi yang dihasilkan dari panas yang tersimpan di dalam perut bumi. Pemanfaatan EBT sangat penting dalam mendukung ketahanan energi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kabupaten Temanggung yaitu:

a. Energi Biomassa Sampah

Kabupaten Temanggung memiliki potensi besar dalam pengembangan energi biomassa berbasis sampah, mengingat setiap harinya menghasilkan timbunan sampah sebesar 130 ton. Jumlah ini merupakan sumber daya yang cukup besar jika dikelola dengan teknologi tepat guna, seperti biogas. Biogas dari sampah organik dihasilkan melalui proses fermentasi anaerobik yang menghasilkan gas metana dan karbondioksida, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar

pembangkit listrik. Selain menghasilkan energi, pengolahan ini juga membantu mengurangi volume sampah dan dampak lingkungan akibat penumpukan limbah, sehingga mendukung konsep pengelolaan sampah berkelanjutan.

b. Energi Biogas Ternak

Potensi energi biogas dari sektor peternakan di Kabupaten Temanggung juga sangat menjanjikan, seiring tingginya populasi ternak besar seperti sapi dan domba. Limbah kotoran ternak dapat diolah melalui proses anaerobik untuk menghasilkan biogas yang kaya akan metana, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak, penerangan, maupun pembangkit listrik skala kecil. Saat ini, telah terbangun 45 unit instalasi biogas yang memanfaatkan limbah ternak, mencerminkan langkah awal yang konkret dalam pemanfaatan energi bersih dari sektor peternakan. Pengembangan lebih lanjut berpotensi meningkatkan efisiensi energi rumah tangga, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta memberikan manfaat ekonomi bagi peternak.

3. Energi Surya

Energi surya merupakan potensi energi baru terbarukan terbesar di Kabupaten Temanggung karena wilayah ini secara geografis menerima paparan sinar matahari yang melimpah sepanjang hari. Dengan kondisi iklim yang mendukung, pemanfaatan energi surya sebagai sumber listrik alternatif sangat memungkinkan untuk diterapkan, baik pada skala rumah tangga, fasilitas publik, hingga sektor industri. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat menjadi solusi energi yang ramah lingkungan, bersih, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Optimalisasi potensi ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target energi terbarukan di daerah serta memperkuat ketahanan energi lokal.

2.1.1.2 Kondisi Demografi

1. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Sebaran penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, dan faktor kebudayaan dan teknologi. Hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 adalah 821,118 jiwa yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan, 266 (dua ratus enam puluh enam) desa, dan 23 (dua puluh

tiga) Kelurahan. Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan Tahun 2025 secara terinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 9
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	Kepadatan penduduk (jiwa/ha)
1	Bulu	4.528	45,28	50.449	1.114,16	11,14
2	Tembarak	2.457	24,57	32.575	1.325,80	13,26
3	Temanggung	3.223	32,23	85.244	2.644,87	26,45
4	Pringsurat	5.955	59,55	54.594	916,78	9,17
5	Kaloran	6.367	63,67	47.199	741,31	7,41
6	Kandangan	7.061	70,61	54.613	773,45	7,73
7	Kedu	3.714	37,14	61.402	1.653,26	16,53
8	Parakan	2.355	23,55	54.739	2.324,37	23,24
9	Ngadirejo	3.783	37,83	58.433	1.544,62	15,45
10	Jumo	3.095	30,95	30.749	993,51	9,94
11	Tretep	3.534	35,34	22.050	623,94	6,24
12	Candiroto	6.321	63,21	33.555	530,85	5,31
13	Kranggan	5.317	53,17	51.841	975,00	9,75
14	Tlogomulyo	2.645	26,45	23.995	907,18	9,07
15	Selopampang	2.240	22,4	21.310	951,34	9,51
16	Bansari	2.037	20,37	24.861	1.220,47	12,20
17	Kledung	3.705	37,05	29.026	783,43	7,83
18	Bejen	6.609	66,09	22.435	339,46	3,39
19	Wonobojo	4.373	43,73	27.452	627,76	6,28
20	Gemawang	7.164	71,64	34.596	482,91	4,83
Jumlah		86.483	86.483	821.118	1.073,72	10,74

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Pada Tahun 2025 kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Temanggung sebanyak 85,244 jiwa dimana jumlah tersebut mencakup 10,38% dari jumlah total keseluruhan penduduk Kabupaten Temanggung. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Selopampang dengan jumlah penduduk sebanyak 21.310 jiwa atau 2,60% dari total keseluruhan penduduk di Kabupaten Temanggung.

Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kecamatan Temanggung dengan kepadatan 2.644,87 jiwa/km², diikuti Kecamatan Parakan dengan kepadatan 2.324,37 jiwa/km², Kecamatan Kedu dengan kepadatan 1.653,26 jiwa/km² dan rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah 1.073,72 jiwa/km². Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 secara terinci disajikan pada tabel berikut ini.

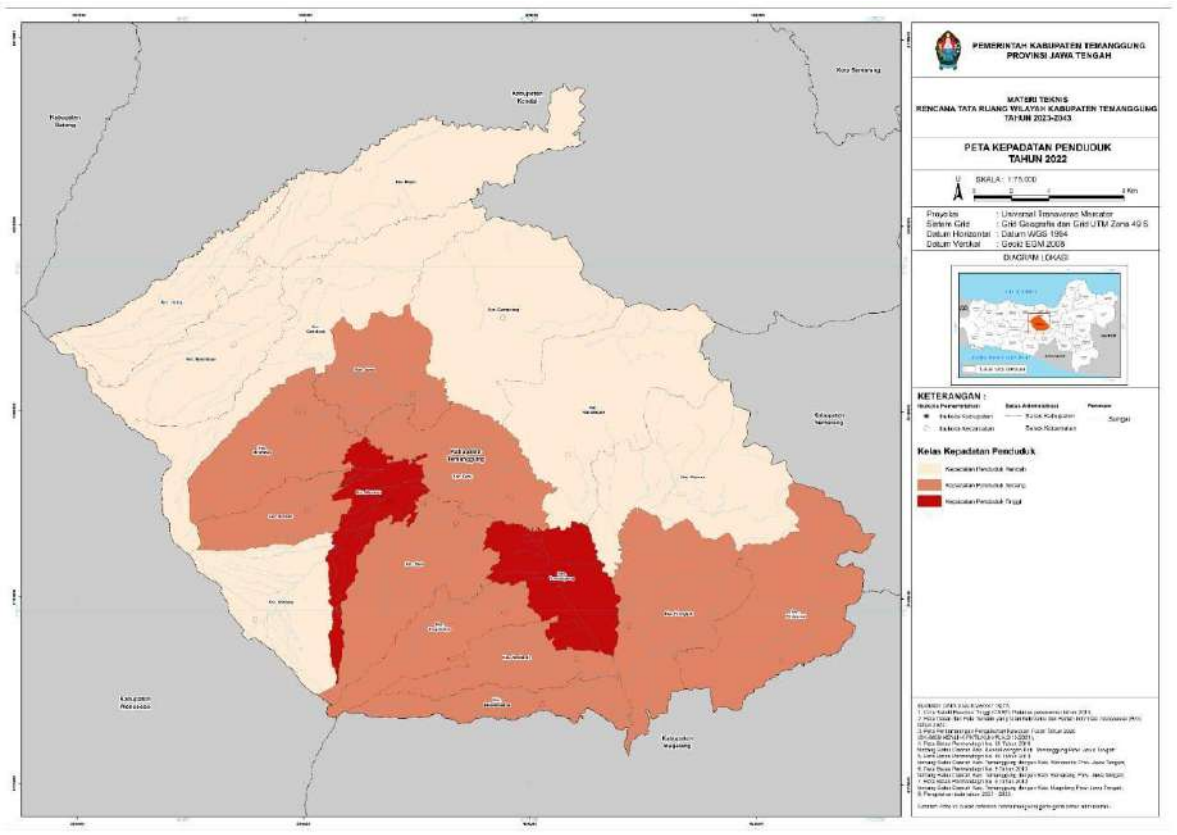
Tabel 2. 10
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021-2025

No.	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bulu	49.005	49.385	49.751	50.107	50.449
2.	Tembarak	31.443	31.737	32.023	32.303	32.575
3.	Temanggung	83.256	83.786	84.294	84.781	85.244
4.	Pringsurat	52.596	53.113	53.618	54.112	54.594
5.	Kaloran	45.413	45.874	46.325	46.767	47.199
6.	Kandangan	52.548	53.081	53.603	54.114	54.613

No.	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
7.	Kedu	59.499	59.997	60.479	60.949	61.402
8.	Parakan	53.519	53.846	54.158	54.456	54.739
9.	Ngadirejo	56.505	57.007	57.495	57.971	58.433
10.	Jumo	29.971	30.177	30.376	30.566	30.749
11.	Tretep	21.357	21.538	21.714	21.884	22.050
12.	Candiroto	32.665	32.900	33.127	33.345	33.555
13.	Kranggan	49.650	50.212	50.764	51.307	51.841
14.	Tlogomulyo	23.377	23.541	23.698	23.850	23.995
15.	Selopampang	20.421	20.649	20.873	21.093	21.310
16.	Bansari	24.111	24.307	24.498	24.682	24.861
17.	Kledung	27.878	28.174	28.463	28.747	29.026
18.	Bejen	21.569	21.792	22.010	22.225	22.435
19.	Wonobojo	26.567	26.798	27.022	27.240	27.452
20.	Gemawang	33.679	33.921	34.155	34.380	34.596
JUMLAH		795.029	801.835	808.446	814.879	821.118

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Jumlah di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 dengan jumlah penduduk 795.029 jiwa bertambah menjadi 821.118 jiwa pada Tahun 2025, naik sejumlah 26.089 jiwa. Gambaran penyebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung di 20 kecamatan disajikan pada gambar 2.8.



Sumber : RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 2. 8
Gambaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Jumlah penduduk terbesar pada akhir Tahun 2024 adalah di Kecamatan Temanggung. Hal tersebut dikarenakan pusat perekonomian Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Temanggung.

Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Jumlah

dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2024 secara rinci disajikan pada tabel 2.11.

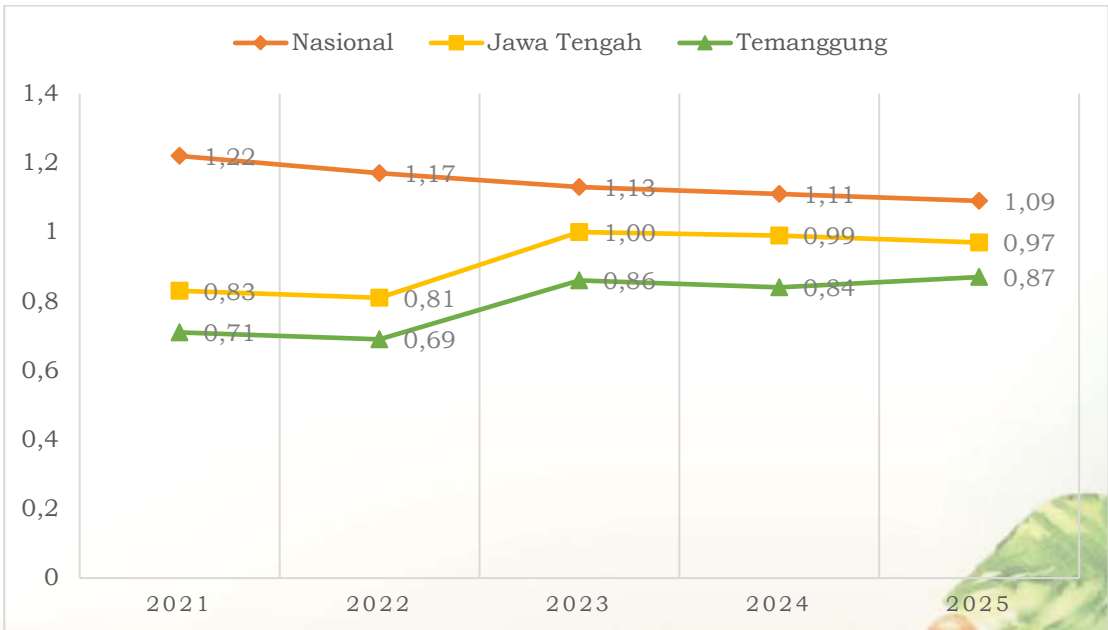
Tabel 2. 11
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2025

Kab/Kota	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk Tahun 2025 (jiwa)	Kepadatan Penduduk Tahun 2024 (Jiwa/Km²)
Kota Magelang	18,12	128.915	7.114,51
Kab. Magelang	1.102,93	1.351.076	1.224,99
Kab. Temanggung	864,83	821.118	949,46
Rata-rata			3.096,32

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Rata-rata kepadatan penduduk di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung adalah 3.096,32 jiwa/km². Daerah dengan jumlah penduduk paling padat adalah Kota Magelang dengan kepadatan mencapai 7.114,51 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kepadatan penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung, dengan kepadatan 949,46 jiwa/km².

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif disajikan dalam gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2025, SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Gambar 2. 9
Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif, dan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2025 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah adakan tetapi lebih tinggi dari Nasional.

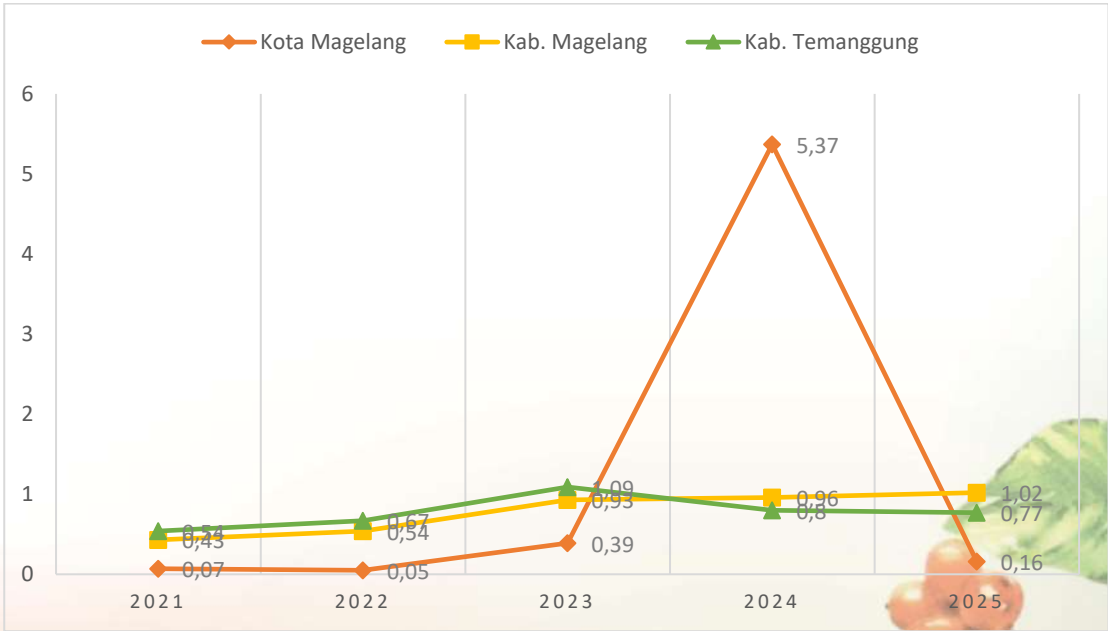
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024, secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 12
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025

Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kota. Magelang	121.610	121.675	122.150	128.709	128.915	0,07	0,05	0,39	5,37	0,16
Kab.Magelang	1.305.512	1.312.573	1.324.756	1.337.411	1.351.076	0,43	0,54	0,93	0,96	1,02
Kab. Temanggung	794.403	799.764	808.446	814.879	821.118	0,54	0,67	1,09	0,80	0,77
Rata-rata	740.508	744.671	751.784	760.333	767.036	0,35	0,42	0,80	2,37	0,65
Rata-rata 5 tahun						0,92				

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Data Diolah.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025 adalah 0,92%, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung di atas rata-rata jika dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung. Laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Gelangmanggung Tahun 2021-2025 sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.



Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Gambar 2. 10
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan Gelangmanggung Tahun 2021-2025

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 13
Jumlah Penduduk Tahun 2021-2025 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2025

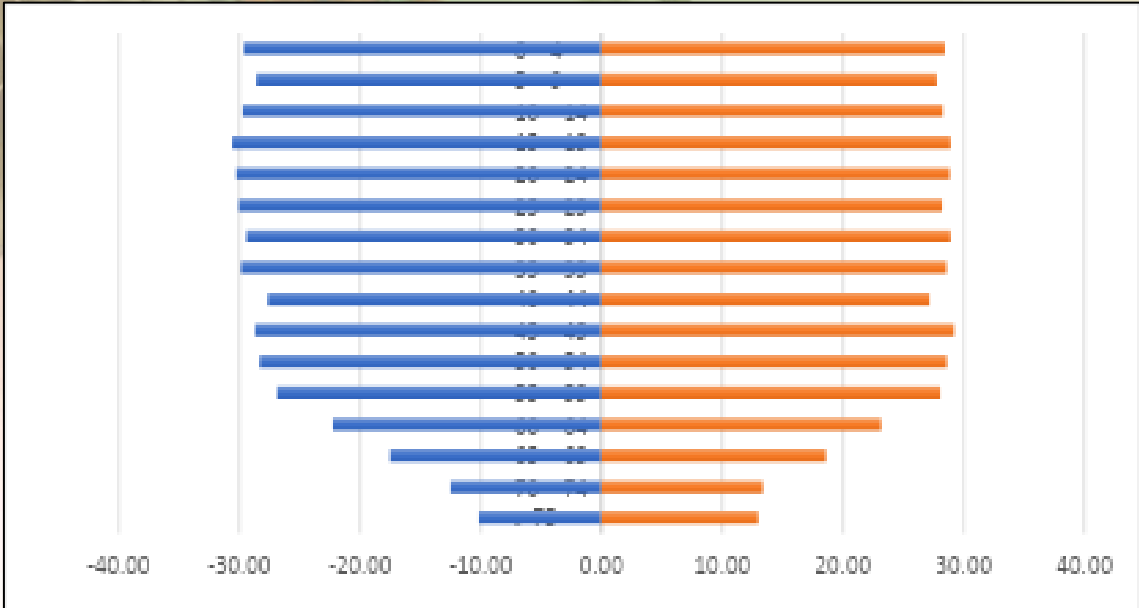
No.	Kecamatan	Tahun					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Bulu	49.005	49.385	49.751	50.107	50.449	0,81	0,78	0,74	0,72	0,68
2.	Tembarak	31.443	31.737	32.023	32.303	32.575	0,97	0,94	0,90	0,87	0,84
3.	Temanggung	83.256	83.786	84.294	84.781	85.244	0,67	0,64	0,61	0,58	0,55
4.	Pringsurat	52.596	53.113	53.618	54.112	54.594	1,02	0,98	0,95	0,92	0,89
5.	Kaloran	45.413	45.874	46.325	46.767	47.199	1,05	1,02	0,98	0,95	0,92
6.	Kandangan	52.548	53.081	53.603	54.114	54.613	1,05	1,01	0,98	0,95	0,92
7.	Kedu	59.499	59.997	60.479	60.949	61.402	0,87	0,84	0,80	0,78	0,74
8.	Parakan	53.519	53.846	54.158	54.456	54.739	0,64	0,61	0,58	0,55	0,52
9.	Ngadirejo	56.505	57.007	57.495	57.971	58.433	0,92	0,89	0,86	0,83	0,80
10.	Jumo	29.971	30.177	30.376	30.566	30.749	0,72	0,69	0,66	0,63	0,60
11.	Tretep	21.357	21.538	21.714	21.884	22.050	0,88	0,85	0,82	0,78	0,76
12.	Candiroto	32.665	32.900	33.127	33.345	33.555	0,75	0,72	0,69	0,66	0,63
13.	Kranggan	49.650	50.212	50.764	51.307	51.841	1,17	1,13	1,10	1,07	1,04
14.	Tlogomulyo	23.377	23.541	23.698	23.850	23.995	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61
15.	Selopampang	20.421	20.649	20.873	21.093	21.310	1,15	1,12	1,08	1,05	1,03
16.	Bansari	24.111	24.307	24.498	24.682	24.861	0,85	0,81	0,79	0,75	0,73
17.	Kledung	27.878	28.174	28.463	28.747	29.026	1,09	1,06	1,03	1,00	0,97
18.	Bejen	21.569	21.792	22.010	22.225	22.435	1,07	1,03	1,00	0,98	0,94
19.	Wonoboyo	26.567	26.798	27.022	27.240	27.452	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78
20.	Gemawang	33.679	33.921	34.155	34.380	34.596	0,75	0,72	0,69	0,66	0,63
JUMLAH		795.029	801.835	808.446	814.879	821.118	0,89	0,86	0,82	0,80	0,77

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025, Data Diolah.

Meskipun jumlah penduduk total Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 cenderung bertambah, namun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021-2025 di tiap kecamatan cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2025, laju pertumbuhan penduduk tinggi di Kecamatan Kranggan sebesar 1,04% atau bertambah 534 jiwa selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

2. Struktur Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam gambar 2.11.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2. 11
Grafik Piramida Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 secara rinci disajikan pada tabel 2.14.

Tabel 2. 14
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Jumlah (ribu jiwa)	%
1	0 – 4	58,10	7,08
2	5 – 9	56,32	6,86
3	10 – 14	58,05	7,07
4	15 – 19	59,50	7,25
5	20 – 24	59,06	7,19
6	25 – 29	58,30	7,10
7	30 – 34	58,28	7,10
8	35 – 39	58,46	7,12
9	40 – 44	54,77	6,67
10	45 – 49	57,92	7,05
11	50 – 54	56,92	6,93
12	55 – 59	54,90	6,69
13	60 – 64	45,41	5,53
14	65 – 69	36,13	4,40
15	70 – 74	25,86	3,15
16	> 75	23,14	2,82
Jumlah		821,12	100

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Kelompok umur paling terbanyak di Kabupaten Temanggung adalah penduduk usia 15-19 tahun dengan jumlah 59,50 ribu jiwa atau setara dengan 7,25% dari total penduduk Kabupaten Temanggung, berikutnya kelompok usia 20-24 tahun, dengan jumlah 59,06 ribu jiwa atau setara dengan 7,19%. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 15
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin
di Tiap Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	% Laki-laki	Perempuan	% Perempuan	Jumlah	%	
1	Bulu	25.711	50,96	24.738	49,04	50.449	6,14%	104%
2	Tembarak	16.574	50,88	16.001	49,12	32.575	3,97%	104%
3	Temanggung	42.225	49,53	43.018	50,47	85.243	10,38%	98%
4	Pringsurat	27.093	49,63	27.501	50,37	54.594	6,65%	99%
5	Kaloran	23.620	50,04	23.579	49,96	47.199	5,75%	100%
6	Kandangan	27.480	50,32	27.133	49,68	54.613	6,65%	101%
7	Kedu	31.021	50,52	30.382	49,48	61.403	7,48%	102%
8	Parakan	27.392	50,04	27.347	49,96	54.739	6,67%	100%
9	Ngadirejo	29.467	50,43	28.966	49,57	58.433	7,12%	102%
10	Jumo	15.456	50,27	15.293	49,73	30.749	3,74%	101%
11	Tretep	11.220	50,88	10.830	49,12	22.050	2,69%	104%
12	Candiroto	16.802	50,07	16.753	49,93	33.555	4,09%	100%
13	Kranggan	25.604	49,39	26.237	50,61	51.841	6,31%	98%
14	Tlogomulyo	12.203	50,86	11.792	49,14	23.995	2,92%	103%
15	Selopampang	10.370	48,66	10.940	51,34	21.310	2,60%	95%
16	Bansari	12.453	50,09	12.408	49,91	24.861	3,03%	100%
17	Kledung	14.711	50,68	14.315	49,32	29.026	3,53%	103%
18	Bejen	11.222	50,02	11.213	49,98	22.435	2,73%	100%
19	Wonoboyo	13.931	50,75	13.521	49,25	27.452	3,34%	103%
20	Gemawang	17.466	50,49	17.130	49,51	34.596	4,21%	102%
Jumlah		412.021	50,18	409.097	49,82	821.118	100%	101%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung sebanyak 821,118 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 412.021 jiwa (50,18%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 409.097 jiwa (49,82%) di mana jumlah tersebut mengalami kenaikan pada sebesar 1,08% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rasio 101%.

Kualitas sumber daya manusia dilihat dari keahlian, kemampuannya dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan diharapkan semakin tinggi kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan per kecamatan masih menggunakan data Tahun 202 dikarenakan data Tahun 2025 tidak dihitung oleh BPS. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 16
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Tahun 2025

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan										Jumlah
		Strata III	Strata II	DIV/ Strata I	DIII	DI/ DII	SLTA	SLTP	SD	Tidak/ belum tamat SD	Tidak/ Belum sekolah	
1	Bulu	2	58	1.115	409	140	5.006	6.090	9.710	14.667	12.704	49.901
2	Tembarak	6	26	716	171	116	3.446	4.876	6.707	5.295	10.523	31.882
3	Temanggung	11	462	6.320	2.013	637	17.984	10.875	15.177	11.177	19.363	84.019
4	Pringsurat	3	48	1.141	317	169	7.461	10.651	12.045	4.177	17.179	53.191
5	Kaloran	1	24	881	248	197	4.694	7.063	10.127	5.248	18.050	46.533
6	Kandangan	5	38	1.006	313	223	5.132	6.993	10.067	6.701	23.040	53.518
7	Kedu	2	81	1.758	569	290	7.128	7.579	12.173	13.751	16.863	60.194
8	Parakan	11	122	2.190	792	292	8.821	7.119	9.040	9.252	16.525	54.164
9	Ngadirejo	1	33	1.436	515	256	6.939	10.486	15.848	9.926	12.688	58.128
10	Jumo	2	19	694	236	161	2.991	4.361	6.880	5.462	9.929	30.735
11	Tretep	1	6	140	48	43	770	2.856	5.937	4.656	7.281	21.738
12	Candirot	2	17	827	331	200	3.433	4.427	8.215	9.291	6.937	33.680
13	Kranggan	3	62	1.392	401	212	7.513	9.224	8.592	7.473	15.290	50.162
14	Tlogomulyo	3	10	333	125	46	2.079	3.689	5.817	4.683	6.685	23.470
15	Selopampang	2	10	470	134	73	2.560	3.257	5.576	3.460	5.221	20.763
16	Bansari	0	14	442	141	62	2.234	3.891	5.198	9.062	3.720	24.764
17	Kledung	1	10	246	95	37	1.899	3.826	6.903	4.225	11.160	28.402
18	Bejen	1	14	330	133	86	2.271	3.793	6.121	2.527	6.486	21.762
19	Wonobojo	2	10	350	105	81	1.898	4.542	8.278	3.671	8.211	27.148
20	Gemawang	1	15	381	131	89	2.162	4.151	7.783	7.237	12.344	34.294
Jumlah		60	1.079	22.168	7.227	3.410	96.421	119.749	176.194	141.941	240.197	808.446
Persentase (%)		0,007	0,133	2,742	0,894	0,422	11,927	14,812	21,794	17,557	29,711	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung 2025, Data diolah

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Temanggung didominasi kategori tidak/belum sekolah sebesar 29,711%, disusul dengan jenjang tamat SD sebesar 21,794%. Untuk tamatan jenjang perguruan tinggi masih relatif kecil yaitu 2,742%. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan adalah karena mahalnnya biaya pendidikan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami perubahan fluktuatif seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari Tahun 2021-2025, perkembangan ekonomi sudah semakin membaik pasca pandemi Covid-19, dimana capaian Tahun 2025 mengalami pertumbuhan positif 5,66%, meningkat dari capaian Tahun 2024.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

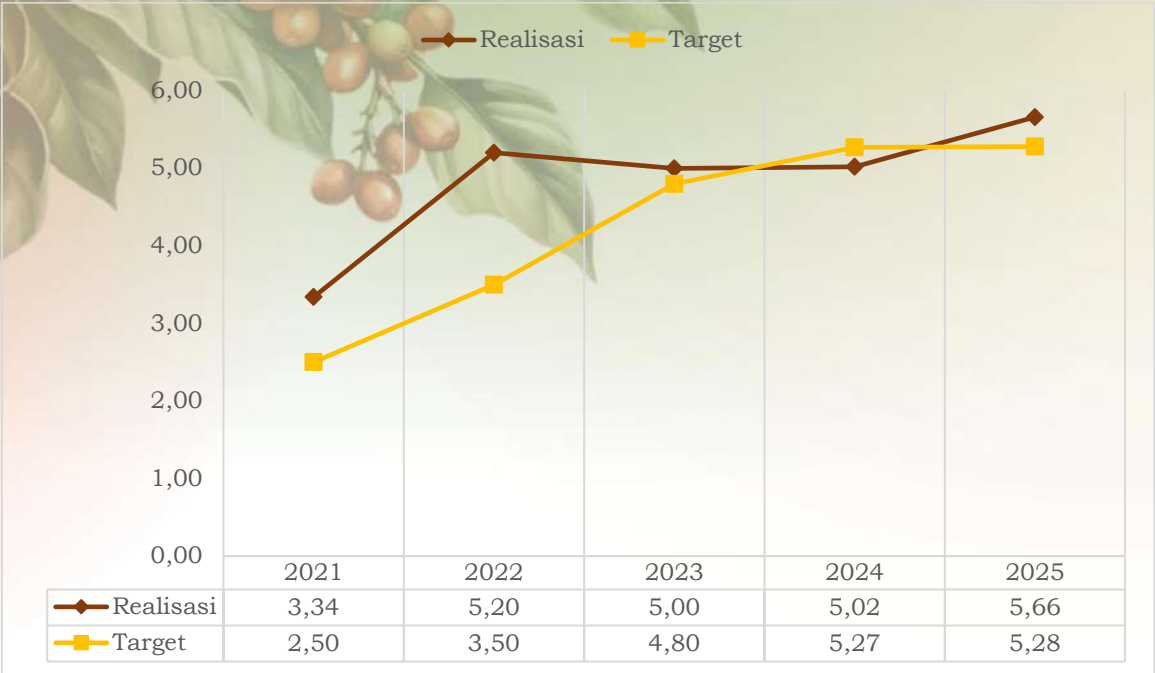
Tabel 2. 17
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target Daerah dan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2021-2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung				
	Target	Realisasi	Perubahan	Kinerja Pencapaian Target RKPD	Skala Nilai
2021	2,50	3,34	5,47	100%	Sangat Tinggi
2022	3,50	5,20	1,86	100%	Sangat Tinggi
2023	4,80	5,00	-0,20	100%	Sangat Tinggi
2024	5,27	5,02	0,02	95,26%	Sangat Tinggi
2025	5,28	5,66	0,64	100%	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2026, Data Diolah.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 mulai terlihat pada Tahun 2021 dengan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan arah positif (>0) mencapai 5,47 menjadi 3,34%. Perubahan pertumbuhan ekonomi juga berlanjut pada Tahun 2022 dengan perubahan positif mencapai 1,86 menjadi 5,20% meskipun pada Tahun 2023 perubahan pertumbuhan ekonomi mengarah ke negatif (>0) sebesar -0,20 menjadi 5,00%. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung semakin membaik menjadi 5,02% dengan perubahan pertumbuhan ekonomi mengarah ke positif yaitu 0,02 dan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 mencapai 5,66% dengan perubahan sebesar 0,64, lebih baik bila dibandingkan dengan Tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi daerah pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target RKPD sudah tercapai 100%, lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 yang jika dibandingkan dengan target hanya sebesar 95,26%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir jika dibandingkan dengan target secara rinci disajikan dalam gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2026

Gambar 2. 12
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD
Tahun 2021-2025

Pada Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung naik menjadi 5,66% yang artinya pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dari tahun sebelumnya. Peningkatan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung bisa dianalisis dari data laju pertumbuhan PDRB ADHK yang mengalami kenaikan signifikan seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dimana pada Tahun 2025 mencapai sebesar 9,82%, jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar 0,49% dan Tahun 2023 sebesar 1,28%. Sektor lain yang mengalami kenaikan signifikan yaitu sektor jasa lainnya dimana pada Tahun 2025 mencapai 9,28%, lebih baik bila dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 6,76% dan Tahun 2023 sebesar 8,83%.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 17.852,53 miliar rupiah pada Tahun 2024 menjadi 18.863,34 miliar pada Tahun 2025. Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2021-2025 secara rinci disajikan pada tabel 2.18.

Tabel 2. 18
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Miliar Rupiah)
Tahun 2021-2025

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.358,51	3.456,66	3.500,84	3.518,13	3.863,49
B	Pertambangan dan Penggalian	126,77	121,77	125,57	131,31	133,31
C	Industri Pengolahan	4.025,97	4.069,85	4.245,85	4.400,86	4.552,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,78	15,56	16,47	17,83	18,46

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,73	13,76	14,36	14,50	14,57
F	Konstruksi	806,12	836,12	901,12	1.025,18	1.094,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.559,94	3.712,94	3.928,94	4.160,95	4.339,37
H	Transportasi dan Pergudangan	548,56	907,26	978,95	1.035,97	1.085,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	264,11	303,84	341,79	376,51	414,27
J	Informasi dan Komunikasi	401,67	410,67	456,86	502,14	547,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	491,70	494,23	508,6	532,07	556,13
L	Real Estate	137,94	145,94	158,14	170,32	177,74
M,N	Jasa Perusahaan	56,33	59,51	64,76	72,06	77,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	395,00	401,33	421,83	455,64	463,37
P	Jasa Pendidikan	671,96	682,91	730,41	792,47	830,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193,28	198,27	214,78	232,09	241,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	321,56	356,76	388,26	414,49	452,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.387,93	16.187,37	16.997,53	17.852,53	18.863,34

Sumber: Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2026

Besarnya peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap kategori. Selama 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Temanggung Tahun 2025 didominasi oleh 4 (empat) kategori yaitu (1) Industri Pengolahan sebesar 25,34%, (2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,78%, (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,01%, dan (4) Konstruksi sebesar 6,03% (BPS, 2025).

Peningkatan PDRB Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan produksi di sejumlah lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan positif. Adapun 4 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,82%, dan (2) Jasa Lainnya sebesar 9,28%.

Pertumbuhan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 19
Pertumbuhan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
berdasarkan Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2021-2025

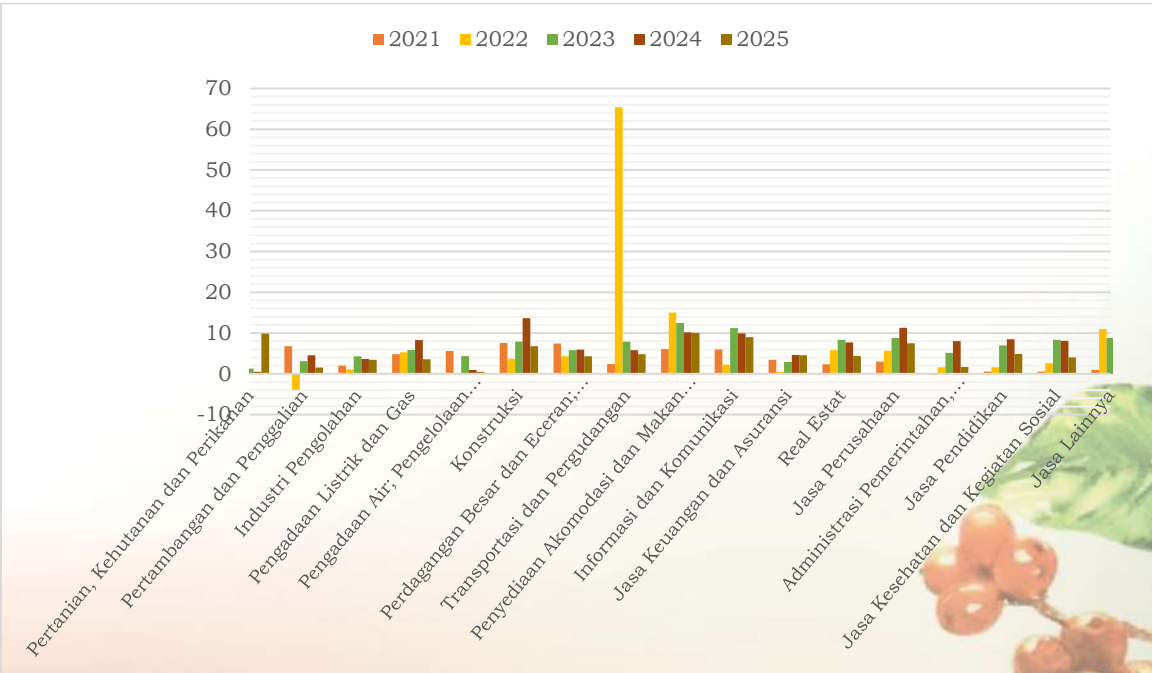
Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	2,92	1,28	0,49	9,82
B	Pertambangan dan Penggalian	6,75	-3,94	3,12	4,56	1,53
C	Industri Pengolahan	2,00	1,09	4,32	3,65	3,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,84	5,26	5,86	8,26	3,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,62	0,22	4,36	0,96	0,52
F	Konstruksi	7,54	3,72	7,89	13,64	6,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,40	4,30	5,82	5,91	4,29
H	Transportasi dan Pergudangan	2,37	65,39	7,90	5,82	4,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,03	15,04	12,49	10,16	10,03
J	Informasi dan Komunikasi	5,98	2,24	11,25	9,91	9,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	0,51	2,91	4,62	4,52
L	Real Estate	2,32	5,8	8,36	7,70	4,35
M,N	Jasa Perusahaan	3,01	5,65	8,82	11,29	7,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,26	1,60	5,11	8,01	1,70
P	Jasa Pendidikan	0,54	1,63	6,96	8,50	4,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	2,59	8,32	8,06	4,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,98	10,95	8,83	6,76	9,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3,34	5,2	5,01	5,02	5,66

Sumber: Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2026

Dari tabel diatas dapat disimpulkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha, setidaknya ada 2 (dua) sektor yang mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu:

- 1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan
- 2. Sektor jasa lainnya.

Pertumbuhan lapangan Usaha Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut 2.13.

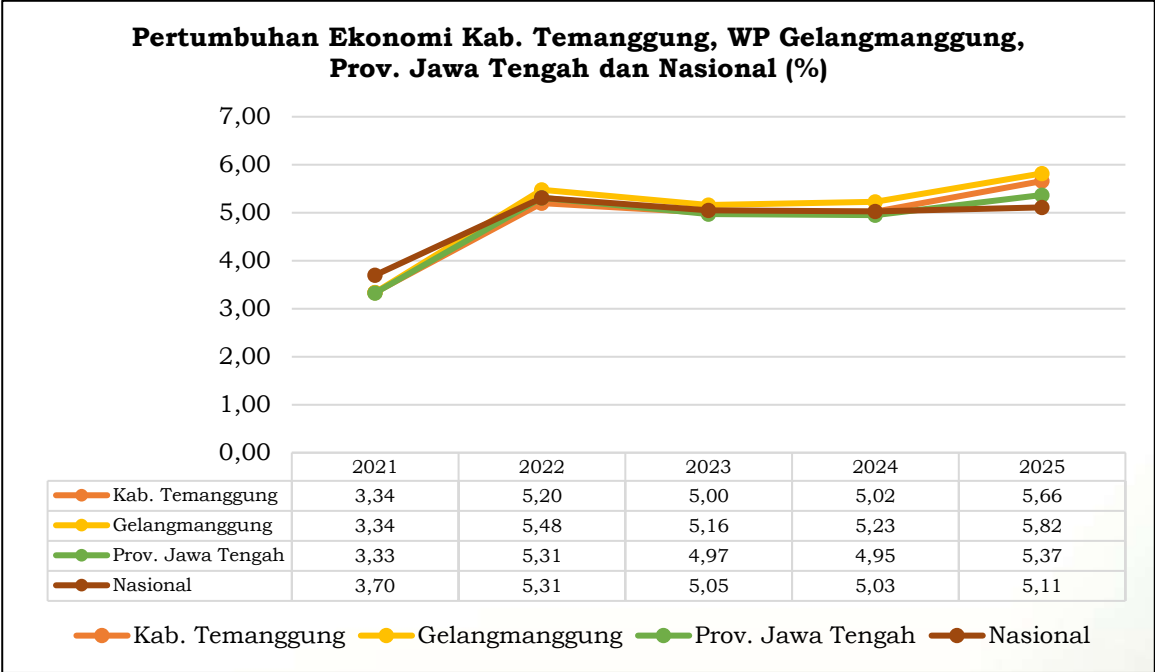


Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2. 13
Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2021-2025
Kabupaten Temanggung

Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan daya ungkit sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis produk pertanian lokal. Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai target Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melakukan langkah-langkah strategis seperti dengan perbaikan infrastruktur dasar masyarakat yaitu perbaikan jalan di beberapa titik pusat kegiatan ekonomi untuk memperlancar distribusi barang dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan sehingga roda perekonomian dapat terpacu dan biaya pengangkutan lebih efisien. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan penguatan peranan UMKM, peningkatan lapangan kerja dan investasi, serta peningkatan daya saing ekonomi.

Selain Kabupaten Temanggung, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh wilayah setara. Berikut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan nasional disajikan pada gambar 2.14.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Gambar 2. 14
Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian pada wilayah yang setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada periode Tahun 2021-2025 sangat signifikan. Pada Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung yang sebesar 5,66% masih lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung yaitu 5,82% namun lebih baik jika dibandingkan dengan

capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,37% dan capaian Nasional yaitu 5,11%.

Adapun perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama 5 (lima) tahun terakhir secara rinci disajikan pada tabel 2.20.

Tabel 2. 20
Perbandingan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	2021		2022		2023		2024		2025	
	Capaian	Perubahan	Capaian	Perubahan	Capaian	Perubahan	Capaian	Perubahan	Capaian	Perubahan
Kota Magelang	3,20	5,65	5,77	2,57	5,45	-0,32	5,60	0,15	5,92	0,32
Kabupaten Magelang	3,48	5,16	5,46	1,98	5,03	-0,43	5,08	-0,05	5,89	0,81
Kabupaten Temanggung	3,34	5,47	5,20	1,86	5,00	-0,20	5,02	0,02	5,66	0,64
RATA-RATA GELANG-MANGGUNG	3.34	5,43	5.48	2,14	5.16	-0,32	5.23	0,04	5.82	0,59
JAWA TENGAH	3,33	6,67	5,31	2,15	4,97	-0,32	4,95	0,07	5,37	0,59
NASIONAL	3,70	5,77	5,31	1,61	5,05	-0,26	5,03	-0,02	5,11	0,08

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada periode Tahun 2021-2025 sangat signifikan. Pada Tahun 2021 perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mencapai 5,47 yang mana lebih tinggi bila dibandingkan dengan perubahan pertumbuhan ekonomi Wilayah Pengembangan Gelangmanggung yang mencapai 5,43, sedangkan rata-rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung sama dengan Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 3,34%.

Sedangkan pada kondisi terkini, perkembangan perekonomian semakin membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung maupun Wilayah Pengembangan Gelangmanggung. Pada Tahun 2025 perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung lebih bagus dibandingkan Tahun 2024 dengan perubahan 0,64 dan lebih baik bila dibandingkan dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung yaitu 0,59, Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,59 dan Nasional yang mencapai 0,08.

Selain perbandingan dengan wilayah setara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung juga dibandingkan dengan target RKP nasional Tahun 2025. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.21.

Tabel 2. 21
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKP
Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan Nasional Tahun 2026	Realisasi Capaian Tahun 2025	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Pertumbuhan Ekonomi	5,3*	5,66	100%

Sumber : *Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026*
Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)
**angka sementara (masih menggunakan tahun 2025)*

Berdasarkan Perpres 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, target RKP Kewilayahan Tahun 2025 yakni 5,3. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Tahun 2025, perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target RKP Kewilayahan sudah mencapai 100%.

Berdasarkan pembagian wilayah di Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong Kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor, maka dilakukan percepatan Pembangunan di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung. Prioritas pengembangan pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung untuk Tahun 2025 diarahkan untuk capaian sasaran pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, dan IPM. Pengembangannya antara lain untuk melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia yang dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi-Merbabu-Telomoyo dan Gunung Sindoro-Sumbing. Kabupaten Temanggung menjadi Kawasan pendukung pengembangan wilayah koridor Borobudur-Dieng.

2.1.2.2 Struktur Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi kategori lapangan usaha PDRB secara keseluruhan. Distribusi kategori lapangan usaha ini juga menunjukkan komposisi atau susunan kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian. Kategori yang dominan atau diandalkan mempunyai nilai persentase yang paling besar dalam struktur tersebut, dan dapat menjadikan ciri khas perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Distribusi ekonomi untuk menggambarkan struktur perekonomian dihitung dari nilai PDRB menurut harga berlaku. Secara lengkap distribusi PDRB yang menggambarkan struktur perekonomian di Kabupaten

Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 22
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2021-2025

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,91	23,41	22,90	22,33	23,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,93	0,84	0,82	0,80	0,76
C	Industri Pengolahan	27,11	26,19	25,93	25,68	25,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	5,37	5,45	5,64	6,03	6,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,9	20,79	20,95	21,05	20,78
H	Transportasi dan Pergudangan	3,18	5,08	5,49	5,49	5,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,58	1,73	1,77	1,85	1,91
J	Informasi dan Komunikasi	1,72	1,61	1,65	1,70	1,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,40	3,40	3,29	3,22	3,20
L	Real Estate	0,76	0,75	0,75	0,76	0,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,76	0,38	0,39	0,42	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,54	2,42	2,40	2,48	2,39
P	Jasa Pendidikan	4,94	4,62	4,59	4,70	4,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,21	1,23	1,28	1,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,87	1,98	2,04	2,06	2,20
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber:BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 yang paling dominan adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 25,34% diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,01% dilanjutkan dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,78%.

2.1.2.3 PDRB Per Kapita

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB per kapita menggambarkan rata-rata besarnya *output* barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB per kapita suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. PDRB per kapita sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Temanggung dengan target RKPD secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 23
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK dan PDRB Per Kapita ADHB Daerah dengan Target RKPD Tahun 2021-2025

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target*	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Target*	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2021	22.000.000	28.484.021	4,24	19.220.000	19.370.430	0,78
2022	23.000.000	30.938.180	8,62	19.710.000	20.190.000	2,44
2023	29.570.000	33.290.000	7,60	20.010.000	21.030.000	5,10
2024	31.992.800	35.490.000	6,61	20.327.040	21.910.000	7,79
2025	33.682.020	38.002.300	7,08	21.400.308	22.972.760	2,99

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (Data Diolah)
*Target Bappeda Kab. Temanggung

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Berdasarkan tabel 2.23 diatas diketahui bahwa PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Temanggung selama periode 2021-2025 selalu lebih baik daripada target daerah dimana setelah capaian pada Tahun 2021 pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung berada pada kisaran 6-8% per tahunnya dengan capaian tertinggi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 8,62% dan PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Temanggung mencapai perolehan tertinggi pada Tahun 2024 yaitu sebesar 7,79%.

Pada Tahun 2025 capaian pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Temanggung berturut-turut sebesar 7,08% dan 2,99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Temanggung jika dibandingkan rata-rata capaian wilayah yang setara sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 24
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

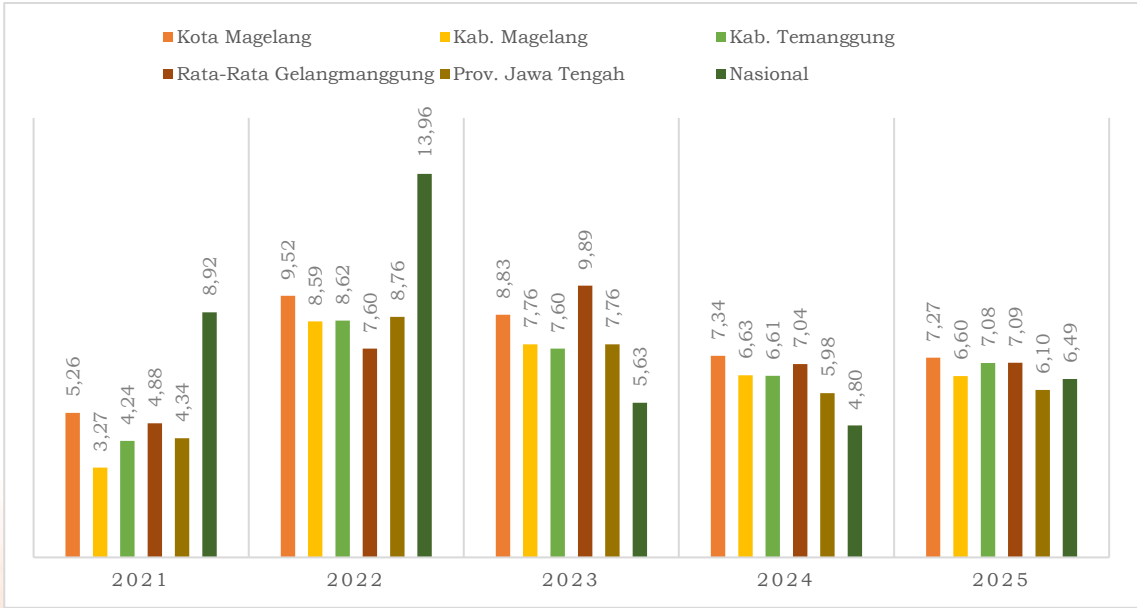
Kabupaten /Kota	2021		2022		2023		2024		2025	
	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
Kota Magelang	75.476.930,00	5,26	82.660.000,00	9,52	89.960.000,00	8,83	96.560.000,00	7,34	103.577.000,00	7,27
Kabupaten Magelang	26.124.724,57	3,27	28.370.000,00	8,59	30.571.677,86	7,76	32.600.000,00	6,63	34.751.000,00	6,60
Kabupaten Temanggung	28.484.021,00	4,24	30.938.180,00	8,62	33.290.000,00	7,60	35.490.000,00	6,61	38.002.300,00	7,08
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	43.361.891,86	4,88	46.659.071,52	7,60	51.273.892,62	9,89	54.883.333,33	7,04	58.776.767,00	7,09
Jawa Tengah	38.568.000,00	4,34	41.946.000,00	8,76	45.199.000,00	7,76	47.900.000,00	5,98	50.820.000,00	6,10
Nasional	62.300.000,00	8,92	71.000.000,00	13,96	75.000.000,00	5,63	78.600.000,00	4,80	83.700.000,00	6,49

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB pada wilayah Gelangmanggung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan antara 7-9% sedangkan pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung juga mengalami peningkatan antara 6-8%, masih di bawah rata-rata capaian pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Wilayah Pengembangan Gelangmanggung kecuali pada Tahun 2022 dimana pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan rata-rata capaian pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Wilayah Pengembangan Gelangmanggung.

Pada kondisi Tahun 2025, pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung sedikit dibawah rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung sebesar 7,08%, akan tetapi jika dibandingkan dengan Kabupaten Magelang masih lebih tinggi capaiannya walaupun lebih rendah dibandingkan dengan kota Magelang. Hal ini disebabkan melonjaknya pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB di Kota Magelang yang merupakan kawasan perkotaan bergerak pada sektor sekunder (non-pertanian), sedangkan Kabupaten Temanggung didominasi oleh kawasan perdesaan bergerak pada sektor primer (pertanian).

Berikut adalah perbandingan pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 sebagaimana gambar berikut ini.



Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

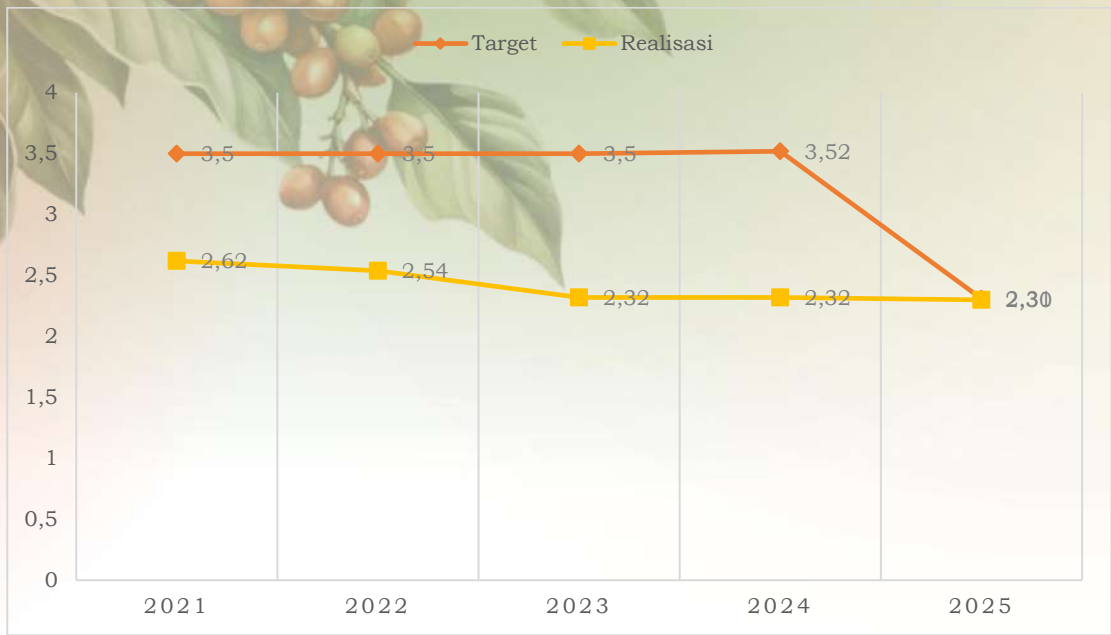
Gambar 2. 15
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB antara Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung bergerak secara fluktuatif. Pada periode Tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sedangkan Tahun 2023 pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah namun lebih tinggi dari Nasional. Periode Tahun 2024 kondisi pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung berhasil bangkit yang dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB Perkapita yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, begitu juga pada Tahun 2025 capaian pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Temanggung sebesar 7,08% lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (6,10) maupun Nasional (6,49).

Kabupaten Temanggung selalu berupaya untuk meningkatkan capaian pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional antara lain dengan meningkatkan distribusi produk barang dan jasa lokal sehingga selain dapat melayani permintaan dan kebutuhan lokal namun juga dapat melayani wilayah sekitarnya, membuka peluang investasi dari berbagai sektor baik dalam maupun luar wilayah, membangun infrastruktur. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga untuk mendorong pertumbuhan PDRB Perkapita serta pemerataan kesejahteraan Masyarakat dengan mendorong UMKM agar tumbuh dan naik kelas.

2.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

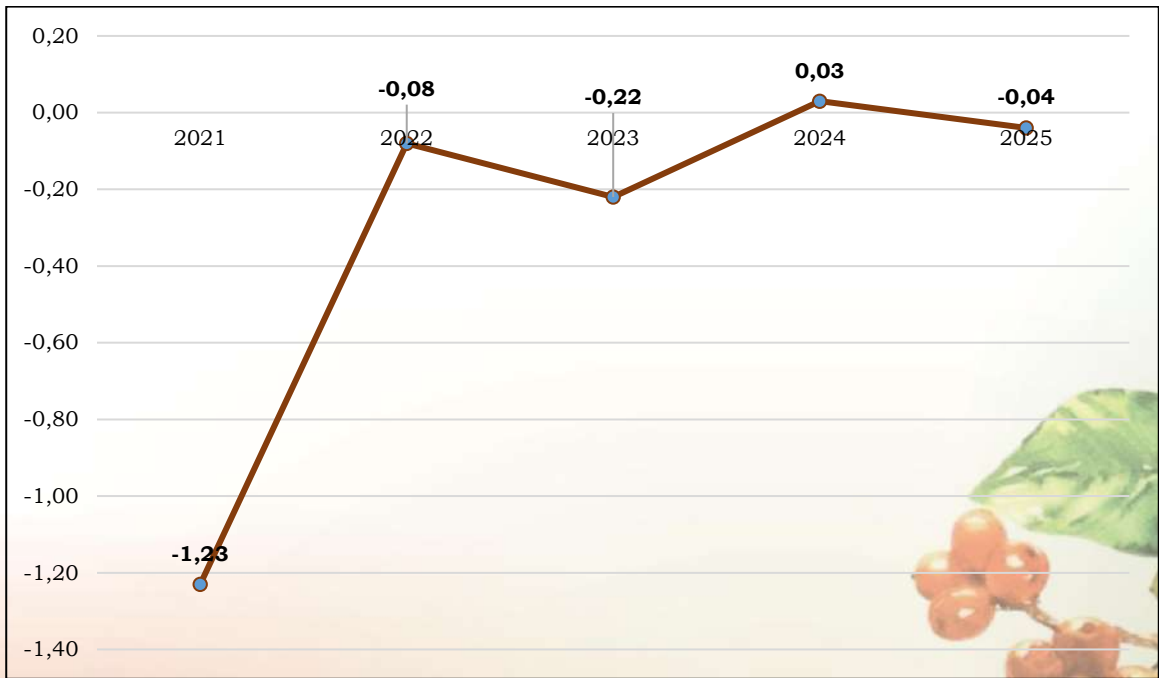
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dengan target RKPD yang telah ditentukan Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Gambar 2. 16
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Target RKPD
Tahun 2021-2025

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan target RKPD sudah mencapai 100% dari kinerja pencapaian target RKPD. Pada Tahun 2021, tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sempat lebih tinggi dibandingkan target yang disebabkan oleh pandemi covid-19, namun pada tahun selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung berangsur membaik yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih rendah dibandingkan target daerah serta tingkat perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ≤ 0 sebagaimana gambar dan tabel berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Gambar 2. 17
Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Tabel 2. 25
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah
Tahun 2021-2025

Tahun	Target RKPD	TPT Kabupaten Temanggung	Perubahan TPT Kabupaten Temanggung	Kinerja Pencapaian Target RKPD
2021	3,50	2,62	-1,23	100%
2022	3,50	2,54	-0,08	100%
2023	3,50	2,32	-0,22	100%
2024	3,52	2,35	0,03	100%
2025	2,30	2,31	-0,04	99,57%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TPT mengalami kecenderungan menurun dari Tahun 2021-2025. Pada Tahun 2025 capaian TPT di Kabupaten Temanggung sebesar 2,31, turun sebesar 0,04 dari capaian Tahun 2024 yang sebesar 2,35 namun secara pencapaian target kinerja masih 99,57% dikarenakan indikator TPT bersifat negatif (semakin kecil semakin baik). Tingkat perubahan dengan nilai ≤ 0 yang berarti tenaga kerja yang tidak termanfaatkan semakin berkurang dan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada pada sektor pertanian dan industri padat karya. Tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 26
Perbandingan TPT Daerah dengan Rata-rata Capaian
Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2021	2,62	-1,23	5,46	-0,11
2022	2,54	-0,08	4,74	-0,72
2023	2,32	-0,22	4,00	-0,74
2024	2,35	0,03	3,43	-0,57
2025	2,31	-0,04	3,38	-0,05

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Secara umum capaian TPT dan Perubahan TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung. Jika ditinjau lebih rinci, TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Gelangmanggung dengan perubahan sebesar -0,04 pada Tahun 2025. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara yang dibuktikan dengan nilai TPT sebesar <3% sedangkan pada wilayah Gelangmanggung mencapai

>4%. Secara rinci, TPT Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Gelangmanggung tersaji pada tabel 2.27.

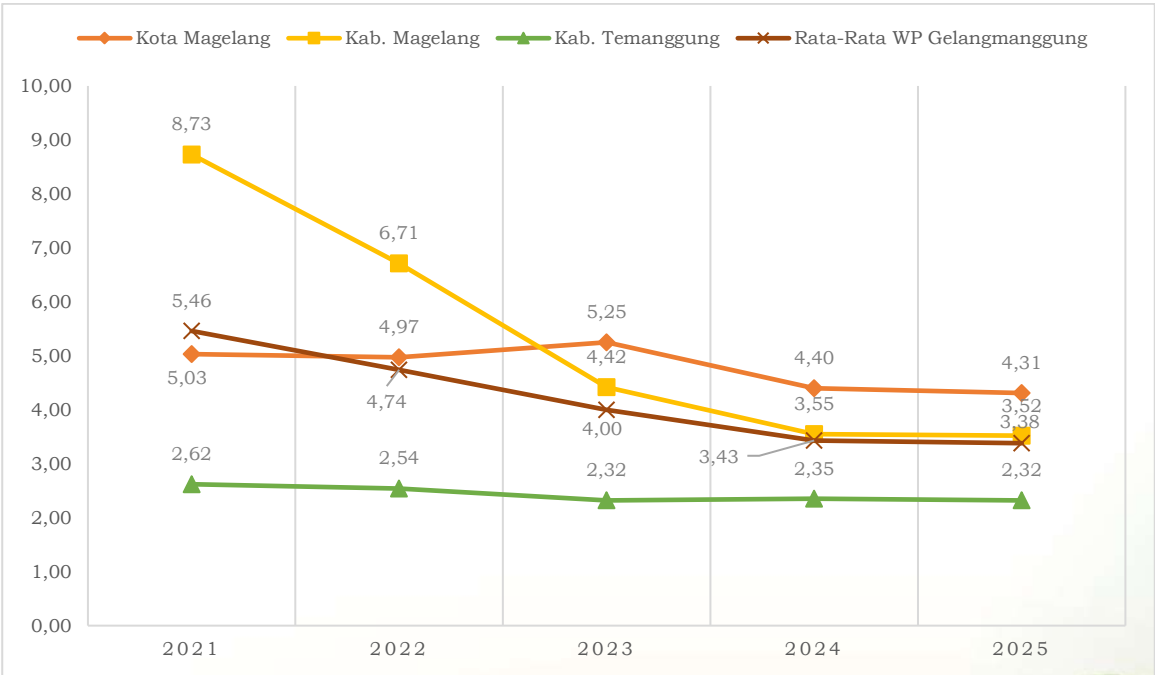
Tabel 2. 27
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	TPT				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	5,03	4,97	5,25	4,40	4,31
Kabupaten Magelang	8,73	6,71	4,42	3,55	3,52
Kabupaten Temanggung	2,62	2,54	2,32	2,35	2,31
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	5,46	4,74	4,00	3,43	3,38

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Dari tabel 2.27 diatas dapat dilihat bahwa capaian TPT Kabupaten Temanggung selama 2021-2025 lebih baik bila dibandingkan dengan capaian Kota Magelang dan Kabupaten Magelang di mana pada kondisi terakhir Tahun 2025 capaian TPT Kabupaten Temanggung sebesar 2,31 lebih baik dari capaian Kota Magelang (4,31) dan capaian Kabupaten Magelang (3,52).

Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025 tersaji pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 2. 18
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025

Selain dibandingkan dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dari perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan target RKP Kewilayahan yang

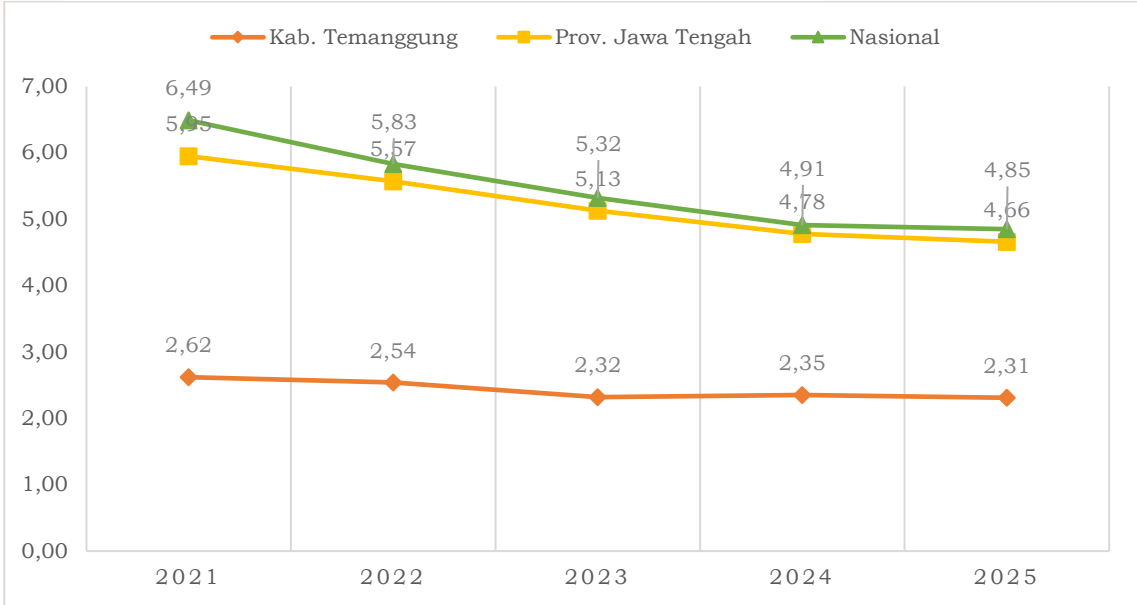
telah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKP Kewilayahan sebagaimana tabel 2.28.

Tabel 2. 28
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan
target RKP Kewilayahan Nasional

Indikator	Target RKP Kewilayahan Nasional Tahun 2026*	Realisasi Capaian Tahun 2025	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 – 5,0	2,31	100%

Sumber : Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026
BPS Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2026

Adapun perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian Nasional Tahun 2021-2025 tersaji pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
BPS Republik Indonesia Tahun 2026

Gambar 2. 19
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-
2025

Tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 29
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung
dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kabupaten Temanggung		Jawa Tengah		Nasional	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2021	2,62	-1,23	5,95	-0,53	6,49	-0,58
2022	2,54	-0,08	5,57	-0,38	5,83	-0,66
2023	2,32	-0,22	5,13	-0,44	5,32	-0,51
2024	2,35	0,33	4,78	-0,35	4,91	-0,41
2025	2,31	-0,04	4,66	-0,12	4,85	-0,06

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
BPS Republik Indonesia Tahun 2026

Secara umum selama 5 (lima) tahun terakhir, capaian TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah dan capaian Nasional. Capaian TPT di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 sebesar 2,31 lebih baik dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang secara berturut-turut memperoleh 4,66 dan 4,85. Begitu juga dengan capaian perubahan TPT di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dimana capaian perubahan TPT Kabupaten Temanggung pada kondisi terkini tahun 2025 menunjukkan nilai yang lebih baik yaitu -0,04 dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah (-0,12) dan capaian Nasional (-0,06). Hal ini karena sektor pertanian terutama pada komoditas tembakau dan industri pengolahan kayu yang padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Capaian TPT dan Perubahan TPT yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam penanganan ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung.

Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan penurunan angka TPT menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang telah dilaksanakan daerah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini karena beberapa sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam memproduksi.

Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 secara rinci disajikan pada tabel 2.30.

Tabel 2. 30
Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Tahun	Kabupaten Temanggung			Jawa Tengah			Nasional		
	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE
2021	2,62	-1,23	3,34	5,95	-0,53	3,32	6,49	-0,58	3,69
2022	2,54	-0,08	5,20	5,57	-0,38	5,31	5,83	-0,66	5,72
2023	2,32	-0,22	5,00	5,13	-0,44	4,98	5,83	-0,51	5,04
2024	2,35	0,33	5,04	4,78	-0,35	4,95	4,91	-0,51	5,03
2025	2,31	-0,04	5,66	4,66	-0,12	4,95	4,85	-0,06	5,03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Pada kondisi pasca pandemi dan terkini pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional sudah menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan dengan penurunan perubahan TPT. Secara umum dampak pandemi terhadap TPT di Kabupaten Temanggung lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Hal tersebut disebabkan dari sisi pertumbuhan jumlah pekerja, dampak Covid-19 relatif kecil terjadi di sektor pertanian yang menjadi sektor utama di Kabupaten Temanggung dengan tren yang tumbuh positif, sementara sektor lainnya (non-pertanian, industri, dan jasa) mengalami kontraksi. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung selain dikarenakan adanya sumber daya alam yang berlimpah khususnya pada sektor perkebunan seperti kopi maupun industri pengolahan kayu, adalah peningkatan yang cukup signifikan dari sektor konstruksi, sektor akomodasi, sektor perusahaan dan sektor jasa pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi secara langsung, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat negatif, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran. Tingkat pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Tahun 2021-2025 disajikan sebagaimana pada gambar berikut.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Gambar 2. 20
Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Berdasarkan gambar 2.20 diatas, pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuaktif dimana Tahun 2022-2023 menunjukkan tren penurunan akan tetapi pada Tahun 2024 naik dengan pertumbuhan 5,72%. Kenaikan jumlah penganggur dikarenakan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sektor jasa padat karya di Kabupaten Temanggung. Namun, pada Tahun 2025 terjadi penurunan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung yang turun menjadi 1,25% atau berkurang 148 orang dibandingkan dengan Tahun 2024. Adapun rata-rata pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir <0 dengan nilai sebesar -2,99%. Adapun rincian pertumbuhan dan perubahan jumlah pengangguran di Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel berikut.

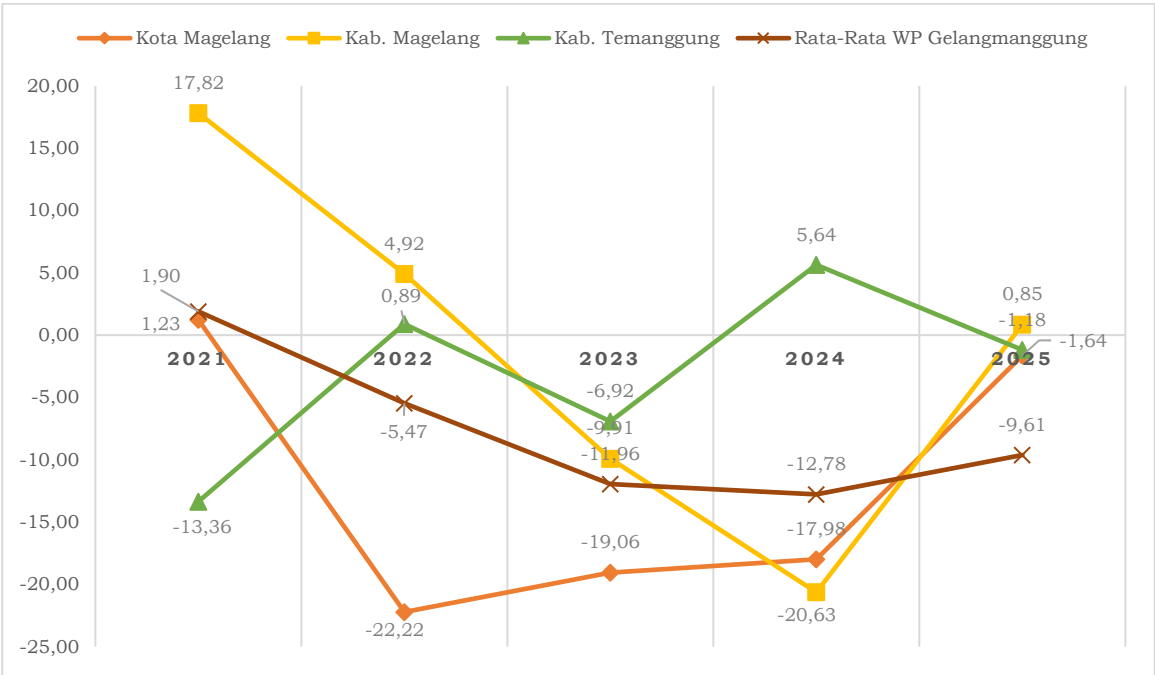
Tabel 2. 31
Rata-Rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Tahun	Kabupaten Temanggung		
	Jumlah Penganggur	Pertumbuhan (%)	Perubahan
2021	11.918	-13,36	-1.838
2022	12.024	0,89	106
2023	11.192	-6,92	-832
2024	11.832	5,72	640
2025	11.684	-1,25	-148
Rata-Rata	11.730	-3,00	-414

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Rata-rata tingkat perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2021-2025 berada pada titik <0 dengan pengurangan sebanyak 414 orang. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi meningkatnya jumlah pengangguran diantaranya peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan bakat, memperluas kesempatan kerja dengan mendorong investasi lebih banyak di Kabupaten Temanggung melalui bursa kerja/bursa kerja khusus di lingkungan sekolah-sekolah Vokasi (SMK), memberikan kemudahan berusaha khususnya perusahaan-perusahaan baik PMPN/PA yang padat kerja, dan menumbuhkan potensi ekonomi dengan disertifikasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi lokal.

Pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung yang ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 2. 21
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025

Adapun perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian wilayah yang setara secara rinci disajikan pada tabel 2.32.

Tabel 2. 32
Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata
Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025

Tahun	Kota Magelang	Kab. Magelang	Kab. Temanggung	WP Gelangmanggung
2021	70	5.896	-1.838	1.376
2022	-1.282	1.919	106	248
2023	-855	-4.054	-832	-1.914
2024	-653	-7.601	631	-2.541
2025	-49	248	-139	20
Rata-Rata	-554	-718	-414	-562

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.32 diatas diketahui bahwa pada Tahun 2021 perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan signifikan mencapai -1.838, jauh lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi pada Kota Magelang yang mengalami peningkatan sebanyak 70, Kabupaten Magelang yang mengalami peningkatan sebanyak 5.896 serta rata-rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung yang mengalami peningkatan sebanyak 1.376. Pada Tahun 2025 perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan sebanyak -139, lebih baik dibandingkan dengan Kota Magelang yang mengalami penurunan sebanyak -49, Kabupaten Magelang yang mengalami peningkatan sebanyak 248 serta rata-rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung yang mengalami peningkatan sebanyak 20.

Adapun secara rinci jumlah penganggur Kabupaten/Kota yang berada pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung secara rinci disajikan pada tabel 2.33.

Tabel 2. 33
Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung
Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penganggur (Orang)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	5.769	4.487	3.632	2.979	2.930
Kabupaten Magelang	38.976	40.895	36.841	29.240	29.448
Kabupaten Temanggung	11.918	12.024	11.192	11.823	11.684
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	18.888	19.135	17.222	14.681	14.687

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Selain dibandingkan dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung juga dapat dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2021-2025 yang secara rinci disajikan pada tabel 2.34.

Tabel 2. 34
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Nasional
Tahun 2021-2025

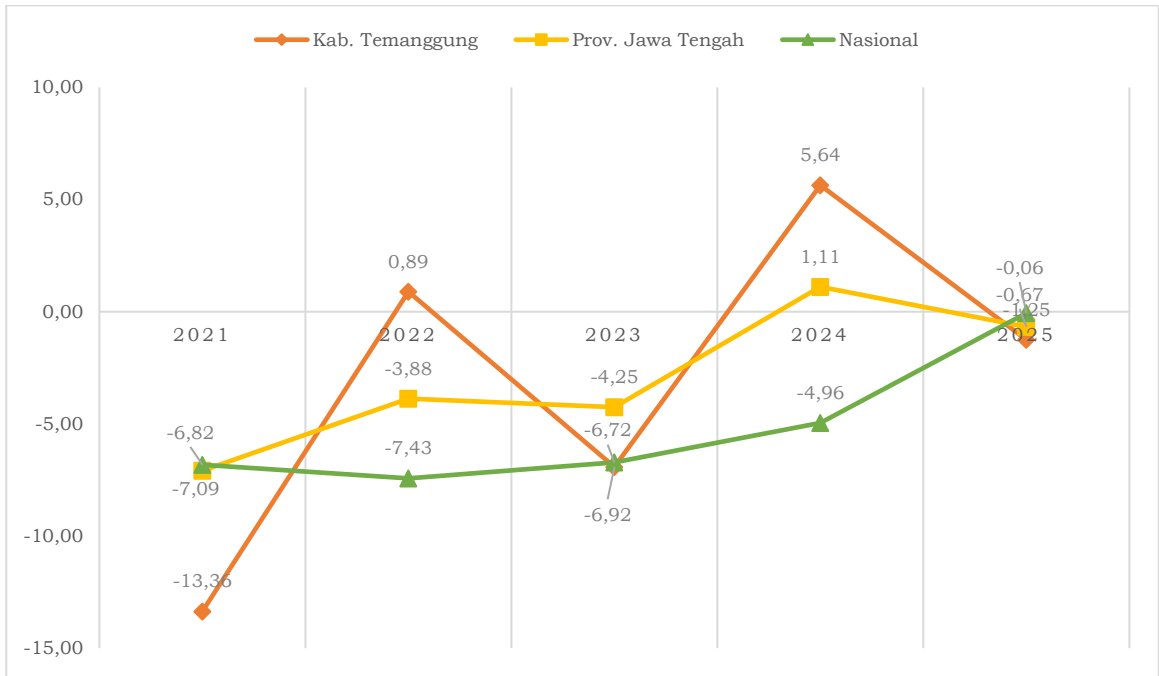
Tahun	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2021	-13,36%	-7,09%	-6,82%
2022	0,89%	-3,88%	-7,43%

Tahun	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2023	-6,92%	-4,25%	-6,72%
2024	5,64%	1,11%	-4,96%
2025	-1,25%	-0,67%	-0,06%
Rata-rata	-3,00%	-2,96%	-5,20%

Sumber: BPS RI, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah
*Angka per Februari Tahun 2025 (BPS Jawa Tengah)
**Angka per Agustus Tahun 2025 (BPS RI)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada kondisi terkini Tahun 2025 capaian pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung sebesar -3,00% lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar -2,96% namun lebih baik dibandingkan dengan capaian Nasional yang sebesar -5,20%.

Adapun perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional disajikan pada gambar 2.22.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

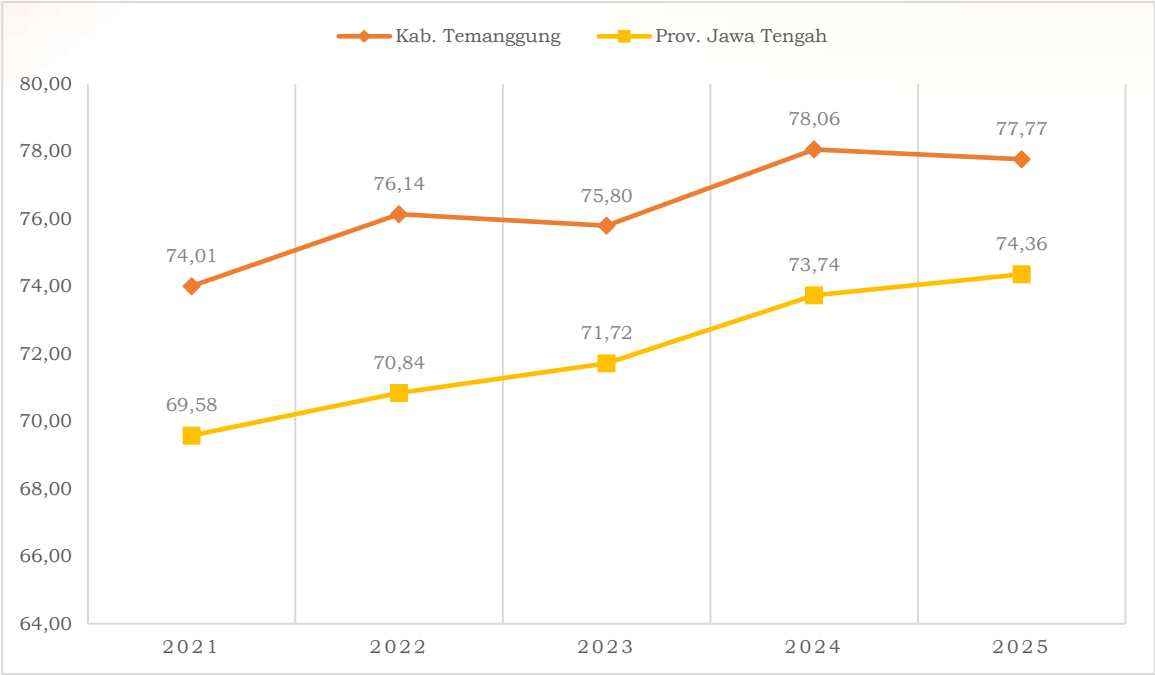
Gambar 2. 22
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung dengan Capaian Provinsi dan Nasional

Pada Tahun 2023 penurunan pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung lebih baik dari nasional dan provinsi dengan pengurangan mencapai -6,92%, sedangkan secara provinsi dan nasional secara berturut-turut hanya mencapai -4,25% dan -6,72%. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Temanggung.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Bekerja (TPAK) memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. TPAK tinggi

merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Akan tetapi, peningkatan TPAK juga dapat menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah pengangguran pada kondisi dimana rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh penduduk usia kerja yang tidak bekerja.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar 2.23 berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 2. 23
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Pada periode 5 (lima) tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah, TPAK Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Tingginya TPAK Kabupaten Temanggung ini menunjukkan bahwa lebih tingginya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Di sisi lain, tingginya TPAK tidak selalu menggambarkan penduduk yang aktif bekerja karena adanya peralihan menjadi ibu rumah tangga maupun penambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa.

2.1.2.5 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global dan masih menjadi prioritas pembangunan nasional. Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang mendapat perhatian serius dari pemerintah yang belum dapat

teratasi. Terkait masalah kemiskinan tersebut, salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah penyediaan data yang akurat.

1. Persentase Penduduk Miskin (PO)

Potret kemiskinan Kabupaten Temanggung dilihat dari tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025. Perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan target RKPD disajikan pada tabel 2.35.

Tabel 2. 35
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Tingkat Kemiskinan) di Kabupaten Temanggung dengan Target RKPD Tahun 2021-2025

Tahun	Nasional	Jawa Tengah	Tingkat Kemiskinan (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2021	9,71	11,79	10,36	10,17	72.372	79.100
2022	9,57	10,93	10,00	9,33	80.126	73.040
2023	9,36	10,77	9,80	9,26	75.495	72.960
2024	9,03	10,47	9,25	8,67	67.442	68.770
2025	8,47	9,48	7,95	7,78	73.000	62.050

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025, Data Diolah

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung tahun 2021-2025 menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Setelah meningkat pada tahun 2021 menjadi 10,17, angka kemiskinan Kabupaten Temanggung konsisten menurun sejak 2022 angka terakhir menjadi 7,78 persen. Persentase penduduk miskin pada Tahun 2025 yang tercatat sebesar 7,78% memiliki makna bahwa terdapat 7,78% penduduk Kabupaten Temanggung yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah Garis Kemiskinan. Jika disandingkan dengan target yang direncanakan, pada periode lima tahun terakhir realisasi persentase kemiskinan selalu lebih rendah (lebih baik) daripada target yang ditentukan. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung juga sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin di mana pada tahun 2025 tercatat terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sejumlah 6.720 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan mulai pulihnya kondisi perekonomian di Temanggung. Perbandingan Tingkat kemiskinan daerah dengan capaian nasional juga menunjukkan nilai yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang lebih baik dengan realisasi capaian di bawah tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data di atas, tercatat tingkat kemiskinan Nasional pada tahun

2025 sebesar 8,47 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 9,48%. Capaian kemiskinan dalam kurun waktu 2021-2025 menggambarkan keberhasilan upaya penanggulangan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah.

Jika dibandingkan dengan target RKP Nasional Tahun 2026 sudah mencapai 100%, kinerja pencapaian target RKP Kewilayahan sebagaimana disajikan pada tabel 2.36 berikut.

Tabel 2. 36
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Target RKP Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan Nasional Tahun 2026*	Realisasi Capaian Tahun 2025	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Tingkat Kemiskinan	7 - 8 %	7,78	100%

Sumber: Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2026
BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Perbandingan tingkat kemiskinan daerah dengan capaian sebelumnya Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 secara rinci tersaji pada tabel 2.37.

Tabel 2. 37
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Temanggung		Jawa Tengah	Nasional
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi
2021	10,36	10,17	11,79	9,71
2022	10,00	9,33	10,93	9,57
2023	9,8,0	9,26	10,77	9,36
2024	9,25	8,67	10,47	9,03
2025	7,75	7,78	9,48	8,47

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025

Capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 yang sebesar 7,78% lebih baik dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah (9,48%) dan juga capaian Nasional (8,47%). Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil menurunkan kemiskinan.

Perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025 secara rinci disajikan pada tabel 2.38.

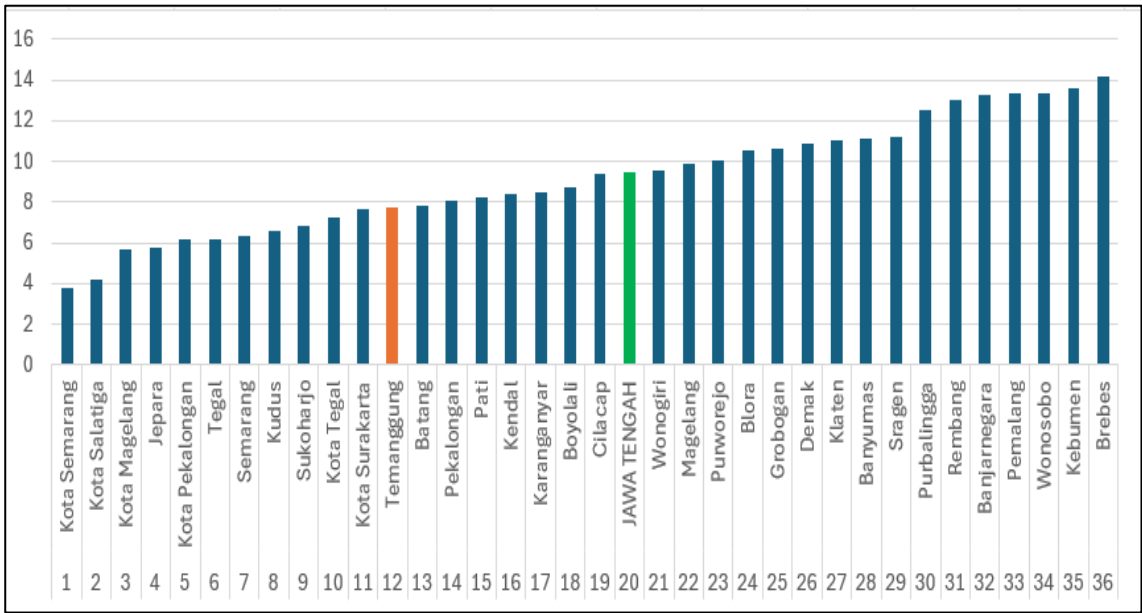
Tabel 2. 38
Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin					Perubahan Penduduk Miskin				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Magelang	11,91	11,09	10,96	10,83	9,90	0,64	-0,82	-0,13	-0,13	-0,93
Kota Magelang	7,75	7,10	6,11	5,94	5,68	0,17	-0,65	-0,99	-0,17	-0,26
Kabupaten Temanggung	10,17	9,33	9,26	8,67	7,78	0,21	-0,84	-0,77	-0,59	-0,89

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin					Perubahan Penduduk Miskin				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
RATA-RATA GELANG-MANGGUNG	9,94	9,17	8,78	8,48	7,79	0,21	-0,27	0,4	-0,30	-0,69
JAWA TENGAH	11,79	10,93	10,77	10,47	9,48	0,38	-0,86	-0,16	-0,30	-0,99
NASIONAL	9,71	9,57	9,36	9,03	8,47	-0,48	-0,14	-0,21	-0,33	-0,56

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah.

Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung menempati posisi kedua setelah Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung lebih baik dari kabupaten yang lain. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah posisi relatif Kabupaten Temanggung menempati urutan ke-12 dibandingkan kabupaten/kota lain dapat tersaji pada gambar 2.24.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 2. 24
Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambaran kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada kondisi terkini serta perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan capaian nasional dapat disajikan pada tabel 2.39.

Tabel 2. 39
Perbandingan Perubahan Pencapaian Persentase Penduduk Miskin Daerah (Tingkat Kemiskinan) dengan Capaian Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Jawa Tengah		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2021	10,17	0,21	9,94	0,43	11,79	0,38	9,71	-0,48
2022	9,33	-0,84	9,17	-0,77	10,93	-0,86	9,57	-0,14
2023	9,26	-0,07	8,78	-0,40	10,77	-0,16	9,36	-0,21
2024	8,67	-0,59	8,48	-0,30	10,47	-0,30	9,03	-0,33
2025	7,78	-0,89	7,79	-0,69	9,48	-0,99	8,47	-0,56

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional juga berimbas pada progres perbaikan kemiskinan ditunjukkan dengan data

pada Tahun 2025 dimana kemiskinan Kabupaten Temanggung maupun rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah serta nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Perubahan persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 yang mencapai -0,89 lebih baik bila dibandingkan dengan capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung (-0,69) dan Nasional (-0,56) namun masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar -0,99.

Pembahasan tentang kemiskinan tidak terlepas dari pembahasan mengenai penduduk miskin. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Adapun jumlah penduduk miskin dan pertumbuhannya di Kabupaten Temanggung, wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 2.40.

Tabel 2. 40
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin, Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Magelang	154,91	145,33	144,49	143,8	132,211	5,86	-6,18	-0,58	-0,48	-8,06
Kota Magelang	9,44	8,65	7,45	7,25	6,93	1,83	-8,37	-13,87	-2,68	-4,41
Kabupaten Temanggung	79,09	73,04	72,96	68,77	62,05	2,28	-7,65	-0,11	-5,74	-9,77
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	81,15	75,67	74,97	73,27	67,06	3,32	-7,40	-4,85	-2,97	-7,41
JAWA TENGAH	4.109,75	3.831,44	3.704,33	3.791,50	3.367,00	3,24	-6,77	-3,32	2,35	-11,20
NASIONAL	26.503,65	26.363,27	25.220,00	24.060,00	23.850,00	-3,80	-0,53	-4,34	-4,60	-0,87

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Dalam kurun waktu Tahun 2021-2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan pada Tahun 2021-2024. Pada Tahun 2025, penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung sebesar -9,77% menunjukkan capaian yang lebih dari rata-rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung (-7,41%) dan Nasional (-0,87%) namun masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu -11,20.

Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 2.41.

Tabel 2. 41
Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUN G		Jawa Tengah		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2020	77,33	6,52	77,65	6,32	3.980,90	6,35	27.549,69	11,15
2021	79,09	2,28	81,15	4,51	4.109,75	3,24	26.503,65	-3,8
2022	73,04	-7,65	75,67	-6,74	3.831,44	-6,77	26.363,27	-0,53
2023	72,96	-0,11	74,97	-0,93	3.704,33	-1,04	25.900,00	-1,76
2024	68,77	-5,74	73,27	-2,26	3.791,50	2,35	24.060,00	-7,10
2025	62,05	-9,77	67,06	-8,47	3.367,00	-11,20	23.850,00	-0,87

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 2.41 di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19 yang puncaknya di Tahun 2021 yang menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kabupaten Temanggung. Tahun 2025 Kabupaten Temanggung memiliki capaian yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan capaian rata-rata di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional namun masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, di mana pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mempengaruhi pada peningkatan kesejahteraan dan berkurangnya kemiskinan. Perbandingan rasio perubahan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian nasional Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel 2.42.

Tabel 2. 42
Perbandingan Rasio Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kabupaten Temanggung				Nasional			
	Tingkat Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi		Tingkat Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2021	10,17	0,21	3,34	5,47	9,71	-0,48	3,7	5,77
2022	9,33	-0,84	5,20	1,86	9,57	-0,14	5,31	1,61
2023	9,26	-0,07	5,00	-0,2	9,36	-0,21	5,04	-0,27
2024	8,67	-0,59	5,02	0,02	9,03	-0,33	5,03	-0,01
2025	7,78	-0,89	5,66	0,64	8,47	-0,56	5,11	0,80

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung dan BPS RI Tahun 2025, Data Diolah

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 turun mengindikasikan capaian positif dengan penurunan sebesar -0,89, kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang baik pada menurunnya angka kemiskinan. Pada tingkat nasional, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga berkorelasi positif terhadap penurunan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian

penurunan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung menunjukkan hasil yang lebih baik dari capaian nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan keberhasilan kebijakan dalam percepatan pemulihan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa persentase dan jumlah penduduk miskin, akan tetapi juga memperhatikan tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan. Semakin kecil P1 maupun P2 semakin baik karena menunjukkan semakin kecilnya kedalaman dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin baik terhadap Garis Kemiskinan maupun di antara penduduk miskin itu sendiri.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan dan perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 jika dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 2.43.

Tabel 2. 43
Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan perbandingan perubahan indeks kedalaman kemiskinan dengan Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	0,85	0,47	0,74	0,92	0,53	-0,27	-0,38	0,27	0,18	-0,39
Kabupaten Magelang	1,63	1,66	1,73	1,23	1,04	0,4	0,03	0,07	-0,5	-0,19
Kabupaten Temanggung	1,57	1,06	0,99	0,97	0,67	0,71	-0,51	-0,07	-0,02	-0,3
RATA-RATA GELANG-MANGGUNG	1,35	1,06	1,15	1,04	0,75	0,28	-0,29	0,09	-0,11	-0,29
JAWA TENGAH	1,91	1,77	1,75	1,64	1,57	0,19	-0,14	-0,02	-0,11	-0,07
NASIONAL	1,67	1,56	1,53	1,36	1,37	-0,08	-0,11	-0,03	-0,17	-0,01

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan daerah dengan capaian nasional menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi. Pada Tahun 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2021-2025 berfluktuasi dan meningkat cukup tajam pada Tahun 2021, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan kemiskinan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Temanggung. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berada di bawah angka rata-rata wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini berarti rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas garis kemiskinan di Kabupaten Temanggung lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, indikator yang juga perlu dilihat adalah Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel 2.44.

Tabel 2. 44
Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Dibandingkan Jateng dan Nasional Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)					Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	0,15	0,06	0,12	0,19	0,09	-0,08	-0,09	0,06	0,07	0,07
Kabupaten Magelang	0,35	0,41	0,41	0,23	0,17	0,15	0,06	0,00	-0,18	-0,18
Kabupaten Temanggung	0,39	0,19	0,17	0,18	0,10	0,28	-0,2	-0,02	0,01	0,01
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	0,30	0,22	0,23	0,20	0,12	0,12	-0,01	0,01	-0,03	-0,03
JAWA TENGAH	0,45	0,42	0,42	0,37	0,35	0,11	-0,03	0,00	-0,05	-0,05
NASIONAL	0,42	0,38	0,38	0,35	0,32	-0,05	-0,04	0,00	-0,03	-0,03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025, Data Diolah.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan pada Tahun 2025 sebesar 0,10, meningkat dari yang sebelumnya sebesar 0,18

pada Tahun 2024. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi dan meningkat cukup tajam pada Tahun 2021 sama seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan di mana pandemi Covid-19 ikut memperparah kondisi kemiskinan yang terjadi di daerah. Kondisi kemiskinan terus menunjukkan perbaikan pada pasca pandemi ditunjukkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang menurun seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian dan kesehatan. Jika dilihat lebih rinci, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 selalu berada di bawah angka rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini berarti penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Temanggung dapat dikatakan masih lebih baik daripada tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

4. Kemiskinan Ekstrem

Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

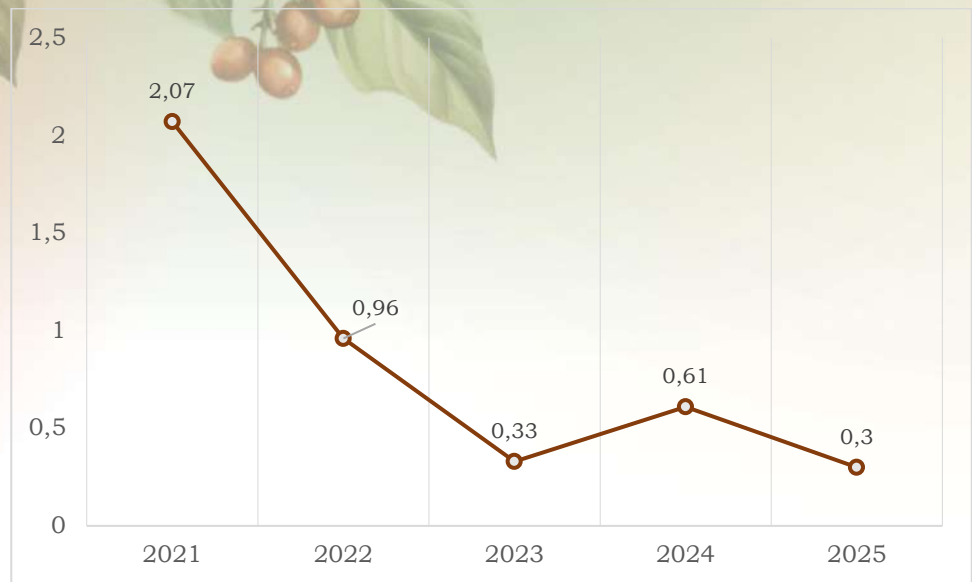
Tabel 2. 45
Angka Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Kemiskinan Ekstrem	2,07	0,96	0,33	0,61	0,3

Sumber: BPS Republik Indonesia

Berdasarkan data pada tabel diatas, persentase penduduk miskin ekstrem menunjukkan tren yang cenderung menurun selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 2,07%, kemudian turun menjadi 0,96% pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 0,33% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan menjadi 0,61%, namun pada tahun 2025 berhasil ditekan kembali hingga mencapai 0,33%. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan penurunan sebesar 1,74 poin dibandingkan tahun 2021 atau sekitar 84,06%. Penurunan tersebut mencerminkan efektivitas strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan guna memastikan keberlanjutan penurunan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar yang telah dilaksanakan.



Sumber: BPS Republik Indonesia

Gambar 2. 25
Grafik Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Selain penurunan kemiskinan secara makro, Kabupaten Temanggung juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam penurunan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data kemiskinan ekstrem Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025, terlihat bahwa tingkat kemiskinan ekstrem menunjukkan tren menurun secara signifikan meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2024. Persentase kemiskinan ekstrem turun dari 2,07% pada tahun 2021 menjadi 0,96% pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 0,33% pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar telah memberikan dampak positif dalam mengurangi jumlah penduduk yang berada pada kondisi kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan persentase kemiskinan ekstrem menjadi 0,61%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi ataupun meningkatnya kerentanan sebagian kelompok masyarakat terhadap tekanan ekonomi. Namun demikian, pada tahun 2025 angka kemiskinan ekstrem kembali turun menjadi 0,30%, yang merupakan capaian terendah selama periode lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dalam melakukan intervensi yang lebih terarah mampu menekan kembali tingkat kemiskinan ekstrem. Secara keseluruhan, capaian kemiskinan ekstrem di Kabupaten Temanggung mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung

target penghapusan kemiskinan ekstrem dan menunjukkan semakin efektifnya sinergi program pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang paling rentan.

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 46
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Variabel	2021	2022	2023	2024	2025
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	69,88	70,77	71,33	71,87	72,52
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,64	75,7	75,77	75,94	76,16
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,08	12,55	12,61	12,62	12,63
	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	6,94	7,41	7,50	7,53	7,61
C	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.142	9.773	10.108	10.519	10.995

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Status pencapaian IPM dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: (a) Sangat Tinggi (IPM ≥ 80); (b) Tinggi, (IPM 70-80); (c) Sedang, (IPM 60-70); dan (d) Rendah, (IPM < 60).

Dalam dimensi IPM Kabupaten Temanggung paling rendah berada pada sektor pendidikan, dimana RLS penduduk usia 25 tahun ke atas Kabupaten Temanggung tahun 2025 tercatat sebesar 7,61 tahun. Artinya bahwa penduduk Kabupaten Temanggung baru menempuh pendidikan sampai kelas 1 SMP/ sederajat atau putus sekolah di kelas 2 SMP/ sederajat. Indikator pendidikan lainnya adalah HLS yang mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun keatas). Pada Tahun 2025, HLS Kabupaten Temanggung sebesar 12,63 tahun artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang sekolah sampai 12,63 tahun atau setara dengan Tingkat I di Perguruan Tinggi jika kondisinya minimal sama seperti sekarang.

Kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada daya saing sumber daya manusia itu sendiri dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Menurut hasil Susenas, mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Temanggung hanya mengenyam pendidikan tinggi hingga tamat SD sederajat (BPS, 2024).

Disisi lain, kesehatan juga merupakan investasi berharga dalam pembangunan. Masyarakat yang sehat akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan pada akhirnya mendukung membaiknya proses pembangunan ekonomi yang semakin baik. Dimensi kesehatan ini dapat ditunjukkan dengan UHH Kabupaten Temanggung yang semakin membaik, tercatat pada tahun 2025 UHH Kabupaten Temanggung sebesar 76,16 tahun. Pencapaian UHH yang terus membaik dari tahun ke tahun didukung dengan keberhasilan upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung.

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dapat menjadi indikator yang mewakili dimensi standar hidup layak yang dapat mencerminkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung. Capaian pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, tercatat pada Tahun 2025 sebesar Rp 10.995.000. Hal ini didukung oleh beberapa statistik lainnya diantaranya menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka serta stabilnya perekonomian di Kabupaten Temanggung.

Perbandingan target dan realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 47
Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional dengan Target RKPD Tahun 2025

No	Variabel	Temanggung			Jawa Tengah	Nasional
		Target	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	72,76	72,52	99,67%	74,77	75,90
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	76,06	76,16	100%	75,24	74,47
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,88	12,63	98,06%	13,05	13,3
C	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,56	7,61	100%	8,15	9,07
D	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.519	10.995	100,00%	12.746	12.809

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI dan BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Capaian IPM Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan capaian nasional juga masih berada di bawah capaian nasional. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah dengan capaian tahun sebelumnya disajikan pada tabel.

Tabel 2. 48
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Tahun 2021-2025

Kabupaten/ Kota	IPM					Pertumbuhan IPM (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Temanggung	69,88	70,77	71,33	71,87	72,52	0,45	1,27	0,79	0,76	0,90

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025, Data Diolah.

Apabila melihat nilai capaian IPM Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan capaian IPM atau IPM daerah lebih baik dengan capaian tahun sebelumnya.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional secara rinci disajikan pada tabel.

Tabel 2. 49
Perbandingan Pertumbuhan IPM Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Kabupaten/ Kota	IPM					Pertumbuhan IPM (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	79,43	80,39	81,17	82,15	82,92	0,56	1,21	0,97	1,21	0,94
Kabupaten Magelang	70,12	70,85	71,45	72,10	73,09	0,36	1,04	0,85	0,91	1,37
Kabupaten Temanggung	69,88	70,77	71,33	71,87	72,52	0,45	1,27	0,79	0,76	0,90
RATA-RATA GELANGM-ANGGUNG	73,14	74,00	74,65	75,37	76,26	0,46	1,17	0,87	0,96	1,18
JAWA TENGAH	72,16	72,79	73,39	73,87	74,77	0,40	0,87	0,82	0,65	1,22
NASIONAL	72,29	72,91	74,39	75,02	75,9	0,49	0,86	2,03	0,85	1,17

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah lebih baik dengan capaian tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung selama Tahun 2021-2025 cukup fluktuatif. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM pada wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2021-2025, pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung tergolong moderat. Pertumbuhan capaian IPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 menunjukkan progres yang semakin membaik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, namun progres tersebut masih berada dibawah

progres yang dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Meski menunjukkan progres yang positif, capaian IPM Kabupaten Temanggung, capaian IPM masih berada di bawah capaian rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelanggangung, Jawa Tengah maupun nasional, sehingga Kabupaten Temanggung masih memerlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian IPM melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi untuk mewujudkan pembangunan manusia yang semakin berkualitas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan standar untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu daerah dari sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sektor kesehatan direpresentasikan dengan indikator usia harapan hidup saat lahir, sektor pendidikan direpresentasikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta sektor ekonomi direpresentasikan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

Komponen dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM) yaitu :

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. AHH merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan. Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dibandingkan dengan target RKPD disajikan pada tabel.

Tabel 2. 50
Perbandingan AHH dengan Target RKPD
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Tahun	AHH (Angka Harapan Hidup)		
	Target	Realisasi	Kinerja
2021	75,49	75,64	100%
2022	75,51	75,70	100%
2023	75,53	75,77	100%
2024	75,71	75,94	100%
2025	76,06	76,16	100%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

AHH di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan capaian 76,16 dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan, lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain

dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada indikator Capaian dan pertumbuhan AHH Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan kabupaten/kota wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional secara terinci disajikan pada tabel.

Tabel 2. 51
Perbandingan Pertumbuhan AHH Daerah dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)					Pertumbuhan AHH				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	76,93	77,02	77,22	77,54	78,03	0,08	0,09	0,20	0,32	0,49
Kabupaten Magelang	74,13	74,28	74,44	74,68	74,93	0,16	0,15	0,16	0,24	0,25
Kabupaten Temanggung	75,64	75,7	75,77	75,94	76,16	0,06	0,06	0,07	0,17	0,22
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	75,57	75,67	75,81	76,05	76,37	0,10	0,10	0,14	0,24	0,32
JAWA TENGAH	74,47	74,57	74,69	74,91	75,24	0,10	0,10	0,12	0,22	0,33
NASIONAL	71,57	71,85	72,13	73,93	74,47	0,10	0,28	0,28	1,80	0,54

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Tren AHH Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021-2025 menunjukkan capaian yang bagus karena terus meningkat. Peningkatan capaian tersebut mengindikasikan perbaikan pembangunan pada bidang kesehatan. Jika dilihat perbandingan capaian Kabupaten Temanggung dengan rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah serta nasional, indikator Angka Harapan Hidup Saat Lahir memiliki capaian yang lebih baik dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional namun masih berada dibawah capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perbandingan HLS Kabupaten Temanggung dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 52
Perbandingan HLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		
	Target	Realisasi	Kinerja
2021	12,35	12,32	99,76%
2022	12,42	12,55	100%
2023	12,49	12,61	100%

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		
	Target	Realisasi	Kinerja
2024	12,60	12,62	100%
2025	12,88	12,63	98,06%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mencapai 12,63 yang artinya tingkat anak-anak Temanggung yang pada Tahun 2025 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 12,63 tahun (Diploma I) lebih baik dari capaian Tahun 2023 (12,61). Capaian HLS Temanggung pada Tahun 2025 lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah (13,05) dan Nasional (13,30).

Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional secara rinci disajikan pada tabel.

Tabel 2. 53
Perbandingan Pertumbuhan HLS Daerah dengan Capaian Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	HLS (Tahun)					Pertumbuhan HLS				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	14,15	14,31	14,40	14,62	14,84	0,01	0,16	0,09	0,22	0,22
Kabupaten Magelang	12,55	12,58	12,61	12,62	12,83	0,01	0,03	0,03	0,01	0,21
Kabupaten Temanggung	12,32	12,55	12,61	12,62	12,63	0,18	0,23	0,06	0,01	0,01
RATA-RATA GELANG-MANGGUNG	13,01	13,15	13,21	13,29	13,43	0,07	0,14	0,06	0,08	0,15
JAWA TENGAH	12,77	12,81	12,85	12,86	13,05	0,07	0,04	0,04	0,01	0,19
NASIONAL	13,08	13,10	13,15	13,21	13,30	0,10	0,02	0,05	0,06	0,09

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Capaian HLS Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan. HLS Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 sebesar 12,63, hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun yang masing jenjang pendidikan pada Tahun 2025 diharapkan dapat bersekolah hingga 12,63 tahun atau setara Diploma I. Dilihat berdasarkan pertumbuhannya, progres HLS Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang positif terutama setelah pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah serta nasional, capaian HLS Kabupaten Temanggung juga masih berada di bawah capaian ketiga wilayah tersebut, oleh karena itu pembangunan di sektor pendidikan masih perlu untuk terus ditingkatkan.

3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perbandingan RLS Kabupaten Temanggung dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel 2.54.

Tabel 2. 54
Perbandingan RLS dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		
	Target	Realisasi	Kinerja
2021	7,50	7,25	96,67%
2022	7,65	7,41	96,86%
2023	7,80	7,50	96,15%
2024	7,85	7,53	96,54%
2025	7,56	7,61	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025 mencapai 7,61 naik 0,08 poin dibandingkan capaian Tahun 2024. Ini artinya rata-rata penduduk Temanggung mencapai Pendidikan Dasar sampai kelas 7 (kelas 1 SMP), belum sampai kelas 8. Capaian RLS Temanggung di bawah capaian Jawa Tengah (8,15) dan capaian Nasional (9,07). Dan ini diasumsikan menjadi salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2021-2025.

Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional disajikan pada tabel.

Tabel 2. 55
Perbandingan Pertumbuhan RLS Daerah dengan Rata-Rata Capaian Wilayah
Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	RLS (Tahun)					Pertumbuhan RLS				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021 1	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	10,62	10,94	11,20	11,43	11,44	0,23	0,32	0,26	0,23	0,01
Kabupaten Magelang	7,79	7,81	7,82	7,83	8,04	0,01	0,02	0,01	0,01	0,21
Kabupaten Temanggung	7,25	7,41	7,50	7,53	7,61	0,01	0,16	0,09	0,03	0,08
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	8,55	8,72	8,84	8,93	9,03	0,08	0,17	0,12	0,09	0,10
JAWA TENGAH	7,75	7,93	8,01	8,02	8,15	0,06	0,18	0,08	0,01	0,13
NASIONAL	8,54	8,69	8,77	8,85	9,07	0,06	0,15	0,08	0,08	0,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Capaian RLS Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. RLS Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebesar 7,53, hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Temanggung telah menempuh pendidikan selama 7,53 tahun atau setara dengan telah

mengenyam pendidikan sampai kelas VII (putus sekolah di kelas VIII). Pencapaian tersebut masih harus ditingkatkan karena jika dibandingkan dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di mana capaian Kabupaten Temanggung termasuk rendah.

Faktor penghambat Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Temanggung di antaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kultur sosial budaya masyarakat. Upaya tindak lanjutnya adalah penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dengan menambah dan meningkatkan sarana pelayanan pendidikan dan tenaga pendidik yang berkompetensi untuk meningkatkan capaian RLS sekaligus HLS.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.

Perbandingan pengeluaran per kapita dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 56
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita dengan Target RKPD
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Tahun	Pengeluaran Per Kapita		
	Target	Realisasi	Kinerja
2021	9.408.000	9.408.000	100%
2022	9.773.000	9.773.000	100%
2023	10.108.000	10.108.000	100%
2024	10.118.500	10.519.000	100%
2025	10.118.500	10.995.000	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 10.995.000,00, lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp.12.746.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Nasional adalah sebesar Rp. 12.809.000,00.

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Pengeluaran per kapita dapat menggambarkan tingkat kemampuan seseorang. Capaian dan pertumbuhan komponen IPM pada indikator Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan wilayah pengembangan Gelangmanggung serta perbandingannya dengan Jawa Tengah dan nasional disajikan pada tabel 2.56.

Tabel 2. 57
Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rp)					Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	12.349	12.816	13.175	13.619	14.023	1,14	3,78	2,8	3,37	2,97
Kabupaten Magelang	9.440	10.011	10.493	10.926	11.343	1,49	6,05	4,81	4,13	3,82
Kabupaten Temanggung	9.408	9.773	10.108	10.519	10.995	0,70	3,88	3,43	4,07	4,53
RATA-RATA GELANG-MANGGUNG	10.399	10.867	11.259	11.688	12.120	1,11	4,57	3,68	3,81	3,70
JAWA TENGAH	11.034	11.377	11.835	12.276	12.746	0,95	3,11	4,03	3,73	3,83
NASIONAL	11.156	11.479	11.890	12.341	12.809	1,30	2,90	3,58	3,79	3,79

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pada Tahun 2025 Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Temanggung telah mencapai 10,995 Ribu Rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, capaian Kabupaten Temanggung masih berada di bawah bahkan paling rendah di antara kabupaten/kota yang ada pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung. Selain itu jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, capaian Kabupaten Temanggung juga masih berada di bawahnya. Namun, bila melihat pertumbuhan pengeluaran per kapita yang disesuaikan capaian dari Kabupaten Temanggung mengungguli seua kabupaten/kota yang masuk dalam Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

2.1.2.7 Ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan

ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut. Ketimpangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui indikator Rasio Gini dan/atau Distribusi Pengeluaran Menurut Bank Dunia.

1. Rasio Gini

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Tingkat ketimpangan menjadi masalah yang perlu dituntaskan bersama. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, oleh sebab itu Pemerintah Daerah seharusnya mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan, dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan tersebut. Ketimpangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui indikator indeks gini atau rasio gini.

Indeks gini atau Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar

antara 0-1, dimana semakin tinggi nilai Rasio Gini menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Perubahan Rasio Gini juga merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk.

Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Temanggung dengan Target RKPD Tahun 2021-2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 58
Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Target RKPD Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Kinerja
2021	0,382	0,374	100%
2022	0,374	0,370	100%
2023	0,363	0,359	100%
2024	0,357	0,380	100%
2025	0,382	0,356	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Perkembangan nilai Rasio Gini Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 secara rinci disajikan pada tabel.

Tabel 2. 59
Perbandingan Rasio Gini pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dengan Capaian Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	0,452	0,427	0,419	0,46	0,375
Kabupaten Magelang	0,384	0,363	0,358	0,33	0,330
Kabupaten Temanggung	0,374	0,370	0,359	0,38	0,356
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	0,403	0,387	0,379	0,39	0,354
JAWA TENGAH	0,372	0,374	0,369	0,37	0,359
NASIONAL	0,381	0,381	0,388	0,38	0,375

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Perkembangan indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2021 hingga Tahun 2025 cenderung mengalami penurunan. Nilai indeks gini yang terus menurun mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan dalam periode tersebut. Penurunan ini mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat. Meskipun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, capaian ini menunjukkan bahwa masih ada lapisan masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan secara merata. Faktor-faktor seperti akses yang tidak merata terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi lainnya dapat menjadi penyebab utama meningkatnya ketimpangan ini.

Indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2025 lebih rendah daripada Jawa Tengah hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata ketimpangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan juga lebih baik dibandingkan capaian nasional.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Temanggung sudah sepenuhnya inklusif, sehingga sebagian besar manfaat dari pertumbuhan tersebut sudah mulai bisa dinikmati oleh kelompok masyarakat secara lebih luas. Indeks Gini Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 0,356 yang menunjukkan arah positif pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Perbandingan nilai Rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Temanggung dan nasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 60
Perbandingan Rasio Perubahan Rasio Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Capaian Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kabupaten Temanggung				Nasional			
	Gini Ratio	Perubahan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan	Gini Ratio	Perubahan	Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan
2021	0,374	-0,008	3,34	5,47	0,381	-0,004	3,7	5,77
2022	0,370	-0,004	5,20	1,86	0,381	0,000	5,31	1,61
2023	0,359	-0,013	5,00	-0,20	0,388	0,007	5,04	-0,27
2024	0,383	0,024	5,04	0,02	0,381	-0,007	5,03	-0,02
2025	0,356	-0,027	5,66	0,64	0,375	-0,006	5,11	0,08

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Data Diolah

Ketimpangan pendapatan memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang digambarkan menggunakan Rasio Gini, dapat diukur dengan pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapita yang mana kedua hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian penduduk di suatu wilayah. Dilihat dari tabel di atas, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung berkorelasi positif terhadap penurunan ketimpangan (Rasio Gini). Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan rata-rata capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 61
Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2021	0,374	-0,008	0,403	-0,008	0,381	-0,004
2022	0,370	-0,004	0,387	-0,004	0,381	0
2023	0,359	-0,011	0,379	-0,011	0,388	0,007
2024	0,383	0,024	0,393	0,014	0,381	-0,007
2025	0,356	-0,027	0,354	-0,039	0,375	-0,006

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Rasio Gini Kabupaten Temanggung mencatatkan nilai sebesar 0,356. Setelah tahun 2020 atau pasca pandemi Covid-19, nilai Rasio Gini mengalami penurunan seiring

dengan kondisi perekonomian yang berangsur pulih sehingga pemerataan pendapatan juga dapat meningkat. Jika dibandingkan dengan rata-rata Purwomanggung dan nasional, Rasio Gini Kabupaten Temanggung memiliki nilai yang lebih kecil meskipun berada pada kategori yang sama yaitu kategori ketimpangan sedang.

Jika dibandingkan dengan target RKP Nasional tahun 2026 baru mencapai 100%, kinerja pencapaian target RKP Kewilayahan sebagaimana disajikan pada tabel.

Tabel 2. 62
Perbandingan Rasio Gini Daerah dengan Target RKP Kewilayahan

Indikator	Target RKP Kewilayahan Nasional Tahun 2026*	Realisasi Capaian Tahun 2025	Kinerja Pencapaian Target RKP Kewilayahan
Rasio Gini	0,379 – 0,382	0,356	100%

Sumber : Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026
BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2026

2. Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria Bank Dunia

Selain Rasio Gini, ukuran lain yang sering digunakan sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk adalah Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia yaitu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- 1. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 20% terendah kurang dari 12%;
- 2. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%; dan
- 3. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%.

Berikut gambaran distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 berdasar kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional dari Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 63
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2021	18,30	18,78	1,24
2022	18,50	18,46	-0,32
2023	18,70	19,52	1,06
2024	18,80	17,83	-1,69
2025	20,12	19,40	1,57

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021-2025), ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dan termasuk kategori rendah (*low inequality*). Pada Tahun 2025 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 19,40%, kondisi tersebut naik 1,57% jika dibandingkan kondisi Tahun 2024 sebesar 17,83%. Perubahan capaian ketimpangan pengeluaran pada Tahun 2025 di Kabupaten Temanggung juga merupakan perubahan tertinggi selama periode 2021-2025 namun masih lebih baik dari target yaitu 20,12.

Perbandingan Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, wilayah Pengembangan Gelangmanggung Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2021-2025 secara rinci disajikan pada tabel.

Tabel 2. 64
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia					Perubahan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Magelang	14,90	16,24	16,07	15,26	15,85	-1,36	1,34	-0,17	-0,81	0,59
Kabupaten Magelang	18,01	18,82	19,03	20,21	17,75	-0,56	0,81	0,21	1,18	-2,46
Kabupaten Temanggung	18,78	18,46	19,52	17,83	19,40	1,24	-0,32	1,06	-1,69	1,57
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	17,23	17,84	18,21	17,77	17,67	-0,23	0,61	0,37	-0,44	-0,10
JAWA TENGAH	18,34	18,51	18,74	18,90	20,02	-0,19	0,17	0,23	0,16	1,12
NASIONAL	17,76	18,06	18,04	18,40	18,65	0,03	0,30	-0,02	0,36	0,25

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, data diolah

Capaian kondisi ketimpangan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 berada diatas capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional namun masih berada dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah yang mana hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perubahan kebijakan dalam efisiensi anggaran sebagaimana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi terbukti memberikan dampak yang positif terhadap penurunan ketimpangan dan peningkatan pemerataan yang lebih baik.

2.1.2.8 Seni Budaya dan Olahraga

Indeks Pembangunan Kebudayaan yang ada di Indonesia perlu dilakukan untuk meningkatkan kemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dasar perundangan terkait Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah dengan adanya UU No 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pada UU No 05 Tahun 2017 mendefinisikan Pemajuan

Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan ini mengacu pada konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO yang menyoroti terkait kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. Namun, implementasi pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan yang ada di Indonesia disesuaikan sesuai dengan konteks kebudayaan Indonesia dan tujuan pemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

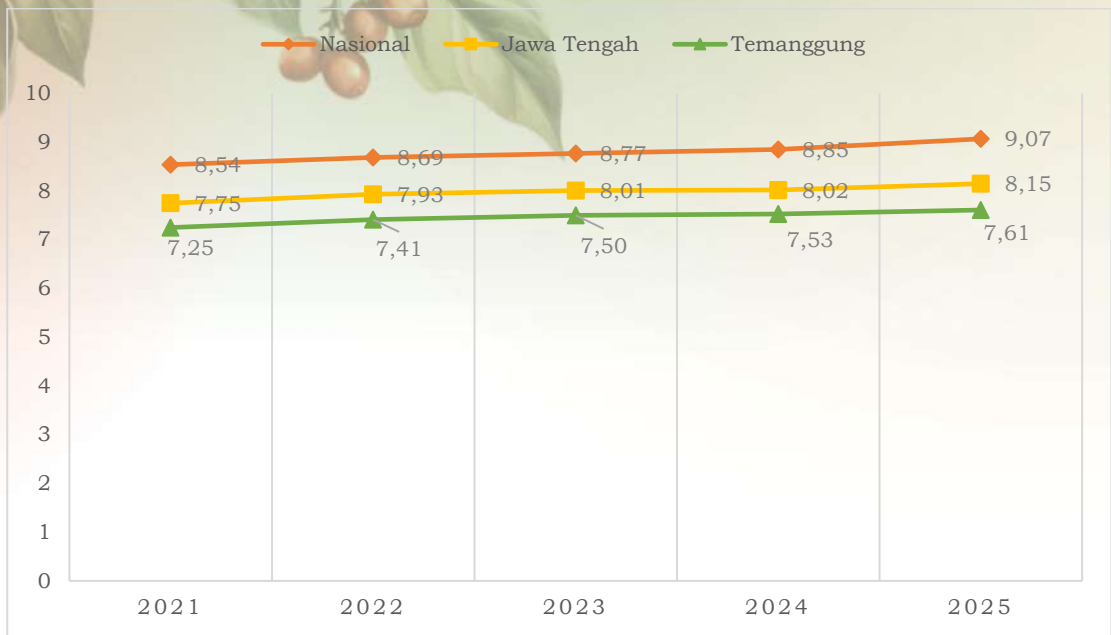
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, mengakhiri kemiskinan, dan memastikan semua laki-laki dan perempuan, terutama masyarakat miskin dan rentan, memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap indikator-indikator pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan secara adil, merata, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah, khususnya kelompok usia 25 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk dalam kelompok usia tersebut, sehingga dapat digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia dari sisi capaian pendidikan di masa lalu. Adapun Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia diatas 25 tahun di

Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada gambar berikut ini.



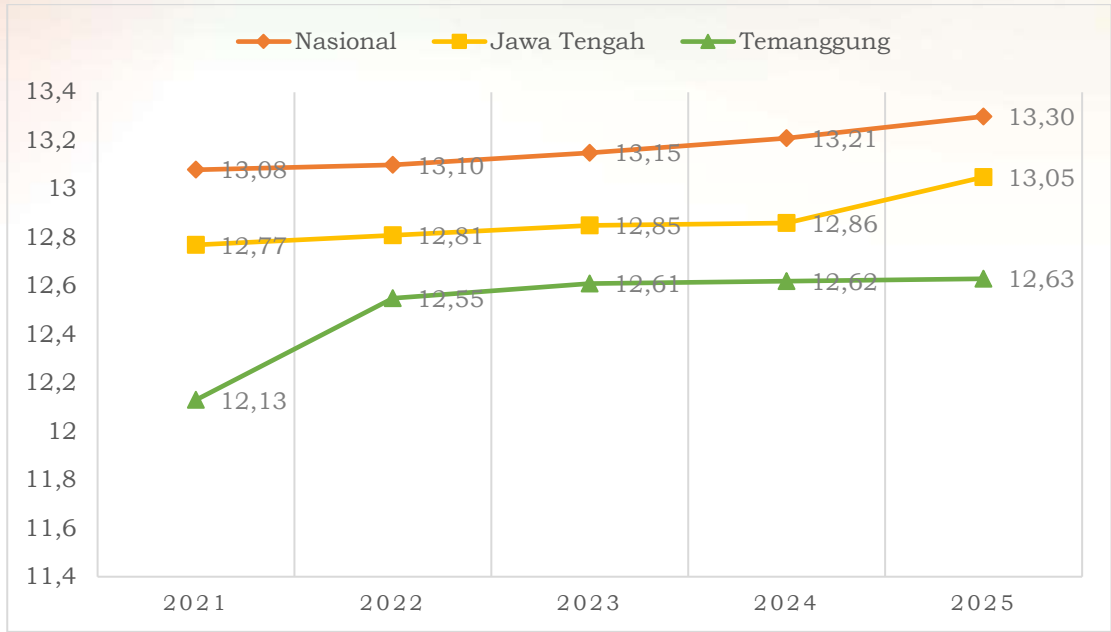
Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Gambar 2. 26
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021–2025

Berdasarkan data BPS Kabupaten Temanggung, Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 25 Tahun menunjukkan tren peningkatan dari 7,24 tahun pada 2020 menjadi 7,61 tahun pada 2025. Ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan pada masa lalu, walau secara umum masih berada di bawah standar 9 tahun wajib belajar. Capaian RLS Penduduk Usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebesar 7,61 atau rata-rata penduduk Usia di atas 25 tahun Kabupaten Temanggung mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 1 SMP atau 7,61 tahun. Angka ini berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2025 RLS Nasional menggambarkan rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan pada kelas 3 SMP atau 9,07 tahun dan di Provinsi Jawa Tengah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 2 SMP atau 8,15 tahun. Rendahnya RLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan kultur/budaya masyarakat, sehingga masih terdapat anak yang putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah dan masih terdapat lulusan peserta didik tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Temanggung, guna mendorong peningkatan RLS.

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan. Adapun Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2024 disajikan pada gambar 2.28 berikut ini.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Gambar 2. 27

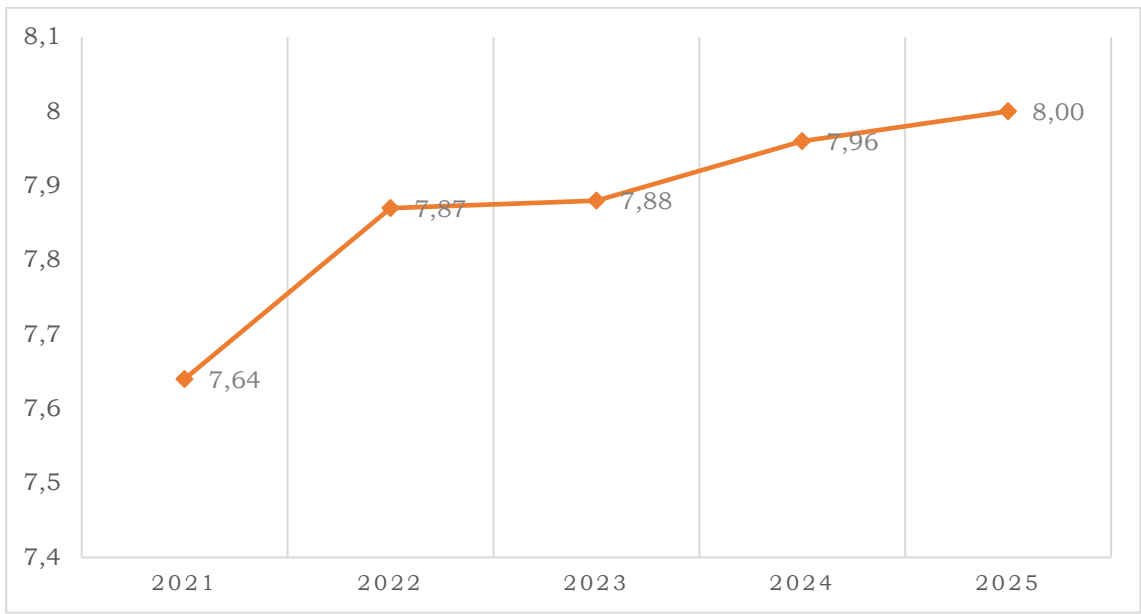
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

Berdasarkan data BPS, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 12,14 tahun pada 2020 menjadi 12,63 tahun pada 2025, yang mencerminkan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kelanjutan pendidikan anak-anak hingga jenjang menengah atas atau bahkan pendidikan tinggi. HLS Kabupaten Temanggung Tahun 2025 tercatat 12,63 tahun, artinya anak-anak di Kabupaten Temanggung yang berusia 7 tahun ke atas pada Tahun 2024, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,63 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, HLS Kabupaten Temanggung masih berada dibawah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 13,05 tahun dan Nasional 13,30 tahun. Meskipun secara capaian absolut HLS Kabupaten Temanggung dibawah provinsi maupun nasional, namun mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2024 yaitu sebesar 0,01 poin atau tumbuh sebesar 0,08%. Rendahnya HLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan belum meratanya kualitas pelayanan satuan pendidikan,

belum tercukupinya kebutuhan pendidik dan kompetensi Pendidik, masih rendahnya kompetensi peserta didik, serta masih adanya kasus anak yang putus sekolah, lulus tidak melanjutkan maupun sama sekali tidak sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di semua jenjang, serta penguatan dukungan terhadap keberlanjutan sekolah anak-anak, agar harapan lama sekolah di Kabupaten Temanggung dapat terus meningkat.

3) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun adalah Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi : DI-DIV, S1, S2, S2 Terapan atau S3. Metodologi dengan Survei yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Gambar 2. 28
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Capaian RLS penduduk usia di atas 15 tahun di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebesar 8,00, naik 0,04 dari capaian tahun 2024 yang sebesar 7,96. Naiknya RLS Kabupaten Temanggung antara lain disebabkan oleh adanya pemerataan akses pendidikan pada jenjang SD dan SMP sebagai persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SD dan SMP.

4) Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional

Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional merupakan indikator yang mengukur kemampuan siswa dalam memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi teks bacaan sesuai jenjangnya. Adapun skor literasi membaca SD/ sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 65
Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021–2025

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SD Umum (%)	NA	54,34	58,24	65,51	66,04
2	SD Keagamaan (%)	NA	48,07	53,89	55,35	58,99
3	SD Kesetaraan (%)	NA	53,38	49,21	61,46	62,40
	Rata-Rata (%)	NA	51,93	53,78	60,77	62,48

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung, skor literasi membaca SD/ sederajat di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 dengan capaian sebesar 51,93 menjadi 62,48 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam memahami dan menganalisis bacaan di jenjang sekolah dasar. Capaian ini tidak lepas dari perbaikan mutu pembelajaran, termasuk penguatan program literasi sekolah. Meskipun begitu, peningkatan skor ini perlu terus dijaga agar lebih banyak siswa mencapai tingkat pemahaman bacaan yang optimal.

5) Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional

Skor literasi membaca siswa SMP/ sederajat memberikan gambaran tentang kemampuan peserta didik dalam memahami bacaan yang lebih kompleks dan bernalar secara kritis. Skor ini juga mencerminkan sejauh mana penguatan literasi pada jenjang sebelumnya berlanjut dan berkembang. Adapun skor literasi membaca SMP/ sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 66
Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021–2025

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SMP Umum (%)	NA	54,34	58,24	76,51	79,42
2	SMP Keagamaan (%)	NA	48,07	53,89	72,51	76,23
3	SMP Kesetaraan (%)	NA	53,38	49,21	61,92	60,92
	Rata-Rata (%)	NA	51,93	53,78	70,31	72,19

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung, skor literasi membaca SMP/ sederajat mengalami peningkatan signifikan, dari

51,93 pada tahun 2022 menjadi 72,19 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca siswa SMP/ sederajat terus membaik, seiring dengan peningkatan kualitas pengajaran dan bahan ajar. Peningkatan ini juga penting untuk mendukung kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dalam berbagai mata pelajaran.

6) Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional

Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional mengukur kemampuan dasar dalam memahami konsep matematika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini menjadi dasar dalam menilai kesiapan siswa untuk menguasai pelajaran yang bersifat logis dan kuantitatif. Adapun skor numerasi SD/ sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 67
Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021–2025

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SD Umum (%)	NA	54,34	58,24	49,50	56,17
2	SD Keagamaan (%)	NA	48,07	53,89	41,89	50,82
3	SD Kesenjangan (%)	NA	53,38	49,21	46,10	55,99
	Rata-Rata (%)	NA	51,93	53,78	45,83	54,33

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Skor Numerasi SD mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 53,78 namun menurun menjadi 45,83 pada Tahun 2024. Sedangkan capaian Triwulan III 2025 mengalami peningkatan menjadi sebesar 54,33. Peningkatan ini menunjukkan adanya gerakan pembiasaan pembelajaran numerasi.

7) Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional

Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana siswa mampu berpikir logis, menyelesaikan persoalan matematis, dan menerapkan pengetahuan numerik dalam konteks nyata. Skor ini juga menjadi gambaran keberhasilan program pembelajaran numerasi dan kualitas guru dalam membimbing siswa memahami matematika secara aplikatif. Adapun skor numerasi SMP/ sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 sebagaimana pada gambar 2.69.

Tabel 2. 68
Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021–2025

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SMP Umum (%)	NA	36,73	42,86	66,48	56,17
2	SMP Keagamaan (%)	NA	34,37	39,18	63,42	50,82
3	SMP Kesetaraan (%)	NA	34,90	46,41	56,88	55,99
	Rata-Rata (%)	NA	35,33	42,82	62,26	63,53

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Skor numerasi SMP/ sederajat menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 35,33 pada Tahun 2022 menjadi 63,53 pada Tahun 2025. Lonjakan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam kemampuan numerasi siswa jenjang menengah pertama. Hal ini mencerminkan hasil dari berbagai upaya peningkatan mutu pengajaran matematika dan pembelajaran yang lebih kontekstual. Skor yang meningkat ini diharapkan terus ditingkatkan agar siswa mampu berpikir logis dan menyelesaikan masalah secara efektif.

8) Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada Asesmen Nasional

Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan. Sesuai dengan kewenangan, jenis pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung yaitu SD SMP Umum, SD SMP Keagamaan dan SD SMP Kesetaraan. Adapun persentase pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SD/ sederajat Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 69
Persentase Siswa SD Sederajat yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Literasi pada Asesmen Nasional Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SD Umum (%)	NA	68,10	76,96	83,98	81,84
2	SD Keagamaan (%)	NA	52,96	65,88	66,04	70,73
3	SD Kesetaraan (%)	NA	58,33	50,00	80,00	68,96
	Rata-Rata (%)	NA	59,80	64,28	76,67	73,84

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung, persentase siswa SD/ sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi selama kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan. Namun berdasarkan data

Triwulan III tahun 2025, capaian persentase literasi membaca SD berdasarkan Asesmen Pendidikan Nasional baru tercapai 73,84%. Hal ini menunjukkan sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Adapun terjadi penurunan capaian pada Triwulan III tahun 2023 disebabkan karena pelaksanaan kegiatan pengisian Sulingjar (Survei Lingkungan Belajar) kurang maksimal dan dukungan orang tua kurang optimal.

9) Persentase siswa SMP Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada Asesmen Nasional

Persentase siswa SMP Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada Asesmen Nasional merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan memahami dan menginterpretasi teks secara kritis. Capaian ini mencerminkan kualitas pembelajaran literasi di jenjang menengah pertama serta efektivitas program peningkatan mutu pendidikan yang diterapkan di Kabupaten Temanggung. Adapun persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SMP/Sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 70
Persentase Siswa SMP Sederajat yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Literasi pada Asesmen Nasional Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SMP Umum (%)	NA	76,23	80,66	87,65	90,18
2	SMP Keagamaan (%)	NA	68,15	77,34	80,40	85,75
3	SMP Kesetaraan (%)	NA	61,22	59,44	60,71	56,42
	Rata-Rata (%)	NA	68,53	72,48	76,25	77,45

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung, persentase siswa SMP/ sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi selama kurun waktu empat tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

10) Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum numerasi pada Asesmen Nasional

Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum numerasi pada Asesmen Nasional merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan dasar berhitung dan berpikir logis siswa

pada jenjang pendidikan dasar. Indikator ini mencerminkan sejauh mana peserta didik mampu memahami konsep matematika dasar yang menjadi fondasi bagi pembelajaran di tingkat selanjutnya. Adapun persentase pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SD/Sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 71
Persentase Siswa SD Sederajat yang Mencapai Standar Kompetensi
Minimum Numerasi pada Asesmen Nasional
Tahun 2021–2025

No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SD Umum (%)	NA	36,65	59,3	73,56	79,70
2	SD Keagamaan (%)	NA	28,35	47,48	54,72	68,20
3	SD Kesetaraan (%)	NA	33,33	50,00	80,00	68,96
	Rata-Rata (%)	NA	32,78	52,26	69,43	72,29

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data rapor pendidikan Kabupaten Temanggung sebagaimana pada tabel, dijelaskan bahwa capaian Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Numerasi selama kurun waktu empat tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

11) Persentase siswa SMP Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum numerasi pada Asesmen Nasional

Persentase siswa SMP Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada Asesmen Nasional mencerminkan kemampuan dasar peserta didik dalam memahami konsep matematika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini penting untuk menilai kualitas pembelajaran numerasi di tingkat menengah serta kesiapan siswa menghadapi tantangan akademik di jenjang pendidikan berikutnya. Adapun persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SMP/ sederajat Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 72
Persentase Siswa SMP Sederajat yang Mencapai Standar Kompetensi
Minimum Numerasi pada Asesmen Nasional
Tahun 2021–2025

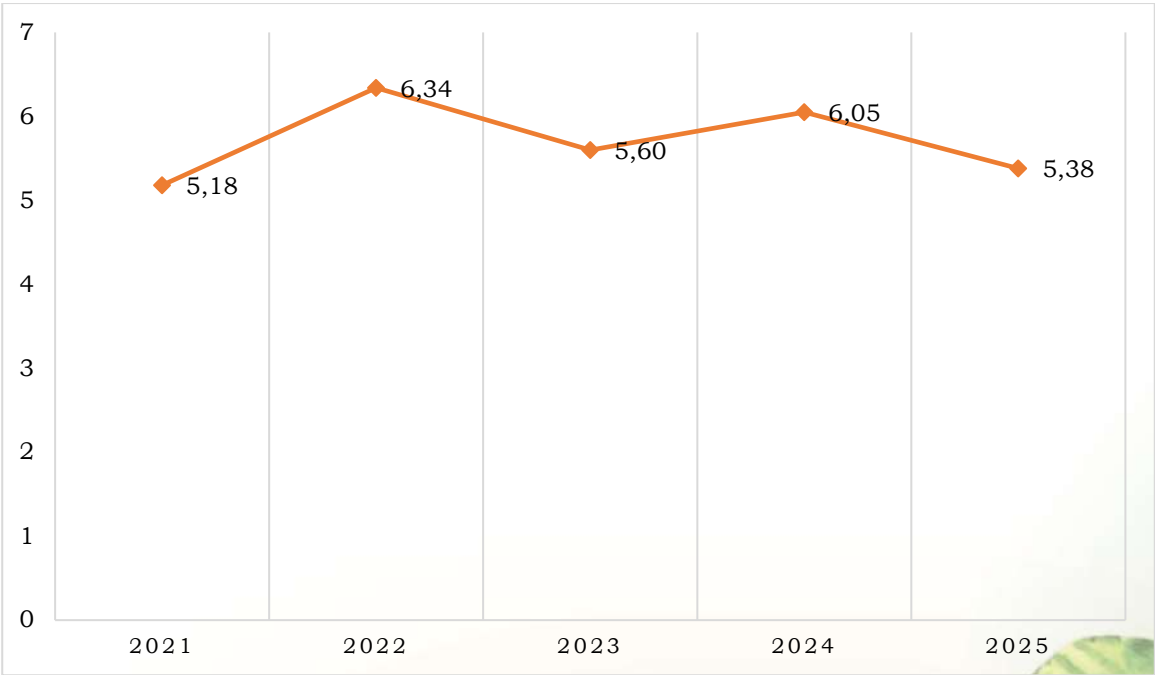
No	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SMP Umum (%)	NA	53,03	59,60	82,79	87,21
2	SMP Keagamaan (%)	NA	44,68	54,54	75,29	83,26
3	SMP Kesetaraan (%)	NA	35,85	45,49	55,71	54,78
	Rata-Rata (%)	NA	44,52	53,21	71,26	75,08

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Persentase siswa SMP/ sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi selama kurun waktu empat tahun di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum, terutama pada jenis pendidikan kesetaraan.

12) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

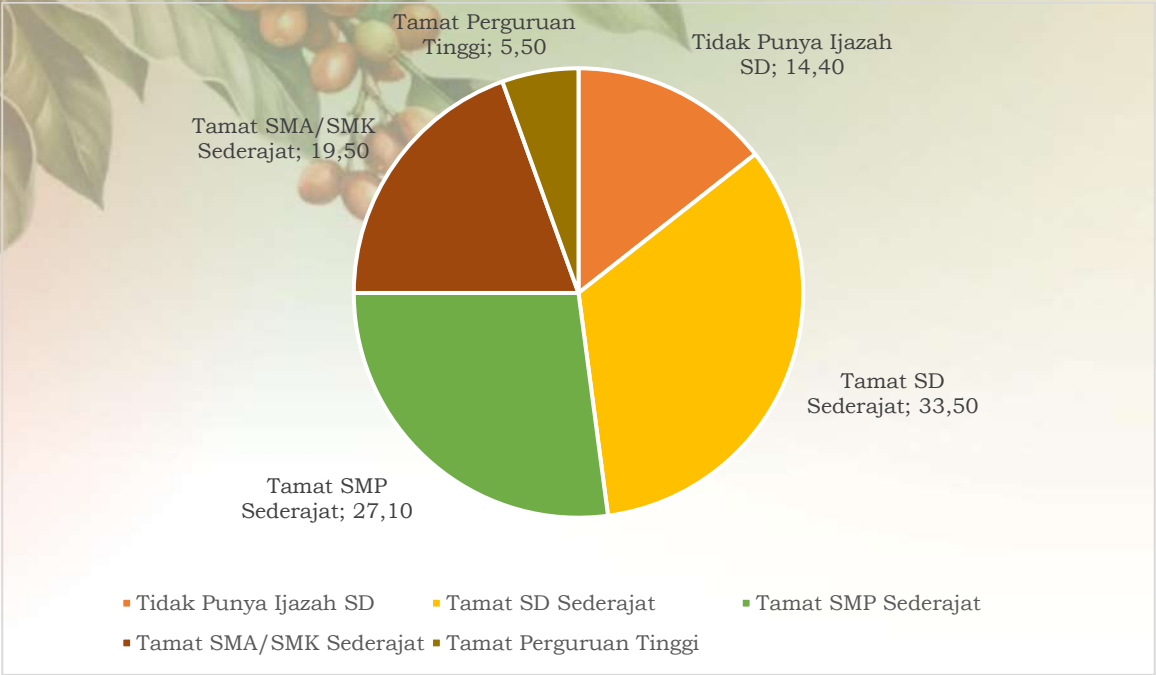
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi bertujuan untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi yang dimaksud meliputi: DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3. Tingginya capaian proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Adapun proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Temanggung disajikan pada gambar 2.28 berikut ini.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (Data Diolah)

Gambar 2. 29
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Apabila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 2. 30
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

13) Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 5-6 tahun merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). Angka Partisipasi Sekolah Usia 5–6 Tahun menunjukkan tren peningkatan dari 89,94% pada tahun 2022 menjadi 93,91% pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 89,75%, hal ini disebabkan karena pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD formal yang relatif belum merata serta kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi partisipasi pendidikan anak. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas anak usia dini di Kabupaten Temanggung telah mendapatkan akses pendidikan pada usia emas perkembangan. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya layanan pendidikan anak usia dini dalam membangun kemampuan fondasi yang krusial bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak di tahap awal kehidupan.

14) Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 tahun adalah

perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah umur 7-15 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Angka partisipasi sekolah usia 7-15 tahun di wilayah Kabupaten Temanggung sangat tinggi, yaitu 98,87% pada 2024, sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 98,41%. Namun belum setiap anak usia 7-15 tahun dapat mengakses layanan pendidikan. Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan siswa ikut mengenyam pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya.

15) Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007 jalur pendidikan nonformal turut diperhitungkan. APS Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan adalah jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/Ula, B/Wustha, C/Ulya). Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi BPS yang tersaji dalam Rapor Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun kesetaraan sebesar 31,37% (kategori rendah), sedangkan tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 35,97% atau proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah kurang.

16) Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan

Persentase satuan pendidikan yang memiliki guru yang mengajar muatan lokal (mulok) bahasa daerah dan/atau seni budaya serta mengarusutamakan kebudayaan merupakan indikator penting dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan sekolah. Kehadiran guru mulok tidak hanya memperkaya kurikulum dengan konten budaya lokal, tetapi juga memperkuat identitas, karakter, dan kebanggaan peserta didik terhadap warisan budaya daerahnya. Implementasi mulok yang berfokus pada bahasa daerah dan seni budaya menjadi bagian dari upaya strategis Kabupaten Temanggung dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan keberagaman sejak dini. Seluruh satuan pendidikan di Kabupaten

Temanggung telah memiliki guru yang mengampu mulok tersebut, yang menunjukkan komitmen kuat dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan.

Adapun indikator kinerja program bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel.

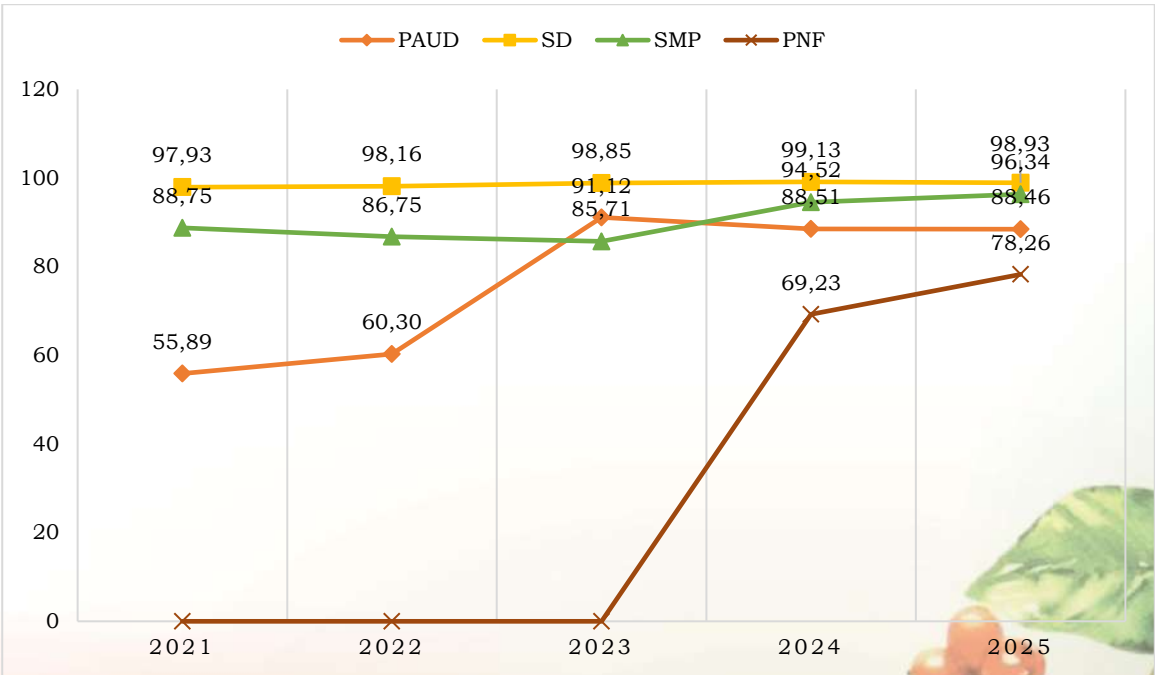
Tabel 2. 73
Gambaran Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Proporsi PAUD terakreditasi minimal B	%	NA	NA	91,12	88,51	88,46
2	Proporsi SD terakreditasi minimal B	%	97,93	98,16	98,85	99,13	98,93
3	Proporsi SMP terakreditasi minimal B	%	88,75	86,75	85,71	94,52	96,34
4	Proporsi Non Formal terakreditasi minimal B	%	NA	NA	NA	69,23	78,26
5	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	%	NA	NA	NA	51,17	47,43
6	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	%	NA	NA	NA	60,31	69,42
7	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	NA	NA	NA	60,36	93,56
8	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	58,55	65,53	55,95	56,64	62,73
9	Persentase Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	%	37,87	48,29	82,40	64,97	59,21
10	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	NA	NA	76,29	86,21	90,00
11	Persentase Pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	%	NA	NA	NA	NA	33,33
12	Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	%	NA	NA	NA	NA	58,21
13	Iklim Inklusivitas SD	Angka	NA	50,52	53,72	52,08	53,25
14	Iklim Keamanan SD	Angka	NA	55,61	67,84	71,18	66,26
15	Iklim Kebhinekaan SD	Angka	NA	61,06	65,75	72,06	68,55
16	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	NA	52,78	55,84	56,79	57,16
17	Iklim Keamanan SMP	Angka	NA	70,79	67,41	69,11	67,69
18	Iklim Kebhinekaan SMP	Angka	NA	59,34	66,47	70,46	67,46
19	Rasio Guru/Siswa SD	Angka	1:17	1:17	1:17	1:14	1:14
20	Rasio Guru/Siswa SMP	Angka	1:17	1:17	1:17	1:17	1:19
21	Rasio Guru/Siswa PAUD	Angka	1:16	1:16	1:16	NA	1:17
22	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	Angka	NA	103,5	97,3	98,47	100,17
23	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	Angka	NA	95,31	91,46	92,01	95,49
24	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	Angka	NA	97,62	109,25	109,75	103,50
25	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	Angka	NA	77,64	86,58	86,57	84,03
26	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (5-6)	Angka	NA	77,62	82,75	84,05	90,72
27	Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	%	NA	NA	NA	99,99	99,06
28	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	Angka	NA	NA	NA	320	401
29	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	Angka	NA	NA	NA	740	1.046
30	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	Angka	NA	NA	NA	933	1.055
31	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	Angka	NA	NA	NA	2.855	3.183
32	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	Angka	NA	NA	NA	276	252
33	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	Angka	NA	NA	NA	305	291

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Indikator kinerja bidang pendidikan tahun 2021–2025 sebagaimana pada tabel 2.76 memberikan gambaran mengenai capaian, tantangan, dan tren perkembangan dalam aspek partisipasi, kualitas satuan pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, serta kondisi sarana prasarana pendidikan di berbagai jenjang. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada permasalahan krusial seperti angka putus sekolah, anak yang tidak melanjutkan pendidikan, dan anak yang belum pernah bersekolah, yang memerlukan intervensi kebijakan yang tepat. Dengan memahami dinamika ini secara menyeluruh, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Akreditasi satuan pendidikan merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan, baik dari sisi manajemen, proses pembelajaran, hingga sarana dan prasarana. Di Kabupaten Temanggung, proporsi satuan pendidikan yang telah terakreditasi minimal B pada jenjang PAUD, SD, SMP, maupun pendidikan nonformal menunjukkan sejauh mana kualitas layanan pendidikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Capaian akreditasi ini tidak hanya menjadi tolok ukur mutu pendidikan, tetapi juga menjadi dasar dalam upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan di berbagai jenjang.



Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 31
Satuan Pendidikan yang Telah Terakreditasi Minimal B pada Jenjang PAUD, SD, SMP, maupun Pendidikan Nonformal Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

1) Proporsi PAUD Terakreditasi Minimal B (SPM)

Proporsi PAUD terakreditasi minimal B pada Tahun 2021-2025 menggunakan data pembagi KB, TK, SPS di Kabupaten Temanggung dengan capaian 88,51% pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025 data yang disajikan adalah TK Negeri dan Swasta di Kabupaten Temanggung dengan capaian 88,46%. Pada tahun 2025 Persentase PAUD Terakreditasi B menggunakan sumber data Rapor Pendidikan. Peningkatan Proporsi PAUD terakreditasi minimal B didukung dengan adanya penerapan SPM Pendidikan, Program Bunda PAUD dan PAUD HI. Adapun untuk peningkatan capaian indikator ini yaitu melalui mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas melalui pemerataan sarpras dan pelatihan peningkatan kompetensi guru.

2) Persentase SD Terakreditasi Minimal B

Tren akreditasi satuan pendidikan SD terus meningkat dari 97,93% pada 2021 menjadi 99,13% pada 2024. Namun pada Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 98,93%. Mulai Tahun 2024 data yang digunakan adalah SD Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi saja. Dari 434 SD Negeri dan Swasta terdapat 375 SD yang telah terakreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh SD telah memenuhi standar mutu minimal nasional. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program peningkatan mutu satuan pendidikan dasar berjalan baik. Meski begitu, masih ada sekitar 1,07% sekolah yang belum mencapai akreditasi minimal B dan harus tetap menjadi sasaran perbaikan dan pembinaan pada tahun 2025. Upaya yang dilakukan yaitu melalui meningkatkan kualitas guru, keterlibatan orang tua serta sumber daya.

3) Persentase SMP Terakreditasi Minimal B

Setelah mengalami penurunan dari 85,71% pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 dengan capaian 94,52%, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2025 yaitu sebesar 96,34%. Mulai Tahun 2024 data yang digunakan adalah SMP Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi saja. Dari 86 SMP Negeri dan Swasta terdapat 66 SMP yang telah terakreditasi dan 63 diantaranya telah mendapat akreditasi minimal B. Hal ini menggambarkan adanya proses pembenahan mutu yang intensif di jenjang SMP. Kenaikan ini merupakan bukti adanya peningkatan kesadaran dan perhatian terhadap standar mutu satuan pendidikan menengah pertama.

4) Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B

Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi minimal B di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebesar 69,23%. Sedangkan pada Tahun 2025 mencapai 78,26%. Pada Tahun 2025 terdapat 17 Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi minimal B dari 23 Satuan Pendidikan Non Formal baik Negeri maupun Swasta yang telah terakreditasi. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 26% satuan pendidikan non formal (seperti PKBM dan LKP) yang belum mencapai standar minimal mutu. Hal ini bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya, kurangnya pelatihan tenaga pendidik, serta belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan. Upaya yang dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola satuan pendidikan dalam mengikuti akreditasi dan peningkatan kapasitas tutor melalui pelatihan dan upaya peningkatan sarana dan prasarana.

5) Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kondisi Baik

Pada Tahun 2024 terdapat 57,17% sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD di Kabupaten Temanggung berada dalam kondisi baik. Adapun capaian pada Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 47,43%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga mempengaruhi jumlah prasarana yang direhabilitasi dan dibangun, keterbatasan ketersediaan lahan untuk pengembangan prasarana sekolah. Namun, angka ini menunjukkan bahwa fasilitas pendukung pembelajaran di tingkat sekolah dasar sebagian telah memenuhi standar kelayakan, baik dari segi bangunan, ruang kelas, maupun fasilitas penunjang lainnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Sarana prasarana yang baik akan mendukung kegiatan belajar mengajar yang nyaman dan efisien.

6) Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP Kondisi Baik

Pada Tahun 2024, berdasarkan data dari Dapodik, terdapat 60,31% sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Temanggung berada dalam kondisi baik. Adapun capaian pada Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 62,42% dari capaian Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya Kebijakan Pemerintah Pusat khususnya kemendidasmen melalui program revitalisasi SMP. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah menengah pertama di Kabupaten Temanggung sebagian telah memiliki fasilitas yang layak untuk mendukung proses pembelajaran. Kondisi sarana

prasarana yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, kenyamanan siswa dan guru, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Meski angka ini sangat tinggi, tetap diperlukan upaya pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas fasilitas secara berkelanjutan, terutama untuk memastikan pemerataan kondisi yang baik di seluruh satuan pendidikan.

7) Persentase Pendidik SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik

Peningkatan drastis persentase PTK SD yang memiliki sertifikat pendidik dari 60,36% pada tahun 2024 menjadi 93,56% di Tahun 2025 yang dipengaruhi karena adanya fasilitasi dan pemberian informasi terkait pelaksanaan PPG. Peningkatan capaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pendidik dan bisa mengatasi hal-hal sebagai faktor penghambat, menggunakan tiap kesempatan yang ada sebagai bahan untuk mengembangkan diri, meningkatkan kedisiplinan, dan tanggung jawab terhadap profesi guru.

8) Persentase Pendidik SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik

Seperti halnya pada jenjang SD, PTK SMP juga mengalami peningkatan dalam persentase kepemilikan sertifikat pendidik, dari 55,95% pada tahun 2023 menjadi 56,64% di Tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan capaian menjadi 62,73%, namun capaian ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem pendataan yang lebih terpadu dan akurat, serta peningkatan koordinasi lintas satuan pendidikan agar informasi yang dihimpun dapat digunakan secara optimal dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan peningkatan mutu pendidikan menengah pertama. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan fasilitasi terkait persyaratan PPG ke semua guru.

9) Persentase Pendidik PNF yang Memiliki Sertifikat Pendidik

Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Non Formal (PNF) yang memiliki sertifikat pendidik merupakan indikator baru pada Tahun 2024. Pada Tahun 2024 masih tercapai 8,30%, sedangkan pada Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 33,33%. Kehadiran indikator ini penting untuk memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kualitas tenaga pendidik di jalur pendidikan nonformal, serta sebagai dasar dalam perencanaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme PTK PNF di masa mendatang. Peningkatan ini didorong dengan adanya upaya dari satuan pendidikan/Pamong Belajar/Tutor untuk mengikuti diklat/ujian sertifikasi pendidik. Adanya peran

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi diklat/ujian sertifikasi pendidik bagi Pamong Belajar/Tutor. Ke depan, konsistensi pencatatan dan kelengkapan data menjadi hal krusial agar indikator ini dapat digunakan secara maksimal dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi mutu pendidikan nonformal.

10) Persentase Instruktur LKP yang Memiliki Sertifikat Metodologi Level 3

Pada tahun 2024, hanya 19,04% instruktur di LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) yang memiliki sertifikat metodologi level 3. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 58,21%. Peningkatan capaian ini didorong karena adanya upaya dari LKP/Instruktur untuk mengikuti diklat/ujian sertifikasi metodologi Level 3. Adapun upaya untuk peningkatan infrastruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 yaitu melalui sosialisasi dan pendampingan kepada LKP untuk mengikuti sertifikasi metodologi Level 3.

11) Iklim Inklusivitas SD

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan inklusif bagi setiap peserta didik sesuai dengan potensi, kondisi dan karakteristik, serta memberikan kesempatan seluas luasnya kepada semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Berikut merupakan capaian Iklim Inklusivitas SD Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 74
Iklim Inklusivitas SD Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SD Umum	N/A	52,98	56,31	54,78	58,68
2	SD Keagamaan	N/A	50,66	53,42	50,67	51,79
3	SD Kesetaraan	N/A	47,91	51,44	50,79	49,28
	Rata-Rata	N/A	50,52	53,72	52,08	53,25

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Iklim Inklusivitas SD dari tahun 2022-2025 mengalami fluktuasi dimana Tahun 2024 (52,08) lebih rendah dari tahun 2023 (53,72). Sedangkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 53,25, yang didukung dengan adanya SK ULD, pelaksanaan asesmen peserta didik berkebutuhan khusus. Iklim Inklusivitas SD merupakan indikator yang dihitung melalui Rapor Pendidikan.

12) Iklim Keamanan SD

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat. Perhitungan iklim keamanan dilakukan dengan indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan; indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan indeks iklim keamanan dengan mengurangkan indeks iklim keamanan dengan indeks iklim keamanan dibagi indeks keamanan dikalikan 100%. Berikut merupakan capaian Iklim Kemanan SD Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 75
Iklim Keamanan SD Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SD Umum	N/A	60,48	70,95	74,51	73,96
2	SD Keagamaan	N/A	55,72	66,3	69,56	63,82
3	SD Kesetaraan	N/A	50,63	66,27	69,48	61,00
	Rata-Rata	N/A	55,61	67,84	71,18	66,26

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel di atas Iklim Keamanan SD pada tahun 2022-2025 mengalami fluktuasi dimana capaian tahun 2024 merupakan capaian tertinggi sebesar 71,18. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 66,26 yang disebabkan karena kurangnya pengawasan secara khusus melalui CCTV terhadap potensi kegiatan bullying di sekolah. Iklim Keamanan SD merupakan indikator yang dihitung melalui Rapor Pendidikan.

13) Iklim Kebhinekaan SD

Iklim kebhinekaan dalam Rapor Pendidikan adalah indikator yang mengukur seberapa baik satuan pendidikan menciptakan lingkungan yang mendukung, menghargai, dan merayakan keragaman agama, budaya, suku, dan latar belakang siswa. Data iklim kebhinekaan diperoleh dari hasil Asesmen Nasional dan digunakan sebagai dasar perencanaan perbaikan kualitas pendidikan, seperti program yang meningkatkan toleransi, kesetaraan, dan pemahaman kebhinekaan di lingkungan sekolah.

Iklim Kebhinekaan di SD, sebagaimana tercermin dalam Rapor Pendidikan, mengukur sejauh mana sekolah berhasil menciptakan

ekosistem yang menerima dan merayakan perbedaan, menjadi komponen penting dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di tingkat satuan pendidikan. Berikut merupakan capaian Iklim Kebhinekaan SD Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 76
Iklim Kebhinekaan SD Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SD Umum	N/A	67,08	69,29	72,29	75,15
2	SD Keagamaan	N/A	60,91	64,01	66,59	65,79
3	SD Kesetaraan	N/A	55,20	63,96	77,29	64,70
	Rata-Rata	N/A	61,06	65,75	72,06	68,55

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Iklim Kebhinekaan SD dari tahun 2022-2025 mengalami fluktuasi dimana tahun 2024 merupakan capaian tertinggi sebesar 72,06. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 68,55, yang disebabkan karena masih terdapat tindakan kurang toleransi antar siswa, guru-siswa di satuan pendidikan.

14) Iklim Inklusivitas SMP

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan inklusif bagi setiap peserta didik sesuai dengan potensi, kondisi dan karakteristik, serta memberikan kesempatan seluas luasnya kepada semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Berikut merupakan capaian Iklim Inklusivitas SMP Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 77
Iklim Inklusivitas SMP Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SMP Umum	N/A	54,87	56,85	58,89	60,24
2	SMP Keagamaan	N/A	52,76	56,27	57,46	58,35
3	SMP Kesetaraan	N/A	50,71	54,40	54,03	52,89
	Rata-Rata	N/A	52,78	55,84	56,79	57,16

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Iklim Inklusivitas SMP dari tahun 2022-2025 mengalami fluktuasi dimana tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan menjadi 57,16 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang didukung dengan adanya SK ULD, pelaksanaan asesmen peserta didik berkebutuhan khusus dan mengkoordinasi dan mengadvokasi pendirian UPTD.

15) Iklim Keamanan SMP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat. Perhitungan iklim keamanan dilakukan dengan indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan; indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan indeks iklim keamanan dengan mengurangkan indeks iklim keamanan dengan indeks iklim keamanan dibagi indeks keamanan dikalikan 100%. Berikut merupakan capaian Iklim Keamanan SMP Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 78
Iklim Keamanan SMP Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SMP Umum	N/A	75,62	69,48	71,7	72,01
2	SMP Keagamaan	N/A	68,50	66,57	69,98	69,92
3	SMP Kesetaraan	N/A	68,24	66,18	65,64	61,13
	Rata-Rata	N/A	70,79	67,41	69,11	67,69

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.81, Iklim Keamanan SMP pada tahun 2022-2025 mengalami fluktuasi dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 70,79. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 67,69. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan disiplin dari guru, keterbatasan sarana dan prasarana keamanan di sekolah, lingkungan sekolah yang tidak tertata, urangnya pendidikan karakter dan pencegahan kekerasan, dan manajemen keamanan sekolah yang lemah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kebijakan dan tata tertib sekolah aman, peningkatan kapasitas SDM sekolah, peningkatan sarana dan prasarana keamanan, pencegahan kekerasan dan perundungan, penguatan partisipasi dan kolaborasi warga sekolah, dan perlu adanya monitoring, evaluasi, dan penegakan disiplin.

16) Iklim Kebhinekaan SMP

Iklim kebhinekaan dalam Rapor Pendidikan adalah indikator yang mengukur seberapa baik satuan pendidikan menciptakan lingkungan yang mendukung, menghargai, dan merayakan keragaman agama, budaya,

suku, dan latar belakang siswa. Data iklim kebhinekaan diperoleh dari hasil Asesmen Nasional dan digunakan sebagai dasar perencanaan perbaikan kualitas pendidikan, seperti program yang meningkatkan toleransi, kesetaraan, dan pemahaman kebhinekaan di lingkungan sekolah.

Iklim Kebhinekaan di SMP, sebagaimana tercermin dalam Rapor Pendidikan, mengukur sejauh mana sekolah berhasil menciptakan ekosistem yang menerima dan merayakan perbedaan, menjadi komponen penting dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di tingkat satuan pendidikan. Berikut merupakan capaian Iklim Kebhinekaan SD Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 79
Iklim Kebhinekaan SMP Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SMP Umum	N/A	61,40	69,47	76,01	73,04
2	SMP Keagamaan	N/A	57,50	66,75	72,76	69,53
3	SMP Kesetaraan	N/A	59,13	63,20	62,60	59,81
	Rata-Rata	N/A	59,34	66,47	70,46	67,46

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Iklim Kebhinekaan SMP tahun 2022-2025 mengalami fluktuasi dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 70,46, sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 67,46. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran warga sekolah dalam memahami pentingnya menghargai perbedaan, keterbatasan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan yaitu guru belum terlatih untuk mengelola kelas yang multikultural atau heterogen, orang tua dan lingkungan sekitar sekolah belum sepenuhnya mendukung penguatan nilai kebhinekaan, sekolah tidak memiliki kebijakan jelas terkait penguatan nilai toleransi dan kebhinekaan, dan adanya konflik atau insiden kecil yang tidak ditangani dengan baik sehingga menyebabkan perselisihan antar siswa yang berbeda latar belakang tidak ditangani secara konstruktif.

17) Rasio Guru/Siswa PAUD

Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Adapun rasio guru/siswa PAUD di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 80

Rasio Guru/Siswa PAUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Guru/Siswa PAUD	Angka	1:16	1:16	1:16	N.A.	1:17

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Rasio guru/siswa PAUD di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tidak dilakukan perhitungan oleh Dindikpora. Namun pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 1:17. Kenaikan rasio ini berarti satu guru harus menangani lebih banyak anak, yang berpotensi mengurangi intensitas interaksi dan kualitas pendampingan dalam proses pembelajaran dan pengasuhan, terutama pada usia dini yang membutuhkan perhatian individual lebih besar. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, masih berada di atas batas ideal bagi sebagian kelompok usia. Oleh karena itu, perlu ada upaya penguatan kapasitas dan distribusi pendidik PAUD agar layanan holistik yang mencakup pendidikan, pengasuhan, dan kesehatan dapat diberikan secara optimal.

18) Rasio Guru/Siswa SD

Rasio guru terhadap siswa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas layanan pendidikan, khususnya dalam hal efektivitas proses pembelajaran di kelas. Rasio yang ideal memungkinkan guru memberikan perhatian yang lebih individual kepada siswa, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Adapun rasio guru/siswa SD Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 81
Rasio Guru/Siswa SD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Guru/Siswa SD	Angka	1:17	1:17	1:17	1:14	1:14

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Rasio guru/siswa SD di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan dari 1:17 pada tahun 2021 menjadi 1:14 pada tahun 2025, mendekati kondisi ideal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, yaitu satu guru untuk setiap 20 siswa. Penurunan rasio ini mencerminkan adanya perbaikan dalam ketersediaan dan distribusi guru di tingkat sekolah dasar, yang memungkinkan peningkatan kualitas pembelajaran melalui interaksi yang lebih intensif antara guru dan siswa. Rasio 1:14 menunjukkan bahwa beban mengajar

guru menjadi lebih proporsional, sehingga diharapkan mampu memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan belajar setiap siswa.

19) Rasio Guru/Siswa SMP

Rasio guru terhadap siswa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pembelajaran dan distribusi tenaga pendidik. Rasio yang ideal memungkinkan guru memberikan perhatian yang lebih personal kepada siswa, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal. Adapun rasio guru/siswa SMP Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 82
Rasio Guru/Siswa SMP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Guru/Siswa SMP	1:17	1:17	1:17	1:12	1:19

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Rasio guru/siswa SMP di Kabupaten Temanggung mengalami sedikit kenaikan dari 1:12 pada tahun 2024 menjadi stabil di angka 1:19 pada 2025. Meskipun rasio ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, angkanya masih berada dalam batas ideal dan cukup baik untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Stabilitas rasio 1:19 menunjukkan bahwa jumlah guru relatif seimbang dengan jumlah siswa, meskipun tetap diperlukan upaya dalam menjaga kualitas dan distribusi guru, terutama di wilayah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Hal ini disebabkan karena persebaran murid sekolah menengah pertama yang tidak merata. Pemerintah daerah perlu memastikan agar peningkatan jumlah siswa di masa depan tetap diimbangi dengan penambahan dan pemerataan guru, guna mempertahankan mutu pendidikan jenjang SMP.

20) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat

Angka Partisipasi Kasar SD menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022, APK mencapai angka 103,5% yang berarti jumlah siswa yang bersekolah di SD melebihi jumlah penduduk usia sekolah dasar. Ini bisa terjadi karena masih banyak anak yang masuk SD tidak sesuai usia ideal, baik yang terlalu muda maupun terlalu tua. Namun, pada 2023 terjadi penurunan ke angka 97,3%, sebelum naik kembali menjadi 98,47% di tahun 2024, dan pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan menjadi 100,17%. Peningkatan ini bisa menandakan perbaikan dalam peraturan usia masuk sekolah atau bisa juga menjadi indikasi menurunnya daya tarik atau akses terhadap

pendidikan dasar. Meski angka tahun 2025 cukup tinggi, pemerintah perlu terus mendorong pemerataan akses pendidikan agar seluruh anak usia SD mendapatkan hak pendidikan secara tepat waktu dan sesuai usia.

21) Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat

Tren Angka Partisipasi Murni SD justru mengalami penurunan, dari 95,31% di 2022 menjadi 92,01% di 2024, sedangkan tahun pada tahun 2025 mengalami peningkatan kembali menjadi 95,49%. Adanya peningkatan capaian ini menunjukkan Besarnya animo masyarakat dalam mengikuti pembelajaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, budaya dan kondisi sosial masyarakat untuk menyekolahkan anak. Meski angka masih tergolong tinggi, penurunan berturut-turut selama dua tahun terakhir perlu menjadi dasar evaluasi program wajib belajar dan pemerataan pendidikan dasar.

22) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat

Angka Partisipasi Kasar SMP meningkat tajam dari 97,62% pada tahun 2022 menjadi 109,75% pada 2024, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 103,50%. Nilai yang melebihi 100% menunjukkan bahwa terdapat siswa yang tidak berada pada rentang usia ideal SMP yang masih bersekolah di jenjang ini. Kondisi ini bisa disebabkan oleh anak-anak yang terlambat masuk sekolah atau yang sebelumnya putus sekolah dan kembali melanjutkan pendidikan. Hal ini juga bisa terjadi apabila banyak siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. Selain itu, ini juga bisa menjadi sinyal positif bahwa program kejar paket atau pendidikan kesetaraan berhasil menjangkau peserta didik yang sempat tertinggal.

23) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat

Angka Partisipasi Murni SMP menunjukkan peningkatan dari 77,64% pada 2022 menjadi 86,57% di 2024, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 84,03%. Hal ini disebabkan karena adanya faktor Kebijakan dan program pemerintah yang berubah-ubah, keterbatasan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sekolah, masih adanya keluarga dengan faktor ekonomi dan bantuan finansial yang rendah, kurangnya kesadaran dan dukungan orang tua maupun lingkungan sekitar. Angka tersebut masih berada di bawah 100%, yang berarti masih ada anak usia SMP yang belum dapat mengakses pendidikan sesuai jenjangnya.

24) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (5-6)

Angka Partisipasi Murni PAUD mengalami peningkatan dari 77,62% pada 2022 menjadi 90,72% di tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Peningkatan ini kemungkinan besar merupakan hasil dari kampanye lembaga pendidikan terkait PAUD serta dorongan dari masyarakat untuk memberikan fondasi pendidikan sejak dini. Meskipun demikian, angka ini belum mencapai 100%, yang berarti masih ada sebagian anak usia 5–6 tahun yang belum mengakses PAUD. Perluasan akses, terutama di daerah tertinggal, serta dukungan finansial bagi keluarga kurang mampu akan membantu menggenjot partisipasi PAUD.

25) Persentase Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik

Tingkat profesionalitas pendidik PAUD menunjukkan tren negatif, dari 82,40% pada 2023 menjadi 64,97% pada 2024. Sedangkan pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan menjadi 59,21%. Hal ini disebabkan karena kuota PPG Dalam Jabatan yang terbatas. Adapun yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu melalui penataan administrasi di Dapodik agar memenuhi syarat untuk bisa terpanggil mengikuti PPG Dalam Jabatan.

26) Angka Putus Sekolah SD Sederajat

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 320 siswa jenjang SD sederajat di Kabupaten Temanggung mengalami putus sekolah. Pada tahun 2025 angka putus sekolah mengalami peningkatan sebesar 401 siswa SD yang putus sekolah. Angka ini menjadi perhatian penting karena mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan akses pendidikan dasar bagi seluruh anak usia sekolah. Berbagai faktor bisa menjadi penyebab putus sekolah, seperti kondisi ekonomi keluarga, faktor geografis, pernikahan dini, atau kurangnya motivasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan strategi pencegahan, seperti program beasiswa, pendampingan sosial, atau penguatan layanan pendidikan alternatif yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa.

27) Angka Putus Sekolah SMP Sederajat

Sebanyak 933 siswa jenjang SMP sederajat tercatat putus sekolah pada tahun 2024 di Kabupaten Temanggung, namun pada tahun 2025 terdapat 1.055 siswa putus sekolah pada jenjang SMP. Transisi dari

pendidikan dasar ke menengah atas masih menghadapi tantangan serius. Tingginya angka putus sekolah di jenjang ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan, seperti kesiapan akademik, dukungan orang tua, kondisi sosial ekonomi, serta aksesibilitas dan kenyamanan lingkungan belajar di tingkat SMP. Upaya strategis seperti program pendampingan transisi, layanan konseling, serta pemberian bantuan biaya pendidikan dan transportasi sangat penting untuk memastikan siswa dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan menengah pertama secara tuntas.

28) Persentase Siswa Kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD

Pada tahun 2024, persentase siswa kelas 1 SD yang berasal dari jenjang TK atau PAUD di Kabupaten Temanggung mencapai 99,99%, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan capaian menjadi 99,06%. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan yang mewajibkan peserta didik kelas 1 harus memiliki ijazah TK atau PAUD. Namun, kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar sudah sangat tinggi. Selain itu, angka ini juga mencerminkan keberhasilan program transisi PAUD ke SD yang semakin baik, baik dari segi akses, partisipasi, maupun kesiapan anak dalam menghadapi pembelajaran di tingkat dasar.

29) Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD Sederajat

Pada tahun 2024, sebanyak 740 siswa yang lulus dari jenjang SD sederajat di Kabupaten Temanggung tercatat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau sederajat. Adapun pada tahun 2025 angka LTM SD meningkat drastis menjadi 1.046 anak. Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) ini menjadi sinyal penting bahwa masih terdapat hambatan dalam keberlanjutan pendidikan, terutama pada masa transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama. Beragam faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya dukungan lingkungan sekitar dapat menjadi penyebab utama siswa tidak melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, dari pemerintah daerah akan melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan melalui koordinasi dengan pemerintah desa.

30) Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP Sederajat

Pada tahun 2024, Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) jenjang SMP sederajat di Kabupaten Temanggung mencapai 2.855 siswa, pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 3.183 siswa. Jumlah ini tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa tantangan keberlanjutan pendidikan tidak hanya terjadi pada transisi SD ke SMP, tetapi juga semakin nyata pada peralihan dari pendidikan menengah pertama ke jenjang pendidikan menengah atas. Tingginya angka LTM ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan biaya, kebutuhan untuk bekerja membantu keluarga, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan, atau kurangnya akses ke sekolah menengah atas, khususnya di daerah terpencil.

31) Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun

Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 252 anak usia 7–12 tahun di Kabupaten Temanggung belum pernah mengenyam pendidikan atau belum pernah sekolah sama sekali. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 276 anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pemenuhan hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan, khususnya pada usia pendidikan dasar. Faktor penyebabnya bisa beragam, mulai dari kondisi sosial ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, hingga keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan di wilayah tertentu.

32) Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun

Pada tahun 2025, sebanyak 291 anak usia 13–15 tahun atau usia setara jenjang SMP di Kabupaten Temanggung tercatat belum pernah bersekolah. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 305 anak. Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) ini menunjukkan bahwa permasalahan akses pendidikan masih cukup signifikan, bahkan pada kelompok usia remaja awal yang seharusnya sudah menempuh pendidikan menengah pertama. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, pernikahan dini, keharusan bekerja membantu keluarga, atau kurangnya dukungan lingkungan terhadap pentingnya pendidikan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Selama periode 2021 hingga 2025, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan menunjukkan berbagai capaian yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Sebagai bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sektor kesehatan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

1) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Kabupaten Temanggung selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus membaik sebesar 76,16 tahun pada Tahun 2025.



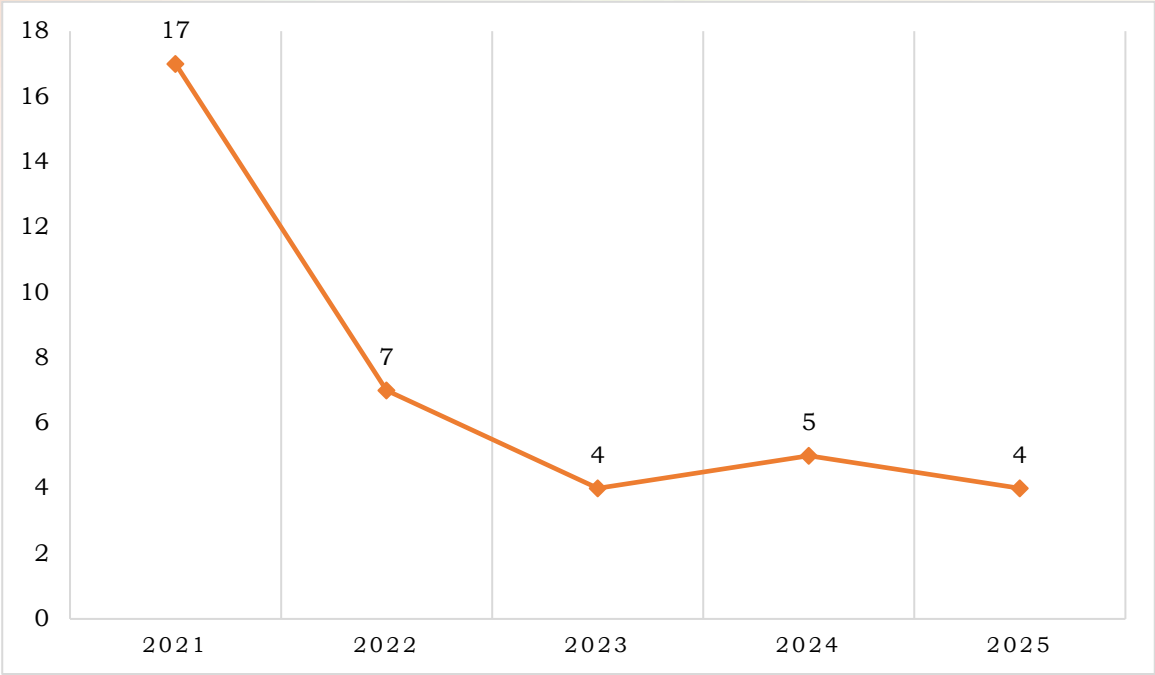
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 32
Usia Harapan Hidup Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Dari gambar dapat dilihat bahwa pencapaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan. Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2025, naik dari 75,64 menjadi 76,16 tahun. Pada tahun 2025, apabila dibandingkan dengan capaian Usia Harapan Hidup di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Usia Harapan Hidup Kabupaten Temanggung lebih tinggi. Pencapaian UHH yang terus membaik dari tahun ke tahun didukung dengan keberhasilan upaya pembangunan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung yang ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, jaminan kesehatan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, serta tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan.

2) Jumlah Kasus Kematian Ibu

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama yaitu jumlah kasus kematian ibu. Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 33
Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan tren yang positif dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2021 terjadi lonjakan yang tinggi pada jumlah kematian ibu yang tercatat ada 17 kasus kematian ibu. Lonjakan tersebut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Namun angka tersebut berhasil ditekan drastis pada tahun-tahun berikutnya di mana pada tahun 2025 tercatat jumlah kematian ibu sejumlah 4 kasus dengan lokus kejadian berada di Kecamatan Bejen, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tembarak dan Kecamatan Pringsurat. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan intervensi Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu, terutama dalam pelayanan antenatal, persalinan, dan pencegahan komplikasi kebidanan. Upaya inovatif seperti pendampingan ibu hamil berisiko tinggi, validasi data, dan pelatihan kader kesehatan turut memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat. Tidak hanya itu, penurunan jumlah kematian ibu sangat dengan aksesibilitas ibu hamil ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, serta Fasilitas Kesehatan Rujukan

Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau Rumah Sakit termasuk di dalamnya dukungan jaminan kesehatan masyarakat (JKN) dengan cakupan kepesertaan yang telah mencapai 94,48%. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, penganggaran untuk program JKN Kabupaten Temanggung tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 83
Rincian Anggaran Program JKN Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Target Kepesertaan (Peserta)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Kepesertaan (Peserta)	Keterangan
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda Kelas 3	31.282.070.400	68.414	31.270.125.600	69.537	• Pagu dari Pajak Rokok = Rp 18.296.409.600,- • Pagu dari DBHCHT = Rp 12.985.660.800,- • Realisasi anggaran = 99,96% • Realisasi kepesertaan = 100%
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Mandiri Kelas 3	994.560.000	29.600	983.640.000	32.041	• Pagu dari pajak rokok = Rp 994.560.000,- • Realisasi anggaran = 98,90% • Realisasi kepesertaan = 100%
Pendampingan Kegiatan (BBM, ATK, Kertas, Tinta, Makmin Rapat, Perjadin Biasa dan Dalam Daerah)	15.107.118		12.310.400		• Pagu dari pajak rokok = Rp 14.772.400,- • Pagu dari DBHCHT = Rp 334.718,-
Jumlah	32.291.737.518		32.266.070.000		• Realisasi anggaran = 99,92%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berkaitan dengan kepesertaan JKN tersebut, ketika seorang ibu hamil memiliki kepesertaan aktif JKN maka hambatan finansial untuk melakukan Antenatal Care (ANC) yang berkualitas, deteksi risiko tinggi, hingga persalinan aman di fasilitas medis dapat diantisipasi. JKN menjamin perlindungan menyeluruh bagi ibu hamil, mulai dari pemeriksaan rutin, penanganan kegawatdaruratan, hingga perawatan pasca melahirkan (nifas). Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif dan berkelanjutan yang dilakukan telah memberi dampak positif dalam menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Temanggung.

3) Jumlah Kematian Balita

Jumlah kematian balita merupakan kematian anak berusia di bawah lima tahun (0-59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam suatu wilayah dan periode tertentu karena sebab apapun. Jumlah kematian balita digunakan sebagai indikator kesehatan masyarakat, mencerminkan akses terhadap layanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta faktor sosial dan ekonomi

yang mempengaruhi kelangsungan hidup anak. Penurunan jumlah kematian menunjukkan perbaikan dalam sistem kesehatan dan kesejahteraan anak di suatu daerah. Berikut merupakan jumlah kematian balita di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

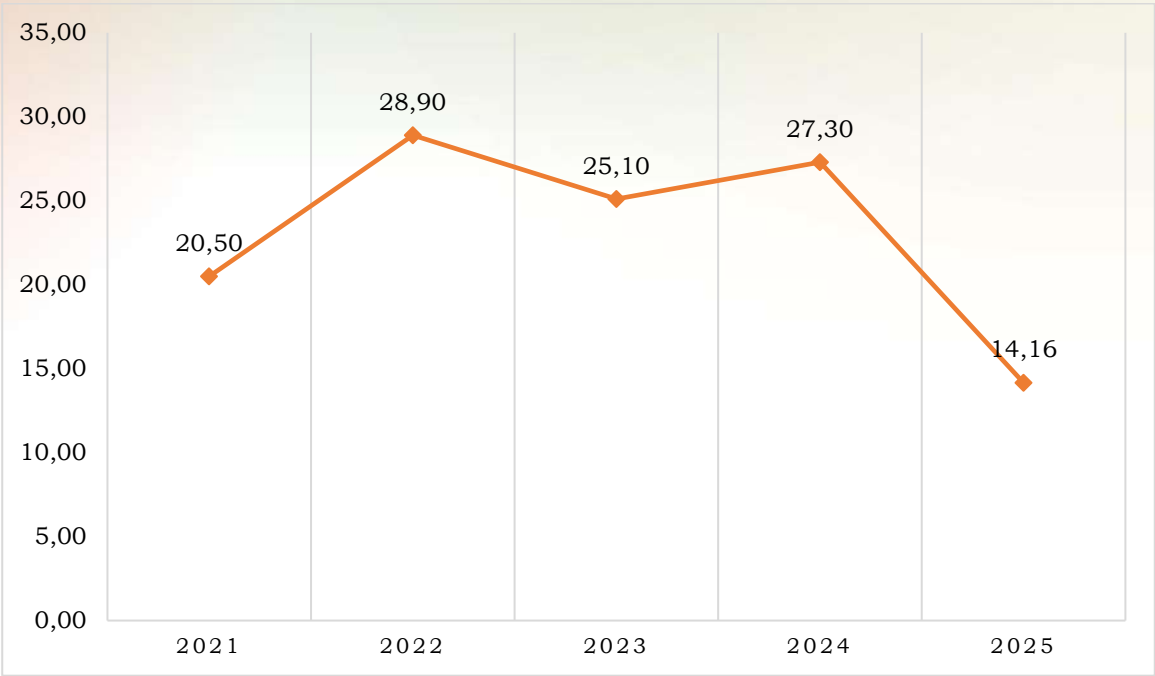
Gambar 2. 34
Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian jumlah kematian balita pada tahun 2021-2025 memiliki angka yang fluktuatif. Dilihat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 jumlah kematian balita terus mengalami penurunan dari 143 kasus di tahun 2023 menjadi 95 kasus di tahun 2025. Hal yang menjadi tantangan terkait penurunan jumlah kematian balita adalah angka kelahiran hidup di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin turun karena keberhasilan program KB; adanya faktor risiko ibu hamil yang tinggi dan infeksi pada bayi/balita. Dinas kesehatan terus berupaya menguatkan upaya-upaya pendukung penurunan angka kematian balita yaitu pendeteksian faktor risiko kehamilan secara rutin dan berkala; peningkatan dan pengelolaan pendidikan pola asuh terhadap bayi dan balita serta pendidikan/ pelatihan/ pemberdayaan kegiatan deteksi faktor risiko pada bayi dan balita oleh keluarga.

4) Prevalensi Stunting pada Balita

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat juga masih cukup tinggi sebesar 27,30 menurut pendataan dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Sedangkan pada tahun 2025 prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan menjadi 14,16, semakin membaik bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, 2025

Gambar 2. 35
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

Prevalensi stunting balita di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif. Angka yang fluktuatif pada stunting dikarenakan stunting memiliki banyak faktor yang mempengaruhi antara lain: pola asuh balita yang kurang optimal, kekurangan asupan gizi yang memadai, adanya infeksi dan penyakit pada bayi dan balita, anemia dan gizi kurang pada ibu hamil, sanitasi yang buruk dll. Dalam intervensi penanganannya, stunting membutuhkan waktu yang cukup lama dan berkelanjutan yaitu mencakup siklus hidup (remaja hingga balita atau 1000 hari kelahiran hidup). Penanganan stunting juga membutuhkan intervensi yang spesifik dan sensitif serta dukungan dan keterlibatan dari berbagai sektor.

Di Kabupaten Temanggung penanganan stunting telah dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal pada ibu hamil KEK, dan balita yang memiliki masalah gizi, kegiatan pengamatan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin melalui posyandu serta pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan tumbuh kembang balita melalui aplikasi e-PPGBM stunting. Selain itu telah dilaksanakan monitoring oleh Dinas Kesehatan terhadap Puskesmas terkait

kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di lapangan secara rutin.

5) Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar

Proporsi Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar merupakan indikator baru yang mencerminkan kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan di Kabupaten Temanggung. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, baik dari segi infrastruktur, peralatan medis, maupun tenaga kesehatan. Kehadiran indikator ini diharapkan mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar merupakan proporsi puskesmas yang 80% desa di wilayahnya memiliki setidaknya 1 unit pelayanan kesehatan tingkat desa dan melayani ≤ 30 ribu penduduk atau jarak ≤ 120 km. capaian triwulan III tahun 2025 berstatus sangat tinggi dengan capaian 61,54% dari target 60% yang telah ditetapkan. Meskipun demikian perlu dilakukan peningkatan infrastruktur fisik terhadap PKD maupun puskesmas yang tidak dapat beroperasi karena kondisi yang tidak lagi memenuhi standar keamanan atau kenyamanan modern. Selain itu juga perlu dilakukan persiapan pemenuhan sarpras dan alkes serta SDM untuk pemerataan fasilitas kesehatan.

6) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk. Cakupan kepesertaan JKN menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terstandar dan terjangkau. Adapun cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada Gambar 2.35.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 36
Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan signifikan selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, cakupan JKN masih berada di angka 75,60%, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 81,08% pada tahun 2022. Lonjakan besar terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 95,44%, dan meningkat sedikit menjadi 95,54% pada tahun 2024, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 93,45%. Pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan capaian Cakupan Kepesertaan JKN antara lain dengan melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan untuk meningkatkan anggaran kepesertaan PBPUPemda untuk mendukung tercapainya UHC, melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk dapat meningkatkan kepesertaan JKN melalui berbagai segmen kepesertaan dan mendorong masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk menjadi peserta JKN dari segmen mandiri dan perusahaan untuk mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta JKN dari segmen PBPUBadan Usaha (BPJS Kesehatan).

7) Persentase Kecamatan Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan

Indikator ini merupakan indikator baru dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029, persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan merupakan Persentase Kecamatan dengan kualitas air minum, kualitas udara dalam ruang, kualitas pangan yang memenuhi

syarat serta merupakan kecamatan sehat. Untuk memperoleh Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan dapat dihitung menggunakan rumus Kecamatan dengan kualitas air minum memenuhi syarat di 70% sarana air minum dan 30% rumah tangga, 70% tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat, kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat di 70% tempat fasilitas umum dan 30% pemukiman serta 70% capaian nilai tatanan kecamatan sehat. Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan sampai dengan Tahun 2025 sudah mencapai 55% (sangat tinggi) dimana sudah ada 11 dari 20 kecamatan yang memenuhi syarat.

8) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah

Merupakan Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan adalah rekomendasi dari lintas sektor berupa tindak lanjut dari hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Capaian sampai dengan Tahun 2025 untuk indikator ini adalah 100% atau sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tidak ada rekomendasi yang masuk untuk ditindaklanjuti.

9) *Net Death Rate* (NDR)

Net Death Rate (NDR) digunakan untuk mengukur mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit, khususnya berkaitan dengan proporsi kematian pasien yang diharapkan dapat dihindari. Angka ini mengukur kualitas perawatan dengan mengasumsikan bahwa kematian yang terjadi setelah 48 jam perawatan adalah indikator yang lebih relevan untuk menilai efektivitas pelayanan *Net Death Rate* (NDR) merupakan Kematian setelah 48 jam dalam perawatan di RSUD. Berikut merupakan capaian NDR Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025.



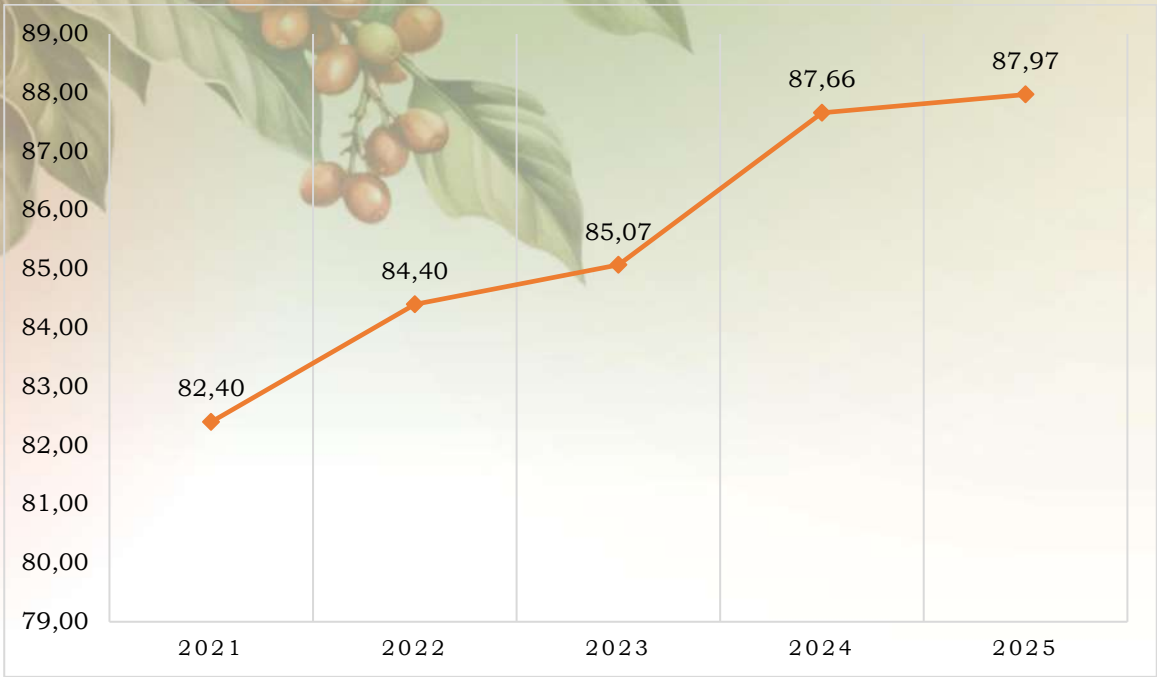
Sumber: RSUD Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 37
Net Death Rate Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

Berdasarkan data *Net Death Rate* (NDR) dari tahun 2021 hingga 2025 terlihat bahwa angka kematian pasien setelah 48 jam perawatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, NDR tercatat sebesar 18,64 dan meningkat menjadi 19,29 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 15,00 yang menunjukkan adanya perbaikan mutu pelayanan atau keberhasilan dalam penanganan kasus-kasus kritis. Meski demikian, pada tahun 2024 NDR kembali meningkat cukup tajam menjadi 20,36, yang dapat mengindikasikan adanya peningkatan kasus berat, keterlambatan rujukan, atau faktor eksternal lainnya yang memengaruhi angka kematian. Pada tahun 2025, NDR menurun kembali menjadi 18,48, menunjukkan adanya upaya perbaikan mutu layanan dan peningkatan efektivitas penanganan pasien.

10) Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan di fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit daerah. Di Kabupaten Temanggung, IKM RSUD menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan publik dalam sektor kesehatan yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Adapun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kabupaten Temanggung disajikan pada gambar 2.40.



Sumber: RSUD Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 38
Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

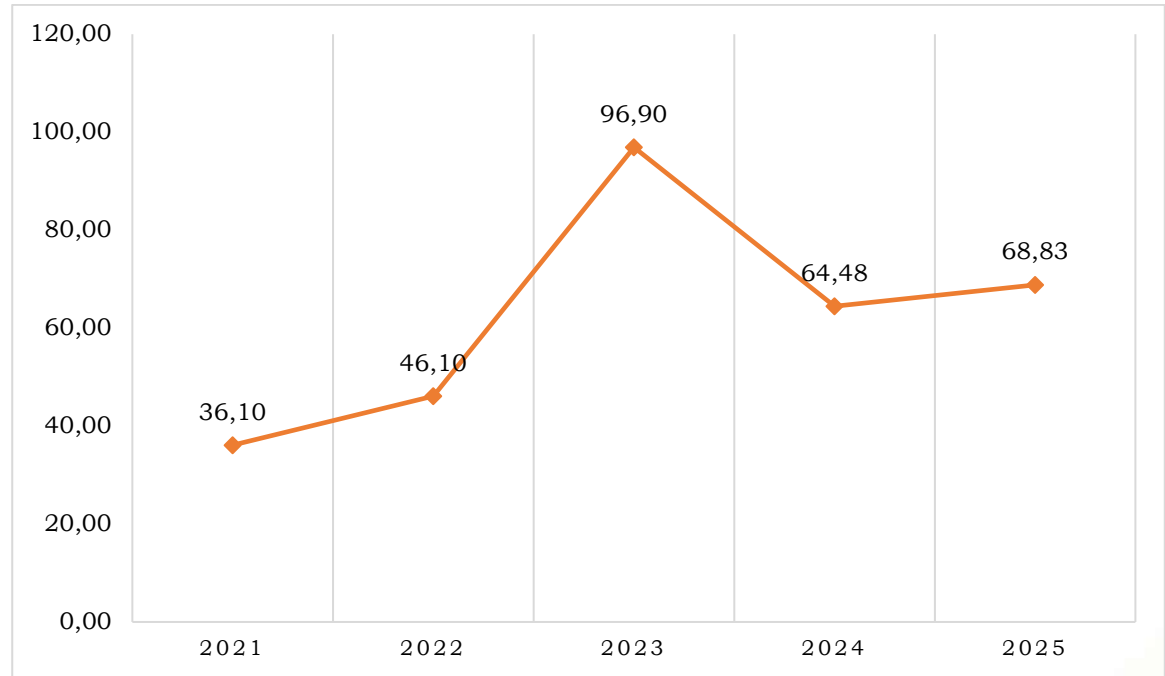
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021 tercapai 82,40%, selanjutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan berkelanjutan, mencapai 84,4% di 2022, naik lagi menjadi 85,07% di 2023, 87,6% pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 87,97%. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan kualitas pelayanan rumah sakit, baik dari aspek medis, administratif, maupun kenyamanan fasilitas. Kenaikan IKM ini mencerminkan bahwa RSUD semakin mampu menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan yang prima dan manusiawi.

11) Persentase Anggota Rumah Tangga dengan Aktivitas Fisik yang Cukup

Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup merupakan persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (≥ 150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia ≥ 10 tahun pada jangka waktu yang sama. Indikator ini merupakan indikator baru di dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 pada bidang urusan kesehatan. Adapun capaian untuk tahun 2025 sebesar 3,72% atau sudah berstatus sangat tinggi. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang juga memantau aktifitas fisik masyarakat selain itu juga terdapat kegiatan posyandu ILP atau posyandu yang terintegritas layanan primer sehingga sasaran pelayanan telah menyeluruh sampai dengan kunjungan ke keluarga.

12) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) adalah persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. *Treatment Coverage* menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dapat terjangkau oleh program pengendalian tuberkulosis. Berikut merupakan capaian Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) di Kabupaten Temanggung tahun 2021-2025.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 39
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021-2023 yaitu dari 36,10% menjadi 96,90%, akan tetapi pada tahun 2024 terdapat penurunan karena adanya peningkatan target kasus dari 867 kasus menjadi 1.357 kasus sehingga persentase capaiannya menjadi 64,48%. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan capaian menjadi 68,83%. Kendati mengalami peningkatan namun banyak ditemukan hambatan dalam pengentasan masalah tuberkulosis ini seperti

keterbatasan anggaran berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan terduga TBC, kader komunitas MSI (Mentari Sehat Indonesia) merupakan project NGO, jadi keberadaannya tidak tentu dan hanya sesuai kontrak, belum optimalnya informasi dan edukasi tentang TBC di masyarakat (pemahaman bahwa TBC harus diobati sampai tuntas masih kurang, masyarakat masih menganggap TBC dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan tuntas), keterbatasan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan terduga TBC, seperti *catridge* TCM, pot dahak, reagen ZN, serta belum maksimalnya dukungan LP/LS dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC seperti untuk kegiatan skrining dan penemuan kasus serta dukungan bagi pasien TBC.

Adapun gambaran capaian indikator kinerja program urusan kesehatan di Kabupaten Temanggung periode Tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel 2.84.

Tabel 2. 84
Gambaran Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	12,72	13,23	13,04	11,84	11,55
4	Angka kematian neonatal	per 1000 kelahiran hidup	9,44	9,15	9,21	8,24	8,02
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	99,09	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	81,64	92,95	100	100	60,26
7	Prevalensi <i>wasting</i> balita	%	NA	NA	NA	8,5	3,93
8	Insiden Stunting balita (kasus baru)	%	NA	NA	NA	5,3	1,51
9	Persentase anemia pada ibu hamil	%	13,64	2,82	11,41	11,46	11,75
10	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	84,92	82,05	100	98,80	94,97
11	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	%	69,25	89,07	100	99,21	99,71
12	Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas sesuai standar	%	89,52	83,22	100	94,61	95,41
13	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	NA	NA	NA	NA	41,26
14	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	88,91
15	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	%	NA	NA	NA	NA	77,10
16	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	%	NA	NA	NA	96,67	96,67
17	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	NA	NA	NA	NA	100

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
18	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	%	NA	NA	NA	NA	80,65
19	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	67,88	95,65	100	127,35	129,69
20	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	73,49	87,03	100	96,28	120,20
21	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	92,50	100	100	108,20	103,20
22	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	30,97	84,78	100	90,03	69,01
23	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	102,63	104,20	100	106,77	102,33
24	Prevalensi obesitas	Angka	NA	NA	NA	15	8,77
25	Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	%	NA	NA	NA	65,38	100
26	Insidensi Hepatitis B	per 100.000 penduduk	NA	NA	NA	5,10	5,33
27	Prevalensi Kusta	per 10.000 penduduk	NA	NA	NA	0,12	0,02
28	Eliminasi Rabies	%	NA	NA	NA	0	0
29	Penurunan angka kematian dengue	%	NA	NA	NA	0,2	0
30	Eliminasi Malaria	%	NA	NA	NA	100	100
31	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	79,1	100	100	102,33	99,62
32	Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	%	NA	NA	NA	100	100
33	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	NA	NA	NA	71,01	68,69
34	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis	%	NA	NA	NA	75,00	91,89
35	Persentase desa/kelurahan STBM	%	NA	NA	NA	NA	85,12
36	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	%	NA	NA	NA	83,81	55,96
37	Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	%	NA	NA	NA	NA	80,00
38	Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	NA	NA	NA	NA	2,56
39	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1000 penduduk	NA	NA	NA	2,50	2,35
40	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	NA	NA	NA	NA	100
41	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	NA	NA	NA	NA	54,29
42	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan	%	NA	NA	NA	83,00	99,34

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berbagai indikator seperti cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta upaya promotif dan preventif, menjadi tolok ukur keberhasilan program kesehatan. Banyak indikator menunjukkan tren positif dan terdapat beberapa indikator baru dalam rangka mengukur kinerja pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Indikator baru tersebut sebagaimana pada

tabel 2.86. Sedangkan Gambaran pencapaian indikator kinerja bidang kesehatan yang telah dilaksanakan periode 2021 – 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1) Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 6 kali (K6) selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga hingga persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP/SIPB). Berdasarkan definisi tersebut, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 sebagaimana pada tabel 2.85.

Tabel 2. 85
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan K6	10.740	10.388	1.453	8.422	7.358
2	Jumlah sasaran ibu bersalin	10.740	10.388	12.146	8.422	7.358
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	11.96	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Tabel 2.87, selama periode 2021-2024, cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar konsisten di angka 100% kecuali pada tahun 2023 yang hanya mencapai 11,96%. Pada tahun 2025 capaian tetap sama seperti tahun 2024 yaitu 100%. Dalam indikator ini sasaran menggunakan angka estimasi, dimana perhitungan berdasarkan data riil tahun 2024 dimana nantinya akan dapat dilakukan pergeseran sasaran riil sesuai yang ada di lapangan pada akhir tahun. Selain itu kurang optimalnya capaian dikarenakan pelaksanaan pendampingan ibu hamil yang mempunyai faktor resiko kehamilan; pemberian pelayanan ANC sampai dengan nifas sesuai standar dan sosialisasi perencanaan kehamilan sehat kepada masyarakat masih proses pelaksanaan oleh Dinas Kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melalui melatih kader kesehatan untuk turut medampingi, mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan serta gencar melakukan sosialisasi terkait semua aspek kesehatan ibu hamil dalam rangkaian kegiatan KIA (kelas ibu hamil, kunjungan ANC, posyandu, dll). Kesadaran Ibu Hamil

untuk memeriksakan kehamilannya juga sudah cukup tinggi, kserta komitmen tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil juga sudah tinggi.

2) Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Setiap ibu bersalin berhak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan dilakukan oleh bidan dan/atau dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Adapun persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada tabel 2.86 berikut ini.

Tabel 2. 86
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	9.792	9.300	8.914	8.222	7.358
2	Jumlah sasaran ibu bersalin	9.792	9.300	8.914	8.222	7.358
3	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sebagaimana pada tabel 2.88, cakupan ibu bersalin yang memperoleh pelayanan sesuai standar mencapai 100% selama tahun 2021–2024, begitu juga dengan capaian tahun 2025 yang juga 100%. Dinas Kesehatan terus meningkatkan upaya-upaya untuk layanan bersalin sesuai standar yaitu di fasilitas kesehatan dan ditangani oleh tenaga penolong persalinan. Dinas kesehatan juga berinovasi untuk peningkatan cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dengan melatih kader kesehatan untuk turut mendampingi, mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan; gencar melakukan sosialisasi kesehatan ibu hamil di setiap kegiatan KIA dan melakukan koordinasi dengan tenaga ahli (SPOG) utk melengkapi semua SOP pada setiap tindakan kebidanan terutama pada persalinan

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi

usia 0–11 bulan, termasuk masa neonatal, di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. AKB menjadi salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Indikator AKB di Kabupaten Temanggung menjadi salah satu fokus perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan karena mencerminkan efektivitas pelayanan kesehatan sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan. Adapun AKB di Kabupaten Temanggung ditampilkan pada tabel 2.87.

Tabel 2. 87
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kasus kematian bayi	124	123	116	89	85
2	Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa)	9.749	9.294	8.897	8.196	7.358
3	Angka Kematian Bayi	12,72	13,23	13,04	11,84	11,55

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Angka kematian bayi pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan dan menurun di tahun 2023-2024 hingga terakhir tahun 2025 dengan capaian 11,55 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi angka kematian bayi senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi angka kematian bayi senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil. Upaya mengedepankan program-program tersebut berhasil menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 yaitu menjadi 7,69 per 1.000 kelahiran hidup.

4) Angka Kematian Neonatal

Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari. Periode ini merupakan masa ketika bayi baru lahir beradaptasi dengan kehidupan di luar rahim. Kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada tabel 2.88.

Tabel 2. 88
Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025

1	Jumlah bayi usia 0-28 hari yang meninggal	93	85	82	69	59
2	Jumlah Kelahiran Hidup	9.749	9.294	8.897	8.196	7.358
3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	9,54	9,15	9,21	8,42	8,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Tabel 2.88, angka Kematian Neonatal di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan selama periode 2021 hingga 2025 dari 9,54 menjadi 8,02 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun jumlah kelahiran hidup mengalami penurunan dari tahun ke tahun, upaya Dinas Kesehatan dalam memperkuat intervensi kesehatan ibu dan bayi terbukti berdampak positif terhadap penurunan angka kematian. Namun, masih terdapat kendala seperti kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal serta pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal. Selain itu, kelengkapan sarana prasarana di Puskesmas, khususnya untuk penanganan kegawatdaruratan neonatal, belum merata dan masih memerlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani kasus darurat. Oleh karena itu, perbaikan sistem rujukan dan penguatan pelayanan pra-rujukan sangat diperlukan untuk menjaga dan menurunkan angka kematian neonatal.

5) Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merupakan salah satu indikator SPM Bidang Kesehatan dengan target 100% setiap tahunnya atau dengan kata lain semua bayi baru lahir harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Adapun jumlah bayi baru lahir dan persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 89

Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	9.740	9.209	8.786	8.181	7.291
2	Jumlah sasaran bayi baru lahir	9.740	9.294	8.786	8.181	7.291
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	99,09	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Pada tahun 2021 seluruh bayi baru lahir telah mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. Pada Tahun 2022 capaiannya hanya 99,09% turun dari capaian tahun sebelumnya. Adapun

pada tahun 2025 kembali tercapai 100% sama seperti capaian tahun 2023 dan 2024. Dalam indikator ini sasaran menggunakan data riil bayi baru lahir pada tahun 2024 dan nantinya akan dapat dilakukan pergeseran sasaran riil sesuai yang ada di lapangan pada akhir tahun. Capaian ini diperoleh dikarenakan adanya tindakan optimalisasi pemeliharaan dan pembangunan fasilitas kesehatan yang lengkap (RS; Puskesmas, Klinik) sebagai fasilitas layanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Temanggung termasuk tersedianya puskesmas PONED (Ngadirejo, Pringsurat; Gemawang; Bejen) untuk mempermudah akses layanan Kesehatan yang terus dilakukan perbaikan.

6) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Setiap balita memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai standar, dan pemenuhan hak ini menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan balita secara optimal melalui berbagai program, seperti pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, serta pelayanan gizi dan penanganan penyakit balita. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Posyandu dan Puskesmas, dengan dukungan tenaga kesehatan dan kader terlatih. Capaian pelaksanaan pelayanan kesehatan balita dapat dilihat pada tabel 2.90.

Tabel 2. 90
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah balita usia 12-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	42.083	40.199	43.520	40.033	39.875
2	Jumlah sasaran balita usia 12-59 bulan	51.545	43.250	43.520	41.699	39.397
3	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	81,64	92,95	100	96,00	101,21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Cakupan pelayanan balita mengalami peningkatan signifikan dari 81,64% pada tahun 2021 menjadi 100% di tahun 2023, dan mengalami peningkatan drastis pada tahun 2025 menjadi 101,21%. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah meningkatkan kesiapan Puskesmas dalam tatalaksana persalinan dan penanganan kegawatdaruratan melalui Puskesmas PONED. Pemenuhan sarana prasarana juga dilakukan untuk mendukung layanan Puskesmas Ramah Anak. Selain itu, kegiatan kelas

balita digerakkan secara aktif dan berhasil menjangkau sasaran masyarakat secara luas.

7) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar

Anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami penurunan dari 84,92% (2021) menjadi 82,05% (2022) namun mengalami kenaikan menjadi 100% (2023) sebelum kemudian sedikit menurun menjadi 98,80% (2024). Pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 94,97% dari capaian tahun sebelumnya. Dalam upaya peningkatan capaian Dinas kesehatan sudah mulai melaksanakan dengan pihak sekolah untuk pemantauan kesehatan secara virtual maupun offline bila memungkinkan serta sosialisasi untuk menanamkan kesadaran siswa untuk aktif mendeteksi kesehatan pribadi dan segera menghubungi pihak sekolah/tenaga kesehatan bila ada gejala.

8) Prevalensi Wasting Balita

Prevalensi wasting balita merupakan Persentase anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -2 SD pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Berikut merupakan capaian prevalensi wasting balita tahun 2021 – 2025.

Tabel 2. 91
Prevalensi Wasting Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Prevalensi wasting balita	n.a.	n.a.	n.a.	8,5	3,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Prevelensi wasting balita di Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2025 sebesar 3,93% atau 1.665 balita yang wasting dari 41.165 balita. Capaian ini lebih rendah dibanding tahun 2024 yang sebesar 8,50%. Hal ini dikarenakan permasalahan gizi di indonesia masih menjadi perhatian penting yang wajib diatasi dengan intervensi sensitif dan spesifik gizi dan telah dilakukan upaya peningkatan monitoring dan evaluasi pelaporan dan pelacakan kasus balita bermasalah gizi di lapangan. namun juga masih terdapat kendala pemahaman masyarakat dalam hal program intervensi spesifik seperti pemberian pmt lokal dengan beranggapan bahwa intervensi tersebut merupakan makanan utama sehingga permasalahan gizi salah satunya seperti wasting masih perlu diatasi yaitu pemahaman

masyarakat dalam hal program intervensi spesifik seperti pemberian PMT lokal dengan beranggapan bahwa intervensi tersebut merupakan makanan utama sehingga permasalahan gizi salah satunya seperti wasting masih perlu diatasi.

9) Insiden stunting balita (kasus baru)

Insiden Stunting balita (kasus baru) merupakan Persentase kasus stunting baru pada anak usia 0-59 bulan pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Berikut merupakan capaian insiden stunting balita (kasus baru) di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025.

Tabel 2. 92
Insiden Stunting Balita (kasus baru) di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Insiden Stunting Balita (Kasus Baru)	n.a.	n.a.	n.a.	5,3	1,51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Insiden Stunting balita (kasus baru) di Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 1,51 dibandingkan tahun 2024 yang tercapai 5,3. Hal ini dikarenakan peningkatan monitoring dan evaluasi pelaporan dan pelacakan kasus ibu hamil bermasalah gizi (KEK, Risiko KEK dan Anemia) di posyandu, puskesmas dan lapangan.

10) Persentase Anemia pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil merupakan salah satu masalah kesehatan yang penting untuk dipantau karena dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin. Persentase anemia ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program kesehatan ibu hamil. Sebanyak 20-40% penyebab utama kematian pada Ibu pasca melahirkan. Anemia Defisiensi besi (ADB) pada ibu hamil menngkatkan resiko terjadinya pendarahan, preeklampsia, infeksi, dan beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah, bayi dengan anemia ataupun kekurangan zat besi, bahkan kematian pada bayi. Adapun persentase anemia pada ibu hamil di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel 2.93 berikut ini.

Tabel 2. 93
Persentase anemia pada ibu hamil di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ibu hamil anemia	1.465	343	1092	998	931
2	Jumlah ibu hamil yang diperiksa	10.737	12.146	9.573	8.707	1.926
3	Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	13,64	2,82	11,41	11,46	11,75

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Persentase anemia pada ibu hamil di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024, dengan nilai dari 13,64% pada tahun 2020 menurun menjadi 11,75% pada tahun 2025. Hal ini didukung dengan ketersediaan tablet Fe yang sudah lebih baik serta adanya sosialisasi pentingnya konsumsi Fe bagi ibu hamil selain itu tersediannya program pemeriksaan Hb pada ibu hamil sehingga dapat diketahui ibu hamil yang anemia. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berinovasi untuk melakukan peningkatan pengawasan minum tablet tambah darah.

11) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar sesuai Standar

Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar merupakan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil skrining kesehatan yang dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah, pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara. Berikut capaian cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025.

Tabel 2. 94
Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96.443	81.813	109.836	112019	106.188
2	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar	113.569	99.708	109.836	113384	113.815
3	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standa	84,92	82,05	100	98,80	94,97

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Pada tahun 2025 persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 94,97%. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan untuk capaian skrining dilaksanakan bulan Mei dan November akan tetapi masih ada anak sekolah yang belum terskrining sehingga capaian belum optimal. Dalam indikator ini sasaran menggunakan angka estimasi, dimana perhitungan berdasarkan data riil tahun 2024 dimana nantinya akan dapat dilakukan pergeseran sasaran riil sesuai yang ada di lapangan pada akhir tahun. Dalam upaya peningkatan capaian Dinas kesehatan sudah mulai melaksanakan kerjasama dengan pihak sekolah untuk pemantauan kesehatan secara virtual dan *offline* bila memungkinkan serta sosialisasi untuk menanamkan kesadaran siswa untuk aktif mendeteksi kesehatan pribadi dan segera menghubungi pihak sekolah/tenaga kesehatan bila ada gejala.

12) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 s.d 59 Tahun) Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar mengharuskan seluruh penduduk dalam rentang usia tersebut memperoleh layanan skrining kesehatan secara menyeluruh. Skrining ini bertujuan untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit, menjaga produktivitas, serta mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Adapun cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) yang sesuai standar di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021–2025 disajikan dalam tabel 2.95.

Tabel 2. 95
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15 s.d 59 Tahun) Sesuai Standardi Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah warga negara Indonesia usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining sesuai standar	357.786	456.236	516.364	520.721	525.488
2	Jumlah warga negara Indonesia usia 15-59 tahun	516.638	512.226	516.364	524.877	527.021
3	Persentase warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	69,25	89.07	100	99,21	99,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.95, capaian indikator ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 69,25% pada tahun 2021 menjadi hampir universal sebesar 99,21% pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun tahun 2025 sudah tercapai sebesar 99,71%, disebabkan karena adanya kendala

pada pemeriksaan posbindu yang belum optimal karena tidak mampu menyelenggarakan tempat periksaan standar yaitu pemeriksaan berat badan untuk indikator obesitas, tekanan darah untuk identifikasi hipertensi, pemeriksaan gula darah dan kesehatan jiwa. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat kurang optimal dan belum adanya pengganggaran daerah terkait kegiatan SPM.

13) Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Warga Usia 60 Tahun Keatas mendapatkan pelayanan kesehatan

Setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia 60 tahun keatas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Adapun cakupan warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 sebagaimana pada tabel 2.96 berikut.

Tabel 2. 96
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Warga Usia 60 Tahun Keatas
mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah warga negara Indonesia berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan minimal 1 kali dalam satu tahun	99.987	91.826	117.293	120.976	128.179
2	Jumlah semua warga negara Indonesia berusia 60 tahun atau lebih	111.691	110.336	117.293	127.874	134.352
3	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	89,52	83,22	100	94,61	95,41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.96, cakupan skrining lansia juga menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2025 mengalami kenaikan capaian menjadi 95,41% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercapai 94,61%. Hal ini mencerminkan komitmen kuat terhadap pelayanan kesehatan lansia. Dengan populasi lansia yang terus meningkat, cakupan skrining ini menjadi sangat penting. Sebagai bentuk intervensi, Dinas Kesehatan melaksanakan berbagai upaya inovatif seperti aktivasi kegiatan Posyandu Lansia, peningkatan kapasitas kader, serta pelibatan lintas sektor dalam mendukung kegiatan skrining kesehatan masyarakat.

14) Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dan ditularkan melalui droplet dari orang yang sudah terinfeksi. Dalam upaya pengendalian TB, pemerintah menetapkan indikator layanan pemeriksaan penunjang TB sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan. Target indikator ini adalah 100%, yang berarti seluruh orang dengan gejala atau yang dicurigai TB wajib mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai standar untuk memastikan diagnosis dan pengobatan tepat waktu. Pelaksanaan indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan layanan kesehatan dasar. Adapun persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 sebagaimana pada tabel 2.97.

Tabel 2. 97
Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	5.462	8.115	8.577	9.332	9.503
2	Jumlah orang terduga TBC	8.046	8.484	8.577	7.328	7.312
3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	67,88	95.65	100	127,35	129,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel, terjadi peningkatan signifikan dalam cakupan pelayanan pemeriksaan penunjang bagi orang terduga TBC di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, hanya 95,65% dari orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, namun angka ini terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2023 dan tetap dipertahankan pada tahun 2024 sehingga dapat mencapai 127,35%. Pada tahun 2025 kembali terjadi peningkatan capaian menjadi 129,69%. Hal ini disebabkan antara lain adanya kader komunitas Mentari Sehat Indonesia untuk kegiatan investigasi kontak pasien TBC, sudah terbentuknya DPPM (Distric Public Private Mix) untuk jejaring layanan kesehatan TBC pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta, tersedianya anggaran BOK Puskesmas untuk kegiatan screening aktif pasien TBC baik oleh kader maupun petugas, terbentuknya SK Tim P2TBC (Percepatan Penanggulangan TBC) dan tersusunnya Perbup RAD (Rencana Aksi Daerah) Penanggulangan TBC.

15) Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel CD4, yang berperan penting dalam melawan infeksi. Jika tidak segera ditangani, HIV dapat berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*), yaitu kondisi di mana tubuh kehilangan kemampuan untuk melawan penyakit. Penularan HIV umumnya terjadi melalui hubungan seksual tanpa pengaman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah yang terkontaminasi, serta dari ibu hamil yang terinfeksi kepada bayinya. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah penyebaran virus serta meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV (ODHIV). Program deteksi dini HIV menjadi salah satu indikator penting dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, dengan target pelayanan sebesar 100% pada kelompok populasi berisiko. Adapun persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 sebagaimana pada tabel 2.98.

Tabel 2. 98
Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.338	11.086	11.230	10.406	12.572
2	Jumlah orang beresiko HIV	12.706	12.738	11.230	10.808	10.459
3	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV sesuai standar	73,49	87.03	100	96,28	120,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel cakupan pelayanan deteksi dini HIV bagi orang dengan risiko terinfeksi di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, persentase cakupan masih berada di angka 73,49%, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 100% pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 96,28% dan kembali mengalami kenaikan drastis pada tahun 2025 menjadi 120,20%. Faktor penghambat belum optimalnya capaian pelayanan orang beresiko terinfeksi HIV di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah penjarangan pada kelompok populasi kunci masih belum maksimal, masih ada populasi beresiko yang menolak atau ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan HIV,

seperti pada kelompok LSL, ibu hamil dan pasien TB; masih adanya ODHIV yang belum open status sehingga pelaksanaan notifikasi pasangan belum maksimal; masih terdapatnya stigma dan diskriminasi pada ODHIV di lingkungan masyarakat sehingga banyak ODHIV yang enggan untuk mencari perawatan medis atau melakukan terapi ARV; dan banyak temuan kasus baru yang meninggal sebelum pengobatan (keterlambatan deteksi dini). Namun, pelayanan deteksi dini HIV di Kabupaten Temanggung didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, keberadaan LSM Kalandara dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Smile Plus yang aktif melakukan penjangkauan populasi kunci melalui kegiatan VCT mobile maupun rujukan statis ke puskesmas atau rumah sakit, serta adanya dukungan anggaran dari Global Fund AIDS. Selain itu, dukungan lintas sektor dan lintas program juga berperan dalam peningkatan skrining HIV/AIDS, terutama pada ibu hamil, pasien TB, dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

16) Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular (PTM) yang paling banyak diderita oleh masyarakat dan sering kali tidak menimbulkan gejala awal yang jelas. Kondisi ini berisiko menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal apabila tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Oleh karena itu, hipertensi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi termasuk dalam indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Adapun persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 sebagaimana pada tabel 2.99.

Tabel 2. 99
Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	66.107	187.378	209.511	208.619	148.667
2	Jumlah estimasi penderita Hipertensi	213.442	221.010	209.511	231.727	215.413
3	Prevalensi Kabupaten Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	30,97	84.78	100	90,03	69,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Tabel 2.99, cakupan pelayanan untuk penderita hipertensi meningkat pesat dari 30,97 pada tahun 2021 menjadi 90,03% (2024), namun pada tahun 2025 menurun menjadi 69,01%. Tantangan yang muncul dalam capaian program ini dikarenakan adanya pola pikir masyarakat terkait kunjungan ke pelayanan kesehatan yang dilakukan hanya saat sakit serta adanya rekapitulasi data kasus hipertensi dari fasilitas kesehatan swasta yang belum melaporkan kepada Dinas Kesehatan. Dalam pelaporan data by name by address dari faskes swasta belum optimal karena laporan belum rutin dilakukan sehingga evaluasi masih belum berjalan optimal. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan cakupan pelayanan penderta hipertensi antara lain dengan mendorong pelaksanaan deteksi dini dan penemuan kasus hipertensi melalui kerjasama lintas program yang ada di Puskesmas; mendorong peningkatan pelayanan kasus hipertensi sesuai standar serta menghimpun data dari faskes swasta di wilayah kerja Puskesmas.

17) Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Diabetes Melitus (DM), atau yang dikenal juga sebagai penyakit kencing manis, merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular (PTM) yang disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah akibat gangguan pada sekresi insulin. Seiring dengan pola hidup yang kurang sehat, prevalensi penyakit DM cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sebagaimana halnya dengan hipertensi. Kondisi ini menjadikan DM sebagai salah satu fokus utama dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan bagi penderita DM ditetapkan sebagai salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Adapun persentase penderta Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 sebagaimana tabel 2.100 berikut.

Tabel 2. 100
Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.456	13.066	13.469	12.007	12.512
2	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka Prevalensi nasional	10.223	10.584	13.469	11.097	12.124

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	92,50	100	100	108,20	103,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel, persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021–2025. Capaian ini meningkat dari 92,5% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023, bahkan melampaui 108,20% pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 108,20%. Namun pada tahun 2025 menurun menjadi 103,20%. Capaian ini masih belum optimal dikarenakan Pola pikir masyarakat yang jika belum merasakan sakit belum mau ke pelayanan Kesehatan; data kasus dari fasilitas kesehatan swasta banyak yang belum masuk; dan sistem pelaporan ASIK yang rumit dan sering maintenance. Namun capaian ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan tidak hanya menjangkau seluruh estimasi jumlah penyandang DM berdasarkan prevalensi nasional, tetapi juga kemungkinan mencakup kasus baru yang belum terdeteksi sebelumnya atau rujukan dari wilayah lain.

18) Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2018 sesuai dengan regulasi Permenkes. Layanan ini bersifat promotif dan preventif, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik), mencegah kekambuhan, serta menghindari tindakan pemasungan. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat Puskesmas di wilayah kerjanya, melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan pelayanan meliputi edukasi, evaluasi kondisi jiwa, pemantauan kepatuhan pengobatan, peningkatan kebersihan diri, serta pelatihan aktivitas sederhana untuk mendukung fungsi sosial dan kemandirian ODGJ berat. Pelayanan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak-hak dasar kelompok rentan.

Tabel 2. 101
Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar	2.030	2.061	2.102	2.112	2.151
2	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada	1.978	1.978	2.102	1.978	2.102
3	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	102,33

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.103, persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif dan preventif sesuai standar di Kabupaten Temanggung menunjukkan pencapaian yang signifikan. Mulai tahun 2021 sampai 2024 persentase pelayanan telah mencapai 100%, yang berarti bahwa seluruh ODGJ berat yang tercatat telah menerima pelayanan yang sesuai dengan standar. Pada tahun 2025 capaian meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 102,33%. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan program kesehatan jiwa yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, yang berhasil meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi ODGJ berat, dengan fokus pada pendekatan promotif dan preventif guna mencegah kekambuhan dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melalui sudah terbentuknya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Kabupaten, sudah terbentuknya TPKJM Tingkat kecamatan di 7 Kecamatan dan sudah terbentuknya Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) pada 12 Desa.

19) Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap

Cakupan imunisasi bayi lengkap merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Tingginya cakupan imunisasi menunjukkan upaya yang efektif dalam melindungi bayi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Adapun cakupan imunisasi bayi lengkap di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada gambar.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 40
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

Cakupan imunisasi bayi lengkap menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, cakupan imunisasi bayi lengkap tercapai 99,31 dan terus meningkat menjadi 102,33% pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 baru tercapai 99,62%. Hal ini dikarenakan banyaknya vaksin yang diberikan ke sasaran, imunisasi ganda, mobilisasi sasaran (masuk-keluar), anak belum punya NIK (sulit/merepotkan dalam catpor), penolakan dari orang tua, pemahaman masyarakat dirasa masih kurang, adanya KIPI, ketersediaan vaksin tdk selalu ada, kualitas logistik, SDM terlatih masih kurang (pensiun, mutasi, petugas baru), dukungan operasional minim terutama untuk perbaikan VR, sarana penyimpanan rusak (Puskesmas dan Dinas) dan belum ada pengadaan yang baru, dan sarana rantai dingin kurang/tidak sesuai standar.

20) Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Kesehatan

Tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor penting dalam menjamin keamanan dan kualitas konsumsi masyarakat. Persentase ini mencerminkan efektivitas pengawasan serta kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan standar higienitas dalam proses pengolahan pangan. Adapun persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 sebagaimana pada gambar.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 41
Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

Persentase tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat kesehatan menunjukkan fluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 tercaoi 79,6%, selanjutnya capaian ini meningkat signifikan pada tahun 2023 dan stabil di angka 83,81% pada 2024. Sedangkan pada tahun 2025 tercapai 55,96%. Kondisi tersebut dipengaruhi karena sebagian besar TPP baru memenuhi kriteria IKL min 80, kriteria peningkatan kapasitas penjamah masih belum tercapai dan pemeriksaan pangan baru akan dilaksanakan pada kegiatan SKAMRT minggu ke-3 bulan Oktober – November dan Dinas Kesehatan telah berupaya menjadwalkan dan melaksanakan pemeriksaan pangan di TPP pada kegiatan SKAMRT minggu ke-3 bulan Oktober-November.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing secara umum dibentuk dari pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dimaksud mencakup: 1) penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum; 2) penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 3) penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dimaksud

mencakup: 1) penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan; 2) dan pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi untuk memastikan pemerataan perkembangan wilayah di Kabupaten Temanggung. Adapun capaian infrastruktur kewilayahan berdaya saing dijabarkan pada tabel 2.102.

Tabel 2. 102
Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Indikator	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Infrastruktur Kewilayahan yang Berdaya Saing		NA	NA	NA	68,40	70,72
Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan						
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	NA	NA	NA	55,79	61,00
2	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	44,27	44,28	44,78	53,43	57,56
3	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	NA	NA	NA	70,83	71,11
Perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah						
4	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	65,17	66,76	67,31	72,24	73,12
5	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	74,21	79,34	83,91	89,72	90,81

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel, persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing di Kabupaten Temanggung mencapai 70,72% pada tahun 2025. Salah satu faktor pendorong pencapaian infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing di Kabupaten Temanggung adalah pemenuhan dokumen RDTR di Kabupaten Temanggung sebagai instrumen legal untuk kendali pemanfaatan ruang dan percepatan perizinan investasi berbasis risiko sesuai UU Cipta Kerja. Selain itu dengan adanya dokumen RDTR juga diharapkan dapat memberikan ruang perkotaan yang aman dan nyaman bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung. Upaya pemenuhan RDTR di Kabupaten Temanggung salah satunya dengan penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan dimana dari 6 kawasan sudah ada 4 kawasan yang memiliki RDTR yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung, RDTR Kawasan Perkotaan Parakan, RDTR Kawasan Perkotaan Pringsurat dan RDTR Kawasan Perkotaan Kranggan sedangkan untuk RDTR Kawasan Perkotaan Ngadirejo dan RDTR Kawasan Perkotaan Candirotro masih dalam proses penyusunan.

Adapun gambaran indikator kinerja urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021–2025 dapat dilihat pada tabel 2.103.

Tabel 2. 103
Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Indikator	Satuan	Tahun					OPD Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	NA	NA	58,62	58,87	58,90	DPUPR
2	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	NA	NA	NA	100	100	DPUPR
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	NA	NA	NA	59,01	60,83	DPUPR
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	17,38	17,81	18,20	19,08	19,23	DPUPR
5	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	17,38	17,81	18,20	19,08	19,23	DPUPR
6	Persentase saluran drainase kondisi baik	%	22,54	22,54	69,21	69,15	69,22	DPUPR
7	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	NA	NA	NA	NA	86,94	DPUPR
8	Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	NA	NA	NA	62,84	57,95	DPUPR
9	Persentase trotoar kondisi baik	%	75,66	73,93	66,66	68,61	68,83	DPUPR
10	Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional. Provinsi. dan Kabupaten	%	7,45	7,41	6,75	6,95	10,13	DPUPR
11	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89,29	88,15	89,16	88,92	87,90	DPUPR
12	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	92,88	92,88	94,36	94,36	92,58	DPUPR
13	Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	NA	NA	22,48	22,59	22,73	DPUPR
14	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	%	NA	NA	NA	NA	100	DPUPR
15	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	%	NA	NA	NA	90,18	98,46	DPUPR
16	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	%	NA	NA	NA	16,67	16,67	DPUPR
14	Persentase jumlah TPS 3R	%	7,61	9,68	13,14	15,57	17,65	DPRKPLH
15	Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	NA	2,50	5,22	3,11	0,80	DPRKPLH
16	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah (SPM)	%	100	100	100	100	100	DPRKPLH

Sumber: DPUPR, DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berbagai indikator yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya air, tata ruang, hingga sanitasi dan pengelolaan sampah mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang layak dan merata. Analisis terhadap capaian indikator tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan berbagai kemajuan yang signifikan, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan, kualitas layanan, dan keberlanjutan infrastruktur.

1) Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)

Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 masih berada dalam kategori “Kinerja Kurang”, dengan capaian sebesar 58,89%, sedikit meningkat dari tahun 2024 yang tercapai sebesar 58,87%. Peningkatan ini tergolong stagnan dan belum cukup

signifikan untuk mendorong sistem irigasi ke kategori kinerja yang lebih baik. Rincian aspek pada Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.104.

Tabel 2. 104
Rincian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tahun	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)						
	Prasarana Fisik	Produktivitas	Sarana Penunjang	Organisasi Personalia	Dokumentasi	P3A/ GP3A/ IP3A	Jumlah
	Nilai Maks 45%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 15%	Nilai Maks 5%	Nilai Maks 10%	Nilai Maks 100%
2024	22,00	9,69	6,92	10,24	3,93	6,12	58,90
2025	22,00	9,69	6,92	10,24	3,93	6,12	58,90

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Salah satu penyebab utama dari belum optimalnya capaian IKSI adalah masih rendahnya kondisi prasarana fisik irigasi, yang hanya mencatat nilai 22,00% dari total bobot maksimal 45% pada tahun 2025. Aspek ini merupakan komponen terbesar dalam penilaian IKSI, sehingga kondisi prasarana yang belum layak sangat memengaruhi skor total. Berdasarkan rincian pada Tabel 2.106 besar aspek lainnya seperti produktivitas sebesar 9,69%, sedangkan sarana penunjang sebesar 6,92%, organisasi personalia sebesar 10,24%, dokumentasi sebesar 3,93%, dan peran serta P3A/GP3A/IP3A sebesar 6,12% atau keempat aspek tersebut mengalami stagnasi atau tidak mengalami perubahan berarti dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain prasarana fisik, aspek pengelolaan dan pendukung lainnya juga belum mengalami peningkatan signifikan. Dengan demikian, perlu dilakukan strategis dan terintegrasi, khususnya pada rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi, serta penguatan kelembagaan pengelola irigasi, agar IKSI Kabupaten Temanggung dapat meningkat dan mendukung ketahanan pangan serta keberlanjutan pertanian secara optimal.

2) Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari

Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari mencapai 100% pada tahun 2025 di Kabupaten Temanggung. Meskipun indikator ini merupakan indikator baru dan belum memiliki data tren dari tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut merupakan sinyal positif bahwa seluruh penduduk telah terlayani dalam pemenuhan kebutuhan dasar air minum. Kondisi tersebut mencerminkan upaya serius

pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat atas akses air minum.

3) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; (2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises); (3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan (4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Tabel 2. 105
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	NA	NA	NA	59,01	60,38

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data capaian air minum Tahun 2025, jumlah rumah tangga (KK) di Kabupaten Temanggung tercatat sebanyak 277.775 KK, dengan 53.405 KK telah mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan (PDAM) dan 114.312 KK mendapatkan akses melalui jaringan perpipaan perdesaan. Dengan demikian, persentase akses perpipaan mencapai 60,38%, atau masih berada di bawah target universal akses 100% air minum aman yang ditetapkan pemerintah dalam RPJMN. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan air minum perpipaan masih perlu diperluas, meskipun beberapa kecamatan telah menunjukkan kemajuan pesat, terutama di wilayah perkotaan dan wilayah yang memiliki sistem jaringan PDAM lebih berkembang.

4) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman merupakan indikator yang menggambarkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang memenuhi persyaratan kualitas air dan layanan secara berkelanjutan, baik dari sisi fisik, kualitas, maupun kontinuitas. Berikut merupakan capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Temanggung tahun 2021-2025.



Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 42
Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mencapai 19,23% atau sebanyak 52.853 rumah tangga dari total 274.845 rumah tangga. Capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 19,08%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap sarana air minum yang layak, namun proporsi masyarakat yang memiliki akses air minum aman masih relatif rendah.

5) Presentase Saluran Drainase Kondisi Baik

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/405 Tahun 2018 Tentang Ruas-Ruas Jalan yang Berstatus Sebagai Jalan Kabupaten ada penyesuaian embang drainase. Panjang drainase yang menjadi tanggung jawab DPUPR adalah 155.363 km dengan saluran drainase kondisi baik sebagaimana pada tabel 2.106.

Tabel 2. 106
Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang jaringan drainase kondisi baik	146.645	104.567	107.519	107.431	107.536
2	Panjang keseluruhan jaringan drainase skala kawasan/kota yang ada	650.467	151.457	155.363	155.363	155.363
3	Persentase (%)	22,54	69,04	69,21	69,15	69,22

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.106 tahun 2025 saluran drainase dalam kondisi baik mencapai 69,22%, atau sepanjang 107.536 km dari total jaringan drainase yang ada. Capaian ini menunjukkan upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas drainase yang cukup konsisten, yang dapat dilihat dari adanya sedikit peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercapai sebesar 69,15%. Meskipun capaian telah berada dalam kategori baik, nilai capaian yang cenderung stagnan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perlunya langkah strategis lanjutan untuk menuju pencapaian yang lebih optimal. Upaya peningkatan kualitas drainase selanjutnya perlu diarahkan pada kegiatan pemeliharaan preventif, peningkatan kapasitas jaringan di kawasan rawan genangan, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan fungsi drainase.

6) Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik

Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik adalah indikator yang menggambarkan tingkat kualitas fisik bangunan gedung milik pemerintah yang berada dalam kondisi baik, layak fungsi, serta dapat digunakan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Gedung kondisi baik merupakan bangunan yang tidak mengalami kerusakan struktural maupun non-struktural signifikan dan hanya memerlukan pemeliharaan rutin. Tujuan pengukuran indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah dalam melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi aset bangunan gedung pemerintah sehingga tetap layak digunakan sesuai standar pelayanan. Pada tahun 2025 capaian persentase gedung pemerintah kondisi baik sebesar 86,94%. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan perhatian terhadap keandalan bangunan, keselamatan, serta kualitas sarana prasarana publik, yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola aset daerah.

7) Persentase Penerbitan PBG dan SLF Terhadap Pengajuan PBG dan SLF Melalui SIMBG

Sejak diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan bangunan yang tertib dan andal khususnya dalam proses penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF).

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah dokumen perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan. Sedangkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan sebelum bangunan tersebut dimanfaatkan.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan substansi fundamental dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dengan terbitnya peraturan tersebut, substansi pada aplikasi SIMBG berubah dan diperlukan penyesuaian. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Capaian persentase penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui SIMBG pada tahun 2025 sebesar 57,95% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 62,84%. Capaian kinerja penerbitan PBG dan SLF sampai 25 September 2025 menunjukkan kinerja pelayanan yang baik dengan total 1.060 dokumen diajukan permohonannya melalui SIMBG. Mayoritas layanan terdiri dari PBG sebanyak 545 dokumen (51,30%), diikuti SLF Baru 304 dokumen (28,60%) dan SLF Existing 209 dokumen (19,70%). Hal ini menunjukkan capaian positif dalam upaya digitalisasi perizinan dan penataan bangunan di Kabupaten Temanggung. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong tata perizinan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar seluruh proses perizinan bangunan dapat sepenuhnya terintegrasi dalam sistem SIMBG, sehingga memudahkan monitoring, mempercepat layanan, dan memastikan kesesuaian dengan standar teknis serta ketentuan tata ruang yang berlaku.

8) Persentase Trotoar Kondisi Baik

Panjang trotoar Kabupaten Temanggung tidak sama dengan keseluruhan embang jalan Kabupaten Temanggung karena setiap jalan kabupaten tidak selalu disertai trotoar. Hal ini menjadikan indikator

persentase trotoar dalam kondisi baik menjadi penting untuk melihat sejauh mana fasilitas pejalan kaki dipelihara dan difungsikan secara optimal. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, panjang trotoar kondisi baik di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 cenderung mengalami penurunan sebagaimana pada tabel 2.107.

Tabel 2. 107
Persentase Trotoar Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang Trotoar Kondisi Baik (m)	55.908,25	55.563,26	50,646.06	52.121,01	52.311,56
2	Panjang Trotoar Kabupaten (m)	73.891,41	75.161,01	75,972.01	75,972.01	76.003,01
3	Persentase (%)	75,66	73,93	66,66	68,61	68,83

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.107, persentase trotoar dalam kondisi baik di Kabupaten Temanggung mengalami tren penurunan dari tahun 2021 yang sebesar 75,66%, menjadi 68,61% pada tahun 2024. Penurunan kondisi ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek pemeliharaan fasilitas trotoar, baik dari segi teknis maupun anggaran. Pada Tahun 2025 persentase trotoar kondisi baik belum mencapai target disebabkan karena eksisting trotoar kondisi rusak tidak sebanding dengan kemampuan anggaran. Persentase trotoar kondisi baik pada tahun 2025 lebih baik dibandingkan tahun 2024 yaitu 68,83%. Sebagaimana data kondisi trotoar Kabupaten Temanggung tahun 2025 pada tabel 2.108 masih terdapat 6.577,55 meter trotoar dengan kondisi rusak ringan.

Tabel 2. 108
Kondisi Trotoar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	Wilayah Kewenangan	Panjang Trotoar (m)		
		Total	Kondisi Baik	Rusak Ringan
1	UPTD Regional I Wilayah Temanggung	30.569,31	19.106,66	1.036,55
2	UPTD Regional II Wilayah Parakan	18.386,00	17.228,00	
3	UPTD Regional III Wilayah Ngadirejo	12.013,00	5.290,00	4.642,00
4	UPTD Regional IV Wilayah Kranggan	8.762,00	6.490,00	899,00
5	UPTD Regional V Wilayah Kandangan	4.572,00	2.847,00	
6	UPTD Regional VI Wilayah Tembarak	1.700,70	1.349,90	
	Total	76.003,01	52.311,56	6.577,55

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Dari ke enam wilayah UPTD di Kabupaten Temanggung, wilayah UPTD Regional III (Ngadirejo) menunjukkan proporsi kerusakan ringan pada trotoar yang cukup signifikan (4.642 meter). Mengingat pentingnya

keberadaan trotoar untuk keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas fasilitas ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

9) Persentase Ketersediaan Trotoar Terhadap Total Panjang Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

Indikator ini mengukur proporsi panjang trotoar yang tersedia dibandingkan dengan total panjang jalan sesuai kewenangan (nasional, provinsi, dan kabupaten) sebagai bentuk dukungan terhadap keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

Persentase ketersediaan trotoar terhadap total jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten di Kabupaten Temanggung masih rendah dan mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, persentase ketersediaan mencapai 6,95%, sedangkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 10,13% yang diperoleh dari perbandingan antara panjang trotoar yang ada yaitu 76.003,01 meter dengan total panjang jalan 750.116 meter. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan penyediaan infrastruktur pejalan kaki yang konsisten dan sejalan dengan arah pembangunan wilayah yang mendukung mobilitas non-motorized transport (NMT) serta keselamatan pengguna jalan.

10) Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota

Jalan kondisi permukaan mantap merupakan jalan kewenangan kabupaten yang mempunyai kondisi perkerasan mantap serta dapat berfungsi melayani transportasi dengan baik. Yang dimaksud kondisi permukaan mantap dalam indikator ini adalah ruas jalan dalam kondisi baik (kerusakan <11 %) dan sedang (kerusakan <23%). Adapun panjang jalan kondisi permukaan mantap di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 – 2025 sebagaimana pada tabel 2.109.

Tabel 2. 109
Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang jalan kondisi mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) (km)	580.790	573.366	579.972	578.400	571.751
2	Panjang Jalan Kabupaten (km)	650.476	650.476	650.476	650.476	650.476
3	Persentase (%)	89,29	88,15	89,16	88,92	87,90

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana pada Tabel 2.109, jalan dengan

kondisi permukaan mantap di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan secara umum dalam lima tahun terakhir, dengan persentase tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 89,29%. Pada tahun 2025, jalan mantap mencapai 571.751 km atau setara dengan 87,90% dari total jalan kabupaten sepanjang 650.476 km. Capaian ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercapai 578.400 km atau 88,92%. Penurunan kondisi jalan terutama terjadi di UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Wilayah Temanggung (-1,11%), UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Wilayah Parakan (-0,44%), dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Wilayah Kranggan (-0,40%). Sementara itu, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Wilayah Kandangan (+2,10%) dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Wilayah Tembarak (+4,06%) mengalami peningkatan kondisi mantap akibat pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan rutin yang efektif. Kinerja pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan secara menyeluruh.

11) Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Yang dimaksud dengan jembatan kondisi baik yaitu jembatan kewenangan kabupaten dengan struktur atas dan struktur bawah dalam kondisi baik sehingga secara keseluruhan jembatan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Kabupaten Temanggung memiliki 337 unit jembatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan jumlah jembatan kondisi baik pada tahun 2021–2025 sebagaimana pada tabel 2.110 berikut.

Tabel 2. 110
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah jembatan dalam kondisi baik (unit)	313	313	318	318	312
2	Jumlah jembatan kabupaten (unit)	337	337	337	337	337
3	Persentase (%)	92,88	92,88	94,36	94,36	92,58

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data DPUPR Kabupaten Temanggung, persentase jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 – 2025 mengalami peningkatan dari 92,28% pada 2020 menjadi stabil di 94,36% sejak 2024. Namun, pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi 92,58% atau menurun 1,78% dibandingkan tahun

2024. Kendati mengalami penurunan namun hal ini menunjukkan bahwa besar jembatan di bawah kewenangan kabupaten berada dalam kondisi yang baik, baik dari sisi struktur atas maupun struktur bawah, dan secara keseluruhan mampu mendukung fungsi layanan transportasi dengan optimal yang mendukung konektivitas antarwilayah.

12) Persentase Jalan dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan

Gubernur Jawa Tengah menetapkan jalan berdasarkan fungsi jalan pada kabupatn/kota di Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/12 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana pada Tabel 2.111.

Tabel 2. 111
Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Temanggung Berdasarkan Fungsinya

No	Keterangan	Panjang (km)
1	Jalan Kolektor Primer-4 (JKP4)	21,63
2	Jalan Lokal Primer (JLP)	193,87
3	Jalan Lingkungan Primer (Jling-P)	2,29
4	Jalan Arteri Sekunder (JAS)	0
5	Jalan Kolektor Sekunder (JKS)	1,71
6	Jalan Lokal Sekunder (JLS)	430,52
7	Jalan Lingkungan Sekunder (Jling-S)	782,64
8	Panjang Ruas	1.432,66

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/12 Tahun 2023

Tabel 2. 112
Jalan Kewenangan Kabupaten dengan Lebar Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Wilayah	Panjang Ruas (Km)	Panjang Ruas (Km)	
			Lebar Sudah Standar	Lebar Belum Standar
1	UPTD Regional I Wilayah Temanggung	62,992	26,727	36,265
2	UPTD Regional II Wilayah Parakan	102,900	37,691	65,209
3	UPTD Regional III Wilayah Ngadirejo	158,770	28,120	130,650
4	UPTD Regional IV Wilayah Kranggan	127,784	5,230	122,554
5	UPTD Regional V Wilayah Kandangan	127,750	38,270	89,480
6	UPTD Regional VI Wilayah Tembarak	70,280	11,835	58,445
Jumlah		650,476	147,873	502,603
Persentase			22,73	77,27

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data dari DPUPR Kabupaten Temanggung sebagaimana pada tabel 2.112 dari total jalan kabupaten di Kabupaten Temanggung sepanjang 650,476 km, hanya 147,873 km atau sekitar 22,73% yang memiliki lebar jalan sesuai standar, sementara sisanya sebesar 502,603 km atau sekitar 77,27% masih belum memenuhi standar lebar yang

ditetapkan. Ketimpangan paling mencolok terlihat di wilayah UPTD Regional III (Ngadirejo) dan UPTD IV (Kranggan), yang memiliki embang ruas belum standar cukup besar, masing-masing 131,2 km dan 122,554 km. Kondisi ini menunjukkan bahwa embangu besar ruas jalan kabupaten masih memerlukan peningkatan lebar jalan sesuai standar untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

13) Persentase Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina

Lembaga jasa konstruksi merupakan penyedia layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan suatu pembangunan bangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023, kabupaten/kota mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi termasuk di dalamnya melakukan pembinaan pengawasan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, serta pendidikan dan pelatihan. Realisasi capaian sampai dengan Tahun 2025 sudah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua lembaga jasa konstruksi yang bermitra berhasil dibina sejumlah 43 lembaga. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pembinaan sudah terlaksana secara efektif, atau proses administrasi pencatatan pelaksanaan pembinaan sudah dilakukan. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini pada tahun berjalan sudah mencapai target tahunan.

14) Persentase Jumlah TPS 3R

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi salah satu prioritas penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Temanggung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.113 yang memuat jumlah TPS 3R yang telah dibangun di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2. 113
Persentase Jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah TPS 3R	22	28	38	45	51
2	Jumlah Desa/Kelurahan	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	7,61	9,68	13,14	15,57	17,65

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data tahun 2021-2025 jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 22 unit (7,61%) pada tahun 2021 menjadi 51 unit (17,65%) pada tahun 2025. Meskipun capaian tersebut cukup rendah, namun konsisten terjadi peningkatan yang mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

15) Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang

Penataan ruang sesuai Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sesuai dengan amanat tersebut, penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dibentuk oleh dua indikator turunan yakni 1) Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan; dan 2) persentase pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Adapun persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mencapai 98,05% sebagaimana pada gambar 2.43.



Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 43
Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Indikator persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Target tahun 2025 tercatat sebesar 98,46%, sementara realisasi sampai dengan Tahun 2025 mencapai 100%. Hal ini berarti kinerja telah melampaui target sebesar +8,18%. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang. Capaian tersebut juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta proses perizinan yang berbasis kesesuaian tata ruang (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/KKPR dan PBG/SLF).

16) Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Ditetapkan

Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat pencapaian penetapan RDTR melalui Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota dibandingkan dengan jumlah RDTR yang direncanakan untuk ditetapkan dalam suatu periode. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang pada skala rinci sebagai bagian dari implementasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), guna memastikan arah pembangunan dan pemanfaatan ruang yang terarah, legal secara administratif, dan mendukung kepastian investasi. Indikator Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan memiliki target tahun 2025 sebesar 33,34%, dengan kondisi akhir tahun 2024 berada pada angka 16,67%. Hingga Tahun 2025, realisasi capaian berada pada 16,67%, sehingga capaian kinerja terhadap target baru mencapai 49,99%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa hingga periode pelaporan, belum terdapat tambahan penetapan RDTR baru dibandingkan capaian akhir tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penetapan RDTR pada tahun berjalan masih dalam tahap penyusunan dan penelaahan, atau masih terdapat tahapan teknis dan administratif yang belum terselesaikan hingga.

17) Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)

Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan embas septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah embas terpusat (SPALD-T). Akses terhadap sanitasi yang aman

serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Adapun capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel 2.114.

Tabel 2. 114
Capaian Akses Sanitasi Aman Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah KK dengan akses sanitasi aman	NA	5.631	14.044	8.686	2.234
2	Jumlah KK	NA	225.325	269.251	274.845	278.809
3	Persentase (%)	NA	2,50	5,22	3,16	0,80

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2021-2025, terjadi peningkatan dari 2,50% (2022) menjadi 5,22% pada tahun 2023. Capaian tersebut menurun menjadi 3,16% pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 menjadi 0,80% atau sebanyak 2.234 rumah tangga dengan akses sanitasi aman. Penurunan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung ini dikarenakan adanya penyesuaian kriteria sanitasi aman dalam pengambilan data. Jika dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga di Kabupaten Temanggung, angka ini masih kecil, mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan cakupan sanitasi aman demi terpenuhinya pelayanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.

18) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPM)

Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah embangu di Kabupaten Temanggung tercatat stabil di angka 100% sejak tahun 2021 hingga 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk telah terlayani dalam hal pengolahan air limbah embangu, baik melalui sistem individual maupun terpusat. Kondisi ini merupakan pencapaian yang sangat positif dalam upaya menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak hanya menjangkau seluruh warga, tetapi

juga berjalan secara efektif dan berkelanjutan, termasuk aspek pengelolaan lumpur tinja, pemeliharaan instalasi, serta kepatuhan terhadap standar teknis dan lingkungan.

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Untuk mencapai infrastruktur perkotaan, pedesaan dan kawasan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas baik diperlukan intervensi pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sehingga nantinya dapat menciptakan infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing di Kabupaten Temanggung. Intervensi yang dilakukan tidak hanya mencakup program-program daerah namun juga mengakomodasi program prioritas nasional maupun program prioritas Provinsi Jawa Tengah sehingga bisa selaras dengan tujuan pembangunan yang ada di Kabupaten Temanggung khususnya dalam aspek infrastruktur kewilayahan. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilihat salah satunya dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah dan Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah yaitu Penyediaan 1 Rumah Layak Huni untuk 1 KK, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengeluarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang bertujuan untuk memudahkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah layak huni. Dengan dikeluarkannya produk hukum tersebut diharapkan dapat mempercepat progres pelaksanaan penyediaan hunian layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung sebagaimana upaya tindak lanjut program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Jawa Tengah.

Adapun gambaran urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 2.115.

Tabel 2. 115
Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
4	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	%	91,15	94,75	95,50	96,31	96,69
5	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	%	22	31	33	48,80	49,93
6	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	42,79	50,21	57,16	64,70	68,34
7	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	NA	NA	NA	74,72	78,79
8	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	NA	NA	NA	NA	100
9	Persentase Terasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Gambaran capaian kinerja program pada urusan pemerintahan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Temanggung selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di daerah.

1) Persentase Rusunawa yang Dikelola dengan Baik

Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik pada lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2021–2025 mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sudah optimal dan konsisten di keenam Rusunawa di Kabupaten Temanggung. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan dan fasilitas hunian vertikal.

2) Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (SPM)

Setiap warga Negara yang terdampak bencana yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal berhak mendapatkan rumah layak huni yang mana merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun.

Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni di Kabupaten Temanggung mencapai angka 100% selama lima tahun terakhir. Artinya, seluruh korban bencana selalu difasilitasi

pemenuhan kebutuhan hunian layak sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini mencerminkan respons cepat pemerintah Kabupaten Temanggung dalam penanganan pascabencana.

3) Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (SPM)

Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Temanggung konsisten mencapai angka 100% selama periode 2021 – 2025. Pada tahun 2021 – 2022 tidak ada rumah yang terdampak relokasi yang harus ditangani sehingga capaian indikator sebesar 100%. Pada tahun 2023 sebanyak 24 rumah relokasi tertangani (100%) melalui Program Bantuan Rumah RUSPIN oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada tahun 2024–2025 tidak ada kegiatan relokasi program pemerintah sehingga capaian sebesar 100%.

Indikator persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah dan memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terdampak. Dukungan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program-program pemerintah, sehingga kelangsungan program dapat berjalan dengan lebih lancar. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa faktor penghambat. Di antaranya adalah syarat bahwa warga calon penerima bantuan harus memiliki lahan yang tersedia untuk relokasi, serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai proses relokasi tersebut.

4) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan dengan memenuhi:

1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;

2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Berdasarkan kriteria tersebut, indikator persentase rumah tangga dengan akses hunian layak mencerminkan seberapa besar proporsi rumah tangga yang tinggal di hunian yang memenuhi kriteria kelayakan, baik dari aspek fisik bangunan, sanitasi, akses air bersih, hingga lingkungan sekitar. Oleh karena itu, capaian indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam menilai kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat. Adapun persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel 2.116.

Tabel 2. 116
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten
Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah layak huni (unit)	179.150	206.231	208.691	211.288	212.422
2	Jumlah rumah (unit)	196.536	217.652	218.519	219.386	219.675
3	Persentase (%)	91,15	94,75	95,50	96,31	96,70

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 2.118 persentase rumah layak huni dari tahun 2021 – 2025 cenderung mengalami peningkatan dari 91,15% pada 2021 menjadi 96,70% di 2025. Sampai dengan tahun 2025 jumlah rumah layak huni sebanyak 212.422 unit dari total rumah di Kabupaten Temanggung sebanyak 219.675 unit. Pembangunan rumah layak huni dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan rumah layak huni menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten Temanggung, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI.

5) Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani

Kawasan permukiman kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria yang dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak diantaranya dengan melihat tujuh aspek kekumuhan berdasarkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh antara lain: (1) Kondisi bangunan gedung; (2) Kondisi jalan lingkungan; (3) Kondisi penyediaan air minum; (4) Kondisi drainase lingkungan; (5) Kondisi pengelolaan limbah; (6) Kondisi pengelolaan persampahan; dan (7) Kondisi proteksi kebakaran.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021 luasan kawasan kumuh di Kabupaten temanggung ditetapkan sebesar 176,836 hektare. Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung melalui program dan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh sehingga tercapai capaian sebagaimana pada tabel 2.117.

Tabel 2. 117
Persentase Luas Kawaan Kumuh yang Tertangani Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas Kawasan Kumuh Tertangani (Ha)	38,313	55,427	57,861	86,30	86,30
2	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan (Ha)	176,836	176,836	176,836	176,836	176,836
3	Persentase (%)	21,67	31,34	32,72	48,80	48,80

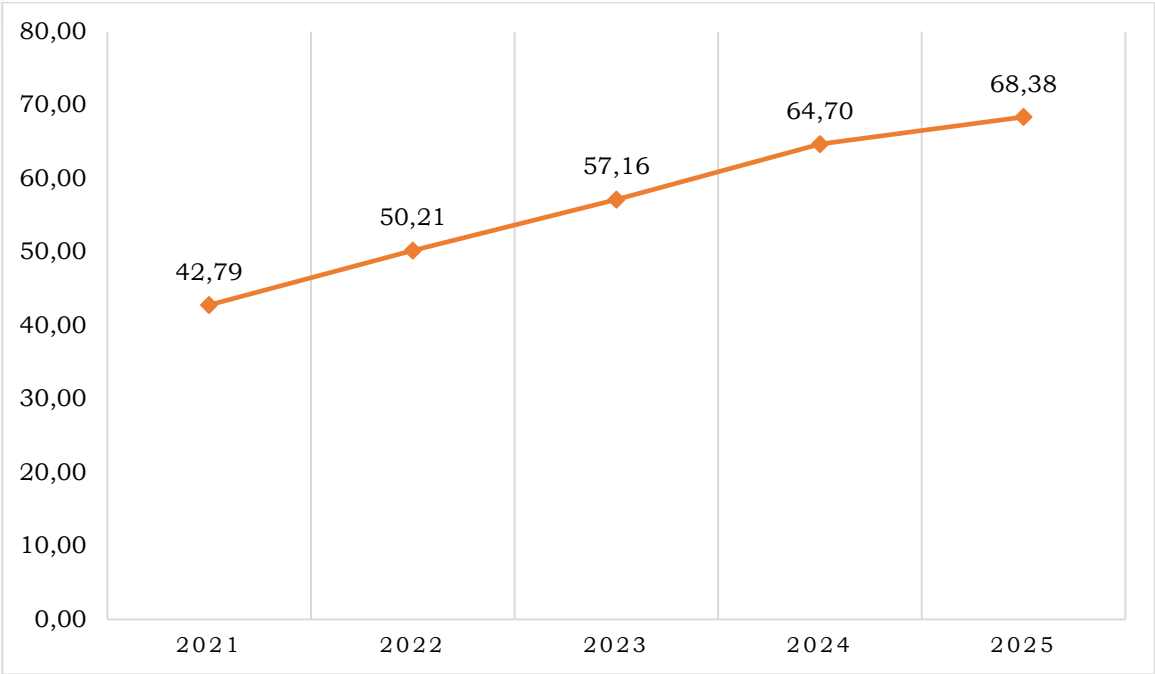
Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.117, terlihat adanya tren positif dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung selama periode 2021-2024. Persentase kawasan kumuh yang berhasil ditangani meningkat secara signifikan dari 21,67% pada tahun 2023 menjadi 48,80% pada tahun 2024. Pada tahun 2025 capaian luas kawasan kumuh yang tertangani masih sama dengan capaian tahun 2024 yaitu 48,80%. Peningkatan penanganan kawasan kumuh ini antara lain melalui kegiatan perbaikan RTLH untuk meningkatkan aspek bangunan gedung dan pembangunan infrastruktur sanitasi untuk meningkatkan aspek pengelolaan limbah, serta meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya meningkatkan aspek lainnya. Komitmen pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini, meskipun ke depan diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target penanganan secara menyeluruh.

6) Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Permasalahan rumah tidak layak huni merupakan salah satu tantangan dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Di Kabupaten Temanggung, upaya penanganan rumah tidak layak huni menjadi bagian penting dari program peningkatan kualitas permukiman yang dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui berbagai intervensi terus berkomitmen untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 tersaji sebagaimana pada gambar 2.44 berikut.



Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 44
Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

Data pada gambar 2.44 menunjukkan adanya peningkatan pada persentase penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025. Persentase penanganan rumah tidak layak huni meningkat dari 42,79% pada tahun 2021 menjadi 68,38% pada tahun 2025. Penanganan RTLH menjadi RLH dilaksanakan diantaranya melalui Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program BSPS, serta pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten. Kondisi ini memperlihatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

7) Persentase Kepemilikan Rumah Terhadap Jumlah Kepala Keluarga

Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan dan

akses masyarakat terhadap hunian layak. Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak kepala keluarga yang telah memiliki tempat tinggal sendiri, yang mencerminkan kestabilan sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap rumah sewa, kontrakan, atau bahkan kondisi hunian tidak tetap, yang dapat berdampak pada kualitas hidup dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan angka kepemilikan rumah menjadi salah satu fokus kebijakan perumahan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial. Adapun persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 secara rinci disajikan pada tabel 2.118.

Tabel 2. 118
Persentase Kepemilikan Rumah Terhadap Jumlah Kepala Keluarga
Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah	216.785	217.652	218.519	219.386	219.675
2	Jumlah seluruh rumah tangga	270.220	271.845	276.110	274.845	278.809
3	Persentase (%)	80,23	80,06	79,14	79,32	78,79

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Tabel 2.118, kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 mengalami fluktuasi. Meskipun jumlah rumah mengalami peningkatan setiap tahun, namun pertumbuhan jumlah kepala keluarga cenderung lebih cepat, sehingga menyebabkan persentase kepemilikan rumah mengalami penurunan dari 80,23% pada tahun 2021 menjadi titik terendah 79,14% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 79,82%, namun terjadi penurunan pada tahun 2025 menjadi 78,79%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *backlog* perumahan masih menjadi tantangan, yang menunjukkan perlunya intervensi strategis dan peningkatan program penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya percepatan pembangunan rumah bersubsidi, kemitraan dengan sektor swasta, serta kebijakan insentif perumahan menjadi langkah penting untuk mengatasi kesenjangan ini.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban wilayah, serta perlindungan terhadap

masyarakat dari berbagai potensi gangguan dan bencana. Di Kabupaten Temanggung, urusan ini dilaksanakan melalui peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berbagai program dan layanan telah dijalankan dalam upaya meningkatkan penegakan peraturan, kecepatan respon darurat, serta kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di tingkat masyarakat. Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan urusan ini adalah Indeks Risiko Bencana (IRB), yang menunjukkan tingkat potensi kerugian akibat bencana di suatu wilayah. Salah satu upaya mitigasinya dilakukan yaitu melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pengembangan *Desa Tangguh Bencana* (Destana). Indikator lain yang juga menjadi perhatian adalah *Indeks Ketahanan Daerah* (IKD), yang menggambarkan kapasitas suatu daerah dalam menghadapi, menyesuaikan diri, dan pulih dari dampak bencana. IKD mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi yang saling terkait, serta menjadi acuan penting dalam perencanaan kebijakan penanggulangan bencana yang berkelanjutan dan berbasis risiko di daerah.

1) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Namun pada tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko).

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode

tertentu. Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana adalah semakin baik, sehingga penentuan ini korelasinya negatif. Tabel dibawah ini merupakan penentuan indeks risiko bencana di Kabupaten Temanggung. Adapun Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan sebagaimana pada tabel 2.119.

Tabel 2. 119
Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

Kriteria	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Risiko Bencana (IRB)	121,33	110,38	116,84	105,76	105,76
Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: BNPB, 2025

Indeks Risiko Bencana menurut dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dikategorikan menjadi tiga kelas antara lain:

1. Kategori kelas risiko rendah memiliki skor sebesar <13
2. Kategori kelas risiko sedang memiliki skor sebesar 13 – 144
3. Kategori kelas risiko tinggi memiliki skor sebesar >144

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan skor Indeks Risiko Bencana, Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 termasuk dalam kategori kelas risiko sedang yang sebesar 105,76 karena perhitungan tahun 2025 untuk nilai IRB Kabupaten Temanggung akan muncul pada Bulan Januari Tahun 2026 dengan kelas risiko sedang untuk Kabupaten Temanggung.

2) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Sejak Tahun 2016, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menerapkan metodologi penilaian kapasitas daerah melalui survei IKD. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana suatu daerah mampu menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari kejadian bencana.

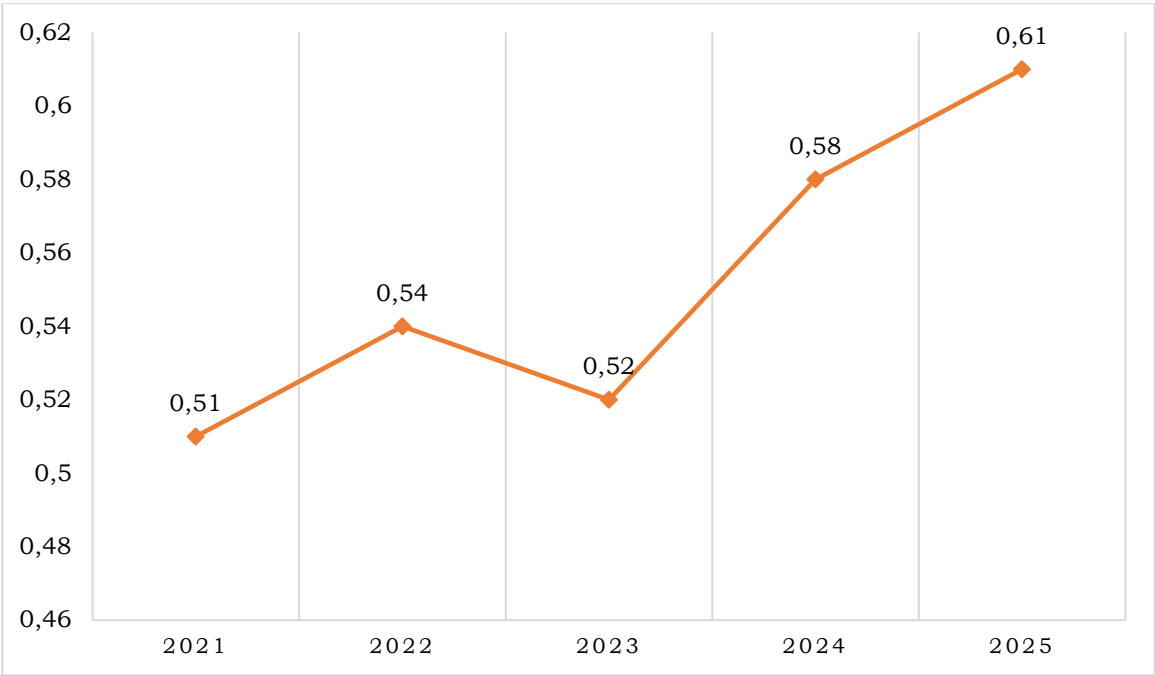
IKD terdiri dari tujuh fokus prioritas yang mencakup: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, (3) Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Ketujuh fokus ini terbagi dalam 16 sasaran aksi dengan 71

indikator pencapaian. Masing-masing indikator memiliki empat pertanyaan kunci dengan level berjenjang, menghasilkan total 284 pertanyaan untuk menilai kapasitas daerah.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah berada pada rentang nilai 0–1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

- 1) Indeks $\leq 0,4$ adalah Rendah;
- 2) Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang; dan
- 3) Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi.

Penilaian IKD juga memperhitungkan nilai agregat di tingkat provinsi, yang dihitung berdasarkan bobot 40% dari hasil penilaian IKD provinsi dan 60% dari rerata nilai IKD kabupaten/kota dalam wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung dari tahun 2021–2025 mengalami fluktuasi sebagaimana tercantum pada gambar 2.45.



Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 45

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan gambar 2.45 terlihat bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung selama tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi dari 0,51 pada tahun 2021 menjadi 0,58 pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 0,61 dan menunjukkan bahwa kapasitas daerah berada dalam kategori Sedang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu terus meningkatkan kebijakan, strategi pengurangan risiko bencana, serta kualitas dan kuantitas program penanggulangan bencana guna mengurangi dampak negatif bencana.

3) Persentase Desa Tangguh Bencana (Destana)

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Adapun persentase Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan sebagaimana pada tabel 2.120.

Tabel 2. 120
Persentase Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, 2025

Pembentukan Destana dilakukan sejak tahun 2018, sampai dengan tahun 2025 terus dilakukan dan mengalami peningkatan. Data pada Tabel.122 menunjukkan perkembangan positif dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025. Jumlah desa yang telah ditetapkan sebagai Destana pada tahun 2024 sebanyak 34 desa. Sedangkan pada tahun 2025 terbentuk 8 desa Tangguh bencana. Namun, dibandingkan dengan total desa rawan bencana yang tetap berjumlah 217 desa selama lima tahun tersebut, cakupan Destana masih perlu dilakukan penambahan. Peningkatan cakupan ini mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kapasitas desa untuk mandiri dalam penanggulangan bencana. Serta dibutuhkan percepatan program pengembangan Destana secara lebih masif dan merata agar ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

4) Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Temanggung mencapai 100% pada tahun 2021–2024. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin

dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Sedangkan pada tahun 2025 masih tercapai 71,27%. Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum diperoleh dengan cara menjumlahkan 2 (dua) realisasi indikator Persentase penegakan Perda/Perbup (59,46%) ditambah realisasi indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota (83,08%) dibagi 2. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat peran aparat penegak hukum, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Berbagai upaya seperti peningkatan patroli keamanan, penyuluhan hukum, serta penanganan cepat terhadap potensi konflik telah berkontribusi secara signifikan terhadap terciptanya suasana yang kondusif di wilayah Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2025.

5) Persentase Penegakan Perda/Perbup

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perbup). Persentase penegakan Perda/Perbup di Kabupaten Temanggung menunjukkan konsistensi selama tahun 2021–2024 yaitu mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa setiap pelanggaran yang dilaporkan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Sedangkan pada tahun 2025 tercapai 59,46% yang diketahui dari jumlah Perda dan Perbup yang memuat sanksi yang ada di Kabupaten Temanggung sebanyak 37 Perda dan Perbup. Dari 37 Perda dan Perbup itu yang sudah ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebanyak 22 Perda dan Perbup.

6) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota. bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil

maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Sedangkan untuk cakupan pelayanan bencana non kebakaran dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 20 penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf d yang terjadi di kawasan perkotaan dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pemadaman kebakaran atau yang disamakan dengan itu.

Berikut merupakan capaian Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025.

Tabel 2. 121
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

Kriteria	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	60,64	60,64	60,64	60,64	60,64
Cakupan Penanganan Bencana Non Kebakaran Kabupaten	100	100	100	100	100

Sumber: SATPOL PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.121, cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 tercapai 74,62%. Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 tidak dapat terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran terdapat 621 kasus pada tahun 2025.

Selain melihat indikator Indeks Risiko Bencana, Cakupan Desa Tanggap Bencana (Destana), dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terdapat indikator kinerja lain yang menggambarkan kinerja urusan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025. Adapun gambaran

kinerja urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel 2.122 berikut.

Tabel 2. 122
Gambaran Kinerja Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun					OPD Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	NA	NA	NA	100	13,49	Satpol PP dan Damkar
2	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	NA	NA	NA	100	100	Satpol PP dan Damkar
3	Persentase penegakan Pelanggaran Perda/Perbup	%	100	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
4	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	76,67	60,00	48,88	50,65	48,08	Satpol PP dan Damkar
4	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	47,72	43,75	38,93	42,72	53,26	Satpol PP dan Damkar
5	Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	%	NA	NA	NA	100	0	Satpol PP dan Damkar
6	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	%	60,64	60,64	60,64	60,64	60,64	Satpol PP dan Damkar
7	Persentase bangunan/gedung/lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	NA	NA	NA	2,56	5,88	Satpol PP dan Damkar
8	Cakupan penanganan bencana non kebakaran Kabupaten	%	100	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
9	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD
10	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD
11	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD
12	Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD
13	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD

Sumber: Satpol PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.122, sejumlah indikator yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan capaian yang beragam, mulai dari konsistensi dalam penegakan peraturan hingga peningkatan cakupan layanan kebencanaan. Beberapa indikator mengalami kemajuan yang signifikan, sementara yang lain masih memerlukan penguatan data dan optimalisasi pelaksanaan.

1) Persentase Satlinmas yang Terlatih

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan akibat bencana serta membantu penanganan bencana guna mengurangi dampaknya. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan satuan yang memiliki tugas membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala Desa/Kelurahan. Untuk mendukung kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), pelatihan sangat penting karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pelatihan bagi anggota Satlinmas untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas mereka yang dicantumkan sebagai indikator kinerja pada bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2024, 100% Satlinmas telah mengikuti pelatihan di Kabupaten Temanggung. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat 29 desa/kelurahan yang sudah melatih dan mengukuhkan linmasnya atau sama dengan 13,49%.

2) Persentase Pengaduan yang Berkaitan dengan Trantibum yang Ditindaklanjuti

Penyelesaian aduan yang berkaitan dengan Trantibum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025, seluruh pengaduan terkait ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) sejumlah 34 aduan ditindaklanjuti, dengan capaian 100%. Ini menunjukkan responsivitas yang optimal dari Satpol PP dan Damkar dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat.

3) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 2. 123
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit	23	21	44	39	17
2	Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK	30	35	90	77	40
3	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) (%)	76,67	60,00	48,88	50,64	42,50

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.123 terlihat bahwa tingkat respons waktu (*response time rate*) terhadap kasus kebakaran di wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, tingkat respon waktu mencapai 76,67%, meskipun jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit menurun menjadi 23 kasus dari 30. Setelah itu, tingkat respons menurun pada tahun 2022 (60%) dan terus menurun pada tahun 2023 (48,88%) serta 2024 (50,64%), sedangkan pada tahun 2025 tercapai 42,50%. Adapun jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit mengalami penurunan capaian pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat tantangan dalam mempertahankan kecepatan respon terhadap kejadian kebakaran. Tantangan tersebut antara lain mencakup keterbatasan armada, kondisi sarana prasarana, personel, hingga aksesibilitas lokasi.

- 4) Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan Pemadam Kebakaran (Balakar, Redkar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. kelompok relawan Pemadam Kebakaran belum memberikan kontribusi dalam layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran,

dengan tercatat angka 0 untuk jumlah layanan yang dilaksanakan. Meskipun terdapat 65 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Temanggung pada tahun 2025, capaian layanan yang diharapkan dari kelompok relawan ini juga tercatat 0%, yang menunjukkan bahwa kelompok relawan, seperti Balakar atau lainnya, belum berfungsi dengan maksimal dalam memberikan layanan

5) Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran

Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebararan (RISPK) Kabupaten Temanggung, kebutuhan pos pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Temanggung sejumlah 6 (enam) lokasi diantaranya Pos Mako Temanggung, Pos Pemadam Candirototo, Pos Pemadam Pringsurat, Pos Pemadam Ngadirejo, Pos Pemadam Parakan, Pos Pemadam Tembarak. Namun, kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi, jumlah pos pelayanan WMK di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) lokasi, sehingga jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mencapai 60,64%.

6) Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Menjadi Prioritas Inspeksi

Pada tahun 2025, jumlah bangunan/Gedung/lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi sebanyak 69 unit (5,88%) dari 1.170 unit bangunan yang menjadi prioritas untuk dilakukan inspeksi. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebanyak 30 unit atau 2,56%. Angka ini tergolong sangat rendah dan mengindikasikan masih minimnya pengawasan terhadap potensi risiko kebakaran di gedung-gedung prioritas. Kegiatan inspeksi seharusnya ditingkatkan untuk mencegah kebakaran dan kecelakaan lainnya. Rendahnya cakupan inspeksi ini disebabkan oleh keterbatasan personel atau anggaran.

7) Cakupan Penanganan Bencana Non Kebakaran Kabupaten

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam

keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran menunjukkan kinerja yang sangat baik. Adapun cakupan penanganan bencana non kebakaran terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 310 kasus menjadi 682 kasus pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan kasus menjadi 621 kasus. Meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian, cakupan penanganan mencapai angka maksimal 100% sejak tahun 2021 hingga 2025. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas dan respons cepat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam menangani situasi darurat non kebakaran, yang patut diapresiasi sebagai indikator keberhasilan pelayanan publik dalam aspek keselamatan dan perlindungan masyarakat.

8) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana serta komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. Sejak tahun 2021 hingga 2025, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung berhasil dalam memberikan layanan informasi rawan bencana kepada seluruh warga (100%). Capaian 100% mencerminkan keberhasilan BPBD dalam melakukan distribusi informasi yang krusial untuk keselamatan masyarakat. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kesiapsiagaan warga menghadapi bencana.

9) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan

peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang sangat baik dengan persentase 100% secara konsisten sejak tahun 2021 hingga 2025. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi terkait upaya pencegahan serta kesiapsiagaan bencana kepada seluruh masyarakat.

10) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator ini mencapai 100% dari tahun 2021–2025, artinya dalam setiap kejadian bencana, seluruh warga terdampak memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

11) Persentase Koordinasi Penanganan Pasca Bencana

Capaian indikator ini konsisten pada angka 100% selama tahun 2021–2025, menunjukkan bahwa BPBD mampu mengkoordinasikan kegiatan pemulihan dengan baik. Artinya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Koordinasi ini juga mencerminkan peran aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat. Konsistensi ini perlu dipertahankan dengan pelibatan lebih banyak stakeholder.

12) Persentase Tertanganinya Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat di Kabupaten Temanggung merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2024 dan mencapai 100% pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Capaian ini menunjukkan kesiapsiagaan dan respons cepat pemerintah daerah dalam menangani dampak fisik bencana secara efektif, khususnya pada tahap tanggap darurat. Melalui koordinasi yang baik antara BPBD, instansi teknis

terkait, dan partisipasi aktif masyarakat, seluruh kerusakan fisik akibat bencana seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, serta infrastruktur vital lainnya dapat segera dipulihkan sementara guna mendukung keberlanjutan aktivitas masyarakat dan mencegah risiko lanjutan. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan responsif.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan pemerintahan di bidang sosial merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, terdampak bencana, dan masyarakat miskin. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial secara konsisten menjalankan berbagai program yang mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta pemberdayaan sosial terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas agar mampu hidup secara mandiri dan bermartabat. Hal ini tercermin dari capaian indikator strategis, seperti meningkatnya persentase penanganan PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi dan perlindungan sosial, serta penguatan PSKS melalui pelatihan, fasilitasi, dan jejaring kemitraan, yang secara keseluruhan mendukung efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung.

- 1) Persentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Pemberdayaan Sosial Bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Penanganan PPKS adalah serangkaian proses/kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan PPKS sesuai dengan identifikasi kebutuhannya melalui pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta rehabilitasi sosial dan Pemberdayaan sosial bagi PPKS merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berikut merupakan capaian persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial PPKS dan PSKS Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025.

Tabel 2. 124
Persentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial Rehabilitasi Sosial PPKS dan PSKS Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Realisasi Persentase Pemerlu PPKS yang ditangani	116,70	64,30	65,28	67,70	82,87
2	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100
3	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial PPKS, dan PSKS	108,35	82,15	82,64	83,35	91,43

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.124 menunjukkan bahwa capaian Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial Rehabilitasi Sosial PPKS dan PSKS Kabupaten Temanggung sangat fluktuatif pada tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 91,43%, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 83,35%. Hal ini didorong dengan adanya identifikasi kebutuhan PPKS melalui pemberian perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

2) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Ditangani

Data persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika capaian yang mencerminkan tantangan dalam konsistensi pelayanan sosial. Pada tahun 2021 tercapai 116,7%. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh respons darurat dan intensitas intervensi sosial yang meningkat selama masa pandemi COVID-19. Namun, pasca pandemi, terjadi penurunan yang cukup drastis hingga ke angka 64,30% pada tahun 2022, dan meskipun ada tren peningkatan pada tahun 2023 yang sebesar 65,28% hingga tahun 2025 yang memperoleh capaian sebesar 82,87%. Adapun yang mendukung ketercapaian PPKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial (adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN). Pada tahun 2025, rumus perhitungan persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani telah menggunakan rumus terbaru, yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan data terkini.

Adapun gambaran kinerja program urusan pemerintahan bidang sosial Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 125
Gambaran Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kabupaten
Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan pemberdayaan PSKS perorangan, keluarga, masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100
3	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
4	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
5	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
6	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100
7	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	NA	100	100	100	100
8	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	%	NA	63,72	100	86,00	97,22
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100
10	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel, urusan pemerintahan bidang sosial Kabupaten Temanggung selama tahun 2021–2025 memiliki capaian yang sangat baik dan konsisten, terutama pada indikator-indikator yang menyangkut perlindungan dan rehabilitasi sosial, seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana. Seluruh indikator tersebut menunjukkan capaian 100% selama lima tahun berturut-turut, yang menandakan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam memberikan layanan sosial dasar yang merata dan menyeluruh kepada kelompok rentan. Sedangkan indikator UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada tahun 2022 memperoleh capaian sebesar 63,72% untuk kemudian berhasil mencapai 100% pada tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 86,00% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2025 menjadi 97,22%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang didukung oleh penguatan kelembagaan dan pelatihan. Secara keseluruhan, kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam periode lima tahun ini dapat dinilai sangat baik, dengan hampir seluruh indikator mencapai target maksimal.

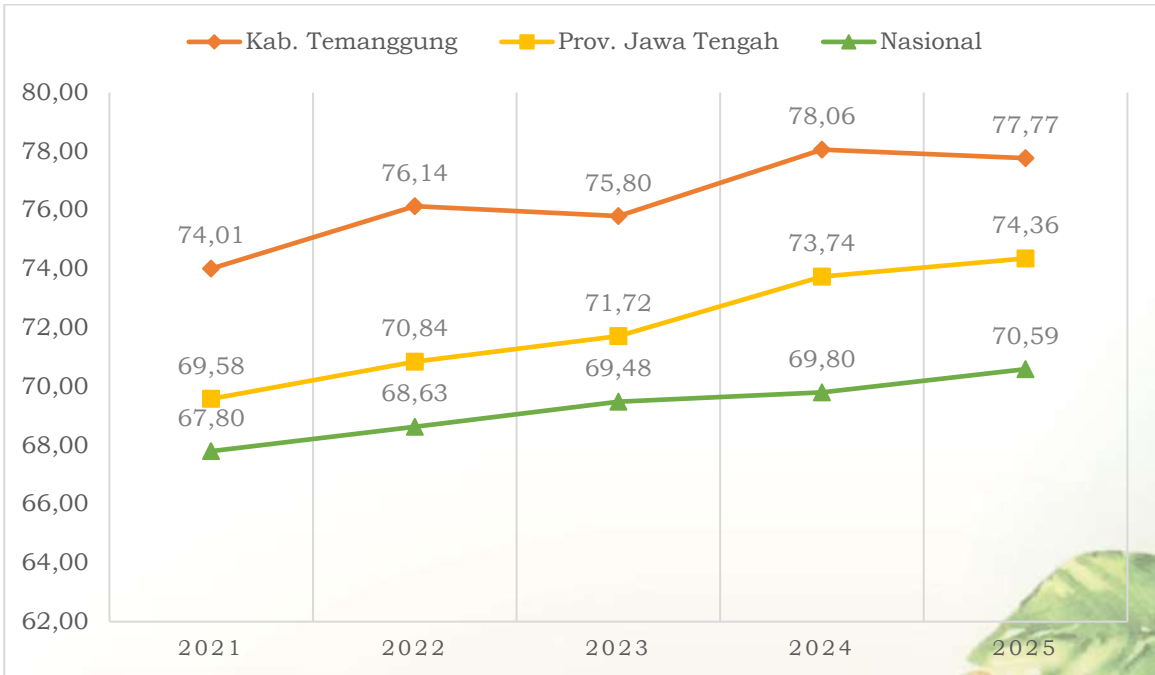
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan daerah, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyerapan tenaga kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif melalui berbagai program, seperti pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan kerja, serta penguatan kelembagaan ketenagakerjaan. Selain itu, peningkatan kepesertaan BPJS Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap upah minimum menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di daerah.

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 46
Capaian Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan data pada gambar, dalam lima tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dengan capaian terakhir tahun 2025 sebesar 77,77 mengungguli capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 74,36 dan capaian Nasional yang sebesar 70,59. Peningkatan TPAK sejak 2021 hingga 2025 mencerminkan meningkatnya keinginan penduduk usia kerja untuk bekerja, seiring dengan pemulihan ekonomi dan membaiknya iklim ketenagakerjaan di daerah. Namun demikian, capaian ini juga menghadapi tantangan, seperti penurunan permintaan terhadap produk kayu olahan yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja di sektor industri pengolahan kayu, yang merupakan sektor penting di Temanggung. Tingginya TPAK mengindikasikan kuatnya pasokan tenaga kerja (*labour supply*), namun belum tentu seluruhnya terserap dalam lapangan kerja formal karena masih ada dinamika seperti peralihan penduduk usia kerja menjadi ibu rumah tangga atau bertambahnya lulusan pendidikan yang belum terserap ke pasar kerja. Oleh karena itu, meskipun TPAK tinggi, diperlukan strategi peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja agar potensi ini benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun gambaran indikator kinerja bidang tenaga kerja di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 126
Gambaran Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	34,78	71,43	72,39	73,78	69,31
2	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	NA	NA	NA	82,35	97,06
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	78,01	53,61	84,88	40,78	55,07
4	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	NA	NA	NA	98,77	88,43
5	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	NA	NA	NA	NA	36
6	Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	NA	NA	NA	100	100
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,88	65,26	65,91	68,52	69,20
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*	%	61,08	84,89	90,83	88,15	87,57
9	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	NA	NA	NA	NA	64,89
10	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	68,91	76,47	81,58	79,67	74,05
11	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	NA	NA	NA	82,93	77,10
12	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	82,35	93,33	100	100	100

Keterangan: *Indikator Baru
Sumber: *Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025*

Melalui berbagai kebijakan dan program strategis, Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi angkatan kerja, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Dalam lima tahun terakhir, berbagai indikator ketenagakerjaan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, seperti peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

1) Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja

Indikator ini merupakan indikator baru di Kabupaten Temanggung yang sangat penting sebagai dasar pengukuran kesesuaian pelaksanaan program ketenagakerjaan dengan perencanaan dalam dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang akan disusun. RTKD menjadi jembatan antara *supply* dan *demand* sektor ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan daerah yang berkesinambungan.

2) Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pemerintah dalam memberikan pelatihan kerja terhadap animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel 2.127 berikut ini.

Tabel 2. 127
Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	112	80	464	336	224
2	Jumlah pendaftar pelatihan	322	112	641	987	626
3	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	34,78	71,43	72,39	73,78	69,31

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.127, capaian indikator ini menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Terjadi lonjakan drastis dari 34,78% pada 2021 naik menjadi 71,43% pada 2022 setelah pulih dari Pandemi Covid-19, angkanya melonjak ke 72,39% di 2023 dan terus meningkat hingga 73,78% pada 2024, peningkatan ini menandakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing pencari kerja. Namun terjadi penurunan di Tahun 2025 menjadi 69,31% dikarenakan adanya efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berimbas pada pemangkasan paket pelatihan yang sudah teranggarkan di tahun 2025.

3) Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina merupakan LPKS yang telah tercatat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pembinaan yang dilakukan berupa perpanjangan masa berlaku izin LPKS yang sudah berakhir, pembinaan LPKS yang belum mendaftarkan izin melalui OSS, serta pembinaan akreditasi LPKS. Pada tahun 2025 terdapat 34 LPKS yang terdaftar di Kabupaten Temanggung dan terdapat 33 LPKS (97,06%) yang telah dibina oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar LPKS di Kabupaten Temanggung telah mendapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah, yang sangat penting untuk menjamin kualitas pelatihan kerja yang mereka selenggarakan.

4) Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten

Penempatan pencari kerja merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas layanan ketenagakerjaan di daerah. Tingginya persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan mencerminkan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi hubungan antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja. Selain itu, indikator ini juga mencerminkan sejauh mana pelatihan, bimbingan, dan informasi pasar kerja yang disediakan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap tren penempatan kerja menjadi penting sebagai dasar perbaikan strategi ketenagakerjaan ke depan. Persentase pencari kerja Kabupaten Temanggung yang ditempatkan tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel 2.128 berikut.

Tabel 2. 128
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pencari Kerja yang ditempatkan	1.749	773	679	661	1.157
2	Pencari Kerja terdaftar	2.242	1.442	800	1.621	2.101
3	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	78,01	53,61	84,88	40,78	55,07

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.128, persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Angka penempatan meningkat dari 78,01% pada tahun 2021 menjadi 53,61% pada tahun 2022 hingga mencapai puncaknya sebesar 84,88% pada tahun 2023. Namun, terjadi penurunan yang cukup drastis pada tahun 2025, yakni hanya sebesar 55,07%. Fluktuasi ini mencerminkan adanya tantangan yang signifikan dalam proses penempatan kerja. Beberapa faktor penghambat antara lain adalah kecenderungan pencari kerja masa kini yang lebih selektif dalam memilih pekerjaan, kurangnya keaktifan dalam mengikuti proses seleksi atau rekrutmen, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, keterbatasan lowongan kerja bagi laki-laki usia di atas 30 tahun serta rendahnya daya tahan kerja pencari kerja usia muda juga turut mempengaruhi capaian indikator ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, serta lembaga pelatihan untuk meningkatkan keberhasilan penempatan kerja ke depan.

5) Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

Penyuluhan dan bimbingan jabatan merupakan suatu proses awal penyampaian informasi secara sistematis, obyektif dan dinamis, tentang jabatan/pekerjaan dan dunia kerja sehingga masyarakat luas dan pencari kerja memiliki gambaran yang obyektif tentang peluang kesempatan kerja dan disertai pemahaman tentang realitas potensi dirinya (bakat, minat dan kemampuan) masing-masing sehingga mampu menentukan pilihan kariernya secara tepat. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebanyak 1.858 orang (88,43%) dari jumlah total pencari kerja yang terdaftar sebanyak 2.101 orang. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pencari kerja telah menerima informasi karier dan orientasi jabatan yang dapat membantu memahami potensi diri dan arah pasar kerja.

6) Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan

Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan merupakan indikator penting untuk mengukur efektivitas pasar kerja dan kebijakan ketenagakerjaan di suatu wilayah. Angka ini mencerminkan seberapa besar proporsi pencari kerja yang berhasil terserap oleh dunia usaha maupun

industri dalam periode tertentu. Sebagai indikator baru, persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan memberikan dimensi tambahan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung. Indikator ini tidak hanya mengukur jumlah pencari kerja, tetapi juga memperlihatkan seberapa besar keberhasilan sistem penempatan tenaga kerja dalam menjembatani pencari kerja dengan kebutuhan pasar. Dengan hadirnya indikator ini, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam menilai dampak nyata dari berbagai program pelatihan, bimbingan kerja, dan fasilitasi penempatan yang telah dijalankan.

7) Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang Terfasilitasi Sesuai Prosedur

Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur pada tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh CPMI yang terdaftar, yaitu sebanyak 307 orang, telah difasilitasi secara prosedural oleh pemerintah daerah. Capaian ini menjadi indikator positif terhadap komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada calon pekerja migran sekaligus mencerminkan keberhasilan upaya pencegahan terhadap praktik penempatan pekerja migran secara non-prosedural atau ilegal. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara lembaga terkait, termasuk dalam hal pendataan, sosialisasi, hingga fasilitasi dokumen dan pelatihan CPMI sebelum keberangkatan.

8) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah persentase pekerja yang terdaftar dan dilindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Adapun cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada gambar.



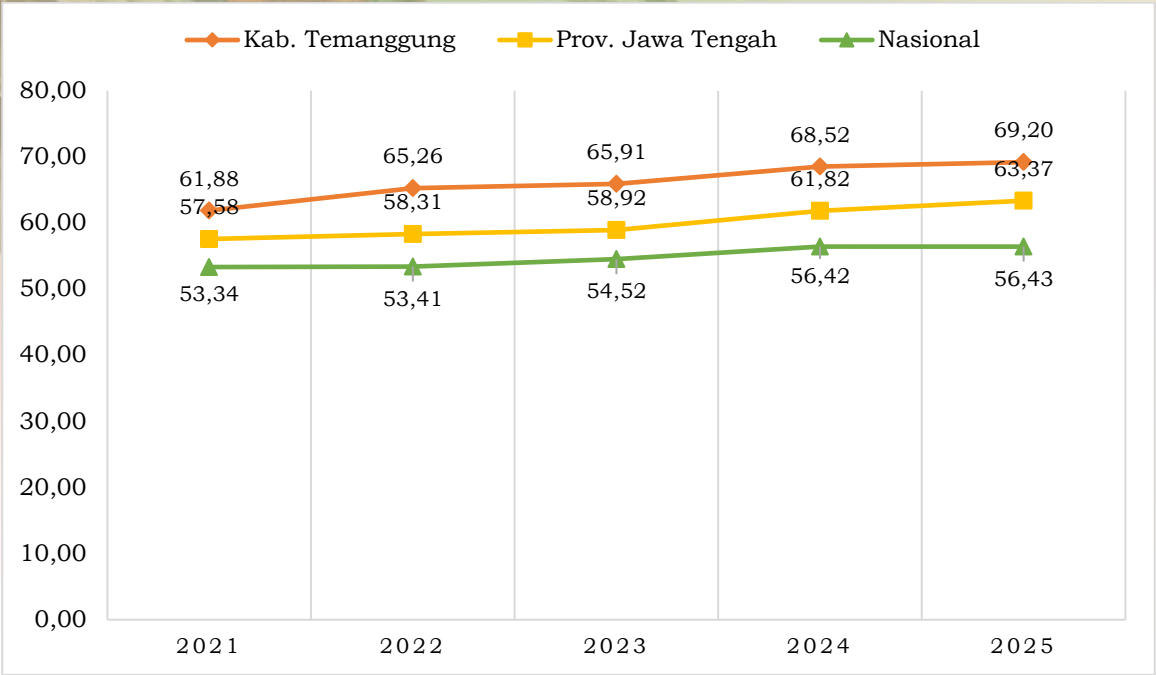
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 47
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Angka ini mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 90,83%, dan mengalami penurunan menjadi 87,57% pada 2025. Kenaikan signifikan ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap perlindungan ketenagakerjaan, baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang luas dan efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup pekerja

9) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merupakan indikator yang mencerminkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam dunia kerja serta peran aktif mereka dalam pembangunan ekonomi. Adapun TPAK Perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada gambar.



Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 48
TPAK Perempuan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021–2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025, dari 61,88% pada tahun 2021 menjadi 69,20% pada tahun 2025. Capaian TPAK Perempuan di Kabupaten Temanggung juga selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dengan capaian terakhir tahun 2025 sebesar 69,20% mengungguli capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 63,37% dan capaian Nasional yaitu 56,43%. Kenaikan ini mencerminkan semakin besarnya peran perempuan dalam aktivitas ekonomi, yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peluang kerja yang lebih inklusif. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan turut mendorong peningkatan ini. Meski demikian, tantangan seperti beban ganda perempuan dalam rumah tangga dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal yang ramah gender masih perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, tren positif ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan yang berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif dan berkeadilan.

- 10) Persentase Perusahaan yang Menjalankan Norma Ketenagakerjaan
- Persentase perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur tingkat

kepatuhan dunia usaha terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, seperti pemenuhan hak-hak pekerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan anak. Sebagai indikator baru, data ini menjadi penting untuk menilai kualitas hubungan industrial dan kondisi kerja yang layak di suatu daerah. Indikator ini digunakan untuk mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan perusahaan, serta penyusunan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan keadilan bagi tenaga kerja.

11) Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.246.850,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Besaran ini menjadi acuan standar minimum pengupahan bagi tenaga kerja yang bekerja di wilayah Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Temanggung diharapkan telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah kepada pekerja sesuai atau di atas ketentuan UMK tahun 2025 guna menjamin kesejahteraan pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Adapun perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah sesuai dengan UMK Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.129.

Tabel 2. 129
Perusahaan yang Memenuhi Kewajiban dalam Memberikan Upah Sesuai UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Perusahaan Yang melaksanakan UMK	82	91	93	98	97
Jumlah Perusahaan yang dibina	119	119	114	123	131
Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK (%)	68,91	76,47	81,58	79,67	74,05

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Temanggung berdasarkan tabel 2.131 menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, yakni meningkat dari 68,91% menjadi 81,58%. Namun, pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi 74,05%. Meski demikian, capaian ini tetap mencerminkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pengupahan. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sebagian perusahaan yang belum stabil serta masih cukup banyak pekerja yang produktivitas kerjanya belum

sesuai dengan yang diharapkan oleh pengusaha. Ketidakseimbangan antara upah dan produktivitas ini kerap menjadi pertimbangan perusahaan dalam menerapkan upah sesuai UMK.

12) Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 tercatat sebesar 77,10%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah menyediakan fasilitas pendukung yang layak bagi kesejahteraan pekerja, seperti sarana kesehatan, sarana keselamatan atau seragam, tempat ibadah, ruang laktasi, serta ruang istirahat atau kantin yang memadai, toilet, tempat parkir, dan sarana yang ramah disabilitas. Fasilitas kesejahteraan ini menjadi indikator penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, serta menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja. Namun demikian, capaian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah perusahaan yang perlu didorong untuk memenuhi standar fasilitas kesejahteraan secara menyeluruh, guna memastikan hak pekerja terpenuhi dan kualitas hubungan industrial tetap terjaga dengan baik.

13) Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan bagian krusial dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan dunia kerja. Perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap produktivitas dan iklim investasi daerah. Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu mekanisme penyelesaian yang diutamakan karena bersifat non-litigasi, cepat, dan mengedepankan keadilan bagi kedua belah pihak. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas terkait terus mengoptimalkan fungsi mediasi untuk menyelesaikan berbagai perselisihan ketenagakerjaan secara efektif. Adapun persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel 2.130.

Tabel 2. 130
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perselisihan Yang Selesai Melalui Mediasi	14	14	20	8	8
2	Jumlah Perselisihan Yang	14	17	15	20	8

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Dimohonkan Mediasi					
3	Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi (%)	82,35	93,33	100	100	100

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.130, persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren positif, dengan capaian yang terus meningkat dari 82,35% pada tahun 2021 hingga mencapai 100% pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini mencerminkan efektivitas peran mediator hubungan industrial dalam menyelesaikan berbagai konflik ketenagakerjaan secara damai, tanpa harus melalui jalur hukum yang lebih panjang dan kompleks. Capaian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi antara pekerja dan pengusaha telah terfasilitasi dengan baik, serta adanya komitmen bersama dalam menjaga iklim hubungan kerja yang harmonis.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif di Kabupaten Temanggung. Upaya ini tercermin melalui penguatan kesetaraan gender yang diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) turut digunakan untuk mengukur sejauh mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dapat ditekan dalam berbagai aspek kehidupan. Perhatian terhadap perlindungan anak dan perempuan juga diwujudkan melalui pemantauan rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak, yang menjadi indikator penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan Perempuan atas perlindungan.

1) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG

dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Adapun Gambaran IPG di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel 2.131.

Tabel 2. 131
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

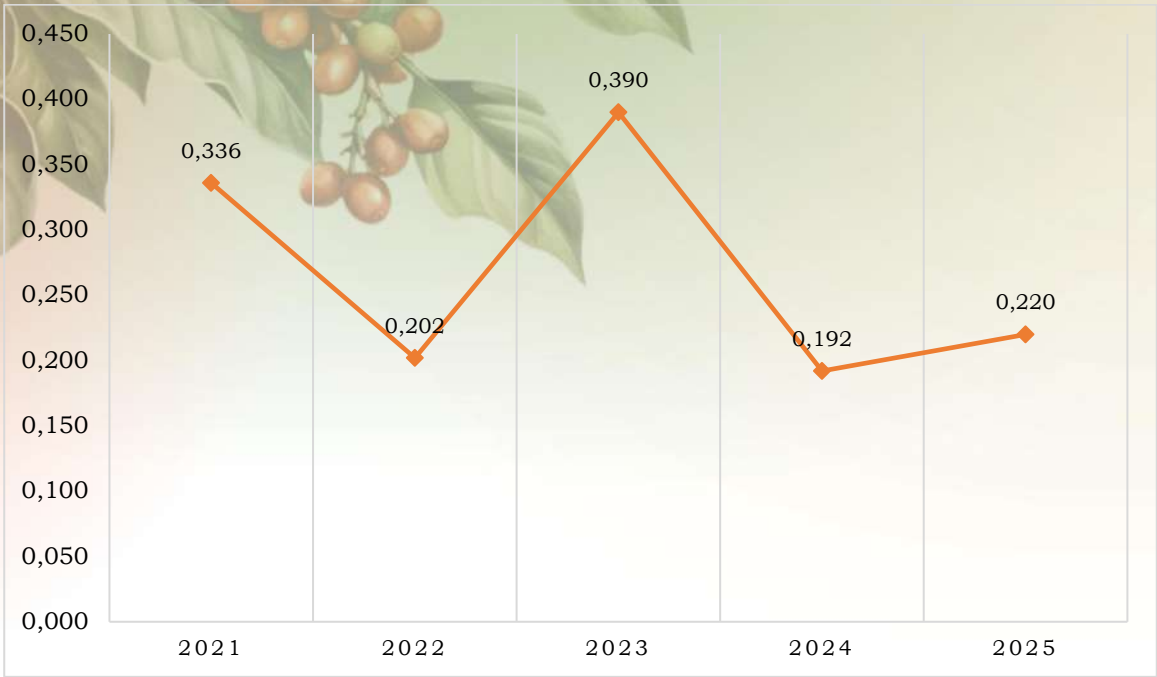
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Gender	angka	95,31	95,74	95,99	96,19	96,27

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung tahun 2021 hingga 2025, terlihat adanya tren peningkatan dari 95,31 pada tahun 2021 dan menjadi 96,27 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Temanggung semakin mengecil. Dengan nilai IPG yang semakin mendekati angka 100, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesetaraan gender di daerah ini mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Meski demikian, masih terdapat sedikit ketimpangan yang perlu terus diupayakan untuk dikurangi melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender.

2) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator baru yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi. Nilai Indeks Ketimpangan Gender berkisar antara 0 – 1, semakin kecil angka IKG menunjukan semakin kecil ketimpangan gender (semakin setara). Adapun nilai Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 disajikan pada gambar 2.49 berikut.



Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 49
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

Berdasarkan Gambar 2.49, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, IKG berada di angka 0,336 dan sempat membaik pada 2022 menjadi 0,202 dimana nilai ini mencerminkan berkurangnya ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi pasar kerja. Namun, terjadi lonjakan ketimpangan pada 2023 dengan indeks mencapai 0,39 dimana angka ini adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan kembali melemahnya kesetaraan akses dan peran antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, pada tahun 2024 nilai IKG kembali menurun ke angka 0,192, dan pada tahun 2025 naik lagi ke angka 0,220 menunjukkan adanya kesenjangan semakin tinggi.

3) Indek Pemberdayaan Gender

Nilai IDG (Indek Pemberdayaan Gender) menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan semakin tinggi nilai (mendekati 100), semakin tinggi pula tingkat partisipasi dan kemandirian perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Adapun Indek Pemberdayaan Gender Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 50
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

Berdasarkan gambar 2.50 diatas capaian IndeK pemberdayaan Gender di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sampai 2023 namun pada tahun 2024 mengalami penurunan dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2025 dengan capaian 74,28.

4) Rasio Peningkatan Pelayanan Dampak Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) terus berkomitmen dalam menyediakan layanan yang responsif dan menyeluruh bagi korban kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas intervensi ini adalah rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak, yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merespons dan menangani kasus-kasus kekerasan melalui peningkatan akses, kualitas, dan jangkauan layanan. Adapun rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada Perempuan dan anak Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada gambar 2.50 berikut.



Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 51
Rasio Peningkatan Pelayanan Dampak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung selama periode 2021 – 2025 menunjukkan bahwa pelayanan sudah tertangani dengan baik.

Urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian penting dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan inklusif di Kabupaten Temanggung. Melalui berbagai program strategis, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Adapun gambaran urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 132
Gambaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD*	%	NA	NA	4,38	8,22	9,90
2	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah*	%	1,79	1.80	2,42	2,27	3,02
3	Indeks Perlindungan Anak*	%	NA	NA	61,62	61,62	61,62
4	Persentase kasus kekerasan terhadap Perempuan yang melapor dan tertangani	%	100	100	100	100	100
5	Rasio kasus kekerasan terhadap Perempuan	angka	1,23	0,74	1,23	1,47	5,38
6	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	NA	NA	53,33	65,38	56,67
7	Kabupaten Layak Anak	%	NA	Madya	Madya	Madya	Madya

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
8	Persentase terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	%	NA	NA	NA	2,42	6,57
9	Persentase pernikahan usia anak	%	NA	NA	NA	0,124	0,042
10	Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	100	100	100	100	100
11	Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	2,58	4,76	3,47	4,02	7,41
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Data capaian dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang mencerminkan adanya kemajuan sekaligus tantangan, baik dalam aspek pemberdayaan, penurunan angka kekerasan, peningkatan layanan ramah anak, hingga penguatan kelembagaan seperti DRPPA dan Kabupaten Layak Anak.

1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Persentase ARG pada belanja langsung adalah proporsi anggaran yang mengintegrasikan analisis gender (ARG) dalam program dan kegiatan terhadap total belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada waktu tahun tertentu. Persentase ARG pada belanja operasional dan modal APBD pada tahun 2025 tercapai 9,90, lebih tinggi bila dibandingkan pada tahun sebelumnya.

2) Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan yang dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah. Sedangkan definisi dari keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada sektor pemerintah. Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2025 sebanyak 3,02%.

3) Indeks Perlindungan Anak

Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Indikator yang menggambarkan pencapaian hak hak anak, dan perlindungan khusus anak. Indeks ini biasanya disusun dari beberapa sub-indeks dan indikator yang mencerminkan:

- Hak atas identitas (misalnya kepemilikan akta kelahiran).
- Hak pengasuhan dan lingkungan keluarga.
- Hak kesehatan dasar.
- Hak pendidikan.
- Perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi.

Semakin tinggi nilai IPA, semakin baik tingkat perlindungan anak di daerah.

4) Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melapor dan Tertangani

Pada tahun 2025, persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani di Kabupaten Temanggung tercatat mencapai 100%. Capaian ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban. Sebagai indikator kinerja baru, angka ini menjadi capaian awal yang penting dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk berani melapor dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perlindungan yang tersedia.

5) Rasio Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Tren ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Fluktuasi ini bisa mencerminkan ketidakteraturan dalam pelaporan atau pengawasan kasus, dan mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif dalam sosialisasi, pencegahan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

6) Persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas

Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 53,33% pada tahun 2023 menjadi 56,67% pada tahun 2025. Kabupaten Temanggung memiliki total 26 puskesmas yang tersebar di 20 kecamatan dengan 17 puskesmas diantaranya sudah mendukung pelayanan ramah anak pada tahun 2025. Ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih ramah dan mendukung kebutuhan anak di fasilitas kesehatan. Harapan kedepannya, seluruh puskesmas di Kabupaten Temanggung dapat mendukung pelayanan ramah anak sehingga akses dan kualitas

layanan kesehatan untuk anak-anak semakin baik, sehingga mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

7) Kabupaten Layak Anak

Status Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten Layak Anak mendapatkan kategori Madya pada tahun 2022-2025. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung hak-hak anak. Meskipun begitu, upaya untuk mencapai status lebih tinggi (Utama) harus terus didorong. Penekanan pada kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih komprehensif akan sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan anak terlindungi dan diperhatikan dengan lebih baik.

8) Persentase Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

Pada tahun 2025, tercatat adanya 6,57% desa yang telah terbentuk sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Indikator ini mencerminkan upaya awal Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mengembangkan kebijakan dan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa. Ke depan, perlu dilakukan percepatan pembentukan DRPPA secara lebih luas melalui peningkatan kapasitas desa, pendampingan teknis, serta sinergi lintas sektor agar terbentuk lebih banyak desa yang mampu menciptakan ruang aman dan memberdayakan bagi perempuan dan anak.

9) Persentase Pernikahan Usia Anak

Pada tahun 2025, persentase pernikahan usia anak di Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 0,042%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan usia anak telah berjalan cukup efektif, dengan angka yang sangat kecil. Meskipun demikian, pernikahan usia anak tetap menjadi isu sensitif yang perlu mendapat perhatian serius karena berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak di masa depan. Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu terus mengintensifkan program edukasi, sosialisasi, serta pemberdayaan remaja dan keluarga, agar angka pernikahan usia anak dapat ditekan lebih jauh hingga mendekati nol.

10) Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Melapor dan Ditangani

Pada tahun 2025, persentase kasus kekerasan terhadap anak yang melapor dan berhasil ditangani di Kabupaten Temanggung mencapai 100%.

Angka ini menunjukkan bahwa seluruh laporan kekerasan terhadap anak ditindaklanjuti dengan baik, mencerminkan responsivitas dan efektivitas sistem perlindungan anak di daerah tersebut. Pencapaian ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan anak dan mendorong lebih banyak korban atau saksi untuk melapor. Ke depan, upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat dan penguatan jejaring perlindungan anak tetap perlu ditingkatkan untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

11) Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan sosial di Kabupaten Temanggung, mengingat anak adalah aset masa depan bangsa yang perlu dijaga dan dilindungi. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi perlindungan anak di Kabupaten Temanggung adalah Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Anak. Melalui indikator ini, dapat dilihat sejauh mana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak telah dilaksanakan secara efektif. Rasio kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi dengan angka yang lebih tinggi pada 2025 yaitu 7,41 dibandingkan dengan 4,02 pada tahun 2024. Meskipun ada penurunan pada 2022 dan 2023, angka yang tinggi pada tahun 2025 menandakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang memprihatinkan. Penguatan mekanisme perlindungan anak, seperti pendidikan tentang hak anak, pelatihan untuk orang tua, dan sistem pelaporan yang lebih efektif, sangat penting untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak di masa depan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan daerah karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan, kualitas hidup, dan kesehatan masyarakat. Ketahanan pangan daerah tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan produksi pangan, tetapi juga dapat dilihat dari ketahanan pangan, asupan energi masyarakat, serta pola konsumsi pangan masyarakat.

1) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan memberikan gambaran komprehensif mengenai ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, sekaligus menilai kerentanan wilayah terhadap guncangan seperti perubahan iklim atau krisis ekonomi. Ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang pengukurannya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional sejak Tahun 2019. Adapun kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 133
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81,69	80,08	77,84	78,91	68,5

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.133, capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Temanggung mengalami dari tahun 2021 hingga 2025 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indikator kinerja tujuan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator baru sehingga tidak bisa membandingkan capaian dengan tahun sebelumnya karena tidak ada target yang ditentukan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional bahwa angka Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 78,91. Pada tahun 2025, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung terealisasi sebesar 68,5 dari target sebesar 79,27. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 10,41 yang disebabkan menurunnya indikator Prioritas NCPR (*Non-Cereal Primary Ratio* atau rasio konsumsi pangan non-sereal terhadap total konsumsi pangan), prioritas protein hewani dan prioritas cadangan pangan. Penurunan capaian IKP pada tahun 2025 juga tidak terlepas dari adanya pemutakhiran pada indikator FSVA yang menjadi indikator untuk pengukuran IKP sehingga hasil penyusunan FSVA menggunakan metode lama tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan FSVA yang menggunakan metode termutakhirkan. Dampak perubahan tersebut kemudian berimplikasi pada capaian IKP. Jika melihat pada target akhir renstra capaian kinerja sebesar 84,86%, maka diperlukan upaya yang lebih untuk pencapaian target terutama pada indikator penyusun IKP yang masih merah (Prioritas NCPR, prioritas protein hewani dan prioritas cadangan pangan).

2) *Prevalence of Undernourishment* (PoU)

Jika IKP mengukur ketahanan pangan pada tingkat kabupaten, maka ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator Ketidacukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan yang diukur oleh BPS. Prevalensi ketidacukupan konsumsi diukur untuk mengetahui proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini membantu dalam memonitor tren atau perubahan pola ketidacukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu. Adapun Ketidacukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 134
Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	%	18,48	14,99	10,26	11,72	11,23

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (PoU) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2022 angka menurun signifikan menjadi 14,99% dan 10,26% pada 2023, mencerminkan perbaikan dalam akses, distribusi, serta kesadaran konsumsi pangan yang lebih sehat. Namun, pada 2024 terjadi kenaikan kembali menjadi 11,72%, yang mengindikasikan penurunan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi minimal. Kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor seperti fluktuasi produksi, harga pangan, dan inflasi yang mengurangi daya beli, sehingga menuntut adanya langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi kelompok rentan. Tahun 2025 turun menjadi 11,23% kemungkinan dipengaruhi oleh kegiatan penyaluran bantuan pangan (Cadangan beras pemerintah) kepada masyarakat sebanyak 69.864 penerima.

Pemerintah Kabupaten Temanggung secara konsisten melakukan pemantauan terhadap berbagai indikator ketahanan pangan, termasuk ketersediaan, kualitas pangan, serta penanganan kerawanan pangan. Adapun gambaran indikator kinerja program bidang pangan Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 135
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	79,7	80,10	93,5	89,43	89,87
2	Persentase ketersediaan pangan pokok	Angka	NA	NA	NA	100	98,63
3	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan segar	%	100	100	100	100	93,10
4	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	NA	NA	NA	100	100

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Data dari tahun 2021 hingga 2025 berdasarkan tabel 2.137 menunjukkan dinamika yang menggambarkan tantangan dan capaian dalam mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan, aman, dan inklusif. Evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan.

1) Skor Pola Pangan Harapan

Salah satu indikator untuk mengukur ketahanan pangan adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang mencerminkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH yang tinggi menunjukkan pola konsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi, mendekati standar ideal yang dianjurkan. Kabupaten Temanggung, melalui berbagai program dan intervensi di bidang pangan, terus berupaya meningkatkan skor ini dari tahun ke tahun. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 89,43 pada tahun 2024 dan meningkat lagi pada Tahun 2025 menjadi 89,87. Penurunan skor PPH pada 2024 ini disebabkan oleh berkurangnya konsumsi pada sejumlah kelompok pangan penting, yakni padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, buah, serta kelompok pangan lain, sementara konsumsi minyak dan lemak justru meningkat. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya ketidakseimbangan dalam pola konsumsi masyarakat yang dapat berdampak terhadap kualitas gizi dan kesehatan. Meski skor masih tergolong baik, pergeseran pola pangan ini perlu diwaspadai agar tidak berlanjut pada penurunan kualitas ketahanan pangan di masa mendatang. Upaya edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta promosi pangan lokal perlu terus diperkuat untuk menjaga dan meningkatkan skor PPH ke depannya.

2) Persentase Ketersediaan Pangan Pokok

Persentase Ketersediaan Pangan Pokok di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 menurun dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman, terbatasnya lahan produktif, penerapan GAP dan GHP belum sesuai standart;
- b. Gangguan rantai pasok, ketinngangan distribusi antar wiayah (daerah surplus dan defisit);
- c. Harga pangan tidak stabil (inflasi pangan), daya beli masyarakat rendah;
- d. Harga pangan tidak stabil (inflasi pangan), daya beli masyarakat rendah.

3) Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu Keamanan Pangan Segar

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang keamanan pangan adalah tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, secara rutin dilakukan pemeriksaan sampel pangan untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan segar di Kabupaten Temanggung menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan angka 100% selama periode 2021 hingga 2024. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh sampel pangan segar yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, adapun sampel yang tidak memenuhi standar maka segera dilakukan penelusuran sumber dan penarikan dari peredaran, serta dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha pangan terkait guna mencegah terulangnya pelanggaran yang sama. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat. Pada Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 93,10 %, hal ini disebabkan oleh :

- a. Terbatasnya pemahaman dan kesadaran sebagian pelaku usaha pangan, khususnya pada skala kecil, terhadap standar keamanan pangan dan cara penanganan pangan segar yang baik;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas penyimpanan, alat transportasi yang memadai, serta teknologi pascapanen juga dapat mempengaruhi kualitas pangan segar yang beredar di masyarakat. Proses distribusi yang panjang dan kurang terjaganya rantai dingin (cold chain) juga dapat menyebabkan penurunan mutu produk pangan;

- c. Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan dan pengujian mutu pangan secara menyeluruh juga menjadi tantangan, sehingga belum seluruh produk pangan segar dapat terpantau secara optimal.

4) Persentase Penanganan Kerawanan Pangan

Pada tahun 2025, Persentase Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Temanggung berhasil mencapai 100%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat. Berdasarkan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA), meskipun terdapat 10 desa yang masuk kategori rentan rawan pangan prioritas 2 dan 3, upaya intervensi tidak hanya difokuskan pada desa tersebut, melainkan diperluas mencakup seluruh 20 kecamatan. Penanganan dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah untuk memastikan keterjangkauan dan ketersediaan pangan, serta program bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada 86.754 jiwa. Pendekatan yang luas dan menyeluruh ini menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung tidak hanya fokus mengatasi kerawanan di titik rawan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan secara umum di seluruh wilayah. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kestabilan pangan di tengah potensi tekanan ekonomi dan iklim ke depan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan pemerintahan di bidang pertanahan merupakan salah satu aspek krusial dalam mendukung tertib administrasi, kepastian hukum, serta pengelolaan ruang yang adil dan berkelanjutan. Pengelolaan pertanahan yang baik menjadi fondasi bagi pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam, serta perlindungan hak atas tanah masyarakat. Di tingkat daerah, urusan pertanahan tidak hanya mencakup pelayanan administrasi pertanahan, tetapi juga penataan, pengendalian, serta penyelesaian konflik agraria yang sering kali menjadi hambatan dalam pembangunan. Sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan pertanahan, perlu dilaksanakan fasilitasi terhadap berbagai program strategis, termasuk reforma agraria dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Fasilitasi ini bertujuan untuk mempercepat penataan dan pemerataan penguasaan tanah serta memastikan pelaksanaan pengadaan tanah berjalan dengan transparan dan berkeadilan, sehingga mendukung kepastian hukum dan kelancaran pembangunan daerah.

1) Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi

Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi merupakan indikator penting yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil mendukung pelaksanaan reforma agraria melalui proses fasilitasi penataan aset dan akses tanah bagi masyarakat. Indikator ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil, sekaligus menyelesaikan konflik agraria yang menjadi hambatan pembangunan. Fasilitasi reforma agraria meliputi kegiatan pendataan, verifikasi, mediasi, serta pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan tanah dapat berlangsung secara produktif dan berkelanjutan. Peningkatan persentase fasilitasi reforma agraria menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat keadilan agraria dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya lokal. Adapun Reforma Agraria yang Difasilitasi Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 tersaji pada tabel 2.136 berikut.

Tabel 2. 136
Reforma Agraria yang Difasilitasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Faktor pendukung dari capaian indikator tersebut di atas antara lain karena adanya koordinasi lintas sektor terkait dengan reforma agraria yang difasilitasi di Kabupaten Temanggung, meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala karena kurang pahamnya masyarakat tentang reforma agraria. Sebagai upaya tindaklanjutnya dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung reforma agraria di Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama dengan ATR/BPN Temanggung bersinergi pada program pengadaan tanah untuk proyek strategis daerah seperti Bendungan Bodri dan pendampingan usaha reforma agraria yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, membuka peluang ekonomi, dan mendukung peningkatan kesejahteraan penerima manfaat Reforma Agraria.

2) Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum merupakan indikator yang mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses pengadaan tanah yang

diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan publik lainnya. Indikator ini menilai sejauh mana pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak masyarakat terdampak dapat terlindungi dengan baik. Fasilitasi yang optimal dalam pengadaan tanah sangat penting untuk mempercepat realisasi proyek pembangunan daerah tanpa menimbulkan konflik atau ketidakpastian hukum. Adapun Reforma Agraria yang Difasilitasi Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 tersaji pada tabel 2.137 berikut.

Tabel 2. 137
Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Faktor pendukung dari capaian indikator tersebut di atas anara lain karena adanya koordinasi lintas sektor terkait dalam upaya penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Temanggung, meskipun pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan perbedaan persepsi terhadap nilai ganti rugi dalam pengadaan tanah sehingga kesulitan mendapat kesepakatan harga ganti rugi. Sebagai upaya tindaklanjutnya dilakukan dengan cara sosialisasi dan mediasi sejak awal program kepada masyarakat.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, dengan fokus utama pada upaya pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mitigasi perubahan iklim. Dalam rangka mengukur kinerja bidang ini, dua indikator penting yang menjadi perhatian adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). IKLH mencerminkan kondisi kualitas udara, air, dan tutupan lahan yang menjadi dasar bagi kelestarian ekosistem, sementara upaya penurunan emisi GRK menjadi kontribusi nyata Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Sinergi antara peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan emisi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian alam.

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kualitas lingkungan hidup terukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan komponennya Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel 2.138 berikut.

Tabel 2. 138
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	67,78	52,22	64,07	59,63	74,17
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	81,95	83,82	85,10	87,44	77,23
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	53,16	53,19	48,9	46,81	60,15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		70,32	65,23	69,27	68,25	72,54

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.138, dapat diketahui bahwa nilai IKLH Kabupaten Temanggung mengalami fluktuatif dari tahun 2021 (70,32) hingga tahun 2024 (68,25). Pada tahun 2025, IKLH menjadi 72,54 yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika ditinjau lebih lanjut, Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung menunjukan tren positif dengan peningkatan sejak tahun 2021 (81,95) hingga 2024 (87,44), namun terjadi penurunan di tahun 2025 sebesar (77,23). Sementara itu, Indeks Kualitas Air mengalami fluktuasi, dengan penurunan dari 67,78 (2021) hingga mencapai 52,22 (2022), meskipun begitu terdapat penurunan menjadi 59,63 pada tahun 2024, namun terjadi peningkatan di tahun 2025 sebesar (74,17).

2) Penurunan Intensitas Emisi GRK

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Temanggung menunjukkan perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pola penggunaan lahan, perkembangan sektor industri, serta implementasi kebijakan pengurangan emisi. Pada tahun 2025 emisi GRK di Kabupaten Temanggung mencapai 709,905.71 Ton CO₂eq.

Kabupaten Temanggung sudah melakukan aksi mitigasi penurunan

emisi yang dilaporkan dalam aplikasi AKSARA pada tahun 2021-2025 yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengelolaan limbah, pengelolaan tanaman terpadu. Secara akumulasi potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung tahun 2024 mencapai 690.921,63 Ton CO₂eq dengan rincian potensi penurunan terbesar berada di tahun 2021 mencapai 574.886,19 Ton CO₂eq karena adanya kegiatan unit pengolahan pupuk organik (UPPO). Dengan adanya pengolahan pupuk organik maka dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, karena faktor emisi antara pupuk organik dan pupuk kimia berbeda. Sehingga salah satu upaya mitigasi penurunan emisi GRK di sektor pertanian diarahkan untuk penggunaan pupuk organik. Berikut ditampilkan kegiatan aksi mitigasi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2. 139
Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Tahun 2021-2025

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	Lahan	580.667,31	678.729,66	678.729,66	679.087,37	679.087,37
B	Pengelolaan Limbah	8.035,4	12.420,59	21.455,12	22.269,45	30.818,38
Grand Total		588.702,71	691.150,25	700.184,78	701.356,82	709.905,75

Sumber: AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon), 2025

Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung juga diikuti upaya pengembangan energi terbarukan yang berbasis potensi lokal daerah dalam rangka pembangunan rendah karbon yang bekerja sama dengan perguruan tinggi salah satunya Fakultas Teknik UNY yang mengembangkan sistem energi *hybrid off-grid* yang menggabungkan tenaga surya dan air untuk menyediakan pasokan listrik kepada 15 warung kelontong di Wisata Alam Posong guna mengatasi masalah akses kelistrikan karena kondisi geografis. Upaya pemanfaatan energi terbarukan lainnya diinisiasi oleh Politeknik Negeri Semarang yang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) di Desa Kebonagung, Kecamatan Selopampang setelah melihat adanya potensi aliran sungai di Desa Kebonagung dengan tujuan untuk mendukung program pengembangan pertanian mandiri.

Pemerintah Kabupaten Temanggung secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai indikator lingkungan hidup guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan kesadaran lingkungan. Berbagai indikator

kinerja, seperti pengelolaan dokumen lingkungan, pemantauan kualitas air dan udara, pengelolaan sampah, hingga pengembangan sekolah berwawasan lingkungan, menjadi tolok ukur penting dalam mengukur efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Capaian indikator ini juga turut mendukung perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Temanggung.

Gambaran lengkap capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Temanggung tahun Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel 2.140.

Tabel 2. 140
Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung
Tahun Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
2	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	0	100	100	100	85,71
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	67,78	52,22	64,07	59,63	74,17
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	81,95	83,82	85,10	87,84	77,23
5	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	53,16	53,19	48,9	46,81	60,15
6	Luas lahan kritis tertangani*	Ha	NA	NA	NA	NA	33,125
7	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola*	%	NA	NA	NA	7,08	7,08
8	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Temanggung*	%	NA	NA	NA	NA	30,23
9	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Temanggung*	%	NA	NA	NA	NA	15,7
10	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	%	100	100	100	92,02	81,70
11	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
12	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100
13	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air*	%	NA	NA	NA	100	100
14	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara*	%	NA	NA	NA	100	100
15	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	27,33	27,87	27,87	28,93	30,80
16	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	82,35	84,62	100	100	100
17	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (IUP)	%	32	59,19	61,26	32,98	33,84
18	Persentase sampah yang terkelola	%	32	59,19	61,26	62,91	63,28
19	Cakupan pelayanan persampahan	%	53,63	61,24	68,51	74,39	76,47
Keterangan:							
*Indikator Baru							

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Data dari tahun 2021 hingga 2025 berdasarkan tabel 2.142 menunjukkan dinamika yang menggambarkan berbagai tantangan

sekaligus capaian dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung. Evaluasi terhadap seluruh indikator ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup di masa mendatang, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.

1) Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan konsistensi yang sangat baik sejak tahun 2021 hingga 2025 dengan capaian 100%. Pada tahun 2024, telah disahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054. Selain itu, Kabupaten Temanggung telah menyusun dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029; Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD); dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

2) Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

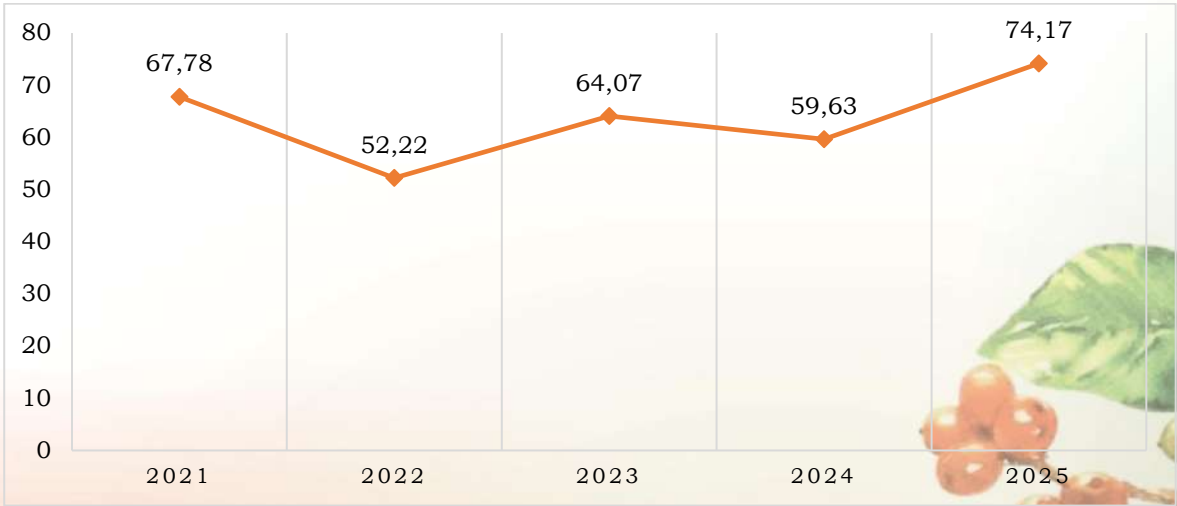
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik yang berdampak penting maupun tidak, wajib memiliki persetujuan lingkungan. Persetujuan ini diperoleh melalui dua mekanisme, yaitu penyusunan dan uji kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bagi kegiatan yang memiliki dampak penting, serta penyusunan dan pemeriksaan formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) bagi kegiatan yang dampaknya tidak signifikan. Dengan demikian, dokumen Amdal wajib dimiliki oleh kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan, sedangkan dokumen UKL-UPL diwajibkan bagi kegiatan dengan dampak yang lebih kecil, sebagai bentuk tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta keputusan kelayakan lingkungan hidup meningkat signifikan dari 0% di tahun 2021 menjadi 100% sampai Tahun

2024. Pada Tahun 2025 realisasi turun menjadi 85,71 karena dari 7 pengajuan baru 6 ajuan yang disetujui. Hal tersebut dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang membutuhkan penyesuaian dalam regulasi dan pelaksanaan proses penerbitan Persetujuan Lingkungan. Pengajuan permohonan persetujuan lingkungan dengan penyusunan dplh Laboratorium Kesehatan Temanggung masih dalam proses perbaikan dokumen

3) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu: pH, TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform. Berdasarkan hasil dari pemantauan titik kualitas air permukaan dan perhitungan Indeks Kualitas Air, maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 sebagaimana pada gambar berikut.



Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 52
Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi selama periode 2021 – 2025. Nilai IKA menurun signifikan dari 67,78 pada tahun 2021 menjadi 52,22 pada tahun 2022, namun kembali naik pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2025, IKA tercatat sebesar 74,17, masih menunjukkan kualitas air yang perlu ditingkatkan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Temanggung masih menghadapi tantangan, seperti pencemaran limbah domestik dan pertanian, serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan air limbah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam menjaga kualitas air, termasuk penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air.

Mengingat DAS Bodri merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung dari hulu hingga hilir, diperlukan upaya intervensi yang nyata dari Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai wilayah hulu untuk mengurangi risiko degradasi lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya air. Berbagai upaya yang telah dan perlu terus dilakukan antara lain rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman vegetasi konservasi, perlindungan dan pelestarian mata air, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air seperti terasering, sumur resapan, dan cekdam, serta penerapan pola budidaya pertanian konservasi pada lahan berlereng. Selain itu, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan partisipasi kelompok tani dalam konservasi lahan, serta sinergi antarwilayah dalam pengelolaan DAS juga menjadi aspek penting untuk memastikan keberhasilan pengendalian erosi dan sedimentasi. Dengan adanya berbagai intervensi tersebut, diharapkan fungsi DAS Bodri sebagai daerah tangkapan air dapat terjaga, risiko bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan, serta keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat di wilayah hulu maupun hilir dapat tetap terjamin.

4) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Udara yaitu: SO_2 dan NO_2 . Adapun Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 sebagaimana pada gambar berikut.



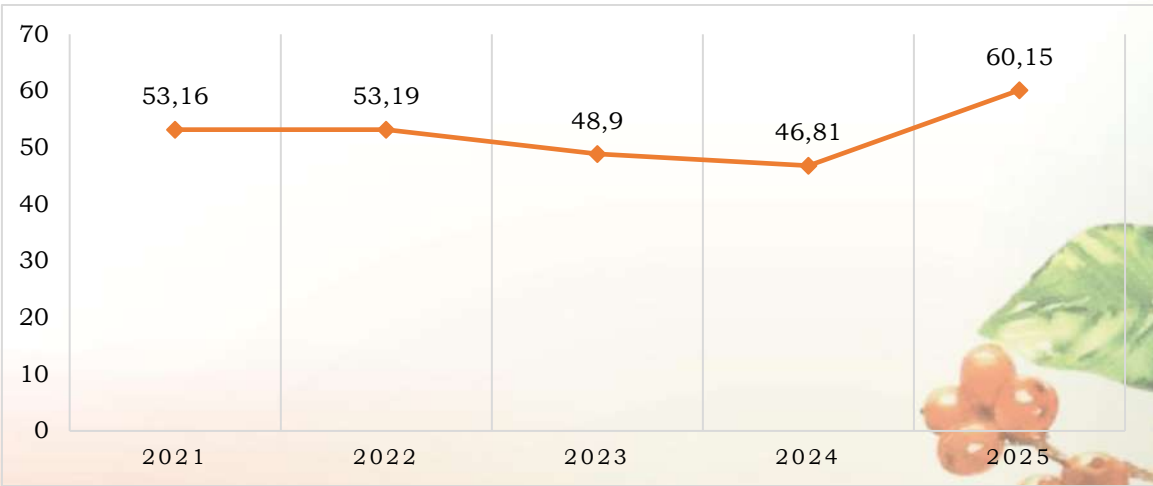
Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 53
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung selama periode 2021 – 2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021, IKU berada di angka 81,95. Kualitas udara terus membaik pada tahun-tahun berikutnya, dengan capaian 83,82 pada 2022, 85,10 pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 87,84 pada 2024. Namun menurun di 2025 menjadi 77,23.

5) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi kualitas lahan berdasarkan parameter seperti luas tutupan hutan, semak/belukar, semak/belukar rawa, ruang terbuka hijau, serta rehabilitasi hutan dan lahan. Penilaian IKL ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari upaya pemantauan kualitas lingkungan secara nasional. Adapun Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 sebagai berikut.



Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 54
Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan selama periode 2021 – 2025. Pada tahun 2020, IKL tercatat sebesar 74,33, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 menjadi 53,16 dan relatif stagnan pada tahun 2022 dengan nilai 53,19. Penurunan berlanjut hingga mencapai 46,81 pada tahun 2024 dan naik menjadi 60,15 pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya degradasi lahan yang dapat disebabkan oleh alih fungsi lahan, erosi, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, serta kurangnya rehabilitasi lahan kritis, sehingga diperlukan intervensi yang lebih kuat untuk menjaga dan memperbaiki kualitas lahan di Kabupaten Temanggung.

6) Luas Lahan Kritis Tertangani

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Lahan kritis merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dapat berdampak serius terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, khususnya dalam hal konservasi tanah dan air. Penanganan lahan kritis menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana seperti longsor dan banjir. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) terus berupaya melakukan rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis secara bertahap dari tahun ke tahun. Adapun upaya penanganan lahan kritis pada periode 2021 hingga 2025 menunjukkan peningkatan. Luas lahan kritis yang ditangani tercatat kumulatif, dimulai dari 12,89 hektar pada tahun 2020 dan 2021, meningkat menjadi 180,275 hektar pada 2022, 253,063 hektar pada 2023, dan mencapai 317,708 hektar pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan intensifikasi dalam program rehabilitasi lahan oleh pemerintah daerah, meskipun cakupan

penanganan masih perlu ditingkatkan untuk mempercepat pemulihan seluruh lahan kritis yang ada. Pada Tahun 2025 akumulasi luas lahan kritis yang tertangani seluas 33,125 Ha dari luas lahan kritis seluas 29.831,58.

Penetapan lahan kritis didasarkan pada kondisi penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, kondisi batuan dan produktivitas lahan dan diuraikan untuk masing-masing kawasan dengan perincian kondisi tidak kritis (TK), Kritis (K) dan Sangat Kritis (SK). Berdasarkan perincian tersebut, kondisi lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 141
Luas Kekritisan Lahan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Luas Lahan Kewenangan Kabupaten (hektar)			Total Kritis Kewenangan Kabupaten
		Tidak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1	Bansari	245.41	708.17	671.63	1379.81
2	Bejen	2830.81	600.99	95.18	696.16
3	Bulu	526.95	1374.02	2228.34	3602.36
4	Candiroto	2915.77	861.44	130.45	991.89
5	Gemawang	5095.59	188.94	0.00	188.94
6	Jumo	1654.75	1023.08	0.00	1023.08
7	Kaloran	4130.12	2224.03	0.00	2224.03
8	Kandangan	4985.98	1408.10	0.00	1408.10
9	Kedu	2809.06	907.99	0.00	907.99
10	Kledung	284.73	270.89	2273.83	2544.72
11	Kranggan	4056.66	1260.06	0.00	1260.06
12	Ngadirejo	481.72	2038.09	814.42	2852.51
13	Parakan	750.93	993.78	521.41	1515.19
14	Pringsurat	5263.37	691.79	0.00	691.79
15	Selopampang	450.12	780.48	547.61	1328.09
16	Temanggung	1901.70	1323.17	4.15	1327.32
17	Tembarak	694.09	670.92	988.92	1659.84
18	Tlogomulyo	295.65	350.61	1553.71	1904.32
19	Tretep	1435.61	1164.49	242.29	1406.78
20	Wonoboyo	2267.38	830.11	88.48	918.59
Total		43076.40	19671.16	10160.42	29831.58

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Perhitungan luasan lahan kritis tertangani dihitung berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel 2. 142
Perhitungan Luas Lahan Kritis Tertangani Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

No	Tahun	Kategori Bibit	Jumlah Distribusi (bibit tanaman)	Konstanta	Luasan (Ha)	Total Luas (Ha)
1	2025	Pohon Bertajuk	13.048	/400	32,62	33,125
		Vetiver	5.050	/10.000	0,505	

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Faktor pendorong capaian indikator tersebut di atas antara lain:

- a. Kondisi cuaca tahun 2025 yang masih cukup banyak hujan (kemarau basah) mendukung kegiatan penanaman secara mandiri oleh Desa/komunitas, sehingga dapat dilaksanakan sepanjang tahun;
- b. Persediaan bibit dari tahun sebelumnya masih cukup untuk melayani permohonan dari masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala antara lain stok bibit tanaman yang tersedia jenisnya terbatas sehingga permohonan dari masyarakat untuk kegiatan penanaman tidak dapat diakomodir secara maksimal. Sebagai upaya tindaklanjutnya antara lain

- a. Melakukan perawatan sisa bibit yang tersisa
- b. Sosialisasi terkait kesadaran untuk turut serta melakukan kegiatan konservasi.

7) Persentase Sumber Mata Air yang Dilindungi dan Dikelola

Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,08%, yang merupakan data awal dari indikator baru dalam pengelolaan sumber daya air. Indikator ini menunjukkan bahwa isu perlindungan mata air mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Perlindungan sumber mata air sangat krusial untuk menjamin ketersediaan air bersih, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung ketahanan lingkungan, terutama mengingat Temanggung merupakan wilayah pegunungan dengan banyak mata air strategis. Capaian awal ini dapat menjadi pijakan penting untuk pengembangan program yang lebih terencana dan berkelanjutan, dengan melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian sumber air.

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian mata air, DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai upaya teknis dan vegetatif yang bertujuan menjaga kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan mata air. Beberapa intervensi yang telah dilakukan dalam rangka konservasi dan perlindungan mata air baik oleh pemerintah maupun masyarakat di antaranya:

a) Penetapan Kawasan Lindung

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044, telah ditetapkan sejumlah kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung seluas 15.264,62 ha. Kawasan Lindung tersebut meliputi Badan Air (508 ha), Kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung (3.211 ha) dan Kawasan Cagar Budaya.

b) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pada tahun 2025, ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2025 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 22.000 hektar. Dalam Perda ini diperkuat aspek konservasi tanah dan air dalam pemanfaatan lahan.

c) Penanaman dan Peremajaan Kopi

Untuk kembali meningkatkan produksi komoditas utama Kabupaten Temanggung khususnya kopi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Pertanian Kabupaten Temanggung mendorong penanaman kopi baik jenis arabika dan robusta di 8 kecamatan kepada 91 Kelompok Tani untuk meningkatkan penghasilan petani sekaligus mendukung upaya konservasi. Pada tahun 2025, DKPP Kabupaten Temanggung menyalurkan bibit Kopi Robusta dan Arabika sebanyak 500.000 batang di lahan seluas 50 hektare untuk mendukung kegiatan konservasi lahan di dataran tinggi lereng Gunung Sumbing khususnya di Kecamatan Selopampang dan Kecamatan Tembarak. Dalam pelaksanaannya, penanaman ini melibatkan stakeholder terkait dan siswa sekolah agar kegiatan ini juga dapat menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap sektor pertanian dan pelestarian lingkungan.

d) Gerakan Konservasi Tanah dan Air

Konservasi lahan kritis dan sumber mata air merupakan upaya serius dari Kabupaten Temanggung dalam menghadapi permasalahan kurangnya tutupan lahan. Sejak membentuk Komite Konservasi pada 8 Oktober 2021, berbagai upaya konservasi diantaranya adalah penanaman pohon untuk meningkatkan tutupan vegetasi, memperbaiki lahan kritis dan melindungi mata air di Kabupaten Temanggung. Kegiatan reboisasi dan penghijauan di Kabupaten Temanggung dilakukan di berbagai titik khususnya di wilayah lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung dan lahan kritis. Gerakan Konservasi tanah dan Air Tahun 2025 memiliki tema yang spesifik diantaranya adalah penanganan konflik satwa dengan penanaman tanaman buah di habitat Monyet Ekor Panjang, pelestarian mata air dengan penanaman tanaman konservasi seperti aren, sukun, beringin serta agroforestry kopi dan mitigasi bencana melalui penanaman rumput vetiver dan bambu di titik-titik rawan longsor dan terabrasi. Kegiatan konservasi tanah dan air di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 mencakup 94 desa di 11 Kecamatan.

e) Pembuatan Sumur Resapan di sekitar Mata Air

Untuk mengintegrasikan berbagai aksi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Temanggung, dibentuk Forum Koordinasi Sumber Daya Air Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/159 tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, dan USAID IUWASH Tangguh sepakat untuk melakukan rencana aksi konservasi di daerah tangkapan Mata Air Tuk Mulyo yang menjadi salah satu sumber air baku terbesar Perumda Air Minum Tirta Agung yakni upaya konservasi sipil teknis berupa pembangunan sumur resapan. Hingga Februari 2026, telah terbangun 711 titik sumur resapan.

f) Pengembangan Greenhouse Pertanian

Pengembangan greenhouse pertanian di Kabupaten Temanggung menjadi salah satu pendekatan inovatif untuk menjawab berbagai permasalahan lahan, khususnya keterbatasan daya dukung dan tekanan pemanfaatan ruang. Dalam kegiatan budidaya pertanian, penggunaan sistem greenhouse memiliki keunggulan baik dari aspek iklim mikro, penggunaan air, maupun input pertanian seperti pupuk dan pestisida. Hal ini memungkinkan peningkatan produktivitas lahan secara signifikan, sekaligus mengurangi tekanan terhadap lahan terbuka, termasuk kawasan dengan fungsi lindung.

g) “Rabu Pon” (Gerakan Ibu Menanam Pohon)

Gerakan Ibu Menanam Pohon, atau Program "Rabu Pon", merupakan inisiatif PKK Provinsi Jawa Tengah yang juga diimplementasikan di Kabupaten Temanggung dan wilayah sekitarnya untuk pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan pangan keluarga.

8) Persentase Titik Pemantauan Kualitas Air Permukaan di Kabupaten Temanggung

Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pemantauan terhadap kualitas air pada badan-badan air permukaan, seperti sungai, danau, dan waduk. Indikator ini penting untuk menilai tingkat pencemaran, menjaga kesehatan ekosistem perairan, serta menyediakan data yang akurat sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Indikator ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya sistem pemantauan kualitas air yang andal dan berkelanjutan.

9) Persentase Titik Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Temanggung

Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan pemantauan terhadap kondisi udara. Pemantauan kualitas udara sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk dan area dekat sumber polusi seperti jalan utama dan kawasan industri. Dengan adanya pemantauan yang terukur dan berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi pencemaran lebih dini serta merumuskan kebijakan pengendalian udara ambien yang lebih efektif dan berbasis data.

10) Persentase RTH Publik Kabupaten yang Terpelihara

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan, menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan ekosistem perkotaan. Selama periode 2021 – 2025, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya menjaga RTH publik milik pemerintah dengan capaian sebagaimana pada tabel 2.143 berikut.

Tabel 2. 143
Persentase RTH Publik Kabupaten Temanggung yang Terpelihara
Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	100	100	100	92,02	81,70
2	Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani (m ²)	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.352,21	149.297,38
3	Luas RTH Milik Pemerintah Daerah (m ²)	79.628,3	79.628,3	79.628,3	86.232,21	182.742,8

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.143, persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terpelihara menunjukkan konsistensi penuh pada tahun 2020 hingga 2023 sebesar 100%, namun mengalami penurunan menjadi 81,70% pada tahun 2025. Penurunan ini bukan disebabkan oleh berkurangnya luasan RTH yang tertangani, melainkan karena adanya penambahan luasan total RTH menjadi 86.232,21 m² akibat perpindahan aset pengelolaan. Beberapa tambahan RTH tersebut antara lain Hutan Kota Potrokasan, RTH Taman Pikatan, serta Hutan Cagar Alam/Monumen Kuda Lumping. Selain itu, perubahan fungsi sebagian RTH menjadi area non-RTH juga berkontribusi terhadap turunnya persentase RTH yang tertangani.

Untuk menjaga kondisi RTH di Kabupaten Temanggung tetap dalam

kondisi baik, secara rutin dilakukan pemeliharaan RTH meliputi penyiraman tanaman, penggantian tanaman yang mati serta pemangkasan dan perapian tajuk tanaman dan pohon. Selain itu, DPRKPLH Kabupaten Temanggung juga menyediakan pembibitan tanaman hias untuk mendukung pemeliharaan RTH publik di lingkungan perkotaan Kabupaten Temanggung. Selain itu, dalam rangka menjaga kondisi tata guna lahan beberapa intervensi yang dilakukan di antaranya menetapkan kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung untuk menjaga pemenuhan luasan RTH minimal dan pengendalian perubahan tata guna lahan yang masif di daerah.

11) Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

Pada tahun 2021 – 2025, seluruh pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung telah ditindaklanjuti. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat responsif terhadap keluhan masyarakat terkait isu lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong partisipasi warga dalam pelestarian lingkungan.

12) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup menunjukkan angka maksimal 100% sejak 2021 hingga 2025. Ini mengindikasikan bahwa Pemkab Temanggung tidak hanya memastikan keberadaan dokumen lingkungan, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap implementasinya.

13) Persentase Pembinaan Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Air

Pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025

menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam tata kelola lingkungan di mana dari total 148,045940 ton limbah B3 yang dihasilkan oleh berbagai sektor (seperti fasilitas pelayanan kesehatan, industri pengolahan kayu, tekstil, dan manufaktur lainnya) pemerintah daerah bersama pihak terkait berhasil mengelola sebanyak 147,062760 ton dan masih terdapat sisa sebesar 0,983180 ton yang belum terkelola. Jika dikonversikan ke dalam bentuk persentase, maka capaian tingkat pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 telah mencapai 99,34%. Keberhasilan dalam capaian tersebut tidak lepas dari peran krusial sistem pengangkutan (transportasi) yang berbasis regulasi (transporter berizin). Hal ini mengingat sebagian besar fasilitas penghasil limbah di Temanggung seperti rumah sakit, puskesmas, industri pengolahan kayu, dan tekstil tidak memiliki fasilitas pemusnahan akhir sendiri, peran transporter limbah B3 berizin menjadi jembatan utama dalam menjaga mata rantai pengelolaan lingkungan yang aman. Meskipun capaian tersebut menunjukkan keberhasilan yang cukup baik, untuk mencapai target *zero-waste* limbah B3 tidak terkelola di masa depan, Kabupaten Temanggung perlu terus memperkuat fasilitasi drop-point (wadah pengumpulan) dan transporter khusus limbah B3 ataupun mendorong pada pemanfaatan limbah B3 secara mandiri di lokasi penghasil (*on-site utilization*) untuk mengurangi ketergantungan penuh pada pihak ketiga dalam rangka efisiensi logistik dan biaya operasional bagi pelaku industri.

Limbah B3 yang Dihasilkan Tahun 2025 : 148,045940 ton

Limbah B3 yang Dikelola Tahun 2025 : 147,062760 ton

Sisa Limbah B3 yang Tidak Terkelola : 0,983180 ton

14) Persentase Pembinaan Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Udara

Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara tercatat pada tahun 2025 dengan capaian 100%. Hal ini menandakan adanya komitmen baru dalam membina usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara. Pembinaan ini penting untuk mengurangi potensi gangguan kesehatan masyarakat akibat kualitas udara buruk. Melalui pendekatan preventif, pelaku usaha bisa lebih siap dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan.

15) Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan

Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti

program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Cakupan sekolah berwawasan lingkungan adalah jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung dari seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebanyak 750 sekolah. Adapun Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan sebagaimana pada tabel 2.144.

Tabel 2. 144
Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan Kabupaten Temanggung yang Terpelihara Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Sekolah Adiwiyata	205	209	209	217	231
2	Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	750	750	750	750	750
3	Persentase (%)	27,33	27,87	27,87	28,93	30,80

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Persentase sekolah berwawasan lingkungan atau sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dari tahun 2021 hingga 2025. Jumlah sekolah Adiwiyata secara akumulatif meningkat dari 205 sekolah pada tahun 2021 menjadi 231 sekolah pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menanamkan nilai-nilai lingkungan hidup sejak dini. Sekolah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga kelestarian alam di tingkat komunitas.

16) Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup

Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan Hidup. Penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru (Kelompok masyarakat/Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklam (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim. Adapun jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup

tahun 2021 – 2025 di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.145 berikut.

Tabel 2. 145
Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah yang mendapatkan penghargaan	14	11	16	25	6
2	Jumlah usulan penghargaan yang diusulkan tiap tahun	17	13	9	15	6
3	Persentase (%)	82,35	84,62	100	100	100

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

17) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolah Sampah

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, non organik dan residu. Sampah organik dapat dikompos menjadi pupuk organik atau kompos maupun untuk budidaya maggot BSF yang saat ini banyak dikembangkan, sampah anorganik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plastik belanja dan lain-lain. Adapun capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 tersaji pada tabel 2.146.

Tabel 2. 146
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Capaian s.d Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (Ton/Tahun)	1.938,25	34.088,15	36.300,9	46.089,71	50.819,56
2	Jumlah timbulan sampah (Ton/Tahun)	182.562,96	146.050,37	147.358,00	148.153,13	150.175,60
3	Persentase (%)	1,06	23,34	24,63	31,11	33,84

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Timbulan sampah di Kabupaten Temanggung meningkat pada setiap tahun yang juga menyebabkan peningkatan pada jumlah sampah yang masuk di TPA Sanggrahan. Pada tahun 2025 sampah masuk TPA sebesar 119.38 ton/hari, 2024 sebesar 121,50 ton/hari, tahun 2023 terdapat 120,48 ton/hari yang masuk ke TPA. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 48,88 ton/hari, tahun

2020 sebesar 70,04 ton/hari, tahun 2021 sebanyak 109,87 ton/hari dan tahun 2022 sebanyak 125,35 ton/hari. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

18) Persentase Sampah yang Terkelola

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Kebijakan pengelolaan sampah dalam Perda di atas meliputi dua (hal), yaitu:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Definisi pengelolaan sampah baik kegiatan pengurangan dan penanganan dibatasi dengan definisi yang tercantum pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa:

- a. Pengurangan Sampah (*waste minimization*) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna ulang dan daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat;
- b. Penanganan sampah (*waste handling*) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan

dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, non organik dan residu. Sampah organik dapat dikompos menjadi pupuk organik atau kompos maupun untuk budidaya maggot BSF yang saat ini banyak dikembangkan, sampah anorganik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plastik belanja dan lain-lain. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau kontainer sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA. Adapun persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel 2.147.

Tabel 2. 147
Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Capaian s.d Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengurangan sampah					
1.	Jumlah Pengurangan Sampah (ton/tahun)	18.306,20	40.682,72	44.305,86	46.672,57	49.888,32
	a. Pengelolaan sampah di Rumah Tangga		29.210,07	32.418,7	34.168,58	35.291,26
	b. Pembatasan sampah di Sekolah		57,59	49,23	49,37	43,40
	c. Pembatasan sampah di Perkantoran		125,86	125,87	126,21	125,87
	d. Bank Sampah (Ton/tahun)	49,90	45,19	39,19	28,20	24,04
	e. TPSD (Ton/tahun)	18.256,30	6.534,27	6.893,36	6.912,24	7.124,80
	f. TPS3R		4.709,73	4.778,82	5.387,96	7.278,95
2.	Persentase Pengurangan Sampah (%)	10,03	27,86	30,07	31,50	33,22
2	Penanganan sampah					
1.	Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun)	40.112,11	45.764,61	45.970,76	46.531,99	45.148,72
	a. Jumlah sampah terkelola di TPS 3R/Depo Transfer (Ton/tahun)	1.887,63	2.062,85	1.995,35	2.182,93	1.096,60
	b. Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton)	38.224,48	43.701,76	43.975,41	44.349,06	44.052,12
2.	a. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/hari	500,17	400,17	403,72	405,90	411,44
	b. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun	182.562,96	146.050,37	147.358,00	148.153,13	150.175,56
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	21,97	31,33	31,20	31,41	30,06
3	Pengelolaan Sampah					
1.	Persentase Pengelolaan Sampah (%)	32	59,19	61,26	62,91	63,28

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025
*data jumlah penduduk DKB Semester II Tahun 2023 Disdukcapil 811.798 jiwa.
*pada tahun 2022 semester 2 asumsi timbulan sampah sebesar 0.5 kg/org/hr

Berdasarkan Tabel 2.147, jumlah sampah yang masuk di TPA Sanggrahan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2025 sampah masuk TPA sebesar 119,38 ton/hari, 2024 sebesar 121,50 ton/hari, tahun 2023 terdapat 120,48 ton/hari yang masuk ke TPA. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 48,88 ton/hari, tahun 2020 sebesar 70,04 ton/hari, tahun 2021 sebanyak 109,87 ton/hari dan tahun 2022 sebanyak 125,35 ton/hari. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sanggrahan yang mengalami penumpukan sampah di *landfill*.

Pembatasan sampah di sekolah berupa penggunaan wadah ramah lingkungan pengganti plastik untuk bekal dan jajanan di kantin sekolah, sedangkan pada perkantoran berupa penggunaan wadah ramah lingkungan dalam penyajian hidangan untuk tamu dan rapat. Pengelolaan sampah yang intensif baik melalui TPS 3R maupun bank sampah yang mana pengelolaan melalui bank sampah yang relatif sudah baik, akan tetapi kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

Penanganan sampah di TPA yang mencakup 44.349,06 ton mencapai rata-rata berkisar 29,93% dari total timbulan sampah. Secara umum penanganan sampah di TPA ke depan diharapkan semakin berkurang, dan lebih banyak penanganan pada sumbernya, TPS 3R, bank sampah atau penanganan lainnya. Secara umum pemrosesan sampah di TPA meliputi pemilahan sampah plastik dan sampah organik yang berupa daun untuk kompos, sementara penanganan gas metan masih rendah.

Proses pengelolaan persampahan di Kabupaten Temanggung diawali dari sumber timbulan sampah yang berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, fasilitas umum, dan sumber lainnya. Dari sumber tersebut, sebagian sampah langsung dikelola oleh sektor informal, seperti pemulung dan pengepul yang melakukan pemilahan serta pengambilan material yang masih memiliki nilai ekonomi. Selain itu, sampah masuk ke bank sampah dan dikelola melalui TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*) untuk dilakukan pemilahan dan pengolahan lebih lanjut. Melalui proses pengolahan pada sektor informal, bank sampah, dan TPS3R, sebagian sampah berhasil dimanfaatkan kembali menjadi produk hasil pengolahan seperti bahan daur ulang, kompos, maupun material bernilai ekonomi lainnya. Namun demikian, masih terdapat sebagian residu dari

proses pengolahan yang tidak dapat dimanfaatkan sehingga harus ditangani lebih lanjut. Sementara itu, sampah yang terkumpul melalui layanan persampahan diangkut menuju TPS/SPA sebagai titik pengumpulan sementara sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Residu dari TPS3R dan fasilitas pengelolaan lainnya juga dialirkan menuju TPA/LUR (Tempat Pemrosesan Akhir/Lokasi Upaya Rehabilitasi). Secara keseluruhan, terdapat $\pm 20\%$ timbulan sampah berakhir di TPA sebagai sampah residu yang memerlukan penanganan akhir.

Di sisi lain, alur pengelolaan menunjukkan masih adanya kebocoran sampah ke lingkungan di mana terdapat sebagian timbulan sampah dari sumber belum masuk ke sistem pengelolaan yang memadai, ditambah kebocoran dari beberapa tahapan pengelolaan lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian sampah masih dibuang sembarangan, dibakar, atau tidak tertangani oleh layanan persampahan yang tersedia. Secara keseluruhan, alur pengelolaan persampahan Kabupaten Temanggung telah melibatkan berbagai skema pengurangan dan penanganan sampah melalui sektor informal, bank sampah, TPS3R, TPS, dan TPA.

19) Cakupan Pelayanan Persampahan

Di Kabupaten Temanggung, pelayanan persampahan terus ditingkatkan setiap tahunnya untuk mencakup lebih banyak desa dan kelurahan. Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah, baik melalui layanan langsung oleh Pemda maupun mendorong partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Adapun cakupan pelayanan persampahan Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel 2.148.

Tabel 2. 148
Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	155	177	198	215	221
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri TPA/ pengelolaan sampah mandiri	27	36	56	69	72
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	128	141	142	146	149
2	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	53,63	61,24	68,51	74,39	76,47

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.148, cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2025. Jumlah desa dan kelurahan yang mendapatkan layanan pengelolaan sampah naik dari 155 (53,63%) pada tahun 2021 menjadi 221 (76,47%) pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan persampahan, baik melalui layanan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui pengelolaan mandiri atau swasta. Jumlah desa yang dilayani secara mandiri/swasta meningkat hampir empat kali lipat, dari 18 menjadi 69 desa/kelurahan, menunjukkan partisipasi masyarakat dan sektor non-pemerintah dalam pengelolaan sampah yang semakin tumbuh. Keberlanjutan peningkatan cakupan ini penting untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih menyeluruh dan ramah lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peranan yang sangat strategis dalam memastikan hak-hak sipil masyarakat Kabupaten Temanggung dapat terpenuhi secara optimal. Salah satu fokus pada urusan ini adalah peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat, akurat, dan merata.

1) Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya menjadi fondasi penting dalam akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dan program pembangunan. Melalui berbagai inovasi layanan dan penguatan sistem digitalisasi, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya meningkatkan cakupan dan kualitas layanan adminduk bagi seluruh penduduk. Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel 2.149.

Tabel 2. 149
Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NA	NA	96,68	98,52	99,71
2	Persentase kepemilikan KTP	99,68	99,29	99,82	99,73	99,66
3	Persentase kepemilikan KK	98,54	99,99	99,93	99,49	99,57
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 th	70,02	73,74	99,43	99,75	99,98
5	Persentase kepemilikan akta kematian	100	100	100	100	100
6	Persentase kepemilikan KIA	65,02	49,77	84,21	93,62	99,36

Sumber: *Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025*
Keterangan: *Data tahun 2021 dan 2022 bersumber dari RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026*

Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka capaian sebesar 96,68% menunjukkan tingkat penetrasi layanan administrasi kependudukan yang cukup baik, sementara pada tahun 2025, persentase ini meningkat menjadi 99.36%, menunjukkan adanya kemajuan yang konsisten dalam memenuhi kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan administrasi, baik melalui inovasi digital maupun percepatan proses pembuatan dokumen, yang pada gilirannya berkontribusi pada tercapainya layanan publik yang lebih inklusif dan efisien. Capaian ini juga mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk berbagai keperluan administratif dan sosial.

Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan akurat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap hak-hak sipil masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan yang sah dan valid, Pemerintah Kabupaten Temanggung mulai mengukur ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan sebagai indikator baru dalam penilaian kualitas layanan publik. Pengukuran ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap proses administrasi, mulai dari perekaman data hingga penerbitan dokumen seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya, dapat diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat.

Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan memegang peran strategis dalam menjamin hak identitas setiap penduduk serta

mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data kependudukan. Oleh karena itu, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen, kualitas infrastruktur pelayanan, dan adopsi teknologi digital menjadi fokus utama dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Temanggung.

2) Ketepatan Waktu dalam Proses Penerbitan Dokumen Kependudukan

Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai sasaran meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Indikator ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan Proses penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan dapat di lihat dalam aplikasi desa permata sehingga dapat dilihat permohonan layanan yang tidak dapat diselesaikan pada hari itu untuk dapat digunakan ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. 150
Ketepatan Waktu dalam Proses Penerbitan Dokumen Kependudukan
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun 2025
1.	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	94,64
	Jumlah permohonan layanan selesai tepat waktu	60.445
	Jumlah pemohon layanan	63.866

Sumber: PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan s/d Bulan September Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelayanan yang dapat dilaksanakan tepat waktu pada pelayanan desa permata adalah 99.69%.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka.

Dalam pengolahan data survei kepuasan masyarakat menggunakan 9 (sembilan) unsur yang meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Komponen pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Tabel 2. 151
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai IKM	NA	84,84	86,10	85,15	86,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari tabel diatas untuk penilaian IKM pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada permohonan Pelayanan Kartu Keluarga, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian dan surat keterangan pindah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan pada tahun 2024 penilaian SKM dilaksanakan kepada petugas pendamping inovasi Desa permata karena pelayanan dilaksanakan pada tingkat desa melalui loket pelayanan desa permata dan diproses oleh petugas back office di dinas.

4) Nilai AKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah (SAKIP) adalah sistem yang dirancang untuk menjamin pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, SAKIP berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan kinerja pemerintah secara transparan dan terukur. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2. 152
Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2025

No	Tahun Penilaian	Nilai AKIP	Predikat
1	2021	69,42	B
2	2022	73,45	BB
3	2023	74,00	BB
4	2024	74,08	BB
5	2025	80,60	A

Sumber : INSPEKTORAT Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa untuk nilai AKIP pada penilain tahun tahun 2020 adalah B dan terus naik pada tiap tahunnya. Hasil evaluasi atas akutanbiltas kinerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2025 sebesar 80,60 dengan predikat predikat “A” hal tersebut menunjukkan bahwa interprestasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan”.

Adapun gambaran indikator kinerja bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel 2.153.

Tabel 2. 153
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan Kepemilikan KK, KTP elektronik, KIA	%	89,59	78,71	89,47	97.61	99,53
2	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,39	99,79	99.85	99,95	99,99
3	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan administrasi kependudukan	%	NA	NA	NA	70	70.87
4	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	NA	NA	18,01	31,05	31.94
5	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	NA	NA	NA	NA	46,15

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025

Indikator-indikator kinerja pada periode 2021 – 2025 memberikan gambaran capaian yang signifikan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan lanjutan untuk pelayanan yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

1) Cakupan Kepemilikan KK, KTP Elektronik, KIA

Indikator ini menunjukkan tren yang cukup fluktuatif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 97,61%, naik signifikan dari 89,47% pada 2023. Meski sempat menurun drastis di tahun 2022 (78,71%), peningkatan dalam dua tahun terakhir menunjukkan keberhasilan program pelayanan kependudukan yang lebih masif, baik melalui layanan langsung maupun jemput bola. Adapun rincian kepemilikan KK, KTP Elektronik, dan KIA di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 tersaji pada tabel 2.154 berikut.

Tabel 2. 154
Persentase Kepemilikan KK, KTP Elektronik, dan KIA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	98,53	99,99	99.93	99,49	99.57
2	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	%	99,68	99,29	99,82	99,73	99,66
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	65,02	49,77	84.21	93,62	99,36

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.154 capaian kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 – 2025 menunjukkan tren yang sangat positif. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) secara konsisten berada di atas 98%, dengan capaian tertinggi mencapai 99,99% pada tahun 2022, menunjukkan bahwa hampir seluruh keluarga telah memiliki dokumen dasar ini. Kepemilikan KTP elektronik juga mengalami fluktuatif dari 99,68% pada 2021 menjadi 99,66% pada 2025, mencerminkan keberhasilan layanan perekaman KTP-el secara luas. Sementara itu, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mengalami lonjakan tajam dalam dua tahun terakhir, dari 49,77% pada 2022 menjadi 99,36% di 2025, sebagai hasil dari peningkatan kesadaran dan layanan proaktif pemerintah terhadap hak identitas anak. Capaian ini menjadi indikator penting bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Temanggung kini telah memiliki dokumen kependudukan dasar, yang menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya.

2) Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan terus meningkat secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2025. Dimulai dari 99,39% pada 2021, meningkat menjadi 99,99% pada 2025. Angka ini menunjukkan hampir seluruh peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian telah tercatat secara resmi oleh pemerintah. Keberhasilan ini mencerminkan kinerja yang solid dalam hal pencatatan sipil, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen legal untuk status hukum dan akses terhadap layanan negara. Adapun rincian kepemilikan akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 tersaji pada tabel 2.155 berikut.

Tabel 2. 155
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 th	%	70,02	73,74	99,43	99,75	99,96
2	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.155, apaian kepemilikan akta pencatatan sipil di

Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 – 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten. Kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan signifikan dari 70,02% pada tahun 2021 menjadi 99,96% pada 2025, mencerminkan keberhasilan masif dalam pencatatan kelahiran dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen tersebut. Sementara itu, kepemilikan akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian secara konsisten mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut, menandakan bahwa sistem pencatatan sipil telah berjalan sangat efektif dan merata. Capaian ini mencerminkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang optimal, serta komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh peristiwa penting dalam kehidupan warga tercatat secara legal dan sah.

3) Persentase Terpeliharanya Sarpras SIAK untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan

Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pihak penyelenggara dan instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) sebagai satu kesatuan sistem administrasi kependudukan. Untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Dindikcapil menyediakan sarana prasarana SIAK sehingga harus memastikan tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung layanan administrasi kependudukan tersebut. Persentase terpeliharanya sarana prasarana SIAK pada tahun 2024 sebesar 70%, mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2025 menjadi 70,87%. Meski relatif tinggi, penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang sangat penting untuk kelancaran layanan dokumen kependudukan. Penurunan ini perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kualitas pelayanan melalui perawatan berkala.

4) Persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Sebagai indikator baru yang mendukung transformasi digital layanan publik, pelaksanaan aktivasi IKD menunjukkan peningkatan dari 18,01% pada 2023 menjadi 31,94% pada 2025. Kenaikan ini menunjukkan respons positif masyarakat terhadap digitalisasi dokumen identitas, meskipun

cakupan masih relatif rendah. Untuk mendorong percepatan, diperlukan sosialisasi yang masif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta integrasi IKD dengan berbagai layanan publik agar manfaatnya semakin dirasakan secara luas. Sebaran pelaksanaan aktivasi IKD di Kabupaten Temanggung secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 156
Persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Kecamatan	Progres Rekam (Jumlah)	Sudah Aktivasi IKD (Jumlah)	Persentase Aktivasi IKD (%)
1	Bulu	38.661	12.804	33,12
2	Tembarak	24.261	7.360	30,34
3	Temanggung	65.428	22.653	34,62
4	Pringsurat	41.637	13.182	31,66
5	Kaloran	37.066	12.073	32,57
6	Kandangan	41.533	12.384	29,82
7	Kedu	46.561	14.871	31,94
8	Parakan	41.760	13.904	33,30
9	Ngadirejo	44.605	14.383	32,25
10	Jumo	24.320	7.696	31,64
11	Tretep	16.778	4.827	28,77
12	Candiroto	26.231	8.782	33,48
13	Kranggan	39.326	11.723	29,81
14	Tlogomulyo	18.165	5.950	32,76
15	Selopampang	15.966	5.198	32,56
16	Bansari	19.172	6.015	31,37
17	Kledung	21.817	6.740	30,89
18	Bejen	17.241	5.839	33,87
19	Wonobojo	21.196	6.427	30,32
20	Gemawang	27.115	8.018	29,57
	TOTAL	628.839	200.829	31,94

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan data di atas, progres pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2025 secara akumulatif telah mencapai 31,94%, di mana sebanyak 200.829 jiwa telah mengaktivasi IKD dari total 628.839 jiwa yang melakukan rekam KTP-el. Secara spasial, wilayah perkotaan Kecamatan Temanggung mencatatkan capaian tertinggi dengan persentase aktivasi mencapai 34,62% (22.653 jiwa). Sebaliknya, Kecamatan Tretep menjadi wilayah dengan tingkat aktivasi IKD paling rendah di Kabupaten Temanggung, dengan capaian sebesar 28,77% (4.827 jiwa), yang mengindikasikan perlunya akselerasi sosialisasi dan penguatan akses infrastruktur digital di wilayah-wilayah pinggiran demi mencapai pemerataan integrasi layanan publik berbasis digital.

5) Persentase OPD yang Melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Kerja sama pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis data yang akurat (*data-driven policy*). Melalui sinergi pemanfaatan hak akses data kependudukan ini, berbagai Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga pengguna lainnya dapat melakukan validasi, sinkronisasi, dan verifikasi data secara *real-time* untuk mengoptimalkan akurasi sasaran berbagai layanan publik. Berkaitan dengan kerjasama pemanfaatan data tersebut, Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkat integrasi dan pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Indikator ini merupakan indikator baru yang mencerminkan komitmen OPD dalam mendukung kebijakan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terverifikasi, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, perumusan kebijakan yang tepat sasaran, serta pengawasan yang lebih transparan. Pemanfaatan data kependudukan secara lintas sektor juga penting untuk mendorong sinergi antar OPD dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penataan layanan administrasi kependudukan yang inklusif. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2025 terdapat 12 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan kerja sama pemanfaatan data administrasi kependudukan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 157
Data Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	NAMA OPD	URAIAN	NOMOR PKS
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung	Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan Dan kartu tanda penduduk elektronik Dalam layanan lingkup tugas Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Temanggung	470/002/II/2026 420/251/2026
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung	Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan Dan kartu tanda penduduk elektronik Dalam layanan lingkup tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung	470/003/II/2026 470/316/II/2026
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan Dan kartu tanda penduduk elektronik Dalam layanan lingkup tugas Dinas kesehatan Kabupaten Temanggung	470/004/II/2026 420/935/II/2026
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten	Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan Dan kartu tanda penduduk	470/005/II/2026 415.4/01/II/2026

NO	NAMA OPD	URAIAN	NOMOR PKS
	Temanggung	elektronik Dalam layanan lingkup tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	
5	Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan Dan kartu tanda penduduk elektronik Dalam layanan lingkup tugas Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	470/006/II/2026 B/562.2/0295/II/2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan Dan kartu tanda penduduk elektronik Dalam layanan lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	470/007/II/2026 470/075/2026
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung	Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan Dan kartu tanda penduduk elektronik Dalam layanan lingkup tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung	470/008/II/2026 041/004/II/2026
8	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan Dan kartu tanda penduduk elektronik Dalam layanan lingkup tugas Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	470/009/II/2026 470/03/II/2026
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung	Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan Dan kartu tanda penduduk elektronik Dalam layanan lingkup tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung	470/010/II/2026 520/216/2026
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan Dan kartu tanda penduduk elektronik Dalam layanan lingkup tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	470/011/II/2026 470/006/II/2026
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan Dan kartu tanda penduduk elektronik Dalam layanan lingkup tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	470/012/II/2026 420/190/II/2026
12	Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung	Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan Dan kartu tanda penduduk elektronik Dalam layanan lingkup tugas rumah sakit umum daerah Kabupaten Temanggung Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung	470/013/II/2026 445/021/PKS/II/2026

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, 2026

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Salah satu indikator keberhasilan dalam bidang ini adalah meningkatnya persentase desa mandiri, yang mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola sumber

daya, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menyediakan pelayanan publik secara optimal.

1) Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Adapun persentase desa mandiri di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada berikut.

Tabel 2. 158
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa Mandiri	15	26	55	101	140
2	Jumlah Desa di Kabupaten Temanggung	266	266	266	266	266
3	Persentase Desa Mandiri	5,63	9,77	20,68	37,97	52,63

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2025

Pada tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam persentase Desa Mandiri di Kabupaten Temanggung, dari hanya 5,63% pada tahun 2021 menjadi 52,63% pada tahun 2025. Lonjakan ini mencerminkan hasil dari berbagai intervensi dan program pemberdayaan desa yang berhasil mendorong kemandirian, baik dalam aspek tata kelola, ekonomi, maupun pelayanan publik. Kenaikan jumlah Desa Mandiri dari 15 menjadi 140 desa menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang mampu memenuhi indikator-indikator kemandirian yang ditetapkan. Namun demikian, dengan total 266 desa, capaian ini masih menyisakan peluang besar untuk mendorong lebih banyak desa menuju status mandiri, melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

2) Nilai Skor Indeks Desa

Indeks Desa merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Status kemajuan dan kemandirian Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa pada Pasal 25 ayat (2) bahwa terdiri dari 5 klasifikasi yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Rekapitulasi Status Kemandirian Desa di Kabupaten Temanggung tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 159
Status Kemandirian Desa di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No.	Status Desa	2021	2022	2023	2024	2025
1	Desa Mandiri	15	26	55	101	140
2	Desa Maju	76	111	152	138	112
3	Desa Berkembang	175	129	59	27	14
4	Desa Tertinggal	0	0	0	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
TOTAL		266	266	266	266	266

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data di atas, perkembangan status kemandirian desa di Kabupaten Temanggung dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan kemandirian yang sangat signifikan dan progresif dari total 266 desa. Jumlah Desa Mandiri mengalami lonjakan yang tinggi dari semula hanya 15 desa pada tahun 2021 menjadi 140 desa di tahun 2025. Sebaliknya, jumlah Desa Berkembang menyusut drastis dari mayoritas sebanyak 175 desa pada tahun 2021 hingga tersisa hanya 14 desa pada tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar desa telah berhasil naik kelas menjadi Desa Maju (yang sempat memuncak di angka 152 desa pada tahun 2023 sebelum sebagian besarnya bertransformasi menjadi Desa Mandiri). Selain itu, sepanjang periode lima tahun tersebut, Kabupaten Temanggung berhasil mempertahankan angka nihil (0) untuk kategori Desa Tertinggal maupun Desa Sangat Tertinggal, yang mencerminkan keberhasilan pemerataan pembangunan daerah yang efektif.

Urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung terciptanya desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui program-program pemberdayaan, masyarakat desa didorong untuk aktif dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, sehingga mampu mengenali dan mengelola potensi lokal secara optimal. Adapun gambaran indikator kinerja bidang pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 160
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa*	%	NA	NA	NA	NA	100
2	Persentase Kerjasama antar Desa	%	NA	NA	100	100	100
3	Persentase Kerjasama dengan Pihak Ketiga	%	NA	NA	NA	100	80

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
4	Persentase Penyusunan LPPD Tepat Waktu	%	NA	NA	NA	100	100
5	Presentase penyusunan RKPDes tepat waktu	%	96,24	100	100	100	100
6	Persentase laporan LKD*	%	NA	NA	NA	NA	4,94
7	Persentase BUM Desa Maju dan berkembang*	%	NA	NA	NA	39,23	42,11
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber:Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian indikator dalam bidang ini menjadi cerminan sejauh mana desa telah mampu menjalankan fungsi-fungsi pembangunan yang berbasis pada partisipasi dan kemandirian masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan.

1) Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Rangka Penataan Desa

Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Rangka Penataan Desa merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur sejauh mana intervensi pemerintah dalam mendukung penataan wilayah dan tata kelola desa secara terstruktur. Indikator ini mencerminkan upaya fasilitasi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data, serta menyesuaikan batas administratif dan pemanfaatan ruang secara legal dan berkelanjutan. Melalui fasilitasi ini, desa diharapkan mampu mengelola potensi dan sumber daya secara optimal, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat posisi dalam sistem pembangunan wilayah. Pada tahun 2025, 145 desa dari 266 desa atau 54,5% sudah memiliki Perdes Penataan Kewenangan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemui tantangan terkait penyusunan Perdes Penataan Kewenangan Desa.

2) Persentase Kerjasama Antar Desa

Persentase Kerjasama Antar Desa merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana desa-desa menjalin kemitraan dan kolaborasi antar desa. Indikator ini mencerminkan semangat gotong royong dan sinergi dalam pengelolaan sumber daya, penyediaan layanan publik, serta pengembangan potensi ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Peningkatan kerjasama desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan kawasan perdesaan, memperluas akses terhadap pendanaan dan teknologi, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Pada tahun 2025 terdapat 33 desa yang telah menjalin

kerja sama dan semuanya sudah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES).

3) Persentase Persentase Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Kerjasama desa yang dilakukan dengan pihak ketiga antara lain kerja sama dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Kerjasama atau PKS. Pada tahun 2025, 4 desa sudah menetapkan PKS dari total 5 desa yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

4) Penyusunan LPPD Tepat Waktu

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tepat Waktu pada tahun 2025 mencapai 100% atau sebanyak 266 dari total 266 desa telah mengirimkan berkas LPPD ke Dinpermades. Capaian ini mencerminkan kepatuhan desa dalam menyusun laporan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan indikator penting dalam aspek tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kapasitas administrasi desa dalam pelaporan kinerja tahunan. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan dijadikan standar untuk indikator tata kelola desa lainnya.

5) Presentase penyusunan RKPDes tepat waktu

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Persentase desa yang menyusun RKPDes menunjukkan tren positif dengan capaian 100% sejak tahun 2022 hingga tahun 2025.

6) Persentase Laporan LKD

Data untuk indikator ini belum tersedia selama periode 2021 hingga 2024 (NA) karena merupakan indikator baru yang mulai digunakan dalam rangka mendorong akuntabilitas kepala desa kepada masyarakat melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKD) memiliki peran penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala desa atas pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran. Ke depan, diperlukan upaya penguatan kapasitas dan komitmen desa dalam menyusun LKD serta dukungan regulasi dan sistem pelaporan yang terintegrasi agar indikator ini dapat dioptimalkan sebagai bagian dari tata kelola desa yang transparan dan partisipatif. Pada Tahun 2025 Laporan Tahunan LKD yang masuk sebanyak 68 dari total LKD 1.596, sehingga persentase Laporan Tahunan LKD sebesar 4,26%.

7) Persentase BUM Desa Maju dan Berkembang

Persentase BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) yang masuk kategori maju dan berkembang pada tahun 2025 sebanyak 112 dari 266 BUMDes atau 42,11%. Kondisi ini naik dari kondisi tahun 2024. Untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut, dibutuhkan dukungan pendanaan, akses pasar, pendampingan manajemen usaha, serta inovasi produk dan layanan agar BUM Desa dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan ekonomi desa.

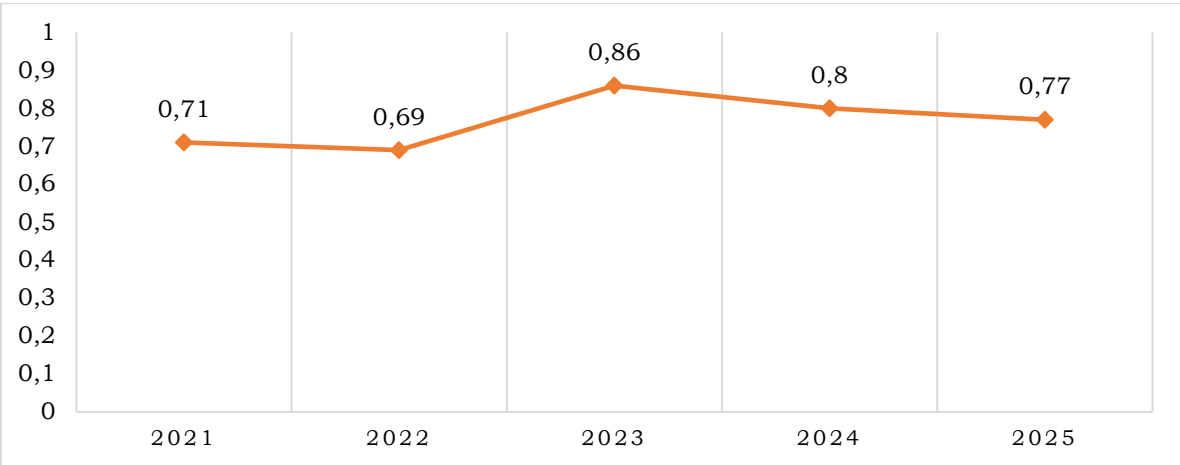
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran strategis dalam mewujudkan keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Temanggung, pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk menekan angka kelahiran yang tidak direncanakan, menunda usia kawin pertama, meningkatkan akses dan kualitas layanan keluarga berencana, serta memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program berbasis siklus kehidupan. Gambaran indikator kinerja selama tahun 2021–2025 menunjukkan adanya dinamika yang signifikan, baik dari sisi pencapaian prevalensi kontrasepsi modern, penurunan unmet need, hingga penguatan peran keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan. Melalui program-program seperti pelayanan

Keluarga Berencana (KB), pengembangan kampung keluarga berkualitas, dan bina keluarga, pemerintah berupaya mengoptimalkan peran keluarga, dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketahanan keluarga. Selain itu, pengendalian penduduk juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memastikan ketersediaan sumber daya yang mencukupi bagi generasi mendatang.

1) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika demografi suatu wilayah. Laju pertumbuhan yang terkendali menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, karena berdampak langsung terhadap kebutuhan akan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemantauan terhadap laju pertumbuhan penduduk perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah penduduk tetap sejalan dengan kapasitas dan daya dukung daerah. Adapun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 55
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang mencerminkan keberhasilan pengendalian kependudukan, sekaligus adanya pengaruh faktor eksternal. Penurunan dari 0,71% pada 2021 menjadi 0,69% pada 2022 menunjukkan dampak nyata dari program-program keluarga berencana dan edukasi masyarakat terkait perencanaan keluarga. Penurunan ini juga dapat dikaitkan dengan menurunnya angka kelahiran serta meningkatnya usia kawin pertama, yang menunda usia reproduktif

perempuan. Namun, kenaikan kembali menjadi 0,86% pada 2023 mengindikasikan adanya faktor pemicu, seperti pemulihan sosial pasca-pandemi COVID-19, peningkatan angka kelahiran yang sempat tertunda, serta arus migrasi masuk karena faktor ekonomi dan pekerjaan. Penurunan kembali pada 2024 ke angka 0,8% dan menjadi 0,77% pada 2025 menunjukkan upaya stabilisasi demografis mulai menunjukkan hasil. Meskipun tetap dalam kisaran yang aman, fluktuasi ini menunjukkan pentingnya pemerintah untuk terus memperkuat sistem pemantauan dan intervensi yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan mobilitas penduduk agar pengendalian pertumbuhan tetap efektif dalam jangka panjang.

2) Indeks Pembangunan Keluarga

Indek Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: (a) iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; (b) iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; dan (c) iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Adapun Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 161
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	55,97	58,19	62,08	62,08	73,00

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 55,97 (berkembang) pada 2021 menjadi 62,08 (berkembang) pada 2023 – 2024 dan menjadi 73,00 pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan keluarga, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Namun, masih perlu upaya tambahan untuk terus meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mendorong iBangga ke tingkat tangguh, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, penguatan peran keluarga dalam pendidikan anak, serta memperkuat kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga di berbagai sektor.

3) TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total)

TFR (*Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total) merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika kependudukan, khususnya terkait dengan tingkat kelahiran di suatu wilayah. TFR mencerminkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, dengan asumsi bahwa pola kelahiran mengikuti kondisi saat ini. TFR yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ledakan penduduk, sementara TFR yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan tantangan dalam regenerasi penduduk. Pemantauan terhadap TFR menjadi krusial dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Di Kabupaten Temanggung, data TFR menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas program kependudukan dan keluarga berencana serta dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun TFR Kabupaten Temanggung selama periode 2022–2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 162
Total Fertility Rate Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	TFR (<i>Total Fertility Rate</i> / Angka Kelahiran Total)	Angka	NA	NA	1,58	1,30	1,24

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.160, *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan angka kelahiran selama periode 2023–2025. Setelah tercatat sebesar 1,58 pada tahun 2023 yang masih berada pada tingkat penggantian (*replacement level fertility*), angka TFR menurun menjadi 1,24 pada Tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan semakin rendahnya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja, keberhasilan program keluarga berencana, serta perubahan preferensi dalam struktur keluarga.

Pembangunan keluarga di Kabupaten Temanggung merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai indikator terkait kependudukan dan keluarga, seperti data mikro keluarga, penggunaan alat kontrasepsi, usia kawin pertama, hingga indeks pembangunan keluarga, menjadi ukuran keberhasilan program yang dijalankan. Gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Temanggung periode 2021 – 2025 sebagai berikut .

Tabel 2. 163
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	NA	NA	NA	58,6	60,1
2	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	12,99	11,47	8,62	7,60	7,44
3	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) *	angka	19,8	19,6	20,5	19,8	22,0
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rates (ASFR) 15- 19 Tahun)	%	21,32	9,80	6,67	14,10	4,01
5	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	75,30	76,58	45,77	46,45	48,68
6	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern contraceptive</i> (mCPR) *	%	75,3	76,58	80,14	81,85	82,54
7	Persentase KB pasca persalinan*	%	NA	NA	NA	52,43	52,09
8	Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri	%	4,84	9,69	11,07	14,88	15,57
9	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita*	%	NA	NA	NA	45,53	50,23
10	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja*	Angka	NA	NA	NA	87,23	86,80
11	Indeks lansia berdaya*	Angka	NA	NA	NA	57,83	75,90
Keterangan:							
*Indikator Baru							

Sumber:DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Gambaran capaian kinerja program pada urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Temanggung selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam upaya membangun keluarga yang lebih sehat, mandiri, dan berkualitas di masa depan.

1) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Pada tahun 2025, IPBK Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 60,1, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan yang mempertimbangkan aspek kependudukan secara terpadu. Pencapaian ini menjadi titik awal yang penting sebagai tolok ukur efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan. Ke depan, pengukuran IPBK dapat membantu pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan kependudukan yang lebih baik.

2) Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Jumlah PUS *unmet need* mengalami penurunan dari 17.012 orang pada tahun 2021 menjadi 9.049 orang pada tahun 2025, meskipun jumlah total PUS relatif stabil, dengan sedikit penurunan dari 130.996 pada tahun 2021 menjadi 121.698 pada tahun 2025. Berdasarkan tabel 2.164, persentase PUS *unmet need* juga menunjukkan tren positif dengan

penurunan signifikan dari 12,99% pada tahun 2021 menjadi 7,44% pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan keberhasilan program keluarga berencana (KB) dalam meningkatkan akses dan pelayanan kepada PUS, sehingga lebih banyak pasangan dapat memenuhi kebutuhan KB mereka.

Tabel 2. 164
Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PUS <i>Unmet Need</i>	17.012	15.084	11.059	9.493	9.049
2	Jumlah PUS	130.996	131.516	128.266	124.978	121.698
3	Presentase PUS <i>Unmet Need</i>	12,99	11,47	8,62	7,60	7,44

Sumber:DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

3) Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Median Usia Kawin Pertama (MUKP) adalah median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 25-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Median usia kawin pertama menunjukkan sebanyak 50 persen dari seluruh wanita usia 25-49 tahun sudah melakukan perkawinan pada usia tertentu. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan dari 19,8 tahun pada 2021, turun menjadi 22 tahun pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia muda masih terjadi dan perlu mendapat perhatian serius melalui intervensi kebijakan yang mendorong penundaan usia kawin, khususnya melalui edukasi dan pemberdayaan remaja perempuan.

4) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rates* (ASFR) 15–19 Tahun)

Age Specific Fertility Rates (ASFR) 15 – 19 Tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur 15 – 19 tahun. Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun mengalami penurunan signifikan dari 21,32% pada 2021 menjadi 6,67% pada 2023, namun meningkat kembali ke 14,10% pada 2024 dan kembali turun menjadi 4,01% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukan bahwa persentase pernikahan dini di Kabupaten Temanggung masih tinggi. Tantangan dalam menekan angka kelahiran remaja ini membutuhkan intervensi lebih lanjut melalui program pendidikan kesehatan reproduksi dan sosialisasi perencanaan keluarga. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selalu berupaya menurunkannya dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui jalur sekolah (SSK/Sekolah Siaga

Kependudukan) dan KIE kepada remaja melalui kegiatan di kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-Remaja), maupun Sosialisasi *Jo Kawin Bocah*.

5) Persentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang mengalami penurunan drastis dari 75,30% pada 2021 menjadi hanya 48,68% pada 2025, berbanding lurus dengan penurunan jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi sebagaimana ditunjukan pada tabel 2.165. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, seperti dari sisi dukungan anggaran pencabutan implan yang rendah mengakibatkan peserta KB yang seharusnya dicabut dan ingin berKB kembali menjadi PUS DO KB, preferensi pasangan usia subur, masih rendahnya animo masyarakat dalam pelayanan KB Metode Operasi Wanita (MOW) melalui *tubektomi* dan Metode Operasi Pria (MOP) melalui *vasektomi* maupun faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi.

Tabel 2. 165
Persentase Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Tahun 2021–2025

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Peserta KB MKJP	98.622	100.714	47.176	47.514	48.902
2	Jumlah (PUS) yang berKB	130.966	131.516	103.082	102.297	100.451
3	Persentase	75,30	76,58	45,77	46,45	48,68

Sumber:DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

6) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ *Modern Contraceptive* (mCPR)

Prevalensi mCPR (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*) KB adalah indikator yang mengukur persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi modern dari total PUS yang ada. Kontrasepsi modern yaitu meliputi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, implan, MOW (*tubektomi*), dan MOP (*vasektomi*)) dan metode jangka pendek (Pil KB, suntik KB, kondom, dan KB darurat). Adapun prevalensi kontrasepsi PUS di Kabupaten Temanggung tahun 2021 –2025 disajikan pada gambar 2.55 berikut.



Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 56
Prevalensi Kontrasepsi Modern Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan data prevalensi kontrasepsi yang diambil dari aplikasi Simantap Kon KB pada Tabel 2.55, angka prevalensi kontrasepsi modern menunjukkan peningkatan dari 75,30% pada 2021 menjadi 82,54% pada 2025. Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh faktor jumlah yang PUS DO KB yang meningkat dimana pada usia 49 keatas sudah tidak masuk kategori PUS yang berakibat juga pada menurunnya jumlah peserta KB aktif.

7) Persentase KB Pasca Persalinan

KB pasca persalinan adalah pelayanan kontrasepsi yang diberikan kepada ibu segera setelah melahirkan hingga 42 hari (6 minggu) pasca persalinan. KB Pasca Persalinan mencakup pemberian metode kontrasepsi jangka pendek maupun jangka panjang (MKJP), seperti IUD pasca plasenta, implan, suntikan, pil, maupun kondom, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ibu pasca melahirkan. Pada tahun 2024 sebanyak 4.262 PUS dari total 8.129 PUS telah menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau dengan persentase sebesar 52,43. Capaian ini mengalami penurunan pada tahun 2025 dengan persentase 52,09% atau sebanyak 3.751 PUS dari total 7.201 PUS yang menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan.

8) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri

Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

keluarga dan masyarakat. Persentase kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang cukup progresif, dari 4,84% pada 2021 menjadi 15,57% pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam pengembangan kampung keluarga berkualitas mandiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan koordinasi, regulasi, dan pendanaan untuk mempercepat perkembangan Kampung KB agar lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

9) Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Bina Keluarga Balita

Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Temanggung tercatat mencapai 45,53% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 50,23% pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan hampir setengah dari keluarga dengan balita telah terlibat dalam program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan yang holistik, mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan kolaboratif antara pemerintah, kader, serta lembaga masyarakat untuk mendorong keterlibatan aktif keluarga dalam BKB sebagai fondasi penting pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

10) Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja

Indeks pengasuhan keluarga dengan remaja sebesar 87,23 pada 2024 dan menurun pada Tahun 2025 menjadi 86,8 karena pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja yang tidak terkontrol, sehingga menyulitkan orang tua dalam pengasuhan. Keluarga di Kabupaten Temanggung relatif mampu memberikan pengasuhan yang baik kepada anak remaja, yang sangat penting untuk mencegah masalah sosial dan mendukung perkembangan remaja yang sehat. Capaian ini mencerminkan efektivitas program pembinaan keluarga serta peran aktif orang tua dalam membimbing anak pada masa transisi menuju dewasa. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengasuhan ini, diperlukan dukungan berkelanjutan melalui edukasi keluarga, peningkatan kapasitas kader, dan kolaborasi lintas sektor.

11) Indeks Lansia Berdaya

Indeks lansia berdaya sebesar 57,83 pada 2024 dan meningkat pada Tahun 2025 menjadi 75,9 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang

untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi lansia dalam keluarga dan masyarakat. Upaya peningkatan layanan dan pemberdayaan lansia perlu diperkuat agar kelompok usia lanjut ini dapat tetap produktif dan mandiri. Hal ini penting mengingat jumlah lansia yang terus meningkat dan perannya yang strategis dalam mendukung ketahanan keluarga lintas generasi.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

WP Gelangmanggung yang meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung merupakan satu kesatuan wilayah fungsional dengan keterkaitan ekonomi, sosial, budaya, dan mobilitas penduduk yang sangat erat. Pengembangan wilayah yang optimal dan penyediaan sistem angkutan aglomerasi yang terintegrasi memerlukan komitmen, kolaborasi, sinergitas, konektivitas dan aksesibilitas transportasi lintas batas administratif. WP Gelangmanggung menyepakati Komitmen Bersama Kolaborasi, Sinergitas, Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi dalam Mendukung Layanan Angkutan Aglomerasi Perkotaan di WP Gelangmanggung (Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung). Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a) Sinkronisasi perencanaan, program, kegiatan, dukungan pembiayaan dalam pembangunan dan pengembangan sistem transportasi kawasan;
- b) Pengembangan layanan angkutan aglomerasi perkotaan dan integrasi layanan angkutan pengumpan (feeder);
- c) Fasilitasi badan usaha dan pihak lain untuk berkolaborasi

Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk:

- a) Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif untuk percepatan pengembangan transportasi WP Gelangmanggung;
- b) Menjamin terlaksananya integrasi perencanaan tata ruang dan program pengembangan transportasi WP Gelangmanggung;
- c) Mempercepat perencanaan dan implementasi sistem angkutan aglomerasi perkotaan di WP Gelangmanggung yang terintegrasi;
- d) Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan
- e) Meningkatkan manfaat dan dampak dari rencana layanan angkutan aglomerasi perkotaan Trans Jateng di WP Gelangmanggung.

Sektor perhubungan di Kabupaten Temanggung memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran arus barang dan jasa.

1) Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah

Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah merupakan gambaran dari tingkat keterhubungan suatu wilayah melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur konektivitas, seperti jaringan transportasi, kondisi jalan, serta perlengkapan jalan yang mendukung kelancaran dan keselamatan mobilitas masyarakat. Presentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah berfungsi untuk menilai sejauh mana pembangunan infrastruktur telah menjangkau berbagai wilayah, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan di masa mendatang. Capaian Tahun 2025 sebesar 81,96 %. Capaian ini didukung dengan adanya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

2) Persentase Sarana Prasarana Pendukung Keselamatan jalan

Meningkatnya Sarana Prasarana Pendukung Keselamatan Jalan diarahkan untuk mewujudkan fasilitas jalan yang aman, nyaman, dan layak bagi semua pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor, pesepeda maupun pejalan kaki dengan melalui penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan infrastruktur keselamatan jalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Cara mengukur Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Keselamatan Jalan adalah Nilai dari ketujuh indikator dijumlahkan kemudian dibagi tujuh, dan menghasilkan nilai rata-rata yang menjadi indikator keseluruhan sarana/prasarana keselamatan jalan, yang dilakukan melalui evaluasi berkala setiap triwulan sekali. Capaian Persentase Data Sarana Prasarana Pendukung Keselamatan Jalan Tahun 2025 sebesar 73,12 %. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendukung Keselamatan Jalan akan menjamin bahwa jalan dan sistem transportasi di wilayah menjadi lebih **aman, teratur, terpelihara, dan berkelanjutan**, memenuhi hak pengguna jalan atas keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas.

3) Persentase Pelayanan Angkutan Umum yang Sesuai Standar dan Terkoneksi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib menjamin

ketersediaan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Mendasari hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan saling terkoneksi.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut didukung melalui **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**. Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kondisi perlengkapan jalan yang layak sebagai penunjang keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran mobilitas angkutan umum dan pengguna jalan lainnya.

Pelayanan angkutan umum dikategorikan memenuhi standar dan terkoneksi apabila armada memiliki kesesuaian dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kendaraan laik jalan (aman, nyaman, dan terjangkau), pengemudi memiliki sertifikat kompetensi, serta terhubung dengan moda transportasi lain melalui integrasi jaringan, jadwal, tarif, dan informasi yang jelas untuk memudahkan mobilitas penumpang.

Peningkatan pelayanan ini didukung oleh tiga aspek utama, yaitu terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan, tersedianya layanan angkutan pada jaringan trayek yang telah ditetapkan, serta kondisi sarana prasarana terminal sebagai titik simpul perpindahan penumpang yang memadai. Presentase Pelayanan Angkutan Umum yang Sesuai Standar dan Terkoneksi sebesar 90,81%.

Kinerja sektor ini diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan kondisi keselamatan jalan, kelengkapan infrastruktur transportasi, layanan angkutan umum, serta pengelolaan fasilitas pendukung lainnya. Dalam kurun waktu 2021 – 2025, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan perhubungan, termasuk peningkatan penerangan jalan, penyediaan rambu lalu lintas, serta optimalisasi pengelolaan terminal dan jaringan trayek. Adapun gambaran indikator kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 166
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Perhubungan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	35,26	41,06	41,55	41,55	42,03

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
2	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	66,09	66,17	66,69	66,84	67,03
3	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	%	96,28	99,56	99,62	99,62	99,68
4	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	%	31,69	32,08	32,49	34,17	35,98
5	Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	NA	NA	NA	63,52	67,13
6	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	%	98,18	98,18	100	100	100
7	Persentase Layanan Perhubungan*	%	NA	NA	NA	100	100
8	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	%	NA	NA	NA	89,17	87,99
9	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	NA	NA	NA	80	84,44
10	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	85,71	85,71	100	100	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel, meskipun beberapa indikator menunjukkan peningkatan signifikan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti pemerataan akses transportasi dan peningkatan standar pelayanan angkutan umum. Hal ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan sektor perhubungan agar dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi bagi seluruh masyarakat. Capaian kinerja program pada urusan bidang perhubungan Kabupaten Temanggung selama periode 2020 hingga 2025 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam pengelolaan sektor perhubungan.

1) Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota

Indikator ini mengalami peningkatan dari 35,26% pada tahun 2021 menjadi 41,55% pada tahun 2023 dan tetap stagnan pada tahun 2024 dan meningkat pada Tahun 2025 sebesar 42,03%. Meskipun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022, stagnasi dalam dua tahun mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam penyediaan kelengkapan jalan agar mendekati kondisi ideal atau memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

2) Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas.

Persentase pemasangan rambu lalu lintas terus meningkat dari total akumulasi 1.762 unit (66,09%) pada tahun 2021 menjadi 1.787 unit (67,03%) pada tahun 2025 sebagaimana didapat dilihat pada gambar 2.60. Peningkatan yang relatif kecil setiap tahunnya menunjukkan bahwa pemasangan rambu-rambu lalu lintas dilakukan secara bertahap di

Kabupaten Temanggung. Meskipun begitu, untuk mencapai kondisi ideal (2.666 unit) dan untuk mendukung keselamatan berlalu lintas, percepatan pemasangan rambu lalu lintas perlu dilakukan.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 57
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

3) Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan

Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan. Berdasarkan definisi tersebut, persentase kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan signifikan dari 96,28% pada tahun 2021 menjadi 99,62% pada tahun 2023, yang kemudian stagnan pada tahun 2024 dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 99,68 pada Tahun 2025. Capaian ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh kendaraan yang wajib uji telah memenuhi standar kelaikan jalan, sehingga meningkatkan keselamatan transportasi darat di Kabupaten Temanggung.

4) Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten

Cakupan penerangan di jalan kabupaten mengalami sedikit peningkatan dari 31,69% pada tahun 2021 menjadi 35,98% pada tahun 2025. Progres cakupan penerangan jalan masih tergolong rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam pemasangan lampu penerangan jalan

untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, terutama di daerah yang masih minim penerangan.

5) Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung

Persentase meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kabupaten Temanggung mulai tercatat pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 63,52% atau dari 19.541 titik PJU dengan layanan listrik PLN, 12.413 diantaranya telah menerapkan sistem meterisasi KWh. Pada tahun 2025, capaian meterisasi KWh penerangan jalan umum di Temanggung meningkat menjadi 67,13%. Ini menandakan adanya upaya dalam mengukur konsumsi listrik penerangan jalan umum guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan anggaran pemerintah daerah. Ke depan, peningkatan cakupan meterisasi diharapkan dapat terus dilakukan guna mencapai efisiensi energi yang lebih maksimal di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

6) Persentase Titik Parkir yang Tertangani dan Dikelola dengan Baik

Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir yaitu mencapai 114 titik (100%) pada tahun 2024 dan 2025. Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan manajemen parkir, baik dari segi penataan, pengawasan, maupun optimalisasi retribusi parkir. Dengan pengelolaan yang lebih baik, fasilitas parkir menjadi lebih tertata, mengurangi potensi kemacetan, serta meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain itu, pengelolaan parkir yang efektif juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur transportasi lainnya. Ke depan, keberlanjutan pengelolaan parkir yang baik perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat serta pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan parkir di Kabupaten Temanggung.

7) Persentase Layanan Perhubungan

Persentase layanan perhubungan merupakan indikator baru yang mulai diperhitungkan dalam evaluasi kinerja sektor transportasi di Kabupaten Temanggung. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana layanan perhubungan telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dalam aspek infrastruktur, keamanan, maupun aksesibilitas bagi

masyarakat. Selain itu, indikator ini juga menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas kebijakan transportasi yang diterapkan guna menciptakan layanan yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Ke depan, upaya peningkatan layanan perhubungan harus terus dilakukan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan regulasi untuk mendukung mobilitas masyarakat yang lebih baik. pada tahun 2025 kondisi Persentase Layanan Perhubungan telah tercapai dengan terwujudnya layanan yang baik terhadap masyarakat dalam bidang Perhubungan.

8) Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan

Pemenuhan standar minimal pelayanan angkutan umum di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mencapai 87,99%, atau sebanyak 476 unit dari total 541 unit angkutan yang beroperasi. Standar ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2015 yang mengatur bahwa setiap penyelenggara angkutan umum wajib memastikan kelaikan kendaraan yang dioperasikan. Salah satu aspek utama dalam pemenuhan standar ini adalah kewajiban kendaraan untuk lolos uji berkala atau uji KIR, yang menjadi bukti bahwa angkutan tersebut layak jalan dan aman digunakan oleh masyarakat. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi umum.

9) Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Trayek

Sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/395 tahun 2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung, jumlah jaringan trayek angkutan penumpang umum baik angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan di Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 45 trayek. Dari 45 trayek tersebut, 38 trayek (84,44%) diantaranya telah terlayani angkutan umum. Meskipun demikian, masih terdapat 15,6% jaringan trayek yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan angkutan umum, sehingga perlu adanya upaya optimalisasi. Optimalisasi pelayanan angkutan umum pada trayek diharapkan dapat menunjang sistem transportasi di Kabupaten Temanggung yang efektif dan merata.

10) Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik

Kabupaten Temanggung memiliki tujuh terminal tipe C yaitu Terminal Pingit, Terminal Kranggan, Terminal Plaza, Terminal Kerkop, Terminal Ngadirejo, Terminal Maron, dan Terminal Candioto. Ketujuh terminal tipe C tersebut berada dalam kondisi baik, meningkat dari 85,71% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2023 hingga 2025. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur terminal guna mendukung kelancaran sistem transportasi umum di Kabupaten Temanggung.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, serta keterjangkauan informasi bagi masyarakat. Di Kabupaten Temanggung, berbagai indikator kinerja pada bidang ini terus mengalami perkembangan, mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi.

1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 167
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,78	2,78	2,80	3,64	3,80*
	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2025 mencapai 3,80 dengan predikat “Sangat Baik”. Secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara elektronik, keamanan data dan infomasi di Kabupaten Temanggung dinilai baik. Dampak manfaatnya adalah masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan layanan-layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan mudah, seperti *free wifi* diarea publik, pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien, keamanan dan kenyamanan pengelolaan data pemerintah, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam penerapan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dari yang semula menggunakan Indeks SPBE menuju Indeks Pemerintah Digital (Pemdi). Transformasi ini merupakan implementasi kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan SPBE 2.0 atau Pemerintah Digital sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, serta diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Lampiran I halaman 188, yang mengamanatkan perubahan instrumen evaluasi SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi).

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE yang Bertransformasi ke Pemerintah Digital (SPBE 2.0). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diarahkan untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, berbasis data, kolaboratif, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada masa transisi tahun 2025, penghitungan Indeks SPBE masih mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020, yang terdiri atas 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator, yaitu Domain Kebijakan SPBE (13%), Domain Tata Kelola SPBE (25%), Domain Manajemen SPBE (16,50%), dan Domain Layanan SPBE (45,50%). Proses evaluasi diawali dengan penilaian mandiri oleh pemerintah daerah yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri, kemudian dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh Kementerian PANRB untuk menetapkan hasil evaluasi secara nasional.

Berbeda dengan Indeks SPBE, Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) mengusung paradigma baru dalam mengukur tingkat kematangan transformasi digital pemerintah. Pemdi disusun berdasarkan 7 aspek dan 20 domain, sehingga memiliki cakupan penilaian yang lebih komprehensif dibandingkan SPBE. Apabila Indeks SPBE lebih menitikberatkan pada

tingkat kematangan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka Pemdi menilai sejauh mana transformasi digital telah diwujudkan secara terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian tidak lagi terbatas pada keberadaan kebijakan, aplikasi, maupun infrastruktur, tetapi juga mencakup integrasi layanan digital, interoperabilitas data, tata kelola pemerintahan digital, pemanfaatan teknologi digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia, keamanan digital, kolaborasi lintas sektor, serta dampak (outcome) transformasi digital terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.

Perubahan metode evaluasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mempersiapkan transformasi secara lebih menyeluruh. Penguatan kebijakan, tata kelola, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pusat data, keamanan informasi, integrasi aplikasi, serta kualitas data menjadi faktor yang semakin menentukan keberhasilan implementasi Pemerintah Digital. Dengan demikian, peningkatan nilai evaluasi tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki, tetapi juga dari tingkat keterpaduan sistem, efektivitas tata kelola, kualitas layanan, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, masa transisi menuju Indeks Pemerintah Digital merupakan momentum strategis untuk memperkuat fondasi transformasi digital daerah. Melalui peningkatan kualitas infrastruktur TIK, pengembangan kapasitas SDM digital, integrasi layanan dan data, serta penguatan tata kelola pemerintahan digital, diharapkan Kabupaten Temanggung mampu meningkatkan capaian Indeks SPBE pada masa transisi sekaligus siap menghadapi penerapan Indeks Pemerintah Digital (Pemdi). Upaya tersebut pada akhirnya akan mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, dan terpercaya sesuai arah kebijakan transformasi digital nasional.

2) Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Indeks ini mencakup dua aspek utama, yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik

berbasis elektronik, yang mencerminkan tingkat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mendukung transformasi digital. Adapun nilai Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 168
Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,5	3,5	3,63	4,46	4,39
<i>*Data disamakan pada tahun sebelumnya karena tidak ada penilaian SPBE</i>							

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian Indeks Layanan SPBE Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai indeks berada pada angka 3,5 yang menunjukkan kondisi awal implementasi layanan digital yang stabil, meskipun belum signifikan berkembang. Peningkatan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan nilai 3,63, dan melonjak menjadi 4,46 pada tahun 2024 dan menurun pada Tahun 2025 sebesar 4,39. Penurunan ini bukan menunjukkan kemunduran kualitas, melainkan lebih disebabkan oleh peningkatan standar dan kedalaman penilaian SPBE secara nasional. Selain itu juga perbaikan dalam penyediaan layanan digital, seperti optimalisasi aplikasi layanan publik, integrasi sistem informasi, serta peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi informasi. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien kepada masyarakat.

3) Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah. Indeks ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain perencanaan strategis, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta efektivitas pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terpadu, transparan, efisien, dan responsif melalui penguatan tata kelola digital. Adapun nilai Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 169
Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten
Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2,5	*2,5	2,3	3,10	3,50

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian Indeks Tata Kelola SPBE Kabupaten Temanggung dalam periode 2021–2025 menunjukkan dinamika peningkatan yang cukup signifikan. Nilai indeks tercatat sebesar 2,5 pada tahun 2021 dan tetap pada angka yang sama di tahun 2022 karena belum dilakukannya penilaian ulang. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 2,3 yang mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan SPBE, seperti koordinasi antar perangkat daerah atau kesiapan infrastruktur digital. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 3,10 dan Tahun 2025 dengan capaian 3,50. Hal tersebut menandakan adanya perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan teknologi informasi, serta penyelenggaraan SPBE secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat ruang perbaikan, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola digital dalam rangka memperkuat pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berbasis elektronik.

4) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Fokus utama evaluasi dan penilaian badan publik dengan hasil akhir adalah kepatuhan badan publik menjalankan standar pelayanan informasi publik, terutama menyangkut keterbukaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 -2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 170
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator Sasaran	Nilai Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	89,56	88,33	97,38	95,86	91,34
	Kategori	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Pada tahun 2025 nilai KIP menurun dari Tahun 2024 yaitu 91,34 dengan kategori Informatif. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 terdapat fase/tahapan baru dalam penilaian Keterbukaan Badan Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, yaitu Uji kompetensi. Ini merupakan capaian kedua PPID Pemkab Temanggung sebagai Badan Publik Informatif dalam pelaksanaan implementasi KIP sejak tahun 2012. Prestasi tersebut dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di Pemkab Temanggung, baik PPID Kabupaten Temanggung, seluruh PPID Pelaksana dan semua stakeholder terkait. Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PPID Pelaksana, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pelaksana, pengembangan website dan dashboard PPID, serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Gambaran capaian kinerja program pada urusan bidang komunikasi dan informasi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 171
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	NA	NA	NA	85,29	85,29
2	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	NA	NA	NA	100	100
3	Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	NA	NA	NA	100	100
4	Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik*	%	14,66	18,18	23,46	26,39	28,74
5	Persentase layanan publik secara elektronik	%	NA	NA	NA	50,38	55,73
6	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	%	NA	NA	NA	100	100
7	Persentase rumah tangga dengan akses internet*	%	84,48	91,16	89,59	90,52	94,24
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Sebagaimana pada Tabel 2.171, indikator kinerja program urusan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2021 – 2025 menunjukkan berbagai pencapaian penting.

- 1) Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo yang Aktif

Pada tahun 2025, persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif mencapai 85,29% atau dari 102 lembaga

binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo, 87 diantaranya aktif. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga yang dibina dan menjadi mitra Dinkominfo aktif dalam menyebarkan informasi. Aktivitas ini penting untuk memastikan informasi yang relevan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan lembaga mitra dalam mengelola informasi publik.

2) Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik

Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non-elektronik tercatat di angka 100%. Dari target 1.460 terealisasi sejumlah 8.122 konten diseminasi informasi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh informasi penting sudah berhasil disebarkan melalui berbagai saluran media, baik yang berbasis teknologi (elektronik) maupun konvensional (non-elektronik). Capaian ini mengindikasikan adanya sistem penyebaran informasi yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

3) Persentase Penanganan Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang Dikelola Dinkominfo

Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo juga mencapai 100% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa dari 733 aduan yang disampaikan oleh masyarakat berhasil ditangani dengan baik oleh pemerintah. Keberhasilan ini mencerminkan responsivitas pemerintah dalam mendengarkan dan menangani berbagai keluhan publik, yang berpotensi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

4) Persentase Badan Publik yang Memenuhi Standar Tata Kelola dan Layanan Informasi Komunikasi Publik

Persentase badan publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik menjadi salah satu indikator kinerja baru dalam bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Temanggung. Munculnya indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi di instansi publik. Standarisasi tata kelola informasi yang baik akan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan. Jumlah badan publik yang memenuhi standar terus

meningkat setiap tahunnya, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022 hingga 2023, di mana jumlah badan publik yang memenuhi standar naik dari 62 menjadi 80 dari total 341 badan publik. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan 90 badan publik, dan pada Tahun 2025 ini mencapai 98 badan publik (28,74%) dari total Badan Publik sejumlah 341.

5) Persentase Layanan Publik Secara Elektronik

Persentase layanan publik secara elektronik pada tahun 2025 tercatat sebesar 52,67% atau dari 131 layanan publik yang ditetapkan, 73 diantaranya sudah dapat diakses secara digital. Capaian ini menunjukkan masih adanya layanan yang belum terdigitalisasi, sehingga pemerintah perlu mempercepat proses digitalisasi layanan untuk mempermudah akses publik dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

6) Persentase Kinerja Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Baik

Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang baik tercatat sebesar 100% pada tahun 2025, yang berarti seluruh infrastruktur TIK di Kabupaten Temanggung berfungsi dengan baik. Infrastruktur TIK yang optimal ini memainkan peran penting dalam mendukung berbagai layanan digital, baik untuk kepentingan pemerintahan maupun publik, serta memastikan kelancaran operasional layanan yang berbasis teknologi informasi.

7) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Persentase rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Temanggung terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2025, akses internet mencapai 94,24% rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah ini telah mendapatkan akses terhadap internet, yang semakin mendukung transformasi digital pada masyarakat.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong pemerataan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Di Kabupaten Temanggung, peran sektor ini tercermin melalui indikator-indikator yang menjadi dasar dalam

merumuskan kebijakan penguatan koperasi dan UKM agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

1) Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan usaha secara rutin dan rutin melaksanakan kewajiban organisasinya sesuai dengan ketentuan undang-undang perkoperasian. Gambaran dari kondisi koperasi di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 172
Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Koperasi aktif tanpa KDKMP	n.a	106	110	165	182

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2026

Secara keseluruhan, kuantitas koperasi aktif di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya ditunjukkan dengan peningkatan dari 106 koperasi pada tahun 2022, jumlahnya melonjak menjadi 185 koperasi di tahun 2026. Ini menandakan iklim kelembagaan perkoperasian yang semakin sehat dan berkembang dengan baik. Meskipun data mencatat adanya peningkatan signifikan pada jumlah koperasi aktif yang berbadan hukum formal, eksistensi KDKMP juga memegang peranan yang tidak kalah penting dalam memetakan produktivitas kelompok usaha informal yang belum atau sedang berproses menjadi koperasi. Pada tahun 2026 Triwulan I, data koperasi aktif ditambah dengan KDKMP di Kabupaten Temanggung tercatat sebanyak 474 masuk dalam kategori koperasi aktif dari 930 koperasi yang ada di Kabupaten Temanggung. Dari data tersebut menunjukkan bahwa persentase atau rasio keaktifan koperasi di Temanggung telah mencapai angka 50,9%. Capaian ini tergolong baik untuk tingkat daerah, di mana lebih dari separuh lembaga koperasi yang ada mampu menjalankan fungsi organisasi dan usahanya secara riil. Meskipun kehadiran KDKMP mendongkrak angka keaktifan secara signifikan, data ini juga menyingkap fakta bahwa masih ada sekitar 456 koperasi yang berstatus pasif/tidak aktif (930 total dikurangi 474 aktif).

2) Jumlah UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu roda penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Temanggung. Peran strategisnya tidak hanya terlihat dari kontribusi terhadap produk domestik

regional bruto, melainkan juga pada kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja lokal dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Gambaran mengenai struktur atau klasterisasi usaha di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Temanggung tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 173
Jumlah dan Sebaran UMKM di Kabupaten Temanggung Berdasarkan Skala Usaha Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Kecil	Jumlah Usaha Menengah
1	Temanggung	2.270	3	
2	Parakan	4.247	1	
3	Ngadirejo	3.921	2	
4	Candiroto	834		1
5	Bejen	548	1	
6	Bansari	768		
7	Kledung	2.206		2
8	Jumo	1.920		
9	Kandangan	2.234		
10	Kaloran	2.386		
11	Kranggan	2.044		
12	Gemawang	1.598		
13	Pringsurat	2.047	2	
14	Selopampang	583	2	
15	Tlogomulyo	276	1	
16	Tretep	96		
17	Wonobojo	1.254		
18	Tembarak	758		
19	Bulu	1.128		
20	Kedu	2.701	1	
	Jumlah	33.819	13	3

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan data kuantitatif yang tersaji di atas, struktur UMKM daerah di Kabupaten Temanggung didominasi oleh sektor Usaha Mikro dengan total mencapai 33.819 unit usaha. Angka ini berbanding sangat kontras dengan jumlah Usaha Kecil yang hanya tercatat sebanyak 13 unit dan Usaha Menengah yang tercatat sebanyak angka 3 unit di seluruh wilayah kabupaten. Secara spasial, aktivitas usaha mikro berpusat secara masif di Kecamatan Parakan (4.247 unit) dan Kecamatan Ngadirejo (3.921 unit), disusul oleh Kecamatan Kedu (2.701 unit) serta wilayah perkotaan Kecamatan Temanggung (2.270 unit). Sebaliknya, Kecamatan Tretep menjadi wilayah dengan densitas usaha paling rendah, yakni hanya sejumlah 96 unit usaha mikro.

3) Jumlah UMKM yang Tersertifikasi Halal

Perkembangan industri halal saat ini bukan lagi sekadar pemenuhan kewajiban religius, melainkan telah bertransformasi menjadi strategi bisnis yang krusial untuk memenangkan kepercayaan pasar. Data UMKM Kabupaten Temanggung hingga Tahun 2026 Triwulan I tercatat UMKM yang belum tersertifikasi halal sebanyak 9.078 dan UMKM yang telah tersertifikasi halal sebanyak 11.255. Melihat data tersebut menunjukkan

bahwa pelaku usaha di Temanggung cukup responsif terhadap kebijakan sertifikasi halal yang dicanangkan oleh pemerintah. Keberadaan label halal tersebut menjadi modal kuat bagi UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas, baik masuk ke jaringan ritel modern, pusat oleh-oleh, hingga memperluas jangkauan pasar ke luar daerah.

4) Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara nilai usaha koperasi yang mencakup penjualan, penerimaan jasa, serta penyaluran pinjaman dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Semakin besar rasio ini, semakin besar pula kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Adapun rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2020–2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 174
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

Tahun	Nilai Volume Usaha Koperasi	Total PDRB ADHB	%
2021	257.702.743.506	22.627.791.480.000	1,14
2022	214.335.739.340	24.726.442.720.000	0,87
2023	275.435.735.600	26.912.324.210.000	1,02
2024	359.227.932.489	28.923.600.000.000	1,24
2025	415.361.000.000	28.923.600.000.000 *	1,44

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2025

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi selama periode 2021–2025, dengan capaian tertinggi sebesar 1,44% pada tahun 2025 dan terendah 0,87% pada tahun 2022. Penurunan tajam pada tahun 2022 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi dan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Namun, pada tahun 2023 rasio kembali meningkat menjadi 1,02%, didorong oleh membaiknya partisipasi anggota koperasi serta peningkatan kedisiplinan koperasi dalam menyampaikan laporan keuangan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Tren positif ini berlanjut hingga 2025, mencerminkan pemulihan dan penguatan kinerja koperasi sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi daerah serta kontribusinya yang semakin nyata terhadap PDRB Kabupaten Temanggung.

5) Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang berusaha dengan dibantu buruh tetap di suatu daerah dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama. Yang dimaksud

dengan berusaha dibantu buruh tetap adalah kegiatan usaha yang dijalankan atas risiko sendiri dengan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang menerima upah. Sementara itu, penduduk usia angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau termasuk dalam kategori pengangguran. Keberadaan pengusaha yang berusaha dengan dibantu buruh tetap mencerminkan orientasi pertumbuhan usaha melalui penciptaan lapangan kerja tetap. Semakin besar jumlah pengusaha yang berada dalam kategori ini, semakin tinggi pula tingkat penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha di daerah tersebut. Rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 175
Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024	2025
Berusaha dibantu buruh tetap daerah	9.208	15.100	8.482	10.117	12.274
Angkatan Kerja	357.156	454.927	472.789	482.651	505.419
Rasio Kewirausahaan Daerah	2,58	3,32	1,79	2,10	2,43

Sumber: Sakernas BPS

Data rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021-2025 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan capaian tertinggi sebesar 3,32% pada tahun 2022 dan terendah 1,79% pada tahun 2023. Penurunan signifikan pada tahun 2023 kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dampak lanjutan pandemi COVID-19, perubahan kondisi ekonomi, serta terbatasnya kapasitas pelaku usaha dalam mempertahankan buruh tetap. Meski demikian, terjadi peningkatan pada tahun 2024 (2,10%) dan 2025 (2,43%), yang mengindikasikan mulai pulihnya semangat kewirausahaan dan kemampuan pengusaha untuk kembali menyerap tenaga kerja tetap. Fluktuasi ini mencerminkan perlunya penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pelatihan, fasilitasi akses permodalan, dan kemitraan usaha agar pertumbuhan wirausaha yang produktif dan berkelanjutan dapat terus meningkat di Temanggung.

Sektor koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas koperasi maupun fasilitasi UMKM. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan koperasi secara berkelanjutan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha, serta memberikan pendampingan dan akses pembiayaan yang lebih luas agar pelaku usaha mikro dapat berkembang dan berdaya saing di pasar lokal maupun nasional. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sekaligus meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

Gambaran capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 176
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan*	%	NA	NA	NA	NA	41,21
2	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi*	%	NA	NA	NA	NA	62,83
3	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan*	%	NA	NA	NA	NA	0,239
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM Kabupaten Temanggung, 2025

1) Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pengurus, pengawas, pengelola maupun anggota koperasi. Untuk tahun 2025 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap 75 Koperasi di wilayah Kabupaten Temanggung. Namun masih terdapat 182 koperasi yang masih belum dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya agar pengawasan koperasi dapat tercapai secara efektif.

2) Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi

Pendidikan perkoperasian merupakan salah satu prinsip jati diri koperasi, program pendidikan dan peningkatan kapasitas bagi pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan dalam mengelola koperasi dan usaha secara berkelanjutan. adaiftif terhadap perkembangan digital. Materi pelatihan mencakup manajemen usaha, keuangan, pemasaran digital dan tata kelola yang bertujuan untuk memberdayakan koperasi agar lebih kuat,

mandiri dan berdaya saing demi kesejahteraan anggotanya. Pada tahun 2025, dari total 922 koperasi tercatat sebanyak 289 pengurus, pengawas dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih yang mengikuti pelatihan/ sosialisasi dengan mitra dan himbara.

- 3) Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan

Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, dan akses pembiayaan adalah perbandingan pengusaha mikro yang telah menerima bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk dari pemerintah, lembaga terkait, atau pihak lain, termasuk pemberian modal, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembangunan jaringan kemitraan, bantuan legalitas atau kelembagaan, serta pendampingan dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya dibandingkan dengan keseluruhan jumlah UMKM di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2025 tercatat baru ada 81 pelaku usaha yang mendapat fasilitasi dari total 33.385 usaha mikro. Adapun kegiatan yang diberikan antara lain penerbitan surat keterangan UMKM Binaan khususnya untuk pengajuan sertifikat HKI atau merek serta pelaksanaan gelar produk UMKM di Kecamatan Bejen yang menjadi tempat bagi para pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produk-produknya dan meningkatkan ekspor. Capaian indikator ini masih sangat rendah sehingga perlu perhatian khusus agar pelaku usaha mikro dapat mendapatkan fasilitasi demi peningkatan usahanya.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mendorong peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan pelayanan, kemudahan perizinan, dan pengelolaan data yang terintegrasi. Beberapa indikator pendukung seperti Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN menjadi gambaran nyata atas daya tarik daerah terhadap investor. Di samping itu, Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan dan Jumlah Jenis Layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat.

- 1) Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Investasi merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Temanggung secara konsisten mendorong peningkatan realisasi investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), guna memperkuat struktur ekonomi daerah. Adapun realisasi investasi Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 177
Realisasi Investasi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun (dalam Miliar)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai investasi tahun berjalan	1.496	1.836	2.046	2.145	2.159,9
2	Nilai investasi PMDN	1.486	1.529	1.326	1.923	1.864,1
3	Nilai investasi PMA	10	306	719	221	295,8

Sumber: OSS.go.id, 2025

Berdasarkan data dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS.go.id), realisasi investasi di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025, dengan nilai investasi tahun berjalan meningkat dari Rp1.496 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.159,9 miliar pada tahun 2025. Kontribusi utama berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang secara konsisten mendominasi, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp1.326,55 miliar sebelum kembali meningkat signifikan menjadi Rp1.923,29 miliar di tahun 2024. Penanaman Modal Asing (PMA) mulai tercatat sejak tahun 2021 dan menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp719,70 miliar, namun menurun menjadi Rp221,80 miliar di tahun 2024 dan mengalami peningkatan menjadi Rp295,8 miliar pada tahun 2025. Pola ini mencerminkan potensi investasi daerah yang semakin berkembang, sekaligus menunjukkan perlunya strategi promosi dan penguatan iklim investasi yang lebih stabil untuk menarik dan mempertahankan investor asing maupun domestik.

2) Realisasi Jumlah Proyek Investasi Per Sektor

Secara umum, kontribusi terhadap perekonomian daerah memiliki karakteristik yang bervariasi di setiap sektornya. Tingkat ketertarikan investor dalam menanamkan modal pada sektor spesifik dapat dilihat dari kuantitas proyek yang berhasil direalisasikan, sedangkan nilai investasi mencerminkan besaran dana yang dialokasikan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Sementara itu, tingkat penyerapan tenaga kerja menjadi

tolak ukur penting karena investasi yang masuk tidak hanya berimplikasi pada peningkatan aset dan produktivitas, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

Tabel 2. 178
Realisasi Jumlah Proyek Investasi Per Sektor Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

No.	Sektor / Sub Sektor	Jumlah Proyek Investasi Per Sektor Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025				
		2021	2022	2023	2024	2025
I	Sektor Primer					
1	Tanaman Pangan, Perkebunan	513	464	916	155	272
2	Peternakan	266		205	217	244
3	Kehutanan	11	3	0	0	0
4	Perikanan	82	58	31	9	67
5	Pertambangan	0	0	0	2	0
II	Sektor Sekunder					
1	Industri Makanan	990	1.868	6.013	4.167	2.115
2	Industri Tekstil	184	94	82	114	82
3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4	0	0	0	1
4	Industri Kayu	165	119	183	348	258
5	Industri Kertas & Percetakan	46	46	28	48	49
6	Industri Kimia & Farmasi	75	46	61	61	30
7	Industri Karet & Plastik	8	29	2	39	10
8	Industri Mineral Non Logam	7	10	61	24	37
9	Industri Logam, Mesin dan Elektronik	91	80	34	90	123
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam	11	15	114	37	18
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	2	3	0	0	0
12	Industri Lainnya	321	85	73	68	83
III	Sektor Tersier					
1	Listrik, Gas dan Air	14	29	12	27	13
2	Konstruksi	230	323	420	388	479
3	Perdagangan & Reparasi	3.702	3.712	3.033	3.800	4.566
4	Hotel dan Restoran	990	1.011	759	1.223	3.501
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	100	157	141	216	211
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	2	71	28	123	70
7	Jasa Lainnya	673	1.198	673	653	1.357
	JUMLAH	8.487	9.421	12.869	11.809	13.586

Sumber: DPMPSTP Kabupaten Temanggung, 2026

Sektor perdagangan dan reparasi secara konsisten mendominasi realisasi investasi di Kabupaten Temanggung dengan volume berkisar antara 3.000 hingga di atas 3.700 proyek per tahun, yang menegaskan posisinya sebagai penggerak utama ekonomi yang padat usaha dan adaptif. Di sisi lain, sektor hotel dan restoran mencatatkan lonjakan ekspansif hingga 2.790 proyek pada tahun 2025, merefleksikan geliat sektor pariwisata dan akomodasi lokal. Sementara itu, fluktuasi tajam melanda

industri makanan yang sempat memuncak dengan 6.013 proyek pada tahun 2023 sebelum menyusut drastis menjadi 1.104 proyek di tahun 2025 di mana fenomena serupa juga dialami oleh sektor konstruksi dan jasa lainnya. Berbeda dengan dinamika tersebut, sektor industri kayu, transportasi, pergudangan, komunikasi, serta perumahan cenderung berkembang secara stabil meski dalam skala proyek yang lebih kecil. Kehadiran investasi berskala mikro namun konsisten pada sektor kimia-farmasi, logam-mesin-elektronik, serta pertanian-peternakan turut menunjukkan adanya diversifikasi usaha di daerah, walaupun sub sektor kendaraan bermotor dan alat transportasi justru bergerak stagnan bahkan sering tidak ada aktivitas di beberapa tahun terakhir.

Tabel 2. 179
Nilai Investasi Per Sektor Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No.	Sektor / Sub Sektor	Nilai Investasi Per Sektor Kabupaten Temanggung				
		2021	2022	2023	2024	2025
I	Sektor Primer					
1	Tanaman Pangan, Perkebunan	22.784.415.100	56.542.215.072	14.088.000.000	10.945.150.980	23.066.672.000
2	Peternakan	13.097.702.650		15.827.200.000	19.323.230.000	21.842.933.000
3	Kehutanan	677.000.000	192.000.000	-	-	0
4	Perikanan	1.474.200.001	1.898.500.000	1.414.000.000	407.700.000	2.235.100.000
5	Pertambangan	-	-	-	170.000.000	0
II	Sektor Sekunder					
1	Industri Makanan	82.714.715.502	109.027.427.401	94.231.979.400	137.593.813.500	44.839.075.100
2	Industri Tekstil	228.695.200.800	32.197.357.280	220.141.900.000	85.514.980.664	136.353.956.123
3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	53.000.000	-	-	-	38.638.625.141
4	Industri Kayu	263.269.999.461	255.511.717.613	541.367.205.572	496.391.619.261	192.841.678.990
5	Industri Kertas & Percetakan	30.258.527.080	2.640.000.000	3.103.000.000	2.095.500.000	2.462.100.000
6	Industri Kimia & Farmasi	21.494.000.152	54.025.600.000	16.921.700.000	5.291.653.966	927.517.861
7	Industri Karet & Plastik	416.500.000	26.236.237.400	30.000.000	3.515.057.634	1.018.507.404
8	Industri Mineral Non Logam	349.000.000	660.000.000	29.113.907.570	1.701.699.737	3.387.000.000
9	Industri Logam, Mesin dan Elektronik	3.691.200.000	1.960.000.000	1.233.500.000	25.657.903.500	5.499.500.000
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam	362.500.000	440.000.000	1.859.400.000	2.892.000.100	574.000.000
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	11.000.000	101.910.000	-	-	-
12	Industri Lainnya	41.399.561.151	28.875.227.900	34.161.500.000	15.993.085.762	4.052.955.000
III	Sektor Tersier					
1	Listrik, Gas dan Air	364.500.000	3.403.500.000	803.000.000	236.322.342.107	691.500.000
2	Konstruksi	77.814.924.893	311.897.334.846	88.864.294.542	70.770.866.767	36.307.046.913

No.	Sektor / Sub Sektor	Nilai Investasi Per Sektor Kabupaten Temanggung				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Perdagangan & Reparasi	446.581.705.994	426.380.340.807	711.493.049.662	350.081.700.250	495.438.568.987
4	Hotel dan Restoran	44.900.941.500	22.487.675.000	37.949.661.100	54.000.709.004	103.807.982.019
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	14.961.600.000	83.632.273.327	97.102.297.214	76.046.164.000	111.714.374.877
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	2.333.000.000	21.972.200.101	3.414.000.000	79.565.297.608	52.639.700.000
7	Jasa Lainnya	198.976.235.419	395.929.711.765	133.131.042.997	470.812.363.678	881.601.794.721
	JUMLAH	1.496.681.429.703	1.836.011.228.512	2.046.250.638.057	2.145.092.838.518	2.159.940.588.136

Sumber: DPMPSTP Kabupaten Temanggung, 2026

Struktur perekonomian Kabupaten Temanggung berdasarkan peta investasi periode 2021–2025 telah bertransformasi ke arah ekonomi modern yang bertumpu pada sektor tersier (jasa dan perdagangan) serta sektor sekunder (industri kayu dan makanan). Realisasi investasi di Kabupaten Temanggung ditopang kuat oleh sektor jasa lainnya yang melonjak signifikan dari Rp198,78 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp770,03 miliar di tahun 2025. Di sektor manufaktur, industri kayu memegang peran krusial dengan capaian tertinggi sebesar Rp541,36 miliar pada tahun 2022, menunjukkan tingginya minat investor pada industri pengolahan komoditas tersebut. Sektor tersier seperti perdagangan & reparasi serta hotel & restoran turut menjadi motor penggerak ekonomi dengan tren yang positif meski dinamis. Sementara itu, lonjakan investasi yang signifikan sempat tercatat pada sektor transportasi, pergudangan, & komunikasi yang menembus angka Rp97,10 triliun pada tahun 2023 sebelum akhirnya mengalami penurunan. Kontras dengan capaian tersebut, kontribusi dari sektor kehutanan, pertambangan, dan industri alat transportasi cenderung minimal bahkan kerap nihil. Secara makro, gambaran investasi ini menegaskan bahwa perekonomian Temanggung berpusat pada integrasi sektor primer, sekunder (khususnya perkayuan), serta tersier (jasa, dagang, dan pariwisata) yang mencerminkan diversifikasi struktur ekonomi serta peluang pengembangan yang luas di masa mendatang.

Tabel 2. 180
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Perusahaan Per Sektor
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Sektor / Sub Sektor	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Perusahaan Per Sektor Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025				
		2021	2022	2023	2024	2025
I	Sektor Primer					
1	Tanaman Pangan, Perkebunan	471	1.326	1.323	398	1.069
2	Peternakan	543		456	496	640
3	Kehutanan	34	11	0	0	0
4	Perikanan	101	233	83	25	147
5	Pertambangan	0	0	0	23	0
II	Sektor Sekunder					

No	Sektor / Sub Sektor	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Perusahaan Per Sektor Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Industri Makanan	1.186	4.847	10.060	10.635	4.190
2	Industri Tekstil	862	1.399	6.870	1.030	1.918
3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	0	0	0	1
4	Industri Kayu	2.038	6.566	9.879	12.595	5.105
5	Industri Kertas & Percetakan	424	111	114	125	145
6	Industri Kimia & Farmasi	315	251	205	182	60
7	Industri Karet & Plastik	8	427	6	46	29
8	Industri Mineral Non Logam	25	38	319	24	123
9	Industri Logam, Mesin dan Elektronik	161	173	88	211	317
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam	15	42	241	184	45
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1	11	0	0	0
12	Industri Lainnya	1.295	757	2.463	810	213
III	Sektor Tersier					
1	Listrik, Gas dan Air	13	124	33	315	55
2	Konstruksi	696	1.873	1.154	923	1.056
3	Perdagangan & Reparasi	4.634	9.832	9.520	10.687	9.706
4	Hotel dan Restoran	932	2.426	1.731	4.008	6.889
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	156	1.983	1.207	792	577
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	5	320	111	422	233
7	Jasa Lainnya	1.767	7.224	3.208	3.378	5.425
	JUMLAH	15.685	39.974	49.071	47.309	37.943

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Temanggung, 2026

Struktur penyerapan tenaga kerja dari investasi di Kabupaten Temanggung telah bergeser secara kuat ke arah Industrialisasi (Sektor Sekunder) dan Ekonomi Jasa (Sektor Tersier). Industri pengolahan kayu dan makanan, dikombinasikan dengan sektor perdagangan serta perhotelan/restoran, merupakan pilar-pilar strategis yang memberikan dampak langsung paling besar terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2021–2025. Sektor perdagangan dan reparasi secara konsisten menjadi penggerak utama penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung dengan capaian tertinggi sebesar 10.687 pekerja pada tahun 2024. Selain perdagangan dan reparasi, sektor Industri Makanan juga memberikan kontribusi signifikan, dengan penyerapan tenaga kerja yang meningkat pesat hingga lebih dari 10 ribu orang pada tahun 2023–2024, meskipun kemudian turun cukup tajam pada tahun 2025. Tren serupa terlihat pada sektor Industri Kayu, yang sempat mencapai puncaknya hingga menyerap di atas 12 ribu tenaga kerja pada tahun 2024 sebelum kembali menurun drastis. Sementara itu, sektor Hotel dan Restoran menunjukkan kontribusi yang relatif stabil dengan serapan tenaga kerja berkisar 4.000–4.500 orang, sedangkan Jasa Lainnya dan Konstruksi juga

memberikan turut menjadi sektor yang berkontribusi penting dalam penyerapan tenaga kerja. Adapun sektor-sektor lain seperti Industri Kimia dan Farmasi, Industri Logam, serta Kehutanan menyerap tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil, namun tetap menunjukkan keberlanjutan peran dalam struktur ekonomi daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan, pengolahan makanan, kayu, dan jasa menjadi pilar utama penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Temanggung, meskipun fluktuasi tajam pada beberapa sektor menandakan pentingnya upaya menjaga stabilitas investasi agar penyerapan tenaga kerja tetap berkesinambungan.

3) Realisasi Investasi Per Kecamatan

Pada rentang waktu 2022 hingga 2025, realisasi investasi di Kabupaten Temanggung mencatatkan tren pertumbuhan yang positif. Tahun 2022 menjadi fase awal pemulihan pasca pandemi, ketika nilai investasi, jumlah proyek, dan serapan tenaga kerja mulai meningkat meskipun masih pada skala yang relatif moderat. Memasuki tahun 2023, pertumbuhan investasi mengalami percepatan yang signifikan. Akselerasi tersebut ditandai dengan peningkatan signifikan pada nilai modal, kuantitas proyek, serta serapan tenaga kerja lokal, di mana wilayah Kecamatan Kranggan, Pringsurat, dan Temanggung kota sukses menjadi motor penggerak utama dengan realisasi investasi tertinggi.

Tabel 2. 181
Realisasi Investasi Kabupaten Temanggung Per Kecamatan
Tahun 2022-2024

No.	Kecamatan	2022			2023			2024		
		Proyek	Investasi	Naker	Proyek	Investasi	Naker	Proyek	Investasi	Naker
1	Temanggung	1.800	552.728.115.666	6.954	2.038	355.427.010.975	7.239	1.722	760.631.843.360	7.360
2	Tembarak	318	15.345.202.127	734	558	22.006.888.853	1.064	314	9.843.940.901	495
3	Pringsurat	549	119.567.289.689	3.448	1.114	452.868.667.983	4.104	993	381.557.111.187	6.952
4	Kaloran	379	28.940.761.095	1.415	445	13.444.000.000	813	367	16.695.671.160	841
5	Kranggan	527	512.443.084.222	8.473	684	520.792.332.460	12.256	749	453.346.054.042	8.961
6	Parakan	1.051	158.594.700.322	2.986	1.468	193.923.867.754	6.008	1.275	111.188.462.403	3.572
7	Bulu	559	54.429.689.788	1.438	769	278.713.398.943	2.238	519	64.637.568.069	1.139
8	Kandangan	525	41.471.593.208	1.765	736	35.249.372.100	1.734	845	45.278.582.831	3.261
9	Candiroto	268	23.000.590.859	1.081	392	12.406.441.000	748	554	57.775.165.000	2.260
10	Ngadirejo	640	45.098.573.875	1.836	947	38.341.778.000	2.007	848	67.349.674.398	3.922
11	Wonoboyo	238	6.948.910.000	552	207	3.683.400.000	318	192	21.345.103.074	443
12	Tretep	115	7.967.900.000	303	230	3.780.550.000	321	76	5.110.390.000	163
13	Bejen	297	14.089.768.273	665	324	12.433.399.736	625	225	7.124.100.000	389
14	Kledung	398	24.766.029.053	1.096	364	18.698.136.785	829	326	22.935.546.666	838
15	Bansari	282	9.886.800.000	586	350	8.271.547.393	652	310	15.865.215.001	953
16	Gemawang	207	11.747.820.000	663	770	9.157.645.000	1.243	629	8.107.350.000	1.874
17	Tlogomulyo	244	12.487.881.181	606	165	10.734.700.001	367	188	9.505.150.100	376
18	Selopampang	156	7.044.313.563	436	194	5.244.027.000	327	249	7.823.850.000	450

No.	Kecamatan	2022			2023			2024		
		Proyek	Investasi	Naker	Proyek	Investasi	Naker	Proyek	Investasi	Naker
19	Jumo	199	14.153.450.439	673	370	13.070.962.650	807	432	21.606.850.011	872
20	Kedu	669	175.298.755.152	4.264	744	38.002.511.424	5.371	996	57.365.210.315	2.188
	Total	9.421	1.836.011.228.512	39.974	12.869	2.046.250.638.057	49.071	11.809	2.145.092.838.518	47.309

Sumber: Laporan Akhir Kajian Pengembangan Investasi Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Secara spasial, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat secara konsisten mendominasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah dengan kontribusi nilai investasi tertinggi dan penyerapan tenaga kerja paling masif sepanjang tiga tahun tersebut.

4) Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan

Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari seluruh layanan yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai dengan standar durasi yang telah ditetapkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur). Persentase ini menghitung berapa banyak layanan yang benar-benar selesai dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Semakin tinggi persentasenya, berarti semakin baik kinerja dalam memberikan layanan cepat, tepat, dan sesuai standar. Pada tahun 2025, seluruh layanan yang diberikan telah memenuhi standar waktu. Adapun persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 secara lebih rinci disajikan pada tabel.

Tabel 2. 182
Persentase Layanan yang Memenuhi Standar Waktu Pelayanan
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Uraian	Tahun (dalam Miliar)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah layanan yang memenuhi standar waktu	NA	NA	NA	NA	14.988
Jumlah layanan yang diberikan	NA	NA	NA	NA	14.988
Persentase	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Temanggung, 2025

Indikator Persentase Layanan yang Memenuhi Standar Waktu Pelayanan merupakan indikator baru yang menjadi salah ukuran kinerja urusan Penanaman Modal dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Layanan yang dimaksud pada indikator ini merujuk pada akumulasi dari seluruh layanan baik jenis maupun instansi penyedia layanan pada suatu periode waktu tertentu. Pada periode RPJMD sebelumnya, indikator ini tidak menjadi pengukuran kinerja sehingga tidak dilakukan perhitungan pada tahun sebelumnya (*Not Available/NA*). Oleh karena itu, pengukuran yang dimulai pada Triwulan I Tahun 2026 ini akan

berfungsi sebagai *baseline* (data dasar) penting dalam menetapkan target capaian di tahun-tahun mendatang. Kehadiran indikator baru ini menandai transformasi paradigma tata kelola penanaman modal daerah yang kini lebih berorientasi pada kepuasan pengguna layanan (*customer-oriented*). Dengan menetapkan standar waktu yang ketat sebagai tolok ukur kinerja, diharapkan hambatan birokrasi dalam proses perizinan dapat dipangkas secara signifikan, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan daya tarik investasi di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2. 183
Data Perizinan Kabupaten Temanggung Triwulan I Tahun 2026

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN (%)
A. IZIN POKOK				
1	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	0	0	100
2	PBG	36	36	100
3	Pemecahan IMB	9	9	100
4	PKKPR Non Berusaha	15	15	100
B. IZIN BIDANG USAHA				
5	NIB	2.003	2.003	100
6	Ijin Trayek	4	4	100
7	Izin Penyelenggaraan Reklame	194	194	100
8	Izin Pemasangan Kabel Udara	0	0	100
C. IZIN OPERASIONAL				
9	Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan	8	8	100
10	Surat Izin Operasional Puskesmas	0	0	100
11	Sertifikat Laik Hygine Sanitasi	2	2	100
D. PERIZINAN YANG TERBIT MELALUI AKUN OSS RBA DPMPTSP TEMANGGUNG KARENA PENERBITANNYA MEMBUTUHKAN VERIFIKASI TEKNIS OLEH DPMPTSP TEMANGGUNG BESERTA TIM TEKNIS				
12	SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)	1.829	1.829	100
13	Persetujuan PKPLH	2	0	100
14	Persetujuan Lingkungan	0	0	100
15	Tanda Daftar Gudang	0	0	100
16	PKKPR DARAT	313	313	100
17	SPPIRT	0	0	100
18	Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan Di Kabupaten/Kota	0	0	100
19	Sertifikat Laik Hygine Sanitasi	1	1	100
20	Sertifikat Standar	243	243	100
21	Sertifikat Standar Kedai Jamu	0	0	100
22	Sertifikat Standar Panti Sehat Berkelompok	0	0	100
23	Sertifikat Standar Toko Alat Kesehatan	1	1	100
24	Sertifikat Standar Toko Kosmetika	2	2	100
25	Sertifikat Standar Toko Kosmetika Pedagang Kaki Lima	0	0	100
26	Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional	1	1	100
27	Izin Apotek	13	13	100
28	Sertifiakt Standar Toko Obat	3	3	100

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN (%)
29	Izin Inseminator	19	19	100
30	Izin Unit Transfusi Darah	0	0	100
31	PSAT-PDUK	0	0	100
32	Pernyataan Mandiri Skala Mikro	3.821	3.821	100
E. MPP DIGITAL				
33	Surat Izin Praktik Apoteker	30	30	100
34	Surat Izin Praktik Dokter	17	17	100
35	Surat Izin Praktik Dokter Gigi	19	19	100
36	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Anak	1	1	100
37	Surat Izin Praktik Bidan Profesi	8	8	100
38	Surat Izin Praktik Bidan Vokasi	4	4	100
39	Surat Izin Praktik Bidan Vokasi Level 5	12	12	100
40	Surat Izin Praktik Bidan Vokasi Level 6	0	0	100
41	Surat Izin Praktik Ners	15	15	100
42	Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan	0	0	100
43	Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Anak	0	0	100
44	Surat Izin Praktik Perawat Vokasi	8	8	100
45	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	0	0	100
46	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Level 5	3	3	100
47	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi	5	5	100
48	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi Level 5	11	11	100
49	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi Level 6	0	0	100
50	Surat Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	2	100
51	Surat Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 5	2	2	100
52	Surat Izin Praktek Fisioterapis Level 5	3	3	100
53	Surat Izin Praktek Fisioterapis	2	2	100
54	Surat Izin Praktek Nutrisisionis	2	2	100
55	Surat Izin Praktek Nutrisisionis Level 5	2	2	100
56	Surat Izin Praktek Nutrisisionis Level 6	0	0	100
57	Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5	0	0	100
58	Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6	1	1	100
59	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi	0	0	100
60	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan	0	0	100
61	Surat Izin Praktik Perawat Vokasi Level 5	25	25	100
62	Surat Izin Praktik Perawat Vokasi Level 6	0	0	100
63	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik	0	0	100
64	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	1	100
65	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Radiologi	0	0	100
66	Surat Izin Praktik Elektromedis Level 5	0	0	100
67	Surat Izin Praktik Fisioterapis Level 5	0	0	100
68	Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	0	0	100

NO	JENIS IZIN	TOTAL		
		JUMLAH IZIN	IZIN YANG TERBIT	PROSENTASE IZIN (%)
69	Surat Izin Praktik Optometris	0	0	100
70	Surat Izin Praktik Okupasional Level 5	0	0	100
71	Surat Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5	1	1	100
72	Surat Izin Praktek Psikologi Klinis	1	1	100
73	Surat Izin Praktek Radiografer	0	0	100
74	Surat Izin Praktek Radiografer 5	0	0	100
75	Surat Izin Praktek Radiografer 6	0	0	100
76	Surat Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah	0	0	100
77	Surat Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah Level 5	1	1	100
78	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan	2	2	100
79	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 5	4	4	100
80	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 6	1	1	100
81	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mata	0	0	100
82	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Psikiatri	0	0	100
83	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal	0	0	100
84	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	0	0	100
85	Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Analisis Farmasi dan Makanan Level 5	0	0	100
86	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	1	100
87	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah Syaraf	0	0	100
88	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah	0	0	100
89	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Level 5	1	1	100
90	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Level 6	0	0	100
91	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Insentif	0	0	100
92	Surat Izin Prakter Ortotik Prostetik Level 5	0	0	100
93	Surat Izin Praktik Penata Anestesi Level	1	1	100
94	Surat Izin Praktik Penata Anestesi Level 6	2	2	100
95	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Neurologi	1	1	100
96	Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara Level 5	0	0	100
97	Surat Izin Praktik Dietisien	3	3	100
98	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	2	2	100
99	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	100
100	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	1	1	100
101	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik	1	1	100
102	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher	2	2	100
103	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	2	2	100
104	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1	1	100
JUMLAH		8.772	8.772	100

Sumber: oss.go.id, simbg.go.id, sicantik.go.id, MPPD

5) Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN

Investasi tidak hanya diukur dari besar kecilnya nilai modal yang masuk, tetapi juga dari jumlah proyek yang direalisasikan sebagai wujud nyata aktivitas ekonomi. Kabupaten Temanggung terus menunjukkan perkembangan positif dalam jumlah proyek investasi sebagai indikator meningkatnya kepercayaan dan minat investor terhadap potensi daerah. Adapun jumlah proyek investasi PMA dan PMDN Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 58
Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025, dari 4.632 proyek pada tahun 2020 menjadi 12.869 proyek pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 11.809 proyek di tahun 2024. Kenaikan jumlah proyek ini sejalan dengan peningkatan nilai realisasi investasi, yang tumbuh dari Rp1.245,66 miliar pada 2020 menjadi Rp2.159,94 miliar pada 2025, menandakan bahwa pertumbuhan investasi tidak hanya terjadi dari sisi jumlah proyek, tetapi juga dari nilai ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa selain semakin banyak investor yang menanamkan modal di Temanggung, terdapat pula kecenderungan proyek-proyek investasi bernilai besar yang masuk, khususnya terlihat dari lonjakan PMA pada tahun 2022–2023.

6) Jumlah Jenis Layanan di MPP

Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung menyediakan sebanyak 132 jenis layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP). Pada tahun 2025 ada penambahan 2 instansi dengan 5 jenis layanan sehingga saat ini MPP memiliki 137 jenis layanan dengan 27 instansi. Hal ini menunjukkan

komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap dan terintegrasi bagi masyarakat. Keberadaan berbagai jenis layanan ini memudahkan warga untuk mengakses berbagai kebutuhan administratif dan perizinan dalam satu tempat secara efisien, cepat, dan transparan. Dengan meningkatkan ragam layanan di MPP, Temanggung tidak hanya memperkuat kualitas pelayanan publik tetapi juga mendukung upaya percepatan birokrasi serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Kinerja program urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diukur melalui lima indikator utama yang mencerminkan efektivitas pelayanan, pengendalian, dan promosi investasi di daerah. Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi menggambarkan sejauh mana target investasi daerah dapat dicapai secara nyata. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal mengukur intensitas dan konsistensi upaya pemerintah dalam menarik investor melalui berbagai kegiatan promosi. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo menjadi indikator penting dalam menilai integritas dan transparansi pelayanan publik. Sementara itu, Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal menunjukkan peran pemerintah dalam memastikan investasi berjalan sesuai dengan ketentuan. Terakhir, Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menilai sejauh mana data investasi dikelola secara digital, akurat, dan dapat diakses sebagai bagian dari sistem pengambilan keputusan berbasis informasi.

Gambaran capaian kinerja program pada urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 184
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	%	NA	NA	NA	100	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM Kabupaten Temanggung, 2025

Sebagaimana pada Tabel 2.184, indikator kinerja program urusan bidang penanaman modal pada tahun 2021 – 2025 menunjukkan berbagai pencapaian penting.

1) Persentase Realisasi Total terhadap target investasi

Persentase total terhadap target investasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar realisasi investasi yang telah dicapai dibandingkan dengan terget investasi yang ditetapkan. Capaian realisasi investasi dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan performa yang sangat kuat karena realisasi selalu jauh melebihi target.

2) Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Promosi penanaman modal merupakan salah satu program dan kegiatan bidang penanaman modal yang meliputi analisis potensi kinvestasi, perencanaan strategi promosi, pengembangan materi promosi, partisipasi dalam acara promosi, pelayanan informasi dan kerjasama dengan pihak eksternal. Tujuan dari kegiatan promosi adalah untuk meningkatkan realisasi investasi. Event Promosi yang diikuti dari tahun 2021 – 2025 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan Promosi pada tahun 2025 disamping melalui event-event, prososi juga dilaksanakan melalui media sosial yang ada.

3) Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo

Perizinan bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas. Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat. Jumlah permohonan izin bebas calo dari tahun 2021 hingga 2025 selalu sama dengan jumlah permohonan izin yang masuk. Hal ini menghasilkan persentase 100% pada seluruh tahun yang ditampilkan. Dengan demikian, seluruh permohonan izin yang diajukan setiap tahunnya diproses melalui mekanisme resmi tanpa indikasi penggunaan jasa perantara atau calo. Data ini menggambarkan konsistensi dalam penerapan layanan perizinan yang bersih, transparan, dan bebas calo selama enam tahun terakhir.

4) Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data terkait investasi. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan

transparansi, dan memfasilitasi investasi yang berkualitas. Dengan pengelolaan yang efektif, data dan informasi penanaman modal dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal sejak tahun 2021 hingga 2025 tersedia melalui 1 (satu) data yaitu Sistem OSS-RBA.

5) Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal

Pengawasan dan pengendalian penanaman modal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai ketentuan, izin, dan rencana yang telah disetujui. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap perusahaan atau proyek investasi dibandingkan dengan jumlah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, terdapat 15 perusahaan yang telah didampingi dalam rangka pengendalian dan pengawasan penanaman modal.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung terus menjadi perhatian dalam rangka menciptakan generasi muda yang berdaya saing serta meningkatkan kualitas fasilitas dan pembinaan olahraga.

1) Persentase Pemuda Berprestasi

Persentase pemuda berprestasi di Kabupaten Temanggung tahun 2025 mencapai 25,71%. Angka ini masih tergolong rendah, sehingga perlu strategi untuk memperluas ruang pengembangan potensi dan pemberian apresiasi bagi pemuda. Pemerintah daerah dapat meningkatkan program pembinaan, pelatihan, serta akses terhadap kompetisi atau penghargaan. Tujuannya adalah mendorong lebih banyak pemuda berpartisipasi aktif dan berprestasi di tingkat daerah maupun nasional.

2) Persentase Atlet Berprestasi

Persentase atlet berprestasi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mencapai 84,14%. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar atlet yang terlibat aktif telah menunjukkan hasil yang membanggakan dalam berbagai kompetisi. Hal ini menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing atlet daerah. Pemerintah perlu

mempertahankan dukungan terhadap sarana latihan, pelatih profesional, dan keikutsertaan dalam event olahraga.

3) Persentase Prestasi Olahraga

Persentase prestasi olahraga di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mencapai 82,35%. Hal ini menandakan bahwa telah ada program dan kegiatan olahraga yang diselenggarakan sehingga mampu menghasilkan prestasi yang signifikan. Namun terbatasnya penyelenggaraan event olahraga menjadi salah satu tantangan pada capaian prestasi olahraga. Perlu adanya upaya yang lebih keras dalam pengembangan olahraga sebagai salah satu sarana pembentukan karakter dan prestasi.

4) Persentase Wirausaha Muda

Persentase wirausaha muda di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mencapai 10,35%. Angka ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pemuda yang terlibat dalam dunia kewirausahaan. Ini mengindikasikan perlunya dorongan lebih besar dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan muda yang inklusif dan suportif. Fasilitas akses modal, pelatihan bisnis, dan inkubasi usaha menjadi langkah penting untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda. Mendorong kewirausahaan di kalangan pemuda juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.

5) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Kemasyarakatan

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Kabupaten Temanggung mencapai 24,99% pada tahun 2025. Partisipasi pemuda dalam organisasi masih tergolong rendah, yang bisa disebabkan oleh kurangnya minat, kesempatan, atau akses terhadap wadah organisasi yang relevan. Rendahnya angka ini perlu menjadi perhatian, mengingat organisasi merupakan ruang penting bagi pembinaan kepemimpinan, partisipasi sosial, dan pengembangan karakter. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran forum kepemudaan dan membangun kolaborasi lintas lembaga untuk menjangkau lebih banyak pemuda.

6) Persentase Atlet Unggulan

Persentase atlet unggulan pada tahun 2025 baru mencapai 42,45 atau 433 atlet berhasil mengikuti kejuaraan minimal tingkat provinsi dari total 1020 atlet yang diseleksi di tingkat kabupaten. Capaian ini masih tergolong rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah

inkonsistensi dalam pembinaan yang diberikan. Selain itu pembinaan yang dilakukan belum terselenggara secara berkesinambungan. Oleh karenanya, Dindikpora terus berupaya untuk menjalin koordinasi dengan pengurus tingkat kabupaten dan pengurus KONI agar dapat meningkatkan pelatihan dan pembinaan atlet.

7) Persentase Cabang Olahraga Unggulan

Pada tahun 2025, atlet delegasi dari Temanggung berpotensi meraih prestasi pada 25 cabang olahraga dari total 43 cabang olahraga. Artinya, terdapat separuh cabang olahraga yang berhasil didominasi. Meskipun demikian, dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki, perlu adanya pembinaan dan regenerasi atlet serta optimalisasi manajemen program. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembinaan atlet dan pelatih, regenerasi atlet dan pelatih, peningkatan kualitas pelatih dan pembinaan cabang olah raga yang berkelanjutan.

Adapun capaian kinerja program pada urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 ditunjukan sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 185
Gambaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	%	NA	NA	NA	NA	1,85
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	93,10	93,10	93,10	84,21	96,30
3	Persentase sarana dan prasarana olahraga kabupaten dalam kondisi baik*	%	NA	NA	NA	55	69,62
4	Cakupan pelatih olahraga yang bersertifikat	%	100	96,43	96,43	72,79	75
5	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	%	80,61	100	100	97,34	96,49
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.176, capaian kinerja program pada urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan berbagai pencapaian penting.

1) Persentase Pemuda yang Memperoleh Pendidikan Kewirausahaan

Indikator ini merupakan indikator baru dalam pengukuran kinerja urusan kepemudaan di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2025, data mengenai persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan tercatat sebesar 1,85%. Kehadiran indikator ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam mendorong pemuda untuk memiliki keterampilan berwirausaha. Untuk ke depan, diperlukan langkah-langkah

konkret seperti penyelenggaraan pelatihan, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha, serta sistem monitoring yang jelas agar perkembangan pendidikan kewirausahaan bagi pemuda dapat terukur dengan baik.

2) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami tren penurunan dari 93,10% pada tahun 2021 menjadi 84,21% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan organisasi kepemudaan. Pada tahun 2021–2023, capaian indikator ini tidak mengalami kenaikan yaitu sebesar 93,10% yang disebabkan jumlah organisasi pemuda dan organisasi yang aktif yang tidak bertambah, salah satu faktornya adalah kurangnya pelibatan organisasi pemuda dan perlunya peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. Sedangkan pada tahun 2025 terjadi kenaikan menjadi 96,30%.

3) Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pada tahun 2025, data menunjukkan bahwa 69,62% sarana dan prasarana olahraga berada dalam kondisi baik. Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur olahraga yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap prestasi olahraga daerah serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Oleh karena itu, masih terdapat banyak fasilitas yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Diperlukan perencanaan yang berkelanjutan untuk mewujudkan sarana prasarana olahraga dengan kondisi baik

4) Cakupan Pelatih Olahraga yang Bersertifikat

Cakupan pelatih olahraga yang bersertifikat mengalami dinamika yang cukup signifikan selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, cakupan mencapai 100%, mencerminkan seluruh pelatih olahraga yang terdata telah memiliki sertifikasi yang masih berlaku. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan, hingga mencapai 75% pada tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh berakhirnya masa berlaku banyak sertifikat pelatih dan telah dilakukan pembaruan data, yang memberikan gambaran lebih akurat mengenai kondisi aktual. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pembinaan dan perpanjangan sertifikasi yang berkelanjutan agar kompetensi pelatih tetap terjaga dan sesuai standar.

5) Persentase Gugus Depan Pramuka yang Aktif

Keaktifan Gugus Depan Pramuka di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan signifikan dari 80,61% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 97,34% dan 96,49% pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas Gugus Depan Pramuka tetap aktif. Keberlanjutan aktivitas Pramuka ini menunjukkan bahwa program pembinaan kepramukaan berjalan dengan baik dan memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter generasi muda di Temanggung.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah, karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Gambaran indikator kinerja urusan statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 186
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)*	Angka	NA	NA	NA	39,32	73,60
2	Ketersediaan data statistik sektoral	%	NA	NA	NA	100	82,16
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data indikator kinerja urusan statistik Kabupaten Temanggung untuk tahun 2025, terdapat dua indikator yang menggambarkan capaian dalam urusan statistik. Indikator pertama adalah Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI), yang pada tahun 2025 dengan capaian angka 73,60. Ini menunjukkan langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data yang digunakan oleh pemerintah. Indikator kedua adalah ketersediaan data statistik sektoral, yang pada tahun 2025 mencapai 82,16%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar data statistik sektoral yang diperlukan sudah tersedia, memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di berbagai sektor pembangunan daerah. Kedua indikator ini menggambarkan bahwa Temanggung telah

mulai membangun fondasi yang baik dalam tata kelola data, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam kualitas dan integrasi data ke depannya.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Dalam menyelenggarakan tata kelola keamanan informasi, untuk mendapatkan gambaran kondisi kesiapan dan kematangan keamanan informasi dilakukan melalui evaluasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dengan tujuan mengetahui kekurangan manajemen keamanan sistem informasi di pemerintahan dan merumuskan rekomendasi perbaikannya. Hal ini terbukti dengan telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang menjadi pedoman untuk tata kelola keamanan informasi di pemerintah daerah. Adapun hasil Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 187
Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah*	%	NA	NA	NA	87,67	91,33
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, 2025

Indikator penilaian sistem elektronik dilihat dari karakteristik instansi seperti nilai investadi, total anggaran operasional tahunan, kepatuhan terhadap standar/peraturan tertentu, teknik kriptografi, jumlah pengguna, data pribadi yang dikelola, tingkat kekritisn data terhadap ancaman upaya penyerangan/penerobosan keamanan informasi dalam sistem elektronik dan lain sebagainya. Sedangkan untuk nilai akhir Indeks KAMI mendapatkan nilai 548, di mana untuk kategori sistem elektronik dengan kategori Tinggi maka termasuk ke dalam klasifikasi Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar. Kategori sistem elektronik dengan kategori Tinggi, untuk penilaian Indeks KAMI terdapat empat kategori antara lain Tidak Layak, Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar, Cukup Baik, dan Baik. Untuk mencapai kategori Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung minimal mendapatkan skor akhir Indeks KAMI sebanyak 548 poin. Persentase nilai indek KAMI tahun 2025 sebesar 91,33%.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pada tahun 2025, Kabupaten Temanggung mencatat 1 Warisan Budaya Tak Benda, 40 kelompok kesenian, dan 18 objek Cagar Budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pendokumentasian kekayaan budaya daerah. Data ini menunjukkan langkah awal yang positif dalam pengelolaan aset budaya, baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible*. Namun, nihilnya data pelaku budaya mengindikasikan adanya celah dalam pendataan sumber daya manusia yang berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan. Untuk mendukung pelestarian budaya secara berkelanjutan, penting bagi pemerintah daerah tidak hanya memetakan objek dan kelompok, tetapi juga mengidentifikasi dan mengapresiasi peran pelaku budaya sebagai penjaga tradisi dan penggerak seni lokal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi : tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Di Kabupaten Temanggung, 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) ini tidak sekadar menjadi catatan sejarah, melainkan menjadi bagian dalam perjalanan perkembangan Kabupaten Temanggung dan telah mengakar kuat di tengah dinamika masyarakat lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau. Kekayaan OPK di Kabupaten Temanggung tercermin secara nyata melalui berbagai ekspresi budaya yang khas. Pada aspek ritus dan adat istiadat, Temanggung memiliki tradisi tahunan seperti Grebeg Makukuhan, Nyadran Desa, hingga ritual atau prosesi Wiwitan seperti Wiwit Mbako serta Festival Petik Merah (panen kopi) sebagai wujud syukur masyarakat agraris. Di bidang seni, wilayah ini menjadi episentrum kesenian rakyat yang sangat hidup, seperti tari Jaran Kepang (Kuda Lumping) dengan berbagai varian klasiknya, Topeng Ireng, Wayang Kedu Temanggungan, Kesenian Bangilun dan sebagainya. Sementara itu, pengetahuan tradisional masyarakat Temanggung terwujud pada kearifan lokal dalam pranata mangsa pertanian, tata kelola mata air (umbul), serta keahlian pengolahan komoditas unggulan daerah seperti tembakau lintingan tradisional dan kopi.

Urusan Kebudayaan memegang peranan penting dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokal di Kabupaten Temanggung. Melalui berbagai program pelestarian dan pengembangan seni budaya,

pemerintah daerah berupaya menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Tabel 2. 188
Gambaran Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	28,98	31,71	41,99	9,09	15,15
2	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	2,64	6,61	7,05	7,49	46,99

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel, persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 28,98% pada tahun 2021 menjadi 41,99% pada tahun 2023. Capaian ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberadaan dan keberlanjutan warisan budaya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, sebagai bagian penting dari identitas dan sejarah daerah. Pada tahun 2025 tercatat 30 cagar budaya dan 3 WBTB yang dilestarikan dari total 198 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya. Dalam penetapan WBTB diharuskan menyesuaikan dengan program kementerian, hal ini menjadi salah satu tantangan pada pelestarian WBTB.

Sejalan dengan hal tersebut, persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan dari 6,61% pada tahun 2021 menjadi 46,99% pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya partisipasi kelompok kesenian lokal dalam menghidupkan aktivitas budaya di masyarakat.

Adapun gambaran kinerja urusan bidang kebudayaan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025 disajikan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 189
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Kabupaten
Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	Obyek	NA	NA	NA	1	1
2	Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	Kelompok				10	10
3	Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	Orang				0	0
4	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	2.400	14.160	19.477	26.944	29.677

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
5	Jumlah Cagar Budaya	Obyek					27

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025

1) Jumlah Warisan Budaya Tak Benda

Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) dapat berupa tradisi lisan dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, kemahiran kerajinan tradisional. Dalam meningkatkan Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dengan melakukan pemetaan OPK di Kabupaten Temanggung. Kemudian setelah dilakukan pemetaan dilakukan kajian untuk mengetahui potensi WBTb dan kemudian akan dipilih untuk diajukan ke pusat untuk dinilai dan ditetapkan oleh Tim Ahli WBTb. Tahun 2025 terdapat 1 Warisan Budaya Takbenda yaitu Kesenian Bangilun. Salah satu tantangan dalam pencapaian indikator ini adalah perlunya menyesuaikan dengan program kementerian dalam penetapan WBTb.

2) Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata

Kelompok kesenian yang terdata adalah komunitas seni yang telah terdaftar secara administratif di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Terdapat dua jenis register kebudayaan yaitu untuk kelompok baru dan kelompok yang melakukan perpanjangan. Dalam meningkatkan Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata dilakukan kebijakan bahwa jika kelompok kesenian melakukan registrasi kelompoknya maka akan mendapat dukungan dari pemerintah dan kesempatan untuk menerima hibah dan difasilitasi untuk tampil dalam acara di Kabupaten Temanggung. Jumlah Kelompok Kesenian yang Terdata Tahun 2025 adalah sebanyak 10 kelompok. Banyaknya potensi kelompok seni di wilayah kabupaten Temanggung menjadi salah satu faktor pendukung capaian ini. Akan tetapi belum semua kelompok seni memiliki kesadaran untuk mencatatkan kelompoknya. Oleh karenanya, perlu upaya promosi kepada kelompok seni untuk mendorong mereka agar membuat register kebudayaan.

3) Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata

Pelaku budaya adalah seniman individu yang menciptakan atau menampilkan karya seni secara pribadi, bukan mewakili kelompok atau institusi. Dalam mendata Jumlah Pelaku Budaya yang terdata dilakukan pendataan kepada pelaku budaya di Kabupaten Temanggung, kemudian

dari data tersebut dipilih pelaku budaya yang banyak berkontribusi dalam melestarikan budaya tradisional di Kabupaten Temanggung. Pendataan Pelaku Budaya baru akan dimulai pada tahun 2026, sehingga di tahun 2025 data pelaku budaya masih 0.

4) Jumlah pengunjung tempat bersejarah

Tempat bersejarah adalah lokasi, situs, bangunan, atau kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi karena pernah menjadi saksi peristiwa penting di masa lalu, tempat ditemukannya benda purbakala, atau mewakili kebudayaan suatu bangsa. Tempat-tempat ini dilestarikan oleh hukum dan sering kali memiliki status resmi sebagai situs sejarah nasional atau warisan budaya dunia, berfungsi sebagai sumber berharga untuk mempelajari peradaban manusia dan dapat menjadi objek wisata. Pengunjung tempat bersejarah adalah individu atau kelompok orang yang datang ke suatu situs atau bangunan dengan nilai sejarah untuk mempelajari, merasakan, dan menghormati warisan budaya serta sejarah di masa lalu. Tujuan utama mereka beragam, mulai dari meningkatkan wawasan, melestarikan warisan budaya, membangun kebanggaan lokal, hingga mencari pengalaman belajar yang berbeda dan unik. Pertumbuhan jumlah kunjungan tempat bersejarah pada Tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 29.677 pengunjung. Tantangan dalam peningkatan jumlah wisata tempat bersejarah adalah karena faktor 3A (Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas) kurang memadai. Atraksi adalah suatu hal yang menarik perhatian, dapat berupa pertunjukan, tontonan, atau daya tarik suatu objek/kegiatan yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai sehingga mampu menarik dan memberikan kepuasan bagi pengunjung, terutama wisatawan. Aksesibilitas adalah kemampuan atau kemudahan bagi setiap orang, terutama penyandang disabilitas, untuk mengakses, menggunakan, dan berpartisipasi dalam suatu sistem, produk, layanan, lingkungan, atau informasi tanpa hambatan. Konsep ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan, baik fisik maupun digital, sehingga tercipta kesamaan kesempatan dan inklusif bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Amenitas adalah fasilitas atau layanan yang disediakan di suatu destinasi atau properti untuk menambah kenyamanan, kemudahan, dan kenikmatan bagi para pengunjung atau wisatawan, seperti hotel, restoran, toko, pusat kebugaran, bahkan produk-produk kecil yang bisa dibawa pulang seperti sabun dan sampo di kamar hotel.

5) Jumlah Cagar Budaya

Cagar Budaya (CB) menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1 tentang Cagar Budaya Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Tahun 2025 terdapat 27 cagar budaya yang sudah di patenkan. Hal ini tidak lepas dari potensi Kabupaten Temanggung yg kaya akan potensi Objek Diduga Cagar Budaya maupun Cagar Budaya. Namun, tidak seluruh Objek Diduga Cagar Budaya maupun Cagar Budaya dikuasai pemerintah. Oleh karenanya Dinbudpar berupaya menjalin kerjasama dengan pengelola/ pemilik CB dan ODCB untuk perlindungan pengembangan dan pemanfaatannya.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan di Kabupaten Temanggung merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan literasi dan membangun budaya baca masyarakat, yang tercermin melalui beberapa indikator kinerja. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mengukur sejauh mana infrastruktur, akses, dan aktivitas literasi telah dikembangkan untuk mendorong kemampuan literasi warga. Sementara itu, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) mencerminkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat, yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat pembelajar. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan juga menjadi indikator krusial yang menunjukkan sejauh mana fasilitas perpustakaan digunakan secara optimal oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Ketiga indikator ini saling mendukung dalam menggambarkan efektivitas pengelolaan urusan perpustakaan serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Temanggung.

1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Temanggung adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Temanggung. Pembangunan literasi masyarakat yang diukur dalam IPLM terdiri dari 7 unsur, yaitu:

1. Pemerataan layanan perpustakaan

2. Ketercukupan koleksi

3. Ketercukupan tenaga perpustakaan

4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari

5. Jumlah perpustakaan ber-SNP

6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi

7. Anggota perpustakaan

Capaian nilai IPLM Kabupaten Temanggung 2021-2025 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 190
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	NA	60,23	55,70	60,48	24,03

Sumber: Dinpusip Kabupaten Temanggung, 2025

IPLM Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori “sedang” disebabkan karena ke 7 unsur dalam penghitungan IPLM rata-rata telah memenuhi standar, terutama unsur jumlah perpustakaan ber-SNP dan unsur anggota perpustakaan. Kedua unsur tersebut merupakan faktor pendorong pembangunan literasi masyarakat Kab. Temanggung.

2) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)

Tingkat Kegemaran Membaca adalah sebuah survei yang dilakukan perpustakaan (Perpusnas RI) untuk mengetahui tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. TGM diukur berdasarkan beberapa dimensi antara lain: Frekuensi Membaca (FM), Durasi Membaca (DM), Jumlah Buku Dibaca (JB), Frekuensi Akses Internet (FAI), serta Durasi Akses Internet (DAI). Adapun Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel.

Tabel 2. 191
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	NA	NA	51,82	69,04	57,62

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025

Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Temanggung “sedang”, hal ini disebabkan karena nilai dari kelima dimensi yang diukur rata-rata bernilai sedang. Nilai tertinggi ada pada dimensi Frekuensi akses internet.

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat setiap harinya mengakses internet untuk kebutuhan informasi dan komunikasi. Pada urutan kedua adalah Frekuensi membaca. Rata-rata masyarakat membaca dalam per minggu yaitu 5-6 kali. Membaca yang dimaksud disini tidak hanya membaca di perpustakaan tetapi juga membaca melalui media lain seperti internet dan di tempat lain seperti rumah, sekolah ataupun toko buku. Rata-rata jumlah bahan bacaan yang dibaca per tiga bulan yaitu 5-6 bahan bacaan. Hal-hal yang tersebut di atas adalah faktor pendorong nilai TGM. Adapun faktor penghambat nilai TGM di Kabupaten Temanggung adalah durasi akses internet dan durasi membaca. Durasi Akses Internet untuk membaca/ mencari informasi serta durasi membaca hanya 1 jam s/d 1 jam 59 menit. Ini artinya masyarakat Kabupaten Temanggung lebih banyak menggunakan internet untuk kepentingan lain selain membaca/mencari informasi. Dari kelima dimensi TGM, Durasi Membaca memperoleh nilai terendah. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengedepankan aktivitasnya untuk membaca buku dan belum menyadari akan pentingnya membaca buku.

3) Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan

Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan adalah seberapa sering perpustakaan digunakan oleh masyarakat. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (*onsite* dan *online*) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Adapun tingkat pemanfaatan perpustakaan Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 192
Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 - 2025

No	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penduduk	Jiwa	NA	NA	811.798	817.483	821.118
2	Jumlah pengunjung per hari	Jiwa	NA	NA	3.685	3.107	1.980
3	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	NA	NA	0,0045	0,0038	0,1206

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025

Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Temanggung merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2023 dengan capaian awal sebesar 0,0045%, namun mengalami penurunan menjadi

0,0038% pada tahun 2024 dan meningkat pada tahun 2025 sebesar 0,1206%. Capaian ini masih tergolong sangat rendah. Rendahnya tingkat pemanfaatan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat, antara lain keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas perpustakaan, kurangnya koleksi buku yang relevan dan menarik, belum meratanya layanan perpustakaan di seluruh wilayah, minimnya kegiatan sosialisasi dan promosi literasi di masyarakat, kurangnya tenaga perpustakaan yang kompeten, serta tantangan dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang mengalihkan minat masyarakat dari perpustakaan konvensional.

Adapun gambaran kinerja perpustakaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025 disajikan sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 193
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase pengunjung di perpustakaan*	%	NA	NA	NA	0,29	50,24
2	Persentase perpustakaan yang aktif	%	39,46	97,68	56,68	55,18	55,15
3	Persentase penelusuran naskah kuno	%	0,039	99,12	100	100	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel, capaian kinerja program pada urusan bidang perpustakaan Kabupaten Temanggung selama periode 2021 – 2025 menunjukkan berbagai pencapaian penting.

1) Persentase Pengunjung di Perpustakaan

Persentase pengunjung perpustakaan merupakan indikator baru yang mulai tercatat pada tahun 2024. Capaian tahun 2025 meningkat pesat dari 0,29 menjadi 50,24, menandakan bahwa tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan meningkat. Pada tahun 2025 sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional RI, penghitungan data pokok perpustakaan disesuaikan dengan amanat UU Otonomi Daerah, yaitu hanya menjaring data dari perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu ada perubahan jenis dan jumlah perpustakaan yang menjadi sasaran penghitungan data pokok perpustakaan. Penghitungan data pokok perpustakaan untuk tingkat kabupaten hanya dilakukan untuk jenis perpustakaan umum yang meliputi Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan dan TBM. Selain itu juga Perpustakaan Sekolah yang meliputi Perpustakaan SD

dan SMP. Perubahan indikator dan rumus penghitungan jumlah pengunjung perpustakaan menjadi faktor perubahan hasil penghitungan.

2) Persentase Perpustakaan yang Aktif

Persentase perpustakaan yang aktif di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi signifikan sepanjang 2021–2025. Pada tahun 2021, persentase masih rendah di angka sekitar 39%, namun melonjak tajam pada 2022 mencapai 97,68%. Angka ini kembali menurun pada 2023-2025 menjadi sekitar 55,15%. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan aktivitas perpustakaan. Konsistensi program pembinaan dan penguatan kapasitas pengelola perpustakaan perlu menjadi perhatian utama. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dilakukan upaya berupa sosialisasi Sistem Informasi Pendataan Perpustakaan (Si-Petak) Pemerintah Kabupaten Temanggung, pembinaan perpustakaan bagi pengelola perpustakaan, kegiatan untuk meningkatkan minat baca, mengadakan kerja sama tukar pinjam koleksi antar perpustakaan, serta melibatkan peran masyarakat di perpustakaan.

3) Persentase Penelusuran Naskah Kuno

Persentase penelusuran naskah kuno di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang sangat pesat sejak pertama kali tercatat pada tahun 2021 sebesar 0,039%. Pada tahun 2022, angka ini melonjak drastis menjadi 99,12% dan mencapai 100% pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya tertulis. Ke depan, pengelolaan hasil penelusuran ini perlu dioptimalkan melalui digitalisasi dan publikasi agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat. Tahun 2025 jumlah kegiatan penelusuran naskah kuno yang direncanakan adalah 20 kegiatan realisasinya sebanyak 32 kegiatan.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan kearsipan di Kabupaten Temanggung merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Kearsipan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan dokumen, tetapi juga menjadi sumber informasi yang strategis dalam pengambilan keputusan. Untuk mengukur kualitas pengelolaan arsip, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Manajemen Kearsipan. Indeks ini mencerminkan tingkat kematangan,

ketertiban, dan efektivitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah.

1) Indeks Manajemen Kearsipan

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja urusan kearsipan diukur melalui penghitungan Indeks manajemen kearsipan yang diperoleh dari hasil audit kearsipan eksternal yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kabupaten Temanggung dan audit kearsipan internal yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Temanggung. Gambaran capaian Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 194
Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	54,02	62,47	70,93	73,54	70,71

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025

Indeks Manajemen Kearsipan Kabupaten Temanggung dalam periode 2021–2024 mengalami kenaikan namun pada tahun 2025 mengalami penurunan. Indeks naik menjadi 62,47 pada 2022, 70,93 pada 2023, dan mencapai 73,54 pada 2024. Pada Tahun 2025, indeks kembali turun menjadi 70,71. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam tata kelola kearsipan, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung.

2) Nilai Pengawasan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Kabupaten

Sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor 6 tahun 2019 Pasal 14 bahwa Pengawasan Kearsipan Internal menjadi tanggung jawab Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, kementerian, badan, lembaga, TNI/POLRI, komisi, BUMN/BUMD, Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan Perguruan Tinggi Negeri pada tiap wilayah kewenangannya. Dengan demikian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Temanggung memiliki tanggung jawab pengawasan kearsipan pada seluruh obyek pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan masih terbatasnya sumber daya yang ada maka Pengawasan Kearsipan Internal baru dilaksanakan pada 25 Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 195
Hasil Audit Internal Kearsipan Tahun 2025

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI AKHIR	KATEGORI
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	77,37	BB (SANGAT BAIK)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74,80	BB (SANGAT BAIK)
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	71,28	BB (SANGAT BAIK)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70,36	BB (SANGAT BAIK)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	66,94	BB (SANGAT BAIK)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66,15	BB (SANGAT BAIK)
7	Sekretariat Daerah	64,91	B (BAIK)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62,61	B (BAIK)
9	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	62,24	B (BAIK)
10	Inspektorat	62,00	B (BAIK)
11	Dinas Perhubungan	60,84	B (BAIK)
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	58,96	B (BAIK)
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	58,54	B (BAIK)
14	Dinas Kesehatan	58,43	B (BAIK)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	56,10	CC (CUKUP)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55,56	CC (CUKUP)
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54,96	CC (CUKUP)
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	49,42	CC (CUKUP)
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	46,27	CC (CUKUP)
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	45,12	C (KURANG)
21	Dinas Sosial	43,65	C (KURANG)
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	42,14	C (KURANG)
23	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung	41,03	C (KURANG)
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35,18	C (KURANG)
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33,66	C (KURANG)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan surat Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Tengah Nomor B/000.5.15.2/469/2025 tanggal 2 September 2025 bahwa nilai pengawasan kearsipan internal yang menjadi kewenangan kabupaten Tahun 2025 adalah sebesar 67,87 dari target sebesar 59,58. Dari realisasi tersebut, maka capaian indikator nilai pengawasan kearsipan internal yang menjadi kewenangan kabupaten pada tahun 2025 telah mencapai 100%.

Secara keseluruhan gambaran capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025 disajikan pada Tabel 2.186 berikut ini.

Tabel 2. 196
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Bidang Kearsipan di Kabupaten
Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	NA	NA	NA	55	60,57
2	Persentase Pembinaan Kearsipan*	%	NA	NA	NA	66,67	73,33
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.196 capaian kinerja program pada urusan bidang kearsipan Kabupaten Temanggung selama periode 2021 – 2025 menunjukkan berbagai pencapaian penting.

1) Persentase Arsip yang Dialihmediakan

Persentase arsip yang dialihmediakan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 tercatat sebesar 60,57% naik dari tahun sebelumnya sebesar 55%. Data ini baru tersedia di 2 tahun terakhir karena indikator ini merupakan bagian dari pengukuran kinerja baru. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh arsip telah dipindahkan ke media lain, seperti digitalisasi, untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan akses. Upaya alih media ini penting dalam menghadapi tantangan era digital dan memperpanjang umur arsip. Ke depan, perlu ditingkatkan kapasitas teknologi dan pelatihan SDM agar proses alih media berjalan lebih optimal dan menyeluruh.

2) Persentase Pembinaan Kearsipan

Persentase pembinaan kearsipan merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah daerah melakukan upaya pembinaan terhadap pengelolaan arsip di perangkat daerah. Indikator ini mencerminkan komitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan arsip yang baik dan sesuai standar. Indikator ini berfungsi sebagai landasan untuk evaluasi awal serta perbaikan berkelanjutan dalam sistem kearsipan, yang merupakan bagian penting dari unsur penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan terdokumentasi. Pada tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah (OPD dan kecamatan) dengan capaian 73,33.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan perikanan merupakan sektor penting yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Sektor ini mencakup kegiatan penangkapan, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Selain sebagai sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat, perikanan juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis perikanan. Oleh karena itu, pengelolaan urusan perikanan yang baik, berbasis potensi lokal dan didukung dengan kebijakan yang tepat, menjadi kunci dalam mewujudkan sektor perikanan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1) Indeks Ekonomi Biru

Selain pengembangan ekonomi hijau yang menjadi fokus pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, aspek ekonomi biru juga memiliki peran meskipun dalam skala yang lebih terbatas, terutama melalui pemanfaatan sumber daya perairan darat dan kegiatan perikanan budidaya. Ekonomi biru merupakan konsep pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem perairan. Namun demikian, Kabupaten Temanggung merupakan wilayah yang tidak memiliki garis pantai maupun berbatasan langsung dengan laut, sehingga potensi pengembangan ekonomi berbasis kelautan relatif terbatas. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan sektor perairan di Kabupaten Temanggung terutama berasal dari sub sektor perikanan darat, yang kontribusinya terhadap perekonomian daerah dapat dilihat melalui peranannya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hingga saat ini memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan, dengan angka kontribusi sebesar 23,01% di tahun 2025, namun dilihat kontribusi masing-masing sub sektor tersebut, kontribusi sub-perikanan di Kabupaten Temanggung hanya berkisar 3%.

Tabel 2. 197
Identifikasi Data Komposit Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Pilar	Sub Sektor	Nama Indikator (Satuan)	Data Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Ekonomi	Perikanan tangkap dan budidaya	Peran Sektor Perikanan dalam PDB (Persen)	0,803	0,770	0,789	0,810	n.a	Data BPS
		Volume Produksi Akuakultur (ton)	13.419,78	13.873,97	13.873,06	13.852,32	n.a	
Sosial	Ketenagakerjaan	Jumlah Nelayan dan Petani Ikan (orang)	14.736	14.736	13.333	10.190	n.a	
		Jumlah Perempuan di Sektor Perikanan** (orang)	149	149	135	103	n.a	estimasi 0,01 dari total pelaku usaha
		Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap (RTP)	991	991	991	912	n.a	
	Kesehatan	Rata-Rata Konsumsi Ikan per Kapita (kg/kapita/th)	23,42	24,34	24,34	24,39	n.a	TKI - dasar rumus IKPD
			23,38	21,22	21,78	21,88	n.a	AKI -- dasar Susenas
	Pendidikan	Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan (orang)	27	47	14	30	n.a	estimasi lulusan SMK HKTI
		Jumlah Peserta Pelatihan Perikanan (orang)	n.a	n.a	n.a	586	n.a	yang tercatat hanya tahun 2023

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Meskipun karakteristik wilayah Kabupaten Temanggung lebih didominasi oleh sektor pertanian yang mendukung implementasi ekonomi hijau, potensi ekonomi biru tetap menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan daerah, khususnya melalui pengelolaan sumber daya perairan darat dan sub sektor perikanan yang berwawasan lingkungan.

2) Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan merefleksikan kualitas pola makan masyarakat, karena ikan kaya protein, asam lemak esensial, dan mikronutrien penting yang berperan dalam pertumbuhan dan pencegahan stunting. Adapun Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada Gambar 2.59.



Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 59
Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

Dari tabel diatas dapat di lihat capaian angka konsumsi ikan Tahun 2025 sebesar 22,27 kg/kap/thn. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan Angka Konsumsi Ikan adalah Data Susenas BPS.

Konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya ekonomi tapi juga budaya, ketersediaan, pendidikan, gaya hidup dan sebagainya. Dengan memperhatikan beragam faktor tersebut dapat memperjelas alasan tingkat konsumsi pangan termasuk konsumsi ikan di suatu daerah dapat berbeda secara signifikan. Perhitungan AKI dengan menggunakan data Susenas adalah tepat karena diperoleh angka konsumsi ikan secara nyata, namun data Susenas masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga untuk mendapatkan angka yang akurat mendekati kebenaran, masih diperlukan angka koreksi. Angka koreksi yang digunakan adalah angka koreksi untuk konsumsi di luar rumah tangga (B) dan konsumsi tidak tercatat (C). Pada saat ini penetapan besarnya angka koreksi dilakukan dengan *expert adjustment* (pendapat pakar) yang berkompeten.

Berdasarkan hasil pemantauan data konsumsi perikanan, Angka Konsumsi Ikan pada tahun 2024 tercatat sebesar 22,25 kg/kapita/tahun. Untuk tahun 2025 menunjukkan angka 22,27 kg/kapita/tahun. Sebagaimana Surat dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 22 Juli 2025 bahwa terdapat perubahan istilah Angka Konsumsi Ikan (AKI)

dan menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) dan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan besaran target sebesar 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029. Perolehan angka tersebut dihitung berdasarkan pendekatan konsumsi ikan di rumah tangga berdasarkan serapan ikan tertimbang setara utuh segar. Pada tahun 2025 diketahui capaian KIM Kab Temanggung adalah sebesar 11,98 kg/kap/tahun dan mengalami peningkatan pada tahun 2026 menjadi sebesar 12,46 kg/kap/tahun.

Upaya peningkatan nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) di masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Safari Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) yang bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang bergizi, murah, dan mudah diperoleh. Kegiatan Safari Gemar Makan Ikan dilaksanakan Desa Kalirejo, Kecamatan Kledung (100 paket), Desa Nglondong, Kec. Parakan sebanyak 500 paket. Bantuan diberikan secara simbolis kepada penerima manfaat yang telah ditentukan, dengan harapan dapat mendorong kebiasaan keluarga untuk lebih sering mengonsumsi ikan dalam menu sehari-hari, terutama bagi kelompok rentan gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Gambaran indikator kinerja program urusan perikanan di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam berbagai sektor perikanan sebagaimana disajikan pada tabel.

Tabel 2. 198
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Perikanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	510,60	430,47	161,83	140,12	140,18
2	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	12,09	11,68	10,66	10,67	10,671
3	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan*	%	NA	NA	NA	NA	28,57
4	Jumlah produksi pengolahan ikan	ton	393,20	389,67	385,31	395,75	395,77
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel 2.198, capaian kinerja program pada urusan bidang perikanan Kabupaten Temanggung selama periode 2021 – 2025 menunjukkan berbagai pencapaian penting.

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Sektor perikanan tangkap pada Tahun 2025 mencapai 140,18 ton dengan target akhir tahun 2025 140,15 ton. Faktor pendorong tercapainya indikator ini diantaranya :

- a. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan aktif mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat;
- b. Banyak kampanye kesehatan menekankan pentingnya mengonsumsi ikan demi mendapatkan asupan gizi yang seimbang;
- c. Ikan dianggap sebagai sumber protein yang baik dan memiliki manfaat kesehatan, seperti mencegah penyakit jantung dan stroke;
- d. Kegiatan restocking ikan di perairan terbuka untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Sektor perikanan budidaya juga menunjukkan tren penurunan meskipun lebih stabil dibandingkan dengan sektor perikanan tangkap. Pada Tahun 2025 ini mencapai 10,671 ton dengan target akhir di tahun 2025 adalah 10,67 ton.

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian tersebut adalah :

- e. Sumber daya perairan dan keanekaragaman hayati yang mendukung budidaya ikan;
- f. Permintaan pasar tinggi: Konsumsi ikan masyarakat terus meningkat;
- g. Teknologi budidaya: Inovasi seperti bioflok, RAS (*Recirculating Aquaculture System*), dan pakan buatan berkualitas;
- h. Dukungan pemerintah: Program bantuan berupa paket budidaya bioflok, bantuan benih, paket budidaya ikan, dan akses kredit usaha rakyat (KUR) untuk pembudidaya;
- i. Tenaga kerja: Banyak masyarakat pedesaan yang bisa terlibat dalam usaha budidaya ikan

3. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan

Pada Tahun 2025, capaian Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan tercatat sebesar 28,57%. Adapun faktor pendorongnya yaitu adanya pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan untuk

mendaftarkan diri melalui OSS guna memperoleh NIB sebagai salah satu dokumen persyaratan usaha.

4. Jumlah Produksi Pengolahan Ikan

Jumlah produksi pengolahan ikan adalah total jumlah produksi hasil pengolahan ikan dalam 1 tahun. Tahun 2025 capaian Jumlah produksi pengolahan ikan sebesar 395,752 ton dengan target tahun 2025 sebesar 395,752 ton. Faktor penghambat pencapaian pada jumlah produksi pengolahan ikan ini adalah:

- a. Ketersediaan bahan baku: Produksi perikanan budidaya dan tangkap tinggi, sehingga pasokan ikan melimpah;
- b. Permintaan pasar tinggi: Konsumsi ikan masyarakat terus meningkat, ditambah peluang produk olahan (*fillet, nugget, abon, ikan asap*);
- c. Teknologi pengolahan: Sudah tersedia teknologi pengolahan modern (*freezer, cold storage, mesin pengasapan, vacuum packaging*);
- d. Dukungan pemerintah: Program industrialisasi perikanan, bantuan alat pengolahan, dan sertifikasi mutu (Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), HACCP, SNI);
- e. Tenaga kerja: Banyak masyarakat yang bisa dilibatkan dalam usaha pengolahan

Beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu penguatan SDM dan kelembagaan, peningkatan teknologi dan infrastruktur, dukungan finansial dan kebijakan, serta pengembangan pasar seperti pemasaran digital melalui *e-commerce* dan media sosial, kemitraan dengan industri besar dan restoran, dan sertifikasi mutu (HACCP, SNI, halal) untuk meningkatkan daya saing di pasar ekspor.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan pemerintahan di bidang pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan desa wisata, serta penguatan subsektor ekonomi kreatif. Kabupaten Temanggung menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi pariwisata, yang tercermin dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik, bertambahnya jumlah desa wisata aktif, serta tingginya persentase subsektor ekonomi kreatif yang berkembang. Sinergi antara potensi alam, budaya, dan kreativitas lokal menjadi fondasi utama dalam

membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

1) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dapat diartikan sebagai persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB suatu daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi ekonomi dari sektor ini terhadap total perekonomian regional pada periode tertentu.

Untuk mengetahui berapa besar Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Temanggung, maka mulai tahun 2025 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum digunakan sebagai Indikator Kinerja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung data diperoleh dari BPS. Data yang diambil dari BPS yaitu data dari sektor makan minum (Kuliner) dan data Akomodasi (transportasi, penginapan dll). Nilai PDRB tahun 2025 adalah 1,85 berdasarkan data tahun 2024 yang dirilis oleh BPS, karena data dari BPS di rilis setiap awal tahun. Adapun rasio penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 199
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

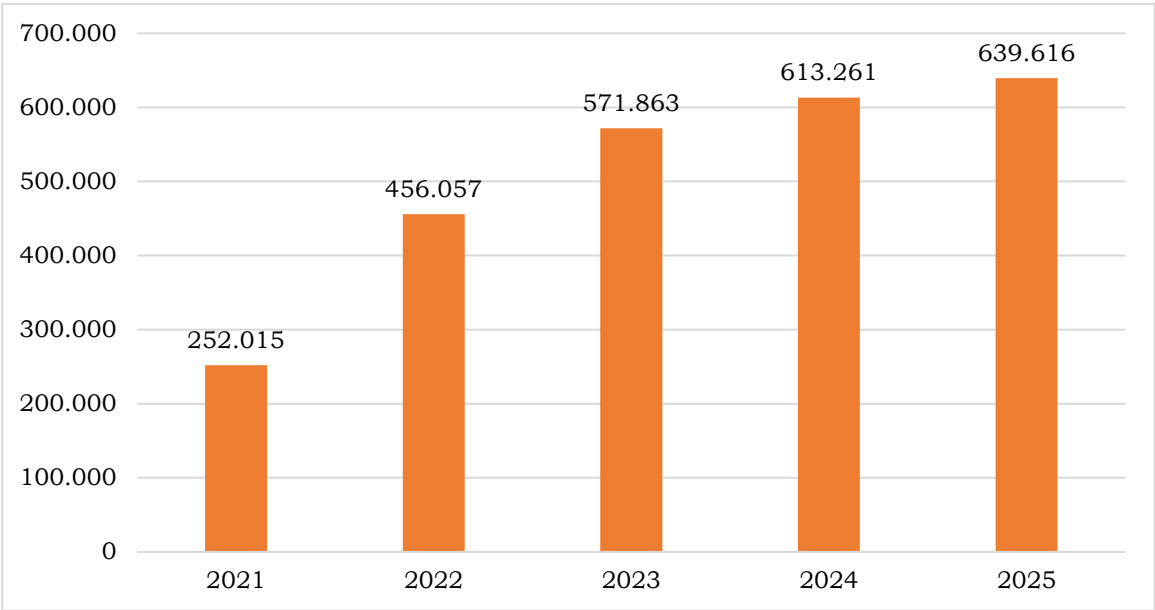
Tahun	Nilai PDRB ADHB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (rupiah)	Total PDRB ADHB (rupiah)	%
2021	356.761.990.000	22.627.791.480.000	1,58
2022	417.899.990.000	24.726.442.720.000	1,69
2023	475.634.990.000	26.912.324.210.000	1,77
2024	534.530.000.000	28.928.200.000.000	1,85
2025	597.460.000.000	31.204.370.000.000	1,91

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum masih menggunakan angka tahun 2024 karena pada tahun 2025 belum keluar, dan baru akan keluar pada awal tahun 2026. Faktor pendorong indikator ini adalah penambahan jumlah data pendapatan pelaku usaha pariwisata, faktor penghambatnya adalah menurunnya pendapatann pelaku usaha pariwisata yang melaporkan data pendapatan, dan upaya yang dilakukan untuk menangani hambatannya adalah diberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang melaporkan.

2) Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)

Pertumbuhan jumlah wisatawan merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan daerah. Kunjungan wisatawan nusantara juga memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi tumbuhnya perekonomian daerah melalui PAD sektor pariwisata. Akan tetapi PAD bukan satu-satunya ukuran perkembangan kepariwisataan, karena Pemerintah Kabupaten Temanggung melauai Kepala Daerah terpilih juga berharap melalui kepariwisataan yang terkelola dengan baik juga memiliki kontribusi besar sebagai penyelamatan perekonomian daerah terutama masyarakat di sekitar destinasi wisata. Adapun jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada Gambar.



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 2. 60
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik) di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2025 mengalami peningkatan jumlah wisatawan dari tahun sebelumnya yaitu dari 613.261 menjadi 639.616. Faktor pendorong dari indiaktor ini adalah Wisata Temanggung mempunyai keindahan alam yang berbeda, faktor penghambatnya adalah 3A (Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas) kurang memadai, dan upaya yang dilakukan oleh Dinbudpar adalah Melakukan perbaikan dan penambahan 3A (Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas). Atraksi adalah suatu hal yang menarik perhatian, dapat berupa pertunjukan, tontonan, atau daya tarik suatu objek/kegiatan yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai sehingga mampu menarik dan memberikan kepuasan bagi pengunjung, terutama wisatawan. Aksesibilitas adalah

kemampuan atau kemudahan bagi setiap orang, terutama penyandang disabilitas, untuk mengakses, menggunakan, dan berpartisipasi dalam suatu sistem, produk, layanan, lingkungan, atau informasi tanpa hambatan. Konsep ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan, baik fisik maupun digital, sehingga tercipta kesamaan kesempatan dan inklusi bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Amenitas adalah fasilitas atau layanan yang disediakan di suatu destinasi atau properti untuk menambah kenyamanan, kemudahan, dan kenikmatan bagi para pengunjung atau wisatawan, seperti hotel, restoran, toko, pusat kebugaran, bahkan produk-produk kecil yang bisa dibawa pulang seperti sabun dan sampo di kamar hotel.

3) Jumlah Desa Wisata Aktif

Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebh pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai ketrampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi yang ada di desa.

Perkembangan keberadaan Desa wisata di Kabupaten Temanggung saat ini sangat menarik perhatian desa-desa yang merasa mempunyai potensi untuk dikembangkan baik dari kondisi alam, Atraksi/Budaya dan Kratifitas masyarakat dan Kearifan Lokal yang ada di Kabupaten Temanggung yang bisa diangkat sebagai salah satu pendorong ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata. Adapun jumlah desa wisata di Kabupaten temanggung, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 200
Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa Wisata	21	23	31	31	31
2	Jumlah Desa dan Kelurahan	289	266	266	266	266
3	% Desa Wisata	7,27	8,65	11,65	11,65	11,65

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Dari variabel diatas dapat dilihat bahwa persentase desa wisata Tahun 2025 masih sama seperti tahun 2024. Faktor pendorong dari indiaktor ini adalah Melakukan monitoring desa wisata dan mengadakan pertemuan Forum Komunikasi Desa Wisata, faktor penghambatnya adalah Tidak semua pengelola Desa Wisata hadir dalam kegiatan FK Desa Wisata, dan upaya yang dilakukan oleh Dinbudpar adalah Berkomunikasi dengan baik dengan pengelola Desa Wisata.

4) Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi yang orientasinya adalah keuntungan. Sedangkan definisi *industri kreatif* menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007 adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Adapun jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 201
Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	n.a	n.a	n.a	n.a	16
2	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif	n.a	n.a	n.a	n.a	17
3	% Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	n.a	n.a	n.a	n.a	94,11

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 16 sub sektor ekonomi kreatif berkembang di Kabupaten Temanggung dari 17 jenis sub sektor ekonomi kreatif sehingga persentase sub sektor ekonomi berkembang di kabupaten Temanggung sebesar 94,11%. Berikut data sub sektor ekonomi kreatif berkembang di Temanggung. Faktor pendorong dari indikator ini adalah Pelaksanaan pendataan pelaku sub sektor ekraf secara insentif, faktor penghambatnya adalah keterbatasan SDM pendata, dan upaya yang dilakukan oleh Dinbudpar adalah mengoptimalkan SDM yang ada.

Urusan pemerintahan di bidang pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan dan penguatan ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Promosi destinasi wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, jumlah pengunjung tempat bersejarah, serta fasilitasi terhadap destinasi menjadi bagian penting dalam mendorong daya tarik daerah. Selain itu, pendataan SDM usaha pariwisata, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf), dan pencatatan pelaku ekraf juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ini secara berkelanjutan. Indikator-indikator tersebut memberikan gambaran

menyeluruh terhadap dinamika dan strategi pengembangan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas. Adapun capaian kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 202
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	DTW	NA	NA	NA	17	20
2	Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	orang	NA	NA	NA	0	598
3	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	NA	NA	NA	100	100
4	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	orang	0	56	50	80	180
5	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	orang	NA	NA	NA	0	1
6	Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	orang	NA	NA	NA	130	135

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Temanggung periode 2021 – 2025, terlihat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah melakukan promosi pada seluruh Destinasi Tujuan Wisata (DTW) di Kabupaten Temanggung dan melakukan fasilitasi pada 20 DTW. Ini menunjukkan salah satunya dari jumlah pengunjung tempat bersejarah mengalami tren peningkatan yang signifikan sampai dengan tahun 2024.

Di sisi lain, jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan fluktuasi yang lebih kecil. Pada tahun 2021 tidak ada wisatawan mancanegara sama sekali, yang disebabkan oleh pandemi dan perbatasan perjalanan internasional. Namun, sejak tahun 2022, jumlah wisatawan mancanegara mulai meningkat, dengan 56 wisatawan pada tahun 2022 dan 50 wisatawan pada tahun 2023. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan 80 wisatawan dan 180 wisatawan mancanegara tercatat berkunjung di tahun 2025. Lonjakan ini menunjukkan adanya potensi besar dalam menarik wisatawan internasional.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan dalam perekonomian daerah Kabupaten Temanggung. Peran strategis ini tercermin dalam Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian yang menunjukkan besarnya sumbangan sektor ini terhadap total perekonomian daerah.

Dalam upaya mendukung pencapaian target ekonomi hijau, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut antara lain pengembangan infrastruktur hijau melalui pembangunan dan pemeliharaan taman kota, jalur hijau, serta ruang terbuka hijau yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan. Di bidang pengelolaan sampah, pemerintah terus mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi pemilahan sampah sejak dari sumber dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah kampanye penggunaan wadah besek berbahan bambu pada perayaan Hari Raya Idul Adha sebagai alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, sektor pertanian juga diarahkan menuju praktik yang lebih berkelanjutan melalui pengembangan pertanian ramah lingkungan, termasuk pertanian organik. Keberhasilan penerapan pertanian organik di Kabupaten Temanggung telah ditunjukkan oleh petani kopi organik yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas dan produktivitas yang kompetitif dibandingkan dengan sistem budidaya nonorganik. Berbagai upaya tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

1) Rasio PDRB Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Kabupaten Temanggung, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Adapun rasio PDRB Pertanian Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 203
Rasio PDRB Pertanian Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

Tahun	Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian (rupiah)	Total PDRB ADHB (rupiah)	%
2021	5.411.356.120.000	22.627.791.480.000	23,91
2022	5.791.776.360.000	24.726.442.720.000	23,42
2023	6.174.016.360.000	26.912.324.210.000	22,94
2024	6.498.190.000.000	28.923.600.000.000	22,47
2025	7.178.700.000.000	31.204.370.000.000	23,01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Capaian indikator Rasio PDRB Sektor Pertanian Tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2024. Faktor pendorong indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yaitu Penerapan GAP dan GHP

untuk meningkat kan produksi, mekanisasi pertanian, KUR sektor pertanian, meningkatnya konsumsi sektor pertanian (pertambahan jumlah penduduk), investasi disektor pertanian. Adapun faktor penghambat belum optimalnya produksi pertanian, berkurangnya tenaga kerja sektor pertanian, rendahnya nilai tukar petani, akses permodalan sektor pertanian, pertambahan jumlah penduduk. Adapun upaya pencapaian target melalui peningkatan produksi melalui penerapan GAP, GHP dan mekanisasi pertanian, mempermudah akses permodalan melalui KUR, mempermudah perijinan untuk menarik investor.

Berikut gambaran kinerja urusan pertanian Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 204
Gambaran Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Produktivitas Padi	ton/ha	5,9	6,315	6,346	6,149	6,09
2	Produktivitas jagung	ton/ha	4,5	4,61	4,6	5,76	5,05
3	Produktivitas bawang putih	ton/ha	6,51	6,92	7,14	7,30	7,163
4	Produktivitas bawang merah	ton/ha	7,14	8,1	7,67	7,65	8,14
5	Produktivitas cabai rawit	ton/ha	6,99	7,64	7,55	7,50	7,38
6	Produktivitas cabai keriting	ton/ha	NA	7,90	7,70	7,65	7,56
7	Produktivitas tembakau	ton/ha	0,688	0,668	0,656	0,670	0,671
8	Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0,715	0,693	0,653	0,744	0,730
9	Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0,61	0,65	0,58	0,55	0,560
10	Jumlah produksi daging ternak besar	kg	775.372	741.741	876.941	804.609	1.160.527
11	Jumlah produksi daging ternak kecil	kg	235.170	260.442	251.790	267.057	417.341
12	Jumlah produksi ternak unggas	kg	6.581.217	6.556.114	6.578.999	6.330.720	6.537.554
13	Jumlah produksi telur	kg	7.706.663	7.810.151	8.329.778	8.728.620	8.888.810
14	Persentase kelahiran pedet	%	NA	NA	NA	48,3	64,15
15	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	15,89	21,24	30,22	35,06	28,86
16	Persentase prasarana yang digunakan	%	100	100	100	100	100
17	Persentase penanganan penyakit hewan	%	96,68	100	97,26	97,43	99,44
18	Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	82,96	100	82,1	82,41	79,75
19	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	41,2	41,45	40,62	99,23	94,32
20	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi*	%	NA	NA	NA	NA	61,88
21	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	0,81	1,03	0,98	1,40	1,40
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Urusan pemerintahan di bidang pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan penguatan perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten

Temanggung yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani agar sektor pertanian tetap menjadi pilar utama perekonomian lokal.

1) Produktivitas Padi

Produktivitas padi di Kabupaten Temanggung merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Selama periode 2021 – 2025, tren produktivitas padi menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik alamiah maupun teknis. Adapun produktivitas padi di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 205
Produktivitas Padi di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas panen	ha	20.553,80	16.784,3	18.038,8	14.802	16.516
2	Produksi	ton	121.262,700	105.992,7	114.471,7	91.022,2	100.582
3	Produktivitas Padi	Ton/ha	5,9	6,315	6,346	6,149	6,09

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 untuk produktivitas padi sebesar 6,09 ton/ha, dibandingkan dengan tahun 2024 capaian kinerja tahun 2025 mengalami penurunan. Ini dipengaruhi oleh :

- a. Perubahan iklim dan ketidakpastian cuaca, yang mempengaruhi pola tanam serta risiko kekeringan atau banjir;
- b. Keterbatasan ketersediaan pupuk bersubsidi atau distribusi yang belum sepenuhnya tepat waktu;
- c. Keterbatasan ketersediaan pupuk bersubsidi atau distribusi yang belum sepenuhnya tepat waktu;
- d. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang berpotensi mengurangi luas lahan produksi tanaman pangan;
- e. Keterbatasan regenerasi petani dan adopsi teknologi, dimana sebagian petani masih menggunakan metode budidaya konvensional

2) Produktivitas Jagung

Produktivitas jagung di Kabupaten Temanggung menjadi indikator penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian petani lokal. Selama periode 2021 – 2025, produktivitas jagung mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, ketersediaan sarana

produksi, serta praktik budidaya yang diterapkan petani. Adapun produktivitas jagung di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 206
Produktivitas Jagung di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas panen	ha	8.580,3	5.714,7	8.395,50	6.264	7.746,4
2	Produksi	ton	38.611,35	26.344,6	38.619,5	36.057,4	39.119,3
3	Produktivitas Jagung	Ton/ha	4,500	4,61	4,6	5,76	5.05

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 untuk produktivitas jagung sebesar 5.05 ton/ha, dibandingkan dengan tahun 2024 capaian kinerja tahun 2025 mengalami penurunan. Penurunan produktivitas tidak jauh dari pengaruh cuaca ekstrem, peningkatan serangan hama penyakit, peralihan komoditas yang dibudidayakan, penggunaan benih yang kurang berkualitas, GAP yang tidak sesuai standart seperti penanaman yang tidak tepat waktu, pemupukan yang tidak seimbang, dan pengendalian hama yang tidak efektif, dapat menurunkan produksi. Kerusakan pasca panen dapat menurunkan kualitas dan kuantitas produksi.

3) Produktivitas Bawang Putih

Bawang putih merupakan salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung. Produktivitas bawang putih di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Secara lebih lengkap, data produktivitas bawang putih di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 207
Produktivitas Bawang Putih di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas panen	ha	1.591	1.169,5	1469,5	1.319	963
2	Produksi	ton	10.355,3	8.088,4	10493,3	9.631,2	6.898
3	Produktivitas Bawang Putih	Ton/ha	6.51	6,916	7,141	7,302	7,163

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2025 produktivitas bawang putih 7,163 ton/ha dengan target akhir tahun 2025 yaitu 6,05 ton/ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini telah mencapai capaian 100%, adapun faktor pendorongnya adalah pemilihan varietas unggul, pengelolaan tanah yang baik, pemupukan yang seimbang, pengairan yang

efektif, pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan metode yang efektif, penggunaan teknologi budidaya yang modern, pengelolaan pasca panen yang baik, dan dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi, pelatihan, dan infrastruktur dapat meningkatkan produksi bawang putih.

4) Produktivitas Bawang Merah

Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung. Produktivitas bawang merah di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Secara lebih lengkap, data produktivitas bawang merah di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 208
Produktivitas Bawang Merah di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas panen	ha	1.555	2.304	2.335,5	2.779,5	2.816,5
2	Produksi	ton	11.102,1	18.662,4	17.901,8	21.263,18	22.932,7
3	Produktivitas Bawang Merah	Ton/ha	7.14	8,1	7,67	7,65	8,14

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Produktivitas bawang merah menunjukkan tren peningkatan dari 7,14 ton/ha di tahun 2021 menjadi 8,1 ton/ha pada 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 7,65 ton/ha di tahun 2024. Kenaikan luas panen secara signifikan, dari 1.555 ha di 2021 menjadi 2.779,5 ha di 2024. Dan pada Tahun 2025 ini telah mencapai 8,14 ton/ha dengan target akhir 6,8 ton/ha di tahun 2025, hal ini berarti capaian saat ini telah mencapai 100%.

5) Produktivitas Cabai Rawit

Cabai rawit merupakan salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung. Produktivitas cabai rawit di Kabupaten Temanggung cenderung stabil selama lima tahun terakhir. Secara lebih lengkap, data produktivitas cabai rawit di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 209
Produktivitas Cabai Rawit di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas panen	ha	2.977,50	5.045,5	6.900	7.583,5	10.093
2	Produksi	ton	20.802.930	38.525,415	52095,0	56.876,2	74.486,3
3	Produktivitas Cabai Rawit	Ton/ha	6,987	7,636	7,55	7,5	7,38

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Produktivitas cabai rawit mengalami peningkatan yang cukup stabil dalam lima tahun terakhir. Dari 6,987 ton/ha di 2021, meningkat menjadi

7,5 ton/ha pada tahun 2024. Dan mencapai 7,38 ton/ha di Tahun 2025. Harga cabai rawit yang cenderung tinggi dalam jangka waktu lama menjadi daya tarik utama. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan kawasan champion cabai juga turut mendorong produktivitas dan minat petani terhadap tanaman ini.

6) Produktivitas Cabai Keriting

Cabai keriting merupakan salah satu komoditas hortikultura di Kabupaten Temanggung. Produktivitas cabai keriting di Kabupaten Temanggung cenderung stabil selama lima tahun terakhir. Secara lebih lengkap, data produktivitas cabai keriting di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 210
Produktivitas Cabai Keriting di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas panen	ha	NA	2.895,5	3.580	3.768,5	4.690,2
2	Produksi	ton	NA	22.861,42	27.555,12	28.828,36	35.458
3	Produktivitas Cabai Rawit	Ton/ha	NA	76,49	76,96	78,95	7,56

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Produktivitas cabai keriting di Kabupaten Temanggung mulai tercatat sejak tahun 2022 dengan capaian sebesar 76,49 ton per hektar, kemudian mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun 2024 dan Tahun 2025 menjadi 78,95 ton/ha dan 7,56 ton/ha. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan budidaya cabai keriting di Temanggung semakin intensif dan produktif, yang kemungkinan didorong oleh dukungan harga yang kompetitif, tersedianya sarana produksi, serta peningkatan keterampilan budidaya petani.

7) Produktivitas Tembakau

Tembakau merupakan komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Temanggung yang secara historis telah menjadi bagian dari budaya dan mata pencaharian masyarakat. Dalam lima tahun terakhir (2021 – 2025), produktivitas tembakau menunjukkan kestabilan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti fluktuasi iklim dan harga pasar. Adapun data produktivitas tembakau di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 211
Produktivitas Tembakau di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas panen	ha	18.293,08	15.801	14.764	14.088	13.133, 5
2	Produksi	ton	12.585,639	10.562,6	9.685,73	9.438,96	8.824,2
3	Produktivitas Tembakau	Ton/ha	0,688	0,668	0,656	0.67	0.6719

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Data capaian kinerja produktivitas tembakau di Kabupaten Temanggung selama periode 2021 hingga Tahun 2025, produktivitas tembakau di menunjukkan fluktuasi yang cenderung stabil di kisaran 0,688 hingga 0,69 ton per hektar. Meskipun luas panen mengalami penurunan signifikan dari 18.293,08 ha pada tahun 2021 menjadi 13.133,5 ha di 2025, produktivitas tetap mampu dipertahankan pada angka sekitar 0,6719 ton/ha. Produktivitas tembakau dapat terhambat oleh kondisi iklim yang tidak stabil, kerusakan lingkungan, serta serangan hama dan penyakit. Keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern, pasar, dan sumber daya manusia terampil turut memperlambat peningkatan produksi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung serta tingginya biaya produksi dapat mengurangi insentif dan kemampuan petani dalam meningkatkan produktivitas tembakau.

8) Produktivitas Kopi Robusta

Kopi robusta menjadi salah satu komoditas strategis di sektor perkebunan Temanggung dengan potensi ekonomi yang cukup besar. Sepanjang tahun 2021 hingga 2025, produktivitas kopi robusta mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap peremajaan tanaman dan dukungan budidaya dari pemerintah. Adapun data produktivitas kopi robusta di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 212
Produktivitas Kopi Robusta di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas panen	ha	11.724,46	12.977,37	12.972,2	11.193,972	11.193,90
2	Produksi	ton	83.841,6	8.994,321	8.476,9	8.329,436	8.171,54
3	Produktivitas Kopi Robusta	Ton/ha	0,715	0,693	0,653	0,744	0,730

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Capaian pada Tahun 2025 ini yaitu 0,730 ton/ha dengan target akhir 0,702 ton/ha, yang berarti capaian telah mencapai 100%. Adapun faktor

pendorong indikator komoditas perkebunan diantaranya kondisi geografis dan iklim mendukung untuk pertumbuhan kopi robusta.

9) Produktivitas Kopi Arabika

Kopi arabika memiliki potensi pengembangan di wilayah-wilayah dataran tinggi Temanggung, terutama di lereng Gunung Sumbing dan Prau. Namun, dalam rentang waktu 2021–2025, produktivitas kopi arabika justru mengalami tren penurunan akibat rendahnya kerapatan tanaman dan pola tanam tumpang sari yang belum optimal. Adapun data produktivitas kopi arabika di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 213
Produktivitas Kopi Arabika di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas panen	ha	1.564,36	1.699,95	1.724,95	1.177,33	1.177
2	Produksi	ton	955,24	1.002,97	992,434	649,288	659,28
3	Produktivitas Kopi Arabika	Ton/ha	0,611	0,65	0,575	0,551	0,56

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Produktivitas kopi arabika cenderung menurun meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2022 tetapi kembali menurun di tahun 2023 sampai 2024. Pada Tahun 2025 ini telah mencapai 0,56 ton/ha dengan target akhir di 2025 0,4 ton/ha. Hal tersebut dapat diartikan bahwa capaian pada triwulan ini telah mencapai 100%. Upaya peningkatan produktivitas kopi arabika dilakukan melalui penggunaan varietas unggul, pengelolaan lahan dan irigasi yang baik, serta pengendalian hama dan penyakit. Penerapan teknologi pertanian modern, penggunaan pupuk organik, dan pemangkasan yang tepat membantu meningkatkan pertumbuhan dan kualitas hasil. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan, pengeringan serta pengolahan pascapanen yang baik, dan kerja sama antar petani turut memperkuat efisiensi produksi.

10) Jumlah Produksi Daging Ternak Besar

Jumlah Produksi Daging Ternak Besar merupakan total hasil produksi daging yang dihasilkan dari ternak besar seperti sapi, kerbau dalam suatu periode tertentu dalam satuan kilogram (kg) dan menggambarkan jumlah daging yang dihasilkan dari pemotongan ternak besar di suatu wilayah yang dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 214
Jumlah Produksi Daging Ternak Besar Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi Daging Ternak Besar	775.372	741.741	876.941	804.609	1.160.527,20

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Target produksi daging ternak besar tahun 2025 sebesar 806.130 kg, dengan realisasi Tahun 2025 sebanyak: 1.160.527,20 kg. Hal ini menunjukkan capaian 100% bahkan melampaui target, yang mengindikasikan peningkatan produktivitas dan keberhasilan program pengembangan peternakan. Pencapaian ini menggambarkan perbaikan kinerja produksi yang baik, didukung oleh faktor pendorong antara lain penggunaan bibit sapi potong unggul yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas, didukung manajemen pakan bergizi yang mempercepat pertumbuhan ternak. Selain itu, pengendalian penyakit dan perawatan kesehatan hewan yang baik berperan penting dalam menekan angka kematian. Ketersediaan infrastruktur peternakan yang memadai juga meningkatkan efisiensi usaha peternakan. Akses pasar yang stabil turut mendorong motivasi peternak untuk meningkatkan produksi, ditambah pelatihan dan edukasi mengenai manajemen modern yang memperkuat kapasitas peternak.

11) Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil

Jumlah produksi daging ternak kecil merupakan indikator yang menggambarkan total hasil produksi daging yang berasal dari ternak kecil, seperti kambing, domba, dan kelinci, dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai kapasitas produksi, ketersediaan daging ternak kecil, serta kontribusinya terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat maupun sektor peternakan daerah. Adapun jumlah produksi daging ternak kecil di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 215
Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil	235.170	260.442	251.790	267.057	417.341,82

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Target jumlah produksi daging ternak kecil tahun 2025 ditetapkan sebesar 409. kg, sementara realisasi hingga mencapai 417.341,82 kg, sehingga capaian telah melampaui target dengan persentase lebih dari

100%. Hal ini menunjukkan bahwa produksi daging ternak kecil mengalami peningkatan signifikan. Faktor pendorong produksi daging ternak kecil meliputi penggunaan bibit unggul yang meningkatkan kualitas dan produktivitas, manajemen pakan bergizi yang menunjang pertumbuhan ternak, serta manajemen kesehatan hewan yang baik untuk menekan angka kematian. Infrastruktur peternakan yang memadai turut mendukung efisiensi produksi, pendidikan dan pelatihan mengenai teknologi modern, sementara pasar yang stabil meningkatkan motivasi peternak.

12) Jumlah Produksi Ternak Unggas

Daging unggas menjadi komoditas utama dalam konsumsi protein hewani masyarakat sehari-hari. Meskipun volumenya tinggi, produksi daging unggas di Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan bertahap selama periode 2021 – 2025 sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 216
Jumlah Produksi Daging Ternak Unggas
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi Ternak Unggas	7.047.798,0	6.128.440,1	6.147.188,0	6.218.437,50	6.537.554,12

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Capaian Tahun 2025 yang mencapai 6.537.554,12 kg dari target tahunan 6.230.875 kg. Faktor pendorong tercapainya produksi ternak unggas yaitu Peningkatan produksi ternak unggas didorong oleh pemberian nutrisi yang seimbang, kesehatan ternak yang terjaga melalui vaksinasi dan pengobatan rutin, serta lingkungan kandang yang nyaman dan terkelola baik. Faktor genetik unggul, ketersediaan air dan cahaya yang memadai, serta manajemen pemeliharaan yang baik turut meningkatkan produktivitas. Selain itu, pengawasan intensif terhadap kesehatan dan performa ternak menjadi kunci dalam memastikan produksi tetap optimal dan berkelanjutan.

13) Jumlah Produksi Telur

Jumlah produksi telur merupakan indikator yang menunjukkan total hasil telur yang dihasilkan oleh ternak unggas dalam suatu periode tertentu (fokus pada ayam petelur). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat produktivitas usaha peternakan unggas pada subsektor produksi

telur. Di Kabupaten Temanggung, produksi telur terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 217
Jumlah Produksi Telur Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi Telur	362.907,3	365.623,4	8.215.172	347.500,0	8.888.810,54

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2025

Target produksi telur tahun 2025 ditetapkan sebesar 6.860.985 kg, sementara realisasi hingga Tahun 2025 mencapai 8.888.810,54 kg. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produksi telah mencapai sekitar 100% dari target tahunan. Realisasi ini menggambarkan bahwa kinerja produksi telur sepanjang tahun berjalan sangat baik. Faktor pendorong produksi telur meliputi pemberian nutrisi yang seimbang, kesehatan ternak yang terjaga melalui vaksinasi, serta lingkungan kandang yang nyaman dan terkelola baik. Genetik unggul, ketersediaan air bersih, pencahayaan yang cukup, serta pengawasan kesehatan dan produksi yang rutin turut meningkatkan produktivitas ternak unggas.

14) Persentase Kelahiran Pedet

Persentase kelahiran Pedet merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kegiatan inseminasi buatan. Persentase kelahiran pedet diperoleh dari perhitungan jumlah akseptor IB sebanyak 3.297 ekor dibagi pedet yang lahir sejumlah 2.115 ekor dengan capaian 64,15%. Faktor pendorong pencapaian target kinerja diantaranya Kab temanggung sebagai wilayah yang potensial utk pengembangan ternak sapi mengingat faktor geografis yang mendukung terutama ketersediaan pakannya, obat-obatan dan alat medis yang memadai, animo masyarakat untuk IB tinggi.

15) Persentase Kecukupan Sarana Alat Mesin Pertanian Pangan Utama

Kecukupan alat dan mesin pertanian (alsintan) pangan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Indikator ini menggambarkan ketersediaan dan pemanfaatan alsintan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan budidaya tanaman pangan di tingkat petani. adapun persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 disajikan sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 218
Persentase Kecukupan Sarana Alat Mesin Pertanian Pangan Utama
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kecukupan Sarana Alat Mesin Pertanian Pangan Utama (%)	6,04	21,24	30,22	35,06	28,86

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama cenderung mengalami penurunan karena pada Tahun 2025 ini baru mencapai 28,86% dengan target akhir Tahun 2025 36,1%. Adapun faktor penghambat dalam pencapaian yaitu biaya yang tinggi, keterbatasan akses, kurangnya infrastruktur, kurangnya pengetahuan, ketergantungan pada impor, kurangnya dukungan pemerintah, kerusakan lingkungan, keterbatasan sumber daya.

16) Persentase Prasarana yang Digunakan

Persentase penggunaan prasarana pertanian mencapai 100% secara konsisten selama lima tahun. Ini menunjukkan prasarana yang tersedia sudah dimanfaatkan dengan optimal. Namun, kualitas dan daya guna tetap perlu dievaluasi. Perlu sinergi pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur baru.

17) Persentase Penanganan Penyakit Hewan

Persentase penanganan penyakit hewan merupakan salah satu indikator untuk mengukur fungsi kesehatan hewan. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan dan penanggulangan penyakit hewan, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.

Penyakit hewan merupakan semua penyakit yang dapat menjangkiti hewan. Penyakit hewan meliputi penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Adapun persentase penanganan penyakit hewan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 219
Persentase Penanganan Penyakit Hewan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penanganan Penyakit Hewan (%)	96,68	100	97,26	97,43	99,44

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 99,44%, artinya target akhir 2025 sebesar 87 % tercapai. Faktor pendorong pencapaian target kinerja diantaranya kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memenuhi tuntutan kasus di lapangan, ketersediaan obat -obatan dan peralatan medis, peningkatan kepercayaan masyarakat untuk memeriksakan/melaporkan ke petugas medis.

18) Persentase Pengawasan Produk Hewan dan Bahan Asal Hewan dan Bahan Penunjang yang Memenuhi Syarat

Pengawasan terhadap produk hewan dan bahan asal hewan memiliki peran penting dalam menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari upaya kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dalam mencegah penularan penyakit zoonosis dan food borne disease melalui produk hewan. Adapun persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 220
Persentase Pengawasan Produk Hewan dan Bahan Asal Hewan dan Bahan Penunjang yang Memenuhi Syarat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengawasan Produk Hewan dan Bahan Asal Hewan dan Bahan Penunjang yang Memenuhi Syarat	82,96	100	82,1	82,41	79,75

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pengawasan produk hewan Tahun 2025 sebesar sebesar 100% dengan target akhir tahun 2025 adalah 75% dan presentase produk hewan yang memenuhi syarat sebanyak 79,75%. Penjaminan produk hewan dapat dilakukan melalui pengaturan peredaran produk hewan dengan kegiatan melalui pengawasan, pemeriksaan dan pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi, untuk menjamin keamanan produk hewan sejak dalam proses budidaya hingga peredaran (*safe from farm to tabel*).

Penjaminan higiene dan sanitasi adalah persyaratan dasar sistem jaminan keamanan pangan. Penjaminan higiene dan sanitasi dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan (*food borne disease*)

atau menggunakan produk hewan dengan mengendalikan resiko produk hewan dalam proses produksi tercemar atau terkontaminasi oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik, serta resiko produk hewan yang tidak halal bagi yang dipersyaratkan.

19) Persentase Fasilitasi Pengendalian Bencana Pertanian

Bencana di bidang pertanian dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerusakan dan/atau kehilangan input produksi, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum, munculnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dampak bencana pada petani berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usaha tani, selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan. Adapun persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 221
Persentase Fasilitasi Pengendalian Bencana Pertanian Kabupaten
Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	41,2 (100%)	41,45 (100%)	40,62 (100%)	99,23 (100%)	94,32 (100%)

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

Capaian di Tahun 2025 sudah mencapai 94,32% dengan target akhir di tahun 2025 75%, hal ini berarti pada triwulan ini capaian kinerja indikator tersebut sebesar 100%, dengan luas cakupan pengendalian 705,45 ha dari total luas hamparan lokasi yang terpapar seluas 747,95 hektar (berdasarkan laporan yang masuk). Gerakan pengendalian dilakukan secara swadaya, kerjasama dengan kelompok dan kerjasama dengan laboratorium hama provinsi.

Pengendalian bencana pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pendorongnya antara lain keberadaan sistem peringatan dini yang mampu membantu petani mengantisipasi potensi bencana, serta pemanfaatan teknologi untuk memantau kondisi lahan secara lebih akurat. Pengembangan varietas tanaman tahan bencana, penerapan praktik pertanian yang baik, serta kerja sama antara petani, pemerintah, dan stakeholder turut memperkuat ketahanan sektor pertanian. Dukungan infrastruktur pertanian yang memadai serta

pendidikan dan pelatihan bagi petani juga berperan dalam meningkatkan kemampuan menghadapi bencana.

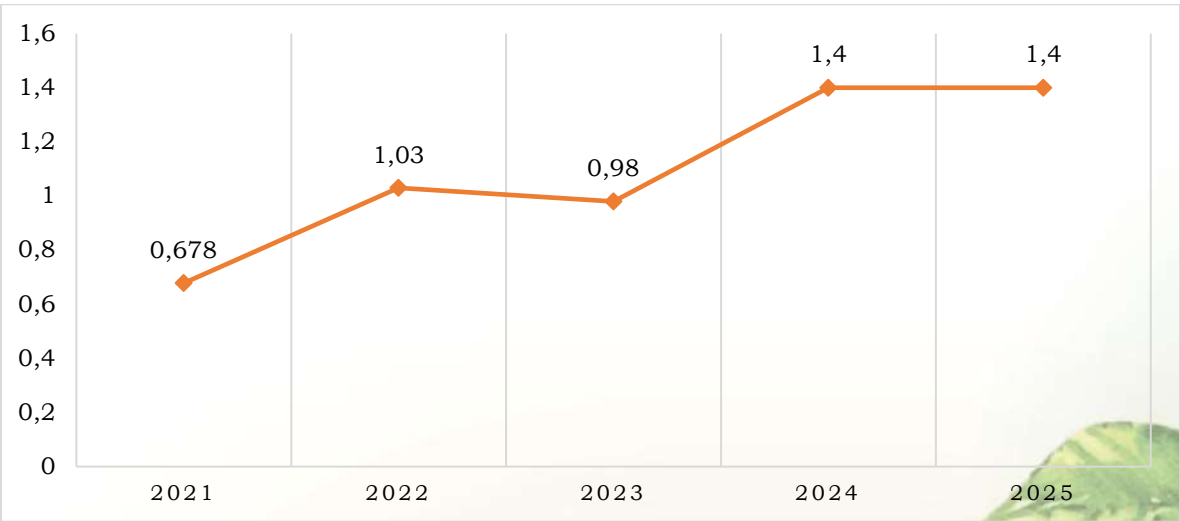
20) Persentase Kelompok Tani Yang Sudah Menggunakan Teknologi

Capaian penggunaan teknologi oleh kelompok tani pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Persentase penggunaan teknologi mencapai 61,88%.

Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat adopsi teknologi pertanian oleh kelompok tani dalam suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi kelompok tani yang telah memanfaatkan berbagai bentuk teknologi seperti alat dan mesin pertanian, sistem irigasi modern, pupuk berimbang, teknologi pascapanen, maupun aplikasi digital pertanian dibandingkan dengan total kelompok tani yang ada.

21) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani

Peningkatan kelas kelompok tani merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembinaan kelembagaan petani di Kabupaten Temanggung. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kelompok tani mampu berkembang dari sisi manajemen, teknis usahatani, dan kemandirian organisasi. Adapun persentase peningkatan kelas kelompok tani Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada Gambar.



Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung, 20266

Gambar 2. 61
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

Tahun 2025 sebanyak 45 kelompok (1,4%) dari total kelompok tani yang terdaftar 3205 (2737 kelompok tani, 468 KWT) yang naik kelas. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kualitas kelompok tani

diantaranya adalah pembinaan penguatan kelembagaan, pembinaan peningkatan kapasitas anggota kelompok, penerapan teknologi dan inovasi, pengelolaan usaha tani berbasis agribisnis, dukungan pemerintah dan akses pasar.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan menyumbang kontribusi terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah Kabupaten Temanggung. Peran penting sektor ini terlihat dari upaya pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kualitas pasar, memperluas akses teknologi perdagangan digital, serta mendukung pengusaha lokal melalui fasilitasi dan promosi produk dalam negeri. Selain itu, sektor perdagangan juga berperan dalam menekan disparitas harga antarwilayah dengan memperlancar distribusi barang dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Di sisi lain, penguatan sektor ini turut mendorong peningkatan nilai ekspor komoditas unggulan daerah, yang tidak hanya memperluas pangsa pasar produk lokal ke luar daerah bahkan mancanegara, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dengan potensi besar untuk terus tumbuh, sektor perdagangan menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong perekonomian Kabupaten Temanggung dan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

1) Rasio PDRB Perdagangan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor perdagangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor perdagangan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor perdagangan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Adapun rasio PDRB perdagangan Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 222
Rasio PDRB Perdagangan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

Tahun	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan (rupiah)	Total PDRB ADHB (rupiah)	%
2021	4.730.062.110.000	22.627.791.480.000	20,90
2022	5.141.962.110.000	24.726.442.720.000	20,80
2023	5.637.462.110.000	26.912.324.210.000	20,95
2024	6.093.620.000.000	28.923.600.000.000	21,07
2025	6.484.170.000.000	31.204.370.000.000	20,78

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan Tabel 2.203, sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, tetap stabil dalam kontribusinya terhadap PDRB. Pada tahun 2024 rasio PDRB dari sektor perdagangan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 21,07 persen. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan sektor perdagangan lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB yaitu 5,98 persen. Stabilitas ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi Temanggung, baik melalui distribusi produk pertanian maupun produk industri. Ini juga mencerminkan pertumbuhan konsumsi domestik yang stabil dan meningkatnya interaksi ekonomi antara Kabupaten Temanggung dengan wilayah sekitarnya. Pada tahun 2025 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 20,78 turun dari tahun sebelumnya.

2) Disparitas Harga

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. Tiga belas komoditas barang pokok antara lain beras medium, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, daging sapi paha belakang, daging ayam ras, telur ayam ras, tepung terigu, kedelai impor, cabe merah keriting, cabe rawit merah, bawang merah, bawang putih kating dan ikan kembung. Disparitas harga di Kabupaten Temanggung mencapai 1,65 persen di tahun 2024 dan 0,3 di Tahun 2025.

Dari data diatas dapat dilihat terjadi penurunan angka dari tahun 2024 ke tahun 2025. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten Temanggung dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah. Berikut rincian data disparitas harga Kabupaten Temanggung tahun 2025 tersaji pada tabel.

Tabel 2. 223
Disparitas Harga Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Komoditas	Harga Rata-rata Provinsi	Harga Rata-rata per Kab./Kota	Gap	Disparitas Harga
1	Beras Medium	13.154	13129	-25,23	-0,19
2	Gula Pasir Curah	17.006	17.104	97,38	0,57
3	Minyakita	16.321	15.678	-642,92	-3,94
4	Daging Sapi Paha Belakang	130.274	135.133	4.858,78	3,73
5	Daging Ayam Ras	35.200	35.139	-60,70	-0,17
6	Telur Ayam Ras	27.521	27.384	-136,41	-0,50
7	Tepung Terigu	11.575	11.892	316,81	2,74
8	Kedelai Impor	10.719	9.503	-1.215,42	-11,34

No	Komoditas	Harga Rata-rata Provinsi	Harga Rata-rata per Kab./Kota	Gap	Disparitas Harga
9	Cabai Merah Keriting	43.062	42.568	-494,61	-1,15
10	Cabai Rawit Merah	49,412	48,486	-926,07	-1,87
11	Bawang Merah	40.319	40.549	229,32	-0,57
12	Bawang Putih Kating	39.502	40.852	1.350,55	3,42
13	Ikan Kembung	34.787	32.844	-1.942,99	-5,59
	Rata-rata	36.065	36.174		0,30

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2026

Gambaran kinerja urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Temanggung selama periode 2021 - 2025 menunjukkan berbagai upaya dan capaian signifikan dalam mendukung perkembangan sektor perdagangan daerah. Adapun gambaran indikator kinerja urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel.

Tabel 2. 224
Gambaran Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	50	66,67	67	67	66.67
2	Presentase pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	NA	NA	NA	1,55	1,92
3	Presentasi pelaku usaha informal yang difasilitasi	%	NA	NA	NA	17	11,31
4	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan barang penting	%	69,32	98,08	100	95,08	100
5	Nilai Ekspor	US\$	1.393.541.923.933,96	1.292.875.363.090,73	2.293.019.642.753,30	132.541.181,60	110.071.498
6	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	79,02	100	95,82	100	88,85

Sumber: Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan data urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 sebagaimana pada tabel diatas, terlihat adanya perkembangan pada beberapa indikator tetapi juga terjadi penurunan. Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik mengalami penurunan pada Tahun 2025 menjadi 66,67% dengan target 67% di akhir tahun 2025. Penggunaan transaksi digital oleh pedagang juga sudah tercatat dengan persentase 1,92%, yang menunjukkan bahwa adopsi digital sudah semakin baik. Hal ini terjadi karena telah adanya pelatihan

transaksi digital bagi pedagang pasar daerah serta dukungan dari perbankan untuk fasilitasi penggunaan aplikasi dan Qris dalam transaksi digital.

Sudah sebanyak 11,31% pelaku usaha informal telah difasilitasi pada Tahun 2025 ini dengan target 6,85% di akhir Tahun 2025, ini mencerminkan upaya positif dalam memperkuat sektor informal. Untuk ketersediaan informasi harga bahan pokok mengalami kenaikan menjadi 100% Tahun 2025. Nilai ekspor pada tahun 2023 mulai naik, dan di tahun 2025 ada tambahan pelaku usaha ekspor baru namun demikian ada beberapa pelaku usaha ekspor yang terdahulu tidak ada aktifitas ekspor sejak tahun 2020 hingga 2025, sehingga capaian baru mencapai \$110.071.498.

Sementara itu, cakupan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang baru mencapai 88,85% pada Tahun 2025 ini salah satunya dikarenakan kurangnya kesadaran para wajib tera untuk menera/tera ulangkan alat UTTP.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Bidang perindustrian merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung. Bidang perindustrian merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung, khususnya melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor industri pengolahan.

1) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.

Tabel 2. 225
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

Tahun	Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan (rupiah)	Total PDRB ADHB (rupiah)	%
2021	6.134.628.680.000	22.627.791.480.000	27,11
2022	6.476.561.690.000	24.726.442.720.000	26,19
2023	6.974.713.090.000	26.912.324.210.000	25,92
2024	7.384.380.000.000	28.923.600.000.000	25,53
2025	7.906.790.000.000	31.204.370.000.000	25,34

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2021 hingga tahun 2025 terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya.

2) Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten

Indikator Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Temanggung menggambarkan tingkat perkembangan jumlah unit usaha industri kecil dan menengah yang aktif di wilayah Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun. Rumus perhitungan indikator ini adalah jumlah IKM pada tahun berjalan (tahun n) dikurangi jumlah IKM tahun sebelumnya (tahun $n-1$) dibagi jumlah IKM pada tahun berjalan (tahun $n-1$). Data Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 226
Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	n.a	n.a	n.a	n.a	0,382

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

Indikator Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten merupakan indikator program baru di tahun 2025 sehingga belum terdapat data series realisasi kinerja dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 persentase pertambahan jumlah IKM di Kabupaten Temanggung mencapai 0,382%, dengan jumlah penambahan sebanyak 76 unit industri kecil dan menengah dari total 17.270 unit IKM. Faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini adalah jenis produk Industri Kecil yang Flutuatif sehingga mempengaruhi perubahan data IKM. Sementara itu, faktor pendorongnya adalah meningkatnya kesadaran IKM untuk menyampaikan usahanya.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah IKM pada tahun 2025 meliputi pembinaan, pendampingan dan monitoring IKM Temanggung.

Perindustrian berperan penting dalam mengolah potensi sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana cita-cita jangka panjang pembangunan industri Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2041 yaitu

mencapai stabilitas ekonomi dan kepastian berusaha, peningkatan pendapatan dan aset industri, serta berdaya saing dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan cita-cita jangka panjang tersebut salah satunya adalah melalui pengembangan sumber daya industri untuk mendukung peningkatan daya saing sektor industri baik di pasar dalam maupun luar negeri. Adapun capaian kinerja bidang perindustrian Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 antara lain sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 227
Gambaran Urusan Perindustrian di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	NA	NA	NA	82,19	78,21
2	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	%	NA	NA	NA	NA	0,21
3	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas*	%	NA	NA	NA	NA	1,80
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, 2026

Kinerja bidang perindustrian digambarkan berdasarkan indikator pada tabel di atas, adapun penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja urusan perindustrian adalah sebagai berikut.

1) Persentase Industri yang Berbasis Pada Komoditas Unggulan Daerah

Persentase Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah pada tahun 2024 sebesar 82,19%. Capaian tahun 2025 sebesar 78,21% berdasarkan jumlah IKM Unggulan Daerah yang Dibina sebesar 4.397 dan jumlah IKM unggulan daerah sebesar 5.622. Faktor penghambat pada capaian indikator ini adalah faktor eksternal atau iklim usaha industri pertembakauan. Sedangkan faktor pendorong indikator ini adalah adanya kesadaran pengusaha untuk melakukan diversifikasi produk. Upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian target adalah fokus dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha industri.

2) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri

Indikator Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri merupakan indikator program baru di tahun 2025 sehingga belum terdapat data series realisasi kinerja dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 target pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri adalah 0,2% dan pada Tahun 2025 ini telah mencapai 0,21%. Jumlah IKM yang dibina dan diawasi sebesar 30 IKM,

sedangkan jumlah IKM yang berizin sebesar 14.210 IKM sehingga persentasenya 0,21%. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah adanya kesadaran pelaku usaha memenuhi komitmen perizinan sektor industri. Faktor penghambat tercapainya indikator ini adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap komitmen perizinan berusaha sektor industri. Adapun upaya pencapaian target kinerja Tahun 2025 adalah melakukan pengawasan dan pendampingan pemenuhan komitmen perizinan sektor industri.

3) Persentase Industri yang Terdaftar dalam SIINas

Indikator Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas merupakan indikator program baru di tahun 2025 sehingga belum terdapat data series realisasi kinerja dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025 jumlah IKM yang terdaftar di SIINas sebanyak 168 IKM, sedangkan jumlah IKM berizin yang belum terdaftar di SIINas sebesar 9.318 IKM sehingga persentasenya 1,80%. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah adanya peningkatan penggunaan fasilitas melalui SIINas. Faktor penghambat tercapainya indikator ini adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajiban kepemilikan akun SIINas. Adapun upaya pencapaian target kinerja Tahun 2025 adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran akun SIINas.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Sekretariat Daerah

Unsur pendukung urusan pemerintahan memegang peranan penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Fungsi Sekretariat Daerah sebagai pusat koordinasi dan administrasi menjadi tulang punggung dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan.

1) Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*). Tujuan dilaksanakannya IKK yaitu untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang dilaksanakan oleh tim pengukuran indeks kualitas kebijakan kabupaten temanggung Tahun 2025 dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor 8/K.1/HKM.02.3/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penilaian IKK yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Hasil dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara tahun 2025 adalah sebesar 75,71. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Temanggung “Baik”, di mana dalam prosesnya masih kurang maksimal dalam melakukan analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan. Faktor pendorong capaian nilai ini adalah adanya dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatnya konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki. Sedangkan faktor penghambatnya adalah prinsip-prinsip tata kelola kebijakan belum dilakukan pada seluruh proses perencanaan maupun penyusunan kebijakan.

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Adapun Nilai AKIP Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 228
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

Tahun	Nilai	Kategori	Interpretasi
2021	63,84	B	Baik
2022	64,73	B	Baik
2023	65,17	B	Baik
2024	66,36	B	Baik
2025	67,37	B	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2026

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa nilai sebesar 67,37 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah adanya tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan sebagian besar Perangkat Daerah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal.

3) Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB

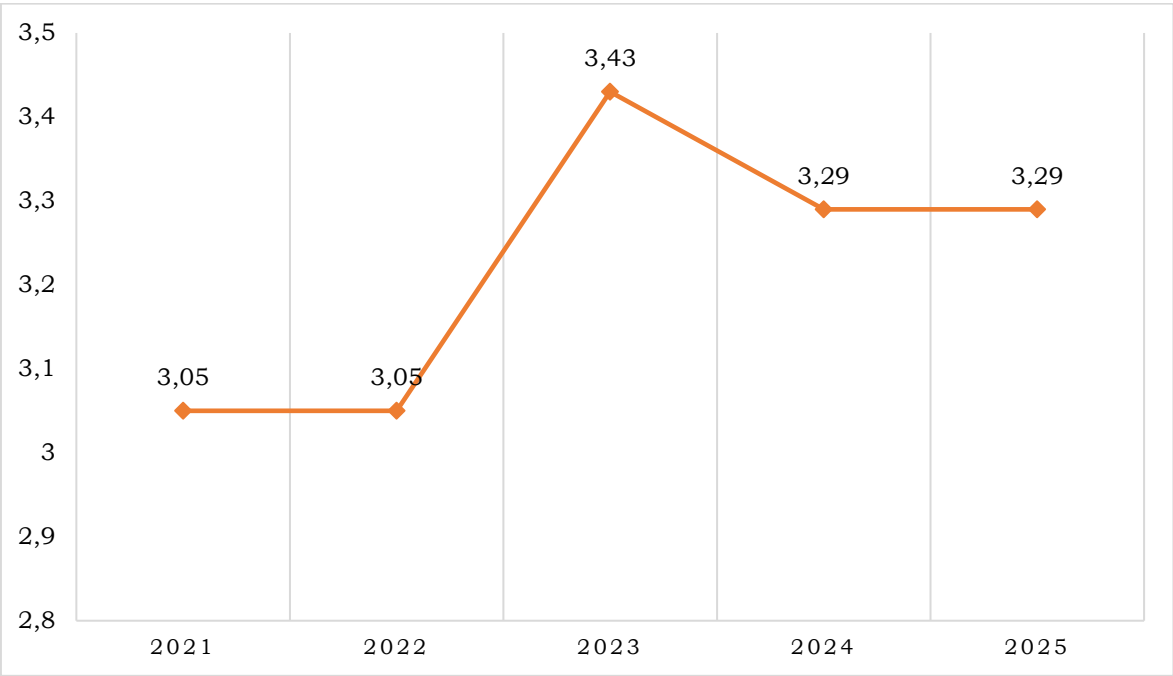
Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB adalah penilaian terhadap beberapa indikator akuntabilitas kinerja dalam suatu Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jika diambil dari nilai evaluasi AKIP tahun 2025, persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB sebesar 84,78%. menunjukkan bahwa sudah sebagian besar perangkat daerah di Kabupaten Temanggung mampu mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang dikategorikan “Sangat Baik”. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas, meskipun secara keseluruhan masih diperlukan upaya penguatan yang lebih merata. Sebagai faktor pendorongnya yaitu laporan kinerja yang secara umum telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan. Namun masih terdapat kendala yaitu pada saat evaluasi dilaksanakan, implementasi SAKIP masih menggunakan Renstra

tahun 2024 – 2026 sehingga tindaklanjut atas hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya belum seluruhnya dapat dilaksanakan.

4) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EPPD merupakan penilaian atas Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Adapun nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada Gambar.



Sumber: Bagian Pemerintahan Setda kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 2. 62
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2024 atas LPPD Tahun 2023 adalah 3,2893 dengan kategori sedang. Dan untuk nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 masih menggunakan nilai EPPD Tahun 2024 dikarenakan nilai EPPD Tahun 2025 belum dilakukan perhitungan penilaian oleh Kemendagri.

5) Indeks Reformasi Hukum

Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan signifikan dari 76,01 pada tahun 2023 menjadi 97,12 di Tahun 2025. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang merupakan hasil dari penilaian Indeks Reformasi

Hukum (IRH), pada tahun 2025 belum terdapat hasil penilaian, dikarenakan penilaian dilakukan setiap tahunnya di akhir tahun oleh Kementerian Hukum.

6) Persentase Rumusan Bahan Naskah Kebijakan yang menjadi Kebijakan Penguatan dan Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual mencapai 100% pada tahun 2024 dan Tahun 2025, menandakan bahwa seluruh program dan kegiatan dalam bidang ini telah sepenuhnya difasilitasi dan dijalankan. Hal ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung penguatan mental dan spiritual masyarakat sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Pencapaian ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan budaya.

7) Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terasilitasi

Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 selalu mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan tidak adanya kendala atau tantangan dalam fasilitasi kebijakan selama tahun tersebut. Dapat dipastikan bahwa dukungan terhadap kebijakan perekonomian dan pembangunan sudah optimal.

8) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan signifikan dari nilai 0 pada awal pengukuran hingga mencapai nilai 84,35% pada Tahun 2025. Hal ini mencerminkan perbaikan yang sangat baik dalam pengelolaan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keberhasilan ini menjadi indikator penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

9) IKM Sekretariat Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran masukan dan sarana prasarana.

Pada tahun 2025, 9 bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, di mana pada tahun-tahun sebelumnya Survei Kepuasan Masyarakat hanya dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.

Faktor pendorong IKM Sekretariat Daerah adalah adanya sistem pelayanan online dan sarana prasarana pendukung layanan sedangkan faktor penghambat adalah penilaian IKM di Sekretariat Daerah selama ini hanya diambil dari nilai IKM Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta belum semua bagian menyampaikan SKM tepat waktu. Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 adalah dengan peningkatan kapasitas SDM pelayanan yang masih perlu serta peningkatan sarana prasarana yang belum memenuhi standar.

10) Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Evaluasi Eksternal RB melibatkan peran Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan / Pejabat dan / atau pegawai kementerian / lembaga /

- pemerintah daerah;
2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
 3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 229

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2025

No	TAHUN	NILAI
1	2022	64,61
2	2023	69,05
3	2024	83,13
4	2025	87,27

Sumber: Bagian Organisasi, 2026

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dari Kementerian PAN dan RB sebagai berikut.

Tabel 2. 230

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Komponen	Nilai
1	RB General	75,51
2	RB Tematik	11,76
Indeks Reformasi Birokrasi		87,27
Kategori		A-

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2026

Hasil evaluasi sebagaimana pada tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar agenda reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada sebagian kecil yaitu pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum dapat dilaksanakan dengan optimal, dan juga apa yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata pada pembangunan. Hal ini ke depan akan menjadi prioritas utama sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat berpengaruh dan memiliki dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja fungsi Sekretariat Daerah digambarkan berdasarkan indikator-indikator dan penjelasan dari masing-masing indikator kinerja fungsi Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 231
Gambaran Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	NA	NA	NA	80	80	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	89,31	90,95	91,55	87,84	87,84	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	Indeks Zakat Nasional*	Angka	NA	NA	NA	NA	0,8	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	%	NA	NA	NA	100	100	Bagian Pemerintahan
5	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Bagian Pemerintahan
6	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	NA	NA	NA	100	100	Bagian Hukum
7	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	82,22	100	100	100	100	Bagian Hukum
8	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100	100	Bagian Hukum
9	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100	100	100	100	Bagian Hukum
10	Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin*	%	NA	NA	NA	NA	100	Bagian Hukum
11	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	NA	NA	NA	93,33	100	Bagian Pembangunan
12	Persentase pelaporan kegiatan PD/unit kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	73,79	Bagian Pembangunan
13	Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	NA	NA	NA	100	75,58	Bagian Pembangunan
14	Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan	%	NA	NA	NA	100	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
15	Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	18,13	96,51	100	86	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
16	Presentase Pendampingan proses PBJ	%	NA	NA	NA	100	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
17	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	75	Bagian Perekonomian
18	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	Bagian Perekonomian
19	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	50	50	83,32	83,33	83,33	Bagian Perekonomian
20	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	Bagian Umum
21	Nilai AKIP Sekretariat Daerah*	Nilai	NA	NA	NA	72,85	75,35	Bagian Umum
22	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan pimpinan daerah	%	100	100	100	100	100	Bagian Umum
23	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan pimpinan daerah	%	100	100	100	100	100	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
24	Indeks Pelayanan Publik (PP)	Nilai	NA	4,41	3,65	4,29	4,04	Bagian Organisasi

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	
25	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen kelembagaan dan analisis jabatan	%	NA	NA	NA	100	100	Bagian Organisasi
Keterangan: *Indikator Baru								

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

Gambaran capaian kinerja program pada urusan pemerintahan fungsi sekretariat daerah Kabupaten Temanggung selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

1) Persentase Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi

Indikator persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat. Pada Tahun 2025, capaian indikator 80%. Faktor pendorong pencapaian adalah dengan sudah terjadwalnya kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan, namun masih terdapat kendala yaitu adanya perubahan kebijakan.

2) Persentase Rumah Ibadah dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kondisi Baik

Persentase rumah ibadah dan sarana prasarana pendidikan keagamaan yang berstatus kondisi baik menunjukkan tren yang relatif stabil dengan capaian sebesar 87,84% pada Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan perhatian yang cukup baik terhadap pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas keagamaan.

3) Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional pada Tahun 2025 masih tercatat 0 dengan target akhir tahun di angka 0,8 karena indikator Indeks Zakat Nasional merupakan indikator program baru di tahun 2025 sehingga belum terdapat data *series* realisasi kinerja dari tahun sebelumnya.

4) Jumlah Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang Dihimpun

Merupakan indikator tematik dari Provinsi Jawa Tengah dengan target Rp11.562.851.960,-. Target dihitung berdasarkan pertumbuhan realisasi tahun 2024 ke 2025. Jumlah penduduk muslim di Jawa Tengah sebanyak 36.992.803 atau 97,27 % dari total populasi. Angka ini

menunjukkan bahwa Jawa Tengah adalah salah satu provinsi dengan basis pembayar zakat (*muzakki*) potensial.

Zakat dan dana sosial lain dapat dimanfaatkan sebagai penambal celah (*buffer*) bantuan yang tidak terjangkau APBD, terutama dalam penanganan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM

Upaya yang dapat dilakukan :

- a Penguatan Regulasi : Sistem *Payroll* Zakat ASN
- b Digitalisasi : Optimalisasi Bank Jateng sebagai kanal utama penghimpunan
- c Koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota masing-masing, untuk sinkronisasi data dan teknis penyaluran

5) Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang Baik

Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik pada Tahun 2025 mencapai 100%. Setiap dokumen yang menjadi kewajiban Bagian Pemerintahan setiap tahun terpenuhi bekerjasama dengan beberapa pihak.

Faktor pendukung tertibnya administrasi tata pemerintahan adalah tertibnya pengumpulan data dari OPD, kelurahan, dan kecamatan sebagai penyedia data. Disamping itu juga adanya monitoring dan evaluasi administrasi secara teratur yang dilakukan.

6) Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti

Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti menunjukkan capaian 100% sejak tahun 2021 hingga saat ini Tahun 2025, menandakan bahwa seluruh kesepakatan kerjasama yang terjalin selalu direspons dengan tindakan nyata. Setiap dinas terkait yang mengajukan kerja sama baik dengan daerah lain, instansi vertikal, dan/atau pihak ketiga langsung ditindaklanjuti sampai selesai dan kemudian langsung diimplementasikan.

Faktor pendukung banyaknya kerjasama antara pemerintah daerah dengan Daerah Lain, Pemerintah Pusat /Instansi Vertikal dan dengan pihak ketiga adalah adanya potensi daerah Kabupaten Temanggung yang mampu menarik minat pihak dari luar Kabupaten.

7) Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi

Persentase produk hukum yang difasilitasi mencapai 100% pada Tahun 2025, hal tersebut merupakan keseluruhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sudah diundangkan maupun yang masih dalam proses penyusunan. Pencapaian ini menggambarkan komitmen yang tinggi

dalam memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

8) Persentase Dokumentasi Perundangan Melalui JDIH

Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH di Kabupaten Temanggung mencapai 100% pada Tahun 2025, yang menunjukkan jumlah produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan belum semuanya terdokumentasi dalam JDIH Kabupaten Temanggung. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pendokumentasian. Sehingga penguatan sumber daya manusia dan peningkatan teknologi informasi perlu diintensifkan agar dokumentasi perundangan dapat terus terjaga dengan baik dan mendukung transparansi hukum.

9) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Secara Non Litigasi

Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi mencapai 100% secara konsisten dari tahun 2021 hingga Tahun 2025, menunjukkan efektivitas pendekatan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong penyelesaian hukum yang cepat, efisien, dan minim konflik melalui mediasi, fasilitasi, atau musyawarah. Pendekatan non litigasi ini turut memperkuat stabilitas sosial dan menjaga harmonisasi hubungan antar pihak di masyarakat.

10) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Secara Litigasi

Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi yang mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut (2021 – 2025) menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menuntaskan permasalahan hukum melalui jalur pengadilan. Capaian ini mencerminkan responsivitas dan kesiapan dalam menangani sengketa hukum secara formal sesuai prosedur yang berlaku. Konsistensi tersebut menjadi indikator positif dalam menjaga kepastian hukum dan kredibilitas institusi pemerintah daerah.

11) Persentase Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada Tahun 2025 telah mencapai 100% karena adanya komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan.

12) Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah

Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan berhasil dilaksanakan sesuai target. Mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program di masing-masing perangkat daerah. Capaian ini juga menjadi indikator positif atas kinerja organisasi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

13) Persentase Pelaporan Kegiatan PD/Unit Kerja Tepat Waktu

Persentase pelaporan kegiatan perangkat daerah/unit kerja yang tepat waktu menunjukkan capaian sempurna sebesar 100% selama periode 2021 – 2024. Konsistensi ini menandakan komitmen tinggi dari seluruh unit kerja dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tertib dan sesuai jadwal. Kedisiplinan ini turut mendukung kelancaran evaluasi kinerja dan perencanaan program yang berbasis data dan waktu. Tetapi pada Tahun 2025 baru mencapai 73,79% dikarenakan ketidaksesuaian data dan menurunnya ketertiban dalam menginput data.

14) Presentase Dokumen Kontrak yang Diverifikasi

Pada Tahun 2025, persentase dokumen kontrak yang diverifikasi mencapai 75,58%, menunjukkan bahwa kontrak telah melalui proses validasi sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan penguatan dalam pengawasan administratif serta kepatuhan terhadap standar pengadaan. Verifikasi penuh ini juga menjadi indikator meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

15) Persentase Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa yang Terumumkan

Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada Tahun 2025 telah mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh nilai anggaran pengadaan telah diumumkan secara terbuka. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Angka ini sangat baik dan menjadi indikasi positif terhadap keterbukaan informasi publik di bidang pengadaan.

16) Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Capaian persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pengadaan barang/jasa pada Tahun 2025 mencapai 100%. Upaya percepatan yang dilaksanakan yaitu dengan membuat surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

17) Presentase Pendampingan Proses PBJ

Pada Tahun 2025, pendampingan terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) telah dilakukan secara menyeluruh dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai regulasi dan prinsip-prinsip transparansi. Pendampingan tersebut juga menjadi upaya strategis untuk meminimalkan risiko kesalahan administrasi serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengadaan di setiap perangkat daerah.

18) Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi

Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi sampai dengan triwulan III tahun 2025 ini sudah mencapai 75%, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan barang bersubsidi sudah mencukupi kebutuhan.

19) Persentase Laporan Permasalahan Barang Bersubsidi yang terselesaikan

Selama lima tahun berturut-turut (2021 – 2025), penyelesaian permasalahan barang bersubsidi selalu mencapai 100%. Capaian ini menandakan respons cepat dan efektivitas sistem penanganan keluhan atau kendala di lapangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi.

20) Persentase BUMD dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) BUMD, sedangkan 1 (satu) BUMD mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Dengan demikian, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 atas presentase BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik telah tercapai 100% dari target yang ditentukan yaitu 83,33%. Adapun faktor pendorongnya yaitu berupa pembinaan dan evaluasi kepada BUMD yang dilaksanakan secara rutin.

21) Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Mulai tahun 2021 hingga 2025, persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah selalu konsisten di angka 100%. Jumlah laporan yang dikirimkan merupakan kegiatan pelaporan yang rutin dilaksanakan sehingga target akan tercapai pada akhir tahun atau pada triwulan IV.

22) Nilai AKIP Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 75,35 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Sangat Baik. Dimana seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.

Faktor pendorong Nilai AKIP Sekretariat Daerah adalah adanya komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 yaitu melaksanakan evaluasi atas isu strategis, tujuan, sasaran, outcome dan output melalui penjenjangan kinerja dan dituangkan dalam dokumen perencanaan.

23) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Pimpinan Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan pimpinan daerah sejak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal dalam mendukung tugas pimpinan. Dukungan penuh terhadap kebutuhan kedinasan ini turut menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

24) Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah

Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan pimpinan daerah pada Tahun 2025 telah mencapai 100%. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan adalah Terpenuhinya SDM bagian prokompim.

25) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Hasil penilaian atas Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh 4,04 dengan kategori “A-” jika dibandingkan dengan target 3,77, capaian kinerja telah tercapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks

Pelayanan Publik “ Sangat Baik”, yaitu Pelayanan Publik sudah baik pada unit pelayanan yang dilakukan penilaian, namun tetap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta Pembinaan terhadap unit pelayanan.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah adanya dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatnya konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki. Sedangkan faktor penghambatnya adalah prinsip-prinsip tata kelola kebijakan belum dilakukan pada seluruh proses perencanaan maupun penyusunan kebijakan.

26) Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Persentase fasilitasi penyusunan dokumen kelembagaan dan analisis jabatan pada Tahun 2025 telah mencapai 100%. Adapun faktor pendorong capaian nilai ini adalah adanya perubahan aturan dari pemerintah pusat yang mengatur tentang SOTK, tugas dan fungsi, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sedangkan faktor penghambatnya adalah skoring bidang-bidang perangkat daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena mengacu kepada PP 18 tahun 2016, dan ketika menyusun peraturan bupati proses harmonisasi yang cukup lama.

2. Fungsi Sekretariat DPRD

Unsur pendukung urusan pemerintahan pada fungsi Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif daerah. Sekretariat DPRD bertanggung jawab memberikan layanan administratif, teknis, dan operasional guna mendukung kegiatan DPRD dalam penyusunan kebijakan daerah, pengawasan, dan penganggaran. Tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi ini dapat diukur melalui indikator Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD dan Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang mencerminkan kualitas pelayanan serta efektivitas dukungan yang diberikan dalam menunjang kinerja lembaga legislatif daerah. Selain itu, terdapat indikator lain yang menjadi tolok ukur kinerja fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 232
Gambaran Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	NA	NA	NA	100	100
2	Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	%	NA	NA	100	100	100
3	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	82,16	88,14	100	100	100
4	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	%	NA	NA	NA	100	100
5	Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD*	%	NA	NA	NA	NA	100
6	Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran*	%	NA	NA	NA	NA	100
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, 2025

Pada Tahun 2025, DPRD Kabupaten Temanggung menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 100% pada indikator kinerja seperti persentase rancangan Peraturan Daerah yang dibahas, pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai rencana, publikasi kegiatan DPRD, dan peningkatan kapasitas anggota DPRD. Indikator-indikator ini mencerminkan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif secara efektif dan transparan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Persentase laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pembahasan kebijakan anggaran merupakan indikator baru, hal ini menunjukkan upaya berkelanjutan DPRD untuk memperkuat akuntabilitas dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

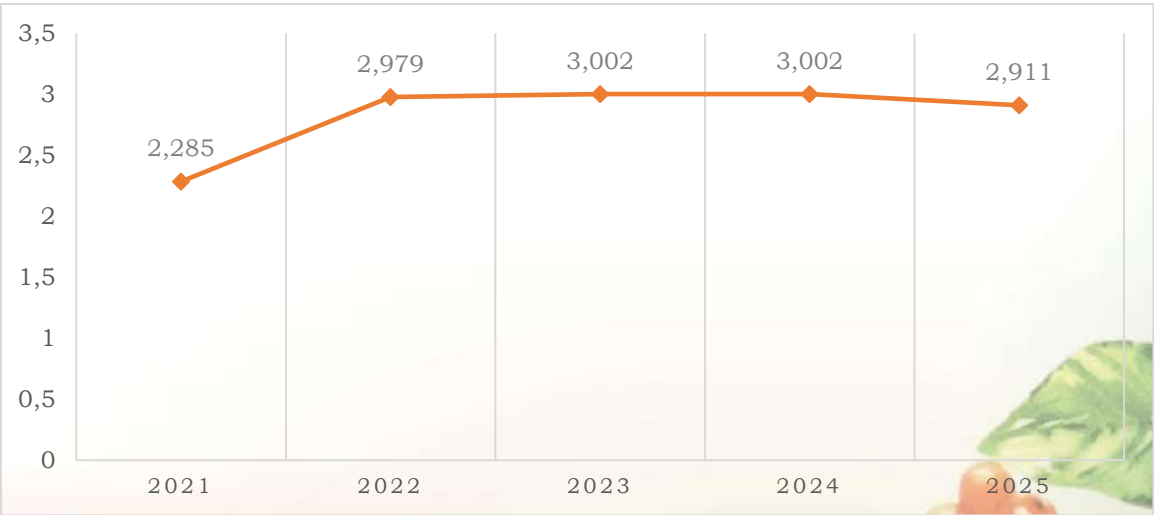
Urusan penunjang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan, terutama melalui perencanaan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Kualitas perencanaan daerah tercermin dalam berbagai indikator seperti Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, Manajemen Risiko Indeks, Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, dan Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP, serta yang menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mengelola risiko dalam pelaksanaan program. Peningkatan capaian pada indikator-indikator tersebut mencerminkan perencanaan yang semakin terintegrasi, inovatif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah dengan orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung menunjukkan kenaikan nilai yang sangat signifikan, dari 4,5 di tahun 2024 saat ini mencapai angka 94,78 pada Tahun 2025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilakukan secara sistematis, partisipatif, serta berbasis data dan eviden. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa terdapat inovasi dan penguatan yang lebih baik dalam aspek perencanaan, sejalan dengan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.

2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks dapat diartikan sebagai sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu tertentu. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat pemerintah daerah dapat diwakili oleh Badan Perencanaan Daerah ataupun Sekretaris Daerah atau unit kerja lain yang ditunjuk. Area penilaian MRI meliputi delapan area yaitu Kualitas Perencanaan, Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, Aktivitas Penanganan Risiko, dan *Outcome*. Adapun angka Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Temanggung disajikan pada Gambar.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 2. 63
Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Berdasarkan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kabupaten Temanggung yang meningkat dari 2,285 pada tahun 2021 menjadi 3,002

pada tahun 2023. Pada Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 2,911, level kapabilitas manajemen risiko daerah ini berada pada transisi dari tingkat *Repeatable* ke *Defined*. Pada level *Repeatable* (2,00–2,99), pendekatan manajemen risiko masih bersifat sektoral atau *silo*, belum terintegrasi secara menyeluruh antar unit. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki strategi dan kebijakan manajemen risiko yang dikomunikasikan dan mulai diimplementasikan, serta adanya kesadaran organisasi terhadap pentingnya penetapan selera risiko. Meski demikian, penurunan pada Tahun 2025 menandakan perlunya peningkatan dalam konsistensi implementasi, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta pengembangan kapasitas untuk dapat naik ke level *Managed* yang lebih komprehensif.

3. Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung secara menyeluruh. Nilai ini diperoleh dari rata-rata capaian tujuan, sasaran, dan program yang dilaksanakan oleh 26 perangkat daerah serta 20 kecamatan. Selanjutnya, nilai capaian kinerja pembangunan daerah berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan misi dan visi pembangunan. Nilai capaian kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2025 adalah 98,57. Hal tersebut menandakan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung telah berhasil dilaksanakan.

4. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP

Nilai Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan bobot 30 persen dalam penilaian keseluruhan. Berdasarkan ketentuan Kementerian PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2022, komponen ini menilai sejauh mana perangkat daerah mampu menyusun, mengimplementasikan, serta memanfaatkan dokumen perencanaan kinerja secara efektif, logis, dan berorientasi hasil. Penilaian dilakukan melalui analisis terhadap keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan dokumen seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), dan Dokumen Pelaporan Kinerja (LKjIP). Penilaian ini bertujuan memastikan setiap perangkat daerah memiliki arah

strategis yang jelas dan terukur dalam mencapai outcome pembangunan daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2025 belum rilis, data terakhir tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 21,20 . Adapun nilai perencanaan kinerja SAKIP di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 233
Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai perencanaan kinerja SAKIP	Nilai	20,13	21	20,88	21,20	21,20

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2026

Nilai perencanaan kinerja SAKIP menunjukkan peningkatan bertahap dari 20,13 pada tahun 2021 menjadi 21,20 pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja yang lebih terukur dan selaras dengan sasaran pembangunan. Nilai ini sekaligus menjadi indikator bahwa perencanaan kinerja masih perlu diperkuat agar dapat mendorong perbaikan nilai SAKIP secara keseluruhan, serta mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

Kinerja program pada unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan diukur melalui sejumlah indikator yang mencerminkan sejauh mana proses perencanaan telah dilakukan secara terintegrasi, akuntabel, dan berbasis hasil. Indikator-indikator tersebut meliputi Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah, Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis Risiko, serta Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah. Selain itu, keselarasan antara RKPD dan Renja Perangkat Daerah di berbagai bidang seperti pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, serta infrastruktur, juga menjadi ukuran penting yang menegaskan sinergi antar level perencanaan. Kualitas capaian pada indikator-indikator ini menunjukkan efektivitas koordinasi, ketepatan penjabaran arah kebijakan, serta kemampuan daerah dalam merumuskan perencanaan yang responsif terhadap tantangan pembangunan.

Adapun capaian kinerja bidang perencanaan Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 antara lain sebagaimana pada tabel.

Tabel 2. 234
Gambaran Capaian Kinerja Bidang Perencanaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah*	%	NA	NA	NA	NA	100
2	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis Risiko*	%	NA	NA	NA	NA	36
3	Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah*	%	NA	NA	NA	NA	64,81
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia*	%	NA	NA	NA	NA	97,83
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Ekonomi dan SDA*	%	NA	NA	NA	NA	98,37
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Infrastruktur*	%	NA	NA	NA	NA	96,23
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Kinerja bidang perencanaan digambarkan berdasarkan indikator pada tabel di atas, adapun penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja urusan perencanaan adalah sebagai berikut:

1) Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah telah mencapai 100% pada Tahun 2025 ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah sudah selaras. Dokumen perencanaan dimaksud adalah antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

2) Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis Risiko

Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko pada Tahun 2025 mencapai 36%. Penerapan perencanaan berbasis risiko menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya integrasi analisis risiko, perangkat daerah dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak tahap perencanaan, sehingga meminimalkan risiko kegagalan program dan meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan.

3) Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025 persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah telah mencapai 97,83% dengan target akhir tahun 2025 70%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah sudah hampir mencapai target. Pengukuran ini menjadi instrumen penting bagi Bappeda Kabupaten Temanggung dalam melakukan evaluasi dan pembinaan kinerja perangkat daerah. Melalui indikator ini, dapat diidentifikasi perangkat daerah yang telah menunjukkan kinerja optimal serta perangkat daerah

yang masih memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

4) Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada Tahun 2025 telah mencapai 98,37 dengan target akhir 2025 85%, hal ini menunjukkan bahwa capaian saat ini telah mencapai 100%. Indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kualitas proses perencanaan yang dilakukan oleh perangkat daerah, agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan tetap berorientasi pada target pembangunan daerah.

5) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Ekonomi dan SDA

Pada Tahun 2025 persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA telah mencapai 100% dengan realisasi kinerja 96,23%. Penerapan indikator ini penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan pada bidang ekonomi dan SDA di Kabupaten Temanggung. Keselarasan yang baik mencerminkan bahwa seluruh perangkat daerah telah berkontribusi secara terkoordinasi dalam mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan lestari.

6) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Infrastruktur

Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur telah mencapai 97,37% pada Tahun 2025 ini dengan target akhir 85%. Capaian ini menandakan bahwa program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan arah kebijakan, prioritas, serta sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD terutama pada bidang infrastruktur. Keselarasan ini menjadi penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan, mengingat sektor ini berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Keuangan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bidang keuangan memiliki peran krusial sebagai unsur penunjang yang menentukan

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efisien menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Kabupaten Temanggung, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan terus diperkuat melalui upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan, belanja, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) setiap tahunnya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem keuangan yang berkelanjutan, guna mendukung tercapainya target-target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun gambaran upaya pengelolaan keuangan di Kabupaten Temanggung dijabarkan sebagai berikut.

1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi. Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 235
Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 - 2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai IPKD	69,52	62,74	68,08	73,66	66,8

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 yaitu 66,8 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 menurun. Faktor penghambat dari hasil Indeks pengelolaan Keuangan Daerah adalah perhitungan yang dilakukan oleh provinsi sehingga Kabupaten perlu menunggu. Selain itu, Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja OPD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. IPKD ini juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah. Secara makro IPKD merupakan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak hanya menjadi indikator kinerja BPKPAD secara mandiri.

2) Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Persentase dari realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 – 2025 di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 2.217.

Tabel 2. 236
Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Persentase
2021	364.099.510.273	1.950.257.238.731	18,67
2022	308.726.486.721	1.849.550.699.127	16,69
2023	351.823.679.260	2.005.427.452.487	17,54
2024	384.396.905.677	2.097.018.658.739	18,33
2025	451.057.543.778	2.051.319.266.447	21,99

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi selama periode 2021 - 2025. Tetapi dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 telah meningkat menjadi 21,99% dari 18,33% di tahun 2024. Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya upaya optimalisasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi PAD secara konsisten agar dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah.

3) Opini BPK atas LKPD

Opini laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*). Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel.

Tabel 2. 237
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2021 – 2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Opini LKPD (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sampai Tahun 2025 atau selama 5 tahun terakhir memperoleh opini WTP. Atas opini yang sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah komitmen dari semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan laporan Keuangan disusun sesuai dengan PP 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Upaya yang terus dilakukan yaitu melakukan monitoring laporan keuangan dan melaksanakan asistensi kepada Perangkat Daerah.

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

Gambaran capaian kinerja program pada urusan keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel.

Tabel 2. 238
Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan pengalokasian anggaran belanja <i>mandatory spending</i> dalam APBD	%	100	100	100	100	100
2	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	42,86	100	100	100
3	Persentase penerbitan SP2D <i>online</i> yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah	%	NA	NA	NA	100	100
5	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	84,52	100	100	100	100
7	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	78,83	88,2	94,33	100	100
8	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	%	24,81	52	7,44	4,57	76,62
9	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	%	100	100	100	98,16	94,94

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2025

Gambaran capaian kinerja program pada urusan keuangan Kabupaten Temanggung selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

- 1) Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja *Mandatory Spending* dalam APBD

Selama periode 2021 tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Temanggung berhasil memastikan bahwa pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban anggaran untuk

sektor-sektor prioritas seperti pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur dasar (25%), dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsistensi dalam pencapaian ini mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang baik serta keseriusan dalam mendukung pelayanan publik yang optimal.

2) Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Capaian ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen penganggaran menunjukkan konsistensi selama 3 tahun dari 2021 hingga triwulan III tahun 2025 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem penyusunan dokumen penganggaran.

3) Persentase Penerbitan SP2D *Online* yang Tepat Waktu

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara *online* selalu mencapai 100% selama lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pencairan dana berjalan dengan efektif dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Upaya penerbitan SP2D *online* yang tepat waktu terus dilakukan dengan peningkatan koordinasi dan konfirmasi kepada perangkat daerah sehingga dokumen SP2D dapat diproses dan tidak mengalami keterlambatan pembayaran.

4) Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah baru mulai diukur pada tahun 2024 dan pada triwulan III tahun 2025 ini telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memperkuat mekanisme dan akurasi dalam pencatatan keuangan, sehingga mengurangi potensi ketidaksesuaian data dalam pengelolaan keuangan daerah.

5) Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu

Selama tahun 2021 hingga triwulan III tahun 2025, Kabupaten Temanggung selalu menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu dengan capaian 100%. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik. Ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD juga berkontribusi pada opini WTP yang secara konsisten diperoleh dalam audit BPK.

6) Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu

Penyampaian laporan daftar barang milik daerah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Mencapai 100% dari tahun 2022 hingga triwulan III tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah meningkatkan efektivitas dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah, sehingga pengelolaan aset menjadi lebih efisien.

7) Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja

Pemanfaatan aset daerah mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 hingga triwulan III tahun 2025 ini capaian telah mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan penggunaan aset daerah untuk mendukung pelayanan publik dan operasional satuan kerja, sehingga aset yang tersedia dapat memberikan manfaat secara maksimal.

8) Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah

Peningkatan target pajak daerah menunjukkan tren fluktuatif selama lima tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 dan 2022 mencapai 24,81% dan 52%. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024, peningkatan target pajak daerah mengalami perlambatan dengan capaian 7,44% dan 4,57%. Dan mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2025 ini dengan capaian 76,62%. Adapun faktor pendorong dalam pencapaian tersebut yaitu telah dilakukan pengelolaan pajak secara online melalui SIAP PAKDE dan e-BPHTB, dilakukannya pemutakhiran data objek pajak daerah, dan pelaksanaan kegiatan pendataan objek pajak baru baik dengan metode survey lapangan maupun pendaftaran oleh wajib pajak secara mandiri

9) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah

Realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target pajak daerah selama periode 2021 – 2024 secara konsisten mencapai 100%, namun pada tahun 2025 baru mencapai 94,94% dikarenakan pendaftaran dan pembayaran objek pajak Reklame dan BPHTB belum maksimal serta capaian pada triwulan III belum menggambarkan keseluruhan realisasi Pajak Daerah.

3. Kepegawaian

Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan, bidang kepegawaian memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini tercermin dari komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menerapkan prinsip-prinsip sistem merit sebagai dasar pengelolaan ASN, yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Sistem Merit dari tahun ke tahun.

Indeks Sistem Merit merupakan pengelolaan kepegawaian yang profesional dan berbasis sistem merit merupakan fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, responsif, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Temanggung, penguatan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu prioritas untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan mampu menghadapi kompleksitas tantangan pelayanan publik. Upaya tersebut tercermin dalam komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, yang salah satunya diukur melalui capaian Indeks Sistem Merit sebagai indikator utama penerapan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan ASN. Adapun Nilai dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 239
Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Penilaian Sistem Merit	113	200	258	258	258
2	Indeks Sistem Merit	0,259	0,482	0,62	0,62	0,62

Sumber: Aplikasi SIPINTER

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan hingga mencapai skor 258 dan indeks 0,62 pada Tahun 2023, 2024, dan Tahun 2025 yang termasuk dalam kategori "Baik". Hal ini mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam penerapan prinsip-prinsip sistem merit dan peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun gambaran indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan, bidang kepegawaian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 240
Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu	%	NA	NA	NA	100	100
2	Persentase keterisian jabatan	%	NA	NA	NA	84,79	84,42
3	Persentase Kebutuhan ASN	%	NA	NA	NA	85,43	100
4	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	NA	NA	NA	98,94	99,98
5	Persentase kedisiplinan ASN	%	NA	NA	NA	99,18	89,36

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2026

Gambaran unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang signifikan dalam berbagai aspek terkait manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu telah mencapai 100%, yang mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan layanan kepegawaian dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Selain itu, keterisian jabatan mencapai 84,42%, menunjukkan bahwa sebagian besar jabatan telah terisi, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Kebutuhan ASN terpenuhi sebesar 100%, mencerminkan bahwa pemenuhan SDM sudah optimal. Adapun kinerja ASN juga menunjukkan hasil positif, dengan 98,98% ASN berkinerja baik atau sangat baik, tetapi untuk kedisiplinan baru mencapai 89,36% karena adanya penambahan 4.204 ASN dan P3K yang belum semua mengikuti pembinaan pegawai melalui webinar.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, Kabupaten Temanggung telah menetapkan indikator baru terkait pengembangan potensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 241
Gambaran Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase pengembangan potensi ASN	%	NA	NA	NA	18,55	45,06

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung, 2025

Pengembangan potensi ASN meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kemampuan ASN dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun program pengembangan lainnya. Pada tahun 2025

mengalami peningkatan menjadi 45,06% dari sebelumnya di tahun 2024 18,55%, Angka ini menjadi *baseline* penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program-program pelatihan dan pendidikan yang telah dijalankan.

5. Penelitian dan Pengembangan

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan berperan strategis dalam meningkatkan kapabilitas inovasi daerah. Melalui kegiatan litbang, pemerintah daerah dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan solusi inovatif untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

1) Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hasil pemeringkatan indeks inovasi daerah untuk Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 242
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025*
1	Nilai Indeks Inovasi Daerah	45,58	70,92	80,87	72,42	88,88
2	Peringkat	28	6	10	24	15
3	Kategori	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2025
Keterangan: *Data menggunakan tahun sebelumnya

Pada Penganugerahan Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024, Kabupaten Temanggung dianugerahkan sebagai Kabupaten “Sangat Inovatif”. Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 88,88 dengan predikat Sangat Inovatif. Capaian s.d. tahun 2025 sebesar 100% dikarenakan dukungan dari semua elemen (masyarakat, Perangkat Daerah, perguruan tinggi, sekolah) dalam menyampaikan data dukung terkait Indeks Inovasi Daerah. Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan pengukuran Indeks

Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai

2) Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas Inovasi menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi di berbagai sektor pembangunan. Nilai Kapabilitas Inovasi dihitung melalui agregasi nilai dari beberapa indikator pembentuk menggunakan rata-rata aritmatik. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang dihimpun dari berbagai kementerian dan lembaga nasional yang menjadi sumber data resmi dalam penyusunan Indeks Daya Saing Daerah. Indikator ini penting untuk menilai kapasitas daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan serta menciptakan ekosistem inovatif yang mendukung peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 243
Kapabilitas Inovasi Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Kapabilitas Inovasi	n.a	1,05	1,89	2,55	2,62

Sumber: BRIN, 2025

Nilai 2,62 mencerminkan bahwa produktivitas dan efisiensi sistem sosial-ekonomi di Temanggung masih perlu ditingkatkan agar dapat berkompetisi dengan daerah lain yang memiliki struktur ekonomi dan inovasi lebih maju. Beberapa aspek yang kemungkinan besar memengaruhi skor ini antara lain kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, tingkat adopsi teknologi informasi, stabilitas ekonomi lokal, serta kemampuan daerah dalam mendorong inovasi berbasis riset dan pengembangan.

Meskipun demikian, skor tersebut juga menunjukkan adanya potensi dan ruang perbaikan yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang berbasis daya saing. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan iklim usaha yang kondusif, penguatan tata kelola kelembagaan, serta dukungan terhadap kegiatan riset dan inovasi daerah dapat menjadi fokus strategis ke depan. Dengan langkah-langkah tersebut, Temanggung diharapkan mampu

meningkatkan skor IDSD-nya secara bertahap sehingga dapat sejajar dengan daerah-daerah yang memiliki indeks di atas rata-rata nasional.

Kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan diukur melalui tiga indikator program yang mencerminkan efektivitas dan relevansi kegiatan litbang terhadap pembangunan daerah, yaitu :

1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dituangkan Dalam Dokumen Perencanaan

Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana hasil litbang berkontribusi langsung terhadap arah kebijakan strategis daerah.

2) Persentase Riset Yang Sesuai Dengan Isu Strategis

Indikator tersebut menunjukkan keterpaduan antara kegiatan penelitian dengan permasalahan aktual dan prioritas pembangunan, sehingga hasilnya lebih aplikatif dan tepat sasaran.

3) Persentase Inovasi Yang Dimanfaatkan

Indikator ini mencerminkan keberhasilan litbang dalam menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan oleh perangkat daerah, dunia usaha, maupun masyarakat.

Ketiga indikator ini secara keseluruhan menggambarkan peran penting litbang sebagai penggerak berbasis ilmu pengetahuan dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di Kabupaten Temanggung.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Kabupaten Temanggung menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari korupsi, yang diukur melalui tiga indikator utama, yaitu nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi. Nilai SPIP mencerminkan sejauh mana perangkat daerah mampu menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sementara itu, nilai Kapabilitas APIP menggambarkan tingkat kemampuan Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan yang profesional, independen, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan. Adapun Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi menunjukkan dampak konkret dari

upaya pengawasan terhadap penurunan potensi tindak korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Ketiga indikator ini saling melengkapi dalam menilai efektivitas peran Inspektorat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel di Kabupaten Temanggung.

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu kerangka kerja dan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola, mengawasi, dan memantau operasi serta sumber daya yang dimilikinya. SPIP dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. SPIP merupakan mekanisme yang diterapkan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan dan tugas pemerintahan berjalan dengan baik. SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan dasar hukum bagi penerapan SPIP di berbagai entitas pemerintah, dan berisi pedoman tentang prinsip-prinsip SPIP, lingkup pengendalian intern, tata cara implementasi, serta tata cara pemantauan dan evaluasi. Penilaian SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi. Tingkat Maturitas SPIP:

- 1. Rintisan, Interval Skor 1,0 < skor < 2,0
- 2. Berkembang, Interval Skor 2,0 < skor < 3,0
- 3. Terdefinisi, Interval Skor 3,0 < skor < 4,0
- 4. Terkelola dan terukur, Interval Skor 4,0 < skor < 4,5
- 5. Optimum, Interval Skor > 4,5

Penilaian maturitas SPIP dilaksanakan atas unsur-unsur SPIP yang didukung oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung, nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 244
Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.045	3.008	3.000	3,077	3,077

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2026

Nilai maturitas SPIP Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Capaian maturitas SPIP Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebesar 3,045, tahun 2022 sebesar 3,008

tahun 2023 menurun menjadi 3.00. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-708/PW11/3.2/2024 tanggal 31 Desember 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi), dengan Nilai 3,077 yang menjadi nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sedangkan, untuk tahun 2025 belum terdapat hasil penilaian maturitas SPIP, sehingga capaian tahun 2025 masih menggunakan nilai hasil penilaian tahun 2024. Hal tersebut menunjukan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel namun masih harus dioptimalkan dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

2. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP menghasilkan level Kapabilitas APIP dari Level 1 s/d Level 5.

Tabel 2. 245
Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	NA	NA	NA	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-353/PW11/6/2024 tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat

Kabupaten Temanggung, Level Kapabilitas APIP Kabupaten Temanggung pada Level 3 (*delivered*). Level *delivered* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance dan consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D. Level Kapabilitas APIP Tahun 2025 masih menggunakan hasil penilaian tahun 2024 karena belum terdapat Laporan Hasil Evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi. IEPK merupakan salah satu unsur dalam penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P).

Tabel 2. 246
Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	NA	NA	NA	3,000	3,000

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Indeks Efektifitas Pegendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Nomor PE.07.03/LHP-558PW11/5.1/2024 Perihal laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Indeks Efektivitas Pengeendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi pada nilai 3,000. Capaian ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki strategi dan kebijakan pengendalian korupsi yang mulai diterapkan serta dikomunikasikan di lingkungan organisasi. Sedangkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi tahun 2025 masih menggunakan nilai tahun 2024, yaitu sebesar 3,000, karena belum terdapat penilaian terbaru.

Adapun gambaran keberhasilan atau capaian kinerja unsur pengawasan di Kabupaten Temanggung disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 247
Gambaran Indikator Kinerja Unsur Pengawasan Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III, IV, Khusus)*	%	NA	NA	NA	NA	100
2	Presentase penyelesaian pengawasan dengan tujuan tertentu*	%	NA	NA	NA	NA	100
3	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100	100	100	100	100
4	Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan*	%	NA	NA	NA	NA	100
5	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	40	100	100	100	66,67
6	Persentase Tindak Lanjut Aduan <i>Whistle Blowing</i> , Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	NA	NA	NA	100	100
Keterangan:							
*Indikator Baru							

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2025

Kinerja Inspektorat digambarkan berdasarkan indikator pada Tabel 2.226. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja Inspektorat adalah sebagai berikut.

1) Persentase Pelaksanaan Pengawasan Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III, IV, Khusus)

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun setiap tahun untuk kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan oleh semua Inspektur Pembantu. PKPT berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan jadwal, sasaran, dan prioritas pemeriksaan (baik reguler maupun berbasis risiko) demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, memastikan kepatuhan, dan mendukung pencapaian kinerja. Adapun persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT pada Irban (I, II, III, IV, Khusus) pada tahun 2025 mencapai 100% dengan penugasan pengawasan yang dilaksanakan sejumlah 237 penugasan dari 485 pengawasan yang direncanakan. Pada tahun sebelumnya pelaksanaan pengawasan sesuai program kerja pengawasan tahunan pada Irban (I,II, III, IV, dan khusus) belum dilaksanakan, sehingga indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang menjadi penting untuk memantau pelaksanaan pengawasan yang telah direncanakan dalam PKPT.

2) Presentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan di luar program rutin, seperti audit keuangan dan kinerja, untuk menyelidiki isu-isu khusus, seperti dugaan penyimpangan, pelanggaran hukum, atau penanganan kasus tertentu. Pada tahun 2025, seluruh laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti oleh Irban Khusus sehingga persentase penyelesaian pengawasan dengan tujuan tertentu sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan setiap isu khusus ditangani secara tuntas dan akuntabel.

3) Persentase Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Indikator kinerja ini telah mencapai 100% secara konsisten sejak tahun 2021 hingga 2025. Ini menunjukkan bahwa setiap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah ditindaklanjuti secara baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada tahun 2025, terdapat sejumlah 6.483 temuan oleh BPK, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dan Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan progress penanganan sampai dengan selesai sejumlah 4.287 temuan (78,19%), masih dalam proses dalam arti sudah ada tindak lanjut dalam proses pemenuhan tindak lanjut sebanyak 1.175 (21,43%) dan temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 0,38% temuan. Kinerja ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan hasil pengawasan dengan maksimal.

4) Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan

Kebijakan teknis pengawasan adalah panduan atau pedoman yang memuat aturan, sasaran, dan prioritas pengawasan yang dibuat oleh lembaga pengawas untuk memastikan pelaksanaan program atau kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Sampai dengan tahun 2025, terdapat satu kebijakan teknis yang sedang dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan, sehingga belum ada realisasi capaian pada indikator ini. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan penyusunan kebijakan teknis agar dapat segera menjadi acuan formal dalam pelaksanaan pengawasan.

- 5) Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Indikator ini menunjukkan peningkatan signifikan dari 40% pada Tahun 2021 hingga mencapai 100% pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2025 terjadi penurunan realisasi menjadi 66,67%, terjadinya penurunan pada realisasi tersebut dikarenakan adanya hambatan diantaranya adalah :

- a. Kurangnya komitmen dan kurang pahamnya Perangkat Daerah untuk melaksanakan pembangunan zona integritas
- b. Adanya mutasi pegawai

Pendampingan pada tahun 2025 dilaksanakan pada tiga perangkat daerah yaitu DPPPAPKB, Dinperinaker, dan DPRKPLH dengan hasil dua perangkat daerah yang lolos dalam penilaian administrasi yaitu Dinperinaker dan DPRKPLH.

- 6) Persentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi

Indikator ini juga menunjukkan kinerja yang konsisten dengan capaian 100% dari tahun 2021 hingga 2025. Setiap aduan yang masuk melalui mekanisme *whistle blowing*, laporan benturan kepentingan, maupun gratifikasi telah ditindaklanjuti dengan tepat. Hal ini menegaskan bahwa sistem pengendalian internal terkait pelaporan pelanggaran telah berjalan efektif dan responsif dalam mencegah pelanggaran etika dan integritas.

- 7) Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi Pengelolaan Risikonya

Pada Tahun 2025, indikator ini mencapai 100%. Evaluasi pengelolaan risiko perangkat daerah merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan dan risiko dalam menjalankan tugas-tugasnya. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul dan menentukan strategi mitigasi yang tepat, sehingga potensi masalah dapat diminimalisir dan kinerja pemerintahan tetap stabil.

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

1. Fungsi Kecamatan

Kabupaten Temanggung terus berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah kecamatan. Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan yang masing-masing memiliki karakteristik geografis, potensi, dan tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memperhatikan pendekatan kewilayahan guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata. Setiap kecamatan di Kabupaten Temanggung memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif di tingkat wilayah, Kabupaten Temanggung mulai menerapkan empat indikator baru pada tahun 2024 untuk mengukur kinerja kewilayahan di tingkat kecamatan. Indikator tersebut meliputi persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, persentase capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) perangkat daerah, dan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pelayanan, akuntabilitas, serta peran koordinatif kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Implementasi indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memperkuat peran strategis kecamatan sebagai simpul pelayanan publik dan pusat koordinasi pembangunan di wilayah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.

Adapun gambaran keberhasilan atau capaian kinerja pada 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 248
Gambaran Indikator Kinerja pada 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan*	%	NA	NA	NA	100	100
2	Persentase realisasi penerimaan PBB di kecamatan	%	99,19	98,72	98,68	98,21	98,24
3	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak*	%	NA	NA	NA	91,60	92,99
4	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif*	%	NA	NA	NA	100	100
5	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
	bencana alam di kecamatan						
6	Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa di tingkat kecamatan*	%	NA	NA	NA	100	100
7	Persentase jumlah desa di kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%	99,2	100	100	100	100
8	Persentase jumlah desa di kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Keterangan:							
*Indikator Baru							

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2025

Kinerja pemerintah kecamatan digambarkan berdasarkan indikator pada Tabel 2.227. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja pada 20 kecamatan adalah sebagai berikut.

1) Persentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan telah terselesaikan. Sebagai indikator baru, data untuk tahun-tahun sebelumnya (2021-2023) belum tersedia (NA). Indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif di setiap kecamatan. Di masa depan, pencapaian indikator ini akan menjadi ukuran penting dalam evaluasi keberhasilan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Adapun capaian indikator kinerja persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan tahun 2021–2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 249
Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Tahun 2021–2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Temanggung	NA	NA	NA	100	100
2	Tembarak	NA	NA	NA	100	100
3	Pringsurat	NA	NA	NA	100	100
4	Kaloran	NA	NA	NA	100	100
5	Parakan	NA	NA	NA	100	100
6	Bulu	NA	NA	NA	100	100
7	Kedu	NA	NA	NA	100	100
8	Kandangan	NA	NA	NA	100	100
9	Candiroto	NA	NA	NA	100	100
10	Ngadirejo	NA	NA	NA	100	100
11	Jumo	NA	NA	NA	100	100
12	Wonobojo	NA	NA	NA	100	100
13	Kranggan	NA	NA	NA	100	100
14	Bejen	NA	NA	NA	100	100
15	Kledung	NA	NA	NA	100	100
16	Bansari	NA	NA	NA	100	100
17	Tlogomulyo	NA	NA	NA	100	100
18	Selopampang	NA	NA	NA	100	100
19	Gemawang	NA	NA	NA	100	100
20	Tretep	NA	NA	NA	100	100
Rata-rata		NA	NA	NA	100	100

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

2) Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan

Persentase realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 menunjukkan penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2025. Adapun capaian kinerja realisasi penerimaan PBB pada 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 250
Capaian Indikator Kinerja Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan
Tahun 2021–2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Temanggung	93,44	93,14	91,93	90,57	90,11
2	Tembarak	100	99,96	99,85	97,78	95,67
3	Pringsurat	99,67	96,47	98,19	99,2	96,32
4	Kaloran	96,68	99,09	100	98,40	99,44
5	Parakan	97,89	97,37	98,43	96,44	97,68
6	Bulu	100	100	97,58	96,06	94,76
7	Kedu	100	100	99,53	99,91	99,70
8	Kandangan	99,10	95,77	96,35	100	98,88
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	99,23	98,28	95	99,19
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonobojo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	96,93	95,39	93,63	95,48	95,75
14	Bejen	100	100	99,89	98,29	99,57
15	Kledung	100	97,92	100	98,17	97,81
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	98,99	100
Rata-rata		99,19	98,72	98,68	98,21	98,24

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian kinerja penerimaan PBB pada periode 2021–2025 fluktuatif. Jika dibandingkan capaian Tahun 2024 mengalami kenaikan capaian kinerja PBB

3) Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Layak

Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang layak merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2024 untuk menilai ketersediaan dan kelayakan fasilitas fisik di wilayah kelurahan. Adapun capaian kinerja realisasi jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak pada 4 kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 251
Capaian Indikator Kinerja Realisasi Persentase Jumlah Sarana dan
Prasarana Kelurahan Yang Layak Tahun 2021 – 2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Temanggung	NA	NA	NA	84,00	85,32
2	Parakan	NA	NA	NA	100	90,79
3	Ngadirejo	NA	NA	NA	100	100

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
4	Kranggan	NA	NA	NA	83,50	95,83
Rata-rata		NA	NA	NA	91,88	92,99

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

Pada Tahun 2025 mencapai 92,99% dan mengalami peningkatan jika di bandingkan realisasi Tahun 2024, menunjukkan bahwa sebagian besar kelurahan telah memiliki fasilitas yang memenuhi standar kelayakan. Meski demikian, masih terdapat sekitar 7,02% sarana dan prasarana yang belum layak, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh dan penguatan perencanaan, termasuk peningkatan alokasi sumber daya serta intervensi yang lebih terarah.

4) Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Terfasilitasi dan Aktif

Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2024. Adapun capaian kinerja realisasi Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif pada 4 kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 252
Capaian Indikator Kinerja Realisasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Terfasilitasi dan Aktif Tahun 2021 – 2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Temanggung	NA	NA	NA	100	100
2	Parakan	NA	NA	NA	100	100
3	Ngadirejo	NA	NA	NA	100	100
4	Kranggan	NA	NA	NA	100	100
Rata-rata		NA	NA	NA	100	100

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2025

Realisasi Tahun 2024 dan 2025 mencapai 100%. Capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kabupaten Temanggung telah mendapatkan fasilitasi dari pemerintah serta berfungsi secara aktif. Hal ini mencerminkan keberhasilan kecamatan dalam memberdayakan masyarakat melalui kemitraan kelembagaan yang produktif, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

5) Persentase Penanganan Laporan Kejadian, Gangguan Kamtibmas, dan Bencana Alam di Kecamatan

Sejak tahun 2021 hingga 2025, semua laporan terkait kejadian, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta bencana alam di kecamatan ditangani 100%. Ini menunjukkan kesiapan kecamatan dalam merespons situasi darurat dan menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat. Adapun capaian kinerja persentase penanganan laporan kejadian, gangguan Kamtibmas, dan bencana alam di kecamatan tahun 2021–2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 253
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penanganan Laporan Kejadian, Gangguan Kamtibmas, dan Bencana Alam di Kecamatan Tahun 2021 – 2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Temanggung	100	95,24	100	100	100
2	Tembarak	100	100	100	100	100
3	Pringsurat	100	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	100	100	100	100	100
7	Kedu	100	100	100	100	100
8	Kandangan	100	100	100	100	100
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100
Rata-rata		100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025

Capaian kinerja di 20 kecataman pada tahun 2025 tercapai 100%. Kondisi tersebut dikarenakan sudah terbentuknya desa tangguh bencana pada semua kecamatan di Kabupaten Temanggung.

6) Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan

Pada tahun 2025, capaian 100% menunjukkan bahwa semua pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa di tingkat kecamatan telah diselesaikan dengan baik. Indikator ini sebelumnya tidak tersedia (NA), namun pencapaian penuh pada tahun 2024 menandakan adanya peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin di tingkat pemerintahan desa. Adapun capaian kinerja persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa di tingkat kecamatan tahun 2021–2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 254
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan
Tahun 2021 – 2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Temanggung	NA	NA	NA	100	100
2	Tembarak	NA	NA	NA	100	100
3	Pringsurat	NA	NA	NA	100	100
4	Kaloran	NA	NA	NA	100	100
5	Parakan	NA	NA	NA	100	100
6	Bulu	NA	NA	NA	100	100
7	Kedu	NA	NA	NA	100	100
8	Kandangan	NA	NA	NA	100	100
9	Candirototo	NA	NA	NA	100	100
10	Ngadirejo	NA	NA	NA	100	100
11	Jumo	NA	NA	NA	100	100
12	Wonoboyo	NA	NA	NA	100	100
13	Kranggan	NA	NA	NA	100	100
14	Bejen	NA	NA	NA	100	100
15	Kledung	NA	NA	NA	100	100
16	Bansari	NA	NA	NA	100	100
17	Tlogomulyo	NA	NA	NA	100	100
18	Selopampang	NA	NA	NA	100	100
19	Gemawang	NA	NA	NA	100	100
20	Tretep	NA	NA	NA	100	100
Rata-rata		NA	NA	NA	100	100

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2025

7) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, semua desa di kecamatan berhasil menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tepat waktu, dan capaian tersebut berlanjut hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan koordinasi yang baik antara kecamatan dan desa dalam perencanaan pembangunan desa. Adapun capaian kinerja persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu pada 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2021 – 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 255
Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan
RKP-Desa Tepat Waktu Tahun 2021 – 2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Temanggung	100	100	100	100	100
2	Tembarak	100	100	100	100	100
3	Pringsurat	100	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	100	100	100	100	100
7	Kedu	100	100	100	100	100
8	Kandangan	100	100	100	100	100
9	Candirototo	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonoboyo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	92,31	100	100	100	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	91,67	100	100	100	100

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100
Rata-rata		99,20	100	100	100	100

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

8) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu

Dari tahun 2021 hingga 2025, seluruh desa di kecamatan berhasil menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) tepat waktu dengan capaian 100%. Kondisi ini mencerminkan konsistensi dan disiplin administrasi pada tingkat desa. Adapun capaian kinerja persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu di 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 256
Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Temanggung	100	100	100	100	100
2	Tembarak	100	100	100	100	100
3	Pringsurat	100	100	100	100	100
4	Kaloran	100	100	100	100	100
5	Parakan	100	100	100	100	100
6	Bulu	100	100	100	100	100
7	Kedu	100	100	100	100	100
8	Kandangan	100	100	100	100	100
9	Candiroto	100	100	100	100	100
10	Ngadirejo	100	100	100	100	100
11	Jumo	100	100	100	100	100
12	Wonobojo	100	100	100	100	100
13	Kranggan	100	100	100	100	100
14	Bejen	100	100	100	100	100
15	Kledung	100	100	100	100	100
16	Bansari	100	100	100	100	100
17	Tlogomulyo	100	100	100	100	100
18	Selopampang	100	100	100	100	100
19	Gemawang	100	100	100	100	100
20	Tretep	100	100	100	100	100
Rata-rata		100	100	100	100	100

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

Capaian kinerja pada indikator persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu di 20 kecamatan pada tahun 2021 – 2025 mencapai 100%. Keberhasilan ini didorong oleh penerapan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur tata kelola keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Selain itu, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa juga berperan penting dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di tingkat desa, sehingga mendukung penyelesaian APBDes tepat waktu.

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berperan strategis dalam membina kesadaran ideologi dan kebangsaan masyarakat, serta memastikan terselenggaranya pendidikan politik yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan, serta mendorong partisipasi politik masyarakat yang lebih sadar dan aktif.

1) Indeks Harmoni

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk memahami, memantau, dan meningkatkan harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia. Terdapat empat dimensi yang diukur dalam IHaI Tahun 2025 : Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Budaya, dan Dimensi Keberagamaan. IHaI kemudian diuraikan menjadi 8 (delapan) variabel yaitu Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan; Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan; Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis; Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal; Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal; Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya, Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-hari. Penghitungan Indeks Harmoni dilaksanakan oleh Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2025. Pada tahun 2025, skor Indeks Harmoni Kabupaten Temanggung sebesar 6,72. Dengan demikian, keberhasilan menjaga harmoni antarumat beragama di Kabupaten Temanggung perlu terus diperkuat melalui sinergi pemerintah dan para tokoh lintas elemen, penguatan nilai toleransi, dialog antaragama, serta kebijakan inklusif yang memastikan seluruh masyarakat merasa dihormati sehingga stabilitas sosial dapat senantiasa terjaga.

2) Presentase Tertanganinya Konflik di Masyarakat

Persentase tertanganinya konflik di masyarakat Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 tercatat mencapai 100% setiap tahunnya, yang menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dan aparat terkait dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Capaian ini

mencerminkan efektivitas sistem deteksi dini, mediasi, dan penanganan konflik yang dijalankan melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga adat. Keberhasilan dalam menyelesaikan seluruh konflik yang muncul juga menjadi indikator penting dalam menciptakan iklim sosial yang kondusif bagi pembangunan daerah, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketenteraman lingkungan.

Adapun gambaran keberhasilan atau capaian indikator kinerja program pada bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Temanggung disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 257
Gambaran Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan*	%	NA	NA	NA	100	100
2	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat*	%	NA	NA	NA	100	100
3	Persentase ormas yang mendapat pembinaan*	%	NA	NA	NA	18,18%	26,46
4	Jumlah kejadian konflik SARA*	Kejadian	NA	NA	NA	1	1
5	Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat*	%	NA	NA	NA	NA	66,67
Keterangan: *Indikator Baru							

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Temanggung, 2026

Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik digambarkan berdasarkan indikator pada tabel. Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut.

1) Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan merupakan ukuran tingkat keberhasilan kegiatan Bankesbangpol dalam menanamkan, memperkuat dan membudayakan nilai-nilai Pancasila serta meningkatkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung. Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan pada Tahun 2024 dan 2025 mencapai 100% dengan masing-masing jumlah masyarakat yang memiliki peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan sebanyak 863 dan 849 orang.

2) Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik kepada Masyarakat

Pada tahun 2024 dan 2025, pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh program pendidikan politik telah

dilaksanakan secara efektif, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem demokrasi dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik di tingkat lokal maupun nasional.

3) Persentase Ormas yang Mendapat Pembinaan

Pada tahun 2024 tercatat 18,18% organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Temanggung telah menerima pembinaan, dan pada tahun 2025 angka tersebut meningkat menjadi 26,46% dengan 50 dari total 189 ormas telah mendapatkan pembinaan. Ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memberikan arahan dan penguatan kepada ormas, meskipun persentase pembinaan ini masih dapat ditingkatkan. Pembinaan ormas penting dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat harmoni, serta memastikan ormas berperan positif dalam pembangunan masyarakat.

4) Jumlah Kejadian Konflik SARA

Pada Tahun 2025, jumlah kejadian konflik terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Kabupaten Temanggung sebanyak satu kejadian. Jumlah kejadian konflik SARA ditargetkan nol kejadian pada tahun 2045. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mencatat potensi konflik SARA agar dapat segera diantisipasi, dengan tujuan menjaga kerukunan sosial dan mencegah timbulnya ketegangan antar kelompok.

5) Persentase Koordinasi Deteksi Dini Konflik di Masyarakat

Koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat merupakan upaya kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, tokoh agama, dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi konflik secara dini agar dapat dicegah sebelum konflik membesar. Pada tahun 2025, persentase koordinasi deteksi dini konflik di Kabupaten Temanggung mencapai 66,67%, dengan realisasi 56 dari 84 kegiatan yang direncanakan, menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi konflik. Capaian ini turut didukung oleh komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan serta penguatan mekanisme koordinasi melalui rapat, forum diskusi, dan kolaborasi lintas sektor.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah mencerminkan sejauh mana wilayah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur aspek ini adalah tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi mencerminkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi komponen utama dalam struktur pengeluaran PDRB daerah.

1. Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Per Tahun

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dalam struktur pengeluaran PDRB yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per tahun adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu tahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam keluarga tersebut. Perkembangan konsumsi rumah tangga per kapita per tahun dapat menjadi indikator penting untuk melihat dinamika perekonomian daerah. Adapun rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per tahun Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 258
Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Tahun (Ribu Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023*	2024	2025
Rata-Rata Konsumsi Per Kapita/Tahun (Ribu Rupiah)	20.337,37	22.036,20	23.998,73	26.218,32	27.438,26

Sumber: PDRB Kabupaten Temanggung Menurut Pengeluaran 2025

Rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita per tahun atas dasar harga berlaku di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren meningkat dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, konsumsi per kapita tercatat sebesar Rp20,34 juta dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga mencapai Rp27,44 juta pada Tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan daya beli masyarakat, yang dapat diindikasikan sebagai dampak dari perbaikan ekonomi daerah pasca pandemi, peningkatan pendapatan, serta aktivitas ekonomi yang kembali menggeliat. Pertumbuhan konsumsi ini juga mencerminkan peranan penting konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama dalam struktur

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Temanggung menurut pengeluaran.

Pergerakan perubahan dan rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita tahun 2025 pola tren yang terus meningkat menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah. Peningkatan konsumsi ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, seperti pemberdayaan UMKM, pengendalian inflasi, serta perlindungan daya beli masyarakat. Selain itu, tren ini juga penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan ketimpangan konsumsi antar kelompok masyarakat agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar inklusif.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberi akses pada tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 259
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025*
Panjang Jalan Kabupaten (km) ¹⁾	650,467	650,467	650,467	650,467	650,467
Jumlah Kendaraan (unit) ²⁾	317.240	329.839	338.428	352.736	352.736
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,00205	0,00197	0,00192	0,00184	0,00184
Jumlah kendaraan per 1 km (unit kendaraan/km)	488	507	520	542	542
Keterangan: *Data Sementara					

Sumber: ¹⁾DPUPR Kabupaten Temanggung, 2025
²⁾BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2025, yaitu dari 0,00205 menjadi 0,00184. Penurunan ini terjadi karena jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya. Panjang jalan yang diperhitungkan merupakan jalan kewenangan kabupaten atau belum termasuk kewenangan provinsi maupun nasional. Nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan

belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Sedangkan berdasarkan pelayanannya, dalam 1 km jalan kabupaten di Temanggung, jumlah kendaraan yang dilayani terus meningkat dari 488 unit pada tahun 2021 menjadi 542 unit pada tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan tekanan terhadap infrastruktur jalan seiring bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya. Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya penambahan panjang jalan atau peningkatan kapasitas jalan, maka risiko terjadinya kemacetan, penurunan kualitas jalan, serta menurunnya efisiensi mobilitas masyarakat dan distribusi barang akan semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas jalan, pembangunan jalan alternatif, penguatan manajemen lalu lintas, serta kebijakan pengendalian pertumbuhan kendaraan, guna menjaga kualitas pelayanan jaringan jalan yang ada.

2. Perkembangan Pelanggan Listrik

Perkembangan pelanggan listrik merupakan indikator penting dalam mengukur kebutuhan dan pemanfaatan energi di suatu daerah. Data pelanggan dan daya terpasang mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi yang berdampak pada konsumsi listrik. Kebutuhan energi listrik Kabupaten Temanggung dilayani melalui Unit Layanan Pelanggan Temanggung dan Unit Layanan Pelanggan Parakan. Adapun perkembangan pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 260
Perkembangan Pelanggan Listrik di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pelanggan listrik	234.737	240.996	247.229	253.791	258.606
2	Daya Terpasang	231.528.442	247.325.429	260.890.550	271.462.000	283.961.650
3	Rata-rata Daya VA per Pelanggan	949,91	1.026,26	1.055,26	1.069,63	1.098,00

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025

Data perkembangan pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Perkembangan pelanggan listrik di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren meningkat dari 234.737 pelanggan pada Tahun 2021 menjadi 258.606 pelanggan pada Tahun 2025 mengalami peningkatan pelanggan sebesar 23.869 dalam lima tahun. Sejalan dengan itu, daya terpasang juga meningkat dari 231 juta VA menjadi lebih dari 284 juta VA, sementara rata-

rata daya per pelanggan naik dari 949,91 VA menjadi 1.098,00 VA. Peningkatan ini mencerminkan tidak hanya bertambahnya jumlah pelanggan, tetapi juga meningkatnya konsumsi listrik per pelanggan, yang menunjukkan pertumbuhan kebutuhan energi seiring dengan dinamika aktivitas rumah tangga, ekonomi, dan sosial masyarakat. Tren ini mengindikasikan pentingnya penguatan infrastruktur kelistrikan dan perencanaan kebutuhan energi yang adaptif guna menjamin keandalan dan keberlanjutan pasokan listrik di masa mendatang.

3. Ketaatan terhadap RTRW

Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang merupakan indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan tertib tata ruang. Tingkat kesesuaian ini mencerminkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang serta kepatuhan terhadap peraturan perencanaan wilayah di Kabupaten Temanggung. Adapun persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 261
Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Luasan KKPR yang disetujui (hektar)	NA	NA	NA	NA	45,70
2	Luas KKPR yang diajukan (hektar)	NA	NA	NA	NA	46,61
3	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang	NA	NA	NA	NA	98,05

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2026

Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mencapai 98,05%. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan kebijakan tata ruang, yang didukung oleh pengendalian yang efektif serta implementasi perencanaan ruang yang lebih tertib.

4. Luas Kawasan Peruntukan Industri

Iklim investasi daerah sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan penataan ruang yang menentukan alokasi lahan untuk kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Temanggung, kebijakan pembangunan wilayah lebih difokuskan pada penguatan sektor pertanian, yang tercermin dari proporsi kawasan peruntukan industri yang sangat kecil dibandingkan luas

kawasan budidaya. Adapun luas wilayah industri di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 262
Luas Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025
1	Luas Kawasan Peruntukan Industri (hektar)	990,95
2	Luas Kawasan Budidaya (hektar)	82.753,97
3	Rasio	0,0119

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2044, 2025

Luas kawasan peruntukan industri di Kabupaten Temanggung sebesar 990,95 hektar, dibandingkan dengan luas kawasan budidaya yang mencapai 82.672 hektar. Rasio kawasan industri terhadap kawasan budidaya sebesar 0,0119 menunjukkan bahwa proporsi lahan untuk kegiatan industri masih sangat kecil. Kecilnya proporsi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Temanggung yang hanya sebesar 990,95 hektar dibandingkan luas kawasan budidaya sebesar 82.672 hektar, dengan rasio 0,0119, mencerminkan orientasi pembangunan wilayah yang masih kuat pada sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang diarahkan untuk mewujudkan ruang berbasis pertanian yang didukung oleh sektor industri dan pariwisata dalam satu kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan industri dilakukan secara selektif dan terintegrasi untuk mendukung sektor utama tanpa mengorbankan keberlanjutan lahan budidaya dan keseimbangan lingkungan.

5. Akses Pelayanan Air Minum Kabupaten Temanggung

Pelayanan air minum di Kabupaten Temanggung diselenggarakan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung (PDAM) untuk kawasan perkotaan, serta oleh berbagai sistem penyediaan air minum (SPAM) Non-PDAM untuk wilayah pedesaan. Berdasarkan jenis akses, air minum layak mencakup sumber seperti ledeng meteran PDAM, ledeng eceran, keran umum, hidran umum, terminal air, penjual eceran, penampungan air hujan, mata air terlindungi, sumur terlindung, dan sumur bor/pompa. Sementara itu, air minum aman harus memenuhi prinsip 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan), dengan kualitas air yang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, dan jenis akses yang diakui sebagai aman antara lain adalah pelanggan PDAM dan program Pamsimas. Perbedaan antara akses layak dan aman ini penting dalam menilai tingkat pelayanan

air minum yang tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga aman untuk dikonsumsi dan berkelanjutan.

Cakupan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung diselenggarakan melalui penyediaan air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan. Adapun capaian akses air minum layak Kabupaten Temanggung sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 263
Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak (KK)	254.563	257.570	260.833	268.376	236.669
2	Jumlah rumah tangga (KK)	269.331	270.220	271.854	274.845	274.845
3	Persentase (%)	94,52	95,32	95,95	97,65	86,11%

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2025

Capaian akses air minum layak di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun mengalami penurunan pada tahun 2025. Pada tahun 2025 akses air minum layak Kabupaten Temanggung turun mencapai 86,11%. Hingga Tahun 2025, persentase rumah tangga dengan akses air minum aman di Kabupaten Temanggung menggunakan basis data yang bersumber dari jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebagai operator yang telah memenuhi kriteria air minum aman di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar capaian akses air minum di Kabupaten Temanggung merupakan jaringan perpipaan pedesaan yang dikelola oleh KPSPAM, yang mana dalam pengelolaannya belum semua KPSPAM yang rutin dalam melakukan pengujian kualitas air minum sehingga belum dapat memenuhi kriteria Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 264
Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pelanggan PDAM (KK)	46.963	48.430	49.986	52.656	53.405
2	Jumlah KK Kabupaten Temanggung	270.220	271.854	274.677	276.110	277.775
3	Persentase (%)	17,38	17,81	18,20	19,07	19,23

Sumber: RISPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2037 (data diolah)

Berdasarkan data hingga Tahun 2025, persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Temanggung mencapai 19,23%, menunjukkan peningkatan bertahap sejak Tahun 2021. Kenaikan ini didukung oleh bertambahnya jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung sebagai operator utama yang telah memenuhi kriteria air minum aman sesuai regulasi. Meskipun demikian, cakupan layanan masih tergolong rendah karena sebagian besar jaringan perpipaan berada di wilayah pedesaan dan dikelola oleh KPSPAM yang belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas air minum aman berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

6. Konservasi Energi Daerah

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya untuk melakukan efisiensi energi yang diwujudkan dalam pelaksanaan manajemen penggunaan listrik khususnya di lingkungan perkantoran yang diimplementasikan melalui himbauan kepada seluruh ASN untuk lebih bijak dalam penggunaan alat-alat listrik di kantor dan kolaborasi dengan pihak ketiga salah satunya yaitu penandatanganan kerjasama dengan PT Semen Indonesia dalam rangka pemanfaatan bahan bakar alternatif yang bersumber dari sampah perkotaan atau *Refuse-Derived Fuel* (RDF).

7. Perkembangan Hotel

Perkembangan sektor perhotelan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan industri pariwisata di suatu daerah. Jumlah hotel yang tersedia mencerminkan kapasitas daerah dalam menyediakan akomodasi bagi wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun perkembangan hotel di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, 2026

Gambar 2. 64
Jumlah Hotel di Kabupaten Temanggung 2021–2025

Jumlah hotel di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 17 unit pada tahun 2024 menjadi 20 unit pada Tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya perkembangan sektor pariwisata dan meningkatnya kebutuhan akomodasi di daerah tersebut. Peningkatan jumlah hotel tidak hanya memperluas kapasitas penampungan wisatawan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan bertambahnya hotel, pendapatan daerah diharapkan meningkat sekaligus mendorong kemajuan industri pariwisata yang lebih berkelanjutan.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah sangat berperan dalam meningkatkan daya saing daerah, karena mampu menarik pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keamanan, regulasi perpajakan dan retribusi, serta dukungan kebijakan daerah. upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dilakukan melalui pengendalian angka kriminalitas, penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, serta penyusunan peraturan daerah (perda) yang mendukung kemudahan berusaha.

1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan indikator yang mencerminkan situasi keamanan dan ketertiban suatu daerah, yang secara langsung memengaruhi iklim investasi dan kualitas hidup masyarakat. Adapun angka

kejahatan di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 265
Angka Kriminalitas di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kasus Narkoba	26	33	29	46	47
2	Jumlah kasus Pembunuhan	2	2	0	2	0
3	Jumlah Kejahatan Seksual	10	6	7	3	13
4	Jumlah kasus Penganiayaan	0	6	13	13	16
5	Jumlah kasus Pencurian	30	28	34	34	38
6	Jumlah kasus Penipuan	10	9	11	19	15
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	1	0	0	0	0
8	Jumlah Tindak Kriminal lainnya	-	-	-	30	25
9	Total Jumlah Tindak Kriminal ²⁾	79	84	98	147	154
10	Jumlah Penduduk	800.429	801.267	816.858	822.880	821.118
11	Angka Kriminalitas (%)	9,87	10,48	12,00	17,86	18,75

Sumber: ¹⁾ BNN Kabupaten Temanggung, 2025
²⁾ Polres Temanggung, 2025
³⁾ Dindikcapil Kabupaten Temanggung, 2025

Angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung menunjukkan fluktuasi selama periode 2021–2025, dengan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2025, dari 79 kasus pada 2021 menjadi 154 kasus pada 2025, yang merupakan jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut didominasi oleh lonjakan kasus narkoba dan pencurian. Jika dilihat dari rasio terhadap jumlah penduduk, angka kriminalitas pun naik dari 17,86% pada 2024 menjadi 18,75% pada 2025, menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan yang perlu segera direspon oleh pemangku kebijakan.

2. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi merupakan salah satu indikator penting dalam mencerminkan kapasitas fiskal serta iklim investasi di suatu wilayah. Adapun jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 266
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1)	Pajak Daerah	52.832.020.942	58.425.439.009	74.947.290.400	76.926.746.042	139.695.644.317
	Pajak Hotel	165.229.973	160.983.816	220.000.000	446.319.043	534.936.538
	Pajak Restoran	2.125.018.457	1.651.644.422	2.432.290.400	3.500.807.350	5.632.060.471
	Pajak Hiburan	14.158.750	78.310.150	75.000.000	89.703.136	173.305.370
	Pajak Reklame	832.726.326	515.450.117	750.000.000	1.056.546.053	920.143.725
	Pajak Penerangan Jalan	17.219.779.238	15.727.797.110	21.000.000.000	25.411.461.890	24.933.830.963
	Pajak BPHTB	16.472.087.860	15.938.739.936	24.000.000.000	17.572.220.275	24.653.872.585
	Pajak Air Tanah	311.626.105	259.907.791	320.000.000	428.407.635	443.635.440
	Pajak Parkir	101.799.300	94.690.933	150.000.000	164.033.510	184.488.481
	Pajak Bumi dan Bangunan	15.589.594.933	23.997.914.734	26.000.000.000	28.257.247.150	29.832.767.244
	Opsen PKB	-	-	-	-	37.380.133.500
	Opsen BBNKB	-	-	-	-	13.097.524.000
2)	Retribusi Daerah	9.400.033.763	6.827.327.510	10.849.288.000	10.925.370.668	224.639.886.979
	Retribusi Jasa Umum	6.835.412.583	5.137.116.885	7.333.500.000	6.361.418.932	219.603.426.995
	Retribusi Jasa Usaha	1.077.724.500	970.705.050	1.514.200.000	2.651.495.850,	3.450.658.056
	Retribusi Perizinan Tertentu	1.486.896.680	719.505.575	2.001.588.000	1.912.455.886	1.585.801.928

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan, pada Tahun 2021 sebesar Rp52.832.020.942 naik menjadi 139.695.644.317di tahun 2025. Pajak daerah pada Tahun 2025 didominasi dari penerimaan Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sedangkan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp213.242.008.063,00 atau 3.352,11% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.361.418.932,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya perubahan akun pendapatan dari BLUD sebagai berikut:

- 1. Tahun 2024 Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD masuk pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- 2. Tahun 2025 Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD masuk pada akun Pendapatan Retribusi.

Sedangkan untuk Retribusi Jasa Tertentu tidak mencapai target atau kurang dari target sebesar Rp114.198.072,00 atau 6,72%.

3. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha merupakan peraturan daerah yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan usaha antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2044.

Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 267
Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha di
Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perkada yang mendukung Iklim Usaha	5	7	7	8	8

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Temanggung, 2025

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan regulasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan investasi dan kemudahan berusaha. Dengan bertambahnya Perda yang pro-investasi, diharapkan iklim usaha di Kabupaten Temanggung semakin menarik bagi pelaku bisnis dan mampu meningkatkan daya saing daerah secara keseluruhan.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan karena manusia sebagai objek dan subjek dalam pembangunan. Oleh karena itu, maka Pembangunan SDM diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, dan profesional. Disamping itu juga mampu

memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan.

Kualitas SDM memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM yang mampu meningkatkan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk

1. Kualitas Tenaga Kerja

Rasio lulusan pendidikan tinggi menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar potensi daerah dalam mengembangkan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil.

Tabel 2. 268
Rasio Lulusan Perguruan Tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lulusan perguruan tinggi (S1/S2/S3)	30.586	22.276	33.362	23.739	25.676
2	Jumlah Penduduk	800.429	801.267	816.858	822.880	826.710
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,0382	0,0278	0,0408	0,0288	0,0311

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Rasio lulusan perguruan tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2025, rasio lulusan perguruan tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 0,0311, yang berarti hanya sekitar 3,11% dari total penduduk yang berpendidikan tinggi. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 meningkat 0,0023 atau 0,23%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesadaran masyarakat untuk pentingnya mendapatkan pendidikan tinggi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan, seperti peningkatan ketersediaan beasiswa, kemitraan dengan perguruan tinggi, serta penguatan dukungan pendidikan untuk meningkatkan jumlah lulusan berpendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang menggambarkan tingkat beban penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Indikator ini penting dalam menilai

sejauh mana penduduk usia produktif mampu menopang kebutuhan hidup kelompok usia anak-anak (<15 tahun) dan lanjut usia (>64 tahun). Perubahan rasio ketergantungan mencerminkan dinamika struktur penduduk yang berdampak langsung terhadap perencanaan pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Adapun rasio ketergantungan di Kabupaten Temanggung tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 269
Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	242.247	245.629	251.991	250.380	251.525
	• Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	177.988	166.385	176.555	167.985	163.668
	• Jumlah Penduduk usia >64 tahun	64.267	79.244	75.434	82.395	87.857
2	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	553.309	561.811	565.492	570.356	573.516
3	RasioKetergantungan (%)	43,78	43.72	44.56	43.89	43.85

Sumber: *Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2025*

Selama periode 2021 hingga 2025, struktur rasio ketergantungan di Kabupaten Temanggung bergerak secara fluktuatif tetapi cenderung stabil, dengan rentang nilai antara 43,72% hingga 43.85%. Variasi ini menunjukkan bahwa beban penduduk usia produktif dalam menopang penduduk usia tidak produktif belum mengalami perubahan yang berarti sepanjang lima tahun tersebut. Jumlah penduduk usia tidak produktif terus meningkat, dari 242.247 jiwa pada Tahun 2021 menjadi 251.525 jiwa pada Tahun 2025, dipengaruhi oleh pertumbuhan baik pada kelompok usia di bawah 15 tahun maupun kelompok lansia di atas 64 tahun.

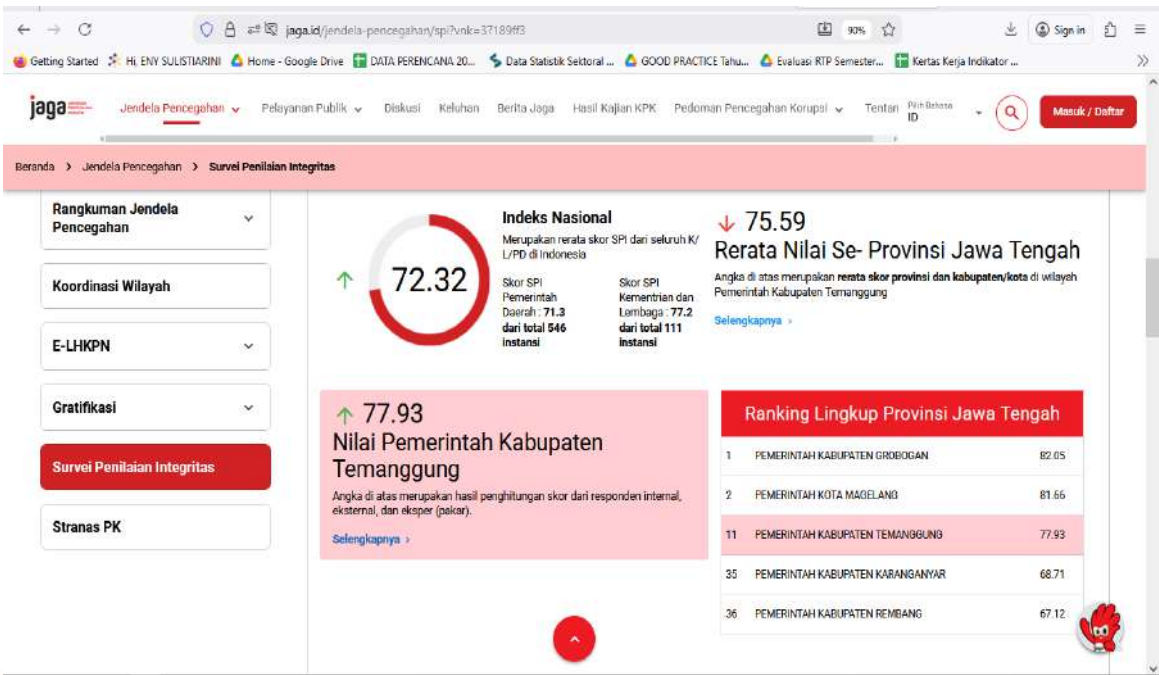
Peningkatan yang cukup menonjol terjadi pada kelompok usia lansia, seperti terlihat pada tahun 2023 hingga 2025, ketika jumlah penduduk berusia di atas 64 tahun bertambah dari 75.434 jiwa menjadi 80.031 jiwa. Kondisi ini memberikan kontribusi terhadap naiknya rasio ketergantungan pada tahun 2025 menjadi 43.85%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 44 penduduk usia tidak produktif. Di sisi lain, penduduk usia produktif memang masih mendominasi dengan kisaran 553.309–573.516 jiwa, namun dominasi tersebut belum cukup untuk menurunkan beban ketergantungan secara konsisten.

3. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Penilaian Integritas. Survei Penilaian Integritas (SPI)

merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penentuan bobot pada masing-masing perspektif, dimensi, hingga variabel dalam survei dihitung menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) yang ditetapkan pada 2021. Metode PCA digunakan sekaligus untuk melihat pengelompokkan variabel yang ditanyakan ke dalam satu dimensi yang sama. Pembobotan menggunakan PCA memiliki keunggulan, yaitu bobot yang terbentuk berasal dari distribusi data itu sendiri dengan melakukan perhitungan korelasi antar-variabel. PCA lebih tepat digunakan untuk menganalisis multivariat yang komprehensif, karena dapat mengukur seberapa penting sebuah variabel dan dimensi relatif terhadap variabel dan dimensi lainnya.

Pada Tahun 2025 KPK Republik Indonesia telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas pada Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan hasil skor 77,93, masuk pada kategori waspada, menempatkan Kabupaten Temanggung Peringkat ke 3 se-Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Grobogan dan Kota Magelang. Secara nasional melebihi 5,61 diatas nilai Indeks Nasional (72,32) dan lebih besar 2,34 dibandingkan dengan nilai rata-rata se Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian survei penilaian disajikan pada gambar berikut.



Sumber: jaga.id

Gambar 2. 65
Hasil Penilaian Survey Penilaian Integritas
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Capaian kinerja Indeks Integritas Nasional Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 270
Capaian Indeks Integritas Nasional Tahun 2021-2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Integritas Nasional	78,71	77,37	76,08	76,91	77,93

Sumber: *jaga.id*

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Indeks Integritas Nasional angkanya fluktuatif dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025. Pada Tahun 2025 nilai Indeks Integritas Tahun 2025 mencapai 77,93 naik sebanyak 1.02 poin dari Tahun 2024.

Faktor penghambat tercapainya indikator Indeks Integritas Nasional antara lain:

1. Responden dipilih secara acak oleh KPK
2. Instrumen kuesioner yang diberikan kepada Responden terlalu panjang pertanyaannya dan jumlah terlalu banyak sehingga Responden enggan untuk menyelesaikan
3. Banyak dijumpai link palsu yang membuat Responden ragu-ragu untuk mengisi
4. Masih dijumpai oknum petugas pelayanan yang melakukan tindakan koruptif

Faktor Pendorong tercapainya indikator Indeks Integritas Nasional antara lain:

1. Telah memiliki regulasi terkait pengendalian korupsi
2. Telah memiliki Sekretariat Antikorupsi dan Penyuluh Antikorupsi
3. Telah melaksanakan sosialisasi Antikorupsi

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Indeks Integritas Nasional antara lain:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparansi serta peningkatan akuntabilitas yang lebih baik sebagai upaya memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Pimpinan organisasi untuk memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi pencapaian tujuan organisasi; dan
3. Melaksanakan sosialisasi antikorupsi kepada legislatif, eksekutif dan masyarakat secara masif.

2.1.5 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)

Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Temanggung sesuai pedoman SDI mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi hingga evaluasi. Penyelenggaraannya tersebut tidak terlepas dari proses diseminasi data yang telah didukung oleh infrastruktur digital melalui Portal SDI Kabupaten Temanggung yaitu <https://data.temanggungkab.go.id/>. Portal data daerah tersebut juga telah terintegrasi ke Portal SDI Nasional yaitu <https://data.go.id/>. Selain melalui Portal SDI, dalam mendukung terwujudnya Smart City Kabupaten Temanggung, proses penyelenggaraan SDI hingga level desa dan kelurahan telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Desa Digital yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung. Dukungan infrastruktur digital ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong setiap daerah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan publikasi hasil riset dan inovasi. Implementasi SDI Kabupaten Temanggung menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola data hingga sistem informasi penduduk berbasis digital dan terintegrasi. Pelaksanaan SDI telah diatur melalui berbagai peraturan seperti Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sesuai Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Selain itu, penyelenggaraan data juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik. Ketersediaan infrastruktur ini juga membuka peluang bagi Kabupaten Temanggung untuk mengembangkan platform riset berbasis data. Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Temanggung juga telah berpedoman pada beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP).

Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Temanggung berpedoman pada SOP diantaranya adalah :

1. SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. SOP Forum Data;
3. SOP Pengelolaan Bank Data Pembangunan;
4. SOP Perencanaan SDI;
5. SOP Pengumpulan Data;
6. SOP Verifikasi dan Validasi Data Statistik Sektoral;
7. SOP Analisis Data Statistik Sektoral, Analisis;
8. SOP Publikasi Statistik Sektoral;
9. SOP Diseminasi Data Statistik Sektoral;
10. SOP Dokumentasi Statistik Sektoral;
11. SOP Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
12. SOP Manajemen Hak Akses;
13. SOP Pengusulan Daftar data dan Data Prioritas;
14. SOP Pengusulan Penggunaan Kode;
15. SOP Permintaan Data Statistik Sektoral Referensi, dan
16. SOP Permintaan Data Selain.

SOP Satu data Indonesia Kabupaten Temanggung dalam kegiatannya juga mengacu pada Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung 2026 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/513 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terencana dan sinergi di tingkat pusat dan daerah. Tersedianya Daftar Data Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang ditetapkan pada Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/29 Tahun 2025 tentang Daftar data Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Dimana Data prioritas yang relevan telah terakomodir 100% dalam daftar data daerah Kabupaten Temanggung telah memiliki akun penyelenggara SDI pada portal SDI pusat. Portal data daerah melalui <https://data.temanggungkab.go.id/> telah terintegrasi dengan pada portal SDI pusat yaitu <https://data.go.id/>. Pemanfaatan data pada Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, baik dalam hal pelaksanaan, evaluasi, maupun pengendalian. Pemanfaatan data SDI untuk perencanaan Pembangunan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan, memudahkan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran

pembangunan, mendorong keterbukaan dan transparansi data, dan memungkinkan digunakan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Evaluasi penyelenggaraan SDI dilaksanakan pada seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mencakup pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian evaluasi penyelenggaraan SDI dilakukan secara berjenjang dan terstruktur mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data Leadership dengan rincian struktur penilaian setiap domain terdiri dari 9 (sembilan) aspek di mana masing-masing aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya untuk mendapatkan nilai indeks Satu Data Indonesia. Penilaian Satu Data Indonesia dilakukan N-1 yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Predikat indeks SDI dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 271
Predikat Indeks Satu Data Indonesia

Nilai	Predikat
0-30	Sangat Kurang
>30 – 50	Kurang
>50 - 70	Cukup
>70 - 90	Baik
>90 - 100	Sangat Baik

Sumber : Bappenas, Tahun 2025

Hasil penilaian Kabupaten Temanggung Tahun 2025 pada Tahun ukur 2024 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 23706/PA.05/12/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal penyampaian hasil evaluasi penyelenggaraan Satu data Indonesia Tahun 2024, dengan hasil tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 272
Nilai Domain dan Indeks SDI Kabupaten Temanggung Tahun 2025
Tahun Ukur 2024

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	92,25
2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	62,13
3	Domain Data Leadership	24%	84,82
Indeks Satu Data Indonesia			73,60

Sumber : Bappenas, Tahun 2025

Indeks SDI Kabupaten Temanggung Tahun 2025 pada Tahun Ukur Tahun 2025 capaian 73,60% dengan predikat BAIK. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 pada Tahun ukur 2023 dengan nilai 39,32

dengan predikat kurang nilai Indeks SDI lebih baik. Untuk nilai Indeks masing-masing aspek dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 273
Nilai Indeks Aspek SDI Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Predikat	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	8%	84,78
2	Aspek Kelembagaan	12%	97,22
3	Aspek Perencanaan	14%	48,53
4	Aspek Pengumpulan	12%	67,30
5	Aspek Pemeriksaan	14%	58,03
6	Aspek Penyebarluasan	16%	73,75
7	Aspek Pemanfaatan Data	12%	100
8	Aspek Pembiayaan	6%	75
9	Aspek Manajemen Data	6%	64,29

Sumber : Bappenas, Tahun 2025

Sedangkan untuk nilai indikator disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 274
Nilai Indikator SDI Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Predikat	Bobot	Nilai
1	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi Satu Data Indonesia	4%	100
2	Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat K/L/D	4%	69,57
3	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	2%	83,333
4	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat	3%	100
5	Persentase pemenuhan kriteria penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	5%	100
6	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia Data Indonesia	4%	100
7	Persentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal K/L/D	6%	100
8	Persentase Data Prioritas relevan yang telah diakomodasi dalam Daftar Data Daerah	8%	9,92
9	Persentase Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data ke alidata sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan	12%	67,30
10	Persentase Daftar Data dengan jenis data statistik yang memenuhi standar data statistik	2%	22,22
11	Persentase Daftar Data dengan jenis data spasial yang memenuhi standar data geospasial	2%	73,77
12	Persentase Daftar Data dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku	2%	19
13	Persentase Daftar Data dengan jenis data spasial yang memiliki metadata spasial sesuai dengan struktur dan format baku	2%	63,93
14	Persentase Daftar Data yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interoperabilitas)	2%	67,30
15	Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan dalam Forum SDI Pusat/ Rapat Dewan Pengarah/ arahan Presiden	2%	60
16	Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Daftar Data oleh Walidata	2%	100
17	Persentase pemenuhan kriteria kepemilikan akun Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Portal SD	4%	75

No	Predikat	Bobot	Nilai
18	Persentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan Portal SDI	4%	80
19	Persentase Daftar Data yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI	4%	40
20	Persentase pemenuhan kriteria penerapan manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D	4%	100
21	Persentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	3%	100
22	Persentase pemenuhan kriteria penurunan redundansi data lintas K/L/D melalui peran Koordinator Forum SDI tingkat K/L/D	5%	100
23	Persentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP	4%	100
24	Persentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam sub kegiatan yang sesuai	2%	25
25	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Satu Data Indonesia menjadi bagian dari Rencana Kerja K/L/D	4%	100
26	Persentase pemenuhan kriteria manajemen arsitektur data dan informasi	3%	100
27	Persentase pemenuhan kriteria manajemen basis data	3%	28,57

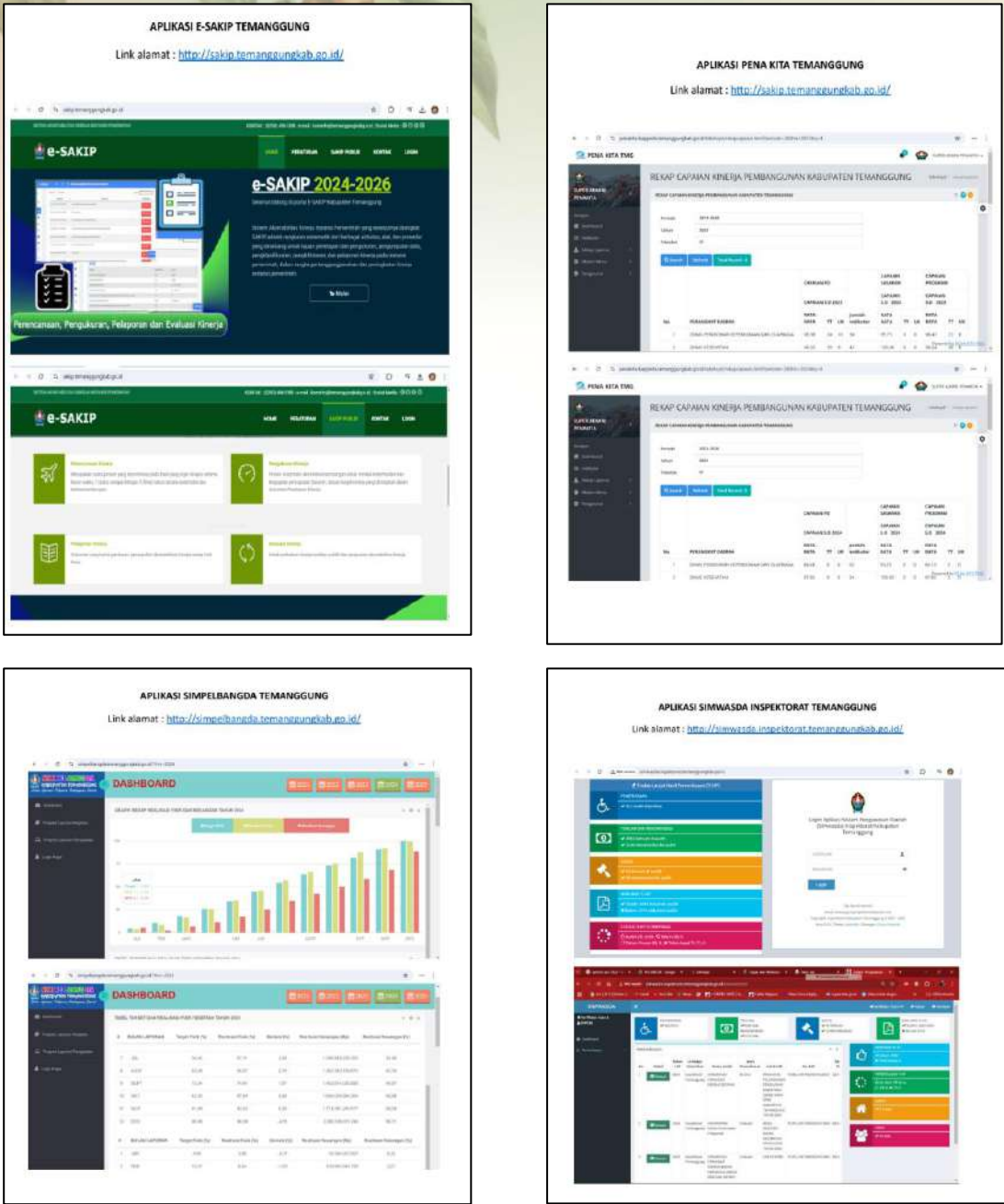
Sumber : Bappenas, Tahun 2025

2.1.6 Penyelenggaraan Pemantauan dan Pengendalian Pemerintah Daerah

Pemantauan dan Evaluasi dan pengendalian (monevdal) pemerintah daerah dilakukan melalui berbagai forum diantaranya dengan desk capaian kinerja pembangunan yang dilaksanakan setiap Triwulanan dan forum monev yang melibatkan berbagai jabatan dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor 048/001/2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan monevdal yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa sistem diantaranya E-Sakip, Pena Kita untuk capaian kinerja pembangunan daerah, Simpelbangda, Simwasda untuk pengendalian pengawasan, Ekinerja dan si Monev -kip. Sistem yang tersedia dapat diakses oleh internal dan *stakeholders* terkait serta melibatkan Perangkat Daerah dalam pengisian dan pelaksanaannya. Pelaksanaan monevdal dilaksanakan secara triwulan, semesteran dan tahunan oleh tim monevdal dan *stakeholders* yang terlibat. Pada bulan Januari 2026 Modul DALEV pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah disosialisasikan oleh Kemendagri sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan, peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi pembangunan

daerah, sejalan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.



Gambar 2. 66
Pemanfaatan Sistem Montoring Evaluasi dan Pengendalian
Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung

Aparat pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai tupoksi berada pada Inspektorat Kabupaten Temanggung. APIP mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/70/2024 Tentang Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, di mana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/ berkembang. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Temanggung diperkuat dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 712/56 Tahun 2024 tentang Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Salah satu wujud pelaksanaan SPIP terintegrasi di Kabupaten Temanggung adalah penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 700/028 Tahun 2024 Tentang Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2024-2026. Selain itu penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) beserta kegiatan monitoring dan evaluasinya dan pada tiap Perangkat Daerah juga menyusun dokumen RTP strategis dan RTP operasional Perangkat Daerah beserta monitoring dan evaluasinya. Regulasi yang menjadi pedoman pengendalian di Kabupaten Temanggung tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan SK SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan monev dal yang akuntabel maka Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan insentif maupun disinsentif bagi perangkat daerah, diantaranya dengan adanya Rapor Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah yang menjelaskan capaian kinerja yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan harapan untuk tahun berikutnya akan meningkatkan kinerja pencapaian target dan disinsentif terkait pengelolaan penganggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2025 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025. Insentif / Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung salah satunya diambil dari pelaksanaan (penginputan data) melalui sistem monev dal daerah yang telah digunakan.

Serta dalam rangka menurunkan kemiskinan di Kabupaten Temanggung terdapat forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 080/346

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 080/101 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) dan indikator kinerja Program pada tahun n-1 terhadap target RPJMD Tahun 2025 dengan mencantumkan kriteria penilaian realisasi kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun kriteria penilaian realisasi kinerja dengan menggunakan interval nilai realisasi kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 275
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

2.2.1 Evaluasi Kinerja Utama

2.2.1.1 Evaluasi Analisis Realisasi Kinerja Tujuan RPJMD

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian kinerja 3 indikator kinerja tujuan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 276
Capaian Indikator Kinerja Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Mewujudkan Masyarakat Temanggung yang Sejahtera, Partisipatif, Setara, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Mudah Mengakses Layanan Publik dan adanya Rasa Aman	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	4,75 - 5,28	5,66	100	Sangat Tinggi
		Tingkat Kemiskinan	Persen	8,67	7,95 -8,1	7,78	100	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,91	86,95	87,66	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 capaian rata-rata indikator kinerja tujuan RPJMD sebesar 100 % dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Penjelasan terkait peningkatan kinerja dari indikator kinerja utama (3 indikator), sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024. Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian 5,66%. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi 5,37% dan capaian Nasional 5,11% Kabupaten Temanggung lebih unggul. Sektor tersier masih menyumbang terbesar terhadap PDRB berdasarkan lapangan usaha dengan kontribusi 44,78% dan konsumsi rumah tangga menjadi motor utama dari sisi pengeluaran dengan kontribusi 71,09%

2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan capaian 7,78% mengalami penurunan positif yaitu 0,89 persen dibandingkan capaian Tahun 2024. Capaian kemiskinan Kabupaten Temanggung tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 9,4% maupun Nasional sebesar 8,47%.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di Garis Kemiskinan/GK) pada Maret 2025 sebesar 62,05 ribu jiwa, turun 6,72 ribu jiwa dibanding Maret 2024 yang sebanyak 68,77 ribu jiwa. Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp. 443.089,- per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp. 27.003,- bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2024 yang sebesar Rp. 416.086,-. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2025 sebesar 0,67 mengalami penurunan sebesar 0,30 poin jika dibandingkan Maret 2024 yaitu sebesar 0,97. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Pada Maret 2025 sebesar 0,10 mengalami penurunan sebesar 0,08 poin dibandingkan Maret 2024 yaitu sebesar 0,18.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 87,66 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah telah berada pada kategori baik dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Nilai ini mencerminkan adanya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan layanan, baik dari aspek prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, maupun sarana dan prasarana pendukung.

Peningkatan nilai IKM tersebut juga mengindikasikan bahwa upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui peningkatan standar pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga terbukti telah memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat. Meskipun demikian, capaian ini tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan terus menindaklanjuti masukan masyarakat, mempercepat inovasi pelayanan, serta memastikan konsistensi kualitas layanan di seluruh unit pelayanan publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga dan semakin meningkat.

2.2.1.2 Evaluasi Analisis Realisasi Kinerja Sasaran RPJMD

Evaluasi terhadap kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung diperlukan untuk mengetahui status ketercapaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Hal ini penting untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung telah dapat dicapai dan direalisasikan dengan baik atau belum. Sedangkan gambaran capaian kinerja tujuan daerah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 277
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,33	71,77	72,52	99,67	Sangat Tinggi
2.		PDRB per Kapita (Juta Rupiah /tahun)	Juta Rupiah	35,49	37,26	35,49	92,25	Sangat Tinggi
3.		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,35	2,30 – 2,17	2,31	99,57	Sangat Tinggi
4.	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	68,25	75,46	72,54	96,13	Sangat Tinggi
5.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing (%)	%	68,4	71,62	70,72	98,75	Sangat Tinggi
6.		Indeks Integritas Nasional	Angka	76,91	77,72	77,93	100	Sangat Tinggi
7.		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,13	86,13	87,27	100	Sangat Tinggi
8.	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini / Gini Rasio	Angka	0,383	0.382-0.370	0,356	100	Sangat Tinggi
9.	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,27	96,78	96,27	99,47	Sangat Tinggi
10		Indeks Harmoni	Angka	n.a	6,72	6,72	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA SASARAN							98,67	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator Sasaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 pada 10 indikator dengan capaian rata-rata kinerja 98,67 dengan skala penilaian Sangat Tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan. Ada 105 indikator terbagi pada 4(empat) aspek pada Indikator kinerja daerah diantaranya :

1. Aspek geografi dan demografi dengan 14 indikator;
2. Aspek kesejahteraan masyarakat dengan 46 indikator;
3. Aspek daya saing dengan 37 indikator; dan
4. Aspek pelayanan umum dengan 8 indikator.

Capaian indikator kinerja daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 278
Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Tahun 2025

NO	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	11,72	9,7	11,23	84.23	T
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	19,08	26,63	19,23	72,20	S
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita /Tahun	22,25	22,25	22,27	100	ST
4	Disparitas Harga	%	1,65	±10	0,3	100	ST
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	68,25	75,46	72.54	96.13	ST
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	690.921.63	793.727.99	709,905.71	89.44	T
7	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,11	8,06	0.80	24.88	SR
8	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah	%	32,98	33,34	33.84	100	ST
9	Cakupan pelayanan persampahan	%	74,39	76,12	76,47	100	ST
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	105,76	105,16	113.08	93	ST
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,6	0,61	100	ST
12	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,91	79,27	68.5	86.41	ST
13	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	89,43	89,73	89,87	100	ST
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,8	0,79	0,77	100	ST
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
15	Tingkat kemiskinan	%	8,67	7,95	7,78	100	ST
16	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	71,86	72,76	72,52	99.67	ST
17	Usia Harapan Hidup	tahun	75,94	76,06	76,16	100	ST
18	Jumlah kematian ibu	kasus	5	5	4	100	ST
19	Jumlah kematian balita	kasus	117	161	95	100	ST
20	Prevalensi Stunting	%	27,3	23,9	14,16	100	ST
21	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	na	60	61,54	100	ST
22	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,54	95,42	93,45	97.93	ST
23	Persentase kecamatan memenuhi syarat	%	na	10	55	100	ST

NO	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
	kesehatan lingkungan						
24	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	na	83,5	100	100	ST
25	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	%	87,6	87,8	87,97	100	ST
26	Net Death Rate (NDR)	per mill	20,36	20,3	18,48	100	ST
27	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	%	na	2,75	3,72	100	ST
28	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	66,31	74	68,83	86.04	T
29	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	81	86	80,70	93,84	ST
30	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	17,83	20,12	17,83	88,62	T
31	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,53	7,56	7,61	100	ST
32	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,62	12,88	12,63	98,06	ST
33	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun	Tahun	7.96* (angka sementara)	8	8.00	100	ST
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Sederajat dan SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional						
34	Literasi SD/Sederajat	Angka	60,77	61,48	62,48	100	ST
35	Literasi SMP/Sederajat	Angka	70,31	71,09	72,19	100	ST
36	Numerasi SD/Sederajat	Angka	45,83	48,19	54,33	100	ST
37	Numerasi SMP/Sederajat	Angka	62,26	63,55	63.53	99,97	ST
	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Nasional (Seluruh Jenjang) : (%)						
38	Literasi SD/Sederajat	%	76,67	77,23	73.84	95,61	ST
39	Literasi SMP/Sederajat	%	76,25	76,88	77,45	100	ST
40	Numerasi SD/Sederajat	%	69,43	70,55	72,29	100	ST
41	Numerasi SMP/Sederajat	%	71,26	72,05	75,08	100	ST
42	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,05	6,2	5,38	86,77	T
43	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	93,91	94,66	89,75	94,81	ST
44	Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun	%	98,87	98,89	98,41	99,51	ST
45	Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	31,37	44,19	35,97	81,40	T
46	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	100	100	ST
47	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	60,48	60,61	24.03	39.65	SR
48	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	angka	0,0038	0,05	0,1206	100	ST
49	Jumlah kejadian konflik SARA (IUP)	kejadian	8	8	2	100	ST
50	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	63,17	63,98	73	100	ST
51	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	54,78	57	86.15	100	ST
52	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	5,28	5,57	100	ST

NO	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
53	Indeks Pembangunan Gender	angka	96,27	96,78	96,27	99,47	ST
54	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,22	0,21	0,22	95,45	ST
55	Indeks Pemberdayaan Gender	angka	74,28	74,31	74,28	99,96	ST
56	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	Persen	n.a	100	100	100	ST
57	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	Angka	2,19	2,18	1,24	100	ST
58	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	35,49	37,26	35,49	95,25	ST
59	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	2,35	2,3	2,31	99,57	ST
60	Indeks Gini/ Gini Rasio	Angka	0,383	0,382	0,356	100	ST
III	ASPEK DAYA SAING						
61	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	1,01	1,83	1,44	78,69	T
62	Return on Asset (RoA) BUMD	%	3,23	4,19	3,23	77,09	T
63	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	2,16	2,23	2,14	95,95	ST
64	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,01	2,73	2,43	89.01	T
65	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,52	69,01	69.20	100	ST
66	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,55	2,6	2,62	100.77	ST
67	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	72,42	73	88.88	100	ST
68	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar	2,145	2,15	2,159,940,588,136	100	ST
69	Nilai Ekspor	US \$	140.188.854.73	121.419.372	110,071,498	90.65	T
70	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota	%	88,92	89,5	87.90	98.21	ST
71	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/ Kota	%	41,55	42,03	42.03	100	ST
72	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	angka	58,87	58,75	58,90	100	ST
73	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,31	96,37	96,70	100	ST
74	Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	90,52	91	94.24	100	ST
75	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	68,4	71,62	70.72	98.75	ST
76	Persentase desa mandiri	%	37,96	39,47	52,63	100	ST
77	Tingkat Inflasi (%)	%	1,52	1,5	1,52	100	ST
78	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	80	85	180	100	ST
79	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	44,76	46,99	15.15	100	ST
80	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan	%	9,09	15,1	46,99	100	ST
81	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	26,944	28,291	29677	100	ST
82	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	25,53	27,35	25,34	92.65	ST

NO	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
83	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,85	1,89	1.85	97.88	ST
84	Rasio PDRB Perdagangan	%	21,07	21,05	21,07	100	ST
85	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22,47	22,4	22,47	100	ST
86	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	Persen	2,69	2,75	2,71	98,66	ST
87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	%	78,06	78,1	77.77	99.58	ST
88	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	16,84	17,34	16,84	97,12	ST
89	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,22	0,48	0.48	100	ST
90	Persentase Pemuda Berprestasi	%	16,66	20	25.71	100	ST
91	Persentase Atlet Berprestasi	%	83,19	83,5	84,14	100	ST
92	Persentase Prestasi Olahraga	%	92,86	93,57	82.35	88.01	T
93	Persentase Wirausaha Muda	%	10,31	12	10,35	86,23	T
94	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	9,36	11	24,99	100	ST
95	Persentase Atlet Unggulan	%	n.a.	25	42.45	100	ST
96	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	n.a.	50	58,14	100	ST
97	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,8	0,81	0,8	98,77	ST
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM						
98	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,88	96,98	97.12	100	ST
99	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,91	77,72	77,93	100	ST
100	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	nilai	3,64	3,7	3,80	100	ST
101	Indeks pelayanan publik	angka	4,29	3,77	4,29	100	ST
102	Indeks reformasi birokrasi	angka	86,13	86,13	87,27	100	ST
103	Indeks kualitas kebijakan	angka	48,25	65	75.71	100	ST
104	Indeks Harmoni	angka	n.a	6,72	6,72	100	ST
105	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	86,91	86,95	87.66	100	ST
RATA-RATA CAPAIAN IKD						96.06	ST

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dengan capaian rata-rata kinerja 96,06% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dari 105 indikator diketahui bahwa 90 dengan skala peringkat kinerja sangat tinggi, 12 skala peringkat kinerja tinggi, 1 indikator skala peringkat kinerja sedang, 0 indikator skala peringkat kinerja rendah dan 2 indikator skala peringkat kinerja sangat rendah. Masih ada 2 (dua) indikator dengan skala penilaian kinerja sangat rendah yaitu :

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dengan faktor penghambat di antaranya adalah :

- a. Adanya perubahan indikator dan metode penghitungan IPLM
- b. Perpustakaan yang ada belum siap dengan data indikator baru
- c. Perhitungan rumus IPLM yang baru memang akan menunjukkan tren penurunan angka IPLM dari tahun sebelumnya
- d. Masih minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan
- e. Belum tercukupinya kebutuhan SDM Pustakawan di setiap perpustakaan

Upaya pencapaian target di antaranya adalah :

- a. Terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pengisian data perpustakaan yang benar
- b. Mendorong perpustakaan untuk mengadakan lebih banyak kegiatan literasi yang menarik bagi pemustaka
- c. Mendorong perpustakaan untuk melakukan inovasi di tengah efisiensi anggaran
- d. Mendorong perpustakaan untuk lebih banyak melakukan kerja sama antar perpustakaan

2. Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman, dengan faktor penghambat karena dipengaruhi adanya penyesuaian kriteria akses sanitasi aman sesuai ketentuan Bappenas pada hasil analisis Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah berupa pengusulan kegiatan penyediaan/ pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi.

2.2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Evaluasi kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain:

2.2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan terdiri dari 21 indikator kinerja IKUPD dan 30 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

Tabel 2. 279
Capaian Kinerja IKUPD Pemerintahan Bidang Pendidikan Pada Tahun 2025

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	73,00	73,83	73,45	99,49	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	88,80	88,94	89.17	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun	Tahun	7,96	8,00	8	100	Sangat Tinggi
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,56	7,61	100	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,88	12,63	98.06	Sangat Tinggi
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,05	6,20	5.38	96.77	Tinggi
3.	Meningkatnya kompetensi peserta didik dan kualitas satuan pendidikan	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	%	76,67	77,23	73,84	95,61	Sangat Tinggi
		Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional	%	76,25	76,88	77,45	100	Sangat Tinggi
		Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	69,43	70,55	72,29	100	Sangat Tinggi
		Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	71,26	72,05	75,08	100	Sangat Tinggi
		Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	60,77	61,48	62,48	100	Sangat Tinggi
		Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	70,31	71,09	72,19	100	Sangat Tinggi
		Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	45,83	48,19	54,33	100	Sangat Tinggi
		Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	angka	62,26	63,55	63,53	99,97	Sangat Tinggi
		Proporsi PAUD terakreditasi minimal B	%	77,78	80,00	88,46	100	Sangat Tinggi
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	99,13	100	98,85	98,85	Sangat Tinggi
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	94,52	95,00	96.39	100	Sangat Tinggi
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	69,23	73,07	78.26	100	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	93,91	94,66	89,75	94,81	Sangat Tinggi
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-15 tahun	%	98,87	98,89	98,41	99,51	Sangat Tinggi
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun	%	31,37	44,19	35,97	81,40	Tinggi

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RATA-RATA IKUPD							97.08	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian IKUPD sebesar 97.08% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Faktor pendorong tercapainya target kinerja diantaranya dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, Pengukuran Kinerja telah dilakukan, Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Tabel 2. 280
Capaian Kinerja Program Pemerintahan Bidang Pendidikan
Pada Tahun 2025

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	9
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	%	51,17	54,31	46.07	84.83	Tinggi
	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	%	60,31	62,28	55.63	89.31	Tinggi
	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	60,36	65,00	75.96	100	Sangat Tinggi
	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	56,64	61,34	64.00	100	Sangat Tinggi

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	9
	Persentase Pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	%	64,97	70,00	64.17	91.67	Sangat Tinggi
	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	%	86,21	86,37	90,00	100	Sangat Tinggi
	Persentase Pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	%	0	8,30	33,33	100	Sangat Tinggi
	Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	%	19,04	23,80	58.21	100	Sangat Tinggi
	Iklim Inklusivitas SD	Angka	52,08	53,19	53,25	100	Sangat Tinggi
	Iklim Keamanan SD	Angka	72,06	72,64	68,55	94,37	Sangat Tinggi
	Iklim Kebhinekaan SD	Angka	71,18	71,48	66,26	92,70	Sangat Tinggi
	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	56,79	57,15	57,16	100	Sangat Tinggi
	Iklim Keamanan SMP	Angka	69,11	69,76	67,69	97,03	Sangat Tinggi
	Iklim Kebhinekaan SMP	Angka	70,46	70,89	67,46	95,16	Sangat Tinggi
	Rasio Guru /Siswa SD	angka	1:14	01:28	01:14	100	Tinggi
	Rasio Guru /Siswa SMP	angka	1:12	1:32	01:17	100	Tinggi
	Rasio Guru /Siswa PAUD	angka	n.a	1:15	1:17	97.33	Sangat Tinggi
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	APK SD Sederajat	%	98,47	99,65	100,7	100	Sangat Tinggi
	APM SD Sederajat	%	92,01	92,56	95,49	100	Sangat Tinggi
	APK SMP Sederajat	%	109,75	100	103,5	100	Sangat Tinggi
	APM SMP Sederajat	%	86,57	86,61	84,03	97,02	Sangat Tinggi
	APM PAUD (5-6 tahun)	%	84,05	85,00	90,72	100	Sangat Tinggi
	Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	%	99,99	100	99,06	99,06	Sangat Tinggi
	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	Angka	320	293	399	63.82	Rendah
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	Angka	740	682	1038	47,80	Tinggi
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	Angka	933	855	1046	77,66	Tinggi
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	Angka	2855	2917	3168	91.40	Sangat Tinggi
	Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	Angka	276	248	181	100	Sangat Tinggi
	Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	Angka	305	280	230	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA					96.09	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja program pada Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 96.09 % dengan nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Masih ada indikator dengan peringkat kinerja rendah dan sangat rendah

yaitu :

1. Angka Putus Sekolah SD Sederajat dengan faktor penghambat diantaranya faktor kemiskinan, kurangnya akses dan masalah keluarga, kurangnya motivasi anak serta kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat. Data belum dilakukan verval lapangan sehingga kemungkinan data realisasi merupakan data akumulasi dari tahun sebelumnya. Upaya pencapaian kinerja diantaranya dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kurikulum dan metode pembejaran yang efektif ,meningkatkan akses fasilitas pendidikan yang memadai serta melibatkan ortu melalui komunikasi yang efektif.
2. Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat dengan faktor penghambat diantaranya masih terdapat siswa SD yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya pencapaian kinerja diantaranya akan dilakukan verval lapangan berkoordinasi dengan pemerintah desa.

2.2.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan terdiri dari 11 indikator IKUPD dan 42 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 281
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (DINKES)
Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Realisasi Tahun 2024
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	94,21	94,22	93,98	99,75	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	70,60	70,70	70,60	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,94	76,06	76.16	100	Sangat Tinggi
3.	Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	5	5	4	100	Sangat Tinggi
		Jumlah Kematian Balita	Kasus	117	161	95	100	Sangat Tinggi
		Prevalensi stunting pada balita	%	27,30	23,90	14,16	100	Sangat Tinggi
		Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	n.a	60	61,54	100	Sangat Tinggi
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,54	95,42	93.45	97.93	Sangat Tinggi
		Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	n.a	10	55	100	Sangat Tinggi
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari	%	n.a	83,5	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Realisasi Tahun 2024
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah						
4.	Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	%	n.a	2,75	3,72	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99.79	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 99.79% dengan nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja IKUPD Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 terdapat 11 indikator dengan kriteria sangat tinggi.

Kemudian, kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di RSUD terdiri dari 2 indikator IKUPD dan 10 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 282
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD)
Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Realisasi Tahun 2024
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	Angka	87,6	87,8	87,97	100	Sangat Tinggi
		Net Death Rate	%	20,3	20,3	18,48	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian IKUPD pada RSUD sebesar 100% dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Faktor pendorong tercapainya target kinerja di antaranya :

1. Tenaga medis yang kompeten dan profesional;
2. Ketersediaan obat dan alat medis yang memadai;
3. Sistem antrean dan pendaftaran online
4. Rekam medis digital dan sistem informasi rumah sakit (SIRS) yang terintegrasi;

- 5. Pimpinan rumah sakit yang proaktif dalam meningkatkan mutu layanan;
- 6. Adanya evaluasi dan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.
- 7. Kualitas SDM medis dan keperawatan yang kompeten dalam penanganan kasus kritis;
- 8. Ketersediaan fasilitas dan peralatan medis, dukungan ICU, ventilator, alat monitoring, dan sarana penunjang diagnostik yang memadai;
- 9. Penerapan sistem keselamatan pasien (*Patient Safety*);
- 10. Komunikasi efektif antara IGD, rawat inap, ICU, dan instalasi penunjang;
- 11. Pengawasan mutu klinis, adanya Komite Mutu dan Komite Medik yang melakukan audit dan evaluasi rutin terhadap kasus kematian.

Tabel 2. 283
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Dinkes)
Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Angka kematian bayi	Per 1.000 KH	11,84	11,84	11.55	100	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Neonatal	per 1.000 KH	8,24	8,24	8.02	100	Sangat Tinggi
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Prevalensi wasting balita	%	8,5	8	3,93	100	Sangat Tinggi
		Insiden Stunting balita (kasus baru)	%	5,3	4	1,51	100	Sangat Tinggi
		Persentase anemia pada ibu hamil	%	11,44	11,3	11,10	100	Sangat Tinggi
		Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	94.97	94.97	Sangat Tinggi
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	%	100	100	99.71	99.71	Sangat Tinggi
		Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	%	100	100	95.41	95.41	Sangat Tinggi
		Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	n.a	20	41.26	100	Sangat Tinggi
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	n.a	84	88.91	100	Sangat Tinggi
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	%	n.a	80	77.10	96.37	Sangat Tinggi
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	%	n.a	96,67	96,67	100	Sangat Tinggi
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	n.a	83	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	%	100	100	80.65	80.65	Tinggi
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		sesuai standar						
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	96.62	96.62	Sangat Tinggi
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Prevalensi Obesitas	%	15	15	8.77	100	Sangat Tinggi
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	%	65,38	69,23	100	100	Sangat Tinggi
		Insidensi Hepatitis B	per 100.000 penduduk	5,1	23	5.33	100	Sangat Tinggi
		Prevalensi kusta	per 10.000 penduduk	0,12	1	0,02	100	Sangat Tinggi
		Eliminasi Rabies	%	0	0	0	100	Sangat Tinggi
		Penurunan Angka Kematian Dengue	%	0,2	0,5	0	100	Sangat Tinggi
		Eliminasi Malaria	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	100	100	99.62	99.62	Sangat Tinggi
		Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	%	80	80	100	100	Sangat Tinggi
		Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	69,48	69,58	68.69	98.86	Sangat Tinggi
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis	%	75	50	91.89	100	Sangat Tinggi
		Persentase Desa /Kelurahan STBM	%	n.a	20	85.12	100	Sangat Tinggi
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	%	83,81	17,4	55.96	100	Sangat Tinggi
		Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	%	n.a	17	80	100	Sangat Tinggi
		Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	n.a	2,5	2,56	100	Sangat Tinggi
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1000 penduduk	2,5	2,24	2,35	100	Sangat Tinggi
		Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	n.a	60	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	n.a	54	54.29	100	Sangat Tinggi
		Persentase posyandu aktif bidang kesehatan	%	83	85	99.34	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99.20	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja program Dinas Kesehatan pada Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 99.20% dengan nilai peringkat kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja program Dinas Kesehatan sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2025 terdiri dari 40 indikator program dengan capaian sangat tinggi dan 2 indikator dengan capaian tinggi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong program pada Dinas Kesehatan, seperti :

1. Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung revitalisasi Posyandu; Adanya dukungan lintas sektor, seperti pemerintah desa, PKK, dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu; Tersedianya kader Posyandu yang aktif dan berdedikasi tinggi; sudah ada assesment kader, Integrasi kegiatan Posyandu dengan berbagai program kesehatan; Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengikuti kegiatan Posyandu dan menjaga keberlangsungan pelaksanaannya.
2. Penambahan kuota peserta PBI JK Kab. Temanggung oleh Kementerian Sosial.
3. Kepatuhan pembayaran iuran peserta PBPU dan BP (mandiri) dan PPU Badan Usaha.
4. Adanya Tim Gerak Cepat Puskesmas sehingga deteksi penyakit potensial KLB responsif.
5. Kabupaten Temanggung sudah dinyatakan Eliminasi Malaria pada tahun 2014 dan tidak ditemukan kasus penularan lokal selama 3 tahun terakhir.

Tabel 2. 284

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (RSUD)

Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	91,2 (Paripurna)	91,2 (Paripurna)	91,2 (Paripurna)	100	Sangat Tinggi
		Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target	%	80	80	60	75	Sedang
		Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	%	n.a	80	75	94	Sangat Tinggi
		Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target	%	n.a	82	100	100	Sangat Tinggi
		Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD	Nilai	93 (Peringkat AA)	93,5 (Peringkat AA)	93,5 (Peringkat AA)	100	Sangat Tinggi
		Persentase kecukupan SDMK sesuai standar	%	75	75	69.19	92.25	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar	%	n.a	80	84.22	100	Sangat Tinggi
		Persentase SDMk yang mendapatkan pelatihan	%	n.a	75	15.568	20.76	Sangat Rendah
		Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	n.a	70	83.33	100	Sangat Tinggi
		Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target	%	n.a	80	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							88.18	Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja program RSUD pada Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 88.18% dengan nilai peringkat kinerja tinggi. Masih ada indikator dengan peringkat kinerja sedang yaitu :

1. Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target dengan faktor penghambat diantaranya :
 - a. Keterbatasan SDM Medis;
 - b. Beberapa alat medis tidak berfungsi optimal atau rusak;
 - c. Komunikasi efektif belum berjalan optimal;
 - d. Variasi penerapan *Clinical Pathway* dan panduan praktik klinis (PPK).

Upaya pencapaian kinerja diantaranya :

- a. Program pelatihan dan seminar kedokteran berkelanjutan (*Continuing Medical Education*);
- b. Pelaksanaan kredensial dan re-kredensial dokter secara periodik oleh Komite Medis;
- c. Audit medis rutin triwulanan;
- d. Monitoring indikator mutu seperti LOS, BOR, *infection rate*, *readmission rate*, dan *patient complaint*;
- e. Pengadaan dan pemeliharaan alat diagnostik dan monitoring sesuai standar;
- f. Peningkatan kenyamanan ruang rawat jalan dan rawat inap;
- g. Revisi dan sosialisasi PPK;
- h. Monitoring kepatuhan pelaksanaan oleh Komite Medis;
- i. Penguatan komunikasi efektif (SBAR) antarprofesi;
- j. Sosialisasi budaya keselamatan dan pelaporan insiden tanpa hukuman (*no blame culture*);
- k. Pembentukan tim mutu klinis di rawat jalan dan rawat inap.

Selain itu, masih terdapat indicator dengan capaian sangat rendah

yaitu :

1. Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan dengan faktor penghambat diantaranya:
 - a. Beban kerja tinggi, terutama di unit pelayanan rawat inap, IGD, dan ICU. Petugas sulit meninggalkan unit untuk mengikuti pelatihan;
 - b. Keterbatasan Pelatihan Relevan di Wilayah;
 - c. Kurangnya Perencanaan Pengembangan SDM;
 - d. Motivasi Individu Rendah.

Upaya pencapaian kinerja diantaranya:

- a. Menyusun peta kebutuhan pelatihan (Training Need Assessment) tiap tahun berdasarkan jabatan dan unit kerja;
- b. Menetapkan prioritas pelatihan wajib sesuai kebutuhan akreditasi dan layanan unggulan RS;
- c. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan SDM dalam RBA BLUD;
- d. Memanfaatkan program pelatihan gratis dari Kemenkes, Dinkes, atau mitra;
- e. Mengikuti pelatihan online/*e-learning* untuk efisiensi waktu dan biaya;
- f. Menjalin kerja sama dengan universitas, asosiasi profesi, dan lembaga pelatihan resmi;
- g. Mendorong pelatihan in-house dengan narasumber internal atau eksternal;
- h. Mengatur jadwal rotasi sementara bagi staf yang mengikuti pelatihan agar pelayanan tetap berjalan;
- i. Monitoring dan Evaluasi.

2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 4 indikator IKUPD serta 16 indikator kinerja program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 3 indikator program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 285
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	85,60	85,65	85,98	100	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	73,75	73,80	75,80	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas infrastruktur urusan pekerjaan umum	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	%	55,79	62,12	61,00	98,20	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	%	53,43	61,81	57,56	93,13	Sangat Tinggi
RATA-RATA							97,83	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 pada indikator IKUPD memiliki rata-rata capaian sebesar 97,83% dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi. Pada indikator Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum faktor pendorong yaitu :

1. Ketersediaan program dan kegiatan PUPR yang terencana baik;
2. Dukungan anggaran pembangunan infrastruktur;
3. Koordinasi lintas bidang dan instansi;
4. Kapasitas teknis dan SDM yang memadai;
5. Dukungan masyarakat dan kebijakan daerah; serta
6. Partisipasi masyarakat.

Sedangkan pada indikator Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas, capaian kinerja turut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya:

1. Tersedianya dokumen RTRW dan RDTR yang diperbarui sehingga menjadi acuan pembangunan wilayah;
2. Dukungan kebijakan dan regulasi daerah terkait pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan;
3. Koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah dan instansi vertikal dalam perencanaan tata ruang;
4. Pemanfaatan sistem digital (SIMTARU) yang mempermudah monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang; serta

5. Peningkatan kapasitas SDM bidang penataan ruang melalui pelatihan dan pendampingan teknis.

Tabel 2. 286
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Periode Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	58,87	58,75	58,90	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	59,01	59,01	60,38	100	Sangat Tinggi
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	19,08	26,64	19,23	72,17	Sedang
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	19,08	26,63	19,23	72,20	Sedang
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kondisi baik	%	69,21	69,20	69,22	100	Sangat Tinggi
4.	Program penataan bangunan gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	n.a	80	86,94	100	Sangat Tinggi
		Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	62,84	64,24	57,95	90,21	Sangat Tinggi
5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68,61	68,62	68,83	100	Sangat Tinggi
		Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional. Provinsi. dan Kabupaten	%	6,95	10,12	10,13	100	Sangat Tinggi
6.	Program Penyelenggara Jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	88,92	89,50	87,90	98,21	Sangat Tinggi
		Persentase jembatan dalam Kondisi baik	%	94,36	94,36	92,58	98,12	Sangat Tinggi
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	22,59	22,59	22,73	100	Sangat Tinggi
7.	Program Pengembangan Jasa konstruksi	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
8.	Program Penyelenggaraan Penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	90,18	90,28	98,46	100	Sangat Tinggi
		Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	%	16,67	33,34	16,67	49,99	Sangat Rendah
9.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,11	8,06	0,801	9,94	Sangat Rendah
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase jumlah TPS 3R	%	15,57	16,96	17,65	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							88,99	Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2025 sebanyak 19 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 88,99% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi. Meski rata-rata capaian memiliki peringkat kinerja Tinggi, masih terdapat indikator dengan peringkat kinerja Sangat Rendah, yaitu:

1) Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan

Capaian yang masih sangat rendah pada indikator persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan dipengaruhi oleh faktor kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta antar instansi terkait sering menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan dan persetujuan substansi RDTR. Selain itu dinamika kebijakan tata ruang dan sistem perizinan berusaha juga menyebabkan perlunya penyesuaian kembali terhadap dokumen RDTR yang sedang disusun. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja antara lain peningkatan koordinasi kepada sektor terkait dalam rangka pemenuhan data dan informasi geospasial untuk mendukung penyusunan RDTR, memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta melibatkan instansi teknis terkait secara aktif sejak tahap awal penyusunan untuk mempercepat proses persetujuan substansi serta penyesuaian terhadap kebijakan tata ruang terbaru dengan proaktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

2) Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Capaian cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman yang masih sangat rendah disebabkan karena adanya penurunan yang dipengaruhi adanya perubahan metode perhitungan sesuai ketentuan Bappenas pada hasil analisis Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja adalah pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi.

Selain terdapat indikator dengan peringkat kinerja Sangat Rendah, masih terdapat 2 indikator dengan peringkat kinerja Sedang yaitu Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman serta Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan. Faktor yang mempengaruhi capaian kedua indikator tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber air baku, permasalahan pendanaan, faktor

lingkungan, kesadaran masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber air baku, jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah, keterbatasan investasi dan anggaran, tingkat kehilangan air (non-revenue water) tinggi, serta kemampuan bayar masyarakat rendah.

2.2.3.4 **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 3 indikator IKUPD dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja pada tabel berikut.

Tabel 2. 287
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Periode Triwulan IV Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	78,14	78,50	85,67	100	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	71,90	74,50	74,9	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	70,83	71,70	71,11	99,18	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99,73	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 99,73% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor Pendorong tercapainya target kinerja pada indikator di atas antara lain:

- 1)

Dukungan anggaran DAK Bidang Sanitasi untuk penyediaan infrastruktur dasar seperti SPALD-S dan TPS 3R;
- 2)

Dukungan anggaran APBD dan CSR untuk kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025; serta
- 3)

Layanan penyedotan Lumpur Tinja.

Tabel 2. 288

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2.		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3.		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
4.	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,31	96,37	96,70	100	Sangat Tinggi
5.		Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,80	48,80	48,80	100	Sangat Tinggi
6.		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	64,70	66,88	68,38	100	Sangat Tinggi
7.		Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	79,82	79,93	78,79	98,57	Sangat Tinggi
8.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
9.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99,84	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada periode Tahun 2025 sebanyak 9 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 99,84% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong tercapainya target kinerja tersebut khususnya terkait rumah layak huni turut dipengaruhi adanya bantuan pembiayaan dari berbagai sumber pendanaan di antaranya Penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, usulan kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui APBN program BSPS, bantuan CSR serta bantuan Baznas.

2.2.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 indikator kinerja IKUPD dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 289

Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	n.a	80,61	81,82	100	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	72,90	73,00	73,00	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	84,14	84,14	Tinggi
3.	Meningkatnya Perda dan Perbup yang ditegakkan	Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100	91,89	91,89	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	76,63	76,63	Tinggi
RATA-RATA							90,53	Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja Program pada periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 90,53% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi. Meski demikian, terdapat 3 indikator yang mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dan belum dapat memenuhi target pada tahun 2025.

Tabel 2. 290

Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2025

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	100	13,49	13,49	100	Sangat Tinggi
		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase penegakan pelanggaran Perda/Perbup	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	50,65	100	48,08	48,08	Sangat Rendah
		Persentase layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	42,72	100	53,26	53,26	Rendah
		Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	%	100	100	0	0	Sangat Rendah
		Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	%	60,64	61,05	60,64	99,33	Sangat Tinggi
		Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi	%	2,39	3,08	5,88	100	Sangat Tinggi
		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							80,07	Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada Urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Tahun 2025 sebanyak 10 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 80,07% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi. Dari capaian tersebut masih terdapat 1 indikator dengan peringkat kinerja Rendah dan 2 indikator dengan peringkat kinerja Sangat Rendah. Indikator dengan peringkat kinerja Rendah yaitu Persentase layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Faktor penghambat yang mempengaruhi capaian indikator tersebut antara lain: kondisi geografi dan topografi wilayah Kabupaten Temanggung yang berupa daerah pegunungan, hambatan portal, jalan sempit, dan sebagainya; lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran; Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candirototo serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi serta terbatasnya sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing-masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja antara lain: 1)

peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar, serta menambah pos pemadam kebakaran di setiap WMK.

Sedangkan 2 indikator dengan peringkat kinerja Sangat Rendah adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Faktor penghambat yang mempengaruhi capaian indikator ini antara lain:

- a. Kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dalam kondisi kecepatan tinggi, berisi air dan jalan yang berliku, naik turun atau gelombang yang dapat membahayakan keselamatan orang yang ada di dalam kendaraan maupun yang berada di sekitar kendaraan damkar;
- b. Kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian;
- c. Kompetensi anggota damkar khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yang terbakar dan lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yang berbeda agar proses pemadaman dapat cepat, efektif dan efisien;
- d. Kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yang tidak memberi jalan untuk kendaraan damkar meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yang berkerumun di lokasi kebakaran yang menghambat pergerakan anggota dan kendaraan damkar dalam proses pemadaman;
- e. Kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, koneksi, nozel, dan lain-lain) yang sudah tua dan lapuk karena usia dan sering dipergunakan mengakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dan efisiensi seperti, selang yang bocor di beberapa titik, semprotan nozel tidak sempurna, dan sebagainya.

Upaya pencapaian kinerja adalah dengan memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran.

- 2) Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

Capaian pada indikator persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah hingga Triwulan IV Tahun 2025 tidak tercapai sama sekali atau 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran yang mendukung Pembentukan Kelompok Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Temanggung dan Tidak adanya anggaran Sarana Prasarana yang akan digunakan Kelompok Relawan (REDKAR) dalam menangani Kebakaran.

Urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 5 indikator kinerja IKUPD dan 5 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 291
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 (BPBD)

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	n.a	76,75	85,81	100	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	n.a	73,05	73,75	100	Sangat Tinggi
2.	Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Angka	105,76	105,16	105,76	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,60	0,61	100	Sangat Tinggi
		Persentase desa tangguh bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 pada BPBD dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong tercapainya target kinerja tersebut di antaranya : upaya mitigasi bencana yang meningkat di suatu daerah, aspek sumber daya manusia yang mencukupi, adanya peningkatan kapasitas pada daerah terutama di daerah rawan bencana, partisipasi masyarakat dan

lintas sektor serta stakeholder terkait dalam mitigasi dan pencegahan terhadap bencana. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana serta kesadaran daerah dalam meningkatkan mitigasi bencana yang ada sehingga meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. Di sisi lain, capaian pembentukan Desa Tangguh Bencana tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kelembagaan dan pemerintahan desa yang kuat. Komitmen pemerintah desa, terutama kepala desa dan perangkatnya, menjadi kunci dalam menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan terhadap bencana. Adanya regulasi pendukung seperti peraturan desa tentang penanggulangan bencana juga memperkuat dasar hukum pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.

Tabel 2. 292
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang
Penanggulangan Bencana Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada Urusan bidang penanggulangan bencana pada Tahun 2025 sebanyak 5 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong tercapainya target kinerja tersebut

di antaranya :

- 1) Capaian persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini meliputi dukungan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana informasi, partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam penyebaran informasi kebencanaan.
- 2) Faktor yang mendorong keberhasilan capaian indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah komitmen dan dukungan kelembagaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Peran BNPB dan BPBD sangat signifikan dalam menyusun kebijakan, panduan, serta melaksanakan program-program pencegahan dan kesiapsiagaan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Keberadaan regulasi seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontinjensi, dan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana menjadi landasan hukum yang kuat dalam memperluas cakupan layanan kebencanaan.
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana penyelamatan yang memadai menjadi faktor pendorong yang mempengaruhi capaian indikator persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Keberadaan peralatan seperti kendaraan evakuasi, perahu karet, tenda darurat, alat komunikasi, serta peralatan medis tanggap darurat berkontribusi besar terhadap efektivitas layanan penyelamatan. Dukungan logistik yang cepat dari BPBD juga memastikan kebutuhan dasar korban dapat segera terpenuhi.
- 4) Capaian indikator Persentase koordinasi penanganan pasca bencana dipengaruhi oleh faktor adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif. Forum koordinasi antara instansi pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi membantu mempercepat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Peran aktif pemerintah daerah dalam memimpin koordinasi lokal juga menjadi faktor penting dalam memastikan program pemulihan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
- 5) Adanya bantuan dan dukungan cepat dari pemerintah pusat maupun daerah, baik dalam bentuk pendanaan melalui Dana Siap Pakai (DSP)

BNPB maupun dukungan logistik dari instansi teknis terkait menjadi faktor pendorong pada pencapaian indikator persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana. Kecepatan respon dalam penyaluran bantuan tersebut menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan sementara di daerah terdampak.

2.2.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdiri dari 4 indikator kinerja IKUPD dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 293
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2025

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	86,71	87,00	89,98	100	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	67,80	70,00	78.20	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	84,06	84,065	91,44	100	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	68,12	68,13	82,87	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Triwulan IV tahun 2025 pada urusan bidang sosial dengan rata-rata sebesar 100 % dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dengan faktor pendorong adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN.

Capaian kinerja program urusan bidang sosial s.d Triwulan IV Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 294
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Pada Tahun 2025

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025(%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
4.	Program perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	%	86	97	97,22	100	Sangat Tinggi
5.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada Urusan bidang Sosial pada Tahun 2025 sebanyak 10 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong tercapainya target kinerja tersebut diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia PSKS yang ada tetap melaksanakan kegiatan dengan semangat dan sukarela;

2. Adanya dukungan antar pihak (Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas Sosial, Pemerintah Provinsi dan Kementerian Sosial);
3. Stakeholder terkait penanganan bencana di Kabupaten Temanggung mempunyai kerjasama yang baik sehingga saat terjadi bencana saling melengkapi untuk tindakan tanggap darurat kepada masyarakat mulai dari sarana, prasarana dan bantuan.

2.2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.2.4.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja terdiri dari 4 indikator IKUPD dan 12 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 295
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	86,7	86,71	86,71	100	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	72,55	72,8	72,55	99,66	Sangat Tinggi
3.		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	78,06	78,10 – 78,48	77,77	99,58	Sangat Tinggi
4.		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	54,78	57	87,57	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99,81	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 99,81% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk capaian kinerja program pada bidang Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 296
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	n.a.	1	91,67	100,00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		yang mengacu pada rencana tenaga kerja						
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	73,78	72,56	69,31	95,52	Sangat Tinggi
3.		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	82,32	81	97,06	100,00	Sangat Tinggi
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	40,78	36	60,40	100,00	Sangat Tinggi
5.		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	98,77	31	88,43	100,00	Sangat Tinggi
6.		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	n.a	36	68,44	100,00	Sangat Tinggi
7.		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	100	92	100,00	100,00	Sangat Tinggi
8.		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	%	68,52	69,01	69,20	100,00	Sangat Tinggi
9.	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	n.a	41	64,89	100,00	Sangat Tinggi
10.		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	79,67	70	74,05	100,00	Sangat Tinggi
11.		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	82,93	46	77,10	100,00	Sangat Tinggi
12.		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99,63	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Tenaga Kerja pada Tahun 2025 sebanyak 12 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 99,63% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Beberapa yang menjadi faktor pendorong adalah adanya kesadaran masyarakat tentang peran dinas yang cukup meningkat sehingga dinas mendapat kemudahan akses penyuluhan di tingkat desa

dan networking atau jejaring yang cukup baik dengan perusahaan sehingga pelaksanaan rekrutmen di Dinas meningkat. Hal tersebut juga berdampak pada minimnya perselisihan hubungan industrial yang dapat terjadi karena adanya kesadaran untuk saling menyelaraskan kepentingan semua pihak. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih banyak perusahaan masuk kategori mikro menengah yang tidak mewajibkan memberikan upah sesuai UMK sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pihak perusahaan menganggap fasilitas kesejahteraan pekerja merupakan beban tambahan biaya operasional.

2.2.4.2 **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 5 indikator IKUPD dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 297
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	67,3	71,65	71,65	100,00	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	85,18	85,20	85,29	100,00	Sangat Tinggi
3.		Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,22	0,21	0,22	95,45	Sangat Tinggi
4.		Indeks Pemberdayaan Gender	angka	74,28	74,31	74,28	99,96	Sangat Tinggi
5.		Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99,08	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 99,08 % dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk capaian kinerja program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 298

Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,22	9,21	10,49	100,00	Sangat Tinggi
2.		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,27	2,3	3,02	100,00	Sangat Tinggi
3.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
4.		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	5,6	5,39	5,6235	95,85	Sangat Tinggi
5.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	65,38	69,23	65,38	94,45	Sangat Tinggi
6.	Program Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	87,42	87,42	Tinggi
7.		Persentase terbentuknya DRPPA	%	2,42	2,47	6,57	100,00	Sangat Tinggi
8.	Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak	Angka	61,62	62,2	61,62	99,07	Sangat Tinggi
9.		Persentase pernikahan usia anak	%	0,124	0,105	0,049	100,00	Sangat Tinggi
10.		Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
11.		Rasio kasus kekerasan terhadap anak	Angka	9,37	8,93	8,79	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							98,50	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2025 sebanyak 11 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 98,50% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dari capaian tersebut, masih ada 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi yaitu pada indikator Kabupaten Layak Anak. Salah satu penyebab yang menghambat capaian indikator tersebut dikarenakan Belum semua kecamatan membentuk Forum Anak.

2.2.4.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan terdiri dari 4 indikator IKUPD dan 4 indikator kinerja program. Capaian kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sebagaimana secara lebih rinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 299
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	84,36	85,35	86,63	100,00	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	74,36	74,8	74,80	100,00	Sangat Tinggi
3.		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,91	79,27	68,50	86,41	Tinggi
4.		Prevalensi Ketidacukupan Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	11,72	9,7	11,23	84,23	Tinggi
RATA-RATA							92,66	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 92,66% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian tersebut salah satunya adalah adanya kesadaran masyarakat dalam hal pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Meski demikian, capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan capaian pada tahun 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya pemutakhiran pada indikator FSVA yang berimplikasi pada capaian IKP yang mengalami penyesuaian. Selain faktor teknis pengukuran, penurunan IKP tersebut juga turut dipengaruhi oleh faktor lain seperti pertumbuhan penduduk, keterbatasan SDA, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, serangan hama penyakit, keterbatasan teknologi. Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja indikator IKP antara lain meningkatkan capaian pada indikator Prioritas NCPR, prioritas protein hewani dan prioritas cadangan pangan yang memiliki status merah atau prioritas 1 dengan langkah-langkah antara lain meningkatkan produksi pangan, pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang yang dapat membantu meningkatkan akses pangan dan mengurangi biaya produksi, modernisasi irigasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan meningkatkan produktivitas pertanian, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, serta penanganan daerah rawan pangan.

Untuk capaian kinerja program urusan pemerintahan bidang pangan

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 300
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	%	100	100	98,63	98,63	Sangat Tinggi
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	89,43	89,73	89,87	100,00	Sangat Tinggi
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	%	100	100	93,10	93,10	Sangat Tinggi
RATA-RATA							97,93	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pangan pada Tahun 2025 sebanyak 4 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 97,93% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong capaian tersebut di antaranya dipengaruhi adanya peningkatan produksi pangan pokok dalam negeri melalui penggunaan teknologi pertanian yang efektif dan efisien ditambah dengan penggunaan benih unggul yang berkualitas dan produktif yang dapat meningkatkan hasil panen sehingga secara linier meningkatkan produksi pangan. Di sisi lain peningkatan pendapatan masyarakat serta kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memilih pangan sehingga bisa mengakses kebutuhan pangan dengan beragam dan bergizi serta ketersediaan pangan yang cukup dan beragam.

2.2.4.4 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, terdiri dari 3 indikator IKUPD dan 17 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 301
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.		Indeks Kualitas Air	Angka	59,63	74,17	74,71	100	Sangat Tinggi
2.		Indeks Kualitas Udara	Angka	87,44	85	77,23	90,86	Tinggi
3.		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2e q	690.921,63	793.727,99	709.905,71	89,44	Tinggi
RATA-RATA							93,43	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 93,43% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Meski demikian, indikator Indeks Kualitas Udara dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Capaian indikator Indeks Kualitas Udara selain tidak memenuhi target juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi adanya tambahan komponen dalam pengukuran IKU yaitu Parameter PM 2,5 sehingga menyebabkan adanya penyesuaian dan nilai IKU menurun.

Untuk kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 17 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 302
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2.		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	85,71	85,71	Tinggi
3.	Program Pengendalian Pencemaran	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	angka	46,81	60,02	60,15	100,00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							
4.		Luas Lahan kritis tertangani	Ha	NA	3,75	33,125	100,00	Sangat Tinggi
5.		Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,08	7,08	7,08	100,00	Sangat Tinggi
6.		Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Temanggung	%	NA	20,9	30,23	100,00	Sangat Tinggi
7.		Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	NA	15,7	15,7	100,00	Sangat Tinggi
8.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	73,61	74	81,70	100,00	Sangat Tinggi
9.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
10.		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
11.		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
12.	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	28,93	30,26	30,80	100	Sangat Tinggi
13.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
14.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
15.	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah	%	32,98	33,34	33,84	100	Sangat Tinggi
16.		Persentase sampah yang terkelola	%	62,91	63,27	63,28	100	Sangat Tinggi
17.		Cakupan Pelayanan persampahan	%	74,39	76,12	76,47	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99,15	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2025 sebanyak 17 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 99,15% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Masih terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sangat Tinggi yaitu indikator Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup. Hal ini disebabkan faktor prosedur dan kebijakan di mana adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebabkan dibutuhkan penyesuaian dalam regulasi dan pelaksanaan proses penerbitan Persetujuan Lingkungan. Selain itu, pengajuan permohonan persetujuan lingkungan dengan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Laboratorium Kesehatan Temanggung masih dalam proses perbaikan dokumen.

2.2.4.5 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 4 indikator IKUPD dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 303
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Nilai IKM Perangkat Daerah	%	85,15	86,69	86,91	100	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	74,8	80,6	80,60	100	Sangat Tinggi
3.		Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	98.52	98.52	99.71	100	Sangat Tinggi
4.		Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	na	89	94.64	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 304
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2025

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	97,17	97.18	99.53	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99.98	98.98	99.99	100	Sangat Tinggi
3.	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	%	70	70	70.87	100	Sangat Tinggi
		Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	31.05	31.2	31.94	100	Sangat Tinggi
		Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	na	11	46.15	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 sebanyak 5 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.4.6 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 4 indikator IKPUD dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 305
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Nilai IKM Perangkat Daerah	%	80,95	81,00	82,86	100	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat	Angka	70,00	70,09	71,75	100	Sangat

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Daerah						Tinggi
3.		Persentase Desa Mandiri	%	37.96	39.47	52,63	100	Sangat Tinggi
4.		Nilai Skor Indeks Desa	%	89.85	91.35	94.73	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						100.00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan kinerja program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 306
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penyelenggaraan penataan Desa	%	n.a	90	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama antar Desa	%	n.a	66.66	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Kerjasama Desa dengan pihak ketiga	%	n.a	66.66	80	100	Sangat Tinggi
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu	%	0	90	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	%	0	90	100	100	Sangat Tinggi
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	%	0	4,2	4.94	100	Sangat Tinggi
		Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	%	38.34	39.53	42.11	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2025 sebanyak 7 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.4.7 **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 3 indikator IKUPD dan 11 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 307
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	63.17	63.98	73	100	Sangat Tinggi
		TFR (Total Fertility Rate/ Angka Kelahiran Total)	Angka	2.19	2.18	1.24	100	Sangat Tinggi
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.8	0.79	0.77	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan kinerja program urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 308
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Program Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	angka	58.6	58.7	60.1	100	Sangat Tinggi
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	7,6	7,59	7,44	100	Sangat Tinggi
		Median usia kawin pertama (MUKP)	Angka	19,8	19,9	22	100	Sangat Tinggi
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19	%	9.48	9.32	4.01	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		th (ASFR 15-19 th)						
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	46.45	46.7	48.68	100	Sangat Tinggi
		Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern contraceptive (mCPR)	%	77,5	77,7	82.54	100	Sangat Tinggi
		Persentase KB pasca persalinan	%	54.42	57.4	52.09	90.75	Tinggi
		Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	14,88	15,22	15,57	100	Sangat Tinggi
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,53	45,56	50.23	100	Sangat Tinggi
		Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87.23	87.3	86.8	99.43	Sangat Tinggi
		Indeks lansia berdaya	angka	57.83	57.9	75.9	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						99.11	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2025 sebanyak 11 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 99.11% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian pada Triwulan IV tahun 2025, terdapat 10 indikator dengan capaian sangat tinggi dan 1 indikator dengan capaian tinggi.

2.2.4.8 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan terdiri dari 5 indikator IKUPD dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 309
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Nilai IKM Perangkat Daerah	%	84,96	84,96	86,08	100	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	70,60	70,60	70,60	100	Sangat Tinggi
3.		Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	%	80.98	81.23	81.97	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.		Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	72.24	72.71	73.12	100	Sangat Tinggi
5.		Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	89.72	89.75	90.81	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat tinggi.

Sedangkan capaian kinerja program urusan perhubungan Triwulan IV disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 310
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	%	41.55	42.03	42.03	100	Sangat Tinggi
		Persentase pemasangan rambu – rambu lalu lintas	%	66.84	66.84	67.03	100	Sangat Tinggi
		Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	%	99.62	99.66	99.68	100	Sangat Tinggi
		Persentase penerapan jalan di Jalan Kabupaten	%	34.17	36.17	35.98	99.47	Sangat Tinggi
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	63.52	64,09	67.13	100	Sangat Tinggi
		Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	%	100	99.12	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Layanan Perhubungan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	%	89.17	35	87.99	100	Sangat Tinggi
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang	%	80	80	84.44	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		tersedia jaringan trayek						
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						99.95	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Perhubungan pada Tahun 2025 sebanyak indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 99.95% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.4.9 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 4 indikator IKUPD 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 311
Capaian IKUPD Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Nilai IKM perangkat Daerah	%	n.a.	79.9	88.59	100.00	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	71.5	74.2	74.2	100.00	Sangat Tinggi
3.		Indeks SIstem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3.64	3.7	3.8	100	Sangat Tinggi
4.		Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	4.46	4.5	4.39	97.56	Sangat Tinggi
	RATA-RATA						98.78	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 98.78% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian program pada urusan bidang komunikasi dan infrastruktur sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 312
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	85.29	85.5	85,29	99.76	Sangat Tinggi
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	100	100	556.30	100	Sangat Tinggi
		Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	100	90	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata Kelola dan layanan informasi komunikasi publik	%	n.a	15	28.74	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik secara elektronik	%	50.38	55	55.73	100	Sangat Tinggi
		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	90.52	91	94.24	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99.96	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025 sebanyak 7 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 99.96% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.4.10 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 4 indikator IKUPD dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 313
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	87,30	87,30	89,69	100,00	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	65,55	72,55	72,55	100,00	Sangat Tinggi
3.		Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	1,22	1,83	1,44	78,69	Tinggi
4.		Rasio Kewirausahaan daerah	%	2,1	2,73	2,43	89,01	Tinggi
RATA-RATA							91,93	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 91,93% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dari 4 indikator yang menjadi kinerja IKUPD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diketahui terdapat 2 indikator yang memiliki capaian dengan peringkat kinerja Tinggi dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB dan Rasio Kewirausahaan Daerah. Meski demikian, capaian kedua indikator tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian pada tahun 2024. Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat di antaranya masih terdapat koperasi yang tidak melakukan penyusunan laporan keuangan dan pelaporan ke Dinas terkait secara tertib serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam memberikan pendampingan lanjutan secara rutin terkait kewirausahaan.

Sedangkan untuk capaian indikator program urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 314
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan. pemeriksaan dan pembinaan	%	na	9,50	41,21	100,00	Sangat Tinggi
2.	Program Pendidikan	Persentase pendidikan	%	na	3,70	62,83	100,00	Sangat

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan Latihan Perkoperasian	dan pelatihan koperasi						Tinggi
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi. pendampingan usaha. kemitraan usaha. pengembangan kelembagaan. akses pembiayaan	%	na	0,15	0,239	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2025 sebanyak 3 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya koperasi sudah dapat melaksanakan self assesment (penilaian mandiri) sehingga JFPK hanya mengcroscek sudah sesuai dengan peraturan belum, serta terdapat dukungan dana Dekon dari Provinsi sehingga pelatihan bagi pengurus KDKMP dapat terlaksana.

2.2.4.11 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal terdiri dari 6 indikator IKUPD dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 315
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	92,27	93	94,2	100,00	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,3	79	81,5	100,00	Sangat Tinggi
3.		Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar	2,145	2,150	100,0	100,00	Sangat Tinggi
4.		Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	%	n.a	90	100	100,00	Sangat Tinggi
5.		Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN	Proyek	n.a	5.010	13.586	100,00	Sangat Tinggi
6.		Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP	Layanan	n.a	1	5	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Berdasarkan data di atas, Capaian kinerja IKUPD bidang pena 2025 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi capaian investasi tersebut antara lain adanya pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal UMR dan harga tanah yang kompetitif serta kondisi lingkungan yang kondusif dengan angka kriminalitas yang rendah. Sedangkan peningkatan capaian terkait layanan di MPP dipengaruhi faktor ketersediaan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan pasti serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan satu pintu sangat tinggi sehingga mendorong berkembangnya jumlah layanan yang disediakan. Sedangkan capaian program urusan bidang penanaman modal pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 316
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	%	n.a	90	100,0	100,00	Sangat Tinggi
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	70	90	100	100,00	Sangat Tinggi
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	%	n.a	90	100	100,00	Sangat Tinggi
4.		Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	n.a	90	100	100,00	Sangat Tinggi
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	%	n.a	90	100	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang penanaman modal pada tahun 2025 sebanyak 5 indikator program memiliki capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian program pada bidang penanaman modal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong di antaranya iklim investasi yang kondusif didukung dengan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak serta dukungan pelayanan berbasis online yang dapat diakses setiap waktu dan dimanapun sehingga mengurangi kesenjangan antara pemohon dengan penyedia layanan pada MPP. Hal tersebut turut didukung dengan adanya transformasi digital turut mendorong kemudahan dalam

pengelolaan data dan sistem informasi.

2.2.4.12 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 7 indikator IKUPD dan 5 indikator kinerja program penyelenggaraan pemerintah daerah. Capaian Indikator IKUPD pada bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 317
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.		Persentase pemuda berprestasi	%	16,66	20,00	25,71	100,00	Sangat Tinggi
2.		Persentase atlet berprestasi	%	83,19	83,50	84,14	100,00	Sangat Tinggi
3.		Persentase prestasi olahraga	%	92,86	93,57	82,35	88,01	Tinggi
4.		Persentase Wirausaha Muda	%	10,31	12,00	10,35	86,23	Tinggi
5.		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	9,36	11,00	24,99	100,00	Sangat Tinggi
6.		Persentase Atlet Unggulan	%	n.a.	25,00	42,45	100,00	Sangat Tinggi
7.		Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	n.a.	50,00	58,14	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							96,32	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 96,32% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dari capaian tersebut, terdapat 2 indikator kinerja yang memiliki peringkat kinerja Tinggi yaitu persentase prestasi olahraga dan persentase wirausaha muda. Faktor penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya capaian indikator tersebut adalah terbatasnya penyelenggaraan event olahraga serta belum optimalnya fasilitasi pelatihan dan pembinaan wirausaha muda dari Kabupaten Temanggung. Sedangkan capaian kinerja program urusan bidang kepemudaan dan olahraga pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 318
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	%	NA	2	1,85	92,40	Sangat Tinggi
2.		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	84,21	85	96,30	100,00	Sangat Tinggi
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	%	55	58	69,62	100,00	Sangat Tinggi
4.		Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	%	72,79	75	75,00	100,00	Sangat Tinggi
5.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	%	97,34	97,78	96,49	98,68	Sangat Tinggi
RATA-RATA							98,22	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2025 sebanyak 5 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 98,22% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Meski demikian masih terdapat 1 indikator dengan capaian yang belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu indikator persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya fasilitasi pelatihan dan pembinaan wirausaha muda dari Kabupaten Temanggung.

2.2.4.13 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Statistik terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 319
Capaian Kinerja IKUPD Pemerintahan Bidang Statistik Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	95.86	96	91.34	95.15	Sangat tinggi
RATA-RATA							95.15	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator IKUPD pada urusan bidang Statistik pada Tahun 2025 sebanyak 1 indikator program dengan

capaian rata-rata sebesar 95.15% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian kinerja program urusan bidang statistik s.d Triwulan IV disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 320
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	angka	39.32	40	73.6	100	Sangat Tinggi
2.		Ketersediaan data statistik sektoral	%	100	74	100	100	Sangat Tinggi
RATA - RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang statistik pada Tahun 2025 sebanyak 2 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorongnya adalah adanya aturan hukum, kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan SDI Kabupaten Temanggung yang sudah ditetapkan dan sudah berjalan serta adanya penetapan data prioritas di Kabupaten Temanggung sudah mempertimbangkan keberadaan data-data tersebut yang dihasilkan produsen data.

2.2.4.14 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 indikator IKUPD dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja indikator IKUPD sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 321
Capaian Kinerja IKUPD Pemerintahan Bidang Persandian
Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	nilai	3.1	3.2	3.5	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator IKUPD pada urusan bidang Persandian pada Tahun 2025 sebanyak 1 indikator program dengan

capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian kinerja program urusan bidang statistik s.d Triwulan IV disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 322
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	87.67	300	548	100	Sangat Tinggi
		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%		100	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Persandian pada Tahun 2025 sebanyak 2 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorongnya adalah Penetapan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2025 Tentang Sistem manajemen Keamanan SPBE yang mengatur tentang keamanan di bidang siber untuk mendukung peningkatan Indeks KAMI. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Perubahan regulasi untuk penilaian indeks KAMI yang sebelumnya menggunakan versi 4 diganti dengan indeks KAMI versi 5 yang menerapkan lebih banyak kontrol keamanan sesuai ISO 27001:2022 sehingga nilai indeks KAMI mengalami perubahan.

2.2.4.15 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan terdiri dari 4 indikator IKUPD dan 5 indikator kinerja program daerah dengan rincian capaian pada masing-masing indikator sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 323
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	90,15	90	92,38	100,00	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	68,65	70	70,9	100,00	Sangat Tinggi
3.		Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	9,09	15,1	15,15	100,00	Sangat Tinggi
4.		Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	44,76	46,99	46,99	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada tahun 2025 memiliki rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir pada tahun 2025 adalah 1.234 kelompok kesenian. Faktor yang menjadi pendorong dari indikator ini adalah banyaknya potensi kelompok seni di wilayah kabupaten Temanggung sehingga Dinbudpar terus berupaya untuk mendorong kelompok seni agar membuat register kebudayaan. Sedangkan faktor pendorong untuk capaian indikator Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan adalah kekayaan potensi Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Temanggung sehingga Dinbudpar terus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target pelestarian CB dan WBTB. Sedangkan untuk capaian indikator program Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 324
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	Obyek	1	1	1	100,00	Sangat Tinggi
2.		Jumlah Kelompok	Kelompo	10	10	10	100,00	Sangat

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.		Kesenian yang terdata	k					Tinggi
		Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	Orang	0	0	0	0,00	Sangat Rendah
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	26.944	28.291	29.677	100,00	Sangat Tinggi
5.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya	Obyek	3	3	9	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							80,00	Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Kebudayaan pada Tahun 2025 sebanyak 5 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 80,00% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi. Dari capaian tersebut, terdapat 1 indikator yang masih belum tercapai atau dengan capaian Sangat Rendah (0%) dikarenakan Pendataan Pelaku Budaya baru akan dimulai pada tahun 2026.

2.2.4.16 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan Bidang Perpustakaan terdiri dari 5 indikator IKUPD dan 3 indikator kinerja program. Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 325
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Nilai IKM Perangkat Daerah	%	80.86	80.88	81.848	100	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	69.70	69.72	69.70	100	Sangat Tinggi
3.		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	60.48	60.61	24.03	39.65	Sangat Rendah
4.		Tingkat Kegemaran Membaca	nilai	69.04	69.29	57.62	83.16	Tinggi
5.		Tingkat pemanfaatan perpustakaan	angka	0.0038	0.05	0.1206	100	Sangat rendah
RATA-RATA							87.13	Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah.

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 87.13% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi.

Sedangkan capaian indikator program Urusan Pemerintahan Bidang perpustakaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 326
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung di perpustakaan	%	n.a	20	50.24376	100	Sangat Tinggi
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	55.18	20	53.02	100	Sangat Tinggi
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional & Naskah Kuno	Persentase penelusuran naskah kuno	%	100	100	160	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Perpustakaan pada Tahun 2025 sebanyak 3 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong tercapainya program urusan perpustakaan, seperti:

1. Adanya kegiatan sosialisasi pendataan perpustakaan meningkatkan kesadaran perpustakaan dalam pelaporan Data Pokok Perpustakaan
2. Adanya layanan perpustakaan keliling yang pinjaman untuk perpustakaan yang kesulitan menambah koleksi baru di perpustakaanannya agar tetap dapat memberikan layanan sirkulasi kepada pemustakanya.

2.2.4.17 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan terdiri dari 2 indikator IKUPD dan 2 indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 327
Capaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	73.54	73.55	70.71	96.14	Sangat Tinggi
2.		Nilai pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten	Angka	59.57	59.58	67.87	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							98.07	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah.

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 98.07% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan capaian indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 328
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1.	Program pengelolaan arsip	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	55	60	60.57	100	Sangat Tinggi
		Persentase pembinaan kearsipan	%	n.a	73.33	73.33	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Kearsipan pada Tahun 2025 sebanyak 2 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.5 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Evaluasi kinerja urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut.

2.2.5.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang kelautan dan perikanan terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 4 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 329
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.		Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	22,25	22,25	22,27	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah

Sebagaimana Surat dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 22 Juli 2025 bahwa terdapat perubahan istilah Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM). Indikator Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) Kabupaten Temanggung belum dapat dihitung untuk evaluasi capaian pada tahun 2025, karena ditentukan target untuk indikator tersebut meskipun realisasi pada tahun 2025 sudah diketahui sebesar 11,98 kg/kap/tahun sehingga evaluasi dilakukan masih dengan menggunakan indikator Angka Konsumsi Ikan.

Capaian kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 dengan indikator sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong di antaranya meningkatnya kesadaran kesehatan karena banyak kampanye kesehatan menekankan pentingnya mengonsumsi ikan demi mendapatkan asupan gizi yang seimbang serta adanya kebijakan pemerintah terkait Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat turut mendorong peningkatan Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Temanggung. Di sisi lain perbaikan infrastruktur dan teknologi transportasi serta penyimpanan membuat ikan lebih mudah diakses di berbagai wilayah serta pengembangan teknologi budidaya ikan yang memungkinkan peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan laut turut mempengaruhi capaian indikator ini. Untuk capaian indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 330
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	140,12	140,15	140,18	100,00	Sangat Tinggi
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	10.670,41	10.670,94	10.671,40	100,00	Sangat Tinggi
3.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	%	na	10	28,57	100,00	Sangat Tinggi
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan ikan	ton	395,75	395,752	395,752	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang kelautan dan perikanan pada Tahun 2025 sebanyak 4 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100,00% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain penggunaan teknologi modern dapat membantu nelayan menemukan stok ikan dengan lebih efisien, penggunaan alat tangkap yang canggih dan efisien juga dapat meningkatkan hasil tangkapan, pemahaman, keterampilan dan pengalaman tentang lingkungan perairan maupun pengelolaannya serta dukungan investasi dan akses kredit yang memadai turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan budidaya. Selain itu regulasi perikanan yang bijaksana dan pemantauan yang ketat juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan stok ikan dan meningkatkan hasil tangkapan. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, subsidi, dan bantuan teknis dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya serta kerja sama dan jaringan pemasaran yang efektif yang dapat meningkatkan akses pasar dan harga jual produk perikanan budidaya turut menjadi faktor pendorong.

2.2.5.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata terdiri dari 4 indikator IKUPD dan 6 indikator kinerja program dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 2. 331
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,85	1,89	1,85	97,88	Sangat Tinggi
2.		Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	orang	n.a	605.500	639.616	100,00	Sangat Tinggi
3.		Jumlah Desa Wisata Aktif	desa	31	31	31	100,00	Sangat Tinggi
4.		Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	%	n.a	90	94,12	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99,47	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 99,47% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian pada indikator jumlah desa wisata yang aktif

dipengaruhi faktor pendorong yaitu adanya pelaksanaan monitoring desa wisata serta penyelenggaraan pertemuan Forum Komunikasi Desa Wisata. Sedangkan pada indikator persentase sub sektor ekonomi kreatif yang berkembang, faktor pendorong yang mempengaruhi adalah adanya pelaksanaan pendataan pelaku sub sektor ekraf secara insentif.

Tabel 2. 332
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitas	DTW	17	17	20	100,00	Sangat Tinggi
2.		Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	orang	0	500	598	100,00	Sangat Tinggi
3.	Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
4.		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	orang	80	85	180	100,00	Sangat Tinggi
5.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	orang	0	1	1	100,00	Sangat Tinggi
6.	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	orang	130	130	135	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang Pariwisata pada Tahun 2025 sebanyak 6 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100,00% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian terkait program pariwisata di Kabupaten Temanggung antara lain adanya kolaborasi dengan berbagai media serta penyelenggaraan event dan travel mart yang meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Temanggung. Sedangkan capaian terkait program pengembangan ekonomi kreatif dipengaruhi faktor pendorong yaitu adanya pendataan pelaku sub sektor ekraf secara insentif serta fasilitasi pengurusan Kekayaan Intelektual.

2.2.5.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terdiri dari 1 indikator IKUPD dan 21 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 333
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanian Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.		Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22,47	22,4	22,47	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada tahun 2025 dengan indikator Rasio PDRB Sektor Pertanian memiliki capaian sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran pertanian, peningkatan tenaga kerja sektor pertanian, peningkatan investasi dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) serta ekspor juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. Sedangkan untuk capaian indikator program urusan pemerintahan bidang pertanian sampai pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 334
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	ton/ha	6,149	6,15	6,09	99,02	Sangat Tinggi
2.		Produktivitas jagung	ton/ha	5,76	5,5	5,05	91,82	Sangat Tinggi
3.		Produktivitas bawang putih	ton/ha	7,3	6,05	7,163	100,00	Sangat Tinggi
4.		Produktivitas bawang merah	ton/ha	7,65	6,8	8,14	100,00	Sangat Tinggi
5.		Produktivitas cabai rawit	ton/ha	7,50	7	7,38	100,00	Sangat Tinggi
6.		Produktivitas cabai keriting	ton/ha	na	7	7,56	100,00	Sangat Tinggi
7.		Produktivitas tembakau	ton/ha	0,67	0,640	0,6719	100,00	Sangat Tinggi
8.		Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0,744	0,702	0,730	100,00	Sangat Tinggi
9.		Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0,55	0,4	0,560	100,00	Sangat Tinggi
10.		Jumlah produksi daging ternak besar	kg	na	806.130	1.160.527,20	100,00	Sangat Tinggi
11.		Jumlah produksi daging ternak kecil	kg	na	267.584	417.341,82	100,00	Sangat Tinggi
12.		Jumlah produksi ternak unggas	kg	na	6.230.875	6.537.554	100,00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.		Jumlah produksi telur	kg	na	6.860.985	8.888.810,54	100,00	Sangat Tinggi
14.		Persentase kelahiran pedet	%	48,3	48	64,15	100,00	Sangat Tinggi
15.		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	35,06	36,1	28,86	79,94	Tinggi
16.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan	%	100	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
17.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	%	97,43	85	99,44	100,00	Sangat Tinggi
18.		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	82,41	75	79,75	100,00	Sangat Tinggi
19.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	82	75	94,32	100,00	Sangat Tinggi
20.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	na	58	61,88	100,00	Sangat Tinggi
21.		Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	1,4	1,3	1,40	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							93,89	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang pertanian pada tahun 2025 terdapat 21 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 93,89% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain pemilihan varietas unggul, ketersediaan benih berkualitas, pemupukan yang seimbang, pengairan yang efektif, pengendalian hama dan penyakit, penggunaan teknologi, pengelolaan pasca panen yang baik, serta dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi, pelatihan, dan infrastruktur dapat meningkatkan produksi hasil pertanian. Meski demikian, adanya perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi hasil panen perlu diantisipasi. Dari 21 indikator program di atas, terdapat 1 indikator yang belum memenuhi target yaitu persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama. Hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain biaya yang tinggi untuk membeli dan memelihara sarana alat mesin pertanian, keterbatasan akses, kurangnya infrastruktur pertanian yang memadai, kurangnya pengetahuan

dan keterampilan petani dalam mengoperasikan sarana alat mesin pertanian dapat membatasi efektivitas penggunaan sarana alat mesin pertanian, ketergantungan pada impor sarana alat mesin pertanian yang membatasi ketersediaan dan meningkatkan biaya, serta kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi, kredit, dan pelatihan dapat membatasi kemampuan petani dalam mengakses sarana alat mesin pertanian.

2.2.5.4 **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan terdiri dari 2 indikator IKUPAD dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 335
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.		Rasio PDRB sektor perdagangan	%	21,07	20,05	21,07	100,00	Sangat Tinggi
2.		Disparitas Harga	%	1,65	±10	0,3	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada tahun 2025 memiliki rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian indikator tersebut yaitu ketersediaan (stok) barang kebutuhan pokok yang cukup serta upaya pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok melalui Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah.

Sedangkan capaian indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 336
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67	67	66,67	99,50	Sangat Tinggi
2.		Persentase Pedagang	%	1,55	1,85	1,92	100,00	Sangat

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.		yang menggunakan transaksi digital						Tinggi
		Persentase Pelaku Usaha Informal yang Difasilitasi	%	17	6,85	11,31	100,00	Sangat Tinggi
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	95,08	90	100,00	100,00	Sangat Tinggi
5.	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	US\$	132.541.181,60	121.419.372	110.071.498	90,65	Tinggi
6.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	100	95	88,85	93,53	Sangat Tinggi
RATA-RATA							97,28	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Berdasarkan data di atas capaian kinerja indikator program pada urusan bidang perdagangan pada Tahun 2025 sebanyak 6 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 97,28% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Dari capaian tersebut, terdapat 1 indikator yang memiliki capaian dengan peringkat kinerja Tinggi yaitu indikator Nilai Ekspor. Faktor penghambat yang mempengaruhi capaian indikator tersebut adalah adanya perubahan kebijakan perdagangan internasional atau kebijakan proteksionisme dari negara tujuan serta ketidakstabilan kurs mata uang.

2.2.5.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perindustrian terdiri dari 2 indikator IKUPD dan 3 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 337
Capaian Kinerja IKUPD Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.		Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	25,53	27,35	25,34	92,65	Sangat Tinggi
2.		Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	%	n.a	0,38	0,382	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							96,33	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada tahun 2025 memiliki rata-rata capaian sebesar 96,33% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Jika dibandingkan dengan data tahun 2024, rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 hanya mengalami sedikit peningkatan. Salah satu kondisi yang mempengaruhi capaian tersebut adalah adanya penurunan permintaan pasar dan kesulitan dalam perolehan bahan baku bagi industri kayu yang merupakan salah satu industri utama di Kabupaten Temanggung. Namun demikian, beberapa komoditas unggulan seperti tembakau, kopi, dan hasil pertanian lain yang mendukung industri pengolahan berbasis agroindustri sangat potensial untuk meningkatkan nilai PDRB industri pengolahan di Kabupaten Temanggung. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir padahal Kabupaten Temanggung memiliki komoditas unggulan kopi yang berpotensi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berorientasi ekspor. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan, diperlukan kegiatan nyata berupa fasilitasi hilirisasi kopi, pengembangan sentra pengolahan dan pengemasan kopi, peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan kelompok tani dalam standar mutu ekspor, sertifikasi produk, promosi dagang, *business matching* dengan eksportir dan *buyer* internasional, serta penguatan akses pembiayaan dan teknologi pengolahan kopi.

Untuk capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 338
Capaian Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	82,19	78,2	78,21	100,00	Sangat Tinggi
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	%	n.a	0,2	0,21	100,00	Sangat Tinggi
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	n.a	1,8	1,80	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, 5data diolah

Dari tabel di atas capaian kinerja indikator program pada Urusan Bidang Perindustrian pada tahun 2025 sebanyak 3 indikator program dengan capaian rata-rata sebesar 100,00% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian indikator program tersebut adalah kesadaran pengusaha untuk melakukan diversifikasi produk serta memenuhi komitmen perizinan sektor industri. Selain itu, Perangkat Daerah juga secara aktif turut memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan penggunaan fasilitasi melalui SIINas.

2.2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Evaluasi kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan antara lain:

1. Fungsi Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan fungsi Sekretariat Daerah diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah dengan 10 indikator kinerja IKUPD dan 25 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 339
Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1.		Indeks kualitas kebijakan	Angka	48.25	65	75.71	100	Sangat Tinggi
2.		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Pemda)	angka	66.36	66.5	67.37	100	Sangat Tinggi
3.		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	angka	3	3.45	3.298	95.6	Sangat Tinggi
4.		Indeks reformasi hukum	angka	96.88	96.98	97.12	100	Sangat Tinggi
5.		Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
6.		Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
7.		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	angka	3.82	3.9	3.82	97.95	Sangat Tinggi
8.		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	angka	84.35	85	84.35	100	Sangat Tinggi
9.		IKM Sekretariat Daerah	angka	-	81	86.22	100	Sangat Tinggi
10.		Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	30.43	73.1	84.78	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99,19	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah

Capaian kinerja IKUPD pada Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2025 yaitu 99,19% dengan kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan capaian kinerja program fungsi Sekretariat Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 340
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pendukung Urusan
Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	Program Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2		Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	72,85	75.35	75.35	100	Sangat Tinggi
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
4		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	%	100	100	4.04	100	Sangat Tinggi
5		Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	26,09	17,39	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
7		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
8		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
9		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	n.a	85	100	100	Sangat Tinggi
10		Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	%	100	100	73,24	73,24	Sedang
11		Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
12		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
13		Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	80	80	80	100	Sangat Tinggi
14		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	87,84	87,84	87.84	100	Sangat Tinggi
15		Indeks Zakat Nasional	Angka	0,8	0,81	0.8	98.765	Sangat Tinggi
16	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	75	75	Sedang
17		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
18		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	83,33	83.33	Tinggi
19		Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
20		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	86	90	100	100	Sangat Tinggi
21		Persentase Pendampingan proses PBJ	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
22		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	93,33	100	100	100	Sangat Tinggi
23		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	73,79	73,79	Sedang
24		Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100	100	75,58	75,58	Sedang
RATA-RATA								Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja program pada fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 90,8% dengan skala nilai kinerja Tinggi.

2. Fungsi Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan Sekretariat DPRD yang diimplementasikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 4 indikator kinerja IKUPD dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 341
Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1.		Nilai IKM Perangkat Daerah	%	n.a	79	84,39	100	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	n.a	70,90	70,90	100	Sangat Tinggi
3.		Tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Angka	n.a	85	100	100	Sangat Tinggi
4.		Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	n.a	80	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja IKUPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Sedangkan Capaian kinerja program Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 342
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	na	90	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
2.		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	95	100	100	Sangat Tinggi
3.		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	58	100	100	100	Sangat Tinggi
4.		Persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	na	100	100	100	100	Sangat Tinggi
5.		Persentase Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	%	0	0	100	100	Sangat Tinggi
6.		Persentase Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	0	0	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Capaian kinerja program Tahun 2025 dengan rata-rata sebesar 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.7.1 Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan pembangunan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 4 indikator kinerja IKUPD, dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2. 343
Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	n.a	88,26	85,64	97,17	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	n.a	83,20	83,65	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,5	81	94,78	100,00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Indeks	3,002	3,005	2,911	96,78	Sangat Tinggi
		Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	na	85	98,57	100,00	Sangat Tinggi
		Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	na	85	98,57	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							98,78	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKUPD pada bidang perencanaan secara rata-rata adalah sebesar 98,78% atau dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi. Penjelasan dari capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Nilai IKM Perangkat Daerah

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapperida pada tahun 2025 sebesar 85,64 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berada dalam kategori baik. Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang relatif tinggi terhadap kinerja layanan, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun sikap pelayanan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan agar dapat mencapai kategori sangat baik di masa mendatang.

2) Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai AKIP Bapperida diperoleh dari hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Pada tahun 2025 nilai AKIP Bapperida adalah 83,65 dengan kategori A (Memuaskan). Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain komitmen pimpinan dan pegawai dalam menerapkan SAKIP secara konsisten. Ketersediaan dokumen perencanaan yang lengkap, peningkatan kualitas pelaporan, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sebelumnya menjadi faktor utama. Selain itu, koordinasi lintas bidang dan penerapan prinsip transparansi memperkuat akuntabilitas kinerja instansi.

3) Indeks Perencanaan Pembangunan Manusia

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah dengan orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung menunjukkan kenaikan nilai yang sangat signifikan, dari 4,5 di tahun 2024 saat ini mencapai angka 94,78 pada triwulan IV tahun 2025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilakukan secara sistematis, partisipatif, serta berbasis data dan eviden. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa terdapat inovasi dan penguatan yang lebih baik dalam aspek perencanaan, sejalan dengan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.

4) Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks dapat diartikan sebagai sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu tertentu. Pada Tahun 2025, capaian MRI Kabupaten Temanggung adalah sebesar 2,911 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 yang memiliki capaian sebesar 3,002. Dengan capaian pada angka 2,911, maka level kapabilitas manajemen risiko daerah ini berada pada *Repeatable*. Pada level *Repeatable* (2,00–2,99), pendekatan manajemen risiko masih bersifat sektoral atau *silo*, belum terintegrasi secara menyeluruh antar unit. Penurunan nilai sampai pada tahun 2025 menandakan perlunya peningkatan dalam konsistensi implementasi, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta pengembangan kapasitas untuk dapat naik ke level *Defined* bahkan *Managed* yang lebih komprehensif.

5) Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP

Nilai Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan bobot 30 persen dalam penilaian keseluruhan. Berdasarkan ketentuan Kementerian PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2022, komponen ini menilai sejauh mana perangkat daerah mampu menyusun, mengimplementasikan, serta memanfaatkan dokumen perencanaan kinerja secara efektif, logis, dan berorientasi hasil. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2025 adalah sebesar 98,57. Capaian tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti

Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja yang lebih terukur dan selaras dengan sasaran pembangunan.

Tabel 2. 344
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	n.a	88	100	100,00	Sangat Tinggi
2.		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	%	n.a	50	36	72,00	Sedang
3.		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	n.a	70	97,3	100,00	Sangat Tinggi
4.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	n.a	85	98,37	100,00	Sangat Tinggi
5.		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	%	n.a	85	96,23	100,00	Sangat Tinggi
6.		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur	%	n.a	85	97,37	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							95,33	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja program pada urusan bidang perencanaan memiliki capaian rata-rata sebesar 95,33% atau dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi. Kinerja program pada unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan diukur melalui sejumlah indikator yang mencerminkan sejauh mana proses perencanaan telah dilakukan secara terintegrasi, akuntabel, dan berbasis hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Penjelasan pada masing-masing capaian indikator adalah sebagai berikut:

1) Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah telah mencapai 100% pada triwulan IV tahun 2025 ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah sudah selaras. Dokumen perencanaan dimaksud adalah antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

2) Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis Risiko

Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko

hingga triwulan IV tahun 2025 baru mencapai 72% dengan peringkat kinerja Sedang. Capaian tersebut mengindikasikan masih diperlukan peningkatan pada upaya penerapan perencanaan berbasis risiko. Penerapan perencanaan berbasis risiko menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya integrasi analisis risiko, perangkat daerah dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak tahap perencanaan, sehingga meminimalkan risiko kegagalan program dan meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan.

3) Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada triwulan IV tahun 2025 persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah telah mencapai 97,83% dari sebesar 70%, artinya indikator tersebut telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi. Pengukuran ini menjadi instrumen penting bagi Bappeda Kabupaten Temanggung dalam melakukan evaluasi dan pembinaan kinerja perangkat daerah. Melalui indikator ini, dapat diidentifikasi perangkat daerah yang telah menunjukkan kinerja optimal serta perangkat daerah yang masih memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

4) Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tahun 2025 telah mencapai 98,37 dari target 85%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah mencapai 100%. Indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kualitas proses perencanaan yang dilakukan oleh perangkat daerah, agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan tetap berorientasi pada target pembangunan daerah.

5) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Ekonomi dan SDA

Pada tahun 2025 persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA telah mencapai 100% dengan realisasi kinerja sebesar 96,23%. Penerapan indikator ini penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan pada bidang ekonomi dan SDA di Kabupaten Temanggung. Keselarasan yang baik mencerminkan bahwa seluruh perangkat daerah telah berkontribusi secara terkoordinasi dalam

mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan lestari.

6) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Infrastruktur

Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur telah mencapai 97,37% pada tahun 2025 dari target sebesar 85%. Capaian tersebut telah mencapai 100% dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi dan menandakan bahwa program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan arah kebijakan, prioritas, serta sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD terutama pada bidang infrastruktur. Keselarasan ini menjadi penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan, mengingat sektor ini berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.2.7.2 Keuangan

Kinerja penyelenggaraan Fungsi penunjang keuangan diimplementasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan 3 indikator kinerja IKUPD, dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 345
Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Keuangan Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d. Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka		86,86	86,87	100,00	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka		77,00	77,00	100,00	Sangat Tinggi
2.		Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	angka	73,66	73,7	66,8	90,64	Tinggi
3.		Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	18,33	20,08	21,99	100,00	Sangat Tinggi
4.		Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99,22	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKUPD pada bidang keuangan secara rata-rata adalah sebesar 99,22% atau dengan

peringkat kinerja Sangat Tinggi. Penjelasan dari capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Nilai IKM Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah (BPKPAD) pada tahun 2025 menunjukkan tren stabil dengan kecenderungan peningkatan. Nilai IKM tahun 2025 tercatat sebesar 86,87, mengalami kenaikan tipis dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 86,86. Meskipun peningkatan yang terjadi relatif kecil, capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik dapat dipertahankan dengan baik dari tahun ke tahun. Faktor yang mendorong tercapainya indikator ini adalah adanya komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi seperti Google Form untuk menjangkau semua responden. Sedangkan faktor yang menghambat ketercapaian indikator ini adalah beberapa pelayanan yang masih memerlukan waktu yang cukup lama, sarana dan prasarana, Keterbatasan SDM Pelayanan. Kedepannya, akan dilakukan peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan, dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

2) Nilai AKIP Perangkat Daerah

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas perangkat daerah dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan tabel diatas, tingkat akuntabilitas kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 berada pada kategori BB (Sangat Baik). Hasil ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah diterapkan secara konsisten dan efektif, meskipun tetap diperlukan upaya penguatan dan penyempurnaan berkelanjutan pada setiap komponen agar kualitas tata kelola kinerja semakin optimal pada tahun-tahun berikutnya. Faktor pendorong atas tercapainya indikator ini adalah kualitas perencanaan kinerja yang semakin baik, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta peningkatan komitmen pimpinan Perangkat Daerah. Sedangkan faktor penghambat capaian indikator ini antara lain pemahaman SDM tentang SAKIP yang masih belum merata, terbatasnya dokumentasi pendukung kinerja serta masih terdapat inkonsistensi antar dokumen, serta penyelarasan (cascading) kinerja yang belum optimal.

3) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Perhitungan IPKD mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan di mana terdapat 6 (enam) dimensi yang menjadi komponen penilaian. Perkembangan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 346
Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 - 2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai IPKD	69,52	62,74	68,08	73,66	66,8

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Pada tahun 2025, capaian nilai IPKD Kabupaten Temanggung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Dimensi yang mendapatkan nilai rendah antara lain Dimensi 1 terkait kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (12,18), Dimensi 5 terkait Kondisi Keuangan Daerah (4), dan cakupan pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (9,37). Nilai yang mengalami penurunan paling tinggi yaitu Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD yang mengalami penurunan sebesar 5,63. Penurunan nilai Dimensi 2 pada Tahun 2025 terjadi karena belum terpenuhinya pengalokasian belanja infrastruktur, belanja pegawai, dan belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan dan proporsi yang diharapkan. Kondisi tersebut menyebabkan skor pada beberapa komponen penilaian belum mencapai nilai optimal, sehingga berdampak pada rendahnya nilai rata-rata dimensi ini. Belum optimalnya pemenuhan ketiga jenis belanja tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja OPD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. IPKD ini juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah.

4) Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah

Persentase dari realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 – 2025 di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 347
Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Persentase
2021	364.099.510.273	1.950.257.238.731	18,67
2022	308.726.486.721	1.849.550.699.127	16,69
2023	351.823.679.260	2.005.427.452.487	17,54
2024	384.396.905.677	2.097.018.658.739	18,33
2025	451.057.543.778	2.051.319.266.447	21,99

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase perolehan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tercapai sebesar 21,99%. Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025 menunjukkan adanya dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan karena peningkatan target pendapatan yang diimbangi dengan realisasi yang linier. Sehingga koefisien persentase perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah terlihat lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Faktor pendorong di indikator ini yakni mulai bertambahnya usaha lokal penyumbang PAD dan diharapkan di tahun berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan.

5) Opini BPK atas LKPD

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sampai Tahun 2025 atau selama 6 tahun terakhir memperoleh opini WTP. Atas opini yang sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah adanya komitmen dari semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan serta penyusunan Laporan Keuangan yang telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun upaya yang terus dilakukan yaitu melakukan monitoring laporan keuangan serta melaksanakan asistensi kepada Perangkat Daerah.

Untuk capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 348

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja <i>mandatory spending</i> dalam APBD	%	100	75	75	100,00	Sangat Tinggi
2.		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
3.		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
4.		Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
5.		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
6.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
7.		Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	100	98	100	100,00	Sangat Tinggi
8.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	%	4,57	4,57	76,62	100,00	Sangat Tinggi
9.		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	%	98,16	98,16	94,94	96,71	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99,63	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Kinerja program pada unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan diukur melalui sejumlah indikator di mana rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 99,63% atau dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi. Penjelasan dari capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Cakupan pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* dalam APBD

Selama periode 2021 hingga tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Temanggung berhasil memastikan bahwa pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur dasar (25%), dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsistensi dalam pencapaian ini mencerminkan tata kelola keuangan

daerah yang baik serta keseriusan dalam mendukung pelayanan publik yang optimal.

2) Persentase dokumen penganggaran tepat waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Capaian ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen penganggaran menunjukkan konsistensi sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem penyusunan dokumen penganggaran.

3) Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online selalu mencapai 100% selama lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pencairan dana berjalan dengan efektif dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Upaya penerbitan SP2D online yang tepat waktu terus dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan konfirmasi kepada perangkat daerah sehingga dokumen SP2D dapat diproses dan tidak mengalami keterlambatan pembayaran.

4) Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah

Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah baru mulai diukur pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 ini telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memperkuat mekanisme dan akurasi dalam pencatatan keuangan, sehingga mengurangi potensi ketidaksesuaian data dalam pengelolaan keuangan daerah.

5) Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu

Pada periode tahun 2021 hingga tahun 2025, Kabupaten Temanggung selalu menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu dengan capaian 100%. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik. Ketepatan waktu dalam penyampaian LKPD juga berkontribusi pada opini WTP yang secara konsisten diperoleh dalam audit BPK.

6) Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu

Penyampaian laporan daftar barang milik daerah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dengan capaian 100% terhitung sejak

tahun 2022 hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah meningkatkan efektivitas dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah, sehingga pengelolaan aset menjadi lebih efisien.

7) Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja

Pemanfaatan aset daerah mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 hingga triwulan IV tahun 2025 ini capaian telah mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan penggunaan aset daerah untuk mendukung pelayanan publik dan operasional satuan kerja, sehingga aset yang tersedia dapat memberikan manfaat secara maksimal.

8) Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah

Peningkatan target pajak daerah menunjukkan tren fluktuatif selama lima tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 dan 2022 mencapai 24,81% dan 52%. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024, peningkatan target pajak daerah mengalami perlambatan dengan capaian 7,44% dan 4,57%. Dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2025 dengan capaian 76,62%. Adapun faktor pendorong dalam pencapaian tersebut yaitu telah dilakukan pengelolaan pajak secara online melalui SIAP PAKDE dan e-BPHTB, dilakukannya pemutakhiran data objek pajak daerah, dan pelaksanaan kegiatan pendataan objek pajak baru baik dengan metode survei lapangan maupun pendaftaran oleh wajib pajak secara mandiri.

9) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah

Realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target pajak daerah selama periode 2021 – 2024 secara konsisten mencapai 100%, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 94,94% dan belum memenuhi dari target yang telah ditetapkan sebesar 98,16%. Penurunan tersebut disebabkan pendaftaran dan pembayaran objek pajak Reklame dan BPHTB belum maksimal, masih rendahnya kesadaran akan membayar pajak, realisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat/provinsi serta dinamika jumlah dan mutasi kendaraan bermotor.

2.2.7.3 Kepegawaian

Kinerja penyelenggaraan kepegawaian diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 1

indikator kinerja IKUPD dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 349
Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Kepegawaian Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	81,55	81,55	83,93	100,00	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	70,95	73,45	73,45	100,00	Sangat Tinggi
2.		Indeks Sistem Merit	angka	0,62	0,65	0,62	95,38	Sangat Tinggi
RATA-RATA							98,46	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKUPD pada bidang kepegawaian secara rata-rata adalah sebesar 98,46% atau dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi. Penjelasan dari capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Nilai IKM Perangkat Daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik di BKPSDM Kabupaten Temanggung salah satunya dengan meningkatkan Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang di dalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada kuesioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel di atas, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah (BKPSDM) pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nilai IKM tahun 2025 tercatat sebesar 83,93, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 81,55. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perbaikan pelayanan dari hasil survei sebelumnya, adanya kemudahan akses pelayanan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pelayanan publik.

2) Nilai AKIP Perangkat Daerah

Penilaian AKIP di BKPSDM Kabupaten Temanggung oleh Inspektorat/Tim Evaluasi adalah dengan menilai dan mengevaluasi

dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali. Berdasarkan tabel di atas, tingkat akuntabilitas kinerja BKPSDM Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 berada pada kategori BB (Sangat Baik). Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut antara lain ketersediaan dokumen perencanaan telah memenuhi standar yang baik serta Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien, telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

3) Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit merupakan pengelolaan kepegawaian yang profesional dan berbasis sistem merit merupakan fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, responsif, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Temanggung, penguatan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu prioritas untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan mampu menghadapi kompleksitas tantangan pelayanan publik. Upaya tersebut tercermin dalam komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, yang salah satunya diukur melalui capaian Indeks Sistem Merit sebagai indikator utama penerapan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan ASN. Adapun Nilai dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 350
Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Penilaian Sistem Merit	113	200	258	258	258
2	Indeks Sistem Merit	0,259	0,482	0,62	0,62	0,62

Sumber: Aplikasi SIPINTER

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan hingga mencapai skor 258 dan indeks 0,62 pada tahun 2023, 2024, dan 2025 yang termasuk dalam kategori "Baik". Hal ini mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam penerapan prinsip-prinsip sistem merit dan peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Untuk capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang

Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 351
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase keterisian jabatan	%	84,79	84,79	84,42	99,56	Sangat Tinggi
		Persentase Kebutuhan ASN	%	85,43	85,43	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	98,94	98,94	99,96	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase kedisiplinan ASN	%	99,18	99,81	89,36	89,53	Tinggi
RATA-RATA							97,82	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Kinerja program pada unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian diukur melalui sejumlah indikator di mana rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 97,82% atau dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi. Penjelasan dari capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Persentase layanan kepegawaian tepat waktu

Berdasarkan tabel di atas, indikator Persentase Layanan Kepegawaian Tepat Waktu menunjukkan capaian sebesar 100 persen dari target 100 persen pada Triwulan IV tahun 2025. Faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian indikator tersebut antara lain anggapan kenaikan pangkat sebagai hak setiap PNS serta adanya kesadaran Perangkat Daerah terkait tugas dan upaya untuk mengusulkan kenaikan pangkat tepat waktu.

2) Persentase keterisian jabatan

Persentase keterisian jabatan adalah ukuran persentase jabatan yang sudah terisi secara definitif, dibandingkan dengan jumlah total jabatan yang tersedia. Angka ini menunjukkan efektivitas suatu instansi dalam mengisi posisi-posisi pentingnya, baik itu jabatan pimpinan tinggi,

administrasi, maupun struktural. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian indikator persentase keterisian jabatan pada Triwulan IV tahun 2025 yaitu sebesar 84,42 persen. Nilai capaian ini lebih rendah dari target capaian sebesar 85,16 persen. Hal ini disebabkan karena adanya faktor penghambat yaitu pada triwulan IV terdapat ASN yang menduduki jabatan yang telah selesai masa tugasnya (pensiun) dan pengisian jabatan menunggu pelaksanaan mutasi di periode berikutnya.

3) Persentase Kebutuhan ASN

BKPSDM Kabupaten Temanggung menghitung persentase kebutuhan ASN untuk mengukur kualitas perencanaan kebutuhan ASN di kabupaten Temanggung. Berdasarkan di atas, menunjukkan bahwa capaian indikator persentase kebutuhan ASN yaitu sebesar 100 persen atau telah tercapai sesuai target dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi. Hal ini terjadi karena adanya faktor pendorong yaitu kebutuhan akan SDM yang mendesak karena pegawai pensiun dan mutasi sehingga semua perangkat daerah mengusulkan formasi kebutuhan.

4) Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik

Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik dihitung berdasarkan laporan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penilaian kinerja ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022, yang membagi predikat kinerja menjadi Sangat Baik, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang, dan Sangat Kurang. Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa capaian pada indikator ini sebesar 99,96% dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian tersebut dipengaruhi faktor pendorong yaitu ASN memahami mekanisme penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), indikator, dan target yang terukur melalui aplikasi e-Kinerja.

5) Persentase kedisiplinan ASN

BKPSDM Kabupaten Temanggung mengukur tingkat kedisiplinan ASN di kabupaten Temanggung melalui indikator persentase kedisiplinan ASN. Berdasarkan data di atas, capaian indikator persentase kedisiplinan ASN Kabupaten Temanggung adalah sebesar 89,53% dengan peringkat kinerja Tinggi. Capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 99,81 dengan realisasi baru mencapai 89,36. Adanya penambahan jumlah Aparatur Sipil Negara dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPPK Paruh Waktu secara signifikan

mempengaruhi nilai capaian indikator tersebut. Faktor penghambat lainnya adalah pelaksanaan kegiatan pembinaan disiplin ASN selama ini belum sepenuhnya didukung oleh bukti dukung yang memadai dan terdokumentasi secara sistematis.

2.2.7.4 Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 1 indikator kinerja IKUPD dan 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 352
Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
1.		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	78,5	80	79,81	99,76	Sangat Tinggi
RATA-RATA							99,76	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKUPD pada bidang pendidikan dan pelatihan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN memiliki capaian sebesar 99,76% atau dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi. IP ASN merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Tabel 2. 353
Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Dimensi Pengukuran	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kualifikasi	11,907	12,39	20,98	20,72	20,76
2.	Kompetensi	9,343	12,73	13,6	27,69	29,06
3.	Kinerja	25	23,01	24,97	25,09	24,99
4.	Disiplin	4,997	5	5	5	5
	TOTAL	50,03	51,247	64,55	78,5	79,81

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2022, 2023, 2024, 2025 dan Penghitungan mandiri BKPSDM Tahun 2021

Capaian IP ASN triwulan IV tahun 2025 yaitu sebesar 79,81 lebih rendah 0,19 dari target yang direncanakan yaitu 80,00. Nilai IP ASN yang kurang dari target tersebut disebabkan oleh belum terinputnya beberapa data kinerja pegawai (P2KP) dan data kompetensi pegawai (sertifikat diklat) yang merupakan bagian dari dimensi penilaian IP ASN. Jika dilihat dari

capaian masing-masing dimensi IP ASN, pencapaian skor paling rendah terlihat pada dimensi kompetensi.

Untuk capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 354
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan potensi ASN	%	18,55	18,55	45,06	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Kinerja program pada unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan diukur dengan indikator persentase pengembangan potensi ASN yang memiliki capaian kinerja sebesar 100% atau dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi. Pengembangan potensi ASN meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kemampuan ASN dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun program pengembangan lainnya. Pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 45,06% dari sebelumnya pada tahun 2024 yang memiliki capaian sebesar 18,55%, Angka ini menjadi baseline penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program-program pelatihan dan pendidikan yang telah dijalankan.

2.2.7.5 Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaraan Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan 2 indikator IKUPD dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 355
Capaian Kinerja IKUPD Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IKUPD								
		Indeks Inovasi Daerah	nilai	72,42	73	88,88	100,00	Sangat Tinggi
		Kapabilitas Inovasi	angka	2,55	2,6	2,62	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja IKUPD pada bidang penelitian dan pengembangan secara rata-rata telah mencapai 100% atau dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi. Penjelasan dari capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hasil pemeringkatan indeks inovasi daerah untuk Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 356
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Indeks Inovasi Daerah	45,58	70,92	80,87	72,42	88,88
2	Peringkat	28	6	10	24	15
3	Kategori	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Pada Penganugerahan Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025, Kabupaten Temanggung dianugerahkan sebagai Kabupaten “Sangat Inovatif”. Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 88,88 dengan predikat Sangat Inovatif. Peningkatan

capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2025 tidak terlepas dukungan dari semua elemen (masyarakat, Perangkat Daerah, perguruan tinggi, sekolah) dalam menyampaikan kelengkapan data dukung terkait Indeks Inovasi Daerah sehingga dapat meningkatkan nilai kematangan setiap satuan inovasi daerah yang dilaporkan kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

2) Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas Inovasi menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi di berbagai sektor pembangunan. Nilai Kapabilitas Inovasi dihitung melalui agregasi nilai dari beberapa indikator pembentuk menggunakan rata-rata aritmatik. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang dihimpun dari berbagai kementerian dan lembaga nasional yang menjadi sumber data resmi dalam pengukuran Indeks Daya Saing Daerah. Indikator ini penting untuk menilai kapasitas daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan serta menciptakan ekosistem inovatif yang mendukung peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Kapabilitas inovasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 357
Kapabilitas Inovasi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Kapabilitas Inovasi	n.a	1,05	1,89	2,55	2,62

Sumber: BRIN, 2025

Nilai 2,62 mencerminkan bahwa produktivitas dan efisiensi sistem sosial-ekonomi di Temanggung masih perlu ditingkatkan agar dapat berkompetisi dengan daerah lain yang memiliki struktur ekonomi dan inovasi lebih maju. Beberapa aspek yang kemungkinan besar memengaruhi skor ini antara lain kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, tingkat adopsi teknologi informasi, stabilitas ekonomi lokal, serta kemampuan daerah dalam mendorong inovasi berbasis riset dan pengembangan. Meskipun demikian, skor tersebut juga menunjukkan adanya potensi dan ruang perbaikan yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang berbasis daya saing. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan iklim usaha yang kondusif, penguatan tata kelola kelembagaan, serta dukungan terhadap kegiatan riset dan inovasi daerah dapat menjadi fokus strategis ke depan. Dengan langkah-langkah tersebut, Temanggung

diharapkan mampu meningkatkan skor IDSD-nya secara bertahap sehingga dapat sejajar dengan daerah-daerah yang memiliki indeks di atas rata-rata nasional.

Tabel 2. 358
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program Perangkat Daerah								
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	%	n.a	50	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2.	Program Riset dan Inovasi	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	%	n.a	50	71,43	100,00	Sangat Tinggi
3.		Persentase inovasi yang dimanfaatkan	%	n.a	50	93,50	100,00	Sangat Tinggi
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan diukur melalui tiga indikator program yang mencerminkan efektivitas dan relevansi kegiatan litbang terhadap pembangunan daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Ketiga indikator tersebut secara keseluruhan memiliki capaian rata-rata 100% atau dengan peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja pengawasan diimplementasikan oleh Inspektorat dengan 5 indikator kinerja IKUPD dan 7 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 359
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	na	80,00	91,59	100	Sangat tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	78,15	78,15	78,15	100	Sangat tinggi
3.		Maturitas SPIP	Angka	3	3,1	3,077	100	Sangat tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
4.		Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3,001	3	99,97	Sangat tinggi
5.		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3	3,001	3	99,97	Sangat tinggi
	RATA-RATA						99,99	Sangat Tinggi
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irbn (I. II. III.IV. Khusus)	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
2.		Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100	100	100	100	Sangat tinggi
3.		Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	n.a	100	100	100	Sangat tinggi
4.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	%	n.a	100	100	100	Sangat tinggi
5.		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK	%	100	100	66,67	66,67	Sedang
6.		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100	100	100	100	Sangat tinggi
7.		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing. Benturan Kepentingan. dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	Sangat tinggi
	RATA-RATA						95.24	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (data diolah)

Capaian indikator sasaran kinerja IKUPD urusan Pengawasan RKPD dan RPD tahun 2025 sebesar 99,99% dengan skala nilai Peringkat Kinerja Sangat Tinggi. Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2025 sebesar 95,24% skala nilai Peringkat Kinerja Sangat Tinggi.

2.2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Kecamatan diimplementasikan Kecamatan dengan 4 indikator kinerja IKUPD dan 8 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 360
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Fungsi Kecamatan Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan						
		Kecamatan Temanggung	Angka	n.a	84,67	84.58	99.90	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	Angka	n.a	83,9	86.086	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
		Kecamatan Pringsurat	Angka	n.a	85,03	85.97	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	Angka	n.a	84,1	84.55	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	Angka	n.a	84,67	86	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	Angka	n.a	84,81	85.95	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	Angka	n.a	83	85.52	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	Angka	n.a	83,19	86	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candirototo	Angka	n.a	83	84.94	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	Angka	n.a	85	86.09	99.81	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	Angka	n.a	87,36	82,673	94,63	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	Angka	n.a	84,09	84,09	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	Angka	n.a	82,4	84.85	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	Angka	n.a	83	85,30	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	Angka	n.a	83,53	85.41	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bansari	Angka	n.a	83	85.27	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	Angka	n.a	83,88	85.46	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	Angka	n.a	84	87	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	Angka	n.a	83	84,06	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	Angka	n.a	83	84,12	98,65	Sangat Tinggi
		Rata-Rata					99,64	Sangat Tinggi
2.		Nilai capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan						
		Kecamatan Temanggung	Angka	n.a	100	96.75	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	Angka	n.a	97	99.28	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	Angka	n.a	99,17	99.39	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	Angka	n.a	98,5	99.81	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	Angka	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	Angka	n.a	99,18	99.13	99.95	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	Angka	n.a	97	99.95	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	Angka	n.a	99,17	99.81	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candirototo	Angka	n.a	97	100	100.00	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	Angka	n.a	100	99.90	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	Angka	n.a	97	90,6	93,40	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	Angka	n.a	96	96	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	Angka	n.a	96	98.95	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	Angka	n.a	97,5	99.93	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
		Kecamatan Kledung	Angka	n.a	99,33	99.64	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bansari	Angka	n.a	97	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	Angka	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	Angka	n.a	97	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	Angka	n.a	97	97,00	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	Angka	n.a	97	99.21	100	Sangat Tinggi
		Rata-rata						94,66
3.		Indeks Kepuasan Masyarakat						
		Kecamatan Temanggung	Angka	86,50	87	87	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	Angka	88,01	88,02	88,08	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	Angka	n.a	86,73	86,73	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	Angka	n.a	84,52	84,55	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	Angka	n.a	86,1	86,1	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	Angka	86,9	86,9	86,91	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	Angka	n.a	84,50	86.3	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	Angka	86,9	86,91	88,48	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candiroto	Angka	84,33	84,5	84,51	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	Angka	n.a	87	86.43	99.34	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	Angka	n.a	84,5	88,023	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	Angka	84,89	84,9	84,9	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	Angka	84,09	84,2	85,16	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	Angka	86,23	86,25	86,53	100	Sangat Tinggi
	Kecamatan Kledung	Angka	86,00	84,5	86,30	100	Sangat Tinggi	
	Kecamatan Bansari	Angka	84,36	84,5	84,6	100	Sangat Tinggi	
	Kecamatan Tlogomulyo	Angka	85,04	85,04	85,70	100	Sangat Tinggi	
	Kecamatan Selopampang	Angka	88,41	88,41	88,41	100	Sangat Tinggi	
	Kecamatan Gemawang	Angka	n.a	84.5	88.18	100	Sangat Tinggi	
	Kecamatan Tretep	Angka	85,3	85,40	85,40	100	Sangat Tinggi	
	Rata-rata						99,96	Sangat Tinggi
4.	Nilai AKIP Kecamatan							
	Kecamatan Temanggung	Angka	66,30	70	70,00	100	Sangat Tinggi	
	Kecamatan Tembarak	Angka	66,7	66,75	70,90	100	Sangat Tinggi	
	Kecamatan Pringsurat	Angka	n.a	69,20	71,8	100	Sangat Tinggi	
	Kecamatan Kaloran	Angka	n.a	69,30	69,3	100	Sangat Tinggi	

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
		Kecamatan Parakan	Angka	n.a	71	70,3	99,01	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	Angka	68,35	68,35	71,80	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	Angka	n.a	66,65	70,30	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	Angka	66,65	66,65	69,70	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candiroto	Angka	67,3	67,5	70,33	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	Angka	n.a	67,15	71,95	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	Angka	n.a	66,75	69,4	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	Angka	68,8	71,36	71,35	99,99	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	Angka	66	67	70,45	100,00	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	Angka	n.a	68,25	69,45	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	Angka	65,30	66,75	70,30	100,00	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bansari	Angka	n.a	66,75	71,2	100,00	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	Angka	66,6	66,6	70,70	100,00	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	Angka	69,50	72,45	72,45	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	Angka	n.a	66,75	67,00	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	Angka	67,4	67,75	67,75	100,00	Sangat Tinggi
		Rata-rata					99,95	Sangat Tinggi
RATA-RATA IKPD							98,55	Sangat Tinggi
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan						
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candiroto	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
		Kecamatan Bansari	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	%	n.a	100	100	100	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					100	Sangat Tinggi
2.		Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan						
		Kecamatan Temanggung	%	90	90	90.11	99.03	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	%	97,78	97,79	95.67	97.83	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	%	99,2	95	96.32	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	%	98,4	98,5	99.44	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	90,57	95	97.68	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	%	96,06	95,06	94.76	99.68	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	%	99,91	95,5	99.70	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	%	95,5	96	98.88	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candirototo	%	100	95	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	97,7	95	99.19	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	%	n.a	95	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	95	96	95.75	99.74	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	%	98,29	95	99.57	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	%	95	96	97.81	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bansari	%	100	96	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	%	100	95	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	%	100	95	100	100	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					99,81	Sangat Tinggi
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak						
		Kecamatan Temanggung	%	84	84	85,32	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	97,18	79	95,83	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	90,79	79	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	100	100	90,79	90,79	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					97,69	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
4.		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif						
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					100	Sangat Tinggi
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam						
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candirot	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonoboyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
			RATA-RATA					100
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa						
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
		Kecamatan Bulu	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candiroto	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonobojo	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bansari	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	%	0	100	100	100	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					100	Sangat Tinggi
7.		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu						
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonobojo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					100	Sangat Tinggi
8.		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu						
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Candirototo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Wonobojo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
		RATA-RATA					100	Sangat Tinggi
		TOTAL RATA-RATA INDIKATOR PROGRAM					99,68	Sangat Tinggi

Sumber:Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (data diolah)

Capaian indikator Kinerja IKUPD unsur kewilayahan pada RKPD dan RPJMD 2025 sebesar 98,55% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

Capaian kinerja program RKPD dan RPJMD tahun 2025 sebesar 99,68% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Berikut faktor yang menjadi pendorong tercapainya kinerja program RKPD, seperti :

1. Adanya dukungan dari pemerintah kecamatan melalui tim monitoring penarikan PBB laporan update setiap senin
2. Hubungan yang harmonis antara pemerintah Kelurahan, lembaga dan masyarakat
3. Koordinasi yang baik dengan muspika

2.2.10 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Capaian Kinerja pemerintahan Umum diimplementasikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 4 indikator kinerja IKUPD, dan 5 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 361
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
					Target 2025	Realisasi s.d Triwulan IV		
1.		Nilai IKM Perangkat Daerah	%	n.a	83	81.790	98,25	Sangat Tinggi
2.		Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	n.a	83	77.800	100	Sangat Tinggi
3.		Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi
4.		Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	%	n.a	100	100	100.00	Sangat Tinggi
RATA-RATA IKUPD							99,56	Sangat Tinggi
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	100	100	70	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	18.18	19	31.25	100	Sangat Tinggi
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kejadian konflik SARA	Kejadian	1	8	2	100	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	%	n.a	100	150	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA PROGRAM							100	Sangat Tinggi

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (data diolah)

Capaian indikator kinerja IKUPD RKPD dan RPJMD tahun 2025 sebesar 99,56 % dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi dengan faktor pendorong terbina sinergitas yang baik dalam mencegah dan menangani

konflik. Dan kinerja program dengan rata-rata 100% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.2.11 Ringkasan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

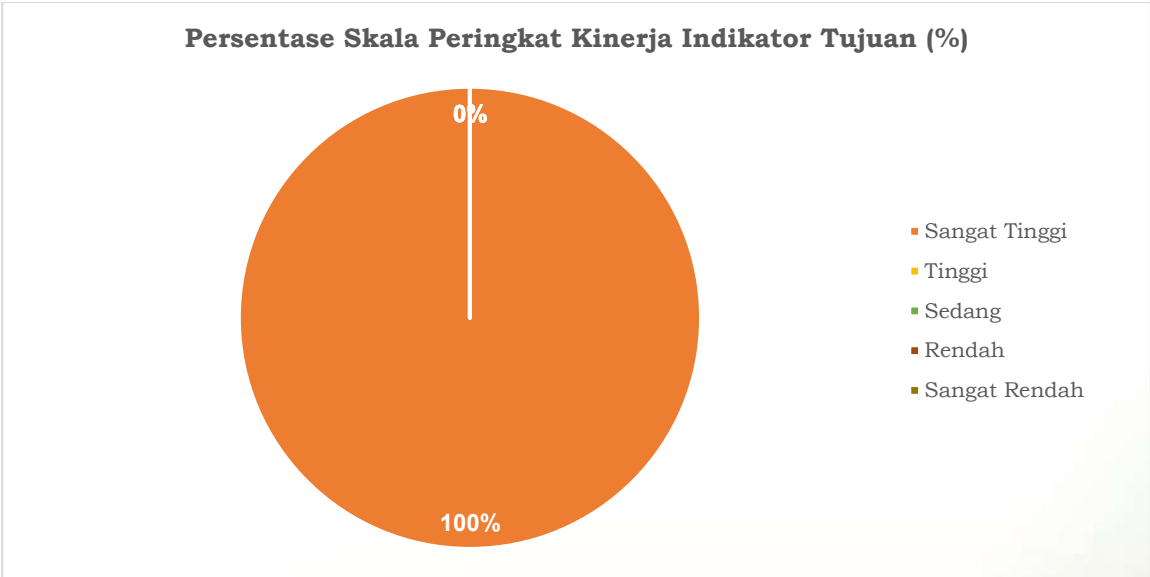
2.2.11.1 Indikator Tujuan

Capaian kinerja pada indikator tujuan pada tahun 2025 telah mencapai 100% dari 3 indikator yang masing-masing indikator telah mencapai skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Ringkasan capaian kinerja tujuan Kabupaten Temanggung tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 362 Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan Kabupaten Temanggung Tahun 2025								
No.	Indikator	Satuan	Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	100	1	0	0	0	0
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	100	1	0	0	0	0
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100	1	0	0	0	0
RATA-RATA / JUMLAH			100	3	0	0	0	0

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Persentase skala penilaian kinerja pada indikator tujuan disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Gambar 2. 67
Persentase Skala Peringkat Kinerja Indikator Tujuan pada Periode Triwulan IV Tahun 2025

2.2.11.2 Indikator Sasaran

Capaian indikator sasaran sampai dengan Tahun 2025 dari 10 indikator sasaran, dengan capaian rata-rata sebesar 98,67% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 363
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
1.	Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing	%	98,75	1	0	0	0	0
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	99,57	1	0	0	0	0
3.	Indeks Gini/ Gini Rasio	Angka	100,00	1	0	0	0	0
4.	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	95,25	1	0	0	0	0
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	99,67	1	0	0	0	0
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	96,13	1	0	0	0	0
7.	Indeks Integritas Nasional	Angka	100,00	1	0	0	0	0
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	100	1	0	0	0	0
9.	Indeks Pembangunan Gender	Angka	99,47	1	0	0	0	0
10.	Indeks Harmoni	Angka	100,00	1	0	0	0	0
Rata-Rata/Jumlah			98,67	10	0	0	0	0

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Persentase skala nilai peringkat kinerja pada indikator sasaran sebagaimana pada Tabel dan gambar berikut.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Gambar 2. 68
Persentase Skala Peringkat Kinerja Indikator Sasaran pada Periode Triwulan IV Tahun 2025

2.2.11.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dari 105 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 96,06% dengan nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 364
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	Indikator	Satuan	Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	84,23	0	1	0	0	0

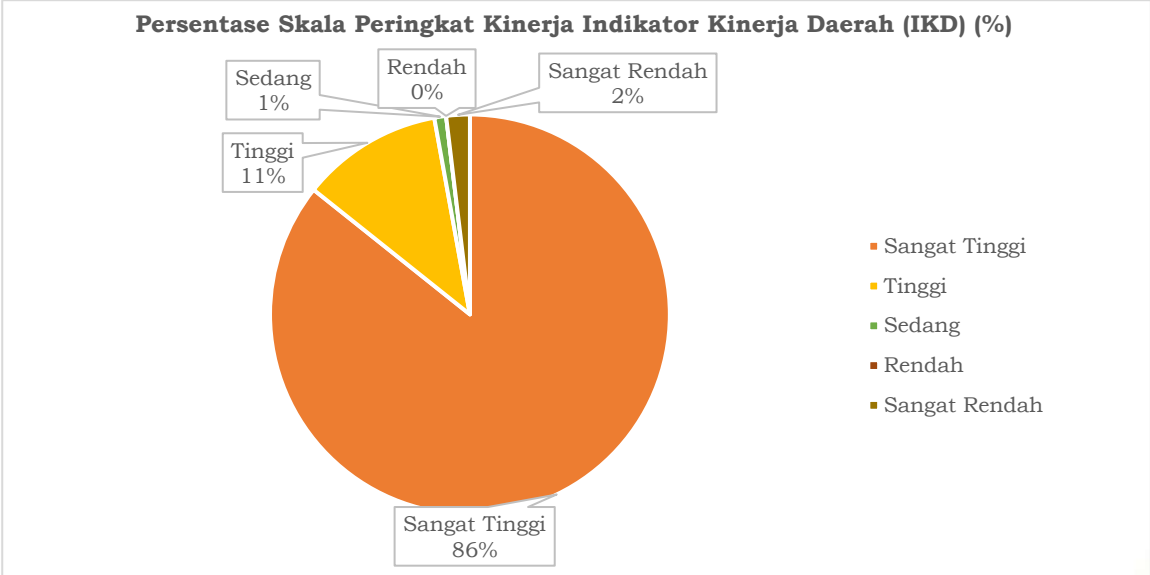
NO	Indikator	Satuan	Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	72,20	0	0	1	0	0
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita /Tahun	100,00	1	0	0	0	0
4	Disparitas Harga	%	100	1	0	0	0	0
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	96,13	1	0	0	0	0
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	89,44	0	1	0	0	0
7	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	24,88	0	0	0	0	1
8	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	100,00	1	0	0	0	0
9	Cakupan pelayanan persampahan	%	100,00	1	0	0	0	0
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	93,00	1	0	0	0	0
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	100,00	1	0	0	0	0
12	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	86,41	1	0	0	0	0
13	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	100,00	1	0	0	0	0
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	100,00	1	0	0	0	0
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
15	Tingkat kemiskinan	%	100,00	1	0	0	0	0
16	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	99,67	1	0	0	0	0
17	Usia Harapan Hidup	Tahun	100,00	1	0	0	0	0
18	Jumlah kematian ibu	Kasus	100,00	1	0	0	0	0
19	Jumlah kematian balita	Kasus	100,00	1	0	0	0	0
20	Prevalensi Stunting	%	100,00	1	0	0	0	0
21	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100,00	1	0	0	0	0
22	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	97,93	1	0	0	0	0
23	Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	100,00	1	0	0	0	0
24	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	100,00	1	0	0	0	0
25	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	%	100,00	1	0	0	0	0
26	Net Death Rate (NDR)	Per Mill	100,00	1	0	0	0	0
27	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	%	100,00	1	0	0	0	0
28	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	86,04	0	1	0	0	0
29	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	93,84	1	0	0	0	0
30	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	88,62	0	1	0	0	0
31	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	100,00	1	0	0	0	0
32	Harapan Lama Sekolah	Tahun	98,06	1	0	0	0	0
33	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun	Tahun	100,00	1	0	0	0	0
34	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	100,00	1	0	0	0	0
35	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	100,00	1	0	0	0	0
36	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	100,00	1	0	0	0	0
37	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	99,97	1	0	0	0	0
38	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	%	95,61	1	0	0	0	0
39	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional	%	100,00	1	0	0	0	0
40	Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	100,00	1	0	0	0	0
41	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	100,00	1	0	0	0	0
42	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	86,77	0	1	0	0	0
43	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	94,81	1	0	0	0	0
44	Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun	%	99,51	1	0	0	0	0

NO	Indikator	Satuan	Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
45	Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	81,40	0	1	0	0	0
46	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengurusutamakan kebudayaan	%	100,00	1	0	0	0	0
47	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	39,65	0	0	0	0	1
48	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Angka	100,00	1	0	0	0	0
49	Jumlah kejadian konflik SARA (IUP)	Kejadian	100,00	1	0	0	0	0
50	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	100,00	1	0	0	0	0
51	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	100,00	1	0	0	0	0
52	Pertumbuhan Ekonomi	%	100,00	1	0	0	0	0
53	Indeks Pembangunan Gender	Angka	99,47	1	0	0	0	0
54	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	95,45	1	0	0	0	0
55	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	99,96	1	0	0	0	0
56	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	Persen	100,00	1	0	0	0	0
57	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	Angka	100,00	1	0	0	0	0
58	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	95,25	1	0	0	0	0
59	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	99,57	1	0	0	0	0
60	Indeks Gini/ Gini Rasio	Angka	100,00	1	0	0	0	0
III	ASPEK DAYA SAING							
61	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	78,69	0	1	0	0	0
62	Return on Asset (RoA) BUMD	%	77,09	0	1	0	0	0
63	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	95,95	1	0	0	0	0
64	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	89,01	0	1	0	0	0
65	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	100,00	1	0	0	0	0
66	Kapabilitas Inovasi	Angka	100,00	1	0	0	0	0
67	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	100,00	1	0	0	0	0
68	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar	100,00	1	0	0	0	0
69	Nilai Ekspor	US \$	90,65	0	1	0	0	0
70	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	98,21	1	0	0	0	0
71	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	100,00	1	0	0	0	0
72	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	100,00	1	0	0	0	0
73	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	%	100,00	1	0	0	0	0
74	Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	100,00	1	0	0	0	0
75	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	98,75	1	0	0	0	0
76	Persentase desa mandiri	%	100,00	1	0	0	0	0
77	Tingkat Inflasi (%)	%	100,00	1	0	0	0	0
78	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	100,00	1	0	0	0	0
79	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	100,00	1	0	0	0	0
80	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	100,00	1	0	0	0	0
81	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	100,00	1	0	0	0	0
82	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	92,65	1	0	0	0	0
83	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	97,88	1	0	0	0	0
84	Rasio PDRB Perdagangan	%	100,00	1	0	0	0	0
85	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	100,00	1	0	0	0	0
86	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	Persen	98,66	1	0	0	0	0
87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	99,58	1	0	0	0	0
88	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	97,12	1	0	0	0	0
89	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	100,00	1	0	0	0	0
90	Persentase Pemuda Berprestasi	%	100,00	1	0	0	0	0
91	Persentase Atlet Berprestasi	%	100,00	1	0	0	0	0

NO	Indikator	Satuan	Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
92	Persentase Prestasi Olahraga	%	88,01	0	1	0	0	0
93	Persentase Wirausaha Muda	%	86,23	0	1	0	0	0
94	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	100,00	1	0	0	0	0
95	Persentase Atlet Unggulan	%	100,00	1	0	0	0	0
96	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	100,00	1	0	0	0	0
97	Indeks Zakat Nasional	Angka	98,77	1	0	0	0	0
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM							
98	Indeks Reformasi Hukum	Angka	100,00	1	0	0	0	0
99	Indeks Integritas Nasional	Angka	100,00	1	0	0	0	0
100	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	100,00	1	0	0	0	0
101	Indeks Pelayanan Publik	Angka	100,00	1	0	0	0	0
102	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	100,00	1	0	0	0	0
103	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	100,00	1	0	0	0	0
104	Indeks Harmoni	Angka	100,00	1	0	0	0	0
105	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100,00	1	0	0	0	0
RATA-RATA / JUMLAH			96,05	90	12	1	0	2

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Persentase skala nilai peringkat kinerja pada indikator kinerja daerah sebagaimana pada gambar berikut.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Gambar 2. 69
Persentase Skala Peringkat Kinerja Indikator Kinerja Daerah pada Periode Triwulan IV Tahun 2025

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui capaian skala nilai peringkat Sangat Tinggi terdapat 90 indikator atau mencapai 85,71%, skala Tinggi terdapat 12 indikator atau 11,43%, skala Sedang terdapat 1 indikator atau 0,95%, skala Rendah terdapat 0 indikator (0%) serta skala Sangat Rendah terdapat 2 indikator atau 1,90%.

2.2.11.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dari 251 indikator dengan rata-rata

capaian sebesar 90,18% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 365
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah							
	Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	99,49	V				
3	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	100	V				
4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	100	V				
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	98,06	V				
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	86,77		V			
7	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	%	95,61	V				
8	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional	%	100	V				
9	Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	100	V				
10	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	100	V				
11	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	100	V				
12	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	100	V				
13	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	100	V				
14	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	99,97	V				
15	Proporsi PAUD terakreditasi minimal B	%	100	V				
16	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	98,85	V				
17	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	100	V				
18	Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	100	V				
19	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	%	94,81	V				
20	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun	%	99,51	V				
21	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	81,4		V			
2	Kesehatan							
22	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	99,75	V				
23	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
24	Usia Harapan Hidup	Tahun	100	V				
25	Jumlah kematian ibu	Kasus	100	V				
26	Jumlah kematian balita	Kasus	100	V				
27	Prevalensi stunting	%	100	V				
28	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	V				
29	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	97,93	V				
30	Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	100	V				
31	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	100	V				
32	Net Death Rate (NDR)	Per Mill	100	V				
33	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	Angka	100	V				
34	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	%	100	V				
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
35	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
36	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
37	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	%	98,2	V				
38	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	%	93,13	V				
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
39	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				

No	Indikator	Satuan	Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
40	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
41	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	99,18	V				
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
42	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
43	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
44	Indeks Risiko Bencana	Angka	93	V				
45	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	100	V				
46	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	V				
47	Persentase Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	%	84,14		V			
48	Persentase Penegakan Perda/Perbup	%	91,89	V				
49	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	%	76,63		V			
6	Sosial							
50	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	100	V				
51	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
52	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	100	V				
53	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100	V				
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
7	Tenaga Kerja							
54	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
55	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	99,66	V				
56	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	99,58	V				
57	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	100	V				
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
58	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
59	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
60	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	95,45	V				
61	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	99,96	V				
62	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	%	100	V				
9	Pangan							
63	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
64	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
65	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	86,41		V			
66	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	84,23		V			
10	Lingkungan Hidup							
67	Indeks Kualitas Air	Angka	100	V				
68	Indeks Kualitas Udara	Angka	90,86		V			
69	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	89,44		V			
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
70	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
71	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
72	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	V				
73	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	100	V				
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
74	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
75	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
76	Persentase desa mandiri	%	100	V				
77	Nilai Skor Indeks Desa	%	100	V				
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
78	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	100	V				
79	TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)	Angka	100	V				
80	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	100	V				
14	Perhubungan							
81	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
82	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
83	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	%	100	V				
84	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	100	V				

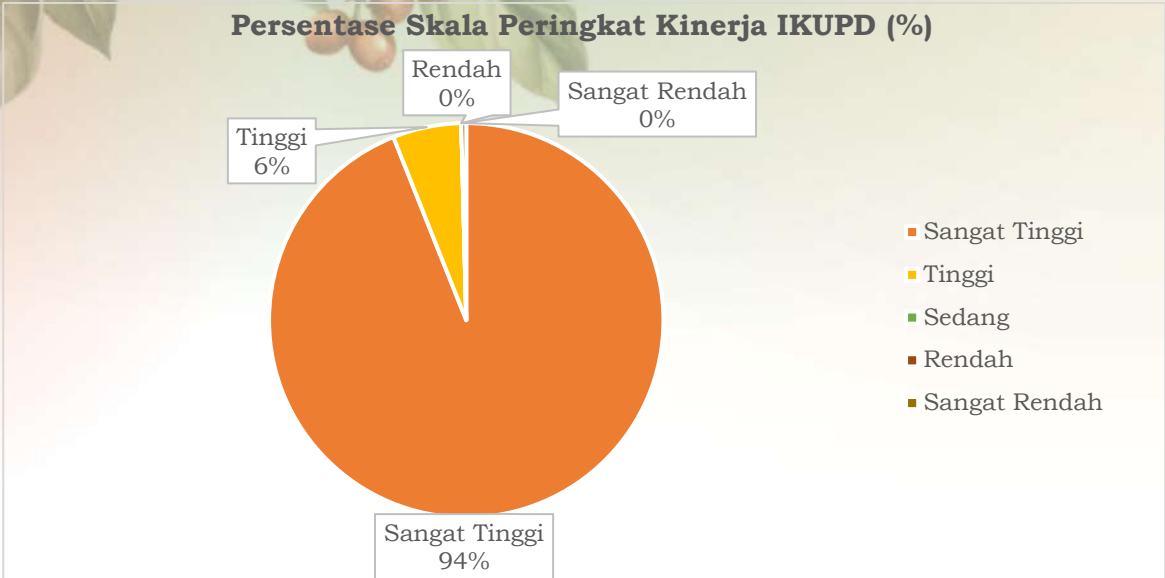
No	Indikator	Satuan	Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
85	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	100	V				
15	Komunikasi dan Informatika							
86	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
87	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
88	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	100	V				
89	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	97,56	V				
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
90	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
91	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
92	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	78,69		V			
93	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	89,01		V			
17	Penanaman Modal							
94	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
95	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
96	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar	100	V				
97	Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	%	100	V				
98	Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN	Proyek	100	V				
99	Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP	Layanan	100	V				
18	Kepemudaan dan Olahraga							
100	Persentase Pemuda Berprestasi	%	100	V				
101	Persentase Atlet Berprestasi	%	100	V				
102	Persentase Prestasi Olahraga	%	88,01		V			
103	Persentase Wirausaha Muda	%	86,23		V			
104	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	100	V				
105	Persentase Atlet Unggulan	%	100	V				
106	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	100	V				
19	Statistik							
107	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	95,15	V				
20	Persandian							
108	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	100	V				
21	Kebudayaan							
109	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
110	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
111	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	100	V				
112	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	100	V				
22	Perpustakaan							
113	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
114	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	99,97	V				
115	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	39,65					V
116	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	83,16		V			
117	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Angka	100	V				
23	Kearsipan							
118	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	96,14	V				
119	Nilai pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten	Angka	100	V				
	Urusan Pemerintahan Pilihan							
24	Kelautan dan Perikanan							
120	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	100	V				
25	Pariwisata							
121	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	97,88	V				
122	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	Orang	100	V				
123	Jumlah Desa Wisata Aktif	Desa	100	V				
124	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	%	100	V				
26	Pertanian							
125	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	100	V				
27	Perdagangan							
126	Rasio PDRB sektor perdagangan	%	100	V				
127	Disparitas Harga	%	100	V				
28	Perindustrian							
128	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	92,65	V				
129	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	%	100	V				
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
29	Sekretariat Daerah							
130	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	100	V				

No	Indikator	Satuan	Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
131	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Pemda)	Angka	100	V				
132	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	95,6	V				
133	Indeks Reformasi Hukum	Angka	100	V				
134	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	100	V				
135	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	V				
136	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	97,95	V				
137	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Angka	100	V				
138	IKM Sekretariat Daerah		100	V				
139	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	100	V				
30	Sekretariat DPRD							
140	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
141	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
142	Tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Angka	100	V				
143	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	V				
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
31	Perencanaan							
144	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	97,03	V				
145	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
146	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	100	V				
147	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Indeks	96,87	V				
148	Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	100	V				
149	Indeks Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	100	V				
32	Keuangan							
150	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
151	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
152	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	90,64		V			
153	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	100	V				
154	Opini BPK atas LKPD	Predikat	100	V				
33	Kepegawaian							
155	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
156	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
157	Indeks Sistem Merit	Angka	95,38	V				
34	Pendidikan dan Pelatihan							
158	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	99,76	V				
35	Penelitian dan Pengembangan							
159	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	100	V				
160	Kapabilitas Inovasi	Angka	100	V				
	Unsur Pengawasan Pemerintahan							
36	Inspektorat Daerah							
161	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	100	V				
162	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
163	Maturitas SPIP	Angka	100	V				
164	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	99,97	V				
165	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	99,97	V				
	Unsur Kewilayahan							
37	Kecamatan							
	Nilai IKM Kecamatan							
166	Kecamatan Temanggung	Angka	100	V				
167	Kecamatan Tembarak	Angka	100	V				
168	Kecamatan Pringsurat	Angka	100	V				
169	Kecamatan Kaloran	Angka	100	V				
170	Kecamatan Parakan	Angka	100	V				
171	Kecamatan Bulu	Angka	100	V				
172	Kecamatan Kedu	Angka	100	V				
173	Kecamatan Kandangan	Angka	100	V				
174	Kecamatan Candiroto	Angka	100	V				
175	Kecamatan Ngadirejo	Angka	99,34	V				
176	Kecamatan Jumo	Angka	100	V				
177	Kecamatan Wonobojo	Angka	100	V				
178	Kecamatan Kranggan	Angka	100	V				
179	Kecamatan Bejen	Angka	100	V				
180	Kecamatan Kledung	Angka	100	V				
181	Kecamatan Bansari	Angka	100	V				
182	Kecamatan Tlogomulyo	Angka	100	V				
183	Kecamatan Selopampang	Angka	100	V				

No	Indikator	Satuan	Capaian s.d TW IV 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
184	Kecamatan Gemawang	Angka	100	V				
185	Kecamatan Tretep	Angka	100	V				
	Nilai AKIP Kecamatan							
186	Kecamatan Temanggung	Angka	100	V				
187	Kecamatan Tembarak	Angka	100	V				
188	Kecamatan Pringsurat	Angka	100	V				
189	Kecamatan Kaloran	Angka	100	V				
190	Kecamatan Parakan	Angka	99,01	V				
191	Kecamatan Bulu	Angka	100	V				
192	Kecamatan Kedu	Angka	100	V				
193	Kecamatan Kandangan	Angka	100	V				
194	Kecamatan Candiroto	Angka	100	V				
195	Kecamatan Ngadirejo	Angka	100	V				
196	Kecamatan Jumo	Angka	100	V				
197	Kecamatan Wonoboyo	Angka	99,99	V				
198	Kecamatan Kranggan	Angka	100	V				
199	Kecamatan Bejen	Angka	100	V				
200	Kecamatan Kledung	Angka	100	V				
201	Kecamatan Bansari	Angka	100	V				
202	Kecamatan Tlogomulyo	Angka	100	V				
203	Kecamatan Selopampang	Angka	100	V				
204	Kecamatan Gemawang	Angka	100	V				
205	Kecamatan Tretep	Angka	100	V				
	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan							
206	Kecamatan Temanggung	%	99,9	V				
207	Kecamatan Tembarak	%	100	V				
208	Kecamatan Pringsurat	%	100	V				
209	Kecamatan Kaloran	%	100	V				
210	Kecamatan Parakan	%	100	V				
211	Kecamatan Bulu	%	100	V				
212	Kecamatan Kedu	%	100	V				
213	Kecamatan Kandangan	%	100	V				
214	Kecamatan Candiroto	%	100	V				
215	Kecamatan Ngadirejo	%	99,81	V				
216	Kecamatan Jumo	%	94,63	V				
217	Kecamatan Wonoboyo	%	100	V				
218	Kecamatan Kranggan	%	100	V				
219	Kecamatan Bejen	%	100	V				
220	Kecamatan Kledung	%	100	V				
221	Kecamatan Bansari	%	100	V				
222	Kecamatan Tlogomulyo	%	100	V				
223	Kecamatan Selopampang	%	100	V				
224	Kecamatan Gemawang	%	100	V				
225	Kecamatan Tretep	%	100	V				
	Nilai Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan							
226	Kecamatan Temanggung	Angka	100	V				
227	Kecamatan Tembarak	Angka	100	V				
228	Kecamatan Pringsurat	Angka	100	V				
229	Kecamatan Kaloran	Angka	100	V				
230	Kecamatan Parakan	Angka	100	V				
231	Kecamatan Bulu	Angka	99,95	V				
232	Kecamatan Kedu	Angka	100	V				
233	Kecamatan Kandangan	Angka	100	V				
234	Kecamatan Candiroto	Angka	100	V				
235	Kecamatan Ngadirejo	Angka	100	V				
236	Kecamatan Jumo	Angka	93,4	V				
237	Kecamatan Wonoboyo	Angka	100	V				
238	Kecamatan Kranggan	Angka	100	V				
239	Kecamatan Bejen	Angka	100	V				
240	Kecamatan Kledung	Angka	100	V				
241	Kecamatan Bansari	Angka	100	V				
242	Kecamatan Tlogomulyo	Angka	100	V				
243	Kecamatan Selopampang	Angka	100	V				
244	Kecamatan Gemawang	Angka	100	V				
245	Kecamatan Tretep	Angka	100	V				
	Unsur Pemerintahan Umum							
38	Kesatuan Bangsa dan Politik							
246	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	98,25	V				
247	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	100	V				
248	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	V				
249	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	%	100	V				
	RATA-RATA / JUMLAH		98,54	234	14	0	0	1

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Persentase skala nilai peringkat kinerja pada indikator IKUPD sebagaimana pada gambar berikut.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Gambar 2. 70
Persentase Skala Peringkat Kinerja IKUPD pada Periode Triwulan IV Tahun 2025

Dari gambar di atas dapat diketahui rincian skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi ada 234 indikator atau 93,98% dan Tinggi ada 14 indikator atau 5,62%, sedangkan peringkat kinerja Sedang dan Rendah masing-masing 0 indikator (0%), serta peringkat kinerja Sangat Rendah ada 1 indikator atau 0,40%.

2.2.11.5 Indikator Program

Capaian Indikator Program sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dari 480 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 98,03% dengan nilai peringkat kinerja Tinggi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 366
Capaian Indikator Program Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

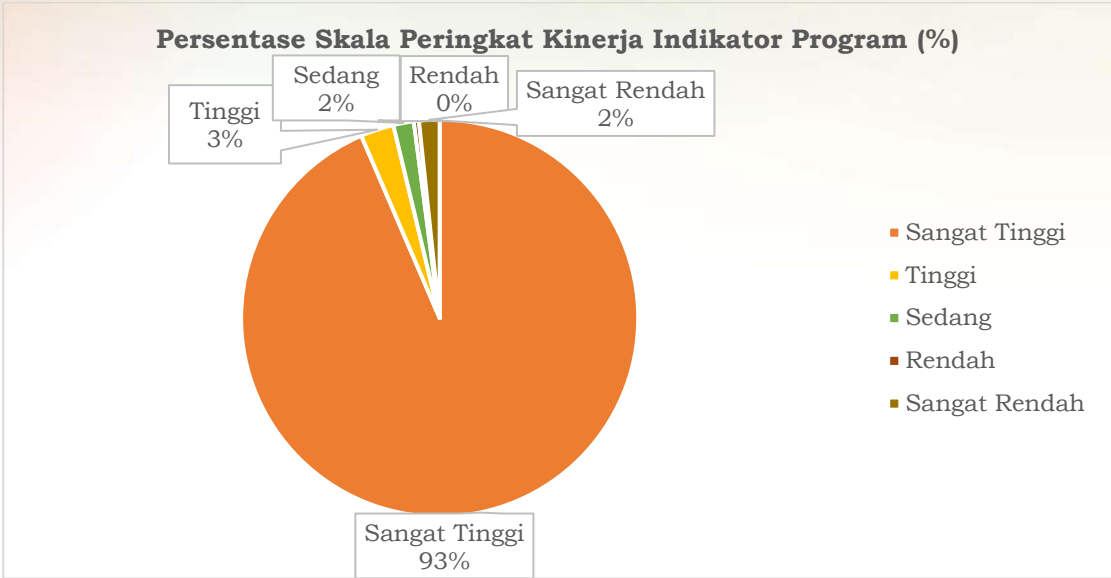
No.	Perangkat Daerah	Rekap Capaian Program						Jumlah Indikator
		Capaian s.d 2025						
		Rata - Rata	SR	T	S	R	SR	
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga	96,09	30	3	0	1	1	35
2	Dinas Kesehatan	99,20	40	2	0	0	0	42
3	Rumah Sakit Umum Daerah	88,18	8	0	1	0	1	10
4	Dinas PUPR	92,56	13	0	2	0	1	16
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80,07	7	0	0	1	2	10
6	Dinas Sosial	100,00	10	0	0	0	0	10
7	Dinperinaker	99,81	15	0	0	0	0	15
8	DPPPAAPKB	98,80	20	2	0	0	0	22
9	DKPPP	86,46	28	1	0	0	0	29
10	DPRKPLH	89,66	27	1	0	0	1	29

No.	Perangkat Daerah	Rekap Capaian Program						Jumlah Indikator
		Capaian s.d 2025						
		Rata - Rata	SR	T	S	R	SR	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00	5	0	0	0	0	5
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	7	0	0	0	0	7
13	Dinas Perhubungan	99,95	10	0	0	0	0	10
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	99,99	10	0	0	0	0	10
15	DINKOPDAG	98,64	8	1	0	0	0	9
16	DPMPTSP	100,00	5	0	0	0	0	5
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	90,00	10	0	0	0	1	11
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100,00	5	0	0	0	0	5
19	BAPPERIDA	97,67	8	0	1	0	0	9
20	BPKPAD	99,63	8	1	0	0	0	9
21	BKPSDM	98,91	5	1	0	0	0	6
22	Inspektorat	95,24	5	0	1	0	1	7
23	Sekretariat DPRD	100,00	6	0	0	0	0	6
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,00	5	0	0	0	0	5
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	5	0	0	0	0	5
26	Sekretariat Daerah Temanggung							
	Bagian Pemerintahan	100,00	2	0	0	0	0	2
	Bagian Hukum	100,00	5	0	0	0	0	5
	Bagian Kesra	99,59	3	0	0	0	0	3
	Bagian Perekonomian	90,48	1	1	1	0	0	3
	Bagian Pembangunan	83,12	1	0	2	0	0	3
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100,00	3	0	0	0	0	3
	Bagian Umum	100,00	3	0	0	0	0	3
	Bagian Organisasi	100,00	2	0	0	0	0	2
	Bagian Prokompim	100,00	1	0	0	0	0	1
27	Kecamatan Temanggung	99,88	8	0	0	0	0	8
28	Kecamatan Tembarak	99,64	6	0	0	0	0	6
29	Kecamatan Pringsurat	100,00	6	0	0	0	0	6
30	Kecamatan Kaloran	100,00	6	0	0	0	0	6
31	Kecamatan Parakan	98,85	8	0	0	0	0	8
32	Kecamatan Bulu	99,95	6	0	0	0	0	6
33	Kecamatan Kedu	100,00	6	0	0	0	0	6
34	Kecamatan Kandangan	100,00	6	0	0	0	0	6
35	Kecamatan Candiroto	100,00	6	0	0	0	0	6
36	Kecamatan Ngadirejo	100,00	8	0	0	0	0	8
37	Kecamatan Jumo	100,00	6	0	0	0	0	6
38	Kecamatan Wonobojo	100,00	6	0	0	0	0	6
39	Kecamatan Kranggan	99,97	8	0	0	0	0	8
40	Kecamatan Bejen	100,00	6	0	0	0	0	6
41	Kecamatan Kledung	100,00	6	0	0	0	0	6
42	Kecamatan Bansari	100,00	6	0	0	0	0	6
43	Kecamatan Tlogomulyo	100,00	6	0	0	0	0	6
44	Kecamatan Selopampang	100,00	6	0	0	0	0	6
45	Kecamatan Gemawang	100,00	6	0	0	0	0	6
46	Kecamatan Tretep	100,00	6	0	0	0	0	6

No.	Perangkat Daerah	Rekap Capaian Program						Jumlah Indikator
		Capaian s.d 2025						
		Rata - Rata	SR	T	S	R	SR	
	Jumlah Indikator / Rata-Rata Capaian	97,82	449	13	8	2	8	480

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah

Persentase skala nilai peringkat kinerja pada indikator program sebagaimana pada gambar berikut.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Gambar 2. 71
Persentase Skala Peringkat Kinerja Indikator Kinerja Program pada Periode Triwulan IV Tahun 2025

Dari gambar di atas dapat diketahui rincian skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi ada 4479 indikator atau 93,54%, Tinggi ada 13 indikator atau 2,71%, Sedang ada 8 indikator atau 1,67%, Rendah ada 2 indikator atau 0,42% dan Sangat Rendah ada 8 indikator atau 1,67%.

2.2.11.6 Indikator Kinerja IKUPD Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

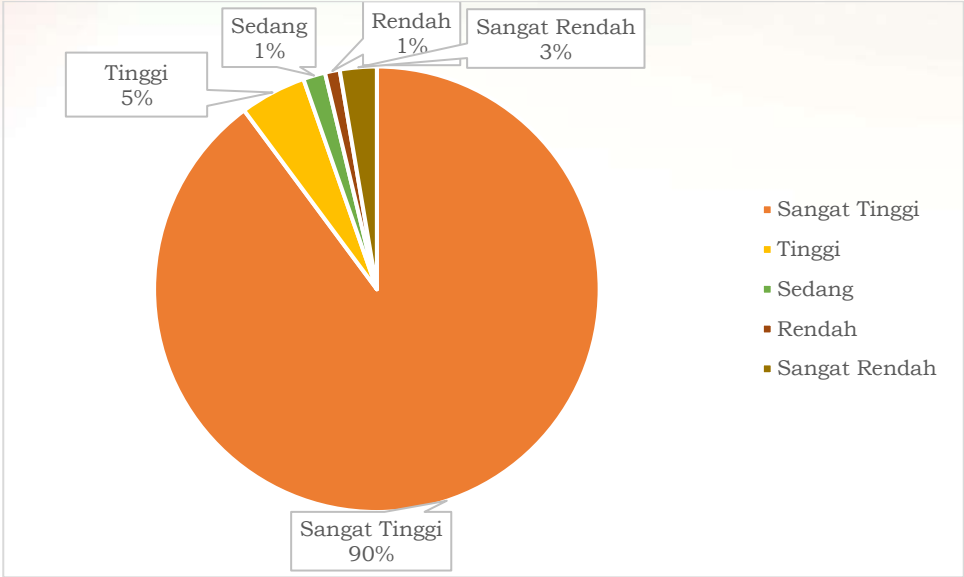
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 bidang urusan. Rincian capaian indikator IKUPD dan Indikator Program per bidang urusan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 367
Rata-rata Capaian Kinerja dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD dan Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata Capaian (%)	ST	T	S	R	SR	Total Indikator
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	Bidang Pendidikan	95,90	44	5	0	1	1	51
2	Bidang Kesehatan – Dinkes	99,49	51	2	0	0	0	53
3	Bidang Kesehatan – RSUD	94,09	10	0	1	0	1	12
4	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95,19	17	0	2	0	1	20
5	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	99,78	12	0	0	0	0	12

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata Capaian (%)	ST	T	S	R	SR	Total Indikator
6	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – Satpol PP Damkar	85,30	10	2	0	1	2	15
7	Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat – BPBD	100,00	10	0	0	0	0	10
8	Bidang Sosial	100,00	14	0	0	0	0	14
Jumlah		96,22	168	9	3	2	5	187

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Gambar 2. 72
Persentase skala penilaian kinerja pada indikator IKUPD dan Program
Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Triwulan IV Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja IKUPD dan program pada urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian yaitu 96,22% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi, dengan rincian skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi ada 168 indikator atau 89,84%, Tinggi ada 9 indikator atau 4,81%, Sedang ada 3 indikator atau 1,60%, Rendah ada 2 indikator atau 1,07% dan Sangat Rendah ada 5 indikator atau 2,67%.

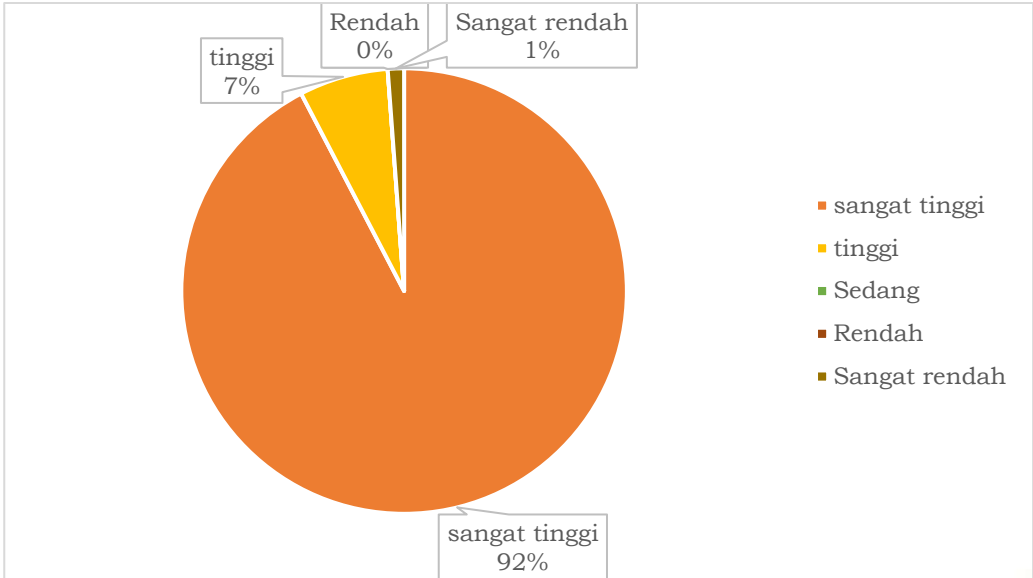
2.2.11.7 Indikator Kinerja IKUPD dan Program Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 17 bidang urusan. Rincian capaian indikator IKUPD dan Indikator Program per bidang sebagaimana pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 368
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD dan Program
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	ST	T	S	R	SR	Jumlah Total
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1	Bidang Tenaga Kerja	99.72	16	0	0	0	0	16
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	98.79	15	1	0	0	0	16
3	Bidang Pangan	103.50	6	2	0	0	0	8
4	Bidang Lingkungan Hidup	96.29	18	2	0	0	0	20
5	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	9	0	0	0	0	9
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	11	0	0	0	0	11
7	Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	99.55	13	1	0	0	0	14
8	Bidang Perhubungan	99.97	15	0	0	0	0	15
9	Bidang Komunikasi dan Informatika	99,96	6	0	0	0	0	6
10	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	95.96	5	2	0	0	0	7
11	Bidang Penanaman Modal	100	11	0	0	0	0	11
12	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	97.27	10	2	0	0	0	12
13	Bidang Statistik	100	2	0	0	0	0	2
14	Bidang Persandian	100	2	0	0	0	0	2
15	Bidang Kebudayaan	90.00	8	0	0	0	1	9
16	Bidang Perpustakaan	93.56	6	1	0	0	1	8
17	Bidang Kearsipan	99.03	4	0	0	0	0	4
JUMLAH		98,44	157	11	0	0	2	169

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah



Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Gambar 2. 73
Persentase skala penilaian kinerja pada indikator IKUPD dan Program
urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
Triwulan IV Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja IKUPD dan program pada urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian yaitu 98,44% dengan skala penilaian kinerja sangat tinggi, dengan rincian skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi ada 157 indikator atau 92%, Tinggi ada 11 indikator atau 7%, Sedang ada 0 indikator atau 0%, Rendah ada 0 indikator atau 0% dan Sangat Rendah ada 2 indikator atau 1%.

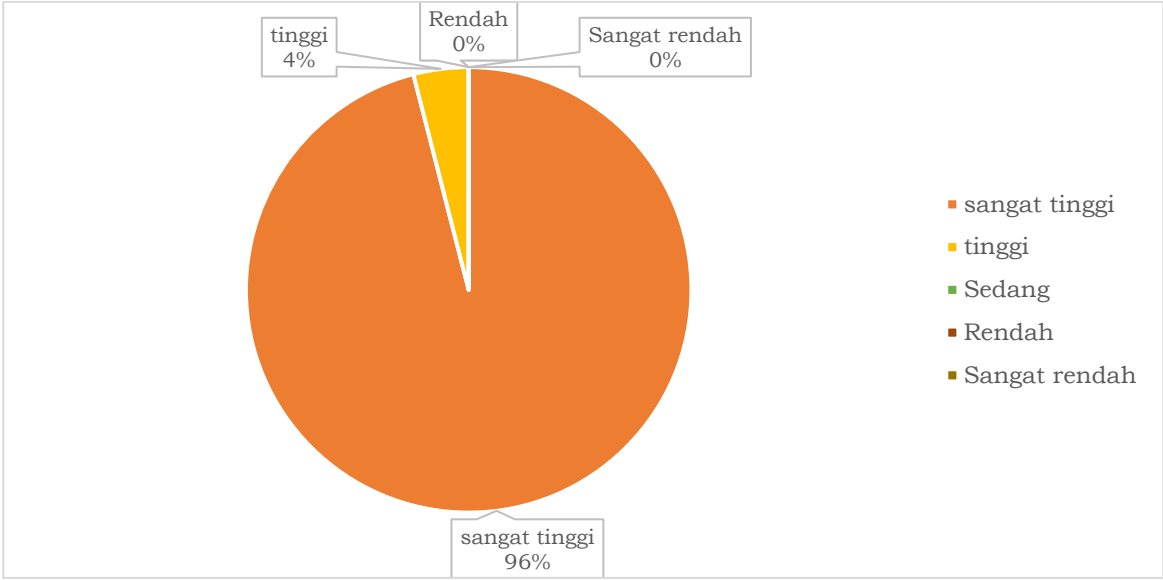
2.2.11.8 Indikator Kinerja IKUPD dan Program yang Mendukung Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilahan terdiri dari 5 bidang urusan. Rincian capaian indikator IKUPD dan Indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 369
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	ST	T	S	R	SR	Jumlah Total
Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	100	5	0	0	0	0	5
2	Bidang Pariwisata	99.74	10	0	0	0	0	10
3	Bidang Pertanian	96.95	21	1	0	0	0	22
4	Bidang Perdagangan	98.64	7	1	0	0	0	8
5	Bidang Perindustrian	98.16	5	0	0	0	0	5
JUMLAH		98,69	48	2	0	0	0	50

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah



Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Gambar 2. 74
Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD dan Program Urusan Pemerintahan Pilihan Triwulan IV Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja IKUPD dan program pada urusan pemerintahan pilihan rata-rata capaian yaitu 98,69% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi, dengan rincian skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi ada 48 indikator atau 96%, Tinggi ada 2 indikator atau 4%, Sedang ada 0 indikator atau 0%, Rendah ada 0 indikator atau 0%, dan Sangat Rendah ada 0 indikator atau 0%.

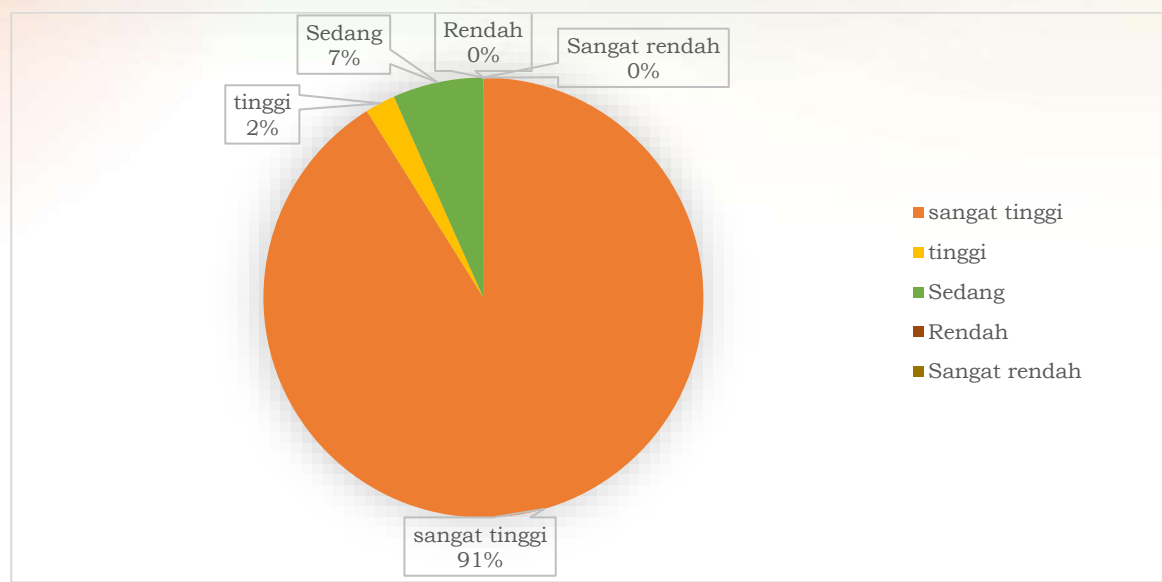
2.2.11.9 Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan pilahan terdiri dari 2 bidang urusan. Rincian capaian indikator IKUPD dan Indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 370
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD Pendukung
Urusan Pemerintahan

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	ST	T	S	R	SR	Jumlah Total
Unsur pendukung urusan pemerintahan								
1	Sekretariat Daerah	87,74	31	1	3	0	0	35
2	Sekretariat DPRD	100	10	0	0	0	0	10
JUMLAH		93,87	41	1	3	0	0	45

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Gambar 2. 75
Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD dan Program
Pendukung Urusan Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja IKUPD dan program pada pendukung urusan pemerintahan rata-rata capaian yaitu 93,87% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi, dengan rincian skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi ada 41 indikator atau 91%, Tinggi ada 1 indikator atau 2%, Sedang ada 3 indkator atau 7%, Rendah ada 0 indikator atau 0% dan Sangat Rendah ada 0 indikator atau 0%.

2.2.11.10 Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan

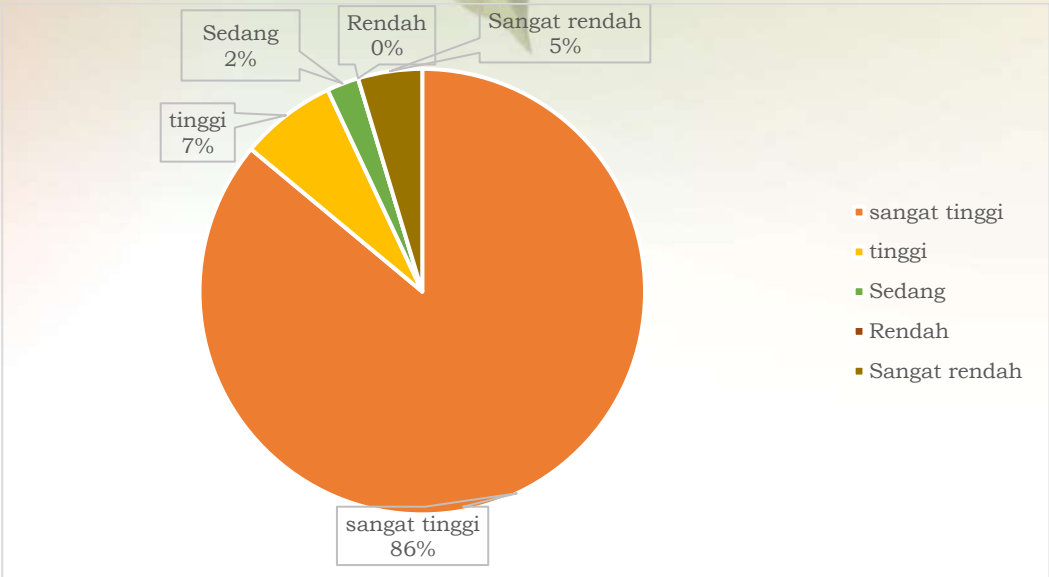
Unsur penunjang Urusan pemerintahan terdiri dari 5 bidang urusan. Rincian capaian indikator IKUPD dan Indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 371
Rata-Rata Capaian Kinerja dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD dan Program
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	ST	T	S	R	SR	Jumlah Total
Unsur penunjang urusan pemerintahan								
1	Perencanaan	97.14	11	0	1	0	0	12
2	Keuangan	99.43	12	2	0	0	0	14
3	Kepegawaian	98.14	7	1	0	0	0	8

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	ST	T	S	R	SR	Jumlah Total
4	Pendidikan dan Pelatihan	99,88	2	0	0	0	0	2
5	Penelitian dan Pengembangan	100	5	0	0	0	2	7
JUMLAH		98,91	37	3	1	0	2	43

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Gambar 2. 76
Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD dan Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja IKUPD dan program pada Unsur penunjang urusan pemerintahan rata-rata capaian yaitu 98,91% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi, dengan rincian skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi ada 37 indikator atau 86%, Tinggi ada 3 indikator atau 7%, Sedang ada 1 indkator atau 2%, Rendah ada 0 indikator atau 0% dan Sangat Rendah ada 2 indikator atau 5%.

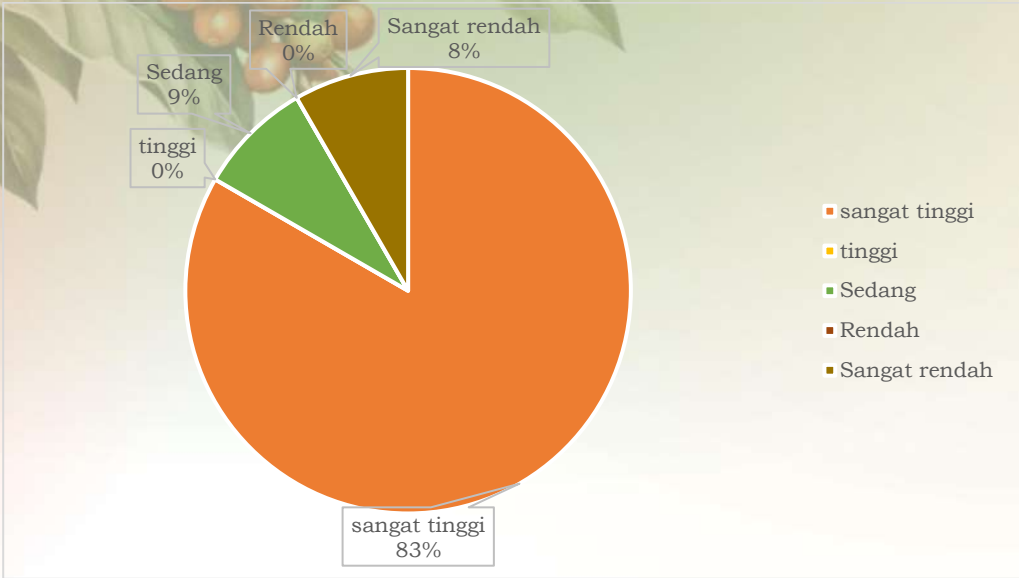
2.2.11.11 Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang Urusan pemerintahan terdiri dari 5 bidang urusan. Rincian capaian indikator IKUPD dan Indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 372
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD dan Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Urusan/Bidang	Rata-rata capaian (%)	ST	T	S	R	SR	Jumlah Total
Unsur pengawasan urusan pemerintahan								
1	Inspektorat Daerah	97.61	10	0	1	0	1	12
JUMLAH		97.61	10	0	1	0	1	12

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Gambar 2. 77

Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD dan Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja IKUPD dan program pada unsur pengawasan urusan pemerintahan rata-rata capaian yaitu 97.61% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi, dengan rincian skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi ada 10 indikator atau 83%, Tinggi ada 0 indikator atau 0%, Sedang ada 1 indikator atau 8%, Rendah ada 0 indikator atau 0% dan Sangat Rendah ada 1 indikator atau 9%.

2.2.11.12 Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur Pemerintahan Umum

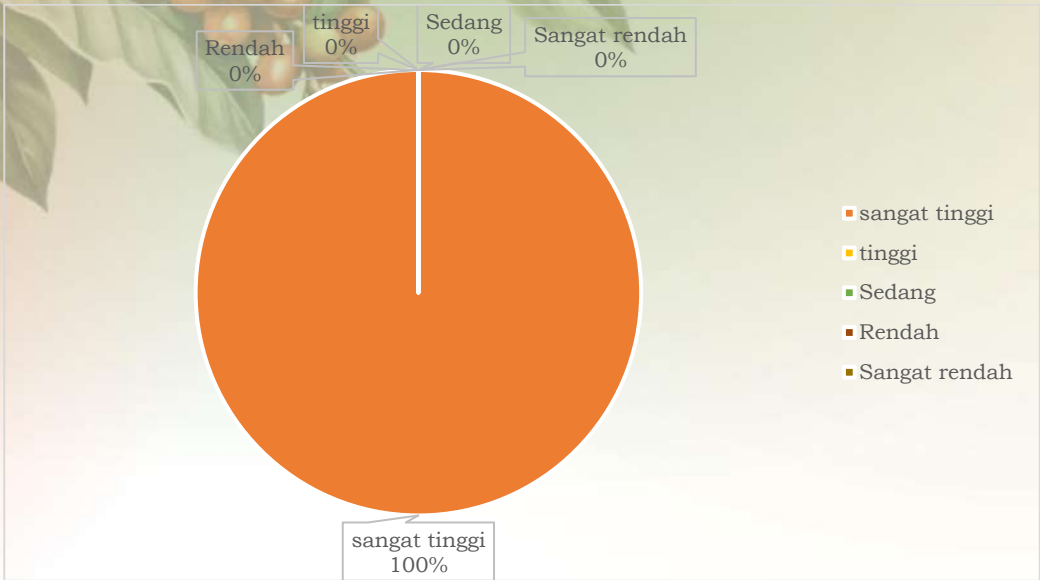
Unsur pemerintahan umum terdiri dari 1 bidang urusan. Rincian capaian indikator IKUPD dan Indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 373

Rata-Rata Capaian Kinerja dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD dan Program Unsur Pemerintahan Umum

No	Urusan/Bidang	Rata-rata capaian (%)	ST	T	S	R	SR	Jumlah Total
Unsur Pemerintahan Umum								
1	Fungsi Lainnya - Kesatuan Bangsa Politik	99.78	9	0	0	0	0	9
JUMLAH		99.78	9	0	0	0	0	9

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Gambar 2. 78
Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD dan Program
Unsur Pemerintahan Umum Triwulan IV Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja IKUPD dan program pada unsur pemerintahan umum rata-rata capaian yaitu 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi, dengan rincian skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi ada 9 indikator atau 100%, Tinggi ada 0 indikator atau 0%, Sedang ada 0 indkator atau 0%, Rendah ada 0 indikator atau 0% dan Sangat Rendah ada 0 indikator atau 0%.

2.2.11.13 Indikator Kinerja IKUPD dan Program Unsur Kewilayahan

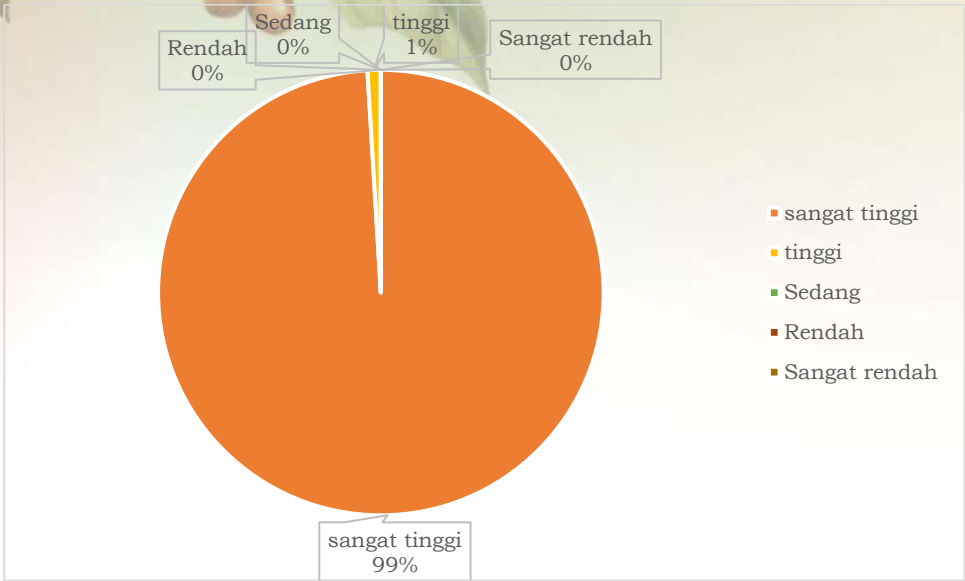
Unsur kewilayahan terdiri dari 1 bidang urusan. Rincian capaian indikator IKUPD dan Indikator Program perbidang sebagaimana pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 374
Rata-Rata Capaian Kinerja dan Skala Penilaian Kinerja IKUPD dan Program
Unsur Kewilayahan

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	ST	T	S	R	SR	Jumlah Total
1	Kecamatan Temanggung	99.93	12	0	0	0	0	12
2	Kecamatan Tembarak	99.82	10	0	0	0	0	10
3	Kecamatan Pringsurat	100	10	0	0	0	0	10
4	Kecamatan Kaloran	100	10	0	0	0	0	10
5	Kecamatan Parakan	99.30	12	0	0	0	0	12
6	Kecamatan Bulu	99.97	10	0	0	0	0	10
7	Kecamatan Kedu	100	10	0	0	0	0	10
8	Kecamatan Kandungan	100	10	0	0	0	0	10
9	Kecamatan Candiroto	100	9	1	0	0	0	10
10	Kecamatan Ngadirejo	99.89	12	0	0	0	0	12
11	Kecamatan Jumo	98.50	10	0	0	0	0	10
12	Kecamatan Wonobooyo	99.99	10	0	0	0	0	10
13	Kecamatan Kranggan	99.98	12	0	0	0	0	12
14	Kecamatan Bejen	100	10	0	0	0	0	10
15	Kecamatan Kledung	100	10	0	0	0	0	10
16	Kecamatan Bansari	100	10	0	0	0	0	10
17	Kecamatan Tlogomulyo	100	10	0	0	0	0	10
18	Kecamatan Selopampang	100	10	0	0	0	0	10
19	Kecamatan Gemawang	100	9	1	0	0	0	10

No	Urusan/ Bidang	Rata-rata capaian (%)	ST	T	S	R	SR	Jumlah Total
20	Kecamatan Tretep	100	10	0	0	0	0	10
JUMLAH		99,86	206	2	0	0	0	208

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026 data diolah



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Gambar 2. 79
Persentase Skala Penilaian Kinerja pada Indikator IKUPD dan Program Unsur Kewilayahan Triwulan IV Tahun 2025

Rata-rata capaian kinerja IKUPD dan program pada unsur kewilayahan rata-rata capaian yaitu 99,86% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi, dengan rincian skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi ada 206 indikator atau 99%, Tinggi ada 2 indikator atau 1%, Sedang ada 0 indkator atau 0%, Rendah ada 0 indikator atau 0% dan Sangat Rendah ada 0 indikator atau 0%.

2.2.12 Evaluasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 375
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan IV

No	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	PENDIDIKAN	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	95,71	94,51	94,29	93,91	94,81
		Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	97,70	96,06	99,94	99,33	99,87
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	90,45	73,28	99,25	97,74	94,49
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam	%	25,51	21,55	13,83	31,37	35,97

No	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
				2021	2022	2023	2024	2025
		pendidikan kesetaraan						
Capaian SPM Bidang Pendidikan				77,34	71,35	76,83	80,59	81,29
2.	KESEHATAN	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	99,09	100	100	100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	81,64	92,95	100	100	100
		Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	84,92	82,05	100	100	94,97
		Cakupan Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	69,25	89,07	100	100	99,71
		Cakupan Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	89,52	83,22	100	100	95,41
		Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	30,97	84,78	100	100	96,62
		Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	92,5	100	100	100	100
		Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100
		Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	62,67	95,65	100	100	100
		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	73,49	87,03	100	100	100
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan				82,08	92,82	100,00	100,00	98,89
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	n.a	n.a	n.a	100	100
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	92,38	100	100	100	100
Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				92,38	100	100	100	100
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
		Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100

No	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
				2021	2022	2023	2024	2025
		yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni						
Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman				100	100	100	100	100
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	n.a	n.a	n.a	100	91,89
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	47,73	43,75	98,25	42,72	53,26
Capaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				86,93	85,94	99,56	88,54	89,03
6.	SOSIAL	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100
Capaian SPM Bidang Urusan Sosial				100	100	100	100	100

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dan penurunan pada sejumlah indikator di beberapa urusan.

1) Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Untuk indikator partisipasi PAUD usia 5–6 tahun, capaian sebesar 89,75% menunjukkan kinerja yang tetap

baik. Pada indikator partisipasi pendidikan dasar usia 7–12 tahun, capaian sebesar 99,87% menandakan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah terlayani dengan baik. Sementara itu, pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama menunjukkan capaian sebesar 94,49 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023. Penurunan ini menunjukkan masih diperlukan adanya perbaikan pada upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan jenjang menengah pertama. Untuk indikator partisipasi pendidikan kesetaraan bagi usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atau yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan memiliki capaian sebesar 35,97% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan program dalam menjangkau kelompok sasaran dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 mencerminkan bahwa layanan pendidikan di Kabupaten Temanggung tetap berjalan dengan sangat baik, namun memerlukan upaya penguatan untuk menjaga konsistensi capaian agar kembali mencapai tingkat optimal seperti tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada jenjang pendidikan menengah pertama dan pemerataan akses pendidikan dasar.

2) Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada awal periode (2021), capaian sebesar 82,08% meningkat menjadi 92,82%, hingga mencapai 100% pada tahun berikutnya yang menandakan terpenuhinya seluruh indikator layanan kesehatan secara optimal. Meskipun pada tahun 2025, capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan mengalami sedikit penurunan menjadi 98,89%. Secara keseluruhan, kinerja SPM bidang kesehatan menunjukkan perkembangan capaian positif yang mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang juga semakin baik. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan layanan, namun secara umum pemerintah daerah mampu menjaga capaian tetap mendekati target maksimal.

3) Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan data capaian SPM pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya terkait layanan dasar air minum dan

pengolahan air limbah domestik, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian SPM pada urusan ini berada pada kategori sangat tinggi, dengan mayoritas indikator telah mencapai target maksimal. Hal ini mengindikasikan keberhasilan dalam penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

4) Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan data capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menunjukkan hasil capaian kinerja yang sangat optimal dan konsisten selama 5 tahun terakhir. Pada indikator persentase warga negara yang memperoleh rumah layak huni, capaian telah mencapai 100% secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian yang layak telah terpenuhi secara menyeluruh. Demikian pula pada indikator persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni, capaian juga berada pada angka 100% di seluruh tahun. Ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat terdampak program pembangunan untuk tetap mendapatkan hunian yang layak.

5) Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan data capaian SPM pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih berfluktuasi. Pada indikator penegakan Perda/Perbup, capaian baru tersedia pada tahun 2024 sebesar 100%, namun mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 91,89%. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam konsistensi penegakan regulasi di lapangan. Adapun indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa layanan penanganan kebakaran belum stabil dan masih memerlukan penguatan, baik dari sisi sarana prasarana, respons waktu, maupun kapasitas SDM.

6) Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

Berdasarkan data capaian SPM pada urusan Sosial dapat dilihat

bahwa keseluruhan indikator kinerja menunjukkan angka 100% secara konsisten dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Capaian tersebut mencerminkan penanganan terhadap anak telantar, disabilitas, lansia, tunasusila, hingga korban bencana telah mencapai jangkauan maksimal (100%) sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

2.2.13 Evaluasi Kinerja Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

Laporan capaian SDGs disusun setiap tahun melalui kegiatan Desk tiap semester yang melibatkan Perangkat Daerah serta para pemangku kepentingan terkait. Berikut ini disampaikan Draft Laporan SDGs Semester II Tahun 2025 di Kabupaten Temanggung, dengan proses pengesahan data yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 376
Capaian Indikator SDGs Tahun 2025

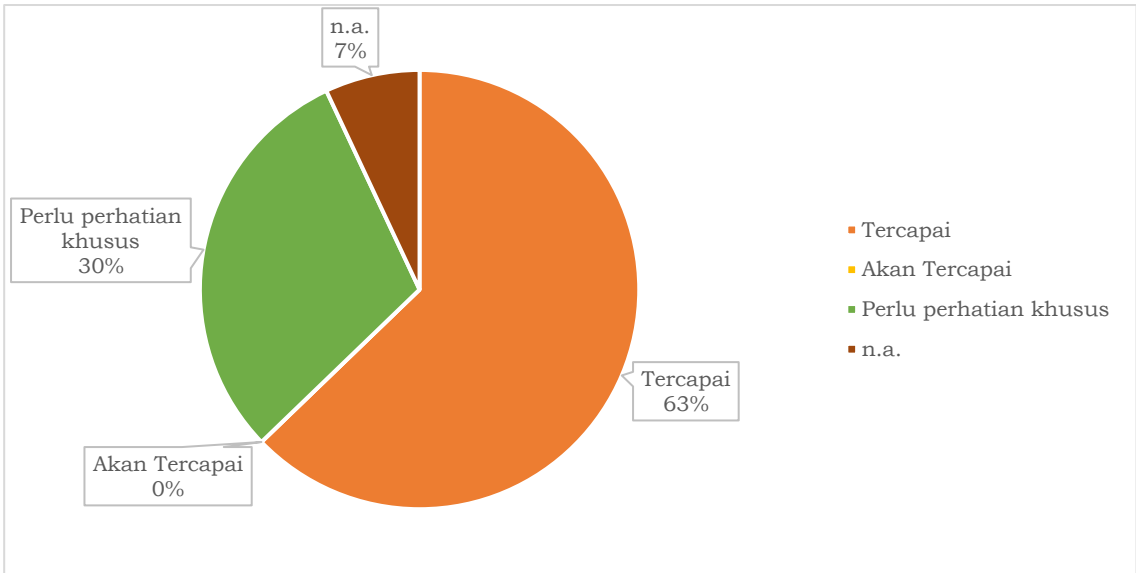
NO	PILAR	GOAL		JUMLAH			PERANGKAT DAERAH	STATUS CAPAIAN		
				INDIKATOR	TERISI	N.A.				
1	I. PILAR SOSIAL	1	Mengurangi Kemiskinan	3	3	0	BPS, DINKES			
		2	Tanpa Kelaparan	3	3	0	DINKES, DKPPP	0	0	3
		3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	8	8	1	DINKES, POLRES	5	0	2
		4	Pendidikan yang Berkualitas	5	5	2	DINDIKPORA, BPS	1	0	2
		5	Kesetaraan Gender	1	1	0	DINKOMINFO	1	0	0
		JUMLAH		20	17	3		9	0	8
2	II. PILAR EKONOMI	7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	1	0	BPS	1	0	0
		8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	2	2	0	BPS	2	0	0
		9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2	2	0	BPS, DINKOMINFO	1	0	1
		10	Berkurangnya Kesenjangan	1	1	0	BPS	1	0	0
		17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	3	3	0	BPAPKAD	2	0	1
		JUMLAH		9	9	0		7	0	2
3	III. PILAR LINGKUNGAN	6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	2	2	0	DPUPR, BPS, DINKES	1	0	1
		11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	2	2	0	BPBD, DPRKPLH	2	0	0
		12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	1	1	0	DPRKPLH	1	0	0
		13	Penanganan Perubahan Iklim	1	1	0	DPRKPLH	0	0	1
		14	Ekosistem Lautan	0	0	0	-	0	0	0
		15	Ekosistem Daratan	0	0	0	-	0	0	0
		JUMLAH		6	6	0		4	0	2
4	IV. PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	8	8	0	BPKPAD, DINDUKCAPIL, BAG. ORGANISASI, BPS	7	0	1
		JUMLAH		8	8	0		7	0	1
JUMLAH INDIKATOR				43	40	3		27	0	13

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026, data diolah

Pengukuran, penentuan dan penilaian kinerja TPB/SDGs di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 meliputi : (1) Jumlah total indikator TPB/SDGs Kabupaten Temanggung; (2) Kriteria penilaian capaian indikator TPB/SDGs; dan (3) Status capaian indikator TPB/SDGs. Indikator yang digunakan sudah menyesuaikan dengan metadata yaitu sejumlah 43 indikator, 40 indikator terisi datanya, dan 3 indikator *Not Available* (NA) karena BPS Provinsi belum menerbitkan untuk indikator

tersebut. Tidak seluruh indikator TPB/*SDGs* di Kabupaten Temanggung mempunyai angka target, sehingga beberapa indikator tidak bisa dibandingkan. Ada tiga status capaian indikator, yaitu:

- a. Telah tercapai:
- Untuk indikator positif: jika capaian sama dengan atau lebih dari target
 - Untuk indikator negatif: jika capaian kurang dari atau sama dengan target
- b. Akan tercapai atau membaik: digunakan untuk indikator yang tidak mempunyai target dan capaiannya lebih baik dari tahun sebelumnya.
- c. Perlu perhatian khusus atau memburuk:
- Untuk indikator positif: jika capaian lebih kecil dari target
 - Untuk indikator negatif: jika capaian lebih besar dari target



Sumber: *Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah*
Gambar 2. 80
Status Capaian Indikator TPB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan status capaian, terdapat 4 kondisi dari 43 indikator TPB Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- Telah tercapai 63% yaitu 27 indikator
- Akan tercapai atau membaik 0% yaitu 0 indikator
- Perhatian khusus atau memburuk 30% yaitu 13 indikator
- Data tidak tersedia (na) 7% yaitu 3 indikator

Adapun indikator yang tidak tercapai diantaranya adalah:

1. Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan (Rumah milik sendiri).

Cakupan indikator ini adalah penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian, yaitu hunian yang memberikan kepastian bermukim (*secure*

tenure) terdiri dari: (a) milik sendiri, (b) sewa/kontrak, (c) dinas, (d) bebas sewa, (e) lainnya. Klasifikasi Status Penguasaan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh BPS, maka klasifikasinya menjadi:

- a. Milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik KRT atau salah satu seorang ART. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri.
- b. Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT/ART dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak.
- c. Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT atau salah seorang ART dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.
- d. Bebas sewa milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh RT tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
- e. Bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara, dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.
- f. Rumah dinas, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh RT tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
- g. Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

Hak atas hunian terjamin meliputi dua sub-komponen: (i) hak kepemilikan diakui sebagai dokumen yang sah dan memberikan kepastian bermukim, dan (ii) persepsi sebagai hunian terjamin, karena jenis kepemilikan dari hunian dianggap didukung oleh dokumen yang sah, di mana keduanya perlu ditunjukkan sebagai hunian terjamin.

Jumlah rumah tangga bersumber dari hasil proyeksi penduduk yang dibuat berdasarkan data sensus penduduk terakhir. Penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 18 tahun dan lebih, dan penduduk yang berumur di bawah 18 tahun tetapi sudah kawin.

Berdasarkan data dari BPS, realisasi kepemilikan rumah dan hak atas tanah mencapai angka 94,37, hasil ini masih di bawah target tahun 2025 yaitu sebesar 95,98.

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Jika IKP mengukur ketahanan pangan pada tingkat kabupaten, maka ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur oleh BPS. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi diukur untuk mengetahui proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini membantu dalam memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu.

Kondisi di Kabupaten Temanggung terkait dengan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan pada tahun 2025 terealisasi dengan angka capaian 11,23%. Angka tersebut masih belum sesuai target tahun 2025 yaitu 9,7%. Kondisi tersebut menunjukkan lebih banyak penduduk yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya fluktuasi produksi dan harga pangan serta inflasi yang tinggi sehingga mengurangi daya beli masyarakat.

3. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

Prevalensi *stunting* balita di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif, mulai tahun 2021 hingga tahun 2025. Angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Temanggung masih tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2025, angka prevalensi *stunting* mencapai 27,30%, di mana angka tersebut masih berada di atas target tahun 2025 yaitu 23,90%. *Stunting* berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik diantaranya praktek

pemberian air susu ibu (ASI) Eksklusif di enam bulan pertama usia bayi, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.

4. Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe

Prevalensi wasting balita merupakan Persentase anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -2 SD pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Angka prevalensi wasting di Kabupaten Temanggung masih tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2025, angka prevalensi stunting mencapai 8,5%, di mana angka tersebut masih berada di atas target tahun 2025 yaitu 8%.

Hal ini dikarenakan permasalahan gizi di Indonesia masih menjadi perhatian penting yang wajib diatasi dengan intervensi sensitif dan spesifik gizi dan telah dilakukan upaya peningkatan monitoring dan evaluasi pelaporan dan pelacakan kasus balita bermasalah gizi di lapangan. Namun juga masih terdapat kendala pemahaman masyarakat dalam hal program intervensi spesifik seperti pemberian PMT lokal dengan beranggapan bahwa intervensi tersebut merupakan makanan utama sehingga permasalahan gizi salah satunya seperti wasting masih perlu diatasi yaitu pemahaman masyarakat dalam hal program intervensi spesifik seperti pemberian PMT lokal dengan beranggapan bahwa intervensi tersebut merupakan makanan utama sehingga permasalahan gizi salah satunya seperti wasting masih perlu diatasi.

5. Kematian akibat kecelakaan lalu lintas (Proxy)

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan target pada tahun tersebut. Angka kecelakaan per 100.000 penduduk pada tahun 2025 mencapai angka 8,71. Angka tersebut masih di atas target tahun 2025 yaitu 4,00.

6. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pada tahun 2025, angka capaian kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Temanggung adalah 93,45%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan kuota peserta PBI JK Kab. Temanggung oleh Kementerian Sosial dan penambahan jumlah kepesertaan JKN dari

berbagai segmen kepesertaan JKN terutama segmen PBPU dan BP Mandiri dan PPU Badan Usaha. Selain itu terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mencapai UHC antara lain:

1. Advokasi kepada pemangku kebijakan untuk meningkatkan anggaran kepesertaan PBPU Pemda untuk mendukung tercapainya UHC (BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPKPAD)
2. Koordinasi lintas sektor untuk dapat meningkatkan kepesertaan JKN melalui berbagai segmen kepesertaan (Dinkes, BPJS Kesehatan, Kemenag, Disnaker, OPD atau instansi vertikal yang memberikan pelayanan publik)
3. Mendorong masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk menjadi peserta JKN dari segmen mandiri dan perusahaan untuk mendaftarkan pekerjaanya menjadi peserta JKN dari segmen PBPU Badan Usaha (BPJS Kesehatan)

Namun meskipun demikian terdapat kendala yang menghambat tercapainya UHC di Kabupaten Temanggung antara lain adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk menyediakan anggaran iuran JKN peserta PBPU dan BP yang dibayarkan iurannya oleh Pemda dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN segmen mandiri masih rendah.

7. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca pada tingkat SD/Sederajat

Berdasarkan Rapor Pendidikan Rata-rata kemampuan literasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional merupakan Nilai rerata peserta didik Siswa SD Sederajat berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam teks (teks informasional dan teks fiksi).

Rata-rata kemampuan literasi siswa SD Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional digunakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi membaca siswa secara nasional, serta sebagai alat untuk melakukan perbaikan dan strategi kebijakan pendidikan lebih lanjut.

Rata-rata angka literasi SD Sederajat selama kurun waktu (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, sedangkan rata-rata angka numerasi SD Sederajat selama kurun waktu 5 tahun terakhir fluktuatif. Pada tahun 2020-2021 belum ada capaian untuk angka

numerasi karena belum dilakukan perhitungan oleh Kemendikbud RI. Tahun 2023 angka numerasi mengalami kenaikan sebesar 1,85, pada tahun 2024 menurun sebesar 7,95.

Faktor Penghambat dan Permasalahan : pelaksanaan kegiatan program GLS belum dilaksanakan secara kontinu sesuai program sekolah. Masih terdapat kendala dalam implementasi kegiatan sesuai jadwal yang sudah disusun.

8. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi : DI-DIV, S1, S2, S2 Terapan atau S3.

Rumus Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus/berijazah pendidikan tinggi dibagi Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100% (sesuai perhitungan BPS).

Faktor Penghambat dan Permasalahan :

- a. Sebagian siswa masih mengalami kesulitan dan kecemasan terhadap matematika (*math anxiety*), sehingga kurang percaya diri dalam menyelesaikan soal berbasis konteks.
 - b. Pembelajaran matematika di beberapa sekolah masih berorientasi pada rumus dan hasil akhir, belum menekankan proses berpikir matematis dan penalaran logis.
 - c. Ketimpangan sarana dan prasarana antar sekolah, terutama antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan.
 - d. Kurangnya media pembelajaran yang menarik dan kontekstual, yang dapat membantu siswa memahami konsep abstrak.
 - e. Minimnya integrasi numerasi dalam mata pelajaran lain, padahal numerasi bersifat lintas disiplin ilmu.
 - f. Belum adanya sistem pemetaan capaian numerasi secara menyeluruh dan berkala di tingkat kabupaten.
 - g. Rendahnya keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran numerasi di rumah.
9. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat,

SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas (Rasio APM Perempuan/Laki SD/ Sederajat)

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ Sederajat dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ Sederajat (7-12 tahun), dinyatakan dalam persentase. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Program Paket A adalah program pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI.

Sedangkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus APK SMP sederajat adalah Jumlah peserta didik di jenjang SMP sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada daerah yang bersangkutan (Rapor Pendidikan).

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, serta siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan.

Berdasarkan data Semester II tahun 2025, terkait indikator tersebut, Kabupaten Temanggung belum bisa memenuhi target pada tahun 2025. Target pada tahun tersebut sebesar 99,65%, sedangkan untuk realisasinya sebesar 96,94%.

10. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Pelayanan air minum di Kabupaten Temanggung dikelola oleh beberapa lembaga yakni PDAM (Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung) dan Non PDAM. Penyediaan air minum oleh PDAM melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Temanggung sedangkan penyediaan air minum di Kawasan pedesaan diselenggarakan melalui pengembangan SPAM Non PDAM. Cakupan

Akses air minum layak di Kabupaten Temanggung diselenggarakan melalui penyediaan air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan.

Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman di Kabupaten Temanggung masih sama dengan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan karena menggunakan basis data yang bersumber dari jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebagai operator yang telah memenuhi kriteria air minum aman di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar capaian akses air minum di Kabupaten Temanggung merupakan jaringan perpipaan pedesaan yang dikelola oleh KPSPAM, yang mana dalam pengelolaannya belum semua KPSPAM yang rutin dalam melakukan pengujian kualitas air minum sehingga belum dapat memenuhi kriteria Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

11. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman

Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja, atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.

Penurunan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung ini dikarenakan adanya penyesuaian kriteria sanitasi aman dalam pengambilan data yang semula hanya berfokus pada ketersediaan fasilitas sanitasi menjadi lebih berfokus pada konsep pengelolaan air limbah domestik. Jika dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga di Kabupaten Temanggung, angka ini masih kecil, mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan cakupan sanitasi aman demi terpenuhinya pelayanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.

12. Proporsi Penduduk Terlayani *Mobile Broadband*

Akses bergerak pitalebar (*mobile boradband*) adalah akses yang berkecapatan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*). Jaringan 4G adalah jaringan seluler yang memenuhi standar generasi keempat untuk transmisi nirkabel dan seluler.

Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband* (internet seluler 4G/5G) adalah indikator SDGs (tujuan 9.c.1) yang mengukur persentase individu yang dapat mengakses internet kecepatan minimal 1 Mbps melalui jaringan seluler. Angka ini menunjukkan cakupan wilayah bukan blankspot dan secara nasional, lebih dari 50% penduduk Indonesia telah mengakses internet.

Pada Kabupaten Temanggung, BPS sementara belum memiliki data terkait proporsi penduduk terlayani mobile broadband, sehingga data yang ditampilkan adalah data terkait persentase akses internet pada individu tahun 2025 yaitu sebesar 72,1%. Angka tersebut masih di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 96%.

13. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Indikator jumlah korban meninggal, hilang, dan terdampak bencana per 100.000 penduduk digunakan untuk mengukur tingkat risiko dan dampak bencana pada populasi. Data ini mencakup total korban jiwa (meninggal/hilang) dan individu yang terdampak langsung (mengungsi, luka, rumah rusak) dibandingkan dengan total populasi, yang seringkali dilaporkan oleh BNPB dan BPS.

Poin indikator pada Kabupaten Temanggung yang belum tercapai adalah terkait jumlah korban mengungsi per 100.000 orang. Kondisi tersebut belum mengalami penurunan dengan angka 0,00081%, di mana angka tersebut masih berada di atas target tahun 2025 yaitu 0,0005%.

14. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi GRK di Kabupaten Temanggung menunjukkan perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pola penggunaan lahan, perkembangan sektor industri, implementasi kebijakan pengurangan emisi, maupun perubahan iklim. Pada tahun 2024 emisi GRK di Kabupaten Temanggung mencapai 468.330 ton CO₂eq, kontribusi emisi tertinggi yaitu berada di sector energi mencapai 299.510 ton CO₂eq.

Kabupaten Temanggung sudah melakukan aksi mitigasi penurunan emisi yang dilaporkan dalam Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA) pada tahun 2020-2024 melalui kegiatan pengelolaan limbah dan pengelolaan tanaman terpadu. Secara akumulasi potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung mencapai 690.921,63 ton CO₂eq dengan rincian potensi penurunan terbesar berada di tahun 2021 mencapai 574.886,19 ton CO₂eq karena adanya kegiatan unit pengolahan pupuk organik. Pengolahan pupuk organik dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, karena faktor emisi antara pupuk organik dan pupuk kimia berbeda sehingga salah satu upaya mitigasi penurunan emisi GRK di sector pertanian diarahkan untuk penggunaan pupuk organik.

15. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta kematian merupakan Akta Catatan Sipil.

Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dihitung dengan rumus : $((\text{jumlah penduduk usia 0-18 th yang memiliki akta kelahiran} / \text{jumlah total penduduk 0-18 th} \times 100\%) + (\text{jumlah penerbitan akta kematian} / \text{jumlah pemohon akta kematian} \times 100\%) + (\text{jumlah akta perkawinan yang diterbitkan} / \text{jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim} \times 100\%) + (\text{jumlah akta perceraian yang diterbitkan} / \text{jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim} \times 100\%)) / 4$

Beberapa hal yang masih menjadi perhatian adalah terkait penduduk berpindah domisili tetapi tidak mengurus administrasi kependudukannya, dan kurangnya informasi tentang pengurusan akta pencatatan sipil (Mudah, Cepat, Gratis).

16. Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-resident, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan PAD untuk membiayai pembangunan di daerah.

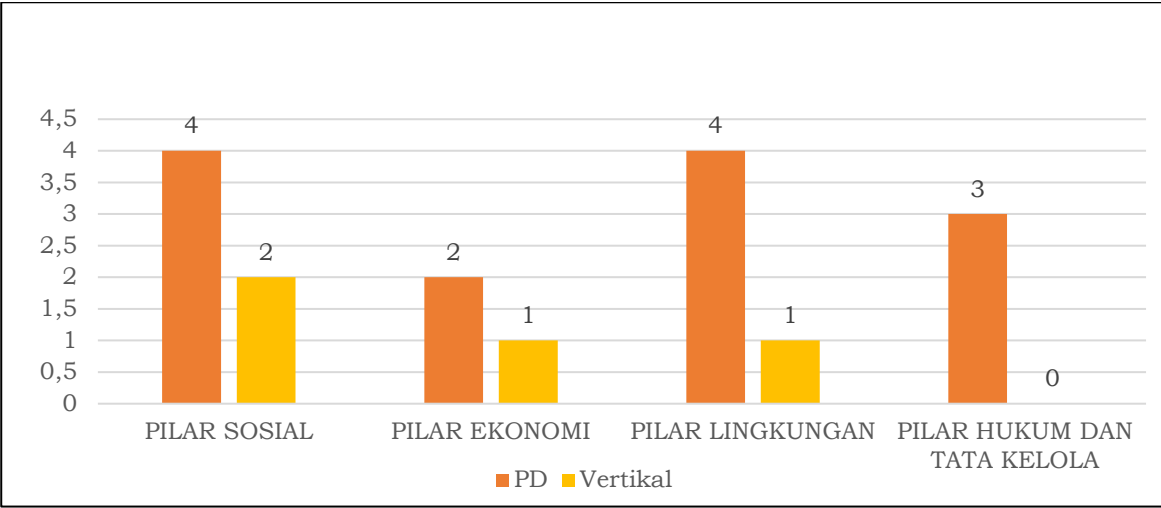
Secara keseluruhan, pencapaian Kabupaten Temanggung dalam hal pajak daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang positif, dengan penerimaan pajak daerah yang meningkat secara signifikan. Meskipun ada penurunan rasio pajak terhadap PDRB pada tahun-tahun terakhir, hal ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada kontribusi pajak daerah. faktor penghambat seperti fluktuasi ekonomi, kesenjangan ekonomi, dan penghindaran pajak masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Ke depan, untuk menjaga kestabilan dan mendorong pencapaian yang lebih baik, perlu dilakukan upaya yang lebih kuat dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pajak, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor-sektor utama Kabupaten Temanggung.

2.2.13.1 Hasil Kinerja Administratif

Hasil kerja administratif SDGs di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 didukung oleh 10 Perangkat Daerah (unsur pemerintah daerah), dan 2 unsur pemerintah vertikal yaitu:

1. Pilar Sosial yang terdiri dari 20 indikator terisi 61 indikator dari 4 Perangkat Daerah, dan 2 instansi vertikal
2. Pilar Ekonomi yang terdiri dari 9 indikator terisi 17 indikator didukung oleh 2 Perangkat Daerah, dan 1 instansi vertikal
3. Pilar Lingkungan terdiri dari 6 indikator, terisi 8 indikator didukung oleh 4 Perangkat Daerah, dan 1 instansi vertikal
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola terdiri dari 8 indikator, terisi 15 indikator didukung oleh 3 Perangkat Daerah.

Dukungan masing-masing aktor terhadap TPB adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar.

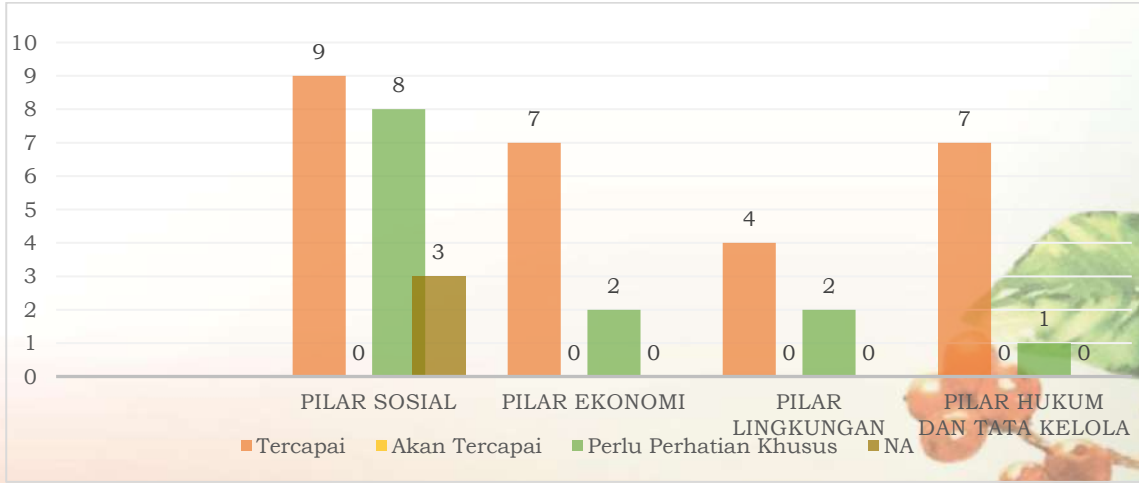


Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Gambar 2. 81
Dukungan Peran Aktor TPB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

2.2.13.2 Hasil Kinerja Substantif

Kinerja substantif ditunjukkan melalui pencapaian target indikator TPB Per Pilar, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Gambar 2. 82
Status Capaian Per Pilar TPB Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Pilar sosial merupakan pilar dengan indikator paling banyak (20 indikator) dibandingkan dengan pilar ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Jumlah goal di masing-masing Pilar dan tingkat keterisian indikator TPB Kabupaten Temanggung dari 17 *goal* dan 4 pilar sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2. 377
Tingkat keterisian indikator TPB Kabupaten Temanggung Tahun 2024

NO	PILAR	GOAL	JUMLAH		
			INDIKATOR	TERISI	N.A.
1	PILAR SOSIAL	1	3	3	0
		2	3	3	0
		3	8	8	1
		4	5	3	2
		5	1	1	0
JUMLAH			20	17	3
2	PILAR EKONOMI	7	1	1	0
		8	2	2	0
		9	2	2	0
		10	1	1	0
		17	3	3	0
JUMLAH			9	9	0
3	PILAR LINGKUNGAN	6	2	2	0
		11	2	2	0
		12	1	1	0
		13	1	1	0
		14	0	0	0
		15	0	0	0
JUMLAH			6	6	0
4	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	16	8	8	0

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

2.2.13.3 Peran Pemerintah Desa dalam Mendukung Pencapaian Indikator TPB

Implementasi TPB di Kabupaten Temanggung juga dilakukan oleh desa/kelurahan dengan program SDGs Desa yang terdiri dari 17 tujuan, yaitu:

1. Desa Tanpa Kemiskinan
2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Desa Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Keterlibatan Perempuan Desa
6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa
10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman
12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
13. Desa Tanggap Perubahan Iklim
14. Desa Peduli Lingkungan laut
15. Desa Peduli Lingkungan darat

16. Desa Damai Berkeadilan

17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa

Capaian pelaksanaan SDGs Desa belum bisa diukur secara jelas karena tidak semua desa *update* datanya. Namun demikian, dari kegiatan yang dilaksanakan di desa, dapat diketahui bahwa indikator SDGs sebagian besar sudah dilaksanakan melalui program kegiatan yang menjadi kewenangan desa, dan telah disesuaikan dengan indikator SDGs Desa yang telah ditetapkan. Sejauh mana dukungan capain indikator SDGs Desa terhadap pencapaian indikator SDGs tingkat kabupaten perlu disandingkan kondisinya di waktu yang akan datang.

2.2.13.4 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, secara garis besar dapat dirumuskan rencana tindak lanjut pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan;
2. Gerakan penurunan angka stunting oleh semua lini
3. Gerakan kembali ke sekolah bagi siswa putus sekolah usia SD, SMP dan SMA sederajat;
4. Penanganan dan perlindungan secara khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
5. Meningkatkan pelestarian lingkungan melalui gerakan konservasi lingkungan;
6. Peningkatan peran akademisi dan institusi pendidikan mendukung TPB;
7. Memberikan pemahaman secara terus-menerus kepada semua pemangku kepentingan TPB;
8. Memberikan sosialisasi dan diseminasi terkait TPB pada institusi pendidikan;
9. Peningkatan kualitas koordinasi Perangkat Daerah dan kerjasama dengan stakeholder terkait (baik pemerintah pusat/provinsi, badan usaha, lembaga lainnya) untuk implementasi program/kegiatan yang berkaitan dengan TPB;
10. Optimalisasi Peran Pemerintah Desa melalui pelaksanaan SDGs Desa.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari permasalahan yang berkaitan

dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Ditinjau dari keterkaitan permasalahan pembangunan dengan hasil evaluasi, seluruh permasalahan hasil evaluasi menjadi permasalahan pembangunan. Adapun hasil identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2025, masih terdapat beberapa indikator utama yang memerlukan perhatian khusus karena belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Identifikasi permasalahan ini disusun untuk memetakan kesenjangan antara realisasi dengan target sasaran yang direncanakan, sekaligus menentukan faktor-faktor strategis yang menjadi kunci keberhasilan dalam upaya perbaikan ke depan. Adapun rincian permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 378
Identifikasi Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Indeks Pembangunan Manusia	- Target 2025: 72,76 - Realisasi 2025: 72,52 - Status capaian: Tidak Tercapai	Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia	1. Pendidikan - Peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan rehabilitasi dan melengkapi sarana prasarana pendidikan formal dan non formal - Peningkatan kompetensi pendidik - Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan formal dan non formal - Sosialisasi pentingnya pendidikan dan gerakan kembali ke sekolah kepada masyarakat melalui media sosial dan media elektronik 2. Kesehatan - Penurunan angka penyakit tidak menular (PTM) dapat dilakukan melalui peningkatan deteksi dini dan pelayanan kesehatan pada usia produktif maupun lanjut usia sesuai standar - Peningkatan KIE kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit sebelum penyakit terjadi melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Puskesmas, kegiatan Integrasi Layanan Primer, dll - Melakukan validasi dan sisir data teekait dengan data-data yang memungkinkan berhubungan dengan kasus penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM) - Peningkatan kepesertaan dan keaktifan masyarakat dalam program jaminan kesehatan (JKN) 3. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan - Peningkatan daya beli masyarakat - Pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal - Perluasan pemasaran produk unggulan Temanggung melalui

No	Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				digitalisasi - Peningkatan keterampilan tenaga kerja (vokasi) agar sesuai kebutuhan pasar - Pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pokok
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	- Target 2025: 2,30 - 2,17 - Realisasi 2025: 2,31 - Status capaian: Tidak Tercapai	Tingkat Pengangguran Terbuka relatif rendah namun rentan terhadap fluktuasi ekonomi	- Sinkronisasi pendidikan dan pasar kerja (<i>link and match</i>) - Penguatan Balai Pelatihan Kerja (BLK) - Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi padat karya - Pengembangan UMKM dan penumbuhan wirausaha baru - Optimalisasi bursa kerja dan informasi pasar kerja - Penanganan pengangguran musiman di perdesaan
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Target 2025 : 75, 46 - Realisasi 2025 : 72,54 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Kualitas Udara: - Peningkatan fungsi adsorpsi polutan melalui penambahan vegetasi penyerap partikulat PM 2.5 di area dengan intensitas aktivitas transportasi dan industri yang tinggi - Pengendalian emisi sektor transportasi melalui pelaksanaan uji emisi berkala - Penegakan aturan pelarangan pembakaran sampah di pemukiman dan lahan terbuka 2. Kualitas Lahan: - Intensifikasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) - Pengembangan agroforestri berkelanjutan - Optimalisasi tutupan tajuk permanen 3. Kualitas Air: - Reduksi beban pencemaran limbah rumah tangga - Pengendalian emisi limbah industri dan usaha - Pengendalian erosi dan sedimen
4	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing (%)	- Target 2025 : 71,62 - Realisasi 2025 : 70,72 - Status capaian : Tidak Tercapai	- Rendahnya kualitas dan pemerataan infrastruktur - Keterbatasan penyediaan sarana transportasi publik dan keterhubungan jaringan jalan interkota menuju DPSP Borobudur serta Kawasan Dieng	- Optimalisasi pendanaan dari berbagai sumber - Pemerataan distribusi pembangunan infrastruktur - Percepatan pemenuhan readiness criteria - Penguatan pemeliharaan rutin pada infrastruktur yang telah terbangun - Sinergitas perencanaan lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur - Penyediaan armada angkutan wisata terintegrasi dan moda transportasi publik yang andal, aman, serta terjadwal menuju koridor Borobudur-Temanggung-Dieng
5	Indeks Pembangunan Gender	- Target 2025 : 96,78 - Realisasi 2025 : 96,01 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pembangunan dan pemberdayaan gender	- Optimalisasi program peningkatan usia perkawinan (PUP) untuk mencegah perkawinan usia anak dan pencegahan putus sekolah - Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan - Memperkuat peran perempuan dalam pengambilan Keputusan - Peningkatan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender - Peningkatan kualitas konstruksi

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

2.3.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 2. 379
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
I	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
a	Harapan Lama Sekolah	- Target 2025 : 12,88 - Realisasi 2025 : 12,63 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah	- Rehabilitasi dan melengkapi fasilitas pendidikan. - Peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi guru - Peningkatan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal - Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan formal dan non formal - Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat melalui media sosial dan media elektronik
b	Rata-Rata Lama Sekolah	- Target 2025 : 7,56 - Realisasi 2025 : 7,61 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah	- Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh. - Peningkatan kualitas layanan pendidikan. - Sosialisasi gerakan kembali ke sekolah. - Memprioritaskan usia peserta didik 13-15 tahun dengan memberikan poin tinggi
c	Rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional	- Target 2025 : 63,55 - Realisasi 2025 : 63,53 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum tercapainya rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP sederajat berdasarkan asesmen nasional	- Pembentukan tim literasi sekolah dan daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan literasi. - Pendampingan intensif bagi sekolah dengan capaian literasi rendah. - Penyusunan modul literasi kontekstual sesuai kearifan lokal Temanggung (misal teks tentang kopi, tembakau, atau legenda lokal). - Penguatan supervisi akademik untuk memastikan guru menerapkan strategi membaca kritis dan reflektif. - Pemanfaatan teknologi digital untuk literasi interaktif (platform baca online, aplikasi membaca).
d	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	- Target 2025 : 77,27 - Realisasi 2025 : 73,84 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya siswa SD yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	- Penguatan kompetensi guru matematika melalui pelatihan <i>teaching numeracy</i> , asesmen diagnostik, dan strategi pembelajaran berbasis konteks kehidupan. - Integrasi numerasi dalam semua mata pelajaran melalui pendekatan lintas disiplin (misalnya menghitung data dalam IPS, dan sains). - Pengembangan bank soal kontekstual dan lembar kerja numerasi berbasis masalah lokal Temanggung (misalnya menghitung hasil panen kopi, jarak antar desa, atau perbandingan harga). - Peningkatan penggunaan teknologi digital dan media manipulatif dalam pembelajaran matematika. - Pemberian penghargaan kepada sekolah yang berhasil meningkatkan capaian numerasi secara signifikan.
e	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	- Target 2025 : 6,20 - Realisasi 2025 : 73,84 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	- Peningkatan upaya gerakan kembali ke sekolah melalui verval data ATS. - Optimalisasi pemberian bantuan pendidikan bagi usia 15 tahun keatas.
f	Angka partisipasi sekolah	- Target 2025 : * Angka partisipasi sekolah usia 5 - 6 tahun : 94,66 * Angka partisipasi sekolah usia 7 - 15 tahun : 98,89	Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	- Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh. - Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal. - Pendataan dan pemetaan ATS, putus

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		* Angka partisipasi sekolah usia 7 - 18 tahun kesetaraan : 44,19 - Realisasi 2025 : *Angka partisipasi sekolah usia 5 - 6 tahun : 89,75 * Angka partisipasi sekolah usia 7 - 15 tahun : 98,41 * Angka partisipasi sekolah usia 7 - 18 tahun kesetaraan : 35,97 - Status capaian : Tidak Tercapai		sekolah, dan LTM berbasis desa/kelurahan. - Penetapan Peraturan Bupati Temanggung tentang pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah. - Pembentukan Tim Terpadu yang melibatkan Dinas, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa dalam penanganan Anak Tidak Sekolah. - Penyediaan bantuan biaya pendidikan (BOP, BSM, PIP, dll) bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
g	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	- Target 2025 : 54,31 - Realisasi 2025 : 46.07 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih terbatasnya sarana prasarana pendidikan jenjang SD dan SMP yang layak dan dalam kondisi baik	Mendorong Satuan Pendidikan untuk memperbaharui sarana dan prasarana yang ada di dapodik agar sesuai dengan data yang ada di Satuan Pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya dengan tujuan untuk bisa mendapat bantuan revitalisasi sekolah.
h	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	- Target 2025 : 62,28 - Realisasi 2025 : 55,63 - Status capaian : Tidak Tercapai		
i	Angka putus sekolah	- Target 2025 : * Angka putus sekolah SD sederajat : 293 * Angka putus sekolah SMP sederajat : 855 - Realisasi 2025 : * Angka putus sekolah SD sederajat : 399 * Angka putus sekolah SMP sederajat : 1046 - Status capaian : Tidak Tercapai	Tingginya angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP	- Pengembangan kurikulum dan metode pembejaran yang efektif. - Peningkatan akses fasilitas pendidikan yang memadai serta melibatkan orang tua melalui komunikasi yang efektif. - Bantuan ekonomi bagi siswa tidak mampu (BSM, BOP, PIP, dll). - Pencegahan faktor sosial yang menyebabkan putus sekolah. - Peningkatan kualitas pendidikan dan motivasi siswa. - Penguatan kebijakan dan monitoring data pendidikan.
j	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat dan SMP sederajat	- Target 2025 : * Angka LTM jenjang SD sederajat : 682 * Angka LTM jenjang SMP sederajat : 2917 - Realisasi 2025 : * Angka LTM jenjang SD sederajat : 1038 * Angka LTM jenjang SMP sederajat : 3168 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih tingginya angka lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang SD dan SMP sederajat	- Pemutakhiran data melalui verifikasi lapangan dan pemetaan calon peserta didik dengan desa/kelurahan. - Peningkatan akses dan ketersediaan layanan pendidikan. - Pemberian bantuan beasiswa dan stimulus ekonomi bagi peserta didik (BOP, BSM, PIP, dll). - Penguatan layanan konseling dan motivasi belajar. - Pemantauan pasca kelulusan (tracking system) terhadap siswa yang lulus untuk memastikan keberlanjutan studi.
k	Rasio Guru/Siswa PAUD	- Target 2025 : 1:15 - Realisasi 2025 : 1:17 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum idealnya rasio guru terhadap siswa pada PAUD	- Pengadaan formasi guru jenjang PAUD. - Pemerataan distribusi guru PAUD melalui penataan ulang penempatan guru agar lebih merata antar desa/Lembaga. - Penguatan standar pelayanan minimal PAUD. - Penguatan kelembagaan PAUD.
l	Iklim Keamanan SD dan SMP	- Target 2025 : * Angka Iklim Keamanan SD : 72,64 * Angka Iklim Keamanan SMP : 69,76 - Realisasi 2025 : * Angka Iklim Keamanan SD : 68,55 * Angka Iklim Keamanan SMP : 67,69 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya iklim keamanan di lingkungan sekolah SD dan SMP	- Penguatan kebijakan dan tata tertib sekolah aman. - Menyelenggarakan pelatihan guru, pegawai, dan peserta didik mengenai keselamatan, penanggulangan bencana, serta pencegahan kekerasan dan perundungan. - Peningkatan sarana dan prasarana keamanan sekolah. - Pencegahan kekerasan dan perundungan dengan program Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Aman dari Kekerasan (SRA). - Menjalin kerja sama dengan Unit PPA Polres, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga psikologi pendidikan.
m	Iklim Kebhinekaan	- Target 2025 :	Belum optimalnya iklim	- Penguatan nilai-nilai kebhinekaan

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	SD dan SMP	* Angka Iklim Kebhinekaan SD : 71,48 * Angka Iklim Kebhinekaan SMP : 70,89 - Realisasi 2025 : * Angka Iklim Kebhinekaan SD : 66,26 * Angka Iklim Kebhinekaan SMP : 67,46 - Status capaian : Tidak Tercapai	kebhinekaan pada satuan pendidikan SD dan SMP	dalam kurikulum dan pembelajaran. - Penerapan program Sekolah Ramah Keberagaman untuk menumbuhkan empati dan solidaritas antarsiswa. - Menyusun tema P5 seperti “Bhinneka Tunggal Ika”, “Bangunlah Jiwa dan Raganya”, atau “Suara Demokrasi” untuk memperkuat. - Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. - Mendorong partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam mendukung kegiatan yang menumbuhkan sikap saling menghormati antar siswa. - Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan proyek kebhinekaan.
n	Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	- Target 2025 : 70,00 - Realisasi 2025 : 64,17 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	Penataan administrasi di Dapodik agar memenuhi syarat untuk bisa terpenggil mengikuti PPG dalam jabatan.
o	Persentase SD terakreditasi minimal B	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 98,85 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih terbatasnya jumlah SD yang memenuhi akreditasi minimal B	- Pemenuhan standar sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). - Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru (pedagogik, profesional, digital). - Rehabilitasi sarana prasarana sekolah yang tidak layak. - Penguatan manajemen dan tata kelola sekolah.
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
a	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	- Target 2025 : 95,42 - Realisasi 2025 : 93,45 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	- Advokasi kepada pemangku kebijakan untuk meningkatkan anggaran kepesertaan BPBU Pemda untuk mendukung tercapainya UHC (BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPKPAD). - Koordinasi lintas sektor untuk dapat meningkatkan kepesertaan JKN melalui berbagai segmen kepesertaan (Dinkes, BPJS Kesehatan, Kemenag, Disnaker, OPD atau instansi vertikal yang memberikan pelayanan publik). - Mendorong masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk menjadi peserta JKN dari segmen mandiri dan perusahaan untuk mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta JKN dari segmen BPBU Badan Usaha (BPJS Kesehatan).
b	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	- Target 2025 : 80,00 - Realisasi 2025 : 68,83 - Status capaian : Tidak Tercapai	- Belum optimalnya informasi dan edukasi tentang TBC di masyarakat sehingga terdapat pemahaman bahwa TBC harus diobati sampai tuntas masih minim, masyarakat masih menganggap TBC dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan tuntas - Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan terduga TBC, seperti catridge TCM, pot dahak, dan reagen ZN	- Advokasi untuk dukungan anggaran program P2TB. - Monev dan koordinasi jejaring dengan Kader Komunitas Mentari Sehat Indonesia, Fasyankes, Lintas program dan Lintas Sektor. - Optimalisasi kegiatan penjarangan, screening aktif kasus TBC baik dalam CKG ataupun program Speling, screening ILTB (Infeksi Laten TBC) terutama di tempat-tempat khusus yang beresiko terjadi penularan. - Meningkatkan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) penyakit TBC melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Puskesmas, kegiatan Integrasi Layanan Primer, dll. - Melakukan validasi dan sisir data teekait dengan data-data yang memungkinkan berhubungan dengan kasus TBC. - Mengkonfirmasi dan menindaklanjuti data yang sudah saling terintegrasi antara beberapa aplikasi.
c	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	- Target 2025 : 86,00 - Realisasi 2025 : 80,70 - Status capaian : Tidak Tercapai		
d	Jumlah kasus kematian ibu	- Target 2025 : 5 - Realisasi 2025 : 4 - Status capaian : Tercapai	Masih ditemukan kasus kematian ibu	- Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal. - Peningkatan pelayanan persalinan di

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				fasilitas kesehatan. - Peningkatan pelayanan pencegahan komplikasi kebidanan - Pelayanan KB berkualitas. - Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu responsif gender. - Penguatan manajemen program kesehatan ibu. - Peningkatan upaya deteksi dini penyakit penyerta pada ibu hamil. - Pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan peningkatan kualitas dan informasi kesehatan terkait kunjungan nifas. - Pelatihan kader kesehatan untuk turut medampingi, mendeteksi ibu hamil dengan masalah kesehatan serta gencar melakukan sosialisasi terkait semua aspek kesehatan ibu hamil dalam rangkaian kegiatan KIA (kelas ibu hamil, kunjungan ANC, posyandu, dll.
e	Jumlah kematian balita	- Target 2025 : 161 - Realisasi 2025 : 95 - Status capaian : Tercapai	Masih ditemukan kasus kematian neonatal, kematian bayi, dan kematian balita	- Pedeteksian faktor risiko kehamilan secara rutin dan berkala. - Peningkatan dan pengelolaan pendidikan pola asuh terhadap bayi dan balita. - Pemberian pendidikan/pelatihan/pemberdayaan kegiatan deteksi faktor risiko pada bayi dan balita oleh keluarga. - Koordinasi dengan penanggung jawab kasus kematian anak di faskes luar daerah untuk memastikan kasus terlapor dalam sistem MPDN. - Melaksanakan kegiatan PKAT dan pemeriksaan bayi balita risiko tinggi oleh tenaga ahli di puskesmas untuk deteksi dini kasus risiko tinggi.
f	Angka kematian bayi	- Target 2025 : 11,84 - Realisasi 2025 : 11,55 - Status capaian : Tercapai		- Peningkatan kualitas ANC (terutama deteksi risiko tinggi). - Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam pelayanan persalinan dan neonatal esensial.
g	Angka kematian neonatal	- Target 2025 : 8,24 - Realisasi 2025 : 8,04 - Status capaian : Tercapai		- Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam manajemen kasus risiko tinggi secara aktif dan cepat. - Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam deteksi dan penanganan BBLR dan <i>premature</i> . - Penguatan rujukan dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri-neonatal. - Peningkatan kualitas edukasi ibu hamil dan keluarga tentang tanda bahaya dan perawatan neonatal awal.
h	Prevalensi stunting	- Target 2025 : 23,9 - Realisasi 2025 : 27,3 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih tingginya kasus permasalahan gizi pada balita	- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin setiap satu bulan sekali.
i	Prevalensi wasting balita	- Target 2025 : 8 - Realisasi 2025 : 3,93 - Status capaian : Tercapai		- Pemantauan tumbuh kembang balita secara serentak pada Februari dan Agustus. - Pelaksanaan monitoring oleh Dinas Kesehatan terhadap puskesmas terkait kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dilapangan secara rutin dilakukan setiap bulan Februari dan Agustus. - Pemeriksaan bayi balita risiko tinggi oleh tenaga ahli di puskesmas untuk deteksi dini kasus risiko tinggi. - Pemberian makanan tambahan melalui intervensi serentak (INTAK).
j	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 94,97 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	- Peningkatan kerjasama dengan pihak sekolah untuk pemantauan kesehatan secara <i>virtual</i> dan <i>offline</i> . - Sosialisasi untuk menanamkan kesadaran siswa untuk aktif mendeteksi kesehatan pribadi dan segera menghubungi pihak

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				sekolah/tenaga kesehatan bila ada gejala.
k	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 99,71 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	- Peningkatan pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar pada pelayanan di gedung Puskesmas ataupun pada Posbindu. - Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit sebelum penyakit terjadi. - Peningkatan peran kader kesehatan/kader posyandu dalam meningkatkan layanan skrining.
l	Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 95,41 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	- Aktivasi kegiatan Posyandu lansia. - Peningkatan kemampuan kader lansia dan melibatkan lintas sektor terkait untuk berpartisipasi dalam kegiatan di Posyandu lansia.
m	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	- Target 2025 : 80 - Realisasi 2025 : 77,10 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan SIKN	- Peningkatan kesadaran faskes terkait pentingnya terintegrasi SIKN dan manfaat SIKN. - Pendampingan implementasi SIKN pada fasyankes yang belum terintegrasi.
n	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 80,65 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	- Koordinasi dengan faskes untuk memonitoring dan evaluasi <i>inputing</i> dan <i>updating</i> data SPA pada aplikasi ASPAK. - Penguatan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan SOP pelayanan fasyankes.
o	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 96,62 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	- Bimbingan Teknis dan monev terhadap Puskesmas terkait pelaksanaan pelayanan, catpor dan hasil capaian program. - OJT terkait teknis pelaksanaan skrining lanjutan (komplikasi) untuk kasus Hipertensi. - Melakukan sosialisasi dan OJT terkait pelaksanaan skrining di masyarakat dan teknis pelaporan ASIK pada kader. - Melaksanakan skrining kesehatan pada instansi untuk menjangar sasaran pekerja yang tidak terjangkau pada pelayanan Posyandu".
p	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 99,62 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya cakupan imunisasi bayi lengkap	- Optimalisasi sumber daya yang ada. - Peningkatan koordinasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Tengah dan Pusat (Kemkes). - Pemberian masukan usulan ke Kemkes terkait VR utk kab. Temanggung termasuk lokus pengadaan VR dibuka bagi Kab. Temanggung. - Monitoring evaluasi mulai dari tingkat Provinsi sd Puskesmas di Kab. Temanggung. - Memaksimalkan koordinasi dan peran POKJA KIPi, Bimbingan teknis, validasi dan verifikasi data, sweeping data dan sasaran. - Meningkatkan peran jejaring, upaya promosi (dirasa belum optimal).
q	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	- Target 2025 : 69,48 - Realisasi 2025 : 68,69 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya kepesertaan aktif masyarakat dalam jaminan kesehatan nasional (JKN)	- Advokasi kepada pemangku kebijakan untuk meningkatkan anggaran kepesertaan BPBU Pemda untuk mendukung tercapainya UHC (BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPKPAD). - Koordinasi lintas sektor untuk dapat meningkatkan kepesertaan JKN melalui berbagai segmen kepesertaan (Dinkes, BPJS Kesehatan, Kemenag, Disnaker, OPD atau instansi vertikal yang memberikan pelayanan publik). - Mendorong masyarakat yang secara

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				ekonomi mampu untuk menjadi peserta JKN dari segmen mandiri dan perusahaan untuk mendaftarkan pekerjaanya menjadi peserta JKN dari segmen BPJU Badan Usaha (BPJS Kesehatan). - Mendorong peserta JKN segmen BPJU dan BP Mandiri dan PPU badan usaha untuk membayar iuran JKN secara rutin untuk meningkatkan cakupan keaktifan (BPJS Kesehatan)".
r	Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target	- Target 2025 : 80 - Realisasi 2025 : 60 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya capaian indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target	- Program pelatihan dan seminar kedokteran berkelanjutan (<i>Continuing Medical Education</i>). - Pelaksanaan kredensial dan re-kredensial dokter secara periodik oleh Komite Medis. - Audit medis rutin triwulanan. - Monitoring indikator mutu seperti LOS, BOR, <i>infection rate</i> , <i>readmission rate</i> , dan <i>patient complaint</i> . - Pengadaan dan pemeliharaan alat diagnostik dan monitoring sesuai standar. - Peningkatan kenyamanan ruang rawat jalan dan rawat inap. - Revisi dan sosialisasi PPK. - Monitoring kepatuhan pelaksanaan oleh Komite Medis. - Penguatan komunikasi efektif (SBAR) antarprofesi. - Sosialisasi budaya keselamatan dan pelaporan insiden tanpa hukuman (<i>no blame culture</i>). - Pembentukan tim mutu klinis di rawat jalan dan rawat inap.
s	Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	- Target 2025 : 80 - Realisasi 2025 : 75 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya capaian indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	- Pelatihan teknis berkala bagi tenaga laboratorium, radiologi, gizi, farmasi, sanitasi, dan petugas nonmedis. - Sertifikasi kompetensi tenaga penunjang medis sesuai standar profesi. - Optimalisasi penggunaan SIMRS untuk integrasi permintaan, hasil, dan pelaporan layanan penunjang. - Digitalisasi dokumen mutu penunjang medis dan nonmedis. - Melaksanakan audit internal mutu layanan penunjang secara triwulanan. - Rapat koordinasi rutin antara kepala unit penunjang dengan unit klinis dan komite mutu.
t	Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan	- Target 2025 : 75 - Realisasi 2025 : 15,57 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya SDM RSUD yang mendapatkan pelatihan	- Penyusunan peta kebutuhan pelatihan (<i>Training Need Assessment</i>) tiap tahun berdasarkan jabatan dan unit kerja. - Penetapan prioritas pelatihan wajib sesuai kebutuhan akreditasi dan layanan unggulan RS. - Pengalokasian anggaran khusus untuk pengembangan SDM dalam RBA BLUD. - Pemanfaatan program pelatihan gratis dari Kemenkes, Dinkes, atau mitra. - Pelatihan online/e-learning untuk efisiensi waktu dan biaya. - Peningkatan kerja sama dengan universitas, asosiasi profesi, dan lembaga pelatihan resmi. - Mendorong pelatihan in-house dengan narasumber internal atau eksternal. - Mengatur jadwal rotasi sementara bagi staf yang mengikuti pelatihan agar pelayanan tetap berjalan. - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
a	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	- Target 2025 : 26,63 - Realisasi 2025 : 19,23 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya pemenuhan akses air siap minum perpipaan	- Perluasan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR). - Penguatan sistem monitoring kualitas air minum (pelaksanaan uji laboratorium secara berkala). - Perlindungan sumber air baku melalui konservasi daerah tangkapan air dan pengendalian pencemaran. - Optimalisasi manajemen operasional untuk menekan angka kehilangan air (NRW) dan meningkatkan efisiensi distribusi. - Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SPAM Perdesaan - Edukasi PHBS. - Pemanfaatan skema pembiayaan alternatif di luar APBD.
b	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	- Target 2025 : 26,64 - Realisasi 2025 : 19,23 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya pemenuhan akses air minum aman bagi rumah tangga	
c	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	- Target 2025 : 89,5 - Realisasi 2025 : 87,90 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kondisi permukaan jalan mantap pada ruas-ruas jalan kewenangan kabupaten	- Pemanfaatan skema pembiayaan alternatif di luar APBD. - Perencanaan dan pendataan presisi kondisi jalan untuk menentukan prioritas penanganan. - Pembangunan sistem drainase jalan untuk mencegah genangan yang mempercepat kerusakan jalan. - Pengendalian <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL). - Penerapan teknologi konstruksi tepat guna.
d	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	- Target 2025 : 94,36 - Realisasi 2025 : 92,58 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penanganan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jembatan	- Pengawasan beban kendaraan. - Pelaksanaan inspeksi rutin (pemeriksaan visual) dan inspeksi mendalam (inspeksi teknis) untuk mendeteksi kerusakan dini sebelum menjadi kerusakan struktur yang fatal. - Pemeliharaan prevsntif melalui pemeliharaan rutin dan perbaikan kerusakan kecil jembatan.
e	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	- Target 2025 : 62,12 - Realisasi 2025 : 61 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur pada urusan pekerjaan umum	- Pemanfaatan skema pembiayaan alternatif di luar APBD. - Penerapan standar infrastruktur berketahanan dan berkelanjutan. - Manajemen risiko penyelenggaraan infrastruktur.
f	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	- Target 2025 : 61,81 - Realisasi 2025 : 57,56 - Status capaian : Tidak Tercapai	4. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas 5. Belum terpenuhinya prasyarat kesesuaian tata ruang serta ketidakselarasan penentuan lokasi sarana fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di zona lahan pertanian pangan berkelanjutan	6. Optimalisasi peran Forum Penataan Ruang (FPR). - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang - Penerapan skema insentif bagi pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana dan disinentif bagi yang menghambat efisiensi ruang. 7. Pelaksanaan pengawasan secara rutin untuk memastikan pemanfaatan ruang di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. - Fasilitasi penyediaan lahan melalui optimalisasi rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk pembangunan sarana fisik KDKMP
g	Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	- Target 2025 : 33,34 - Realisasi 2025 : 16,67 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pemenuhan target penetapan rencana detail tata ruang	- Penguatan tim teknis penataan ruang. - Optimalisasi peran Forum Penataan Ruang. - Efisiensi Proses Administrasi dan Legislasi.
h	Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	- Target 2025 : 64,24 - Realisasi 2025 : 57,95 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penyelesaian layanan perizinan PBG dan SLF	- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia. - Penyusunan SOP pelayanan yang terukur. - Edukasi dan sosialisasi bagi pemohon/konsultan. - Optimalisasi koordinasi lintas

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				perangkat daerah.
i	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	- Target 2025 : 8,06 - Realisasi 2025 : 0,80 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya pemenuhan akses sanitasi aman bagi rumah tangga	- Optimalisasi IPLT. - Pemanfaatan skema pembiayaan alternatif di luar APBD. - Penyediaan tanki septik kedap air sesuai standar. - Implementasi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2). - Perubahan perilaku dan edukasi masyarakat.
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
a	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	- Target 2025 : 71,7 - Realisasi 2025 : 71,11 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	- Pemenuhan standar hunian layak. - Percepatan penanganan kawasan kumuh. - Legalitas dan Kepastian Penguasaan Lahan. - Kolaborasi multi-sektor pada bidang PKP. - Skema Pembiayaan Kreatif untuk MBR. - Penguatan peran Pokja PKP. - Efektivitas penyaluran bantuan sosial atau stimulant. - Pendataan profil hunian yang akurat (<i>Backlog</i> , RTLH).
b	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	- Target 2025 : 79,93 - Realisasi 2025 : 78,79 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi rumah tangga	- Akurasi data dan perencanaan terpadu. - Kemudahan akses pembiayaan bagi MBR. - Ketersediaan lahan dan instrumen kebijakan. - Standardisasi dan kualitas bangunan. - Optimalisasi program CSR dan hibah. - Pemberdayaan masyarakat (<i>self-help housing</i>).
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
a	Indeks Risiko Bencana	- Target 2025 : 105,16 - Realisasi 2025 : 113,08 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih tingginya tingkat risiko bencana	- Peningkatan mitigasi dan pencegahan serta kesiapsiagaan terutama pada wilayah/kawasan rawan bencana. - Penyusunan dan pemutakhiran peta rawan bencana (longsor, banjir, erupsi, kekeringan). - Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, optimalisasi pendanaan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa yang tangguh terhadap bencana.
b	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 84,14 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	- Optimalisasi peran Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada. - Deteksi dini potensi konflik sosial di masyarakat. - Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. - Peningkatan sarana dan prasarana ketertiban umum.
c	Persentase penegakan Perda/Perbup	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 91,89 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih adanya pelanggaran Perda/Perbup	- Penguatan kapasitas dan profesionalitas Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan. - Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran. - Peningkatan patroli rutin dan operasi penertiban. - Penyusunan dan penyempurnaan SOP penegakan Perda/Perbup. - Penguatan koordinasi lintas sektor antara Satpol PP, kepolisian, TNI, dan perangkat daerah terkait.
d	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 76,63 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	- Penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. - Peningkatan kapasitas SDM damkar. - Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat. - Penguatan sistem respon cepat dan layanan darurat.

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
e	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 48,08 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum terpenuhinya Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	- Peremajaan atau pengadaan armada Damkar baru. - Memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran. - Penambahan Pos Damkar sesuai WMK di RISPK. - Pengadaan Sarana dan Prasarana Baru (Nozzle, selang, Y Connection dan kelengkapannya).
f	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 53,26 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran. - Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di pos Damkar. - Penambahan pss pemadam kebakaran di setiap WMK.
g	Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Peran gkat Daerah	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 0 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh relawan kebakaran	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran - Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar. - Menambah Pos Pemadam Kebakaran di setiap WMK.
h	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	- Target 2025 : 61,05 - Realisasi 2025 : 60,64 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau manajemen kebakaran	- Penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. - Peningkatan kapasitas SDM damkar. - Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat. - Penguatan sistem respon cepat dan layanan darurat.
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
a	Tingkat kemiskinan	- Target 2025 : 7.95-8.1 - Realisasi 2025 : 7,78 - Status capaian : Tercapai	Masih tingginya angka kemiskinan	- Peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. - Peningkatan layanan dasar seperti RLH (Rumah Layak Huni), jamban sehat, akses terhadap listrik, dan air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi rumah tangga miskin. - Peningkatan akses terhadap permodalan untuk pengembangan usaha.
II	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
a	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	- Target 2025 : 78.10-78.48 - Realisasi 2025 : 77,77 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penyerapan penduduk usia kerja ke dalam pasar kerja	- Keselarasan kompetensi (<i>link and match</i>). - Kemitraan strategis dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI). - Penciptaan iklim investasi dan perluasan lapangan. - Penguatan kewirausahaan dan UMKM. - Efektivitas informasi dan bursa kerja. - Perlindungan dan ketahanan tenaga kerja melalui harmonisasi hubungan industrial dan sertifikasi SDM.
b	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	- Target 2025 : 72,56 - Realisasi 2025 : 69,31 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penyiapan tenaga kerja yang kompeten	- Pengembangan <i>soft skill</i> dan karakter kerja. - Sertifikasi dan standarisasi profesi melalui aksesibilitas uji kompetensi dan subsidi biaya sertifikasi. - Keterlibatan industri sebagai penguji dalam sertifikasi kompetensi. - Penguatan infrastruktur pelatihan. - Transformasi kurikulum berbasis kebutuhan pasar.
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
a	Indeks Pemberdayaan Gender	- Target 2025 : 74,31 - Realisasi 2025 : 74,28 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pemberdayaan gender di berbagai sektor	- Penguatan partisipasi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan (legislatif, pemerintahan, dan posisi strategis lainnya). - Pelatihan UMKM bagi perempuan

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				bekerja sama dengan organisasi Perempuan. - Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. - Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). - Penyediaan data terpilah gender dalam perencanaan Pembangunan. - Pemberdayaan perempuan melalui kelompok PKK, koperasi, dan organisasi masyarakat.
b	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	- Target 2025 : 69,23 - Realisasi 2025 : 65,38 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih adanya puskesmas yang belum menerapkan pelayanan ramah anak	- Penyusunan regulasi tentang Rumah Sakit dan Puskesmas ramah anak. - Penyusunan dan penerapan SOP pelayanan ramah anak di puskesmas. - Penataan lingkungan puskesmas yang aman, nyaman, dan tidak menakutkan bagi anak. - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan anak (fisik, psikologis, dan sosial). - Optimalisasi layanan KIA, imunisasi, gizi, dan tumbuh kembang anak. - Sinergi dengan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, pendidikan, dan desa.
c	Kabupaten Layak Anak	- Target 2025 : Madya - Realisasi 2025 : Madya - Status capaian : Tercapai	Masih stagnannya status Kabupaten Layak Anak pada kategori Madya	- Penguatan gugus tugas KLA melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi/kelurahan/desa/lembaga organisasi masyarakat. - Peningkatan kualitas pemenuhan hak anak (5 klaster KLA). - Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui penguatan UPTD PPA. - Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak. - Evaluasi capaian indikator KLA secara berkala.
d	Indeks Perlindungan Anak	- Target 2025 : 62,2 - Realisasi 2025 : 61,62 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya tingkat perlindungan terhadap anak	- Optimalisasi UPTD PPA untuk layanan pengaduan, pendampingan, dan rujukan kasus. - Penguatan peran Gugus Tugas KLA dan lembaga perlindungan anak. - KIE kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan perundungan (<i>bullying</i>). - Kampanye sekolah dan lingkungan ramah anakPenguatan program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Balita (BKB) dan edukasi <i>parenting</i>. - Pencegahan perkawinan usia anak. - Penguatan peran Forum Anak sebagai agen pelopor dan pelapor.
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
a	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	- Target 2025 : 9,7 - Realisasi 2025 : 11,23 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kalori masyarakat	- Diversifikasi konsumsi pangan. - Peningkatan literasi gizi dan intervensi gizi pada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). - Pengawasan keamanan pangan.
b	Indeks Ketahanan Pangan	- Target 2025 : 79,27 - Realisasi 2025 : 68,5 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah akibat masih rendahnya rasio produksi bersih karbohidrat lokal terhadap konsumsi normatif, keterbatasan ketersediaan protein hewani per kapita dan belum terpenuhinya kuota Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sesuai mandat perundang-undangan	- Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian melalui penerapan pola tanam yang efisien dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) - Penyediaan dan penggunaan benih unggul - Pemanfaatan teknologi pascapanen - Peningkatan produktivitas peternakan - Optimalisasi budidaya perikanan darat - Menjamin stabilitas ketersediaan fisik pangan sumber protein hewani di pasar tradisional maupun modern

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Menjaga stabilitas harga produk hewani - Pemenuhan alokasi dan volume Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) - Sinergi kelembagaan dan pengawasan rantai pasok pangan
c	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 98,63 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum terjaminnya stabilitas dan kontinuitas ketersediaan pangan pokok daerah	- Stabilitas stok dan pengendalian harga pangan daerah. - Efisiensi rantai pasok dan logistik. - Mitigasi risiko gangguan produksi. - Kerjasama antar daerah surplus untuk menjamin kuota pasokan pangan pokok secara berkelanjutan. - Pengembangan fasilitas pasca-panen.
d	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 93,10 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum terjaminnya kualitas konsumsi masyarakat	- Penguatan pengawasan dan monitoring pasar. - Standardisasi dan sertifikasi pelaku usaha. - Peningkatan kapasitas pengawas pangan. - Edukasi kepada konsumen dan pembinaan petani serta pedagang.
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
	-			
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
a	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	- Target 2025 : 793.727,99 TonCO2eq - Realisasi 2025 : 709.905,71 TonCO2eq - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) daerah	- Penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. - Transisi menuju energi terbarukan. - Peningkatan efisiensi energi. - Pengembangan transportasi publik berkualitas. - Optimalisasi pengelolaan sampah terpadu. - Perlindungan dan penambahan RTH. - Penguatan inventarisasi produksi dan penurunan emisi secara berkala dari berbagai sektor (energi, limbah, lahan). - Edukasi perubahan perilaku masyarakat dalam penghematan energi, mengurangi sampah, dan penanaman pohon secara swadaya. - Mendorong pelaku untuk menerapkan teknologi produksi bersih dan pelaporan jejak karbon melalui skema insentif/penghargaan lingkungan.
b	Indeks Kualitas Udara	- Target 2025 : 85 - Realisasi 2025 : 77,23 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pengendalian pencemaran udara	- Peguatan pemantauan kualitas udara. - Pengendalian emisi sumber bergerak (transportasi) dan tidak bergerak (industri). - Perlindungan dan peningkatan luas vegetasi. - Ketegasan sanksi pembakaran sampah terbuka dan mitigasi Karhutla.
c	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 85,71 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan dokumen lingkungan hidup	- Ketegasan penegakan hukum dan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti mengabaikan kewajiban dokumen lingkungan. - Penguatan kapasitas dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha. - Sertifikasi kompetensi lembaga penyusun dan penilai dokumen lingkungan hidup.
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
a	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Target 2025 : 98,52 - Realisasi 2025 : 99,71 - Status capaian : Tercapai	Belum semua penduduk Temanggung memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	- Sosialisasi secara berkelanjutan melalui rakor dan media sosial (<i>web dan instagram</i>) - Optimalisasi program "Curhat Pak" setiap Senin s.d. Kamis dalam rangka menanggapi permasalahan atau kendala masyarakat dalam

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				kepengurusan layanan administrasi kependudukan - Pelayanan jemput bola (<i>mobile service</i>) kepada sasaran - Melaksanakan pelayanan di luar jam kerja - Pemeliharaan secara rutin dan perawatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
a	Persentase laporan LKD	- Target 2025 : 4,2 - Realisasi 2025 : 4,94 - Status capaian : Tercapai	Belum semua desa membuat laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	- Pendampingan dan fasilitasi kepada pemerintah desa, anggota lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum dalam proses penyusunan laporan tahunan LKD. - Sosialisasi kembali Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada pihak terkait yaitu Kecamatan dan Desa. - Mendorong penyusunan laporan tahunan LKD di Desa dilakukan monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung. - Membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan untuk mendukung proses penyusunan.
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
a	Persentase KB pasca persalinan	- Target 2025 : 74,31 - Realisasi 2025 : 74,28 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya penggunaan KB pasca persalinan	- Optimalisasi implementasi aplikasi SIMATAPKON KB (Sistem Informasi Manajemen Pencatatan, Pelaporan dan pemantauan kontrasepsi keluarga berencana, sehingga bisa mengetahui segmentasi sasaran dalam pelayanan KB. - Pemberian KIE dan advokasi kepada masyarakat untuk menghilangkan mitos penggunaan alat kontrasepsi pasca persalinan. - Integrasi KB pasca persalinan (KBPP) di fasilitas kesehatan (RS, puskesmas, klinik). - Optimalisasi program Safari KB.
b	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	- Target 2025 : 87,3 - Realisasi 2025 : 86,8 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kualitas pengasuhan dalam keluarga yang memiliki remaja	- Meningkatkan cakupan dan kualitas kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) di semua desa/kelurahan. - Revitalisasi dan perluasan kelompok BKR di desa/kelurahan. - Edukasi pencegahan pernikahan dini, penyalahgunaan NAPZA, dan kenakalan remaja. - Penyediaan layanan konseling keluarga dan remaja - Kolaborasi dengan sekolah dalam pembinaan karakter remaja dan penguatan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan positif remaja.
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
a	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	- Target 2025 : 36,17 - Realisasi 2025 : 35,98 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum meratanya kondisi penerangan jalan kabupaten	- Mitigasi pencurian dan vandalisme. - Peningkatan keandalan operasional an pemeliharaan PJU.
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika			
a	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Target 2025 : 4,5 - Realisasi 2025 : 4,39 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum maksimalnya integrasi dan tata kelola SPBE	- Penguatan kebijakan satu data daerah untuk memastikan data akurat, mutakhir, dan saling terhubung. - Evaluasi berkala Indeks Layanan SPBE sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan mutu layanan berbasis elektronik. - Penguatan peraturan dan kebijakan internal SPBE, dengan pembaruan peta rencana.

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
b	Nilai keterbukaan informasi publik	- Target 2025 : 96,00 - Realisasi 2025 : 91,34 - Status capaian : Tidak Tercapai	Kurangnya kesadaran perangkat daerah tentang keterbukaan informasi publik dan memaksimalkan pelayanan publik secara elektronik	Memberikan pemahaman, sosialisasi, dan pendampingan yang masif bagi PPID Pelaksana OPD, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan
c	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	- Target 2025 : 85,5 - Realisasi 2025 : 85,29 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum semualembaga binaan dan mitra Dinkominfo yang tidak aktif dalam menyebarkan informasi	Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) baru dengan berlatarbelakang hobi/interest dan kewilayahan (KIM Desa).
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
a	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	- Target 2025 : 1,83 - Realisasi 2025 : 1,44 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya peran dan kontribusi sektor koperasi dalam menggerakkan perekonomian daerah	- Rebranding, modernisasi, dan adopsi teknologi informasi pada koperasi. - Pengembangan unit usaha produktif pada koperasi. - Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen pengelola koperasi. - Pengembangan kemitraan antara koperasi dengan BUMD, swasta atau industri besar. - Peningkatan kualitas pengawasan kesehatan koperasi.
b	Rasio Kewirausahaan Daerah	- Target 2025 : 2,73 - Realisasi 2025 : 2,43 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya akselerasi penumbuhan wirausaha daerah	- Pembangunan pusat inkubasi bisnis daerah. - Kemudahan akses permodalan melalui fasilitasi akses kredit usaha rakyat. - Percepatan legalitas usaha (NIB) dan fasilitasi sertifikasi produk. - Perluasan akses pasar dan digitalisasi UMKM serta wirausaha baru. - Optimalisasi program CSR untuk mendukung program pelatihan dan keterampilan wirausaha potensial.
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
a	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	- Target 2025 : 2.150 M - Realisasi 2025 : 2.159,9 M - Status capaian : Tercapai	Masih tingginya kerentanan struktur investasi daerah terhadap dinamika ekonomi eksternal	- Penyederhanaan birokrasi dan perizinan. - Promosi investasi yang terfokus. - Kemitraan penanaman modal dengan pengusaha lokal.
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
a	Persentase prestasi olahraga	- Target 2025 : 93,57 - Realisasi 2025 : 82,35 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih minimnya prestasi yang diraih pada event olahraga yang diikuti	- Koordinasi dengan pengkab dan KONI dalam penyelenggaraan event kejuaraan. - Penelusuran, identifikasi dan pembinaan bakat atlet sejak usia dini. - Pembangunan dan rehabilitasi lapangan, stadion, dan fasilitas olahraga.
b	Persentase Wirausaha Muda	- Target 2025 : 12,00 - Realisasi 2025 : 10,35 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya jumlah wirausaha muda dibanding jumlah pemuda	- Koordinasi dengan Diperinaker dan Dinkopdag. - Pelatihan keterampilan usaha dan manajemen bisnis. - Pelatihan e-commerce dan pemanfaatan platform digital. - Pendataan, monitoring, dan evaluasi jumlah dan perkembangan wirausaha muda.
c	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	- Target 2025 : 2,00 - Realisasi 2025 : 1,85 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih minimnya jumlah pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	- Koordinasi dengan Diperinaker dan Dinkopdag. - Penguatan kurikulum kewirausahaan di SMA/SMK. - Pemberdayaan karang taruna dan komunitas pemuda. - Pelatihan digital marketing, e-commerce, dan branding. - Pendataan, monitoring, dan evaluasi pemuda yang mengikuti pendidikan kewirausahaan.
d	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	- Target 2025 : 97,78 - Realisasi 2025 : 96,49 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih terdapat Gugus Depan Pramuka yang tidak aktif	- Penguatan koordinasi dengan Pengurus Pramuka Kabupaten. - Penguatan peran Kwartir Cabang (Kwarcab) dalam pembinaan. - Penguatan kegiatan berbasis

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				keterampilan, kepemimpinan, dan kewirausahaan. - Monitoring dan evaluasi kinerja gugus pramuka secara berkala.
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
a	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	- Target 2025 : 40 - Realisasi 2025 : 73,6 - Status capaian : Tercapai	Kurangnya partisipasi aktif para penyelenggara SDI	Melaksanakan pembinaan statistik sektoral bersama Pembina Data, untuk meningkatkan pemahaman statistik dalam rangka melakukan proses bisnis kegiatan di setiap Produsen Data.
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
a	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	- Target 2025 : 300 - Realisasi 2025 : 548 - Status capaian : Tercapai	Perlunya penguatan Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Menguatkan SDM di bidang keamanan informasi dan melakukan audit keamanan SPBE secara internal bekerjasama dengan Inspektorat.
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
a	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	- Target 2025 : 46,99 - Realisasi 2025 : 46,99 - Status capaian : Tercapai	Belum bertumbuhnya ekosistem kesenian sebagai bagian dari ekonomi kreatif	- Penyediaan ruang publik dan aksesibilitas sarana pendukung ekosistem kesenian. - Perlindungan kekayaan intelektual (HAKI) melalui fasilitasi pendaftaran HAKIL dan edukasi nilai ekonomi intelektual. - Penyelenggaraan event dan festival secara berkala. - Dukungan skema pembiayaan kreatif bagi seniman yang membutuhkan akses terhadap bantuan hibah seni, dana CSR.
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
a	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	- Target 2025 : 60,61 - Realisasi 2025 : 24,03 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat	- Sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya pengisian data perpustakaan yang benar. - Mendorong perpustakaan untuk mengadakan lebih banyak kegiatan2 literasi yang menarik bagi pemustaka. - Mendorong perpustakaan untuk melakukan inovasi di tengah efisiensi anggaran. - Mendorong perpustakaan untuk lebih banyak melakukan kerja sama antar perpustakaan".
b	Tingkat kegemaran membaca	- Target 2025 : 69,29 - Realisasi 2025 : 57,62 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih kurangnya upaya pembudayaan Gemar Membaca di kalangan masyarakat	- Menyelenggarakan kegiatan peningkatan literasi yang menarik untuk masyarakat. - Penyediaan buku yang variatif, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat. - Optimalisasi inovasi layanan (perpustakaan keliling, layanan digital, dll.). - Integrasi kegiatan literasi dalam kurikulum sekolah.
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
a	Indeks Manajemen Kearsipan	- Target 2025 : 73,55 - Realisasi 2025 : 70,71 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya manajemen dan pengawasan kearsipan	- Penguatan peran unit kearsipan di setiap perangkat daerah. - Optimalisasi pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah/instansi/desa/kelurahan. - Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada perangkat daerah/instansi/desa/kelurahan/ dan non pemerintah. - Penataan arsip sesuai klasifikasi, retensi, dan jadwal pemusnahan. - Monitoring, evaluasi, dan audit pengelolaan arsip secara berkala.
III	Urusan Pemerintahan Pilihan			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
a	Angka Konsumsi Ikan	- Target 2025 : 22,25 - Realisasi 2025 : 22,27 - Status capaian : Tercapai	Keterbatasan akses terhadap pasar komoditas perikanan dan rendahnya minat serta budaya konsumsi ikan di	- Stabilitas harga ikan di tingkat konsumen. - Diversifikasi produk olahan ikan. - Mendorong budidaya ikan skala rumah tangga.

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			masyarakat	- Edukasi dan masifikasi kampanye memasyarakatkan makan ikan.
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	- Target 2025 : 1,89 - Realisasi 2025 : 1,85 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap struktur PDRB daerah	- Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata strategis. - Penguatan aksesibilitas menuju destinasi dan titik akomodasi. - Promosi dan digitalisasi pemasaran.
b	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	- Target 2025 : 605.500 orang - Realisasi 2025 : 639.616 - Status capaian : Tercapai	- Belum optimalnya pertumbuhan jumlah kunjungan, durasi tinggal (<i>length of stay</i>), dan tingkat belanja (<i>tourism spending</i>) wisatawan mancanegara maupun domestik di Kabupaten Temanggung - Belum optimalnya pemanfaatan potensi perkebunan kopi sebagai daya tarik wisata (<i>agrowisata</i>) pendukung ekosistem pariwisata Borobudur, Dieng, dan Sindoro-Sumbing	- Penyusunan <i>masterplan</i> dan terwujudnya rintisan fisik (<i>pilot project</i>) kawasan agrowisata kopi - Transformasi kelompok tani kopi menjadi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang kompeten dalam pelayanan kepariwisataan berbasis masyarakat (<i>community-based tourism</i>) - Peningkatan efektivitas pemasaran digital terpadu (<i>joint marketing</i>) dan penyelenggaraan kalender acara (<i>calendar of events</i>) berskala nasional/internasional untuk menarik minat wisatawan - Pengembangan pusat oleh-oleh terpadu dan diversifikasi produk turunan kopi/tembakau premium yang terintegrasi dengan metode pembayaran digital untuk memudahkan transaksi wisatawan
c	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	- Target 2025 : 90 - Realisasi 2025 : 94,12 - Status capaian : Tercapai	- Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal - Masih terbatasnya dukungan pengembangan usaha, akses permodalan, inovasi desain, serta jejaring pemasaran yang berkelanjutan	- Kemudahan fasilitasi legalitas usaha (NIB, sertifikasi halal/HAKI) serta penyediaan skema pembiayaan/kredit yang ramah bagi pelaku usaha mikro ekonomi kreatif - Pemetaan potensi (<i>mapping</i>) dan fasilitasi inkubasi bisnis yang intensif bagi subsektor ekraf prioritas agar mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan - Peningkatan inovasi desain produk (<i>product development</i>), diversifikasi varian kerajinan, dan penerapan teknologi tepat guna - Pemanfaatan platform pemasaran digital (<i>e-commerce</i>) secara optimal dan pembentukan kemitraan dengan industri perhotelan, retail, serta destinasi wisata regional sebagai penyerap produk ekraf lokal
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
a	Produktivitas Padi	- Target 2025 : 6,15 - Realisasi 2025 : 6,09 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya produktivitas padi	- Optimalisasi kelompok tani dan peran penyuluh pertanian. - Penguatan sistem perlindungan tanaman dan adaptasi perubahan iklim. - Optimalisasi jaringan irigasi dan sarana irigasi alternatif. - Penerapan teknologi budidaya dan benih unggul.
b	Produktivitas Jagung	- Target 2025 : 5,5 - Realisasi 2025 : 5,05 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya produktivitas jagung	
c	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	- Target 2025 : 36,1 - Realisasi 2025 : 28,86 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum terpenuhinya kebutuhan sarana alat mesin pertanian pangan utama	- Skema pembiayaan kreatif dan mandiri dalam penyediaan sarana pertanian. - Peningkatan kapasitas operator untuk meminimalkan risiko kerusakan.
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
a	Nilai Ekspor	- Target 2025 : US \$ 121,419,372.00 - Realisasi 2025 : US \$ 110,071,498 - Status capaian : Tidak Tercapai	- Belum optimalnya pertumbuhan nilai ekspor daerah - Belum optimalnya nilai tambah, daya saing, penetapan standar ekspor dan jangkauan pasar internasional untuk komoditas produk unggulan (kopi dan tembakau srintil)	- Pemenuhan standardisasi dan sertifikasi internasional - Kemudahan prosedur dan fasilitasi kegiatan ekspor - Partisipasi dalam pameran dagang strategis dan pemanfaatan platform digital - Penguatan kapasitas SDM eksportir melalui program pendampingan eksportir pemula dan kelembagaan eksportir - Peningkatan kapasitas hilirisasi

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				produk melalui modernisasi teknologi pengolahan pascapanen di tingkat petani
b	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	- Target 2025 : 67 - Realisasi 2025 : 66,67 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kondisi fisik sarana perdagangan daerah	- Partisipasi dan kedisiplinan pengguna pasar dalam hal penggunaan sarana prasarana pasar. - Pengelolaan dan pengawasan rutin agar intervensi perbaikan sarana perdagangan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
c	Cakupan alat ukur. takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	- Target 2025 : 95 - Realisasi 2025 : 88,85 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan	- Pendataan UTTP wajib tera secara berkala. - Penyelenggaraan sidang pasar dan optimalisasi layanan tera keliling. - Sosialisasi dan kesadaran pelaku usaha dengan edukasi budaya tertib ukur.
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
a	Rasio PDRB Industri Pengolahan	- Target 2025 : 27,35 - Realisasi 2025 : 25,34 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya upaya hilirisasi komoditas unggulan daerah, keterhubungan ekonomi, serta integrasi rantai pasok antarwilayah di dalam Wilayah Pengembangan (WP) Gelangmanggung	- Penerapan regulasi daerah terkait pemberian insentif fiskal/non fiskal serta penyederhanaan sistem perizinan untuk mendorong investasi di sektor hilirisasi komoditas unggulan. - Peningkatan kapasitas dan jumlah industri pengolahan (agroindustri) lokal dalam mengolah bahan baku unggulan (kopi, tembakau, hortikultura) menjadi produk bernilai tambah tinggi - Fasilitasi sertifikasi dan legalitas produk, seperti PIRT, halal, BPOM, SNI, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk meningkatkan daya saing produk olahan Temanggung - Fasilitasi kemitraan antara petani, kelompok tani, koperasi, BUMDes, UMKM, dan industri pengolahan guna menjamin kontinuitas pasokan bahan baku dan kepastian pasar - Perluasan jejaring bisnis langsung (<i>direct sourcing</i>) bagi pelaku usaha lokal ke dalam rantai pasok industri manufaktur, ritel modern, dan jaringan perhotelan di dalam WP Gelangmanggung
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
1	Fungsi Sekretariat Daerah			
a	Return on Asset (RoA) BUMD	- Target 2025 : 4,19 - Realisasi 2025 : 3,23 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya tingkat pengembalian aset (ROA) pada BUMD	Melakukan pengukuran produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki.
b	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	- Target 2025 : 2,23 - Realisasi 2025 : 2,14 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya rasio total kredit bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB	- Perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha. - Mendorong penyaluran kredit produktif (UMKM, pertanian, perdagangan, industri kecil). - Digitalisasi layanan perbankan (<i>mobile banking</i> , kredit <i>online</i>). - Sinergi antara pemerintah daerah, bank daerah, dan OPD terkait (koperasi, UMKM, pertanian).
c	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	- Target 2025 : 2,75 - Realisasi 2025 : 2,71 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya total dana pihak ketiga pada bank milik daerah dibandingkan dengan PDRB	Melakukan pengukuran kekuatan sektor Bank milik kabupaten, kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan efektivitas penghimpunan dana DPK yang bisa disalurkan kembali untuk kredit atau investasi.
d	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	- Target 2025 : 3,9 - Realisasi 2025 : 3,82 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya akses keuangan daerah	- Penyelarasan tingkat inklusi keuangan di berbagai kabupaten dan kota. - Optimalisasi peran bank daerah (BUMD) dan lembaga keuangan lainnya. - Pengembangan layanan keuangan digital (<i>mobile banking</i> , QRIS, <i>e-wallet</i>).

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				- Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
e	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 75,00 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih kurangnya ketersediaan produk barang bersubsidi	Menghimbau agar aduan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen/bukti pendukung.
f	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	- Target 2025 : 83,33 - Realisasi 2025 : 83,33 - Status capaian : Tercapai	Masih terdapat BUMD yang belum mendapatkan opini WTP; atas pemeriksaan KAP	Melakukan pembinaan dan koordinasi secara intensif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama dengan Tim Pembina dan Dewan Pengawas.
g	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	- Target 2025 : 84,35 - Realisasi 2025 : 84,35 - Status capaian : Tercapai	Belum optimalnya peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa meskipun telah mencapai target	Mengikuti Kegiatan Pembentukan Mentor Kematangan UKPBJ untuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Temanggung dari LKPP RI Tahun 2025.
h	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	- Target 2025 : 3,45 - Realisasi 2025 : 3,298 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum maksimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dari nilai EPPD	- Melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK). - Melaksanakan koordinasi dengan Kemendagri serta provinsi terkait dengan penyelarasan rumus Indikator Kinerja Kunci (IKK). - Melakukan evaluasi secara berkala dengan OPD yang capaian rendah didampingi Inspektorat kabupaten sebagai APIP.
i	Indeks Zakat Nasional	- Target 2025 : 0,81 - Realisasi 2025 : 0,80 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pengelolaan zakat yang tercermin dari Indeks Zakat Nasional	- Peningkatan penghimpunan zakat melalui sosialisasi dan edukasi kewajiban zakat kepada masyarakat dan optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS dan LAZ. - Peningkatan kapasitas BAZNAS daerah. - Sinergi dengan pemerintah daerah, OPD, dan lembaga sosial pengelola zakat.
j	Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 73,39 - Status capaian : Tidak Tercapai	Rendahnya ketertiban pelaporan kegiatan oleh PD/Unit Kerja secara tepat waktu	- Monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan oleh perangkat daerah. - Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah di Kabupaten Temanggung. - Peningkatan kompetensi operator dan admin pelaporan.
k	Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 75,58 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih kurangnya dokumen kontrak yang diverifikasi	- Penguatan koordinasi internal dan eksternal. - Penetapan target yang realistis. - Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan. - Monitoring paket pekerjaan fisik. - Perencanaan diusahakan N-1 dan meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan juga pembinaan terhadap konsultan pengawas.
2	Fungsi Sekretariat DPRD			
a	Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	- Target 2025 : 90 - Realisasi 2025 : 100 - Status capaian : Tercapai	Perlunya optimalisasi Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	Meningkatkan akses informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung proses pengawasan
b	Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran	- Target 2025 : 90 - Realisasi 2025 : 100 - Status capaian : Tercapai	Perlunya optimalisasi Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kinerja pembahasan kebijakan anggaran
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
1	Perencanaan			
a	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	- Target 2025 : 3,005 - Realisasi 2025 : 2,911 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya capaian Indeks Manajemen Risiko (MRI)	- Reviu dan perbaikan perencanaan kinerja dengan memperhatikan cascading, proses bisnis, serta logical framework agar sasaran, indikator, dan target kinerja lebih terukur dan SMART. - Penguatan implementasi pengelolaan risiko terutama pada sektor strategis daerah, serta memastikan proses Monitoring dan Evaluasi MR dapat menguji efektivitas pengurangan

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				dampak dan penyebab risiko secara lebih sistematis dan berkelanjutan. - Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 – 2029.
b	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	- Target 2025 : 50 - Realisasi 2025 : 36 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penerapan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.	Pendampingan kepada Perangkat daerah pada penyusunan Dokumen Resiko.
2	Keuangan			
a	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	- Target 2025 : 0,48 - Realisasi 2025 : 0,483 - Status capaian : Tercapai	Perlunya peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB	- Optimalisasi pemungutan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, PBB-P2, dan BPHTB. - Optimalisasi implementasi integrasi sistem pajak dengan perbankan dan aplikasi pembayaran. - Peningkatan aktivitas ekonomi (pariwisata, UMKM, pertanian, industri) dan dukungan terhadap pariwisata daerah. - Hilirisasi produk unggulan Temanggung (kopi, tembakau, dll.).
b	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	- Target 2025 : 73,7 - Realisasi 2025 : 66,8 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dari IPKD	Optimalisasi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mencukupi capaian-capaian dalam dimensi.
c	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	- Target 2025 : 98,16 - Realisasi 2025 : 94,94 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target pajak daerah	Sosialisasi secara rutin dan berkelanjutan tentang pajak daerah menggunakan beberapa platform digital yang tersedia.
3	Kepegawaian			
a	Indeks Sistem Merit	- Target 2025 : 0,65 - Realisasi 2025 : 0,62 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian	- Pengusulan tambahan anggaran asesmen untuk menambah jumlah pemetaan pegawai melalui asesmen. - Melakukan penilaian kinerja, sikap dan perilaku pegawai secara rutin. - BKPSDM dengan Dinkominfo mengembangkan aplikasi Sinta Merit untuk manajemen talenta dan aplikasi penilaian kinerja PKSP 360° untuk aspek manajemen kinerja.
b	Persentase keterisian jabatan	- Target 2025 : 84,79 - Realisasi 2025 : 84,42 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya tingkat keterisian jabatan pada perangkat daerah	- Pengisian jabatan menunggu pelaksanaan mutasi di periode berikutnya. - Pemetaan jabatan kosong dan kebutuhan riil perangkat daerah - Penyusunan dan pelaksanaan desk Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) secara akurat. - Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
c	Persentase kedisiplinan ASN	- Target 2025 : 99,81 - Realisasi 2025 : 89,36 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya tingkat kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas	- Monitoring dan evaluasi Kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. - Mendata jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pembinaan pegawai secara daring (webinar) maupun luring. - Peningkatan rapat koordinasi, sosialisai, dan bimbingan teknis kepegawaian. - Optimalisasi program Ngopi Pait (webinar) oleh BKPSDM.
4	Pendidikan dan Pelatihan			
a	Indeks Profesionalitas ASN	- Target 2025 : 80,00 - Realisasi 2025 : 79,81 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya tingkat profesionalitas ASN	Koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/ yang mengeluarkan nilai indeks. Sebagian pegawai telah melakukan update data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi penilaian dalam IP ASN. IP ASN perlu digantikan dengan indikator pengganti yaitu NSPK.

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
5	Penelitian dan Pengembangan			
a	Kapabilitas Inovasi	- Target 2025 : 2,6 - Realisasi 2025 : 2,62 - Status capaian : Tercapai	Perlunya optimalisasi dalam peningkatan kapabilitas inovasi	Meningkatkan capaian indikator pada dimensi riset melalui intervensi fasilitasi kekayaan intelektual (KI) dan peningkatan publikasi ilmiah.
b	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	- Target 2025 : 50 - Realisasi 2025 : 71,43 - Status capaian : Tercapai	Perlunya peningkatan kesesuaian riset dengan isu strategis	Memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan riset di Temanggung.
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
1	Inspektorat Daerah			
a	Nilai Kapabilitas APIP	- Target 2025 : 3,001 - Realisasi 2025 : 3,000 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya kapabilitas APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan	- Menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas APIP sebagai stimulan bagi Inspektorat agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya. - Mempertimbangkan untuk melakukan penambahan dana operasional yang memadai sebesar 1% dari APBD. - Menetapkan mekanisme pemberian reward/ penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan. - Melaksanakan evaluasi intern dan ekstern melalui kegiatan Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan (<i>Quality Assurance and Improvement Program/QAIP</i>) dan Telaah Sejawat guna menjamin mutu dan kualitas audit Inspektorat. - Melakukan reviu atas <i>Internal Audit Charter</i>. - Melakukan penyegaran kembali terhadap Satuan Tugas - Peningkatan Kapabilitas APIP dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing anggota tim. - Melibatkan semua tenaga pemeriksa dalam perencanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) guna mengetahui dan menganalisis area kritis mana yang ditemui selama melakukan pengawasan.
b	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	- Target 2025 : 3,001 - Realisasi 2025 : 3,000 - Status capaian : Tidak Tercapai	Belum optimalnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	- Peningkatkan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penugasan pengukuran IEPK. - Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi dengan upaya peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). - Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting pencegahan korupsi yang efektif dan IEPK menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan penguatan pengendalian anti korupsi.
c	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	- Target 2025 : 100 - Realisasi 2025 : 66,67 - Status capaian : Tidak Tercapai	Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas	- Pendampingan yang lebih intensif kepada perangkat daerah yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas. - Koordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI. - Sosialisasi kepada perangkat daerah yang dicanangkan sebagai ZI.
VII	Unsur Kewilayahan			
1	Kecamatan			
a	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	- Realisasi 2025 : 85,21 - Status capaian : Tercapai	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	- Penetapan indikator kinerja yang jelas, penyusunan rencana kerja yang terarah, dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. - Pemantauan dan evaluasi berkala, serta pelaporan kinerja secara

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
				komprehensif sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. - Peningkatan kapasitas SDM kecamatan. - Optimalisasi penyusunan perencanaan dan penganggaran - Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kecamatan. - Penguatan budaya kerja organisasi.
b	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	- Realisasi 2025 : 95,29 - Status capaian : Tercapai	Masih terdapat sarana dan prasarana lokal kelurahan di kecamatan dalam kondisi kurang baik;	- <i>Updating</i> data kondisi sarana dan prasarana kelurahan setiap 3 bulan sekali. - Pengusulan kebutuhan sarpras di kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
c	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	- Realisasi 2025 : 98,11 - Status capaian : Tercapai	Belum optimalnya realisasi penerimaan PBB di kecamatan	- Peningkatan jemput bola kepada wajib pajak dan memberikan sosialisasi serta pengertian kepada masyarakat untuk merubah kebiasaan pembayaran PBB tidak menunggu usai panen tembakau. - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin berjenjang di tingkat desa/kelurahan. - Pendataan dan pemutakhiran objek pajak secara berkala. - Penerapan sanksi tegas dan <i>persuasive</i> . - Pembentukan Tim Insentififikasi penarikan PBB di tingkat kecamatan.
VIII	Unsur Pemerintahan Umum			
1	Kesatuan Bangsa dan Politik			
a	Indeks Harmoni	- Target 2025 : 6,72 - Realisasi 2025 : 6,72 - Status capaian : Tercapai	Perlunya optimalisasi kualitas indeks harmoni	Melaksanakan pemantauan berkelanjutan atas dimensi Indeks Harmoni, agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat harmoni sosial ke depan

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Sumber perumusan isu strategis Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun berdasarkan:

- 1)

Permasalahan pembangunan dalam RPJMD
- 2)

Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD
- 3)

Arah kebijakan RPJMD, dan
- 4)

Arah kebijakan RKP

Adapun isu-isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

2.3.2.1 Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan konektivitas wilayah mencakup pembangunan

infrastruktur pada jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan. Pengembangan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk pemenuhan sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan serta sarana dan prasarana transportasi umum. Diperlukan pemerataan sarana dan prasarana transportasi umum serta pemenuhan sistem jaringan jalan yang memenuhi aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat.

Sarana transportasi umum dan barang yang harus dipenuhi adalah angkutan umum dan barang dengan jumlah mencukupi dan dalam kondisi layak, serta peningkatan prasarana terminal, halte dan simpul transportasi lainnya. Sarana dan prasarana transportasi umum dan barang yang memadai akan memberikan kemudahan pelayanan perpindahan manusia dan barang yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain sarana dan prasarana transportasi dibutuhkan juga untuk timbulnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

Sistem jaringan jalan yang memenuhi aspek aman, aspek nyaman dan aspek selamat juga akan memberikan dampak terhadap kemudahan distribusi dan perpindahan berbagai komoditas ekonomi yang ada di Kabupaten Temanggung. Sistem jaringan jalan yang ada harus dikelola dengan baik dengan membuat sistem manajemen perkerasan jalan terintegrasi mulai dari status kewenangan pengelolaan terendah yaitu jalan desa dan jalan lingkungan sampai dengan status kewenangan pengelolaan tertinggi yaitu jalan nasional, termasuk juga pemenuhan kelengkapan keselamatan jalan.

2.3.2.2 Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas pertama dalam SDGs. Selain itu kemiskinan merupakan salah satu kerangka pikir yang digunakan dalam Trisula Pembangunan Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Temanggung selalu mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung masih cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebanyak 62,05 ribu jiwa atau 7,78% terhadap total jumlah penduduk. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka penanganan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni pemerataan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran

penduduk miskin, serta peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat miskin. Untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut, perlu adanya kemitraan, baik antara Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah/Swasta/Masyarakat atau Komunitas Peduli, maupun sinergi kebijakan.

2.3.2.3 Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

a. Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam meningkatkan pendapatan dan ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat akan memacu berkembangnya sektor industri dan jasa serta mempercepat transformasi struktur perekonomian daerah. Ketangguhan sektor industri akan semakin kokoh apabila didukung oleh berkembangnya sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya untuk membangun pertanian yang efektif, efisien dan bernilai ekonomi tinggi.

Pertanian yang efektif adalah pola usaha tani yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta berkelanjutan bagi lingkungan. Pengukuran efisiensi pertanian lazimnya menggunakan perhitungan efisiensi berorientasi input, dimana mengukur efisiensi dari minimisasi biaya penggunaan input dalam usahatani untuk mencapai output tertentu. Seorang petani dikatakan efisien secara teknis dalam usaha taninya jika petani tersebut mampu menghasilkan output yang sama, tetapi dengan jumlah penggunaan kombinasi input yang lebih sedikit. Keuntungan petani menjadi semakin besar jika produk hasil usaha taninya bernilai ekonomi tinggi.

b. Kemudahan Investasi

Kemudahan dalam berinvestasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat, karena investasi akan menciptakan lapangan kerja, mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi, meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong pemerataan ekonomi. Berapa wilayah di Jawa Tengah dianggap seksi untuk investasi. Dengan adanya *exit toll* Kabupaten Temanggung akan menjadi lokasi yang menarik bagi investor. Tetapi menarik saja tidak cukup bagi para investor, kemudahan investasi yang

diberikan Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi faktor pendorong berkembangnya investasi di daerah. Kemudahan investasi juga sangat diperlukan bagi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

2.3.2.4 Kualitas Hidup dan Sumber Daya Manusia

Kualitas hidup dan sumber daya manusia (SDM) merupakan kemampuan dan keadaan individu untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Kualitas hidup dan SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas, inovasi dan kemandirian. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah dan keberlanjutan pembangunan. Aspek yang berkaitan dengan kualitas hidup dan sumber daya manusia SDM antara lain kualitas pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat, budaya literasi masyarakat, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan anak, kualitas daya saing pemuda dan olahraga, dan terciptanya rasa aman pada masyarakat.

2.3.2.5 Ketahanan Pangan

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung yang pengukurannya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional menunjukkan penurunan pada tahun 2025 sebesar 10,41 poin pada tahun 2025 atau sebesar 68,91 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 78,91. Penurunan IKP sebesar 10,41 poin ini mengindikasikan adanya tantangan serius pada pilar-pilar ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung, yaitu pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Kondisi ini menempatkan ketahanan pangan sebagai isu prioritas yang harus segera ditangani melalui penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, optimalisasi diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, serta pengendalian inflasi daerah yang lebih agresif. Tanpa intervensi kebijakan yang terintegrasi antar-perangkat daerah, tren penurunan ini dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya kerentanan sosial dan risiko *stunting* di Kabupaten Temanggung.

2.3.2.6 Kelestarian Lingkungan

Isu kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung ditandai dengan belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2025. Permasalahan utama terletak pada rendahnya kualitas lahan, beban pencemaran udara dan air yang mengindikasikan penurunan daya dukung lingkungan akibat aktivitas manusia dan alih

fungsi lahan. Hal ini dipicu oleh masifnya konversi lahan produktif menjadi area terbangun, praktik pembuangan limbah domestik serta industri yang belum terstandarisasi, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya risiko bencana ekologis, penurunan produktivitas pertanian, serta terganggunya derajat kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas daya dukung alam.

Selain hal tersebut diatas, sesuai dengan Surat Edaran Menteri ATR/BPN yang berisi tentang tindak lanjut pengendalian alih fungsi lahan sawah, luas LP2B di Kabupaten Temanggung belum memenuhi 87% dari total keseluruhan LBS dan perlu untuk segera dipenuhi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Temanggung dalam pemenuhan LP2B salah satunya adalah karena memenuhi program prioritas nasional pembangunan KDMP baik di kelurahan maupun desa yang beberapa diantaranya berada di LSD. Guna mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memprioritaskan program pemulihan daya dukung lingkungan melalui perluasan vegetasi penyerap polutan, penguatan infrastruktur sanitasi, dan pengarusutamaan praktik pertanian ramah lingkungan.

2.3.2.7 Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Pelayanan publik yang berkualitas memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terpenuhi secara efektif, adil, dan efisien. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang baik memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas yang mengarah pada kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, didukung dengan peningkatan profesionalisme ASN, tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi, tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Isu strategis daerah juga menjadi acuan dan prioritas pembangunan pada janji tahunan kepala daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD, di mana dalam penyusunan rencana pembangunannya seiring dengan tahapan perencanaan pembangunan dan berdasarkan permasalahan yang ada,

pelibatan Kepala Daerah dan DPRD ada dalam tahapan perencanaan pembangunan sehingga perlu mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Berikut merupakan pemetaan permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Temanggung disajikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2. 380
Identifikasi Isu Daerah

No	Permasalahan	Tingkat Isu			Isu Strategis Daerah
		Internasional	Nasional	Provinsi	
1	Masih tingginya angka kemiskinan	Penghapusan kemiskinan dan ketimpangan	Pengentasan kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	Penanganan kemiskinan
2	- Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia - Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah - Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) - Tingginya anak tidak sekolah (putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan) - Masih terbatasnya sarana prasarana pendidikan jenjang SD dan SMP yang layak dan dalam kondisi baik - Belum optimalnya cakupan kepesertaan dan keaktifan jaminan kesehatan nasional (JKN) - Masih ditemukan kasus kematian ibu, kematian neonatal, kematian bayi, dan kematian balita - Masih tingginya kasus permasalahan gizi pada balita - Masih tingginya penemuan kasus penyakit tidak menular (TBC, Hipertensi, dll) - Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum - Belum optimalnya	- Kehidupan yang sehat - Kesejahteraan penduduk - Pendidikan berkualitas, adil, dan inklusif - Perlindungan hak asasi manusia (HAM) - Kesetaraan gender	Kualitas sumber daya manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Kualitas Hidup dan Sumber Daya Manusia

No	Permasalahan	Tingkat Isu			Isu Strategis Daerah
		Internasional	Nasional	Provinsi	
	pembangunan dan pemberdayaan gender - Masih rendahnya tingkat perlindungan terhadap anak - Masih rendahnya penggunaan KB pasca persalinan - Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat - Masih rendahnya jumlah wirausaha muda dibanding jumlah pemuda - Masih minimnya prestasi yang diraih pada event olahraga yang diikuti				
3	- Belum maksimalnya integrasi dan tata kelola SPBE - Belum optimalnya manajemen dan pengawasan kearsipan - Belum maksimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dari nilai EPPD - Belum optimalnya capaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) - Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian - Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dari IPKD - Belum optimalnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	- Peningkatan keamanan dan penegakan hukum - Sistem akuntabilitas dan transparansi kinerja - Digitalisasi dan integrasi data	- Digitalisasi dan efisiensi tata kelola pemerintah - Reformasi birokrasi dan kelembagaan - Transformasi budaya kerja	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas	Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
4	- Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup - Belum optimalnya upaya penurunan emisi	- Perubahan iklim - Kehilangan Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity Loss</i>) - Polusi lintas batas (<i>Transboundary Pollution</i>)	- Swasembada Energi - Hutan dan lahan kritis - Kelestarian keanekaragaman hayati - Pembangunan rendah karbon	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Kelestarian lingkungan

No	Permasalahan	Tingkat Isu			Isu Strategis Daerah
		Internasional	Nasional	Provinsi	
	Gas Rumah Kaca (GRK) daerah - Belum optimalnya pengendalian pencemaran udara - Belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan dokumen lingkungan hidup - Masih tingginya tingkat risiko bencana	- Energi bersih dan terjangkau (<i>Affordable and Clean Energy</i>) - Peningkatan alih fungsi lahan dan risiko bencana			
5	- Rendahnya kualitas dan pemerataan infrastruktur - Rendahnya pemenuhan akses air siap minum perpipaan - Belum optimalnya kondisi permukaan jalan mantap pada ruas-ruas jalan kewenangan kabupaten - Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur pada urusan pekerjaan umum - Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas - Rendahnya pemenuhan akses air minum aman bagi rumah tangga - Belum optimalnya penyelesaian layanan perizinan PBG dan SLF - Belum optimalnya penanganan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jembatan - Belum optimalnya pemenuhan target penetapan rencana detail tata ruang - Rendahnya pemenuhan akses sanitasi aman bagi rumah tangga - Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur	- Infrastruktur Tangguh Iklim (<i>Infrastructure for Climate Resilience</i>) - <i>Quality Infrastructure Investment</i> (QII)	- Infrastruktur dan konektivitas ekonomi - Swasembada Air	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Konektivitas dan Aksesibilitas

No	Permasalahan	Tingkat Isu			Isu Strategis Daerah
		Internasional	Nasional	Provinsi	
	perumahan dan kawasan permukiman - Rendahnya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi rumah tangga				
6	 - Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kalori masyarakat - Belum optimalnya ketahanan pangan daerah - Belum terjaminnya stabilitas dan kontinuitas ketersediaan pangan pokok daerah - Belum terjaminnya kualitas konsumsi masyarakat - Masih rendahnya minat dan budaya konsumsi ikan di tingkat keluarga - Belum optimalnya produktivitas padi - Belum optimalnya produktivitas jagung - Belum terpenuhinya kebutuhan sarana alat mesin pertanian pangan utama	 - Kelaparan dan kerawanan pangan - Gangguan Rantai Pasok Pangan (<i>Global Food Supply Chain Disruption</i>)	 - Kerentanan dan kerawanan pangan - Swasembada Pangan	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Ketahanan pangan
7	 - Belum optimalnya peran dan kontribusi sektor koperasi dalam menggerakkan perekonomian daerah - Rendahnya akselerasi penumbuhan wirausaha daerah - Belum bertumbuhnya ekosistem kesenian sebagai bagian dari ekonomi kreatif - Belum optimalnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap struktur PDRB	 - <i>Circular Economy</i> (Ekonomi Sirkular) - <i>Green Economy</i> (Ekonomi Hijau)	 - Ekonomi Syariah - Ekonomi Digital - Ekonomi Hijau - Ekonomi Sirkular - Ekonomi Kreatif - Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan - Investasi berorientasi industri dan ekspor - Efisiensi dan efektivitas investasi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

No	Permasalahan	Tingkat Isu			Isu Strategis Daerah
		Internasional	Nasional	Provinsi	
	daerah - Belum optimalnya pertumbuhan nilai ekspor daerah - Belum optimalnya kondisi fisik sarana perdagangan daerah - Belum optimalnya perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan - Belum optimalnya upaya hilirisasi komoditas unggulan daerah - Masih rendahnya rasio total kredit bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB - Rendahnya total dana pihak ketiga pada bank milik daerah dibandingkan dengan PDRB - Tingkat Pengangguran Terbuka relatif rendah namun rentan terhadap fluktuasi ekonomi - Belum optimalnya penyerapan penduduk usia kerja ke dalam pasar kerja - Belum optimalnya penyiapan tenaga kerja yang kompeten - Masih tingginya kerentanan struktur investasi daerah terhadap dinamika ekonomi eksternal				

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

2.4 KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.4.1 Kinerja Prioritas Nasional (PN) RKPD 2025 di Daerah

Tabel 2. 381
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 1:
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah				
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
	PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM										
	S.1.1. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM										
1	Indeks Demokrasi Indonesia			79,51 (2023)	81,69 - 85,23	Indeks Harmoni	n.a	n.a	n.a	6,72	
2	Indeks HAM			2,70 (2023)	2,75						

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Tabel 2. 382
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 2:
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

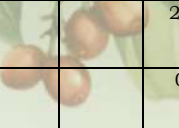
No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/ Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
	S.2.1. Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan									
1	Asia Power Index (Military Capability)			15,7	16					
2	Asia Power Index (Diplomatic Influence)			65,6	65,7					
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)			62,80 (2020)	67,5					
4	Global Cybersecurity Index			100	100					
5	Indeks Keamanan Laut Nasional			59	60					
	S.2.2. Meningkatkan Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)									
1	Indeks Ketahanan Pangan			71,2	73,2	Indeks Ketahanan Pangan	80,08	77,84	78,91	68,5
2	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			0,67	3,16	Rasio PDRB Sektor Pertanian			22,47	23,01
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)			8,27	7,21	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	14,99	10,26	11,72	11,23
	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)									
4	Indeks Ketahanan Energi			6,64	6,77					
5	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)			14,68	20					
	S.2.3. Meningkatkan Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)									
1	Indeks Ketahanan Air Nasional			3,48 (2022)	3,5					
2	Kapasitas Tampung Air (m3/Kapita)			59,59	59,31					
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)			24,00 (2020)	39,2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air			19,08	19,23

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/ Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
						Siap Minum Perpipaan				
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)			10,25	12,5	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman			3,11	0,80
S.2.4. Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan										
1	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)			3 (2023)	3					
2	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)			34,25 (2023)	38,76					
	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)			43	43					
S.2.5. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau										
1	Indeks Ekonomi Hijau			60,37 (2023)	68,34					
2	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)			52,64 (2023)	58					
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)			15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah			32,98	33,84
4	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)			17,47 (2023)	18,37	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (TonCO2eq)			690921,6	709905,71
5	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)			28,53 (2023)	26,67					
6	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			0,35 (2020)	0,44					
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			73,53 (2024)	76,49	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,86	74,83	68,25	72,54

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Tabel 2. 383
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 3:
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
	2022	2023	2024	2025	2022		2023	2024	2025	
	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi									
	S.3.1. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan									
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB(%)			43,00 (2019)	46,5					
	S.3.2. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB									
1	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)			169,1	188,5					
2	Aset Perbankan/PDB (%)			57,21	66,9					
3	Aset Dana Pensiun/PDB (%)			6,81	8					
4	Aset Asuransi/PDB (%)			8,93	9,1					
5	kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)			55,72	57,8					
6	Total Kredit/PDB (%)			35,35	37,8	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	n.a	n.a	2,16	2,14
7	Inklusi Keuangan (%)			88,70 (2023)	91	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	n.a	n.a	3,82	3,82

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
	S.3.3. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas									
1	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)			24,50	35					
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)			0,97	1,1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	n.a	n.a	1,01	1,44
3	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)			3,06	3,1					
4	Rasio Kewirausahaan (%)			3,08	3,1	Rasio Kewirausahaan Daerah	n.a	n.a	2,01	2,43
	S.3.4. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata									
1	Rasio PDB Pariwisata (%)			3,72 (2022)	4,20 - 4,30	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,53	1,53	1,85	1,91
2	Devisa Pariwisata (miliar USD)			16,71	17,10-18,30					
	S.3.5. Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif									
1	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)			6,77 (2023)	7,30 - 7,90					

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Tabel 2. 384
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 4:
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah				
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas										
	S.4.1. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata										
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (tahun)			9,22	9,33	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun			7,53	8,00	
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)			13,21	13,32	Harapan Lama Sekolah	12,55	12,61	12,62	12,63	
3	Rata-rata Nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains			359 (2022) 366 (2022) 383 (2022)	396 404 416						
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca Numerasi			63,06 55,92	64,89 57,36	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional			60,77	62,48	
						Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional			70,31	72,19	
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)			32,00	33,94						
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)			10,20 2)	11,11	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi			6,05	5,38	
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)			68,14	68,32						
	S.4.2. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua										
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)			72,39	74,43	Usia Harapan Hidup	75,70	75,77	75,94	76,16	

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (rata-rata kelahiran per wanita			2,11	2,1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	n.a	n.a	2,19	1,24
3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)			189 (2020)	122	Jumlah kasus kematian ibu	n.a	7	5	4
4	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)			21,50 (2023)	18,8	Prevalensi Stunting	13,03	11,59	27,3	14,16
5	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			387 (2023)	329	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	n.a	n.a	66,31	68,83
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)			98,42	98,6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	n.a	n.a	95,54	93,45
S.4.3. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif										
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga			69,51 (2023)	72,89	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	55,97	58,19	63,17	73
2	Indeks Perlindungan Anak			68,29 (2023)	70,19	Indeks Perlindungan Anak	n.a	n.a	61,62	61,62
3	Indeks Pembangunan Pemuda			60,59 (2023)	65,16					
4	Indeks Ketimpangan Gender			0,421	0,43	Indeks Ketimpangan Gender	n.a	n.a	0,22	0,162
5	Indeks Pembangunan Gender			91,85	92,02-92,11	Indeks Pembangunan Gender	95,71	95,71	96,27	98,5
6	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)			92,94 (2023)	94					
7	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)			68,42 (2023)	69					
S.4.4. Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja										
1	Peringkat Indeks Inovasi Global			54	53	Indeks Inovasi Daerah	100	80,87	72,42	88,80
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			4,91	4,50-5,00	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,32	2,35	2,35	2,31
3	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)			0,28 (2020)	0,3					
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)			56,42	56,30-58,80	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	n.a	n.a	68,52	69,20
S.4.5. Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat										
1	Peringkat pada Asian Games			13 (2023)						
2	Peringkat pada Asian Para Games			6 (2023)						
3	Peringkat pada ASEAN Para Games			1 (2023)						
4	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga (%)			9,04 (2023)	10,36-11,45					

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Tabel 2. 385
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 5:
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/ Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri									
	S.5.1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan									
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)			18,98	20,80	Rasio PDRB Industri	25,92	25,92	25,53	25,34

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/ Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
						Pengolahan				
S.5.2. Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global										
1	Biaya Logistik (% PDB)			14,29 (2022)	13,52					
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)			29,15	29,37	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	n.a	n.a	16,84	16,84
3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)			22,2	21,7	Nilai Ekspor	27,80		132.541.181,60	110,071,498

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Tabel 2. 386
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 6:
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,
Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
	Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan									
	S.6.1. Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan									
1	Tingkat Kemiskinan (%)			8,57	7,0 - 8,10	Tingkat Kemiskinan	9,33	9,26	8,67	7,78
2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)			1,47	0,50 - 1,00					
3	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)			17,13	17,50					
4	Cakupan Kesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)			31,21	32,15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	84,89	94,71	54,78	86,15
5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)			9,07 (2023)	10,00					
	S.6.2. Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan									
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)			65,25	67,00	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	94,75	94,5	96,31	96,70
	S.6.3. Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan									
1	Persentase Desa Mandiri (%)			22,85	23,29	Persentase desa mandiri	9,77	20,68	52	52,63
	S.6.4 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi									
1	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)			56,56 (2022)	57,29					
2	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional			44,13 (2022)	44,35					

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Tabel 2. 387
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 7:
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan									
	S.7.1. Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional									
1	Indeks Pembangunan Hukum			0,68 (2023)	0,69	Indeks Reformasi Hukum	n.a	n.a	96,88	97,12
2	Indeks Persepsi Korupsi			37	38	Indeks Integritas Nasional	n.a	n.a	n.a	77,93
3	Indeks Integritas Partai Politik			62,83	63,00 -					

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
					64,99					
S.7.2 Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani										
1	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional			69,89	71,38	Indeks reformasi birokrasi	64,61	69,05	86,13	87,27
2	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri			93,0	93,5	Indek Kepuasan Masyarakat	83,41	84,97	86,91	87,66
S.7.3 Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba										
1	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)			1,73 (2023)	1,70					
S.7.4 Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan										
1	Return on Asset (RoA) BUMN			3,14 (2023)	3,21	Return on Asset (RoA) BUMD	n.a	n.a	3,23	3,23
S.7.5 Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan										
1	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB			12,84	12,36	Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	16,29	17,54	18,33	21,99
2	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)			10,08	10,24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	n.a	n.a	0,22	0,48
S.7.6 Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan										
1	Tingkat Inflasi (%)			1,57	2,50 ± 1,00	Tingkat Inflasi (%)	7,03	3,2	1,52	1,52

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Tabel 2. 388
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 8:
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
	Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur									
	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju									
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)			62,85 (2021)	65,49					
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)			57,13 (2023)	58,39					
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)			76,47	76,77	Jumlah kejadian konflik SARA (IUP)	n.a	n.a	8	2
	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim									
1	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)			0,140 (2022)	0,137					

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

2.4.2 Pelaporan Program Strategis Nasional (Pro SN)

Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan Pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu, komitmen dan keselarasan daerah dalam mendukung pencapaian trisula melalui Program Stratetgis Nasional sangat penting. Pengendalian dan monitoring Program Strategis Nasional dilaksanakan secara periodik untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Program Strategis Nasional berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan

yang berlaku. Program Strategis Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Tabel 2. 389
Pelaksanaan Program Strategis Nasional
Di Kabupaten Temanggung

No	Program/Kegiatan	Keterangan
A	Penanggulangan Kemiskinan	
1	Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan	√
2	Sekolah Rakyat	√
3	Pembangunan 3 Juta Rumah	√
B	Ketahanan Pangan	
1	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	√
C	Kesehatan Untuk Semua	
1	Jaminan Kesehatan Nasional	√
2	Makan Bergizi Gratis	√
D	Perluasan Akses Pendidikan	
1	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	√
E	Pertumbuhan Ekonomi	
1	Pengendalian Inflasi	√
2	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	√
3	Kemudahan Perizinan di Daerah	√

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro SN), Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk memberikan kinerja terbaik melalui kerjasama dengan *stakeholder* terkait sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat masyarakat.

2.4.3 Intervensi Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Prioritas Tahun 2025

2.4.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung didukung melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal untuk mewujudkan masyarakat yang unggul, sejahtera, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat sektor-sektor unggulan daerah serta meningkatkan kapasitas ekonomi lokal sehingga tumbuh secara inklusif dengan menjaga keberlanjutan sumber daya daerah, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Intervensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal sebagai berikut:

Tabel 2. 390
Intervensi Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran	Efektivitas Intervensi Daerah
	BUMI MUTIARA “Bersatu	DKPPP	Program penyediaan dan	380.174.800	Pertumbuhan Ekonomi (%)

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran	Efektivitas Intervensi Daerah
	Membangun Ekonomi, Masyarakat Unggul, Petani Sejahtera dan Berkelanjutan”		pengembangan sarana pertanian	5.660.000.000	2023 : 5,01 2024 : 5,04
		DINPERMADES	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.429.485.400	PDRB Per Kapita (Juta/Rp) 2023: 33.290 2024: 35.490 Nilai PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2023 : Rp 26.912,32 miliar Nilai PDRB Sektor Pertanian tahun 2023 : Rp 3.500,84 miliar
		DINPERINAKER	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	61.000.000	Kontribusi kategori peternakan tahun 2023 : 19,43% Kontribusi kategori perkebunan tahun 2023 : 17,01%
JUMLAH				7.530.660.200	

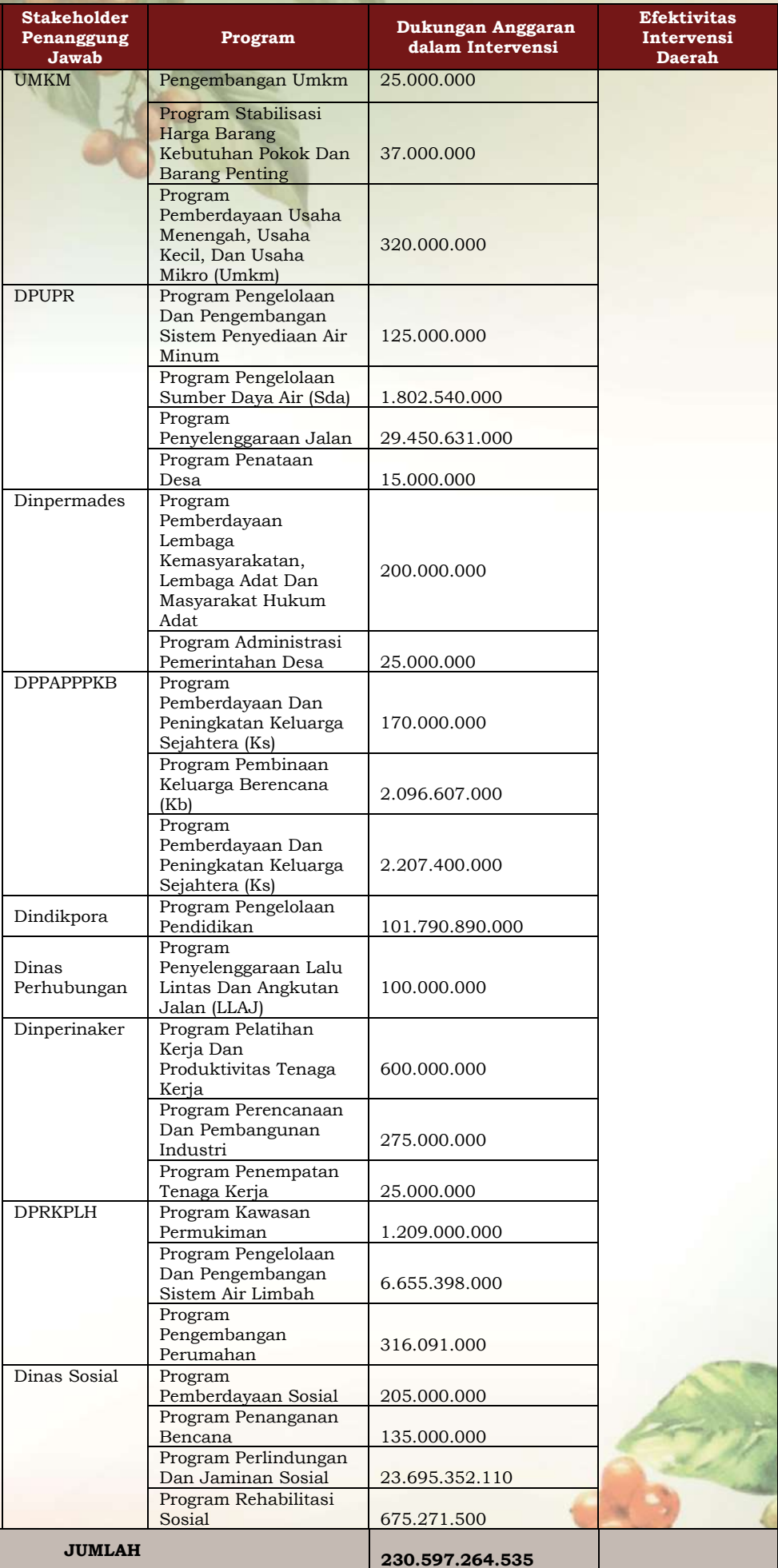
Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

2.4.3.2 Penurunan Kemiskinan

Penurunan kemiskinan didukung melalui pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan yang diperkuat oleh program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait, sehingga tercipta sinergi lintas sektor yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan dalam mempercepat pengurangan kemiskinan dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 391
Intervensi Daerah dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan

Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan disusun untuk mempercepat penurunan kemiskinan melalui program-program Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara sinergis dan terintegrasi	BPBD	Program Penanggulangan Bencana	120.000.000	Tingkat Kemiskinan: 2023 : 9,26 2024 : 8,67 2025: 7,78
	BAPPERIDA	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	70.000.000	
	DINDUKCAPIL	Program Pencatatan Sipil	10.000.000	
		Program Pendaftaran Penduduk	693.500.000	
	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.300.257.518	
	DKPPP	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100.000.000	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	22.849.066.407	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	20.000.000	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	130.000.000	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	300.000.000	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	848.260.000	
	Dinkopdag	Program		

Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
	UMKM	Pengembangan Umkm	25.000.000	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	37.000.000	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	320.000.000	
	DPUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	125.000.000	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.802.540.000	
		Program Penyelenggaraan Jalan	29.450.631.000	
		Program Penataan Desa	15.000.000	
	Dinpermades	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	25.000.000	
	DPPAPPPKB	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	170.000.000	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.096.607.000	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.207.400.000	
	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan	101.790.890.000	
	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100.000.000	
	Dinperinaker	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	600.000.000	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	275.000.000	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	25.000.000	
	DPRKPLH	Program Kawasan Permukiman	1.209.000.000	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.655.398.000	
		Program Pengembangan Perumahan	316.091.000	
	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	205.000.000	
		Program Penanganan Bencana	135.000.000	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	23.695.352.110	
		Program Rehabilitasi Sosial	675.271.500	
JUMLAH			230.597.264.535	

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

2.4.3.3 Sumber Daya Manusia Berkualitas

Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung salah satunya didukung melalui implementasi SDGs, yang mengarahkan perangkat daerah untuk melaksanakan program-program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Integrasi prinsip SDGs dalam perencanaan dan pelaksanaan program memungkinkan pembangunan manusia berjalan lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat kualitas hidup masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut adalah intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia:

Tabel 2. 392
Intervensi Daerah dalam Mendukung Peningkatan Sumber Daya Berkualitas

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
	Pemerintah Kabupaten Temanggung mengimplementasikan SDGs dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program Perangkat Daerah, sehingga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan manusia, dan penurunan kemiskinan melalui kegiatan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.	DINPERMADES	Program Administrasi Pemerintahan Desa	17.308.600	Pertumbuhan Ekonomi (%) 2023 : 5,01 2024 : 5,04 Kemiskinan (%) 2023 : 9,26 2024 : 8,67 2025: 7,78 IPM 2023: 71,33 2024: 71,87 2025: 72,52
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	152.655.440	
		DINPERINAKER	Program Hubungan Industrial	80.000.000	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	275.000.000	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	600.000.000	
		DINSOS	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.106.400.000	
			Program Pemberdayaan Sosial	212.285.400	
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	20.000.000	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	23.730.824.110	
			Program Rehabilitasi Sosial	645.775.150	
		DPRKPLH	Program Kawasan permukiman	1.197.231.300	
			Program Pengelolaan Persampahan	5.911.970.700	

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25.348.000	
		DPMPTSP	Program Pelayanan Penanaman Modal	114.990.500	
		DINKOPDAG	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	320.000.000	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	9.901.500	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	15.486.400	
		DINKES	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107.063.479.094	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.149.970.500	
		BPBD	Program Penanganan Bencana	102.895.786.980	
			Program Penanggulangan Bencana	24.208.000	
		DKPPP	Program Penanganan Kerawanan Pangan	250.000.000	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	21.426.000	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	350.000.000	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.000.000	
		DPUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	219.426.000	
		BPKPAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	751.764.000	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.582.896.400	
		DINDIKPORA	Program Pengelolaan Pendidikan	190.440.547.230	
		DINBUDPAR	Program Peningkatan Daya Tarik	329.480.800	

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
			Destinasi Pariwisata		
		DINHUB	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	180.000.000	
		SETDA	Program Perekonomian dan Pengembangan	10.671.000	
		TOTAL		444.714.833.104	

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

2.4.4 Capaian Program Prioritas

Program prioritas Kabupaten Temanggung 2025-2029 yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain:

1. Penataan garis imajiner

- Pembangunan *Citywalk* Jl S.Parman;
- Pemeliharaan Pasar Kliwon.

2. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi

- Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik;
- Penerapan merit *system* dan *talent pool*;
- Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi;
- Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati;
- Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah);
- Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW; dan
- Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan).

3. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan

- Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan;
- Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian;
- Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk;
- Regenerasi petani;
- Penyediaan bibit ternak dan ikan;
- Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan

4. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan

- Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten;
- Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi;

- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung);
- Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik;
- Penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- Penyediaan rumah layak huni.

5. Optimalisasi Pasar Daerah

- Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif;
- Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional.

6. Penguatan dan pelestarian seni budaya dengan program aksi :

- Pembentukan dewan kesenian di Kecamatan;
- Pertemuan pegiat seni dan budaya;
- Penghargaan pada seniman dan budayawan;
- Pentas seni di ruang publik;
- Pelaku seni dan budaya lokal go to school;
- Regulasi dan pemakaian baju adat khas Temanggung;
- Festival seni dan budaya tahunan Temanggung;
- Informasi dan promosi pariwisata;
- Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif; dan
- Rebranding Temanggung.

7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak

- Pembentukan Satgas PPA di Kecamatan dan Desa;
- Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan;
- Pembentukan desa ramah perempuan dan anak;
- Pemberdayaan ekonomi perempuan; dan
- Penyediaan hotline/panic button.

8. Pelayanan dasar bidang pendidikan

- Akses pendidikan untuk semua warga;
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru;
- Pimpinan daerah sambang sekolah;
- Penguatan database pendidikan;
- Fasilitasi diseminasi informasi terkait pendidikan;
- Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP;
- Pemberdayaan PAUD;
- Insentif kepada Guru Keagamaan;
- Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah; dan
- Peningkatan Literasi membaca melalui perpustakaan daerah.

9. Pelayanan dasar bidang kesehatan

- Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan;
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas);
- Pemeriksaan kesehatan gratis;
- Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa;
- Peningkatan kualitas pelayanan RSUD;
- Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo.

10. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan

- Penataan data program perlindungan sosial;
- Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang;
- Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal; dan
- Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

11. Pelayanan perijinan dan administrasi

- Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik.

12. Integrasi Data

- Penyepakatan protokol interoperabilitas data antar perangkat daerah;
- Sinkronisasi dan integrasi data.

13. Pencegahan dan mitigasi bencana alam

- Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana;
- Pembentukan desa tangguh bencana;
- Peningkatan kapasitas relawan bencana;
- Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam;
- Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana;
- Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan;
- Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten.

14. Digitalisasi dan Smart City

- Digitalisasi dan integrasi layanan digital;
- Lapor Bupati;
- Penyediaan dan peningkatan SDM;
- Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa;
- Pembuatan superapps mobile;
- Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan; dan

- Penyediaan infrastruktur jaringan internet di ruang publik strategis.

15. Pelestarian lingkungan hidup

- Perlindungan sumber mata air;
- Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air;
- Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat;
- Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah;
- Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST;
- Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas;
- Aksi bersih lingkungan;
- Penghijauan di lokasi lahan kritis; dan
- Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis.
- Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis.

16. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi

- Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan;
- Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM;
- Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala;
- Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi; dan
- BUMD Sehat.

17. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah

- Peningkatan optimalisasi peran kelompok masyarakat dan dunia swasta dengan melibatkan akademisi dalam pembangunan daerah;
- Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, dunia swasta dan akademisi.

18. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga

- Pemajuan cabang olahraga unggulan;
- Peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas atlet; dan
- Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional.

19. Peningkatan kualitas tenaga kerja

- Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja;
- Peningkatan hubungan industri;
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD).

2.5 TELAAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung tidak hanya dilaksanakan secara teknokratik namun juga secara politik yang dibuktikan dengan adanya telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. Dari total 1.085 usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Temanggung yang masuk ke dalam SIPD Kementerian Dalam Negeri tercatat ada 978 pokok pikiran yang disetujui oleh sistem. Persetujuan terhadap usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diberikan karena 978 usulan telah diinput sesuai kamus usulan kegiatan sehingga sudah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah) dan dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

Usulan kegiatan hasil penelaahan kegiatan Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disetujui dalam SIPD telah mengacu pada nomenklatur Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kesesuaian antara pokok-pokok pikiran DPRD dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sangat penting guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan aspirasi yang ditampung dari masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

2.6 INOVASI DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH

Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan berorientasi untuk kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Inovasi dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan inovasi terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan inovasi dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah

Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang inovasinya berhasil diterapkan. Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, DPRD, ASN, Perangkat Daerah maupun masyarakat.

Pemerintahan pada era saat ini memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan menyejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan kebijakan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui inovasi, mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perkembangan inovasi di Kabupaten Temanggung dalam mendukung program-program pemerintah maupun mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi di masyarakat, Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah, diterbitkanlah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang mempunyai inovasi-inovasi terbaiknya melalui ajang lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova). Selanjutnya para pemenang lomba krenova tingkat Kabupaten akan mengikuti lomba Krenova tingkat Provinsi dan mendapatkan uang pembinaan serta fasilitasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual berupa paten, hak cipta).

Melalui kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Temanggung secara konsisten berhasil menghimpun, mengembangkan, dan mengimplementasikan inovasi daerah secara berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong

kemajuan daerah, meningkatkan kemandirian, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah.

Sejalan dengan komitmen tersebut, capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Temanggung selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun bersifat fluktuatif. Nilai IID meningkat signifikan pada periode tahun 2021–2023, sempat menurun pada tahun 2024, dan kembali meningkat tajam pada 2025 dengan capaian sebesar **88,80**, yang mengantarkan Kabupaten Temanggung meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif. Rincian capaian nilai IID Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 393
Capaian nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Tahun	Skor Indeks	Predikat	Penghargaan
1	2021	45,58	Sangat Inovatif	-
2	2022	70,92	Sangat Inovatif	Terinovatif
3	2023	80,87	Sangat Inovatif	Terinovatif
4	2024	72,42	Sangat Inovatif	-
5	2025	88,80	Sangat Inovatif	Terinovatif

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Temanggung mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas unsur dalam mendorong budaya inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Inovasi yang dihasilkan tidak hanya berasal dari perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga didukung aktif oleh pemerintah desa dan kelurahan, pelajar, serta masyarakat umum. Sinergi ini menunjukkan bahwa inovasi telah menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari berbagai level, mulai dari birokrasi hingga akar rumput, sehingga mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing daerah secara konsisten. Rekapitulasi Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 ditunjukan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 394
Rekapitulasi Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021–2025

No	Tahun	Nomor SK Bupati	Jumlah Inovasi
1	2021	NOMOR 072.3/0293 TAHUN 2021	123
2	2022	NOMOR 072.3/249 TAHUN 2022	124
3	2023	NOMOR 072.3/351 TAHUN 2023	265
4	2024	NOMOR 072.3/488 TAHUN 2024	176
5	2025	NOMOR 050/541 TAHUN 2025	255

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026, data diolah

Tabel 2. 395
Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

No	Nama Inovasi	Permasalahan	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
1	IKAT RAJUT (Inovasi Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan) RKPD Tahun 2020	Masih tingginya angka kemiskinan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam ikut berpartisipasi penanggulangan kemiskinan Semua Elemen masyarakat, pemerintah dan Stakeholder dapat bekerja bersama dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung	Penurunan Kemiskinan dapat teratasi lebih cepat Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung dapat berjalan sesuai dengan harapan	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial
2	MUSTIKA DESA (Masyarakat Unggul Sejahtera dengan Tani Pekarangan, Konservasi dan Desa Bebas Sampah) RKPD Tahun 2021	Masih tingginya angka kemiskinan. Belum terjaminnya kualitas konsumsi masyarakat. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Tumbuhnya Petani Pekarang di Semua Desa dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung Terjadinya gerakan pelestarian lingkungan dengan penghijauan Sabuk Gunung Adanya Gerakan Masyarakat Pengelolaan Sampah Di Desa dan Kecamatan	Peningkatan Ekonomi masyarakat Tumbuhnya UMKM Penurunan lahan Kritis dan penurunan Lahan Longsor Lingkungan Desa sampai Kota terbentuk pengelola Sampah Terjadinya Penurunan kemiskinan	Inventor : BAPPEDA DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR
3	KABAR PENTING DESAKU (Kerja Bareng Penanggulangan Stunting, Desa Bebas Sampah dan Konservasi Lingkungan Hidup) RKPD Tahun 2022	Masih tingginya kasus permasalahan gizi pada balita. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Penanganan stunting dapat dilaksanakan secara bersama-sama Terjadinya Peningkatan gerakan pelestarian lingkungan dengan penghijauan Sabuk Gunung Adanya Gerakan Masyarakat Pengelolaan Sampah Di Desa dan Kecamatan	Terjadi Penurunan angka Stunting Penurunan lahan Kritis dan penurunan Lahan Longsor Lingkungan Desa sampai Kota terbentuk pengelola Sampah Terjadinya Penurunan kemiskinan	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR
4	GERBANG EMAS (Gerakan Pembangunan untuk Peningkatan Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat) RKPD Tahun 2023	Masih tingginya kasus permasalahan gizi pada balita. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Tingkat Pengangguran Terbuka relatif rendah	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Terbukanya lapangan kerja baru Tertanganinya Lahan Kritis Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pelestarian lingkungan Peningkatan kesehatan masyarakat	Inventor : BAPPEDA, DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi,

No	Nama Inovasi	Permasalahan	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		namun rentan terhadap fluktuasi ekonomi.			Media Sosial, TJSLP/CSR
5	PASARKU GANDEM	Belum maksimalnya integrasi dan tata kelola SPBE. Belum optimalnya kondisi fisik sarana perdagangan daerah.	Peningkatan produktivitas pasar Digitalisasi pelayanan Pelayanan publik di pasar Penerapan pasar pintar Pengembangan pasar solidaritas	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan pelayanan publik	Inventor; BAPPEDA DPRD, BUPATI, Semua Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Desa, Masyarakat Ormas, Komunitas, Akademisi, Media Sosial, TJSLP/CSR
6	BUMI MUTIARA RKPD Tahun 2024	Tingkat Pengangguran Terbuka relatif rendah namun rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Belum optimalnya upaya hilirisasi komoditas unggulan daerah. Masih tingginya angka kemiskinan	Menggerakkan pengembangan sektor Pertanian, perdagangan, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dengan menciptakan akses serta kesempatan luas sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	Meningkatkan produksi pertanian komoditas kopi Peningkatan Ekonomi Masyarakat	DKPPP, FTJLS, Mitra Usaha
7	MAHKOTA TRIANCALA RKPD Tahun 2026	Belum optimalnya upaya hilirisasi komoditas unggulan daerah.	Pengembangan potensi desa dalam mendukung percepatan tercapainya peningkatan Sumber Daya Manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat.	Diperolehnya produk-produk unggulan dari desa/kelurahan yang memiliki ciri khas, kualitas baik, dan berpotensi untuk dipasarkan secara luas, baik domestik maupun global.	Pemerintah, pengusaha, komunitas, akademisi, masyarakat, tim tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa.

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 2. 396
Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
a.	Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah	Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Digital	Peserta didik memperoleh pengalaman belajar lebih interaktif	Peserta didik menjadi lebih termotivasi, dan sesuai	DINDIKPORA

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Froggy Jump		dengan tuntutan keterampilan abad 21	
		Pemanfaatan Google Sites dan Zep Quiz Sebagai Media Pembelajaran Interaktif Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Murid	Meningkatkan layanan pendidikan menjadi lebih bermutu	Meningkatkan kinerja pendidikan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan	DINDIKPORA
		Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Melalui Media Pembelajaran "ASSEMBLR EDU"	Meningkatkan kompetensi digital guru dan mempercepat implementasi kurikulum yang menekankan kreativitas, literasi digital, dan inovasi	Meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran melalui pengalaman belajar yang lebih menarik dan kontekstual	DINDIKPORA
		Inovasi Penerapan Lesson Study Kolaboratif dengan Microsoft Teams dalam Mendorong Peningkatan Profesionalisme dan Praktik Pembelajaran Guru di SDN 2 Parakan Kauman	Mendorong peningkatan profesionalisme dan praktik pembelajaran guru	Menguatnya kerja sama antara sekolah dan stakeholder dalam kegiatan literasi digital, kewirausahaan dini, ataupun program CSR pendidikan	DINDIKPORA
		Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Model Pembelajaran TGT pada Games Clash of Champions	Meningkatkan kualitas pembelajaran, layanan pendidikan yang lebih inklusif, ramah, dan relevan dengan perkembangan zaman	Memperkuat profesionalisme guru sehingga mampu menjembatani sekolah dengan industri melalui kolaborasi	DINDIKPORA
		SIASIX EXAM (Aplikasi Penilaian Berbasis Android)	Memudahkan pelaksanaan ujian berbasis digital secara cepat dan akurat.	Sistem evaluasi menjadi lebih transparan dan efisien.	DINDIKPORA
b.	Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah	AKRAB (Akselerasi Kualitas pembelajarAn melalui supervisi kolaBoratif)			
		Kokutri Pembelajaran yang			

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Bermakna dan Mengembangkan			
c.	Belum tercapainya rata-rata kemampuan numerasi siswa SMP sederajat berdasarkan asesmen nasional	SIPATEN (Sistem Integrasi Pembelajaran, Administrasi dan Transformasi Ekosistem Numerasi-Literasi)	Menciptakan Ekosistem Pembelajaran yang Efisien dan Inovatif	Meningkatnya pemahaman Literasi dan Numerasi yang kontekstual serta berkembangnya keterampilan kolaborasi dan komunikasi melalui diskusi sederhana hingga penyelesaian tugas proyek intensif	DINDIKPORA
		Penerapan Asesmen Diagnostik dan Formatif Berbasis Digital di SMP Negeri 2 Bulu : Implementasi Deep Learning	Menyediakan pembelajaran mendalam yang sesuai dengan tujuan dalam dunia pendidikan dengan penerapan asesmen yang tepat	Meningkatkan dan menunjang ketercapaian serta keberhasilan pembelajaran yang dilakukan serta meningkatkan minat belajar peserta didik serta menjadi sosok yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.	DINDIKPORA
d.	Masih rendahnya siswa SD yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	Inovasi SeBerKat : Upaya Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri Sunggingsari Parakan	Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah dasar.	Mutu pendidikan dan hasil belajar siswa meningkat.	DINDIKPORA
		Metode Pembelajaran Smsku Bedot Dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis	Mempermudah siswa memahami teknik menulis secara bertahap.	Kemampuan menulis siswa meningkat secara signifikan.	DINDIKPORA
		“BAJAWA” Buku Berbasis Augmented Reality Sebagai Alternatif Media Pembelajaran Bahasa Jawa	Menyajikan pembelajaran Bahasa Jawa yang interaktif dan menarik.	Minat belajar dan pemahaman siswa terhadap Bahasa Jawa meningkat.	DINDIKPORA
		SIPATEN (Sistem Integrasi Pembelajaran, Administrasi	Menciptakan Ekosistem Pembelajaran yang Efisien dan Inovatif	Meningkatnya pemahaman Literasi dan Numerasi yang	DINDIKPORA

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		dan Transformasi Ekosistem Numerasi-Literasi)		kontekstual serta berkembangnya keterampilan kolaborasi dan komunikasi melalui diskusi sederhana hingga penyelesaian tugas proyek intensif	
		PJBL I-CREATE (Informatics Creative Project): Penguatan Pembelajaran Informatika Melalui Proyek Karya Canva, Coding Scratch dan Publikasi Karya Peserta Didik	Mendapatkan pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman	Peserta didik dapat mengembangkan literasi digital, kreativitas, kolaborasi, dan kepercayaan diri	DINDIKPORA
		SAMBEL TRASI (Sarana Media Belajar Literasi)	Menyediakan media pembelajaran literasi yang kreatif dan kontekstual bagi siswa sekolah dasar.	Kemampuan membaca, menulis, dan minat literasi siswa meningkat.	DINDIKPORA
e.	Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi				
f.	Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	PRASTIKA (PResensi siswa SMPN 3 KAloran)			
		SAHABAT MANGGONG (Sarana Hadir Belajar Tepat Waktu SDN Manggong)			
g.	Masih terbatasnya sarana prasarana pendidikan jenjang SD dan SMP yang layak dan dalam kondisi baik	"COMPRESS LAB" Solusi Hemat Ruang dan Biaya Untuk Produktivitas Guru dan UMKM di Seluruh Nusantara	Menghemat ruang dan biaya penyimpanan alat serta bahan kerja.	Produktivitas guru dan UMKM meningkat secara efisien.	DINDIKPORA
		Peta dan Maket Mini	Mempermudah pemahaman konsep ruang dan perencanaan wilayah.	Kualitas pembelajaran dan visualisasi tata ruang meningkat.	Masyarakat

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Pemantauan Status Sekolah Adiwiyata Secara Digital dan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung	Memudahkan sekolah dalam memantau masa berlaku predikat Adiwiyata secara tepat waktu	Mencegah kehilangan status Adiwiyata karena keterlambatan dalam evaluasi atau perpanjangan	DPRKPLH
h.	Tingginya angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP				
i.	Masih tingginya angka lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang SD dan SMP sederajat				
j.	Belum idealnya rasio guru terhadap siswa pada PAUD	Transformasi dan Tata Kelola Administrasi Guru Berbasis Digital	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola administrasi guru melalui penerapan sistem digital yang terorganisasi dan terstandar	Terwujudnya sistem administrasi guru yang lebih efektif, efisien, dan terstruktur	DINDIKPORA
		Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Melalui Media Pembelajaran "ASSEMBLR EDU"	Meningkatkan kompetensi digital guru dan mempercepat implementasi kurikulum yang menekankan kreativitas, literasi digital, dan inovasi	Meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran melalui pengalaman belajar yang lebih menarik dan kontekstual	DINDIKPORA
k.	Belum optimalnya iklim keamanan di lingkungan sekolah SD dan SMP	Pengolahan Limbah Kertas Dalam Karya Seni Topeng Kreatif Untuk Peningkatan Nilai Seni Rupa Pada Siswa SD Negeri Kruwisan	Meningkatkan pengetahuan, wawasan, kreatifitas dalam mengolah limbah menjadi karya dan menanamkan rasa ketertarikan terhadap siswa dalam berkarya seni rupa	Terwujudnya pengolahan limbah kertas menjadi karya seni	DINDIKPORA
l.	Belum optimalnya iklim kebhinekaan pada satuan pendidikan SD dan SMP	CERIA (Cerita Tanpa Suara)	Menyediakan media pembelajaran inklusif tanpa hambatan verbal.	Partisipasi dan empati peserta didik dalam pembelajaran meningkat.	DINDIKPORA
		Integrasi Pendidikan Karakter Melalui Penulisan Jurnal Harian	Membiasakan siswa merefleksikan sikap dan perilaku positif.	Karakter disiplin, jujur, dan tanggung jawab siswa meningkat.	DINDIKPORA

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		SILAPIS (Fasilitasi Layanan Pendidikan Inklusif)	Meningkatnya koordinasi yang baik dalam layanan pendidikan inklusif yang melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan kewenangannya	Kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan inklusif dapat terpenuhi secara optimal	DINDIKPORA
m.	Masih rendahnya persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	Transformasi dan Tata Kelola Administrasi Guru Berbasis Digital	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola administrasi guru melalui penerapan sistem digital yang terorganisasi dan terstandar	Terwujudnya sistem administrasi guru yang lebih efektif, efisien, dan terstruktur	DINDIKPORA
		Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Melalui Media Pembelajaran "ASSEMBLR EDU"	Meningkatkan kompetensi digital guru dan mempercepat implementasi kurikulum yang menekankan kreativitas, literasi digital, dan inovasi	Meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran melalui pengalaman belajar yang lebih menarik dan kontekstual	DINDIKPORA
n.	Masih terbatasnya jumlah SD yang memenuhi akreditasi minimal B	Pemantauan Status Sekolah Adiwiyata Secara Digital dan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung	Memudahkan sekolah dalam memantau masa berlaku predikat Adiwiyata secara tepat waktu	Mencegah kehilangan status Adiwiyata karena keterlambatan dalam evaluasi atau perpanjangan	DPRKPLH
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
a.	Belum optimalnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Optimalisasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) di Wilayah Puskesmas Wonoboyo	Meningkatkan ketercapaian target pemenuhan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP	Peningkatan jumlah kehadiran peserta prolanis serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prolanis	Dinas Kesehatan
b.	Belum optimalnya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB)	Optimalisasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) di Wilayah Puskesmas Wonoboyo	Meningkatkan ketercapaian target pemenuhan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP	Peningkatan jumlah kehadiran peserta prolanis serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prolanis	Dinas Kesehatan

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
c.	Masih ditemukan kasus kematian ibu				
d.	Masih ditemukan kasus kematian neonatal, kematian bayi, dan kematian balita	KANGAROO MOTHER CARE (KMC)	Bayi Prematur dapat ditangani dengan lebih baik, skin-to-skin contact	Bayi prematur tumbuh dan berkembang dengan baik, terjaga kesehatannya.	RSUD Temanggung
		Optimalisasi Edukasi Penyakit Gagal Jantung Menggunakan Video dan Pamflet di Poli Jantung RSUD Kabupaten Temanggung	Pasien dan keluarga memperoleh informasi tentang penyakit gagal jantung dengan cara yang lebih mudah dipahami, melalui kombinasi media audio-visual dan media cetak	Pasien dan keluarga lebih memahami tanda bahaya, pentingnya kepatuhan minum obat, serta dapat menekan risiko kekambuhan dan rawat inap berulang	RSUD Temanggung
e.	Masih tingginya kasus permasalahan gizi pada balita	Forti-PreMILK: Fortifikasi ASI untuk Meningkatkan Berat Badan Bayi Prematur di Ruang PICU NICU RSUD Temanggung	Memenuhi kebutuhan nutrisi bayi prematur secara optimal.	Berat badan dan kondisi kesehatan bayi prematur meningkat.	RSUD Temanggung
		Telur ayam Kampung Omega 3, 6, 9 + DHA	Menyediakan sumber protein dan asam lemak esensial berkualitas.	Kesadaran dan kualitas gizi masyarakat meningkat.	Masyarakat
		Si Tangkas “Strategi Intervensi Turunkan Angka Stunting”	Mengoptimalkan intervensi terpadu dalam pencegahan dan penanganan stunting.	Angka stunting menurun dan kualitas kesehatan anak meningkat.	DINKES
		Peningkatan Mutu Pelayanan Asuhan Gizi pada Pasien Rawat Inap Melalui Penyusunan Dokumen Penunjang Gizi Klinik di Puskesmas Pringsurat Kabupaten Temanggung	Meningkatkan kualitas pelayanan gizi sehingga pasien memperoleh asupan gizi yang tepat untuk pemulihan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan gizi di Puskesmas karena pencatatan dan intervensi lebih tepat	DINKES
		ANTING EMAS (Ayo Cegah Stunting dengan Program Inovasi Kesehatan)	Memetakan dan mengintervensi berbagai determinan stunting—baik yang bersifat spesifik maupun sensitif—secara konvergen,	Penurunan angka stunting, perbaikan status gizi ibu hamil, peningkatan kepemilikan jamban sehat,	DINKES

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
			terstruktur, dan berkelanjutan	serta stabilitas cakupan ASI eksklusif	
		Diversifikasi Olahan Ikan Nila Sebagai Pemberdayaan UMKM Dalam Rangka Pencegahan Stunting	Menghadirkan alternatif makanan pencegahan stunting	Meningkatnya ketersediaan alternatif makanan bergizi tinggi yang berperan dalam pencegahan stunting, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha lokal	Masyarakat
f.	Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Teen Fun Game (Game Edukasi Kesehatan Remaja)	Menyampaikan edukasi kesehatan remaja melalui media permainan interaktif.	Pengetahuan dan perilaku hidup sehat remaja meningkat.	Masyarakat
		Optimalisasi Edukasi Penyakit Gagal Jantung Menggunakan Video dan Pamflet di Poli Jantung RSUD Kabupaten Temanggung	Pasien dan keluarga memperoleh informasi tentang penyakit gagal jantung dengan cara yang lebih mudah dipahami, melalui kombinasi media audio-visual dan media cetak	Pasien dan keluarga lebih memahami tanda bahaya, pentingnya kepatuhan minum obat, serta dapat menekan risiko kekambuhan dan rawat inap berulang	RSUD Temanggung
		Upaya Peningkatan Pengetahuan Pentingnya Pengobatan Epilepsi Kepada Pasien dan Keluarga Melalui Video Edukasi di RSUD Kabupaten Temanggung	Keluarga pasien dapat lebih mudah memahami pentingnya pengobatan epilepsi secara tuntas serta berperan penting dalam membantu kesembuhan pasien	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pasien mengenai pentingnya pengobatan epilepsi terlebih terkait target pengobatan	RSUD Temanggung
g.	Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	Gerakan Sadar Deteksi Dini Penyakit Kanker Leher Rahim dengan Inspeksi Visual Asam Asetat Test (GESID PARASIT)	1. Menurunkan risiko terkena kanker leher rahim 2. Menemukan lesi pra-kanker sedini mungkin 3. Mengurangi morbiditas penyakit dengan pengobatan dini	1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan diri 2. Menyelamatkan banyak wanita	Puskesmas Dharmarini

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Upaya Peningkatan Skrining Kanker Leher Rahim Melalui Inovasi Perawan Ramping (Pemeriksaan Rahim Wanita Dengan Program Puskesmas Keliling) di Wilayah Puskesmas Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	Masyarakat, khususnya wanita mendapatkan layanan skrining yang lebih mudah dan terjangkau	Menurunkan angka keterlambatan deteksi kanker leher rahim	Puskesmas Kranggan
		Teen Fun Game (Game Edukasi Kesehatan Remaja)	Menyampaikan edukasi kesehatan remaja melalui media permainan interaktif.	Pengetahuan dan perilaku hidup sehat remaja meningkat.	Masyarakat
		Optimalisasi Edukasi Penyakit Gagal Jantung Menggunakan Video dan Pamflet di Poli Jantung RSUD Kabupaten Temanggung	Pasien dan keluarga memperoleh informasi tentang penyakit gagal jantung dengan cara yang lebih mudah dipahami, melalui kombinasi media audio-visual dan media cetak	Pasien dan keluarga lebih memahami tanda bahaya, pentingnya kepatuhan minum obat, serta dapat menekan risiko kekambuhan dan rawat inap berulang	RSUD Temanggung
		Upaya Peningkatan Pengetahuan Pentingnya Pengobatan Epilepsi Kepada Pasien dan Keluarga Melalui Video Edukasi di RSUD Kabupaten Temanggung	Keluarga pasien dapat lebih mudah memahami pentingnya pengobatan epilepsi secara tuntas serta berperan penting dalam membantu kesembuhan pasien	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pasien mengenai pentingnya pengobatan epilepsi terlebih terkait target pengobatan	RSUD Temanggung
		Optimalisasi Edukasi Keluarga tentang Pengobatan pada Pasien Skizofrenia di Poliklinik RSUD Temanggung	Membantu masyarakat dalam memonitor pengobatan serta pengawasan risiko kekambuhan pasien skizofrenia	Meningkatkan pengetahuan pengunjung dan keluarga pasien	RSUD Temanggung
h.	Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	Optimalisasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) di Wilayah Puskesmas Wonobojo	Meningkatkan ketercapaian target pemenuhan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP	Peningkatan jumlah kehadiran peserta prolanis serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prolanis	Dinas Kesehatan

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Optimalisasi Edukasi Penyakit Gagal Jantung Menggunakan Video dan Pamflet di Poli Jantung RSUD Kabupaten Temanggung	Pasien dan keluarga memperoleh informasi tentang penyakit gagal jantung dengan cara yang lebih mudah dipahami, melalui kombinasi media audio-visual dan media cetak	Pasien dan keluarga lebih memahami tanda bahaya, pentingnya kepatuhan minum obat, serta dapat menekan risiko kekambuhan dan rawat inap berulang	RSUD Temanggung
		Upaya Peningkatan Pengetahuan Pentingnya Pengobatan Epilepsi Kepada Pasien dan Keluarga Melalui Video Edukasi di RSUD Kabupaten Temanggung	Keluarga pasien dapat lebih mudah memahami pentingnya pengobatan epilepsi secara tuntas serta berperan penting dalam membantu kesembuhan pasien	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pasien mengenai pentingnya pengobatan epilepsi terlebih terkait target pengobatan	RSUD Temanggung
		Optimalisasi Edukasi Keluarga tentang Pengobatan pada Pasien Skizofrenia di Poliklinik RSUD Temanggung	Membantu masyarakat dalam memonitor pengobatan serta pengawasan risiko kekambuhan pasien skizofrenia	Meningkatkan pengetahuan pengunjung dan keluarga pasien	RSUD Temanggung
i.	Masih rendahnya fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan SIKN	e-Report IKP: Pencatatan dan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Berbasis Aplikasi	Memudahkan pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan pasien secara digital.	Budaya keselamatan pasien dan mutu layanan rumah sakit meningkat.	RSUD Temanggung
		Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas Tretep dengan Pelatihan dan Monitoring Penggunaan Rekam Medis Elektronik pada Petugas di Lingkungan Puskesmas Tretep Kabupaten Temanggung	Meningkatkan kepatuhan pasien dalam melakukan kontrol kesehatan serta menurunkan risiko komplikasi penyakit hipertensi	Peningkatan pemahaman dari para petugas pelayanan mengenai penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME)	Dinas Kesehatan
j.	Masih rendahnya fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	Optimalisasi Pelaksanaan Informed Consent Secara Elektronik Sebelum Tindakan Medis di Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Bejen Kabupaten	Meningkatnya pemahaman pasien mengenai pentingnya informed consent	Meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan puskesmas	Dinas Kesehatan

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Temanggung			
k.	Belum optimalnya penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Optimalisasi Penanganan Hipertensi Usia Produktif di Wilayah Kerja Puskesmas Dharmarini, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung	Menurunnya risiko komplikasi dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat usia produktif	Meningkatnya pemahaman pasien dan keluarga/wali terkait hipertensi	Dinas Kesehatan
		Optimalisasi Kepatuhan Pasien Hipertensi dalam Melakukan Kontrol Rutin di Poli Penyakit Dalam RSUD Temanggung	Pasien menjadi lebih paham mengenai penyakitnya dan termotivasi untuk patuh kontrol	Peningkatan kepatuhan dan pemahaman pasien terhadap penyakit dan pentingnya kontrol rutin	RSUD Temanggung
l.	Belum optimalnya cakupan imunisasi bayi lengkap				
m.	Rendahnya kepesertaan aktif masyarakat dalam jaminan kesehatan nasional (JKN)				
n.	Belum optimalnya capaian indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target	SIMAPUT (Siaga Mantap Antar Jemput) Kegawatdaruratan Medis	Pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah dan cepat	Pasien merasa lebih nyaman segera dapat tertangani	PSC 119 DINKES
		Penyusunan e-Vislap Sebagai Panduan Digital Pelaksanaan Visitasi Lapangan Pra-Izin Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD) di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peningkatan mutu layanan perizinan tenaga kesehatan	Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik	Dinas Kesehatan
		Optimalisasi Penilaian Pulih Sadar Pasien Paska Anestesi di Recovery Room Instalasi Bedah Sentral di RSUD Temanggung			

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Perencanaan Formulir Elektronik Surat Permintaan Data Medis Pasien dengan Menggunakan Scan QR Code di RSUD Kabupaten Temanggung	Mempermudah dan meningkatkan efisiensi bagi keluarga pasien atau pasien dan pengelola data	Meningkatkan kinerja dalam hal pelayanan kepada pihak yang membutuhkan data	RSUD Temanggung
		POS Teko, Lara Lunga Inovasi Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD Kab. Temanggung	Mempercepat dan mengefisienkan pelayanan farmasi rawat jalan.	Kepuasan pasien RSUD Temanggung meningkat dan antrean berkurang.	RSUD Temanggung
		Sistem Informasi Pengelolaan Data Pasien dan Perubahan Status Pasien (SI PENDAPAT PESAT) untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemungutan Pendapatan di RSUD Kabupaten Temanggung	Efisiensi biaya pegawai terutama biaya lembur untuk pengelolaan data pasien	Meningkatnya pendapatan RSUD akan berimbas pada pembangunan sarana prasarana yang berkualitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat	RSUD Temanggung
o.	Belum optimalnya capaian indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	Kolak Pisang Gendis Menuju Rumah Sakit Ramah Lingkungan	Memanfaatkan limbah organik menjadi produk bernilai guna.	Lingkungan rumah sakit lebih bersih dan berkelanjutan.	RSUD
		e-TraceMed : Pencatatan dan Pelaporan penggunaan Alat Kedokteran berbasis Barcode di RSUD	Meningkatkan ketertelusuran penggunaan alat kedokteran berbasis barcode.	Efisiensi pengelolaan alat medis dan akurasi data rumah sakit meningkat.	RSUD
		Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas Tretep dengan Pelatihan dan Monitoring Penggunaan Rekam Medis Elektronik pada Petugas di Lingkungan Puskesmas Tretep Kabupaten Temanggung	Meningkatkan kepatuhan pasien dalam melakukan kontrol kesehatan serta menurunkan risiko komplikasi penyakit hipertensi	Peningkatan pemahaman dari para petugas pelayanan mengenai penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME)	Dinas Kesehatan

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Optimalisasi Pelayanan Informasi Obat Menggunakan QR Code di Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Temanggung	Mempermudah dan meningkatkan efisiensi bagi keluarga pasien atau pasien dan pengelola data	Meningkatkan kinerja dalam hal pelayanan kepada pihak yang membutuhkan data	RSUD Temanggung
		Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) Sebagai Regulasi Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Korporasi Yang Baik (Good Corporate Governance) dan Tata Kelola Klinik Yang Baik (Good Clinical Governance) di RSUD Kabupaten Temanggung	Memberikan pedoman untuk meningkatkan kinerja pelayanan baik internal maupun eksternal	Menjamin keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan RSUD sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat	RSUD Temanggung
p.	Masih rendahnya SDM RSUD yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas Tretep dengan Pelatihan dan Monitoring Penggunaan Rekam Medis Elektronik pada Petugas di Lingkungan Puskesmas Tretep Kabupaten Temanggung	Meningkatkan kepatuhan pasien dalam melakukan kontrol kesehatan serta menurunkan risiko komplikasi penyakit hipertensi	Peningkatan pemahaman dari para petugas pelayanan mengenai penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME)	Dinas Kesehatan
		Optimalisasi Inventarisasi dan Labelisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Jenis Barang Peralatan dan Mesin Baru (KIB B) Melalui Sistem Pendataan Digital Berbasis Google Form di RSUD Kabupaten Temanggung	Menyediakan data BMD yang lebih akurat mendukung perencanaan, pengawasan, dan pelaporan aset daerah	Mengatasi kendala pada proses manual sebelumnya, seperti ketidakaturan dokumentasi, risiko ketidakakuratan data, dan keterbatasan proses verifikasi	RSUD Temanggung
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
a.	Rendahnya pemenuhan akses air siap minum perpipaan				

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
b.	Rendahnya pemenuhan akses air minum aman bagi rumah tangga				
c.	Belum optimalnya kondisi permukaan jalan mantap pada ruas-ruas jalan kewenangan kabupaten	Digitalisasi Peta Jalan Sebagai Media Monitoring Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	Mendukung pemanfaatan kemajuan teknologi digital dan peningkatan konektivitas wilayah	Memudahkan dalam pencarian, penggunaan, dan pemanfaatan data serta dapat memberikan perbaikan bagi peningkatan kualitas penggunaan peta	DPUPR
		Pengembangan Sistem Inventarisasi Infrastruktur Berbasis Digital untuk Optimalisasi Pendataan Kerusakan Jalan Jembatan dan Saluran Irigasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	Menyediakan sarana peningkatan efisiensi kerja melalui pendataan digital yang lebih terstruktur dan mudah diakses	Layanan publik dapat lebih optimal dan keselamatan pengguna jalan dapat lebih terjamin	DPUPR
		Digitalisasi Monitoring dan Satu Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya efisiensi dan akurasi pengelolaan infrastruktur	Percepatan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan bagi masyarakat	DPUPR
d.	Belum optimalnya penanganan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jembatan	Digitalisasi Monitoring dan Satu Data Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya efisiensi dan akurasi pengelolaan infrastruktur	Percepatan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan bagi masyarakat	DPUPR
e.	Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur pada urusan pekerjaan umum	Digitalisasi Peta Jalan Sebagai Media Monitoring Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan	Mendukung pemanfaatan kemajuan teknologi digital dan peningkatan konektivitas wilayah	Memudahkan dalam pencarian, penggunaan, dan pemanfaatan	DPUPR

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Jalan Oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung		data serta dapat memberikan perbaikan bagi peningkatan kualitas penggunaan peta	
		Sistem Informasi Jagateman (Jaringan Irigasi Temanggung)	Meningkatkan Aksesibilitas Data Irigasi Guna Mendukung Kebutuhan Masyarakat di Kabupaten Temanggung	Penanganan Permasalahan Air Irigasi cepat ditangani	DPUPR
		Digitalisasi Pelaporan Kerusakan Oleh Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Melalui Sarana Web JAGA TEMAN di Kabupaten Temanggung	Percepatan dan ketepatan pelaporan kondisi infrastruktur	Respons penanganan yang lebih cepat dan peningkatan keandalan sistem irigasi.	DPUPR
		Digitalisasi Pelaporan Kerusakan Jaringan Irigasi Melalui Sistem Informasi JAGATEMAN	Percepatan dan ketepatan pelaporan kondisi infrastruktur	Respons penanganan yang lebih cepat dan peningkatan keandalan sistem irigasi.	DPUPR
		Efisiensi Kegiatan Monitoring Pemeliharaan Irigasi Melalui Implementasi Sistem Pelaporan Digital Berbasis AppSheet di UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu kerja petugas lapangan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor irigasi melalui penanganan kerusakan yang lebih proaktif dan tepat waktu	DPUPR
		SIMBAKDES (Sistem Pelayanan Bantuan Keuangan Kepada Desa) dalam Rangka Optimalisasi Fasilitas Pencairan Bankeudes Urusan Pekerjaan Umum)	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang bersifat informatif, mudah, murah dan cepat	Meningkatnya pelayanan fasilitasi pencairan Bankeudes yang optimal kepada para desa penerima oleh DPUPR Kabupaten Temanggung serta meningkatkan citra positif	DPUPR

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
				pelayanan publik masyarakat desa penerima Bankeudes.	
f.	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Optimalisasi Akurasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Berbasis QR Code di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung	Mempercepat proses pendataan dan pengecekan barang serta memudahkan update data inventaris secara berkala.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah	DPUPR
		SIPENA (Sistem Informasi Pengawasan Bangunan)	Terciptanya tata lingkungan bangunan gedung dan perumahan yang memberi kemudahan pada kegiatan pengendalian kawasan dan perumahan	Meningkatkan peran masyarakat dan khalayak umum dalam mendukung pengawasan partisipatif untuk menyuarakan berbagai isu terkait dengan tata bangunan dan perumahan di kawasan kabupaten	DPUPR
		Penerapan Sistem Aplikasi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Data Sewa Tanah Pemerintah Kabupaten Temanggung	Memberikan kemudahan, keterbukaan informasi, dan akurasi data dalam proses penyewaan aset tanah daerah	Mewujudkan data pemerintah yang transparan dan valid	BPKPAD
		Digitalisasi Register Pemutakhiran PBB-P2	Meningkatkan transparansi dan akurasi baik dalam pengelolaan data internal maupun dalam pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan serta tata kelola data di BPKPAD	BPKPAD
g.	Belum optimalnya pemenuhan target penetapan rencana detail tata ruang				
h.	Belum optimalnya penyelesaian layanan perizinan PBG dan SLF	Optimalisasi Pelayanan Informasi PBG/SLF Melalui Layanan Digital di Kabupaten	Mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait tata cara pengurusan PBG/SLF tanpa	Meningkatkan citra pelayanan publik yang inovatif, responsif, dan	DPUPR

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Temanggung	harus datang langsung ke kantor	berbasis digital melalui budaya pelayanan yang lebih modern dan transparan	
i.	Rendahnya pemenuhan akses sanitasi aman bagi rumah tangga				
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
a.	Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Integrasi Data Rumah Kawasan Rawan Bencana dengan Pemetaan ArcGIS di Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung	Meminimalisir risiko korban bencana, mengurangi kerugian ekonomi dan meningkatkan kesadaran terkait budaya siaga bencana	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanggulangan bencana serta mempercepat pemulihan pasca bencana	DPRKPLH
		Digitalisasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kawasan Kumuh Manganjo Kabupaten Temanggung	Memudahkan proses pengajuan bantuan penanganan RTLH dan pengurangan luasan kawasan kumuh	Memudahkan proses penanganan RTLH dan pengurangan luasan kumuh	DPRKPLH
		Retribusi Kebersihan Sampah Berbasis e - Billing	Kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam proses pembayaran	Peningkatan kepatuhan masyarakat dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi sampah	DPRKPLH
		PERKIM-SMARTSITE (Portal Digital Berbasis Google Sites Sebagai Media Profil dan Pengarsipan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Terintegrasi dengan Google Drive)	Mendukung prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan	Peningkatan citra dan profesionalitas OPD serta memperkuat kolaborasi dan inovasi antar bidang	DPRKPLH
		Integrasi Kawasan Kumuh Melalui “Doktor Pekape”	Meningkatkan kualitas pembangunan perumahan dan pengembangan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	DPRKPLH

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		untuk Memenuhi Kebutuhan Kawasan Permukiman yang Layak Huni di Kabupaten Temanggung	kawasan permukiman	Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Penataan Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
b.	Rendahnya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi rumah tangga	Alternatif Rigen Sebagai Pengganti Material Fasad Bangunan	Menyediakan material fasad yang lebih ringan dan ekonomis.	Biaya pembangunan menurun dan desain bangunan lebih ramah lingkungan.	Masyarakat
		Penyediaan Petunjuk Teknis yang Praktis dengan Video Tutorial Untuk Optimalisasi Edukasi Pengelolaan Sampah di TPS3R Kabupaten Temanggung	Meningkatkan efektivitas kegiatan 3R dengan sudah melakukan pemilahan sampah dari sumber sebelum masuk ke TPS3R	Mengurangi timbulan sampah dari sumber untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPS3R	DPRKPLH
		Digitalisasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kawasan Kumuh Manganjo Kabupaten Temanggung	Memudahkan proses pengajuan bantuan penanganan RTLH dan pengurangan luasan kawasan kumuh	Memudahkan proses penanganan RTLH dan pengurangan luasan kumuh	DPRKPLH
		Retribusi Kebersihan Sampah Berbasis e - Billing	Kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam proses pembayaran	Peningkatan kepatuhan masyarakat dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi sampah	DPRKPLH
		Inovasi Pelayanan Persampahan Berbasis Digital	Meningkatnya efisiensi, kemudahan akses layanan, dan transparansi pengelolaan	Peningkatan kualitas layanan kebersihan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	DPRKPLH
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
a.	Masih tingginya tingkat risiko bencana	Optimalisasi Penentuan Skala Prioritas Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca	Menyediakan basis data spasial serta dokumen analisis berbasis GIS terkait bencana tanah longsor yang dapat	Tersedianya data dan dokumen kebencanaan yang terintegrasi berbasis GIS,	BPBD

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Bencana Berbasis Geographic Information System (GIS) di Kabupaten Temanggung	dimanfaatkan oleh berbagai perangkat daerah di Kabupaten Temanggung serta instansi dan masyarakat, sebagai dasar perencanaan, penanganan, rehabilitasi, hingga pemberian bantuan berbasis risiko bencana secara terintegrasi.	didukung analisis spasial-temporal yang sistematis, sehingga meningkatkan ketepatan penentuan skala prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta memperkuat kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di BPBD.	
		Optimalisasi Early Warning System (EWS) Tanah Longsor Dengan Sosialisasi dan Monitoring Berkala di Kabupaten Temanggung	Mengoptimalkan tata kelola data monitoring EWS bagi instansi, mempermudah kinerja petugas di lapangan, serta membangun kesiapsiagaan dan kepedulian masyarakat terhadap mitigasi bencana tanah longsor.	Penyediaan materi, panduan kerja, dan sistem monitoring berkala ini berdampak pada meningkatnya pemahaman teknis serta kesiapsiagaan warga dan petugas dalam menghadapi ancaman tanah longsor secara terukur dan berkelanjutan.	BPBD
		Integrasi Data Rumah Kawasan Rawan Bencana dengan Pemetaan ArcGIS di Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung	Meminimalisir risiko korban bencana, mengurangi kerugian ekonomi dan meningkatkan kesadaran terkait budaya siaga bencana	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanggulangan bencana serta mempercepat pemulihan pasca bencana	DPRKPLH
		PUNAKAWAN (Peran Pusdalops dalam Peningkatan Kegiatan Relawan Untuk Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung)	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang risiko bencana, metode mitigasi, dan teknik pertolongan pertama	Timbulnya solidaritas dan kerjasama antar anggota masyarakat serta kemandirian dalam penanganan bencana.	BPBD
b.	Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	DRONE PATROL (Sistem Patroli Terintegrasi Berbasis Drone)	Peningkatan jangkauan pemantauan dan efisiensi pengawasan	Respon yang lebih cepat terhadap potensi gangguan dan peningkatan keamanan wilayah	SATPOL PP DAN DAMKAR

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Elektronik Aduan Masyarakat (E-DUMAS)	Memudahkan pelaporan dan percepatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan responsivitas aparat, keamanan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat	SATPOL PP DAMKAR
c.	Masih adanya pelanggaran Perda/Perbup	DRONE PATROL (Sistem Patroli Terintegrasi Berbasis Drone)	Peningkatan jangkauan pemantauan dan efisiensi pengawasan	Respon yang lebih cepat terhadap potensi gangguan dan peningkatan keamanan wilayah	SATPOL PP DAN DAMKAR
		Sistem Pemetaan Titik Rawan Pelanggaran Perda dan Perbup (SIPETAK)	Meningkatnya efektivitas dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), serta peraturan lainnya yang berlaku di daerah	Memperkuat kemampuan pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada.	SATPOL PP DAN DAMKAR
d.	Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	DRONE PATROL (Sistem Patroli Terintegrasi Berbasis Drone)	Peningkatan jangkauan pemantauan dan efisiensi pengawasan	Respon yang lebih cepat terhadap potensi gangguan dan peningkatan keamanan wilayah	SATPOL PP DAN DAMKAR
e.	Belum terpenuhinya Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				
f.	Belum optimalnya layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
g.	Rendahnya persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta warga negara yang memperoleh layanan				

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh relawan kebakaran				
h.	Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau manajemen kebakaran				
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
a.	Masih tingginya angka kemiskinan	Optimalisasi Sistem Validasi Data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Berbasis Data Spasial Lahan Petani di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung	Meningkatkan pengetahuan serta keterampilan petani dalam pemanfaatan agen pengendali hayati (APH) untuk pembuatan biopestisida	Meningkatnya akurasi, transparansi, dan efektivitas perencanaan serta penyaluran pupuk bersubsidi melalui pembaruan data petani berbasis spasial, penyusunan peta lahan dan e-book profil kelompok tani, serta perhitungan kebutuhan pupuk yang lebih tepat sasaran.	DKPPP
		Optimalisasi Layanan PPKS Pada UPT Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Meningkatnya penanganan PPKS dari layanan kedaruratan di Rumah Singgah sampai dengan pembinaan di keluarga/masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Temanggung	Dinas Sosial
		Transformasi Tata Kelola Perparkiran Untuk Mengurangi Kemiskinan Ekstrem Melalui Optimalisasi Kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Temanggung	Optimalisasi pengelolaan dan pengawasan parkir berdampak langsung pada kenaikan setoran retribusi parkir yang masuk ke kas daerah	Membantu mengurangi jumlah keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Temanggung melalui perekrutan anggota keluarga miskin ekstrem sebagai juru parkir resmi	Dinhub
		Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembentukan Kelompok	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan menciptakan kreativitas	Memajukan kondisi wilayah, pemberdayaan masyarakat menjadi optimal dan usaha	Kecamatan Bansari

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Petani Green House di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung		pertanian mengalami peningkatan	
II.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				
a.	Belum optimalnya penyerapan penduduk usia kerja ke dalam pasar kerja	SiParJoNo (Siap Pados Kerjo Jaman Now)	Menyediakan integrasi layanan ketenagakerjaan dalam satu ekosistem layanan yang lebih komprehensif, adaptif, dan mudah diakses.	Meningkatkan kepercayaan diri, kesiapan menghadapi proses rekrutmen, serta pemahaman terhadap potensi dan arah karier pencari kerja.	Dinperinaker
b.	Belum optimalnya penyiapan tenaga kerja yang kompeten	Teman Alula “Tempat Jualan Alumni Pelatihan” Dinperinaker Temanggung	Sebagai media mempromosikan dan memasarkan produk-produk alumni pelatihan Dinperinaker Kabupaten Temanggung, baik produk makanan, minuman, jasa dll.	Meningkatkan Penjualan Produk-produk alumni Dinperinakaer	DINPERINAKER
		Optimalisasi Digitalisasi Untuk Media Pembelajaran Pembuatan Desain Busana Dalam Pelatihan Menjahit di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Temanggung	Memperkuat citra BLK Kabupaten Temanggung sebagai lembaga pelatihan yang modern dan adaptif	Meningkatnya kemampuan peserta dalam mendesain busana menggunakan aplikasi ibis Paint X di smartphone, tersedianya materi ajar digital yang fleksibel, serta diperolehnya informasi mengenai efektivitas, kendala, dan kebutuhan pengembangan media pembelajaran yang mendorong inovasi pengajaran di BLK Temanggung	Dinperinaker
		Optimalisasi Informasi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kejuruan Teknik Las BLK	Meningkatkan pemahaman dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi peserta, mendukung terciptanya sistem	Meningkatnya kesadaran, pemahaman, dan kedisiplinan peserta serta instruktur dalam	Dinperinaker

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Kabupaten Temanggung	pelatihan yang aman dan terstandar bagi instruktur dan pengelola, memperkuat kualitas serta citra UPTD BLK Kabupaten Temanggung, serta menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan budaya K3 yang baik bagi dunia usaha dan industri.	menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sehingga potensi bahaya dapat diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik serta risiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir.	
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
a.	Belum optimalnya pemberdayaan gender di berbagai sektor	Penguatan Kapasitas dan Monitoring Analisis Responsif Gender Untuk Meningkatkan Penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya Kabupaten Temanggung	Memperkuat kapasitas DPPPAPPKB dalam pelaksanaan dan evaluasi Anggaran Responsif Gender (ARG), meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif gender, serta mendorong peningkatan kinerja dan peringkat Kabupaten Temanggung dalam Penilaian PPE 2025	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui tersedianya template GAP yang lebih terstruktur, data pilah yang terintegrasi, penguatan kapasitas SDM dan sinergi tim, monitoring dan evaluasi yang lebih optimal, serta komitmen pimpinan OPD yang semakin kuat.	DPPPAPPKB
b.	Masih adanya puskesmas yang belum menerapkan pelayanan ramah anak				
c.	Masih stagnannya status Kabupaten Layak Anak pada kategori Madya	Pemanfaatan Instagram DPPPAPPKB Sebagai Media Informasi terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Temanggung	Mengintegrasikan pendataan dan analisis laporan kekerasan melalui sistem digital guna memudahkan pemetaan kasus oleh dinas, sekaligus memperluas akses edukasi serta layanan pengaduan bagi masyarakat melalui media sosial yang responsif dan mudah dijangkau.	Meningkatkan efisiensi kinerja pendataan internal sekaligus penguatan literasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan."	DPPPAPPKB
d.	Masih rendahnya tingkat	Pemanfaatan Instagram	Mengintegrasikan pendataan dan	Meningkatkan efisiensi	DPPPAPPKB

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
	perlindungan terhadap anak	DPPPAPPKB Sebagai Media Informasi terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Temanggung	analisis laporan kekerasan melalui sistem digital guna memudahkan pemetaan kasus oleh dinas, sekaligus memperluas akses edukasi serta layanan pengaduan bagi masyarakat melalui media sosial yang responsif dan mudah dijangkau.	kinerja pendataan internal sekaligus penguatan literasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan."	
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
a.	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kalori masyarakat	Spoontify	Menyediakan <i>edible spoon</i> yang ramah lingkungan, sekaligus bernilai gizi tinggi berkat kandungan protein, serat, dan zat besi dari kacang merah.	Meningkatkan konsumsi gizi dan mampu mengurangi sampah plastik	Masyarakat
b.	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah				
c.	Belum terjaminnya stabilitas dan kontinuitas ketersediaan pangan pokok daerah				
d.	Belum terjaminnya kualitas konsumsi masyarakat				
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				
	-				
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
a.	Belum optimalnya upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) daerah	Potensi Energi Terbarukan Untuk Rumah Tangga	Menyediakan alternatif sumber energi yang ramah lingkungan.	Ketergantungan pada energi fosil berkurang dan efisiensi energi meningkat.	Masyarakat
		Pemantauan Status Sekolah Adiwiyata Secara Digital dan Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung	Memudahkan sekolah dalam memantau masa berlaku predikat Adiwiyata secara tepat waktu	Mencegah kehilangan status Adiwiyata karena keterlambatan dalam evaluasi atau perpanjangan	DPRKPLH

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
b.	Belum optimalnya pengendalian pencemaran udara	TESAMO (Tempat Sampah Otomatis)	- Mempermudah membuang sampah tanpa harus menyentuh tempat sampah - Mengurangi kontak langsung dengan tempat sampah, sehingga lebih higienis - Membantu mengurangi penumpukan sampah - Membantu petugas kebersihan memantau kapasitas tempat sampah	Mengurangi pencemaran lingkungan	Masyarakat
		Kolak Pisang Gendis Menuju Rumah Sakit Ramah Lingkungan	Memanfaatkan limbah organik menjadi produk bernilai guna.	Lingkungan rumah sakit lebih bersih dan berkelanjutan.	RSUD
		Mesin Penghancur Sampah dan Pemilah Sampah di Box Filter	Mempermudah proses pemilahan dan pengurangan volume sampah.	Pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan ramah lingkungan.	Masyarakat
		Kompoli	Memanfaatkan oli bekas sebagai bahan bakar alternatif yang murah dan mudah diperoleh.	Mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus menekan biaya energi masyarakat.	Masyarakat
		Spoontify	Menyediakan <i>edible spoon</i> yang ramah lingkungan, sekaligus bernilai gizi tinggi berkat kandungan protein, serat, dan zat besi dari kacang merah.	Meningkatkan konsumsi gizi dan mampu mengurangi sampah plastik	Masyarakat
		Inovasi Limbah Air Tahu Menjadi Pupuk Organik Cair (POC) Yang Ramah Lingkungan	Mengurangi pencemaran akibat limbah cair industri tahu melalui pemanfaatan kembali sebagai pupuk organik cair	Mendorong perubahan pola pikir masyarakat bahwa limbah tidak selalu berakhir sebagai sisa produksi, melainkan dapat diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai guna	Masyarakat
		Pakan Alternatif dari Telur	Mengurangi penumpukan limbah	Dapat menekan biaya	Masyarakat

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Busuk	telur busuk, menyediakan pakan ikan alternatif yang lebih murah, serta membuka peluang usaha kecil berbasis produksi pakan ikan sederhana dari limbah organik	pemeliharaan ikan bagi masyarakat serta meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah limbah menjadi produk yang memiliki nilai guna.	
		Grass Chopper	Mempermudah proses mencacah rumput menjadi ukuran kecil dan seragam	Meningkatnya efisiensi dalam pemberian pakan ternak	Masyarakat
		Rocket Stove	Membantu petugas TPS3R mengurangi beban kerja dan tumpukan sampah harian	Menciptakan solusi jangka panjang pengelolaan sampah yang lebih bersih dan ramah lingkungan	Masyarakat
		Penyediaan Petunjuk Teknis yang Praktis dengan Video Tutorial Untuk Optimalisasi Edukasi Pengelolaan Sampah di TPS3R Kabupaten Temanggung	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengelola TPS3R, mengurangi timbulan sampah dari sumber, meningkatkan efektivitas pemilahan dan kegiatan 3R, serta mengoptimalkan pengelolaan sampah sesuai petunjuk teknis.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan sampah di TPS3R melalui tersedianya alur kerja yang jelas, data yang terbaharui, serta media edukasi berbasis video yang menarik sehingga meningkatkan pemahaman dan partisipasi pengelola maupun masyarakat.	Masyarakat
		Retribusi Kebersihan Sampah Berbasis e - Billing	Kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam proses pembayaran	Peningkatan kepatuhan masyarakat dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi sampah	DPRKPLH
		Inovasi Pelayanan Persampahan Berbasis Digital	Meningkatnya efisiensi, kemudahan akses layanan, dan transparansi pengelolaan	Peningkatan kualitas layanan kebersihan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	DPRKPLH
c.	Belum optimalnya kepatuhan				

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
	pelaku usaha dalam pemenuhan dokumen lingkungan hidup				
6.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
a.	Belum semua penduduk Temanggung memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Inovasi 0 Kilometer 0 Rupiah	Meningkatkan pelayanan masyarakat dari rumah tanpa biaya	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa	DINDUKCAPIL
		Curhat PAK	Menyediakan media komunikasi dan pengaduan yang aman dan responsif.	Kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap layanan publik meningkat.	DINDUKCAPIL
		SIPERMATA (Sistem Informasi Pengolahan Pengajuan Desa Permata)	Menghemat waktu pengolahan data bulanan serta meningkatkan akurasi rekapitulasi	Mendukung evaluasi efektivitas program DESA PERMATA	DINDUKCAPIL
		SI FASTRAK (Sistem Fast Track Administrasi Kependudukan)	Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan KTP-el melalui integrasi layanan desa dan Dukcapil	Pengurangan antrean, peningkatan kepastian pelayanan, dan kemudahan bagi masyarakat	DINDUKCAPIL
		GEMPITA (Gerakan Melayani Penduduk Rentan Adminduk)	Pelayanan bagi penduduk rentan yang membutuhkan dokumen kependudukan untuk keperluan mendesak	meningkatnya akses dan kecepatan pelayanan bagi penduduk rentan dalam memperoleh dokumen kependudukan secara tepat waktu, sehingga mendukung pemenuhan kebutuhan mendesak serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat	DINDUKCAPIL
7.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
a.	Belum semua desa membuat laporan Lembaga	Pemanfaatan Media Spreadsheet Untuk	Meningkatkan efisiensi administrasi Dinpermades melalui percepatan	Terciptanya tata kelola arsip yang lebih aman, cepat	Dinpermades

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
	Kemasyarakatan Desa	Optimalisasi Pengelolaan Dokumen Perdes APBDes di Dinpermades Kabupaten Temanggung	akses dokumen, sekaligus menjamin keamanan data dan transparansi tata kelola bagi pemerintah desa secara terintegrasi.	ditemukan, dan mudah dioperasikan secara berkelanjutan.	
		SAPA BUM DESA	Sapa BUMDesa berhasil menghemat biaya akomodasi (transportasi dan konsumsi) bagi dinas, pemerintah desa, dan BUMDesa	Peningkatan efisiensi dari segi waktu dan anggaran.	Dinpermades
		Pengelolaan Data Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	Mewujudkan standardisasi pengelolaan data BUM Desa yang sistematis guna menyediakan basis data komprehensif bagi pengambilan kebijakan pemberdayaan desa di Kabupaten Temanggung.	Terpetakannya kebutuhan data lintas bidang dan penyediaan standar format teknis yang baku berdampak pada terciptanya basis informasi BUM Desa yang akurat, sistematis, serta adaptif terhadap masukan lapangan guna mendukung perencanaan pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.	Dinpermades
		MODENA (Monitoring Dana Desa)	Memudahkan dalam monitoring status desa, penganggaran rehap kantor desa, dan belanja operasional desa	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa, percepatan pengambilan keputusan dalam penganggaran, serta optimalisasi penggunaan anggaran untuk rehabilitasi dan operasional desa	Dinpermades
		Fasilitasi Pelaporan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Temanggung pada Aplikasi SIPEMDES (Sistem Informasi Pemerintahan Desa) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Pendataan BPD melalui Aplikasi Sipemdes untuk menjamin bahwa BPD berfungsi efektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, serta terjamin kesejahteraannya.	Adanya pemutakhiran dan akurasi data BPD	Dinpermades

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Dan Desa Kabupaten Temanggung			
		KLINIK SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)	Menyediakan wadah pendampingan dan konsultasi yang bersifat berkelanjutan, mudah diakses, dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa	Tersedianya sarana pembinaan dan asistensi, serta meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Bansari
		PEPES NILA (Pembinaan dan Pengawasan BUMDES Menuju Smart Village Berbasis Teknologi Informasi)	Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan transparansi BUMDes, serta berdampak pada penguatan ekonomi desa, peningkatan akuntabilitas	Terwujudnya tata kelola desa yang lebih modern dan berbasis data	Kecamatan Ngadirejo
		Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Melalui Aplikasi DESA (Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa)	Peningkatan transparansi, ketepatan, dan kemudahan pengelolaan dana desa	Akuntabilitas kinerja yang lebih baik, pengawasan yang efektif, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat	
8.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
a.	Masih rendahnya penggunaan KB pasca persalinan				
b.	Belum optimalnya kualitas pengasuhan dalam keluarga yang memiliki remaja	Temanggung Bergerak Lawan Narkoba	Menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan keluarga yang berkontribusi pada dukungan pencegahan penyalahgunaan narkoba	Terwujudnya ketahanan keluarga yang akan membentuk keluarga sejahtera yang bebas dari narkoba	Bankesbangpol
9.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
a.	Belum meratanya kondisi penerangan jalan kabupaten	Digitalisasi Administrasi Pengelolaan Aduan Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Memberikan kemudahan pelaporan dan percepatan penanganan aduan	Meningkatnya kualitas layanan PJU dan kepuasan masyarakat	Dinhub

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Inventarisasi Digital Prasarana Keselamatan Jalan	Memberikan kemudahan pendataan dan pemantauan kondisi prasarana secara akurat	Meningkatnya keselamatan pengguna jalan dan efektivitas perencanaan penanganan infrastruktur	Dinhub
		Digitalisasi Laporan Stock Opname Pengeluaran Bukti Lulus Uji Elektronik	Memudahkan pencatatan serta pemantauan dokumen secara digital	Meningkatkan tertib administrasi, transparansi, dan efisiensi pengelolaan data	Dinhub
		Pengembangan SIPANTES sebagai Inovasi Sistem Informasi Parkir Terpadu untuk Meningkatkan Tata Kelola Perparkiran di Kabupaten Temanggung	Memberikan kemudahan akses layanan bagi juru parkir	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja petugas	Dinhub
		Pemanfaatan Media Sosial Untuk Peningkatan Layanan Informasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kepada Masyarakat di Dinas Perhubungan	Meningkatkan kemudahan akses informasi layanan uji berkala kendaraan, kesadaran masyarakat, kualitas pelayanan, keselamatan berkendara, serta pemerataan sarana prasarana guna mendukung mobilitas dan mengurangi kesenjangan wilayah.	Meningkatnya akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan uji berkala kendaraan, optimalnya proses pelayanan (termasuk sinkronisasi data dan penataan arsip), serta meningkatnya jumlah kendaraan yang diuji sehingga mendukung keselamatan berkendara.	Dinhub
		Penyajian Peta Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Berbasis Digital di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	Memudahkan dalam menentukan titik-titik lokasi kantong parkir dan dapat mengetahui titik-titik penggunaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas	Meningkatkan citra instansi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menentukan alternatif rute yang akan dilewati dan mengetahui titik titik lokasi kantong parkir	Dinhub
		Digitalisasi Pendataan Permohonan Perlengkapan	Membantu petugas dalam pencatatan dan pengawasan permohonan,	Memudahkan masyarakat dalam mengakses dan	Dinhub

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Jalan dengan Googleform dan Spreadsheets di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelaporan aset di Dinas Perhubungan, serta memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan perlengkapan jalan.	menyampaikan permohonan secara online.	
		Optimalisasi Perekapan dan Kontrol Retribusi Parkir Melalui Sistem E-Retribusi di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	Peningkatan PAD karena setoran retribusi tercatat langsung ke kas daerah sehingga mengurangi kebocoran serta semua transaksi tercatat otomatis melalui sistem perbankan sehingga mudah diaudit	Transparansi pembayaran retribusi akan meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat	Dinhub
10.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				
a.	Belum maksimalnya integrasi dan tata kelola SPBE	Layanan Laporan dan Aduan Masyarakat WAGE (Whatsapp Gateway) Caranya, ketik WAGE kirim ke nomor WA: 085878600900	1. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan, informasi dan pertanyaan seputar layanan publik Pemkab Temanggung, disampaikan melalui WAGE (Whatsapp Gateway), 2. Masyarakat dapat memantau aduan, pertanyaan dan laporan yang dulur kirimkan di wage.	Masyarakat lebih mudah dalam mengajukan pengaduan, informasi dan layanan dan cepat mendapat penanganan tindak lanjut.	DINKOMINFO
		Smart Village Kabupaten Temanggung	Ketersediaan data terintegrasi dan akurat dari seluruh desa mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, sehingga kebijakan yang dibuat lebih relevan dan berdampak	Memungkinkan operator desa, perangkat daerah, dan masyarakat umum untuk berinteraksi dengan data dan informasi secara efektif	DINKOMINFO
		(Geographic Information System) GIS Terintegrasi Kab Temanggung	Dapat membantu dapat membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pemantauan. SIG dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti lingkungan, transportasi, dan pengelolaan proyek.	Mempermudah dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemantauan Lingkungan, Penanganan Bencana, Transportasi dan Logistik di Kabupaten Temanggung.	DINKOMINFO
		Sistem Informasi BAPPEDA Temanggung	Memudahkan dalam pengisian agenda rapat	Meningkatnya efisiensi dan kerapian administrasi	BAPPERIDA

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
				agenda rapat, sehingga mendukung koordinasi yang lebih efektif serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terarah	
		Elektronik Aduan Masyarakat (E-DUMAS)	Memudahkan pelaporan dan percepatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan responsivitas aparat, keamanan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat	SATPOL PP DAMKAR
		Transformasi Digital Pelayanan Publik dengan Integrasi Whatsapp Official Contact di Kelurahan Jampirejo			
b.	Kurangnya kesadaran perangkat daerah tentang keterbukaan informasi publik dan memaksimalkan pelayanan publik secara elektronik	Diskusi Seputar Layanan Publik Pemkab Temanggung “RUBRIK DIGITAL”	- Memfasilitasi Pelayanan Publik Bagi Pemerintah dan Masyarakat Temanggung - Memperluas Informasi kepada masyarakat.	- Meningkatnya Komunikasi 2 arah antara Pemerintah dan Masyarakat - Masyarakat lebih mudah dalam mendapat informasi - Jangkaun informasi lebih luas, cepat dan murah	DINKOMINFO
		Sarana Informasi Interaktif Dinkominfo dan Layanan Publik Pemkab Temanggung RuDiMas (Ruang Digital Masyarakat)	Masyarakat dapat mendapatkan informasi, pelayanan, pelatihan dalam pengembangan SDM dengan mudah dan gratis Pemerintah Desa, Mahasiswa, siswa/siswi sekolah dan masyarakat dapat meningkatkan SDM dengan mudah	Meningkatkan SDM Masyarakat Kabupaten Temanggung	DINKOMINFO
c.	Belum semua lembaga binaan dan mitra Dinkominfo yang tidak aktif dalam menyebarkan				

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
	informasi				
11.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
a.	Belum optimalnya peran dan kontribusi sektor koperasi dalam menggerakkan perekonomian daerah	Digitalisasi Pengajuan Sewa Barang Milik Daerah (BMD) Berupa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Pengajuan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	Peningkatan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan data bagi rekan kerja dan unit kerja, serta mempermudah dan mempercepat proses pengajuan layanan bagi masyarakat.	Tersedianya sistem dan petunjuk teknis Google Form, meningkatnya pemahaman admin, terlaksananya layanan sewa secara digital, serta adanya evaluasi database yang mendukung optimalisasi pengajuan sewa.	
b.	Rendahnya akselerasi penumbuhan wirausaha daerah	BUMBUSEGO Bumbu Nasi Goreng Instan	Memberikan solusi bumbu praktis dengan cita rasa konsisten.	Daya saing produk UMKM kuliner meningkat.	Masyarakat
		Spoontify	Menyediakan <i>edible spoon</i> yang ramah lingkungan, sekaligus bernilai gizi tinggi berkat kandungan protein, serat, dan zat besi dari kacang merah.	Meningkatkan konsumsi gizi dan mampu mengurangi sampah plastik	Masyarakat
		Aksi Figur 2 Dimensi berbahan dasar Multiplex	Mengembangkan keterampilan seni dan kreativitas berbasis material lokal.	Nilai tambah produk kerajinan dan peluang ekonomi kreatif meningkat.	Masyarakat
		SELAYA (Selai Pepaya)	Menyediakan cara pemanfaatan buah saat panen melimpah dan berpotensi menjadi usaha rumahan yang menjanjikan bagi masyarakat.	Menjadi peluang usaha	Desa Bengkal
		Okravive (Okra and Revive) From Waste to Worth	Menyediakan produk yang berpotensi menjadi peluang usaha bagi masyarakat yaitu lotion berbahan tanaman okra yang mengandung antioksidan yang dapat membantu menjaga kesehatan dan melembabkan kulit.	Menumbuhkan semangat inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk yang aman, berkualitas, dan ramah lingkungan serta menjadi peluang usaha	Desa Nguwet

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Reformulasi Kopi Redvia (Kopi Robusta Reformulasi dengan Ekstrak Buah Naga Merah, Jahe Merah, dan Gula Daun Stevia)	Membantu mengoptimalkan potensi lokal serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi minuman bernutrisi yang aman dan alami	Meningkatkan nilai tambah ekonomi kopi robusta lokal yang selama ini hanya dipasarkan dalam bentuk sederhana	Masyarakat
		KLEPURA (Klepu UMKM Nusantara) - Website Profil UMKM Desa Klepu sebagai Pusat Informasi dan Promosi Produk Lokal	Memberikan akses kepada masyarakat untuk mengenal dan membeli produk desa serta menumbuhkan semangat wirausaha dan inovasi berbasis digital	Meningkatnya akses pasar dan daya saing produk desa, tumbuhnya semangat kewirausahaan berbasis digital, serta penguatan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat
		Susu Kedelai Ekstrak Daun Kelor	Memberikan tambahan asupan gizi bagi ibu hamil melalui inovasi susu kedelai ekstrak daun kelor untuk mendukung pencegahan stunting	Menghasilkan minuman dengan nilai gizi lebih tinggi, cita rasa tetap diterima, dan potensi daya terima yang baik di masyarakat	Masyarakat
		Pemanfaatan Serpihan Arang Kayu Menjadi Briket Sebagai Bentuk Upaya Peningkatan Ekonomi Desa	Membuka peluang usaha baru dan menambah sumber penghasilan masyarakat melalui produksi dan penjualan briket	Mengurangi pencemaran lingkungan akibat sisa produksi arang	Masyarakat
		Budidaya Maggot	Mendukung konsep zero waste melalui pemanfaatan limbah menjadi produk bermanfaat	Memberikan nilai tambah dari sampah organik melalui produk larva maggot, pupuk organik, dan bioenergi	Masyarakat
		Pelatihan Pembuatan Spray Obat Anti Nyamuk	Membuka peluang usaha baru, biaya produksi terjangkau, dan menaikkan nilai jual kopi serta serai	Berpotensi mengoptimalkan pertanian lokal serta mendukung konsep green product berbasis sumber daya alam daerah	Masyarakat
		Brownies Bekatul	Peningkatan Nilai Jual Bekatul, yang sebelumnya dianggap sebagai limbah	Mendorong munculnya Unit Usaha	Masyarakat

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
			penggilingan padi diolah menjadi produk olahan	Kecil dan Menengah (UKM) baru di tingkat desa yang fokus pada pengolahan makanan, menyediakan sumber pendapatan alternatif bagi ibu-ibu rumah tangga dan pemuda setempat	
		Lilin Aromaterapi Kopi	Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk lilin aromaterapi.	Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan limbah secara berkelanjutan serta membuka peluang bagi pengembangan produk kreatif berbasis pemanfaatan limbah rumah tangga	Masyarakat
		Aplikasi Web Kebumify: Etalase Digital UMKM Desa	Mempermudah promosi produk lokal dan memperkuat ekonomi desa	Menjadi jembatan data bagi pemerintah desa untuk integrasi ke portal Smart Village	Masyarakat
		SIGAP (Sistem Informasi Geospasial Aset Potensi)	Menyediakan data potensi desa yang akurat dan terintegrasi	Perencanaan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran dan berbasis data	Masyarakat
		Limbah Kulit Kopi menjadi Pakan Ternak	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai	Produk dapat digunakan sebagai alternatif pakan ternak	Masyarakat
		Pemanfaatan Limbah Kulit Kopi Menjadi Cascara Tea	Masyarakat memperoleh pemahaman bahwa limbah kulit kopi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi	Mendukung pengembangan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi desa berbasis komoditas khas daerah	Masyarakat

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		KLEPUKOPI (The herbal dari daun kopi)	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pengolahan daun kopi menjadi teh	Membuka peluang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi lokal	Masyarakat
		Lilin Aroma Terapi dari Minyak Jelantah dan Kopi	Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk lilin aromaterapi.	Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan limbah secara berkelanjutan serta membuka peluang bagi pengembangan produk kreatif berbasis pemanfaatan limbah rumah tangga	Masyarakat
		Pemanfaatan Bubuk Kopi sebagai Bahan Pembuatan Sabun Cuci Tangan	Penggunaan bahan alami dan pengurangan limbah	Peningkatan nilai tambah produk, peluang usaha, dan keberlanjutan lingkungan	Masyarakat
		Biochar Kulit Kopi	Memanfaatkan potensi desa berupa limbah kulit kopi yang selama ini belum dimaksimalkan dengan mengolahnya menjadi produk bermanfaat berupa Biochar yang berfungsi sebagai produk penyubur tanah bagi ladang para petani	Memberikan alternatif produk penyubur tanah bagi petani di Desa Wonokerso melalui pengolahan limbah kulit kopi menjadi biochar yang ramah lingkungan	Masyarakat
		Pemanfaatan Limbah Kulit Kopi Menjadi Bolu kukus	Pengurangan limbah dan diversifikasi produk pangan	Peningkatan nilai ekonomi, peluang usaha, dan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat
		Selai Ubi Ungu	Diversifikasi produk olahan dan pemanfaatan komoditas lokal	Peningkatan nilai tambah, peluang usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat desa	Masyarakat
		Lilin Aromaterapi dari Minyak Jelantah	Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk lilin	Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan limbah secara	Masyarakat

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
			aromaterapi.	berkelanjutan serta membuka peluang bagi pengembangan produk kreatif berbasis pemanfaatan limbah rumah tangga	
		Sirup Kulit Kopi	Memberdayakan petani dan pelaku UMKM di Desa Tepusen melalui pelatihan teknis, penyediaan panduan pengolahan, serta pengenalan strategi pemasaran produk sirup kulit kopi	Limbah yang sebelumnya bernilai ekonomi rendah dapat menjadi komoditas unggulan desa	Masyarakat
		Wedang Pring Khas Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu	Memberdayakan UMKM wedang pring dan pengrajin bambu	Meningkatkan ide inovasi produk khas Desa Ngadimulyo	Masyarakat
		Diversifikasi Olahan Ikan Nila Sebagai Pemberdayaan UMKM Dalam Rangka Pencegahan Stunting	Menyediakan alternatif pengolahan yang tidak hanya memiliki daya tahan yang lebih lama, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.	Dapat meningkatkan selera selera makan anak-anak dengan kandungan gizi yang baik dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak	Masyarakat
		Karya Seni Limbah Kardus	Meningkatkan nilai ekonomis limbah kardus Meningkatkan kreativitas masyarakat	Meningkatkan ekonomi Masyarakat	Masyarakat
		Alat Linting Kayu	Mempermudah dan mempercepat produksi rokok	Meningkatkan ekonomi Masyarakat	Masyarakat
12.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
a.	Masih tingginya kerentanan struktur investasi daerah terhadap dinamika ekonomi eksternal	SIAP TANAM (Aksi Andalan Pendampingan Penanaman Modal)	Mempermudah proses pendampingan dan perizinan penanaman modal.	Realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja meningkat.	DPMPTSP

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		GAMPIL (Gerakan Pendampingan Layanan Perizinan)	Mempermudah pendampingan dan akses layanan perizinan masyarakat.	Proses perizinan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.	DPMPTSP
		Optimalisasi Layanan Informasi Potensi Investasi Dengan Peta Digital di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung	Memudahkan akses informasi potensi investasi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, menyediakan data yang akurat dan terstruktur, mendukung perencanaan kebijakan pemerintah, serta meningkatkan daya tarik investasi daerah.	Teridentifikasinya potensi investasi di tiap kecamatan, tersedianya peta digital beserta panduan, video simulasi, serta evaluasi layanan informasi potensi investasi di Kabupaten Temanggung.	DPMPTSP
		Optimalisasi Promosi Potensi Investasi Melalui Layanan Pesan Otomatis Promosi Potensi Investasi di DPMPTSP Kabupaten Temanggung	Tersedianya alur dan teks layanan, terlaksananya sosialisasi, pengiriman, serta evaluasi pesan otomatis promosi potensi investasi Temanggung.	Sistem pesan otomatis promosi investasi meningkatkan partisipasi publik, transparansi layanan, kemudahan promosi informasi, serta mendukung percepatan pengambilan keputusan dan pengembangan ekonomi daerah.	DPMPTSP
		SI KOALA (Solusi Kolaboratif untuk Sinkronisasi Data Reklame)	Menyediakan pemutakhiran data permohonan izin penyelenggaraan reklame secara real time	Pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat karena berbasis data real time dan terintegrasi	DPMPTSP
13.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				
a.	Masih minimnya prestasi yang diraih pada event olahraga yang diikuti				
b.	Masih rendahnya jumlah wirausaha muda dibanding jumlah pemuda	Pengembangan Aplikasi Kepemudaan (SIDAMUDARAGA)			

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
c.	Masih minimnya jumlah pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan				
d.	Masih terdapat Gugus Depan Pramuka yang tidak aktif				
14.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				
a.	Kurangnya partisipasi aktif para penyelenggara SDI				
15.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				
a.	Perlunya penguatan Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	PATAS (Pantau Jaringan Terintegrasi Alert System)	Peningkatan respons cepat, efisiensi koordinasi, dukungan transformasi digital, peluang riset, kelancaran layanan publik, serta transparansi dan akses informasi yang lebih baik.	Meningkatnya kecepatan penanganan gangguan, efisiensi koordinasi antarinstansi, serta terciptanya layanan publik yang lebih andal, transparan, dan responsif berbasis digital.	Dinkominfo
16.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				
a.	Belum bertumbuhnya ekosistem kesenian sebagai bagian dari ekonomi kreatif	Optimalisasi verifikasi data pelaku ekonomi kreatif . Inovasi dalam Proses Verifikasi: Sistem Informasi dan Kolaborasi Digital	Menyediakan pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan	Peningkatan daya tarik wisata berdampak pada pertumbuhan UMKM dan jasa pariwisata lainnya.	Dinbudpar
17.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
a.	Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat	PELUKIS BERTALI (Pembiasaan Lisan Tulisan Berbasis Digital Library)	Mendorong pembiasaan literasi lisan dan tulisan berbasis digital.	Budaya literasi dan pemanfaatan digital library di sekolah meningkat.	DINPUSIP
		OME GOOD! One Minutes Educations, Good! (Produksi Konten Video Edukasi di	Memudahkan pemahaman materi, meningkatkan motivasi belajar, memperluas akses informasi,	Meningkatnya pemahaman, motivasi, kreativitas, interaksi, serta akses	DPMPTSP

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Sosial Media Berdurasi 1 Menit)	memperkuat interaksi dan kolaborasi, mengembangkan kreativitas, serta mendukung pembelajaran yang fleksibel bagi warganet.	pembelajaran yang lebih fleksibel dan mudah bagi warganet melalui media digital yang interaktif.	
b.	Masih kurangnya upaya pembudayaan Gemar Membaca di kalangan masyarakat				
18.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
a.	Belum optimalnya manajemen dan pengawasan kearsipan	Digitalisasi Pencatatan Agenda Surat dan Arsip surat di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	Kemudahan pencatatan dan pencarian arsip surat, pengurangan risiko kehilangan dokumen, serta peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan administrasi persuratan di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.	Tersusunnya sistem digitalisasi persuratan yang mencakup database, arsip digital, panduan penggunaan, serta mekanisme evaluasi pencatatan dan pengelolaan surat berbasis Google Sheets dan Google Drive.	Sekretariat DPRD
		Digitalisasi Arsip dan Dokumen Dalam Upaya Meningkatkan Proses Administrasi di DINDIKPORA Kabupaten Temanggung	Peningkatan efisiensi kerja, kemudahan pengelolaan dokumen dan administrasi, serta peningkatan kualitas layanan melalui digitalisasi dan kolaborasi kerja yang lebih efektif.	Terciptanya sistem kerja yang lebih cepat, tertata, dan modern sehingga mendukung peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan administrasi di lingkungan kerja.	DINDIKPORA
		Aplikasi SINAR Kecamatan Kledung (Sistem Informasi Arsip Digital Kecamatan Kledung)	Mewujudkan pengelolaan arsip Kecamatan yang tertib, rapi, dan terdigitalisasi	Mendukung implementasi dan reformasi birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kecamatan Kledung
		BIMA (Bimbingan Manajemen Arsip)	Memberikan kemudahan akses informasi, keamanan dan kepatuhan	Peningkatan produktivitas, kualitas pengambilan	Dinpusip

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
			hukum, serta efisiensi ruang dan biaya	keputusan, dan pelestarian memori organisasi.	
III.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				
a.	Masih rendahnya minat dan budaya konsumsi ikan di tingkat keluarga				
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
a.	Belum optimalnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap struktur PDRB daerah	SIPENTAS (Sistem PENDataan penTAs Seni)	Memberikan kemudahan, kecepatan, dan memperluas jangkauan pengumpulan data dari kelompok kesenian	Ketersediaan data yang lebih akurat, peningkatan partisipasi, dan perencanaan kegiatan seni yang lebih efektif	Dinbudpar
		Pembuatan Peta Desa Wisata Berbasis WebGIS	Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang Desa Wisata Di Kabupaten Temanggung.	Tersedianya informasi publik terkait dengan Desa Wisata di Kabupaten Temanggung.	Bapperida
		Peta dan Maket Mini	Mempermudah pemahaman konsep ruang dan perencanaan wilayah.	Kualitas pembelajaran dan visualisasi tata ruang meningkat.	Masyarakat
		Info Dewi Kledung	Memudahkan masyarakat, wisatawan, dan pemangku kepentingan dalam mengakses informasi wisata secara cepat, akurat, dan menarik.	Meningkatkan daya tarik wisata dan perekonomian daerah	Kecamatan Kledung
		Transformasi Tata Kelola Kawasan Wisata Sumbing Sindoro Melalui Kolaborasi Pentahelix “GERBANG SUSI” di Kabupaten Temanggung	Meningkatkan peran serta pelaku usaha dalam pengembangan pariwisata melalui usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Temanggung dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Sumbing	Dinbudpar

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
				Sindoro	
		Desa Wisata Gunung Gempol Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung	Terwujudnya Desa Gunung Gempol yang bersih, sehat, dan lestari dengan meningkatnya kunjungan wisata serta kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan.	Meningkatnya kelestarian lingkungan dan satwa, tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menjaga alam, serta berkembangnya kunjungan wisata yang turut mendorong peningkatan ekonomi lokal.	Masyarakat
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Stek Berakar Tanaman Kopi	Menyediakan Bibit Kopi berkualitas yang cepat produksi.	Petani dapat panen lebih cepat dan produksi tinggi	DKPPP
		Budidaya Kopi Robusta dengan memanfaatkan Batang Kopi Excelsa	1. Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi 2. Tanaman kopi lebih kuat dan tahan penyakit	Meningkatkan pendapatan petani	Masyarakat
		Optimalisasi Pendataan Sumber Benih Kopi Melalui Pemanfaatan Google Form dan Google Spreadsheet di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung	Peningkatan kompetensi, efisiensi pengelolaan data, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pendataan sumber benih kopi berbasis digital.	Meningkatnya akurasi, kecepatan, dan keterpaduan data sumber benih kopi melalui sistem pendataan digital yang lebih terstandar, efisien, dan mudah dievaluasi.	DKPPP
a.	Belum optimalnya produktivitas padi	Optimalisasi Sistem Validasi Data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Berbasis Data Spasial Lahan Petani di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pemanfaatan teknologi geospasial serta APH, dan optimalisasi dukungan pengelolaan pertanian yang lebih mandiri dan efektif.	Pembaruan data petani berbasis spasial, penyusunan peta dan e-book profil lahan, serta perhitungan kebutuhan pupuk bersubsidi yang lebih akurat untuk mendukung validasi RDKK	DKPPP
		Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembentukan Kelompok Petani Green House di			

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung			
b.	Belum optimalnya produktivitas jagung	Optimalisasi Sistem Validasi Data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Berbasis Data Spasial Lahan Petani di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pemanfaatan teknologi geospasial serta APH, dan optimalisasi dukungan pengelolaan pertanian yang lebih mandiri dan efektif.	Pembaruan data petani berbasis spasial, penyusunan peta dan e-book profil lahan, serta perhitungan kebutuhan pupuk bersubsidi yang lebih akurat untuk mendukung validasi RDKK	DKPPP
		Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Pembentukan Kelompok Petani Green House di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung			
c.	Belum terpenuhinya kebutuhan sarana alat mesin pertanian pangan utama				
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
a.	Belum optimalnya pertumbuhan nilai ekspor daerah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemasaran	Mempermudah pengelolaan dan pemantauan pemasaran produk secara terintegrasi.	Efektivitas strategi pemasaran dan penjualan meningkat.	Masyarakat
		Penerapan Sistem Pendataan Dan Pemetaan Digital Industri Penghasil Limbah Cair Melalui Pemanfaatan Aplikasi MWATER dan QGIS di Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung	move urusan LH		
b.	Belum optimalnya kondisi fisik sarana perdagangan daerah	Digitalisasi Pengajuan Sewa Barang Milik Daerah (BMD)	Kemudahan koordinasi, efisiensi pengelolaan administrasi, serta	Sistem pengajuan sewa berbasis Google Form yang	Dinkopdag

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Berupa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Pengajuan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	peningkatan kecepatan, akurasi, dan kenyamanan layanan bagi rekan kerja, unit kerja, dan masyarakat.	didukung petunjuk teknis, pemahaman admin, pelaksanaan layanan digital, serta evaluasi database yang terpublikasi.	
		Sistem Perijinan Sewa Kios Los Pasar Secara Online (E-SEWA)	Memberikan kemudahan akses, ketepatan data, serta percepatan proses perizinan	Peningkatan efisiensi layanan, transparansi pengelolaan, dan optimalisasi pendapatan daerah	Dinkopdag
		Dolan Ning Pasar Lor	Peningkatan daya tarik dan kunjungan ke pasar tradisional melalui integrasi kegiatan di era digital	Tumbuhnya aktivitas ekonomi, peningkatan pendapatan pedagang, dan keberlanjutan pasar tradisional	Dinkopdag
c.	Belum optimalnya perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan				
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
a.	Belum optimalnya upaya hilirisasi komoditas unggulan daerah	“PRINGSURAT NGANGENI”	1. Meningkatkan Potensi Unggulan Kecamatan Pringsurat 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pringsurat Semakin Dikenal secara luas 2. Meningkatkan ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pringsurat
		Kalung Kopi Jahe	Mengolah bahan lokal menjadi produk kesehatan bernilai tambah.	Nilai ekonomi produk herbal lokal meningkat.	Masyarakat
		Mesin Roasting Kopi Berbasis Android	Memudahkan pengaturan proses roasting kopi secara presisi.	Kualitas dan konsistensi produk kopi lokal meningkat.	Masyarakat
IV.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
1.	Fungsi Sekretariat Daerah				
a.	Masih rendahnya tingkat pengembalian aset (ROA) pada BUMD				
b.	Masih rendahnya rasio total kredit bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB				
c.	Rendahnya total dana pihak ketiga pada bank milik daerah dibandingkan dengan PDRB				
d.	Belum optimalnya akses keuangan daerah				
e.	Masih kurangnya ketersediaan produk barang bersubsidi				
f.	Masih terdapat BUMD yang belum mendapatkan opini WTP; atas pemeriksaan KAP	Media Digital Internal "Pojok Informasi BUMD"	Menyediakan informasi tentang BUMD secara terstruktur dan terdokumentasi	Mendukung proses kerja yang lebih cepat dan kolaboratif	Sekretariat Daerah
g.	Belum optimalnya peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa meskipun telah mencapai target	Gerak Aktif Strategis Pemantauan Online (GAS-POL) Perangkat Daerah Untuk Akselerasi Realisasi PDN Pemerintah Kabupaten Temanggung	Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mempermudah pemantauan secara real-time, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa.	Meningkatnya persentase belanja PDN secara bertahap yang menunjukkan progres positif, sekaligus memperkuat kemandirian dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk optimalisasi.	Sekretariat Daerah
		Pendampingan Sertifikasi Pelatihan PBJ Sebagai Optimalisasi Kompetensi Pada Kuasa Pengguna	Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM pengadaan, memperkuat peran kelembagaan, serta mendukung terwujudnya tata	Terwujudnya sistem pengelolaan dan pendampingan kompetensi PBJ yang lebih terstruktur,	Sekretariat Daerah

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Anggaran (KPA) Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Pemerintah Kabupaten Temanggung	kelola pengadaan barang/jasa yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.	terukur, dan transparan, sehingga meningkatkan kapasitas KPA/PPK serta mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih profesional, akuntabel, dan sesuai regulasi.	
		Digitalisasi Dokumen Pelaksanaan Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan Melalui Migrasi dari Excel ke Dalam Google Form di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	Mempermudah proses pengumpulan dan pengiriman data secara digital yang lebih cepat, terstandar, dan minim kesalahan, sekaligus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta pemahaman pengguna dalam pengelolaan dan pelaporan PEKPPP.	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan pegawai dalam pengelolaan serta pelaporan data PEKPPP secara digital, didukung sistem yang lebih terstandar melalui Google Form dan Google Drive, sehingga proses menjadi lebih cepat, akurat, terkoordinasi, dan akuntabel.	Sekretariat Daerah
		Panduan Kerja Efektif (PAKET) untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Pencatatan Non Tender Seluruh Instansi oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Temanggung	Menyediakan pedoman yang jelas dan terstruktur sekaligus meningkatkan pemahaman serta pendampingan dalam pengelolaan pencatatan pengadaan non tender sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih tertib, konsisten, dan akuntabel.	Terciptanya sistem pencatatan pengadaan non tender yang lebih terstandar, mudah dipahami, dan konsisten melalui dukungan SOP, mekanisme kerja, media pembelajaran, serta pendampingan, sehingga meningkatkan efektivitas, ketepatan, dan akuntabilitas data sekaligus mendorong komitmen dan kinerja instansi secara berkelanjutan.	Sekretariat Daerah
		EKSIST (E-Katalog Assist) Upaya Peningkatan Jumlah Transaksi E-Katalog Versi 6.0	Meningkatkan profesionalisme dan integritas peserta ASN, mengoptimalkan pendampingan bagi	Meningkatnya pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam menggunakan	Sekretariat Daerah

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		pada Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung	PPK, bendahara, dan admin perangkat daerah, serta mendukung pelayanan pengadaan barang/jasa yang lebih efektif, terpantau, dan berbasis data akurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.	E-Katalog Versi 6.0, didukung dengan tersedianya SOP yang jelas serta laporan kegiatan, sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih terarah, efektif, dan akuntabel.	
h.	Belum maksimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dari nilai EPPD	Digitalisasi Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat	Peningkatan efektivitas dalam pendataan dan pelaporan SKM tentang pelayanan pajak	Memberikan pelayanan publik yang prima melalui evaluasi SKM	BPKPAD
i.	Belum optimalnya pengelolaan zakat yang tercermin dari Indeks Zakat Nasional				
j.	Rendahnya ketertiban pelaporan kegiatan oleh PD/Unit Kerja secara tepat waktu	Gerak Aktif Strategis Pemantauan Online (GAS-POL) Perangkat Daerah Untuk Akselerasi Realisasi PDN Pemerintah Kabupaten Temanggung	Peningkatan persentase belanja PDN, kemudahan monitoring secara real-time, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa.	Meskipun masih termasuk daerah dengan persentase PDN terendah di Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung menunjukkan progres peningkatan belanja PDN dari 82,7% menjadi 86,71% pada 2025 yang perlu terus dioptimalkan untuk mendukung kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah.	Sekretariat Daerah
		Digitalisasi Dokumen Pelaksanaan Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan Melalui Migrasi dari Excel ke Dalam Google Form	Kemudahan proses digitalisasi PEKPPP, peningkatan efisiensi dan akurasi pengelolaan data, serta penguatan kompetensi dan profesionalisme dalam mendukung transformasi digital.	Meningkatnya pemahaman pegawai, sistematisnya pengelolaan dan migrasi data berbasis digital, serta peningkatan efisiensi, akuntabilitas, koordinasi, dan ketepatan waktu dalam	Sekretariat Daerah

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung		pelaksanaan PEKPPP.	
		MOKU-MOKU (Monitoring Keuanganku)	Menyediakan monitoring serapan anggaran sehingga pengajuan GU (Ganti Uang) selanjutnya dapat terpetakan	Peningkatan ketepatan perencanaan, efisiensi penggunaan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Dinkominfo
		Pendigitalisasian Dokumen SPJ	Pengelolaan administrasi keuangan dapat diverifikasi atau validasi dimanapun dan kapanpun tanpa melihat dokumen fisik	Peningkatan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan	Dindukcapil
		SOLIDER (Spj, rekOnsiliasi, pemeLiharaan Dan pErawatan baRang) untuk Peningkatan Kapasitas SIMBADA dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	Mendorong peran serta masyarakat dalam memberikan kontrol pengelolaan sarana prasarana yang berkualitas.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang bersifat informatif, mudah, murah dan cepat.	Sekretariat DPRD
k.	Masih kurangnya dokumen kontrak yang diverifikasi	Optimalisasi Publikasi Informasi Prosedur Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Peningkatan efisiensi kerja, kemudahan akses informasi bagi perangkat daerah dan pihak ketiga, serta penambahan wawasan dan kompetensi bagi penulis.	Tersusunnya sistem publikasi digital kerja sama dengan pihak ketiga yang mencakup perencanaan, alur kerja jelas, sosialisasi, implementasi konten di Instagram, serta evaluasi berkelanjutan.	Sekretariat Daerah
2.	Fungsi Sekretariat DPRD				
a.	Perlunya optimalisasi Laporan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan oleh DPRD				

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
b.	Perlunya optimalisasi Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran				
V.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1.	Perencanaan				
a.	Belum optimalnya capaian Indeks Manajemen Risiko (MRI)				
b.	Belum optimalnya penerapan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.	KA' SAFIRA (Kawal Sampai Final Renstra dan Renja Perangkat Daerah)	Meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan akuntabilitas proses verifikasi dokumen perencanaan melalui sistem yang terintegrasi, mudah diakses, serta mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat.	Terciptanya proses pengelolaan dan verifikasi dokumen yang lebih cepat, terintegrasi, dan transparan melalui pemanfaatan Google Drive dan Google Sheets, sehingga memudahkan pengumpulan, distribusi, koreksi, hingga pengecekan dokumen secara online dan efisien.	Bapperida
		Pembuatan Website PUSDOK (Pusat Dokumen) SDGs Kabupaten Temanggung Menggunakan Google Sites	Meningkatkan efisiensi dan ketepatan proses verifikasi dokumen, mengoptimalkan kinerja tim verifikator, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan meminimalisir kesalahan administrasi.	Terciptanya sistem kearsipan berbasis Google Sites yang memudahkan penyimpanan serta mempercepat pencarian file dan dokumen secara lebih efektif dan terorganisir.	Bapperida
2.	Keuangan				
a.	Perlunya peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB	Penyusunan Petunjuk Teknis Reviu Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada Inspektorat Kabupaten Temanggung	Kejelasan alur kerja, kepastian hukum, peningkatan kualitas pengawasan, serta mendorong praktik pengelolaan aset yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.	Tersusunnya sistem pelaksanaan reviu Barang Milik Daerah yang mencakup regulasi, petunjuk teknis dan SOP, sosialisasi kepada auditor,	Inspektorat

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
				pengukuran pemahaman, serta laporan evaluasi kegiatan.	
		SIPBUKA (Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Karcis) Berbasis Google Sites	Memberikan kemudahan akses informasi dan pengelolaan data secara sederhana dan terintegrasi	Peningkatan transparansi, efisiensi administrasi, dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi	DKPPP
		Pengembangan Aplikasi Monitoring Pajak Kendaraan Dinas	Menyediakan sistem terpadu yang memberikan notifikasi otomatis mengenai jatuh tempo pembayaran pajak dan informasi pemegang serta menyediakan laporan status kendaraan secara real time	Peningkatan efisiensi pemantauan, meminimalisir resiko keterlambatan, serta memastikan pengelolaan kendaraan dinas lebih tertib dan akuntabel	BPKPAD
b.	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dari IPKD	Pengembangan Aplikasi SIAP PAKDE (Sistem Informasi Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah)	Kemudahan pelayanan pajak daerah dengan sedikit mungkin interaksi dengan fiskus. Terutama dalam hal mengakses layanan informasi pajak daerah meliputi pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWPD dan pengisian Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).	Terwujudnya tata kelola pajak daerah yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung reformasi birokrasi dan smart city dan tersedianya data dan informasi pajak daerah yang akurat dan up to date	BPKPAD
		Digitalisasi Pencatatan Persediaan Barang Habis Pakai dengan Google Spreadsheet di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Peningkatan kompetensi, efisiensi dan akurasi pengelolaan data, kemudahan kolaborasi, serta dukungan terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang lebih optimal.	Meningkatnya ketertiban, akurasi, dan transparansi data, pemahaman pegawai, serta efisiensi pengelolaan melalui sistem real-time yang mudah dipantau dan dievaluasi.	Dinas Kesehatan
		Optimalisasi Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Melalui Video Tutorial di Youtube Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan,	Sebagai sarana pembelajaran dalam penyusunan laporan inventarisasi BMD serta mendorong kelengkapan dan kesesuaian laporan agar lebih optimal.	Tersedianya video edukasi dan tutorial, pendampingan, verifikasi laporan, serta monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan	Dindikpora

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		dan Olah Raga Kabupaten Temanggung		kualitas penyusunan laporan inventarisasi BMD.	
		Pemanfaatan Media Digital dan Optimalisasi Sistem Pengajuan Surat Permohonan Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi pada Website dan Media Sosial Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung	Menyediakan sistem digital untuk bisa membuat surat permohonan rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi secara online menggunakan google form yang terintegrasi dengan google docs dan email.	Mendorong transparansi dan akuntabilitas layanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta meningkatkan efisiensi kerja instansi pemerintah.	DKPPP
		Pemanfaatan Aplikasi SIMGAJI Taspen Dalam Perumusan Anggaran Belanja Pegawai/Gaji APBD			
		Integrasi Laporan Persediaan Melalui SI GESIT pada BPKPAD Kabupaten Temanggung	Memudahkan penyusunan pelaporan barang milik daerah utamanya laporan persediaan secara periodik serta menyajikan data laporan sebagai back up dan rekonsiliasi data	Peningkatan penatausahaan barang milik daerah dengan baik sehingga laporan barang milik daerah dapat terselesaikan dengan benar dan tepat waktu.	BPKPAD
c.	Belum tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target pajak daerah	Penilaian Individual Objek Pajak Khusus Bumi dan Bangunan PT Mustaneer Adi Pratama untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	Meningkatkan kepercayaan wajib pajak pada sistem pajak serta memberikan sumber daya keuangan tambahan	Meningkatkan pendapatan daerah	BPKPAD
		SIPBUKA (Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Karcis) Berbasis Google Sites	Memberikan kemudahan akses informasi dan pengelolaan data secara sederhana dan terintegrasi	Peningkatan transparansi, efisiensi administrasi, dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi	DKPPP

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		JEMPOL JAMINAN (Jemput Bola Pajak Bumi dan Bangunan)	Mendekatkan pelayanan pembayaran dan pengurusan PBB kepada masyarakat.	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak, mempercepat proses pembayaran, serta meminimalisir tunggakan	Kelurahan Tlogorejo
3.	Kepegawaian				
a.	Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian	Optimalisasi Informasi Kenaikan Pangkat PNS dengan Buku Saku Digital Sebagai Inovasi Dalam Genggaman di Kabupaten Temanggung	Penguatan kompetensi digital, serta membantu unit kerja dalam memperluas akses informasi, mempercepat layanan kenaikan pangkat, dan meningkatkan literasi digital ASN	Tersusunnya kebutuhan informasi dan regulasi, terbentuknya konsep Buku Saku Digital, terwujudnya aplikasi yang mudah diakses ASN, meningkatnya pemahaman penggunaan, serta adanya umpan balik untuk penyempurnaan.	BKPSDM
		PEKA TEMAN (Penilaian Kinerja Sikap Perilaku 360° untuk Peningkatan Indeks Sistem Merit ASN di Lingkungan Pemerintah kabupaten Temanggung)	Penilaian kinerja ASN yang lebih objektif, pemetaan talenta yang akurat, peningkatan motivasi dan kinerja pegawai, serta penguatan sistem merit untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.	Terwujudnya penilaian kinerja ASN yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pemetaan talenta dan peningkatan kinerja pegawai berbasis sistem merit.	BKPSDM
		Optimalisasi Layanan Administrasi Jabatan Fungsional dengan Penambahan Fitur Kontrol Ketersediaan Formasi pada Aplikasi E-Jabfung dan Pengintegrasian Basis Data Pada Simpeg di BKPSDM Kabupaten Temanggung	Fitur kontrol ketersediaan formasi pada E-Jabfung mempercepat dan meningkatkan akurasi verifikasi layanan jabatan fungsional, mendukung kinerja organisasi BKPSDM, serta memudahkan pengelola kepegawaian di perangkat daerah dalam proses administrasi.	Tersedianya perencanaan dan pengembangan fitur, integrasi data kelas jabatan, fitur kontrol formasi, pelaksanaan sosialisasi, serta evaluasi pengembangan aplikasi SIMPEG dan E-Jabfung.	BKPSDM
		Sistem Inventarisasi Dokumen Kinerja	Mempercepat pengumpulan data, meningkatkan akurasi dan integritas,	Pengumpulan dokumen dilakukan secara	Dinperinaker

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Terintegrasi (SiDokin)	mengurangi risiko kesalahan atau kehilangan dokumen, mempermudah pelaporan dan monitoring, serta mendukung efisiensi kerja melalui digitalisasi dokumentasi.	terintegrasi melalui Google Drive dengan struktur sistematis, unggah via Google Form, rekap otomatis di Spreadsheet, serta monitoring yang cepat dan real-time.	
		e-Jabfung	Memberikan kemudahan dalam proses pengajuan karena dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung atau mengumpulkan berkas fisik.	Penghematan waktu dan biaya administrasi serta membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi beban administrasi manual.	BKPSDM
b.	Masih rendahnya tingkat keterisian jabatan pada perangkat daerah	e-MUTASI untuk Mengoptimalkan Layanan Administrasi Mutasi Masuk di BKPSDM Kabupaten Temanggung	Memudahkan pengelolaan dan verifikasi berkas secara terintegrasi, meningkatkan efisiensi dan profesionalisme organisasi, serta memberikan kemudahan, kepastian informasi, dan transparansi layanan bagi ASN.	Teridentifikasinya kebutuhan dan alur layanan, tersedianya sistem dan panduan e-Mutasi yang siap digunakan, meningkatnya pemahaman pengguna, serta adanya monitoring dan evaluasi pengembangan sistem.	BKPSDM
		e-Kenaikan Pangkat	Penghematan waktu dan biaya administrasi serta peningkatan efisiensi kerja perangkat daerah	Peningkatan kepuasan PNS sebagai pengguna layanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian	BKPSDM
c.	Belum optimalnya tingkat kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas	Sistem Absensi Perangkat Desa (SAPD)	1. Mengurangi waktu dan meningkatkan akurasi dalam pengelolaan kehadiran pegawai 2. Memungkinkan pemantauan kehadiran secara real-time 3. Meningkatkan transparansi	1. Meningkatkan Kedisiplinan Perangkat Desa 2. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan	DINPERMADES

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
			4. Terintegrasi dengan sistem digital lainnya, seperti manajemen surat-menyurat, layanan kependudukan, atau pelaporan keuangan		
		Aplikasi Data Kepegawaian SMA Negeri 1 Pringsurat	Mempermudah pengelolaan dan pemutakhiran data kepegawaian.	Administrasi sekolah menjadi lebih tertib dan akurat.	DINDIKPORA
		Optimalisasi Penyimpanan Dokumen Melalui Portal BERKERIS (Bank Data Kegiatan Rencana Kerja dan Rencana Strategis) di BANKESBANGPOL Kabupaten Temanggung	Membantu mempercepat, mengefisienkan, dan meminimalkan kesalahan dalam pengisian kegiatan dan capaian kinerja setiap bidang untuk mempermudah dan membantu penyusunan Renstra dan Renja yang berkelanjutan.	Mendukung Smart Governance, meningkatkan efektivitas dalam penyimpanan dokumen kegiatan dan capaian kinerja tiap bidang, efisiensi anggaran	Bankesbangpol
		Optimalisasi Pencatatan Agenda Kegiatan secara Digital melalui Aplikasi Monday pada Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan di Bappeda Kabupaten Temanggung	Memudahkan fasilitasi dan monitoring agenda secara visual, meningkatkan efisiensi dan pengelolaan kerja yang terintegrasi di unit kerja, serta mendukung kolaborasi, koordinasi, dan akses data yang lebih mudah antar bidang dan masyarakat.	Tersusunnya perencanaan dan pemetaan informasi, terlaksananya sosialisasi, tersedianya aplikasi pencatatan agenda digital, meningkatnya keterampilan pengguna, serta adanya laporan hasil kegiatan penggunaan aplikasi Monday.	Bapperida
		Optimalisasi Fasilitasi Pengelolaan Agenda Kegiatan Melalui Penggunaan Web Google Calendar di Subbagian Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Memudahkan rekan kerja dalam mengakses jadwal kapan saja dan di mana saja serta membantu instansi memastikan pelaksanaan kegiatan lebih terencana, terintegrasi, dan tidak terlewat.	Telah dilakukan identifikasi, penyediaan Google Calendar beserta panduan, peningkatan pemahaman dan kemampuan staf, serta evaluasi dalam pengelolaan agenda kegiatan di Subbagian Perencanaan.	Dinas Sosial
		Pemanfaatan Google	Meningkatkan kemudahan pengajuan	Pengelolaan data	Dinperinaker

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Spreadsheet Dan Google Form Untuk Optimalisasi Layanan Cuti Pegawai di Dinperinaker Kabupaten Temanggung	cuti, ketertiban dan akurasi pencatatan data, transparansi informasi, serta efisiensi monitoring dan administrasi kepegawaian.	terintegrasi secara otomatis sehingga memudahkan verifikasi, monitoring, dan pelaporan.	
		Integrasi Sistem Presensi Digital Berbasis GPS Pada Gerai Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung	Meningkatkan akurasi dan transparansi absensi, memudahkan monitoring kinerja, serta mendorong disiplin dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.	Terlaksananya koordinasi dan validasi gerai, tersedianya sistem presensi digital berbasis GPS yang terintegrasi, serta adanya rekapitulasi laporan presensi yang sesuai format.	DPMPTSP
		Pengumpulan Berkas Pembayaran Melalui Digitalisasi	Memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketertiban dalam pengumpulan dokumen	Peningkatan efisiensi proses administrasi, akurasi data, dan transparansi pengelolaan pembayaran	DPUPR
		Kalender Lacak Informasi KGB (KLIK)	Menyediakan sistem pendukung pelayanan kepegawaian yang lebih tertib, tepat waktu, dan berkelanjutan	Efisiensi proses administrasi, peningkatan kinerja aparatur, dan kualitas layanan yang lebih optimal	Dinkominfo
		SIMANTAB (Sistem Manajemen Tanda Barang)	Menghasilkan data realtime yang informatif, akuntabel, akurat, minim angka, mudah dibaca dan dipahami, serta memudahkan proses pengecekan aset.	Mempercepat inventarisasi, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.	Dinkominfo
4.	Pendidikan dan Pelatihan				
a.	Belum optimalnya tingkat profesionalitas ASN	Optimalisasi Pendaftaran dan Pengumpulan Berkas Program Belajar Mandiri Melalui Website “BERDIKARI” BKPSDM Kabupaten Temanggung	memberikan kemudahan akses bagi ASN dalam pengembangan kompetensi mandiri sekaligus menyediakan sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih terukur bagi Dinas guna mewujudkan transformasi	menciptakan birokrasi pembelajaran yang lebih responsif dan aman melalui digitalisasi proses pendaftaran, verifikasi <i>real-time</i> , dan sentralisasi data	BKPSDM

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
			literasi digital menuju profil Smart ASN	berbasis <i>cloud</i> yang meminimalkan risiko administratif.	
		Optimalisasi Pelayanan Informasi Kepegawaian Melalui FAQ (Frequently Asked Questions) di Website BKPSDM Kabupaten Temanggung	menciptakan standar pelayanan informasi yang lebih efisien dan responsif, sehingga pegawai mendapatkan akses data secara mandiri sementara petugas dapat beralih pada penanganan kasus strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kepuasan layanan BKPSDM.	mentransformasi pola komunikasi menjadi lebih proaktif dan mandiri, sehingga mampu meminimalkan hambatan informasi serta menjadi fondasi utama dalam perbaikan kualitas pelayanan digital kepegawaian yang berkelanjutan.	BKPSDM
		Optimalisasi Website Learning Management System (LMS) dalam Pengembangan Kompetensi di BKPSDM Kabupaten Temanggung	meningkatkan motivasi inovasi peserta dan efisiensi tata kelola pelatihan di BKPSDM melalui sistem LMS yang terintegrasi, sekaligus memperkuat instrumen <i>Smart Governance</i> dalam mewujudkan ASN yang profesional dan adaptif bagi Kabupaten Temanggung.	mewujudkan sistem pembelajaran digital yang lebih profesional, efisien, dan terintegrasi secara sistemik, sehingga mampu meningkatkan akurasi data kepegawaian serta memberikan pengalaman belajar yang lebih optimal bagi pengguna.	BKPSDM
		Optimalisasi Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Melalui Video Tutorial di Youtube Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Temanggung	sebagai instrumen pembelajaran strategis sekaligus standar acuan dalam penyusunan laporan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) guna memastikan akurasi data yang lebih optimal dan akuntabel.	berdampak pada standarisasi kompetensi penyusunan laporan inventarisasi BMD di lingkungan DINDIKPORA Kabupaten Temanggung, sehingga tercipta tata kelola aset yang lebih akurat, valid, dan berkelanjutan.	Dindikpora
		Penggunaan QR Code Untuk mengoptimalkan Informasi Jenis Pelayanan dan Format	mendukung penyusunan kebijakan mitigasi berbasis data spasial bagi pemerintah daerah, mempercepat	Percepatan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat sasaran dalam	Dinpermades

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Lampiran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	koordinasi penanganan dan identifikasi risiko di tingkat desa, serta meningkatkan kesadaran sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.	menentukan wilayah prioritas mitigasi bencana.	
		OME GOOD! One Minutes Educations, Good! (Produksi Konten Video Edukasi di Sosial Media Berdurasi 1 Menit)	Menyediakan informasi yang edukatif, mudah dipahami, dan komunikatif mengenai layanan Surat Keterangan Penelitian melalui media sosial, sehingga meningkatkan pemahaman, kemudahan akses, dan kepatuhan masyarakat dalam proses pengajuan penelitian	Mempermudah proses pengurusan layanan publik menjadi lebih mudah dan efisien.	DPMPSTP
		Digitalisasi Pencatatan Agenda Surat dan Arsip surat di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	Meningkatkan efisiensi dan keamanan administrasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung melalui sistem pencatatan digital yang mempercepat temu balik arsip sekaligus meminimalkan risiko kehilangan dokumen fisik.	Menciptakan sistem tata kelola persuratan yang lebih terstruktur dan aman melalui penyediaan basis data terpusat serta cadangan digital yang meminimalkan kerentanan data dan menjamin keberlanjutan operasional melalui panduan penggunaan yang terstandar.	Sekretariat DPRD
		Optimalisasi Layanan Permohonan Bantuan Hukum Secara Online di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, mempermudah pemohon dalam mengakses bantuan hukum secara lebih efektif melalui layanan online tanpa harus datang langsung, serta mendukung peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.	Terciptanya sistem layanan bantuan hukum yang lebih terstruktur, mudah diakses secara online, tersosialisasi dengan baik, serta didukung oleh prosedur, formulir, dan evaluasi yang jelas sehingga meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun perangkat daerah/ASN.	Sekretariat Daerah

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Sistem Informasi BAPPEDA Temanggung	Memudahkan dalam pengisian agenda rapat	Meningkatnya efisiensi dan kerapian administrasi agenda rapat, sehingga mendukung koordinasi yang lebih efektif serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terarah	BAPPERIDA
		RETALIA TE (Rekap Data Online dan Terintegrasi)	mempermudah akses data secara cepat kapan saja dan di mana saja, sekaligus menjamin ketersediaan data yang akurat, real-time, dan konsisten karena bersumber dari satu sistem terintegrasi.	terciptanya sistem rekap data terintegrasi berbasis Google Sheets yang mempercepat penyediaan data perizinan dan penanaman modal serta meminimalisir perbedaan atau diskrepansi data yang dikeluarkan oleh DPMPSTP.	DPMPSTP
		Pembuatan Website PUSDOK (Pusat Dokumen) SDGs Kabupaten Temanggung Menggunakan Google Sites	meningkatkan efisiensi dan ketepatan proses verifikasi dokumen, mengoptimalkan kinerja tim verifikator, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan meminimalisir kesalahan administrasi.	terciptanya sistem kearsipan berbasis Google Sites yang memudahkan penyimpanan serta mempercepat pencarian file dan dokumen secara lebih efektif dan terorganisir.	Bapperida
		Digitalisasi Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat	Peningkatan efektivitas dalam pendataan dan pelaporan SKM tentang pelayanan pajak	Memberikan pelayanan publik yang prima melalui evaluasi SKM	BPKPAD
		Pengumpulan Berkas Pembayaran Melalui Digitalisasi	Memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketertiban dalam pengumpulan dokumen	Peningkatan efisiensi proses administrasi, akurasi data, dan transparansi pengelolaan pembayaran	DPUPR
		Arsip Surat Digital	Memberikan kemudahan, kecepatan, dan keterpaduan dalam pengelolaan surat secara elektronik	Peningkatan efisiensi kerja, transparansi, dan kualitas tata kelola pemerintahan yang selaras dengan penerapan SPBE	Dinkominfo

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Buku Tamu Digital	Menyediakan data real-time yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pelayanan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja layanan	Dinperinaker
		RABA HUKUM JDIH (Ragam Akses Braille Hukum JDIH)	Menyediakan akses informasi yang setara bagi penyandang disabilitas khususnya bagi tuna netra di Kabupaten Temanggung	Meningkatkan keterbukaan pemerintah, meningkatkan kesadaran sosial, wujud implementasi produk hukum daerah, dan peningkatan aksesibilitas secara umum	Sekretariat Daerah
5.	Penelitian dan Pengembangan				
a.	Perlunya optimalisasi dalam peningkatan kapabilitas inovasi	SIDA KITA (Sistem Informasi dan Data Base Inovasi Daerah) Kabupaten Temanggung	Meningkatkan pelayanan digital dalam pengelolaan data dan informasi inovasi daerah secara terpadu dan terintegrasi	Meningkatnya efisiensi dan keterpaduan pengelolaan data inovasi daerah sehingga mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data	Bapperida
b.	Perlunya peningkatan kesesuaian riset dengan isu strategis	Pengembangan Media Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi Daerah Berbasis Digital Melalui Bhumi Phala E Magz: Jendela Riset dan Inovasi Temanggung	Mempermudah akses terhadap hasil riset dan inovasi daerah untuk perencanaan dan pengambilan keputusan	Mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan lokal.	Bapperida
VI.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
1.	Inspektorat Daerah				
a.	Belum optimalnya kapabilitas APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan	Tanya Auditor Online	Fasilitasi Pelayanan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa secara online	Pemerintah Desa Dapat Melaksanakan Konsultasi Kepada Inspektorat Setiap Saat tanpa harus datang ke Kantor.	INSPEKTORAT

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Optimalisasi Ketepatan Waktu Penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA) dengan Menggunakan Spreadsheet di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Database KKA memungkinkan auditor menyusun secara lebih cepat dan akurat serta membantu instansi memantau proses penyusunan secara real-time.	Tersusunnya bahan dan database digital KKA beserta rumusnya, meningkatnya pemahaman auditor, serta tersedianya laporan evaluasi pengembangan sistem penyusunan KKA.	INSPEKTORAT
		Penguatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Daerah Melalui SIMWASTITI di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Mempermudah dan mempercepat proses pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan daerah di Kabupaten Temanggung	Peningkatan efisiensi dalam proses pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan	INSPEKTORAT
		Penyusunan Petunjuk Teknis Reviu Barang Milik Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Menyediakan pedoman baku yang memperjelas alur kerja, memberikan kepastian hukum, meningkatkan keandalan hasil pengawasan, serta mendorong praktik pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.	Tersedianya regulasi dan dokumen, rancangan juknis dan SOP, pelaksanaan sosialisasi beserta pengukuran pemahaman, serta adanya laporan umpan balik kegiatan Reviu Barang Milik Daerah.	INSPEKTORAT
		Elektronik Aduan Masyarakat (E-DUMAS)	Memudahkan pelaporan dan percepatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan responsivitas aparat, keamanan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat	SATPOL PP DAMKAR
		Pengembangan Aplikasi SIMWASDA (Sistem Pengawasan Daerah)	Menyediakan data visual yang mudah diinterpretasikan untuk pemberitaan yang akurat serta memberikan akses informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai progres tindak lanjut hasil pengawasan	Mendorong partisipasi publik dalam mengawasi kinerja pemerintah	Inspektorat
		Aplikasi EVAKIP (Evaluasi AKIP)	Peningkatan kualitas SAKIP Kabupaten serta efisiensi proses evaluasi dan pengendalian mutu	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Inspektorat

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
b.	Belum optimalnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Optimalisasi Layanan Informasi dan Penguatan Program Desa Anti Korupsi dengan Media Digital di Kabupaten Temanggung	Penyediaan media digital terintegrasi memudahkan akses informasi, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Desa Antikorupsi	Tersedianya analisis program, media digital link-tree beserta konten, pelaksanaan sosialisasi, serta evaluasi untuk optimalisasi layanan informasi dan penguatan program desa antikorupsi	Inspektorat
c.	Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas	Optimalisasi Pemanfaatan Media Digital Dalam Mendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Kabupaten Temanggung	Penyediaan layanan informasi melalui media Linktree meningkatkan pemahaman perangkat daerah sekaligus memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi Inspektorat dalam pelaksanaan program pembangunan zona integritas.	Tersedianya analisis program, media digital linktree beserta konten, pelaksanaan sosialisasi, serta evaluasi untuk optimalisasi layanan informasi program pembangunan zona integritas.	Inspektorat
VII.	UNSUR KEWILAYAHAN				
1.	Kecamatan				
a.	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	SISTEM GERBONG (GERakan kerja Bareng Ora kokean omONG)	Sistem GERBONG menumbuhkan kebersamaan, gotong royong, dan rasa kekeluargaan, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan, efisien, dan produktif serta memperkuat persatuan.	Meningkatnya efektivitas koordinasi, kolaborasi, dan gotong royong antar kecamatan, desa, dan kelurahan sehingga kinerja pelayanan publik menjadi lebih cepat, terarah, dan optimal.	Kecamatan Temanggung
		SIP DEKOR (Sistem Pengelolaan Dokumen Efektif dan Terorganisir) Berbasis Cloude Storage pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan	meningkatkan motivasi peserta untuk berinovasi, membantu pegawai dalam pengelolaan dokumen dan data secara lebih efektif melalui SIP DEKOR dan portal BERKERIS, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, profesional, dan	terwujudnya sistem penyimpanan dokumen digital yang terencana, terstruktur, dan valid, didukung media yang memadai serta implementasi, monitoring,	Kecamatan Kaloran

No.	Permasalahan	Nama Inovasi	Manfaat	Dampak	Stakeholder Terkait
		Kaloran Kabupaten Temanggung	adaptif.	dan evaluasi berkala sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan data.	
		Optimalisasi Pengelolaan Arsip Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang Efektif dan Efisien Melalui Google Sites di Kecamatan Kledung	meningkatkan kecepatan dan kerapihan pengelolaan dokumen SPJ, memudahkan akses dan pelacakan secara digital, menjamin keamanan serta keabsahan data, dan mendukung penyusunan laporan pertanggungjawaban secara lebih efektif dan akurat.	terwujudnya sistem pengelolaan arsip SPJ berbasis cloud yang terstruktur dan mudah diakses, meningkatkan pemahaman pegawai, serta mendorong efisiensi, keteraturan, dan efektivitas dalam penyimpanan dan pengelolaan dokumen.	Kecamatan Kledung
		Digitalisasi Pencatatan Laporan Kejadian Berbasis Website Melalui Google Sites di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung	Menyediakan data yang lebih valid untuk koordinasi lintas perangkat daerah serta memperkuat integrasi sistem informasi di tingkat kecamatan dan kabupaten	Meningkatkan citra instansi sebagai unit kerja yang responsif dan profesional.	Kecamatan Ngadirejo
b.	Masih terdapat sarana dan prasarana lokal kelurahan di kecamatan dalam kondisi kurang baik;				
c.	Belum optimalnya realisasi penerimaan PBB di kecamatan				
VIII.	Unsur Pemerintahan Umum				
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik				
a.	Perlunya optimalisasi kualitas indeks harmoni				

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Temanggung, 2026

2.6.1 Program Unggulan Daerah

Selaras dengan arah pembangunan nasional, Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” yang menekankan penguatan struktur ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, perluasan investasi, serta pengembangan industri bernilai tambah. Tema tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 yaitu “Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan”. Sinergi kedua arah kebijakan ini menegaskan pentingnya integrasi penguatan sektor pertanian sebagai basis produksi dengan pengembangan sektor pariwisata sebagai pengungkit nilai tambah, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagai implementasi konkret dari sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung menghadirkan Program Unggulan Program Unggulan KOPI ARUNA (Komoditas Olahan Pascapanen berbasis Inovasi untuk Agribisnis Unggulan) yang difokuskan pada penguatan nilai tambah komoditas kopi melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pengolahan pascapanen. Program ini mendorong transformasi dari aktivitas hulu menuju hilir dengan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan standarisasi produk kopi, sekaligus membuka peluang pengembangan industri olahan dan agrowisata berbasis kopi. Melalui pendekatan terintegrasi dari tingkat desa, program ini tidak hanya memperkuat daya saing produk lokal, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadikan kopi sebagai ikon unggulan daerah yang mendukung sektor pertanian dan pariwisata di Kabupaten Temanggung.

Melalui program ini, produk unggulan yang dikembangkan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan di tingkat desa, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. pengembangan tersebut mencakup penguatan budidaya kopi, pengolahan pascapanen, hingga hilirisasi melalui pemanfaatan teknologi pascapanen untuk menghasilkan kopi berkualitas tinggi. Setiap desa difokuskan pada pengembangan produk prioritas kopi secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah kecamatan berperan sebagai fasilitator dalam pembinaan serta pengelompokan jenis-jenis produk hilir kopi di tingkat wilayah sebagai dasar tindak lanjut di tingkat kabupaten. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dukungan melalui fasilitasi pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing. Melalui proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, akan diidentifikasi produk-produk kopi unggulan desa dan kecamatan yang layak dikembangkan sebagai produk unggulan daerah. Produk-produk tersebut selanjutnya diproyeksikan menjadi bagian dari branding kopi Temanggung yang memiliki kualitas tinggi dan daya saing kuat di pasar regional maupun nasional.

2.6.1.1 Latar belakang

Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2027 mengusung tema **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”** yang menekankan pada penguatan struktur ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, perluasan investasi, serta pengembangan industri bernilai tambah. Arah kebijakan tersebut selaras dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 yaitu **“Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan”**. Sinergi antara kebijakan nasional dan daerah ini menegaskan pentingnya optimalisasi potensi lokal berbasis pertanian yang terintegrasi dengan pengembangan industri dan pariwisata, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi kopi yang sangat kuat, baik dari sisi kualitas, keunikan cita rasa, maupun nilai historis dan budaya pengolahannya. Namun demikian, walaupun aktivitas ekonomi kopi sudah mulai pada sektor hilir dalam skala kecil, nilai tambah yang dihasilkan belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan transformasi menuju penguatan sektor hilir yang lebih produktif dan berorientasi industri, sekaligus terintegrasi dengan pengembangan pariwisata berbasis kopi.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengembangkan Program Unggulan **KOPI ARUNA** (**K**omoditas **O**lahan **P**ascapanen berbasis **I**novasi untuk **A**gribisnis

Unggulan)

Program Unggulan **KOPI ARUNA** sebagai strategi dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pengolahan kopi, mendorong masuknya investasi pada sektor industri pengolahan, serta membangun ekosistem hilirisasi kopi berbasis desa yang terintegrasi dengan pengembangan agrowisata kopi.

Penerapan teknologi pascapanen diharapkan mampu meningkatkan konsistensi kualitas, serta standarisasi produk kopi, sehingga memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing. Melalui pendekatan pengembangan dari hulu hingga hilir, setiap desa didorong untuk memperkuat proses budidaya, pengolahan pasca panen, produksi biji sangrai, hingga pengembangan produk turunan bernilai jual tinggi. Selain itu, pengembangan ini juga diarahkan untuk mendukung potensi wisata berbasis kopi sebagai bagian dari penguatan sektor pariwisata daerah.

Dalam implementasinya, pemerintah kecamatan berperan sebagai fasilitator dalam pembinaan serta pengelompokan produk kopi di tingkat wilayah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dukungan melalui pendampingan teknis, fasilitasi investasi, penyelarasan kebijakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan perangkat daerah terkait. Melalui rangkaian monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, produk-produk kopi unggulan desa yang memenuhi standar kualitas akan dikembangkan sebagai produk unggulan daerah dan diproyeksikan menjadi bagian dari branding ekonomi Temanggung.

Dengan demikian, Program Unggulan **KOPI ARUNA** tidak hanya menjadi strategi penguatan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga merupakan langkah transformasi struktural dalam mendorong peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan industri berbasis pertanian serta pariwisata. Program ini sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Temanggung sebagai sentra kopi berdaya saing tinggi di tingkat regional, nasional, hingga global.

2.6.1.2 Keterkaitan Program Unggulan dengan Tema Pembangunan

Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2027 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”** memberikan arah strategis bagi daerah untuk memperkuat struktur ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, perluasan investasi, serta pengembangan industri berbasis nilai tambah. Selaras dengan hal tersebut, Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 yaitu **“Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan”** menegaskan pentingnya optimalisasi potensi lokal melalui integrasi sektor pertanian, industri, dan pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Program Unggulan **KOPI ARUNA** memiliki keterkaitan kuat dan langsung dengan kedua tema tersebut. Pertama, program ini mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas kopi, melalui penguatan budidaya, pengolahan pascapanen, hingga hilirisasi berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi pascapanen mampu meningkatkan konsistensi kualitas, serta standarisasi produk, sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan memperkuat daya saing kopi Temanggung di pasar yang lebih luas.

Kedua, program ini membuka peluang investasi pada sektor industri pengolahan kopi di tingkat lokal. Pengembangan unit-unit usaha berbasis desa, koperasi, maupun UMKM menciptakan ekosistem industri kopi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Hal ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi daerah, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan berorientasi pasar.

Ketiga, program ini mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui konsep agrowisata kopi. Proses pengolahan kopi berbasis teknologi, keunikan cita rasa, serta nilai budaya yang melekat pada kopi Temanggung menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kunjungan serta memperluas sumber pendapatan masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara sektor pertanian, industri, dan pariwisata dapat terwujud secara nyata.

Keempat, program ini berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rantai nilai kopi yang dikembangkan melibatkan petani, pelaku UMKM, koperasi, serta masyarakat desa secara luas, sehingga memberikan peluang ekonomi yang merata. Pendekatan hulu-hilir yang terintegrasi memungkinkan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan ekonomi desa yang berdaya saing.

Dengan demikian, Program Unggulan **KOPI ARUNA** merupakan program strategis yang secara langsung mendukung pencapaian tema pembangunan nasional dan daerah. Program ini tidak hanya memperkuat posisi Kabupaten Temanggung sebagai sentra kopi unggulan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan produktivitas, pengembangan industri berbasis pertanian, perluasan investasi, serta penguatan sektor pariwisata dalam rangka mewujudkan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Program Unggulan **KOPI ARUNA** dirancang secara berkesinambungan dan memiliki keterkaitan langsung dengan dokumen perencanaan Kabupaten Temanggung. Program ini mendukung arah kebijakan pembangunan jangka panjang maupun tahunan sebagai berikut:

1. RTRW Kabupaten Temanggung 2024–2044
Mendukung kebijakan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, khususnya penguatan komoditas kopi sebagai bagian dari sistem produksi dan hilirisasi pertanian yang bernilai tambah serta berorientasi keberlanjutan.
2. RPJPD Kabupaten Temanggung 2025–2045
Sejalan dengan arah kebijakan *“Penguatan produktivitas dan skala ekonomi sektor unggulan”*. Pada fase 2025–2029, program hilirisasi kopi menjadi bagian dari strategi memperkuat produksi, kualitas, dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
3. RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
Mendukung strategi *“Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian ”* melalui peningkatan nilai tambah kopi, penguatan kapasitas pelaku usaha, dan pemanfaatan teknologi dalam proses hilirisasi.

4. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024
Berperan dalam mendukung *“Pemulihan ekonomi”* melalui penguatan usaha berbasis komoditas lokal yang memiliki nilai tambah tinggi, termasuk diversifikasi produk kopi.
5. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
Berjalan searah dengan prioritas *“Percepatan pertumbuhan ekonomi”* melalui peningkatan kualitas produk kopi, perkembangan industri hilir, dan penguatan pasar sehingga mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

2.6.1.3 Relevansi dengan Konsep Perencanaan berbasis THIS

Program Unggulan **KOPI ARUNA** memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan perencanaan **THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)**, sebagaimana menjadi prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Relevansi program dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Tematik**

Program ini berfokus pada tema strategis pembangunan daerah, yaitu peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan penguatan ekonomi masyarakat desa. Hilirisasi kopi menjadi tema prioritas karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani, UMKM, serta daya saing daerah.

b. **Holistik**

Pelaksanaan program mencakup keseluruhan aspek rantai nilai kopi, mulai dari penguatan kapasitas petani, peningkatan kualitas pascapanen, pemanfaatan teknologi roasting digital, pengembangan branding, hingga pemasaran produk. Pendekatan ini memastikan pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

c. **Integratif**

Program menghubungkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, seperti pertanian, UMKM, perdagangan, riset dan inovasi, pariwisata, serta lembaga keuangan. Integrasi antar perangkat daerah, pemerintah kecamatan–desa, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas kopi menciptakan sinergi yang memperkuat efektivitas program.

d. **Spasial**

Pengembangan hilirisasi kopi dilakukan dengan mempertimbangkan

karakteristik wilayah dan potensi desa penghasil kopi di Kabupaten Temanggung. Pendekatan spasial memastikan bahwa intervensi diarahkan pada lokasi strategis baik desa penghasil kopi, kawasan UMKM, maupun pusat pertumbuhan ekonomi sehingga dampaknya lebih optimal dan merata.

Pada akhirnya, penerapan konsep **THIS** menjadikan Program Unggulan **KOPI ARUNA** selaras dengan prinsip perencanaan modern yang berorientasi pada efektivitas, pemerataan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

2.6.1.4 Tujuan dan sasaran

a. Tujuan Program

Program Unggulan **KOPI ARUNA** bertujuan untuk:

- 1) **Meningkatkan nilai tambah komoditas kopi** melalui penguatan proses hilirisasi berbasis teknologi modern agar menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berdaya saing.
- 2) **Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa** melalui penguatan usaha tani kopi, UMKM pengolahan kopi, dan ekosistem industri kopi lokal.
- 3) **Mewujudkan pengembangan komoditas unggulan daerah** yang berkelanjutan, inklusif, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
- 4) **Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah dan kearifan lokal** sebagai basis pengembangan industri kopi Temanggung.
- 5) **Memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk kopi Temanggung** melalui standar kualitas, digitalisasi proses, dan branding daerah.
- 6) **Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kopi** yang melibatkan petani, pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah daerah secara kolaboratif.

b. Sasaran Program

Sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program ini adalah:

- 1) **Meningkatnya kualitas dan konsistensi produk kopi** hasil hilirisasi melalui penerapan teknologi pascapanen.
- 2) **Meningkatnya pendapatan petani dan pelaku UMKM kopi**, terutama di desa-desa sentra kopi Kabupaten Temanggung.

- 3) **Terlaksananya pembinaan terpadu hulu–hilir** bagi petani, pelaku pascapanen, dan pelaku pengolahan kopi.
- 4) **Terbentuknya klaster hilirisasi kopi desa/kecamatan** sebagai basis pengembangan produk unggulan daerah.
- 5) **Terfasilitasinya pemasaran produk kopi Temanggung** melalui penguatan branding, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
- 6) **Terciptanya produk kopi unggulan daerah** yang memenuhi standar mutu dan memiliki karakter khas Temanggung.
- 7) **Meningkatnya kontribusi sektor kopi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**, khususnya dalam peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja.

2.6.1.5 Ruang lingkup program unggulan

Ruang lingkup program mencakup pembinaan petani dan pelaku usaha kopi, pendampingan proses hilirisasi berbasis teknologi pascapanen, serta fasilitasi pemasaran dan kemitraan yang mudah dijalankan oleh pemerintah daerah.

2.6.1.6 Muatan program unggulan dalam dokumen perencanaan.

Program unggulan tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RKPDes, RKPD Kabupaten Temanggung maupun Renja Perangkat Daerah terkait.

2.6.1.7 Kerangka Program Unggulan

a. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya perencanaan dan focus pengembangan kopi di tingkat desa;
- 2) Belum semua desa penghasil kopi memiliki prioritas Pembangunan sektor kopi secara jelas;
- 3) Kapasitas SDM petani, pelaku UMKM kopi, dan komunitas desa masih terbatas pada aspek budidaya;
- 4) Pengelolaan produk kopi unggulan (green bean, roasted bean, ground coffee) belum optimal dan belum berbasis standar mutu;
- 5) Kolaborasi antar stakeholder belum maksimal

b. Input

- 1) Potensi Desa:
 - Kearifan Lokal: Tradisi budidaya kopi Temanggung, budaya seduhan lokal, serta jejaring komunitas kopi.

- Sumber Daya Alam: Ketinggian, iklim, dan varietas kopi robusta-arabika unggulan.
- Keterampilan Masyarakat: Keahlian budidaya, pascapanen, dan olahan kopi yang dapat ditingkatkan ke arah digital roasting.

2) Produk Unggulan:

- Produk Berbasis Lokal: Green bean, roasted bean, bubuk kopi, kopi olahan, dan produk turunan.
- Kualitas dan Keunikan: Karakter rasa kopi Temanggung yang khas secara geografis dan kultur agraris.
- Potensi Pasar: Tinggi untuk pasar domestik, retail modern, cafe, marketplace, dan peluang ekspor.

3) Dukungan:

- ✓ **Pemerintah:** Dukungan kebijakan, pendampingan, pelatihan, akses permodalan, serta promosi produk.
- ✓ **Masyarakat:** Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses produksi, pemasaran, dan pengembangan produk.
- ✓ **Infrastruktur:** Ketersediaan infrastruktur yang mendukung produksi dan pemasaran produk, seperti jalan, listrik, dan akses informasi.

c. Sumber Anggaran

APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Perbankan, Investor, TJSLP, Mitra Kerja dll.

d. Kelembagaan

Terdapat Tim Pelaksana pada tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten untuk memastikan implementasi hilirisasi kopi berjalan terstruktur dan terukur.

e. Inisiator dan Penanggung Jawab Pelaksana

Inisiator program unggulan adalah perangkat daerah yaitu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan, sedangkan penanggung jawab pelaksana program unggulan adalah Bupati Temanggung.

f. Institusi/ *stakeholders* lain yang terlibat

Pemerintah, Masyarakat/komunitas, Pelaku usaha, Akademisi, Media.

g. Pemanfaatan teknologi

Teknologi yang dimanfaatkan antara lain *smart farming*,

alat produksi/hilirisasi, *market place*, jaringan internet desa dan pemanfaatan media elektronik.

h. Sarana dan prasarana yang diperlukan

Rumah produksi, Rumah Singgah Produksi Unggulan, dan alat pengolahan, Sarana publikasi dan alat transportasi.

i. Proses

- 1) Sosialisasi Program Unggulan **KOPI ARUNA**.
- 2) Penetapan program hilirisasi desa sesuai potensi kopi masing-masing wilayah.
- 3) Peningkatan kapasitas SDM desa (petani–UMKM–komunitas) pada budidaya dan pascapanen,
- 4) Penetapan produk kopi unggulan desa serta pembentukan klaster hilirisasi kopi.
- 5) Penentuan tim fasilitator hilirisasi kopi di setiap kecamatan.
- 6) Branding kopi unggulan desa dan pemetaan produk yang layak dijadikan branding daerah.
- 7) Pemberian penghargaan kepada desa/kelompok yang berprestasi dalam hilirisasi kopi.

j. Output

1. Produk kopi unggulan desa dengan kualitas dan standar mutu yang lebih baik (green bean premium, roasted bean digital, bubuk kopi).
2. Peningkatan pendapatan UMKM kopi melalui diversifikasi produk dan akses pasar yang lebih luas.
3. Penguatan ekonomi lokal berbasis komoditas kopi dan penyerapan tenaga kerja desa.
4. Ekspansi pasar kopi Temanggung ke retail modern, café, marketplace, dan potensi ekspor.
5. Pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam rantai nilai kopi.
6. Pelestarian identitas lokal melalui pengembangan kopi khas Temanggung.
7. Peningkatan kualitas produk dan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan.

2.6.1.8 Outcome dan Dampak

Outcome:

- Peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi.
- Perluasan pasar dan peningkatan kualitas produk kopi Temanggung.
- Penguatan hilirisasi dan rantai nilai kopi berbasis teknologi.
- Meningkatnya daya saing kopi Temanggung dan pengembangan potensi lokal.

Dampak:

- Peningkatan ekonomi masyarakat penghasil kopi.
- Pertumbuhan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan.
- Berkembangnya industri kreatif kopi (roastery, café, produk turunan).
- Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam ekonomi berbasis komoditas.
- Penguatan citra kopi Temanggung sebagai ikon daerah berdaya saing tinggi.
- Meningkatnya kontribusi sektor kopi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung.

2.6.1.9 Keberlanjutan

Dilaksanakan event promosi kopi unggulan desa di setiap kecamatan satu kali setiap tahun anggaran, misalnya festival kopi, pasar kopi, dan temu pelaku kopi sebagai ruang pemasaran, edukasi, dan kolaborasi.

2.7 PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN TEMANGGUNG

Kabupaten Temanggung mempunyai prestasi dan menerima banyak penghargaan baik skala provinsi, nasional maupun internasional dari berbagai bidang lomba/kompetisi. Pencapaian tersebut merupakan apresiasi sekaligus memberikan semangat untuk berkarya dan berprestasi yang lebih baik di masa mendatang. Berikut penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2021-2025.

Tabel 2. 397
Jumlah Penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 – 2025

No	Tahun	Jumlah Penghargaan		
		Regional	Nasional	Internasional
1.	2021	15	20	2
2.	2022	34	19	3
3.	2023	38	35	5

No	Tahun	Jumlah Penghargaan		
		Regional	Nasional	Internasional
4.	2024	8	13	2
5.	2025	41	102	-

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (data diolah)

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 398
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara I Lomba Penerapan Hygiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan oleh CV, Sumber Gizi Desa Kedu Kec, Kedu tingkat Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Juara II Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah tingkat Provinsi Jawa Tengah	Sekda Provinsi Jawa Tengah	Regional	Diperinaker
3	Kategori Kabupaten Inovatif	Kemendagri	Nasional	Bappeda
4	Kota Layak Anak Kategori Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	BKPBPPPA
5	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	BKPBPPPA
6	OPINI WTP yang ke 9	BPK RI	Nasional	BPKPAD
7	Shibiru Pewarna Alam dari tanaman Stobilantes Cusia,	Juara 2 (dua) tingkat Provinsi Jateng	Regional	Bappeda
8	Lift Cor Beton Ekonomis (LCBE)	10 besar tingkat Provinsi Jawa Tengah	Regional	Bappeda
9	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (SBM)	Terbaik Pertama di Tingkat Nasional	Nasional	DKK
10	Sekolah Adiwiyata Nasional kepada SMP N 1 Kandungan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	Dindikpora
11	Medali Perak bidang Lomba Matematika pada kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SMP tingkat Nasional	Menteri Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Nasional	Dindikpora
12	juara 1 (emas) kejuaran Nasional Championship Karate	Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI)	Nasional	Dindikpora
13	juara 1 (emas) Open virtual Wushu Tournament 2021 Putra	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
14	juara 1 (emas) Open virtual Wushu Tournament 2021 Putri	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
15	Juara 1 (emas) Taekwondo Championship Menpora Cup	Pengurus Besar Taekwondo Indonesia	Nasional	Dindikpora
16	Juara 2 (perak) Open Virtual Wushu Tournament 2021	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora
17	Juara 2 (perak) tenis lapangan Walikota Tegal Cup XIII tahun 2021	Pengkab PELTI (Persatuan Lawn Tennis Indonesia) Kabupaten Tegal	Nasional	Dindikpora
18	Juara 3 (perunggu) Open Virtual Wushu Tournament 2021	Pengurus Besar Wushu Indonesia	Nasional	Dindikpora

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 (data diolah)

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 399
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	eRTe FM Raih Penghargaan Terbaik Radio Ramah Anak dalam Indonesia Persada,ID Award III Tahun 2022	Wakil Ketua Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Indonesia Persada	Nasional	KOMINFO
2	Temanggung Menerima Penghargaan Indikasi Geografis Terbanyak se Indoensia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Nasional	BAPPEDA
3	Temanggung Raih penghargaan atlet taekwondo SEA Games	PANITIA SEA GAMES	Nasional	DINDIKPORA
4	KPU Temanggung Dapat Penghargaan Menuju Informatif	Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng	Nasional	KPU
5	Artikel ini telah tayang di TribunJogja,com dengan judul PROFIL Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq, Penerima Penghargaan Tribun Inspiring Award	Tribun Inspiring Award	Nasional	KOMINFO
6	Ketiga Kalinya Temanggung Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA)	Nasional	DPPPAPPKB
7	DINDA PUTRI LESTARI, ATLET TAEKWONDO TEMANGGUNG RAIH MEDALI EMAS PON XX PAPUA	Penyelenggara PON XX PAPUA	Nasional	DINDIKPORA
8	Wahyu Jati Atlet Paralympic Asal Temanggung Kejuaraan	Ketua Nasional Paralympic Committe	Nasional	DINDIKPORA

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Dunia Cabang Atletik	Indonesia		
9	Lomba Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Taruna se-Jawa Tengah	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Taruna se-Jawa Tengah Bupati Batang Cup 2022	Regional	DINDIKPORA
10	Kontingen Kabupaten Temanggung Raih 3 Medali Dalam Pospeda Tingkat Provinsi Jawa Tengah	POSPEDA PROVINSI JAWA TENGAH	Regional	DINDIKPORA
11	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan (KRAP) Wali Kota Magelang Cup 2022	Wali Kota Magelang Cup 2022	Regional	DINDIKPORA
12	Empat Santri Ponpes Al Mu'min Raih Prestasi Tingkat Nasional	Penyelenggara Olimpiade Ahmad Dahlan (OlympicAD) dan Pekan Taaruf Seni Budaya dan Olahraga (Pentasbora) ke V	Nasional	DINDIKPORA
13	Temanggung raih Olimpiade Sains Nasional 2022	Penyelenggara Olimpiade Sains	Nasional	DINDIKPORA
14	Kompetisi Bahasa Arab Nasional, Chilya `Ainul Jamilah berhasil menjadi Juara Harapan II sebagai wakil Jawa Tengah ke tingkat Nasional	Penyelenggara Olimpiade Bahasa Arab Tingkat Nasional	Regional	DINDIKPORA
15	Bela Rahma Sayida, warga Kabupaten Temanggung berhasil meraih prestasi di tingkat nasional, Ia menjadi juara kedua di ajang Duta Maritim Indonesia 2022	Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo)	Nasional	DINDIKPORA
16	Kontingen dari Kabupaten Temanggung berhasil meraih Juara Umum Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI) SMP X Tingkat Jawa	Penyelenggara MAPSI Jateng	Regional	DINDIKPORA
17	Alhamdulillah kontingen Kabupaten Temanggung dapat meraih peringkat VII se- Provinsi Jawa Tengah	Penyelenggara Gelaran MTQ XXIX	Regional	DINDIKPORA
18	MTs Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung kembali meraih juara, Kali ini kejuaraan datang dari cabang olahraga (cabor) Panahan Perorangan Putra	Penyelenggara OlympiadicAD dan Pentasbora	Regional	DINDIKPORA
19	MTs Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak meraih penghargaan cabang olahraga (cabor) Judo	Penyelenggara OlympiadicAD dan Pentasbora	Regional	DINDIKPORA
20	RSUD Temanggung Memperoleh Piagam Penghargaan dari BPJS Cabang Magelang Sebagai Juara 1 Lomba Pelayanan	BPJS Jateng	Regional	DINKES

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Prima			
21	Paduan Suara Dewasa Campuran	PESPARAWI Jawa Tengah	Regional	DINDIKPORA
22	Olimpiade Ma arif Tingkat Provinsi	Penyelenggara Olimpiade Makarif Jawa Tengah	Regional	DINDIKPORA
23	Siswa SMP Ngadirjo Juara Lari Atletik Lari	Popda Jateng	Regional	DINDIKPORA
24	ASN Terinovative (Dwi Sukarme, ST,,MT,)	JAWA POS	Regional	BAPPEDA
25	Ketiga Kalinya Temanggung Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA),	Nasional	DPPPAPPKB
26	Sertifikat Warisan Tak Benda	KEMENDIKBUD	Nasional	DINBUDPAR
27	Kampoeng Pro Iklim Utama Nasional	Kementrian LHK	Nasional	DPRKPLH
28	Inovasi Rasa Mesra Mendapat Penghargaan Human Raights In Southeasty Asia	Human Raights In Southeasty Asia	Nasional	BAPPEDA
29	Ammar Amrullah merupakan salah satu atlit Wushu MI Negeri 1 Temanggung yang meraih medali Emas pada lomba yang dilaksanakan secara virtual oleh Pusaka Tantra pada tanggal 10-15 Mei 2021, Sebagai Juara 1 GS PA Group 5 tingkat nasional	Pusaka Tantra	Nasional	DINDIKPORA
30	Kepala daerah Yang Berkontriutif Nominasi LPM Award	penghargaan oleh LPM Award 2022	Nasional	DINPERMADES
31	Penghargaan Anugrah PDSD Juara 1 Ekosistem Inovasi Jawa Tengah	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
32	Penghargaan Anugrah Innovation Government Award 2022 Kabupaten Temanggung Terinovatif	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	BAPPEDA
33	Penghargaan Krenova Minyak Kopi Herbal 10 besar Utama Tingkat Jawa Tengah	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
34	PPID Pemkab Temanggung Raih Penghargaan pada KIP Award	KIP Award	Nasional	KOMINFO
35	Bela Rahma Sayida,juara ke dua di ajang Duta Wisata Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo),	Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo),	Nasional	DINBUDPAR

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
36	Kurnia Setyo Wulandari Kabupaten Temanggung berhasil meraih Juara I Lomba Baca Puisi Kreatif (LBPK) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Gaperto Jepara,	Yayasan Gaperto Jepara,	Nasional	DINDIKPORA

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (data diolah)

Penghargaan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 400
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara 2 Piala Presiden Kontes Kambing PE th 2023 tk Nasional Kelas Pejantan (Kelompok ternak cabe Farm Desa Tretep kecamatan Tretep)	Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI)	Nasional	DKP3
2	Juara 3 piala Presiden Kontes Kambing PE th 2021 tingkat Nasional kelas anakan indukan- Kelompok ternak Jalu Farm Desa Kertosari Kecamatan Jumo	Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI)	Nasional	DKP3
3	Juara 1 Tembakau varietas Kemloko 4 Festival Tembakau Lembutan Kategori Gunung pada Soropadan Agro Festival II tahun 2023(Bapak Chadik Mubarak) desa Bansari Kecamatan Bansari	Soropadan Agro Expo Festival II tahun 2023	Regional	DKP3
4	Juara 1 Kelompok Tani Ternak Berprestasi tingkat Provinsi Jawa tengah- KTT Taruna Karya Mudha	Provinsi Jawa Tengah	Regional	DKP3
5	Juara 1 Tingkat Nasional Penghargaan Mitra Bhakti Usaha -perusahaan yg telah melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)- PT Shoenary Javanesia Inc Kab Temanggung	Direktorat Jendral Masyarakat Kementrian RI	Nasional	PT Shoenary Javanesia Inc/ Dinkes/ Puskesmas Pare
6	Peringkat ke 4 tingkat Nasional Penghargaan Profil Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2023	Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI	Nasional	Dinkes
7	Sertifikasi Akreditasi Paripurna Puskesmas Parakan	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	Dinkes/ Puskesmas Parakan
8	Sertifikat Bebas Frambusia- Apresiasi Kepala Daerah berhasil menangani	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	Dinkes

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	penyebaran Neglected Tropical Disease (NTD)			
9	Penghargaan kategori Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas terstandarisasi dan sebagai rujukan Nasional tahun 2022-Puskesmas Temanggung	DKPPPAPPKB Provinsi Jateng	Regional	DKPPPAPPKB Tmg/ Dinkes Tmg/ Puskesmas Tmg
10	Sekolah Adiwiyata Mandiri – SMP 6 Temanggung	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
11	Sekolah adiwiyata Nasional – SDN 3 Tuksongo	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
12	Sekolah Adiwiyata Provinsi - SD Muhammadiyah Parakan, MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak, SMP N 1 Kaloran, MTs Ma'arif Jumo	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Regional	DPRKPLH
13	Green Leadership Nirwasita Tantra- Pemerintah Daerah dan Ketua DPRD untuk Kategori Kabupaten Sedang	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
14	Green Leadership Nirwasita Tantra- Ketua DPRD untuk Kategori Kabupaten Sedang	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
15	Lomba Habitat Tingkat Provinsi Jawa Tengah- Juara 4 (Kel. Manggong Kec. Ngadirejo)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
16	LOMBA WANA LESTARI-terbaik I Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Nasional dan Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Provinsi (An. R. Gravita Eka Purnama)	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Nasional	DPRKPLH
17	Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Utama- 1.Des Ketitang Kec. Jumo 2.Desa Batursari Kec. Kledung	Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Nasional	DPRKPLH
18	Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya-Desa Petarangan Kec. Kledung	Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Nasional	DPRKPLH
19	Nominator Penghargaan Kalpataru Nasional- Fatah Syaifur Rochman	Kementrian Lingkungan Hidup	Nasional	DPRKPLH
20	Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng	Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Kategori Perintis Lingkungan Hidup- Fatah Syaifur Rochman			
21	Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup- Bank Sampah Bumi Asri, Desa Banaran Kecamatan Tembarak	Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
22	Juara 1 Kategori Pelestarian Lingkungan Hidup dalam acara Anugerah Penyuluh Agama Islam Award tingkat Jawa Tengah- An Al Imron	Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah	Regional	DPRKPLH
23	Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 11 atas Laporan Keuangan tahun 2022 Pemerintah Daerah Kab Temanggung	Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI	Nasional	BPKPAD
24	Kabupaten Terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Nasional tahun 2023	Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	Nasional	Bappeda
25	Kabupaten Terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Gubernur Jawa Tengah	Nasional	Bappeda
26	Juara terbaik III tingkat Nasional SDG's award	Menteri PPN/ Bappenas	Nasional	Bappeda
27	Juara 1 Tingkat Nasional kategori News Anchor Anugerah Persada. Id Award ke IV – Lembaga penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Erte FM	Persada.Id (Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia)	Nasional	Radio Erte FM/ Dinkominfo
28	Juara 1 dalam Lomba Pertunjukan Rakyat (Petunra) FK Metra Tingkat Jawa tengah	FK Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional)/ Dinkominfo Provinsi Jateng	Regional	Dinkominfo
29	Desa Anti Korupsi dengan Predikat Istimewa- Desa Tanurejo Kecamatan Bansari	Provinsi Jateng	Regional	Inspektorat/ Dinpermades/ Dinkominfo
30	Opini Kualitas tinggi pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022	Ombudsman Republik Indonesia	Nasional	Ortala
31	Peringkat 4 Penilaian Evaluasi Smart City se Indonesia tahun 2022	Kementrian Kominfo	Nasional	Dinkominfo
32	Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Gubernur Jawa Tengah	Regional	Bagian Hukum
33	Medali Emas Cabor Balap	Asian Games	Internasional	KONI/ Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Sepeda BMX di ajang Asian Games 2023 di Hangzhou, China (amellya Nur Sifa)			
34	Medali Emas Cabor Catur tingkat Asia di Paragames Kamboja An. Farah Yumna Budiati (2 emas P dan 2 emas B)	Paragames Kamboja	Internasional	Dindikpora
35	Medali Perak Cabor Atletik tingkat Asia di Paragames Kamboja An. Slamet Wahyu Jati (1 Perak P dan 1 Perak B)	Paragames Kamboja	Internasional	Dindikpora
36	Medali Perak Cabor Wushu kejuaran Asia di Macau China An. Intan Anindya	Macau Cina	Internasional	Dindikpora
37	Medali Perunggu Cabor Wushu kejuaran Asia di Macau China An. Genta Ganda Prakoso	Macau Cina	Internasional	Dindikpora
38	Medali Emas Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Intan Anindya	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
39	Medali Emas Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Genta Ganda Prakoso	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
40	Medali Perak Cabor Wushu di POPNAS Palembang An. Pandu Dian Saputra	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
41	Medali Perak Cabor Kempo di POPNAS Palembang An. Talin Nabilla Putri	POPNAS Palembang	Nasional	Dindikpora
42	Medali Emas Cabor Atletik di Lari Trail Run Gunung Gajah An. Diva Setiyawan	Turnamen Jawa Tengah	Regional	Dindikpora
43	Medali Emas Cabor Lompat jauh di PEPARPEDA Surakarta An Nicholas Arya Naufal putra	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
44	Medali Emas Cabor Lompat jauh di PEPARPEDA Surakarta An. Diva Setiyawan	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
45	Medali Emas Cabor Atletik tuna rungu di PEPARPEDA Surakarta An. Navilla Ardiana	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
46	Medali Emas Cabor Atletik tuna rungu di PEPARPEDA Surakarta An. Zulaika	PEPARDA Surakarta	Regional	Dindikpora
47	Medali Emas Cabor Judo di POPDA Provinsi An. Dwiki Hepto	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
48	Medali Emas Cabor Kempo di POPDA Provinsi (7)	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
49	Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Pandu Dian Saputra	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
50	Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Intan Anindya	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
51	Medali Emas Cabor Wushu di POPDA Provinsi An. Intan Anindya	POPDA Provinsi	Regional	Dindikpora
52	Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. Intan Anindya	O2SN Provinsi	Regional	Dindikpora
53	Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. M. Attar Pandu Affandi	O2SN Provinsi	Regional	Dindikpora
54	Medali Emas Cabor Renang O2SN Provinsi An. Indira Ferinza Jasmine	O2SN Provinsi	Regional	Dindikpora
55	Medali Emas Cabor Atletik 100 M lari gawang putra di PORPROV XVI Jateng An. Ayub Kabri	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
56	Medali Emas Cabor Atletik sapta putra di PORPROV XVI Jateng An. Ayub Kabri	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
57	Medali Emas Cabor catur beregu di PORPROV XVI Jateng An. Abdul jalil, M Fidyen, Oka satria	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
58	Medali Emas Cabor judo di PORPROV XVI Jateng An. Dwikie Hepto Januartika	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
59	Medali Emas Cabor kick boxing full contact putri di PORPROV XVI Jateng An. Siska Ayu Valentina	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
60	Medali Emas Cabor Tarung drajat di PORPROV XVI Jateng An. Deni Cahya N	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
61	Medali Emas Cabor Taekwondo di PORPROV XVI Jateng An. Dinda putri lestari	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
62	Medali Emas Cabor Tennis lapangan di PORPROV XVI Jateng An. M Hilmy Abdulrahman	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
63	Medali Emas Cabor Gita Ariesta di PORPROV XVI Jateng An. Gita Ariesta	PORPROV XVI Jateng	Regional	Dindikpora
64	RSUD Temanggung penghargaan dalam bidang keselamatan dan keamanan nuklir kegiatan Radiologi Diagnostik dan	BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)	Nasional	RSUD Tmg

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Intervensional - Anugerah BAPETEN 2023			
65	RSUD Temanggung sertifikat Akreditasi Rumah Sakit status paripurna	Direktur Utama Lembaga Akreditasi Rumah sakit DHP (LARS-DHP)	Nasional	RSUD Temanggung
66	Krenova Provinsi-Ijuk Ulir Ranjau Binatang- juara Harapan	Bappeda Provinsi Jateng	Regional	Bappeda
67	Olimpiade sains nasional tingkat provinsi (osn-p) jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (smp/mts) tahun 2023 An. M Ridwan Damarjati Wijaya (SMP2 Temanggung)	Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Regional	Dindikpora
68	Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) atau Swasti Saba Kategori Padapa Tahun 2023	Kementrian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	Dinkes
69	Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional Innovation Government Award (IGA) Tahun 2023	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	Bappeda
70	Penghargaan atas tercapainya angka jaminan kesehatan masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95,44 % di Kabupaten Temanggung tahun 2023	BPJS kesehatan	Regional	Dinkes/ Pemkab Temanggung
71	Anugerah Meritokrasi 2023	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Nasional	BKPSDM
72	Pemenuhan Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Regional	PBJ
73	Penghargaan Anugrah PDSD dengan kategori Sangat Tinggi (3,952)	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
74	Penghargaan Anugrah PDSD untuk Dokumen Evaluasi PDSD Terbaik I Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	Gubernur Jateng	Regional	BAPPEDA
75	Juara I Medali Emas Olimpiade Pendidikan Agama Isalam Nasional ke 2 Zona Jawa Tengah An Husna Dzakiyyah (SDN I Jampiroso)	DPP AGPAII (Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia)	Regional	Dindikpora
76	Badan Publik Informatif kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Keterbukaan Informasi Award 2023 Jawa Tengah	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
77	Badan Publik Pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	kategori informatif (Desa Gilingsari, Kec. Temanggung dalam Keterbukaan Informasi Award 2023 Jawa Tengah			
78	Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Juara 1 dalam Kompetisi Nugraha Karya Desa BRILian Tahun 2023	BRI	Nasional	Pemdes Bansari

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (data diolah)

Pada tahun 2023 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Prestasi ini berlanjut pada tingkat Nasional, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Pada tahun yang sama Kabupaten Temanggung juga dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional pada Innovation Government Award (IGA) Tahun 2023.

Daftar penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 401
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pngampu
1.	Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Regional	Bappeda
2.	Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional Tahun 2024	Bappenas	Nasional	Bappeda
3.	Penghargaan Perpamsi Jateng Award 2024 kategori Platinum Peringkat III Perumda Air Minum Kabupaten Temanggung	Perpamsi Jateng	Regional	PDAM Temanggung
4.	Baznas Award 2024 kategori Kepala Daerah yang Mendukung Pengelolaan Zakat Terbaik	Baznas	Nasional	Pemkab Temanggung
5.	Prima Award kategori Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tertinggi Tahun 2024 Wilayah Indonesia Barat	Ditjen Dukcapil Kemendagri	Nasional	Dindukcapil
6.	Juara Harapan II Tingkat Nasional Firefighter Skill Competition 2024	Kemendagri	Nasional	Satpol PP-Damkar
7.	Penghargaan dari Kemendikbud kepada Dinas Pendidikan dan	Kemendikbud	Nasional	Dindikpora dan Dinbudpar

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pngampu
	Kebudayaan dalam Mendukung Pemerintah Daerah Mencapai Level Melebaga pada 4 Kategori			
8.	Juara I Lomba Pawai dalam rangka HUT Satpol, Linmas, dan Damkar di Surakarta	Pemprov Jawa Tengah	Regional	Satpol PP-Damkar/Pemkab Temanggung
9.	Penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mendapatkan Opini WTP 12 Kali	BPK Republik Indonesia	Nasional	Pemkab Temanggung
10.	Penandatanganan Naskah Kerja Sama antara Ombudsman RI dengan Pemda dan Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Ombudsman RI	Nasional	Bagian Organisasi
11.	Pemenang Kategori Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Peduli Anak Terbaik Tingkat Nasional pada Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024	Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI)	Nasional	Dinkominfo
12.	Penghargaan Anugerah ASN 2023 dan ASN Talent 2024 Tingkat Nasional kategori Best Employee	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi (KemenPAN-RB)	Nasional	BKPSDM
13.	Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Baik Tingkat Kabupaten se-Indonesia	Indonesian Institute of Public Governance (IIPG)	Nasional	Bagian Organisasi/Pemkab Temanggung
14.	Penghargaan Juara III Jawa Tengah Inspiring <i>Economic Effort Awards</i> kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Jawa Tengah	Pemprov Jawa Tengah	Regional	Pemkab Temanggung
15.	Penghargaan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jawa Tengah Tahun 2024 oleh Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah	Diskominfo Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
16.	Juara I kategori B dalam Festival Dalang Anak Jawa Tengah Tahun 2024	Disporapar Jawa Tengah	Regional	Dinbudpar
17.	Penghargaan dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta atas Penyelesaian Disparitas Data ASN dengan Prosentase Terbanyak	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Regional	BKPSDM
18.	Penghargaan Inovasi Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi Kabupaten Tertinggi yang Memberikan Jaminan Tenaga Kerja Non-Formal	BPJS Ketenagakerjaan	Nasional	Dinas Sosial

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pngampu
19.	Penghargaan 3 Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 1 Sekolah Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	DPRKPLH
20.	Penghargaan dari Ditjen PAUD Dikdasmen kepada SDN Kalirejo Kecamatan Kledung dalam rangka Aksi Nyata Sadar Literasi Numerasi	Ditjen PAUD Dikdasmen	Nasional	SDN Kalirejo
21.	Medali Perunggu pada Kompetisi IMEC and JEO Olympiad di Amity College Prestons Campus Sydney Australia a.n Anantacetta Reugra Abiraya	Amity College Prestons Campus Sydney	Internasional	Dindikpora
22.	Medali Perunggu pada Kompetisi International Round di Royal Lotus Hotel Da Nang Vietnam a.n Anantacetta Reugra Abiraya	International Round	Internasional	Dindikpora
23.	Pemenang Utama Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah	Regional	Pemkab Temanggung

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (data diolah)

Pada tahun 2024 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Prestasi ini berlanjut pada tingkat Nasional, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Pengumuman disampaikan oleh Kepala Bappenas bersamaaan dengan pelaksanaan Musrebangnas Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Pada tahun yang sama Kabupaten Temanggung juga mendapatkan penghargaan yaitu sebagai pemenang utama pada lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah.

Daftar penghargaan yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 402
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pngampu
1	Pemerintah Daerah Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Kategori Prima	KemenPAN-RB	Nasional	DPMPPTSP
2	Predikat Informatif Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
3	Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	Bappenas	Nasional	Bapperida

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pngampu
	Tingkat Nasional Tahun 2025			
4	Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional Innovation Government Award (IGA) Tahun 2025	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	Bapperida
5	Kabupaten Tercepat Melaporkan Inovasi	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	Bapperida
6	Penghargaan Swasti Saba Padapa Kabupaten/Kota Sehat 2025	Kementrian Kesehatan	Nasional	Dinkes
7	Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 “Perbaikan Akses Layanan Pendidikan Tingkat Kabupaten dengan Fiskal Rendah”	Kemendikdasmen	Nasional	Dindikpora
8	Peringkat 4 Nasional dalam SDG’s Action Award 2025	PT Surveyor Indonesia mbk.	Nasional	Bapperida
9	“Satria Pemimpin Inklusif dan Komunikatif” Satria Leader Award 2025	Suara Merdeka Award	Regional	Wakil Bupati
10	Lembaa Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Terbaik Jawa Tengah 2025	KPID Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
11	Juara 2 Penyiar Radio Pria Terbaik se-Jawa Tengah 2025	KPID Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
12	Juara 2 Talkshow Terbaik se-Jawa Tengah “Panggung Sastra: Episode Konten Budaya Lokal”	KPID Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
13	Juara Harapan 3 Ajang Film Pendek KIM Jawa Tengah 2025	Diskominfo Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
14	Juara 3 Ajang Pertunjukan Rakyat FK Matra Jawa Tengah	Diskominfo Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
15	Top 10 Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA) Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 2025 dengan Inovasi “Jempol Boss”	BRIDA Jawa Tengah	Regional	DPMPTSP
16	Top 10 Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA) Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 2025 dengan inovasi “Gampil”	BRIDA Jawa Tengah	Regional	DPMPTSP
17	Pemenang Utama Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Jawa Tengah 2025 dengan Inovasi “Mesin Roasting Kopi Berbasis Android, Retnawan”	BRIDA Jawa Tengah	Regional	Bapperida
18	Predikat Sangat Baik Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Kemendagri	Nasional	Dindukcapil
19	Penganugrahan Baznas Awards 2025 Kategori “Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia”	Baznas	Nasional	Pemkab Temanggung
20	Penghargaan Implementasi Program Smart City 2024 Kategori Tingkat Improvement Gerakan Menuju Smart City	Komdigi	Nasional	Pemkab Temanggung
21	Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Regional	Bapperida
22	Juara I Kategori Penilaian Lapangan Lomba Kinerja Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Provinsi jawa Tengah Tahun 2025	Pusdataru Provinsi jawa Tengah	Regional	DPUPR
23	Juara II Kategori UPTD/Pengamat Lomba Kinerja Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Provinsi jawa Tengah Tahun 2025	Pusdataru Provinsi jawa Tengah	Regional	DPUPR
24	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 400m Pa	POMPROV JATENG	Regional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pngampu
25	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 200m Pa	POMPROV JATENG	Regional	Dindikpora
26	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 110m Gawang Pa	JATENG OPEN	Regional	Dindikpora
27	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 110m Gawang Pa	KEJURNAS ATLETIK SOLO 2025	Nasional	Dindikpora
28	Juara 2 Cabang Olahraga Atletik Lari Estafet 4x400m Pa	KEJURNAS ATLETIK SOLO 2025	Nasional	Dindikpora
29	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 110m Gawang Pa	POMNAS	Nasional	Dindikpora
30	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 110m Gawang Pa	KEJURPROV JATENG	Regional	Dindikpora
31	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Sapta Lomba Pa	KEJURPROV JATENG	Regional	Dindikpora
32	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 400m Pa	AKPOL	Nasional	Dindikpora
33	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 100m Pa	KAHF MOTION LEAGUE JOGJA	Nasional	Dindikpora
34	Juara 2 Cabang Olahraga Atletik Lari 100m Pa	KEJURPROV JATENG	Regional	Dindikpora
35	Juara 3 Cabang Olahraga Atletik Lari Estafet 4x400m Pa	KEJURPROV JATENG	Regional	Dindikpora
36	Juara 3 Cabang Olahraga Atletik Lari 60m Pa	GANESHA OPEN IV SALATIGA	Regional	Dindikpora
37	Juara 3 Cabang Olahraga Atletik Lompat Jauh	BAHUREKSO CUP XII 2025	Nasional	Dindikpora
38	Juara 2 Cabang Olahraga Atletik Lempar Lembing	GANESHA OPEN III SALATIGA	Regional	Dindikpora
39	Juara 3 Cabang Olahraga Atletik Lempar Lembing	BAHUREKSO CUP	Nasional	Dindikpora
40	Juara 2 Cabang Olahraga Atletik Lari 5000m Pa	RUN AMD JUMP COMPETITION	Nasional	Dindikpora
41	Juara 2 Cabang Olahraga Atletik Lari 800m Pa	DISPORA PROVINSI DKI JAKARTA	Nasional	Dindikpora
42	Juara 3 Cabang Olahraga Atletik Lari 1500m Pa	DISPORA PROVINSI DKI JAKARTA	Nasional	Dindikpora
43	Juara 3 Cabang Olahraga Atletik Lari 800m Pa	KEJURPROV JATENG	Regional	Dindikpora
44	Juara 3 Cabang Olahraga Atletik Lari 1500m Pa	KEJURPROV JATENG	Regional	Dindikpora
45	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 1500m Pa	POPDA JATENG	Regional	Dindikpora
46	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 5000m Pa	KEJURWIL FINAL	Regional	Dindikpora
47	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 800m Pa	KEJURWIL FINAL	Regional	Dindikpora
48	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 1500m Pa	PORSIMAPTAR	Nasional	Dindikpora
49	Juara 3 Cabang Olahraga Atletik Jalan Cepat 10.000 Meter	KEJURPROV JATENG	Regional	Dindikpora
50	Juara 2 Cabang Olahraga Atletik Jalan Cepat 5.000 Meter	BAHUREKSO CUP XII	Nasional	Dindikpora
51	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 1.500M PI	KEJURWIL FINAL	Regional	Dindikpora
52	Juara 3 Cabang Olahraga Atletik Lari 800M PI	KEJURWIL FINAL	Regional	Dindikpora
53	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 5.000M PI	KEJURWIL FINAL	Regional	Dindikpora
54	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 3.000M PI	BAHUREKSO CUP XII	Nasional	Dindikpora
55	Juara 1 Cabang Olahraga Atletik Lari 1.500M PI	BAHUREKSO CUP XII	Nasional	Dindikpora
56	Juara 3 Cabang Olahraga Atletik Lari 800M PA	BAHUREKSO CUP XII	Nasional	Dindikpora
57	Juara 2 Cabang Olahraga Atletik 3.000m Pa	PORSEMA XIII 2025	Regional	Dindikpora
58	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo Kemenpora Taekwondo Championship Kota Magelang	Kemenpora	Nasional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pngampu
	2025			
59	Juara 2 Cabang Olahraga Taekwondo PANGDAM IV/DIPONEGORO CAP TAEKWONDO OPEN TOURNAMENT	KODAM IV DIPONEGORO	Regional	Dindikpora
60	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo Kemenpora Taekwondo Championship Kota Magelang 2025	Kemenpora	Nasional	Dindikpora
61	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo Rawa Pening Taekwondo Championship 2025 Se Jawa Bali	DIASPORA PROV JATENG,DHARMOTAMMA SATYA PRAJA	Jawa Bali	Dindikpora
62	Juara 2 Cabang Olahraga Taekwondo TAEKWONDO DISDIKBUD	DINAS PENDIDIKAN	Regional	Dindikpora
63	Juara 3 Cabang Olahraga Taekwondo Kemenpora Taekwondo Championship Kota Magelang 2025	Kemenpora	Nasional	Dindikpora
64	Juara 2 Cabang Olahraga Taekwondo Kemenpora Taekwondo championship Kota Magelang 2025	Kemenpora	Nasional	Dindikpora
65	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo Rawa Pening Taekwondo Championship 2025 Se Jawa Bali	Kab Semarang	Jawa Bali	Dindikpora
66	Juara 2 Cabang Olahraga Taekwondo Kemenpora Taekwondo Championship Kota Magelang 2025	KEMENPORA	Nasional	Dindikpora
67	Juara 2 Cabang Olahraga Taekwondo RAWA PENING TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025	PROPINSI JAWA TENGAH	Jawa Bali	Dindikpora
68	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo Kemenpora Taekwondo Champhionship kota Magelang 2025	Kemenpora	Nasional	Dindikpora
69	Juara 2 Cabang Olahraga Taekwondo Kemenpora Taekwondo Championship Kota Magelang 2025	Kemenpora	Nasional	Dindikpora
70	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo Rawa Pening Taekwondo Championship 2025 Se Jawa Bali	Kab Semarang	Jawa Bali	Dindikpora
71	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo PANGDAM IV/DIPONEGORO CAP TAEKWONDO OPEN TOURNAMENT	Pengprov TI Jateng	Provinsi	Dindikpora
72	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo Kemenpora Taekwondo Championship Kota Magelang 2025	Kemenpora	Nasional	Dindikpora
73	Juara 2 Cabang Olahraga Taekwondo Rawa Pening Taekwondo Championship 2025 Se Jawa Bali	Pengkab TI Kab Semarang	Jawa Bali	Dindikpora
74	Juara 2 Cabang Olahraga Taekwondo Rawa Pening Taekwondo Championship 2025 Se Jawa Bali	Pengkab TI Kab Semarang	Jawa Bali	Dindikpora
75	Juara 2 Cabang Olahraga Taekwondo Rawa Pening Taekwondo Championship 2025 Se Jawa — Bali	Pengkab TI Kab Semarang	Jawa Bali	Dindikpora
76	Juara 3 Cabang Olahraga	Kemenpora	Nasional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pngampu
	Taekwondo Kyorugi U 42 PA Kemenpora taekwondo Championship			
77	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo Piala ketua umum KONI pusat 3	KONI nasional	Nasional	Dindikpora
78	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo BK PORPROV JAWA TENGAH 2025	Jawa Tengah	Regional	Dindikpora
79	Juara 3 Cabang Olahraga Taekwondo Indonesia Challenge Taekwondo Championship Piala Kemnpora 2025	Kediri	Nasional	Dindikpora
80	Juara 2 Cabang Olahraga Taekwondo Kejuaraan KONI CUP Series 6 Indonesia Taekwondo Championship 2025	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bekerja sama dengan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia	Nasional	Dindikpora
81	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo Rawa Pening Taekwondo Championship 2025 Se Jawa Bali	Kabupaten Semarang	Jawa Bali	Dindikpora
82	Juara 3 Cabang Olahraga Taekwondo Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2025 Tingkat Provinsi Jateng	PENGPROV JATENG	Regional	Dindikpora
83	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo kemenpora taekwondo champhionship kota magelang 2025	Kemenpora	Nasional	Dindikpora
84	Juara 1 Cabang Olahraga Taekwondo Taekwondo Championship PMS Open Piala Walikota 2025	Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia dan Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS)	Regional	Dindikpora
85	Juara 1 Cabang Olahraga Kungfu Tradisional Kategori Phibu 52 Kg Junior (15 - 17 Tahun) Putra	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
86	Juara 2 Cabang Olahraga Kungfu Tradisional Kategori Phibu 30 Kg Pra Kadet (9 - 10 Tahun) Putra	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
87	Juara 3 Cabang Olahraga Kungfu Tradisional Kategori Phibu 35 Kg Kadet (11 - 12 Tahun) Putra	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
88	Juara 3 Cabang Olahraga Kungfu Tradisional Kategori Phibu 60 Kg Junior (15 - 17 Tahun) Putra	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
89	Juara 1 Cabang Olahraga Line Dance Perorangan Dewasa 2 40 - 55 Tahun	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
90	Juara 1 Cabang Olahraga Panahan Kategori Horsebow Dewasa Putra Jarak 50m	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
91	Juara 1 Cabang Olahraga Panahan Kategori Horsebow Dewasa Putra Jarak 50m	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
92	Juara 3 Cabang Olahraga Panahan Kategori Horsebow Dewasa Putri 25m	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
93	Juara 1 Cabang Olahraga tradisional Kategori Egrang Putra	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
94	Juara 1 Cabang Olahraga tradisional Kategori Egrang Putri	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
95	Juara 1 Cabang Olahraga tradisional Kategori Terompah Panjang (5 Orang) Putri	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
96	Juara 2 Cabang Olahraga tradisional Kategori Terompah	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pngampu
	Panjang (5 Orang) Putra			
97	Juara 1 Cabang Olahraga Bola Sundul Kategori Long Heading Putra	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
98	Juara I Cabang Olahraga Liong Barongsai Kategori Barongsai Tradisional Junior	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
99	Juara II Cabang Olahraga Liong Barongsai Kategori Barongsai Tradisional Umum	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
100	Juara I Cabang Olahraga Pernafasan Kategori Beregu Usia < 25 Th	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
101	Juara I Cabang Olahraga Pernafasan Perorangan Kategori Pelajar Dan Mahasiswa (Usia 25 Th Ke Bawah)	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
102	Juara I Cabang Olahraga Senam Kreasi Kategori Perorangan Pelajar Sd - Sma (Putra/ Putri/ Campuran)	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
103	Juara II Cabang Olahraga Senam Kreasi Kategori Beregu Umum 40th Kebawah (Putra/Putri/Campuran)	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
104	Juara III Cabang Olahraga Senam Kreasi Kategori Perorangan 41th Keatas (Putra/Putri/Campuran)	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
105	Juara I Cabang Olahraga Pencak Silat Kategori Jurus Ksatria Utama Putra (Usia >17 Tahun- 45 Tahun)	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
106	Juara I Cabang Olahraga Pencak Silat Kategori Jurus Ksatria Utama Putri (Usia >17 Tahun-45 Tahun)	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
107	Juara I Cabang Olahraga Pencak Silat Kategori Seni Berkelompok Putra/Putri/Campur (Usia >10 Tahun-45 Tahun)	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
108	Juara II Cabang Olahraga Pencak Silat Kategori Seni Berpasangan_ Putra/Putri/Campur (Usia >10 Tahun-45 Tahun)	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
109	Juara III Cabang Olahraga Pencak Silat Kategori Seni Berkelompok Putra/Putri/Campur (Usia >10 Tahun-45 Tahun)	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
110	Juara II Cabang Olahraga Senam Kebugaran Kategori Senam Aero Boxing Perorangan	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
111	Juara II Cabang Olahraga Senam Kebugaran Kategori Senam Individual Aerobic Dance Free Style (Iadfs) Usia > 40	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
112	Juara II Cabang Olahraga Senam Kebugaran Kategori Senam Kebugaran Indonesia (Ski) Seri Ii Beregu	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
113	Juara III Cabang Olahraga Senam Kebugaran Kategori Senam Individual Aerobic Dance Free Style (Iadfs) Usia < 40 Tahun	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
114	Juara III Cabang Olahraga Senam Kebugaran Kategori Senam Segar Bugar (Ssb) Beregu	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
115	Juara II Cabang Olahraga Panahan kategori Barebow Standar U16 Putri	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pngampu
116	Juara III Cabang Olahraga Panahan kategori Barebow Tradisional Umum Putri	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
117	Juara III Cabang Olahraga Panahan kategori Jemparing Target U16 Putra	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
118	Juara III Cabang Olahraga Senam Sehat Kategori Beregu Usia Di Atas 50 Tahun	KORMI Provinsi Jawa Tengah/FORDA	Regional	Dindikpora
119	Juara III Cabang Olahraga Renang Gaya Dada 100 M	KRAPSI PB PRSI	Nasional	Dindikpora
120	Juara I Cabang Olahraga Renang G Dada 100 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
121	Juara I Cabang Olahraga Renang Gaya Kupu-kupu 100 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
122	Juara I Cabang Olahraga Renang Gaya Bebas 100 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
123	Juara II Cabang Olahraga Renang Gaya Bebas 100 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
124	Juara I Cabang Olahraga Renang Gaya Bebas 100 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
125	Juara II Cabang Olahraga Renang Gaya Ganti Perorangan 400 M	KRAPSI PB PRSI	Nasional	Dindikpora
126	Juara I Cabang Olahraga Renang Gaya Bebas 400 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
127	Juara I Cabang Olahraga Renang Gaya Bebas 200 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
128	Juara II Cabang Olahraga Renang Gaya Bebas 200 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
129	Juara I Cabang Olahraga Renang Gaya Bebas 200 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
130	Juara III Cabang Olahraga Renang Gaya Bebas 200 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
131	Juara II Cabang Olahraga Renang Gaya Bebas 100 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
132	Juara II Cabang Olahraga Renang Gaya Kupu-kupu 200 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
133	Juara II Cabang Olahraga Renang Gaya Kupu-kupu 100 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
134	Juara III Cabang Olahraga Renang Gaya Punggung 100 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
135	Juara II Cabang Olahraga Renang Gaya Punggung 50 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
136	Juara II Cabang Olahraga Renang Gaya Kupu-kupu 200 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
137	Juara II Cabang Olahraga Renang Gaya Kupu-kupu 200 M	KRAPSI PB PRSI	Nasional	Dindikpora
138	Juara II Cabang Olahraga Renang Gaya Kupu-kupu 200 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
139	Juara II Cabang Olahraga Renang Gaya Kupu-kupu 100 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
140	Juara I Cabang Olahraga Renang Gaya Kupu-kupu 50 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
141	Juara III Cabang Olahraga Renang Gaya Punggung 100 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
142	Juara III Cabang Olahraga Renang Gaya Punggung 200 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora
143	Juara II Cabang Olahraga Renang Gaya Bebas 100 M	FAI Provinsi JATENG	Regional	Dindikpora

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2026 (data diolah)

Pada tahun 2025 Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Jawa Tengah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Prestasi ini berlanjut pada tingkat Nasional, Kabupaten Temanggung berhasil menjadi juara 1 lomba Perencanaan

Pembangunan Daerah untuk kategori Kabupaten Terbaik. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga memperoleh predikat sebagai Pemenang Kabupaten Terinovatif dan Tercepat dalam pengiriman inovasi pada ajang Innovative Government Award (IGA). Tidak hanya itu, Kabupaten Temanggung turut mencatatkan prestasi sebagai pemenang 10 besar terbaik dalam Lomba IDEA serta meraih pemenang utama pada Lomba Krenova yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah.

**DOKUMENTASI KOMPETISI DAN PIAGAM PENGHARGAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**





BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2027 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Temanggung yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2027.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah serta mengacu arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta sesuai arah dan kebijakan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan performa yang tangguh di tengah dinamika global, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11 persen. Angka ini merefleksikan penguatan dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada di 5,03 persen, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas domestik.

Pertumbuhan sepanjang tahun 2025 didorong oleh struktur ekonomi yang solid, baik dari sisi lapangan usaha maupun pengeluaran. Dari sisi lapangan usaha, sektor jasa lainnya menjadi mesin pertumbuhan tercepat dengan kenaikan sebesar 9,93 persen, disusul oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,78 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan tetap mempertahankan posisinya sebagai kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 19,07 persen, yang menunjukkan keberlanjutan proses hilirisasi industri nasional.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kinerja Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh signifikan sebesar 7,03 persen, serta penguatan pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi. Momentum pertumbuhan ini mencapai puncaknya pada Triwulan IV-2025 yang menyentuh angka 5,39% (*y-on-y*), memberikan sinyal positif bagi prospek ekonomi di tahun mendatang. Namun, keberhasilan domestik ini dicapai di tengah lingkungan global yang penuh gejolak.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak linier terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Tercatat per September 2025, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,25 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan hingga level 4,74 persen pada November 2025. Dengan landasan makroekonomi yang stabil ini, Indonesia diproyeksikan mampu melanjutkan tren pertumbuhan positif pada tahun 2026 dalam kisaran target 4,9 persen hingga 5,7 persen. Meskipun perekonomian domestik stabil, risiko eksternal tetap menjadi faktor penentu.

Tantangan dan kondisi yang mewarnai ekonomi global yang menjadi perhatian antara lain:

1. Ketegangan Geopolitik dan Perdagangan: Eskalasi konflik regional dan meningkatnya fragmentasi perdagangan global menciptakan hambatan baru bagi arus ekspor dan impor.
2. Fluktuasi Harga Komoditas: Ketidakpastian pasokan energi dan pangan global terus memberikan tekanan pada inflasi di banyak negara maju.
3. Kebijakan Moneter Ketat: Suku bunga global yang masih berada di level relatif tinggi memberikan tantangan bagi arus modal masuk (*capital inflow*) dan nilai tukar di negara berkembang.

Lembaga ekonomi internasional memperkirakan dinamika ekonomi dunia akan mengalami penyesuaian sebagai dampak dari normalisasi suku bunga dan ketidakpastian geopolitik. Menurut laporan *International Monetary Fund (IMF)*, *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* dan *Asian Development Bank (ADB)*, memasuki tahun 2026, ekonomi global diprediksi tumbuh moderat di level 3,1 persen hingga 3,3 persen. Secara spesifik, proyeksi pertumbuhan untuk beberapa kawasan Amerika Serikat tumbuh di kisaran 2,0 persen hingga 2,6 persen, Negara Eropa tumbuh melambat di angka 0,8 persen hingga 1,3 persen,

Tiongkok proyeksi pertumbuhan sekitar 4,4 persen hingga 4,6 persen, India Tetap menjadi mesin pertumbuhan utama dengan proyeksi kuat di angka 6,3 persen hingga 6,9 persen, Indonesia diproyeksikan tumbuh stabil di level 4,7 persen hingga 5,2 persen.

Pada tahun 2027, momentum pemulihan diharapkan sedikit menguat seiring dengan meredanya tekanan inflasi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global stabil di kisaran 3,0 persen hingga 3,2 persen, Amerika Serikat diperkirakan terus melandai ke level 1,7 persen, Negara Eropa diharapkan sedikit pulih ke angka 1,2 persen didukung oleh penguatan belanja pertahanan, Tiongkok diprediksi terus menurun secara bertahap ke angka 4,2 persen hingga 4,3 persen, India diproyeksikan kembali menguat 6,8 persen hingga 7,3 persen didorong oleh reformasi domestic, Indonesia Mempertahankan tren positif dengan proyeksi pertumbuhan di angka 4,4 persen hingga 5,2 persen. *Asian Development Bank (ADB)* memperkirakan ekonomi nasional tetap tangguh di angka 5,2 persen didukung konsumsi swasta yang stabil.

Meskipun terdapat hambatan ekonomi global, masih terdapat harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di Tahun 2027. Tanda-tanda membaik (*upside risks*) dapat dilihat dari: (1) Tekanan inflasi telah mereda namun melambat penurunannya; (2) Perlambatan laju pengetatan moneter; (3) Potensi sumber pertumbuhan baru (ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru). Disisi lain terdapat beberapa resiko (*downside risk*) antara lain: (1) Peningkatan tensi geopolitik; (2) *Geo-economic fragmentation*; (3) Pelemahan ekonomi Tiongkok; (4) Terbatasnya *policy space* (fiskal); (5) Peningkatan resiko *debt distress*; (6) *Shock* akibat perubahan iklim.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2025 sebesar 5,11%, meningkat dibanding Tahun 2024 sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,93%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh signifikan sebesar 7,03%, serta penguatan pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi.

Selama tahun 2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi mencapai 56,93 persen dan mencatat pertumbuhan sebesar 5,30%.

Sektor industri pengolahan menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PDB. Pada tahun 2025, industri pengolahan menyumbang 19,07% terhadap total PDB, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,30%. Selain itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 13,17% terhadap PDB pada tahun 2025 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,49%.

Pada tahun 2027, ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi tetap menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Beberapa kondisi yang mencirikan perlambatan global dan ketidakpastian tinggi tersebut seperti: (1) Pertumbuhan ekonomi global yang melemah; (2) Penurunan inflasi global yang melambat; (3) Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama; (4) Perdagangan global tumbuh negatif yang utamanya disebabkan penurunan nilai perdagangan barang, harga komoditas unggulan perdagangan Indonesia (Kelapa Sawit, Batubara, Nikel, Gas Alam, Minyak Mentah) nilainya mengalami penurunan; (5) *Prompt Manufacturing Index* (PMI) atau Indeks Manufaktur Global masih berada di zona ekspansi, (6) Risiko Keuangan Global; (7) Krisis Energi dan Pasokan.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,85% pada tahun 2025 dari 4,91 % pada tahun 2024. Sementara, angka kemiskinan Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun 2024 ke 2025, dengan persentase penduduk miskin September 2024 sebesar 8,57% menjadi 8,25% pada September 2025. Indikator ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia, yang diukur melalui Gini Ratio, menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dalam dua tahun terakhir. Penurunan angka Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat menjadi semakin merata, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang lebih inklusif. Tingkat ketimpangan yang diukur menggunakan Rasio Gini menurun dari sebelumnya 0,381 pada September 2024, menjadi 0,363 pada September 2025. Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Pada Desember 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* sebesar 2,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,92. PDB per kapita tahun 2025 mencapai Rp83,7 juta atau USD 5.083,4. Dengan

mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro nasional Tahun 2027 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional
Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80 – 6,50
2	Inflasi	%	1,50 – 3,50
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,30 – 4,87
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,0 – 6,5
5	Rasio Gini	Angka	0,375 – 0,378
6	Indeks Modal Manusia	Angka	0,58

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah RKP Tahun 2027

3.1.3. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2025 mencatatkan performa yang sangat progresif dengan tingkat pertumbuhan mencapai 5,37% . Capaian ini menunjukkan akselerasi yang signifikan dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,95%. Pertumbuhan ekonomi wilayah ini tercatat melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11%, mempertegas posisi Jawa Tengah sebagai salah satu kontributor utama bagi stabilitas ekonomi di Pulau Jawa.

Struktur Perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mendominasi adalah Industri Pengolahan sebesar 33,39%; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,49%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,07%; dan Konstruksi sebesar 11,47%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 71,42%.

Sementara dari sisi pengeluaran, tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 60,89%; komponen PMTB sebesar 30,91%; Komponen Impor Luar Negeri sebesar 13,80%; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 10,96%; Komponen PK-P sebesar 6,12%; Komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 2,99%; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,37%; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,56%.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,66% pada Agustus 2025 dibandingkan pada Agustus 2024 sebesar 4,78%. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,47% pada tahun 2024, turun menjadi 9,48% pada tahun 2025. Sementara Inflasi (y-on-y) di Jawa Tengah pada Pada Desember 2025 sebesar 2,72% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,98.

Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,367 pada tahun 2024 turun menjadi 0,359 pada tahun 2025.

Salah satu upaya meningkatkan pemerataan ekonomi adalah melalui pengembangan investasi di wilayah selatan, guna mengurangi ketimpangan pembangunan dengan wilayah utara. Selain itu, pentingnya menarik investor, baik dalam negeri maupun asing, untuk berinvestasi di sektor industri, pelabuhan, manufaktur, dan energi. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah selatan dan utara harus terus digencarkan guna meningkatkan daya saing ekonomi. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar pembangunan berjalan optimal. Dengan strategi ini, Jawa Tengah diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berdaya saing tinggi.

3.1.4. Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, perekonomian Jawa Tengah tahun 2027 diproyeksikan pada kisaran angka 5,60 - 7,40%. Sementara inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,50 - 3,50 %. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2027, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 8,51 - 8,17 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,65 - 4,08 %. Di sisi lain, PDRB per Kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 56,0 - 59,8 juta rupiah/tahun. Penurunan Angka Kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,358 - 0,363 di tahun 2027.

Tabel 3. 2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah
Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60 - 7,40
2	PDRB per kapita	Juta Rp	56,0 - 59,8
3	Inflasi	%	1,50 - 3,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,65 - 4,08
5	Angka Kemiskinan	%	8,51 - 8,17
6	Rasio Gini	Angka	0,358 - 0,363

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2026

Tahun 2027 merupakan tahap “Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun kedua ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut antara lain:

1. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital;
3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata;
4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
5. peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata;
6. penguatan integrasi antar destinasi wisata;
7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata;
8. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata;
9. city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;
10. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism), serta kawasan

strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang- Yogyakarta-
Surakarta;

11. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital;
12. penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif;
13. peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata desa;
14. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
15. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
16. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
17. penguatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK bidang keahlian layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, dan perbankan syariah termasuk ekonomi kreatif dan kewirausahaan halal;
18. revitalisasi kurikulum SMK seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, layanan pariwisata dan perbankan syariah selaras dengan kebutuhan usaha dan industri;
19. penguatan integrasi tema pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syariah dalam kurikulum SMA dan SLB berbasis project integratif dan lintas;
20. penguatan kemitraan DUDI melalui sinkronisasi kompetensi dan penyusunan Memorandum of Agreement (MoA) untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal, serta perguruan tinggi termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal;
21. peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan karya budaya dan cagar budaya sebagai salah satu daya tarik wisata melalui pemetaan karya budaya dan cagar budaya potensial, pemeliharaan prasarana sarana kebudayaan, peningkatan upaya diplomasi budaya tingkat nasional/internasional, serta penguatan SDM/lembaga/komunitas kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya;
22. penguatan event olahraga pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan;

23. perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan;
24. mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif berbasis kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan;
25. peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun startup berbasis syariah.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap kedua “Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah” ini diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut.

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

3.1.5. Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02%, dan mengalami peningkatan pada Tahun 2025 menjadi sebesar 5,66% Kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung tahun 2025 lebih baik dibandingkan dengan kondisi Jawa Tengah sebesar 5,37% maupun nasional sebesar 5,11%.

Struktur Perekonomian Kabupaten Temanggung didukung oleh sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Kontribusi sektor unggulan industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Temanggung di tahun 2024 sebesar 25,68%, sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,33% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,05%.

Sedangkan tahun 2025 distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku di Kabupaten Temanggung didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 25,34%, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,01% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,78%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung menurun menjadi 2,31% pada tahun 2025 dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 2,35%. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung tahun 2025 lebih baik dibandingkan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,66% maupun nasional sebesar 4,85%. Angka kemiskinan konsisten mengalami penurunan dari sebelumnya 8,67% di tahun 2024 menjadi 7,78%% pada tahun 2025. Mengukur inflasi di Kabupaten Temanggung, yang bukan merupakan daerah survei biaya hidup (SBH) untuk perhitungan inflasi di Jawa Tengah, memerlukan pendekatan alternatif. Penghitungan inflasi Kabupaten Temanggung di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menggunakan angka inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,89% (y-o-y). Sedangkan penghitungan inflasi mulai tahun 2024 menggunakan angka inflasi dari Kabupaten Wonosobo sebesar 1,52% (y-o-y) di tahun 2024 dan sebesar 2,64% (y-o-y) di tahun 2025. Menggunakan data inflasi dari Kabupaten Wonosobo dapat menjadi proksi representatif untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Temanggung, mengingat kedua Kabupaten ini yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang serupa.

Rasio Gini/ indeks gini Kabupaten Temanggung menunjukkan adanya perbaikan dalam tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2024, Rasio Gini tercatat sebesar 0,383 yang mengindikasikan tingkat ketimpangan berada pada kategori sedang. Pada tahun 2025, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 0,356. Penurunan ini mencerminkan semakin meratanya distribusi pendapatan di masyarakat Kabupaten Temanggung, sehingga kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah semakin mengecil.

Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional pada tahun 2025, Rasio Gini Kabupaten Temanggung tergolong lebih rendah. Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah tercatat sekitar 0,359, sedangkan Rasio Gini nasional berada pada kisaran 0,375. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Temanggung relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung cukup efektif dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut.

3.1.6 Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung diarahkan pada perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan yang difokuskan pada peningkatan potensi produk unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri pengolahan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan, gini rasio, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mendasarkan pada kondisi-kondisi di atas, maka perekonomian Kabupaten Temanggung tahun 2027 diproyeksikan pada kisaran angka 6,10 – 7,30%. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,50 - 2,50%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 diharapkan dapat berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Kabupaten Temanggung. Tahun 2027, tingkat kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 7,00-6,78% dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 2,18 – 1,88%, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 73,98%. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 41,47 juta rupiah/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks gini/gini rasio sebesar 0,360-0,357 di tahun 2027.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, arah Pembangunan tahun 2027 yakni pengembangan sektor pertanian dan pariwisata untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata secara terpadu menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pertanian yang produktif dan inovatif menyediakan bahan baku berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan petani sebagai salah satu pilar utama ekonomi daerah.

Di sisi lain, pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, termasuk agrowisata dan ekowisata, membuka peluang baru untuk diversifikasi ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Integrasi antara pertanian dan pariwisata memungkinkan terciptanya sinergi yang memperkuat nilai tambah produk pertanian sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Fokus pembangunan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata dilakukan melalui :

1. Penguatan infrastruktur pertanian dan pariwisata melalui peningkatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang seperti jalan, irigasi dan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan;
2. Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya Lokal melalui pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pembinaan petani , pelaku UMKM, dan pelaku wisata secara profesional dan berkelanjutan; dan
4. Promosi dan Pemasaran Terintegrasi.

3.1.6.1. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2027 berada pada kisaran 5,80% - 6,50% (mendasarkan pidato Presiden Prabowo pada penyampaian KEM PPKF 2027 di DPR RI). Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya pemulihan ekonomi global, meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur, meningkatnya mobilisasi penduduk, serta peningkatan konsumsi masyarakat. Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2027 menjadi 5,60 % - 7,40%.

Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca adanya optimisme bahwa pada 2027 ekonomi akan tumbuh. Optimisme inilah yang menjadi dasar bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Temanggung pada tahun 2027, meskipun harus mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan besaran pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi pemerintah pusat maupun provinsi.

Faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa investasi fisik maupun investasi modal manusia yaitu pendidikan. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak mengutamakan sisi konsumsi namun lebih ke sisi produksi yaitu peningkatan dalam jumlah maupun kualitas produksi barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat naik dengan meningkatkan produktivitas di setiap sektor perekonomian.

Tabel 3. 3
Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2027

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2021	3,34	3,33	3,70
2022	5,20	5,31	5,31
2023	5,01	4,97	5,05
2024	5,02	4,95	5,03
2025	5,66	5,37	5,11
2026*	5,10 - 5,50	5,00 - 6,00	5,40
2027*	6,10 - 7,30	5,60 - 7,40	5,80 - 6,50

Sumber: BPS, 2026; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026; BPS Kabupaten Temanggung, 2026
*Angka Proyeksi

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir menunjukan kondisi yang fluktuatif. Pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Pada Tahun 2021 hingga Tahun 2024, perkembangan ekonomi sudah semakin membaik, dimana capaian Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,20%, meningkat dari capaian Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,34%. Sementara itu, pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sebesar 5,01% yang mengalami perlambatan dibanding Tahun 2022. Namun, pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan hingga tahun 2025 menjadi sebesar 5,66%.

Berdasarkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan capaian Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa kecenderungan perubahan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi dan kondisi terkini menunjukkan perbaikan ke arah positif (>0) yang mana tahun 2025 mengalami peningkatan baik pada tingkat Provinsi

Jawa Tengah maupun Nasional. Beberapa upaya yang akan dilakukan guna memastikan pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lebih baik lagi diantaranya peningkatan produktivitas sektor kearifan lokal seperti pertanian yang dapat ditingkatkan dengan cara:

- a. Mendorong minat berusaha di bidang pertanian;
- b. Peningkatan teknologi pertanian;
- c. Mendorong persaingan yang sehat dalam jual beli sektor pertanian;
- d. Pengembangan jenis komoditas agar berhasil guna;
- e. Membuka peluang ekspor ke daerah lain;
- f. Mendorong ekonomi kreatif semakin berkembang
- g. Digitalisasi usaha produk pertanian, dan lain-lain.

3.1.6.2. Struktur Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan selama jangka waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pergerakan dan pergeseran di beberapa sub sektor. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 3.4.

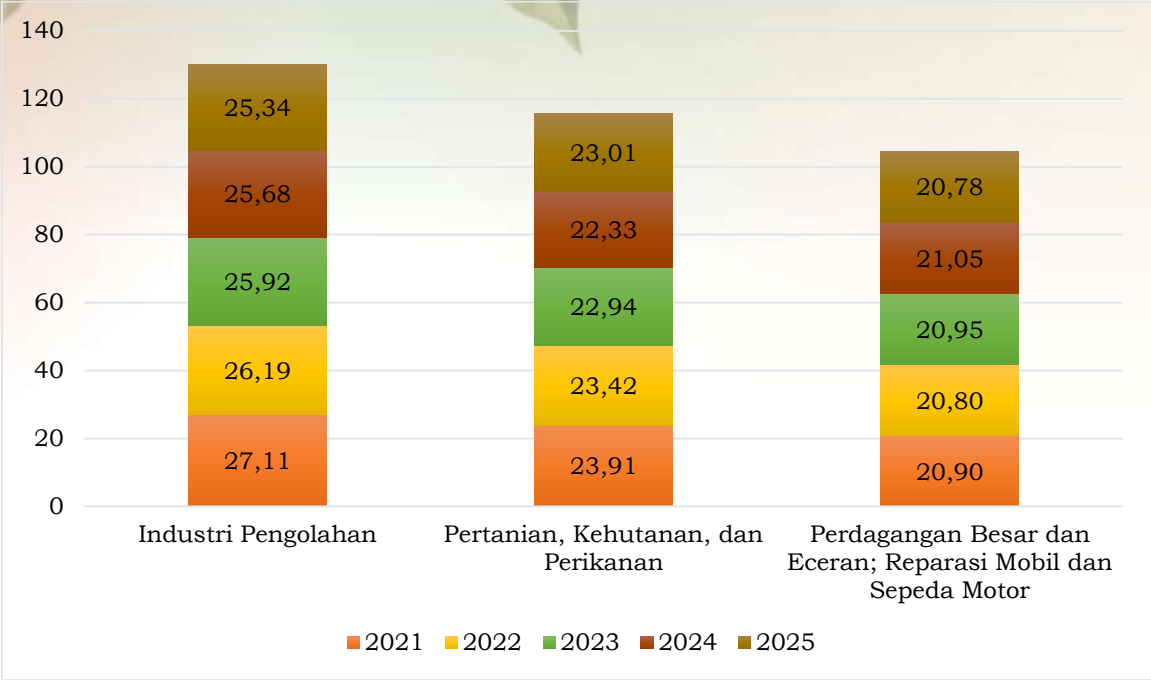
Tabel 3. 4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK
Tahun 2021-2025

	LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	2,92	1,28	0,49	9,82
B	Pertambangan dan Penggalian	6,75	-3,94	3,12	4,56	1,53
C	Industri Pengolahan	2,00	1,09	4,32	3,65	3,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,84	5,26	5,86	8,26	3,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,62	0,22	4,36	0,96	0,52
F	Konstruksi	7,54	3,72	7,89	13,64	6,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,40	4,30	5,82	5,91	4,29
H	Transportasi dan Pergudangan	2,37	65,39	7,90	5,82	4,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,03	15,04	12,49	10,16	10,03
J	Informasi dan Komunikasi	5,98	2,24	11,25	9,91	9,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	0,51	2,91	4,62	4,52
L	Real Estate	2,32	5,80	8,36	7,70	4,35
M,N	Jasa Perusahaan	3,01	5,65	8,82	11,29	7,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,26	1,60	5,11	8,01	1,70
P	Jasa Pendidikan	0,54	1,63	6,96	8,50	4,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	2,59	8,32	8,06	4,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,98	10,95	8,83	6,76	9,28
	PDRB	3,34	5,20	5,01	5,02	5,66

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2026

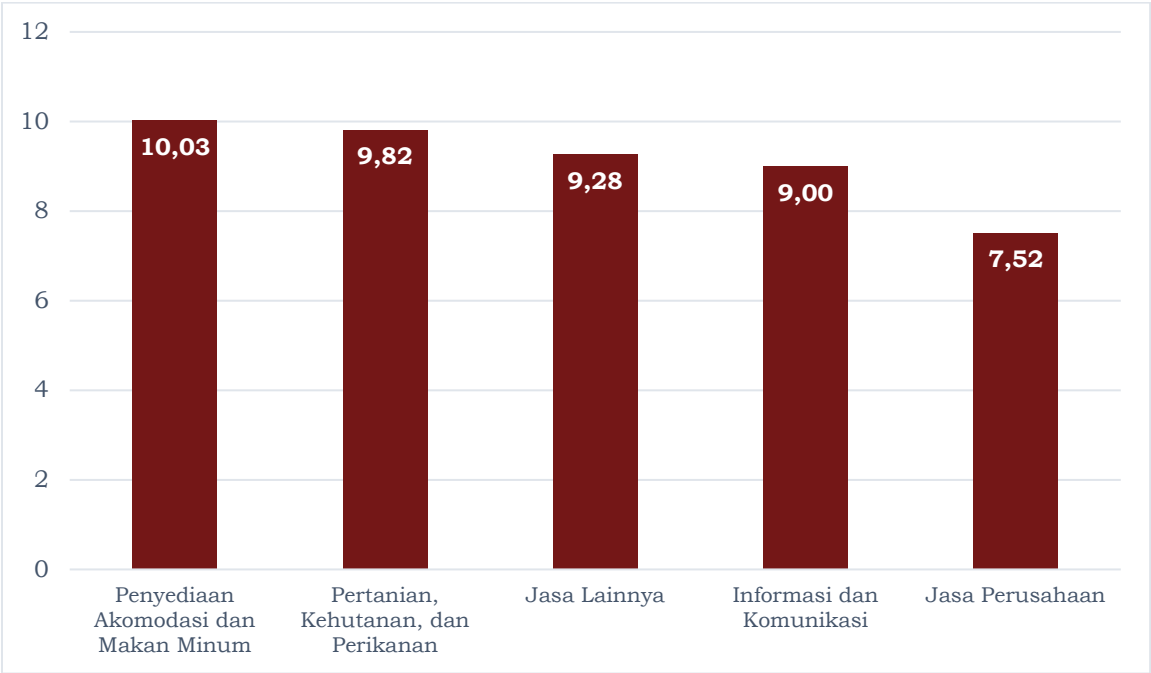
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pendukung utama. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu

industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Meskipun 3 sektor tersebut adalah penggerak utama perekonomian Kabupaten Temanggung, akan tetapi 3 (tiga) sektor tersebut tidak memiliki pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya.



Sumber: BPS Kab Temanggung 2026

Gambar 3. 1
Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2026

Gambar 3. 2
Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai bergeser dari lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha industri pengolahan. Hal tersebut dicerminkan dari besarnya distribusi lapangan usaha kategori Industri Pengolahan yang nilainya lebih

besar dibandingkan dengan lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini mencerminkan transformasi ekonomi Kabupaten Temanggung, di mana kegiatan pengolahan hasil-hasil pertanian mulai memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong perekonomian lokal. Perkembangan industri pengolahan juga berhubungan erat dengan upaya industrialisasi di sektor pertanian, yang menciptakan nilai tambah bagi produk-produk lokal. Peningkatan PDRB di sektor industri pengolahan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong transformasi ekonomi dari daerah agraris menjadi daerah berbasis industri. Sektor manufaktur memiliki kapasitas untuk menciptakan produktivitas yang lebih tinggi dan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan sektor agraris. Ini karena sektor industri pengolahan memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih canggih, serta skala ekonomi yang lebih besar, sehingga meningkatkan daya saing global suatu negara atau daerah. Transformasi ekonomi ini terjadi ketika tenaga kerja dan sumber daya dialihkan dari sektor dengan produktivitas rendah (seperti pertanian tradisional) ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi, yaitu industri pengolahan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional juga mendorong perkembangan industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Temanggung.

3.1.6.3. PDRB per Kapita

PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten atau kota. Namun demikian PDRB Perkapita masih cukup relevan untuk menggambarkan apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.

Tabel 3. 5
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

Tahun	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2021	28.462.000	4,16
2022	30.837.000	8,34
2023	33.267.000	7,88

Tahun	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2024	35.500.000	6,71
2025	38.002.000	7,05

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2026

Nilai PDRB perkapita selalu naik hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/ dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada yang dimiliki/ dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2025 PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Menaikkan investasi berdasarkan potensi daerah sampai kepada komoditas;
- b. Meningkatkan program kewirausahaan/pengembangan UMKM/pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri maupun sektor penggerak perekonomian;
- d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan keterampilan; dan
- e. Meningkatkan produksi bagi sektor potensial daerah.

3.1.6.4. Inflasi

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Sejak tahun 2020 BPS hanya berwenang menghitung laju inflasi sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel, sedangkan Kabupaten Temanggung tidak masuk ke dalam daerah sampel sehingga angka inflasi Temanggung mengikuti inflasi Jawa Tengah. Mengukur inflasi di Kabupaten Temanggung, yang bukan merupakan

daerah survei biaya hidup (SBH) untuk perhitungan inflasi di Jawa Tengah, memerlukan pendekatan alternatif. Penghitungan inflasi Kabupaten Temanggung di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menggunakan angka inflasi Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penghitungan inflasi mulai tahun 2024 dan seterusnya menggunakan angka inflasi dari Kabupaten Wonosobo. Menggunakan data inflasi dari Kabupaten Wonosobo dapat menjadi proksi representatif untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Temanggung, mengingat kedua Kabupaten ini yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang serupa.

Tabel 3. 6
Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional

LOKASI	2023	2024	2025	2026*	2027*
Temanggung	2,89	1,52	2,64	1,50 – 2,50	1,50 – 2,50
Jawa Tengah	2,89	1,67	2,72	1,50 – 3,50	1,50 – 3,50
Nasional	2,61	1,57	2,92	1,50 – 3,50	1,50 – 3,50

Sumber : BPS , 2026
*proyeksi

Laju inflasi di Kabupaten Temanggung hingga tahun 2025 cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi salah satunya dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja. Pada tahun 2024 inflasi di Tingkat Kabupaten Temanggung, Provinsi dan Nasional mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2023. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.

Dengan mendasarkan atas data kondisi ekonomi Kabupaten Temanggung di atas, maka arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah Pengembangan Sektor Pertanian Dan Pariwisata Untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan. Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata dilakukan melalui :

1. Penguatan infrastruktur pertanian dan pariwisata melalui peningkatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang seperti jalan, irigasi dan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan;

2. Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya Lokal melalui pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pembinaan petani , pelaku UMKM, dan pelaku wisata secara profesional dan berkelanjutan; dan
4. Promosi dan Pemasaran Terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berupaya mendukung tema dan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2027 yaitu “Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi” melalui strategi :

1. Peningkatan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan konektivitas wilayah untuk mendukung sektor pariwisata;
2. Penataan dan pengembangan transportasi lokal untuk mendukung sektor pariwisata; dan
3. Pembentukan ekosistem ekonomi syariah yang dapat mendorong partisipasi pelaku usaha lokal dan UMKM berbasis nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Proses penyusunan RKPD dan APBD Tahun 2027 akan menjadi titik kritis (*critical juncture*) dalam sejarah reformasi pengelolaan keuangan daerah. Momentum ini adalah puncak dari sebuah proses transisi yang telah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Melalui regulasi ini, arah kebijakan fiskal daerah dirancang lebih disiplin dan berkualitas. Dua pasal yang menjadi perhatian utama adalah Pasal 146 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, serta Pasal 147 yang mewajibkan alokasi minimal 40 persen untuk belanja infrastruktur pelayanan publik sesuai kewenangan daerah, di luar bantuan keuangan. Pada angka-angka tersebut, tersirat filosofi mendasar tentang wajah pembangunan daerah yang dicita-citakan. Pembatasan belanja pegawai hingga 30 persen bukan bermaksud mengecilkan peran administrasi, melainkan sebuah upaya strategis untuk mengakhiri dominasi belanja rutin dan mendorong pergeseran menuju belanja yang bersifat produktif. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang ramping, efisien, dan berorientasi pada kinerja.

Keuangan daerah merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menggerakkan roda organisasi dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD yang menjadi pedoman utamanya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan, serta target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam hal ini, keuangan daerah berperan sebagai instrumen utama untuk merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendukung visi, misi, tujuan, isu strategis, permasalahan pembangunan serta pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dan tema tahunan untuk Tahun 2027 yaitu : Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata untuk mendukung ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan RKPD harus melibatkan proses perencanaan yang partisipatif dan berbasis pada analisis kapasitas fiskal, realistis dan sinkron dengan kemampuan keuangan daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya terencana secara baik, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal sesuai kemampuan keuangan yang tersedia. Sebaliknya, pengelolaan keuangan daerah melalui APBD harus mencerminkan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tepat dan efisien menjadi kunci keberhasilan implementasi program dan kegiatan pembangunan.

Pemenuhan belanja yang bersifat *mandatory* harus menjadi prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah, diantaranya : pendidikan minimal 20%, infrastruktur pelayanan publik minimal 40%, belanja pegawai maksimal 30%, pembangunan/ pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum minimal 10% dari PKB dan Opsen PKB, minimal 10% dari PBJT Tenaga Listrik untuk penyediaan penerangan jalan umum, minimal 50% Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum terkait pajak rokok, pendidikan dan pelatihan ASN guna pengembangan kompetensi minimal 0,16% dari total belanja daerah, dan minimal 0,5% untuk anggaran pengawasan di inspektorat untuk APBD di atas 2 Triliun.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kebutuhan pembahasan arah kebijakan keuangan daerah yakni untuk melihat penggunaan keuangan masa lalu dan proyeksi pada masa mendatang, sebagai pedoman arah kebijakan keuangan dan juga program prioritas yang akan dilakukan pada tahun berkenaan. Oleh karena itu, pembahasan pada sub bab ini mengarah pada dua pembahasan makro yakni terkait arah kebijakan pendapatan daerah dan arah kebijakan belanja daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi kondisi ekonomi makro secara nasional dan kebijakan fiskal nasional yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan alokasi dana transfer ke daerah serta kebijakan harga BBM. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola Pendapatan Asli Daerah agar lebih efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan SOP;
2. Menyusun kajian potensi pendapatan asli daerah
3. Meningkatkan target pendapatan dengan menggali dan mengembangkan potensi dan pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta komponen pendapatan asli daerah lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi;
5. Melakukan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
6. Optimalisasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
7. Meningkatkan pengelolaan piutang daerah
8. Menegakkan Peraturan Daerah tentang PDRD;
9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan pendapatan asli daerah;

10. Sosialisasi kepada Subjek Pajak dan Retribusi dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pajak dan retribusi serta meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
11. Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tidak menambah beban Wajib Pajak
12. Meningkatkan pemanfaatan dan pengawasan asset daerah;
13. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
14. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
15. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, baik petugas pemungut maupun pengelola PAD, melalui pelatihan dan pendampingan.
16. Meningkatkan kemandirian daerah dengan peningkatan PAD melalui optimalisasi pendapatan dari opsen PKB dan opsen BBNKB dengan melakukan kerjasama dan koordinasi intensif dengan upaya, diantaranya :
 - Membentuk tim sinergitas pendapatan opsen kabupaten Temanggung dengan 3 pilar utama kepolisian, BPKPAD dan UPPD;
 - Melaksanakan program sengkuyung (pendataan piutang) mulai tahun 2024;
 - Melaksanakan kegiatan gerakan disiplin pajak untuk rakyat (gadis pantura) yang meliputi pengecekan kewajiban pajak kendaraan di Perangkat Daerah dan BUMD;
 - Melaksanakan kegiatan operasi gabungan di ruas jalan protokol kabupaten dan tempat strategis melibatkan kepolisian berupa pengecekan pajak kendaraan dan kelengkapan berkendara;
 - Melaksanakan penatausahaan dan rekonsiliasi pendapatan dengan UPPD Kabupaten Temanggung secara periodik;
 - Melaksanakan kegiatan *Government Auto Show* di Kabupaten Temanggung;
 - Penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dan UPPD Temanggung dalam percepatan penanganan piutang;
 - Berkordinasi terkait kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas/plat merah, dan jika ditemukan kendaraan plat merah

tersebut dalam kondisi tidak layak digunakan maka akan kita usulkan untuk mencabut registrasinya dengan melakukan kordinasi bersama UPPD Temanggung sehingga tidak dianggap sebagai data potensi kedepannya;

- Kegiatan gerakan disiplin pajak untuk rakyat bersama UPPD Temanggung harapan kami mampu meminimalisir kendaraan dinas yang belum membayar pajak dengan mengunjungi Perangkat Daerah dan melakukan sidak ditempat.

Perbandingan Pendapatan daerah Kabupaten Temanggung berupa realisasi dari Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun anggaran 2025, Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2026 dan Proyeksi Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 7
Realisasi Pendapatan 2021-2026, dan Proyeksi Pendapatan 2027 Kabupaten Temanggung

URAIAN			TAHUN ANGGARAN					PROYEKSI 2027	
			REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025		APBD 2026
PENDAPATAN DAERAH			1.971.005.990.029	1.915.197.142.714	2.003.870.332.664	2.101.479.855.788	1.917.280.341.340,00	1.883.601.918.712,00	1.913.575.369.463
1	Pendapatan Asli Daerah		363.128.342.571	308.693.982.914	350.283.014.437	388.858.102.726	439.351.499.834,00	416.593.288.775,00	431.566.739.526
	a.	Pajak Daerah	52.832.020.942	74.191.559.232	79.677.967.921	76.926.746.042	135.839.678.413,00	139.968.634.896,00	143.568.034.896
	b.	Retribusi Daerah	9.400.033.763	9.643.158.066	11.496.721.044	10.925.370.668	222.787.513.581,00	243.212.775.891,00	225.281.403.256
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.633.082.917	21.426.146.839	21.311.076.903	22.645.578.254	23.153.792.414,00	22.685.506.988,00	22.776.616.803
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	281.263.204.949	203.433.118.777	237.797.248.569	278.360.407.762	57.570.515.426,00	10.726.371.000,00	39.940.684.571
2	Pendapatan Transfer		1.537.846.595.458	1.585.778.027.969	1.653.587.318.227	1.710.621.753.062	1.477.928.841.506,00	1.467.008.629.937,00	1.482.008.629.937
	a.	Transfer Pemerintah Pusat	1.385.928.637.379	1.472.041.917.200	1.517.163.835.087	1.525.673.694.150	1.391.501.867.970,00	1.385.694.300.000,00	1.400.694.300.000
		1) Dana Insentif Daerah	17.149.213.000	2.438.134.000	29.383.259.000	0	0	0	0
		2) Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0
		3) Dana Keistimewaan	0	0	0	0	0	0	0
		4) Dana Desa	247.881.825.000	245.879.771.000	242.462.582.000	246.690.892.000	209.995.681.594,00	205.149.783.000,00	205.149.783.000
		5) Insentif Fiskal				28.501.104.000	9.002.280.000,00	0	0
		6) DBH	66.832.564.275	50.975.465.200	75.150.038.079	69.727.710.589	66.416.019.440,00	34.918.875.000,00	34.918.875.000
		7) DAU	753.140.119.000	753.174.275.000	791.039.886.585	843.895.369.956	822.853.104.127,00	833.762.700.000,00	835.558.578.000
		8) DAK	300.924.916.104	419.574.272.000	379.128.069.423	336.858.617.605	283.234.782.809,00	311.862.942.000,00	311.862.942.000
		a) DAK Fisik	131.534.286.845	153.727.447.000	109.544.079.906	67.587.633.850	39.043.735.581,00	26.371.750.000,00	26.371.750.000
		b) DAK Non Fisik	169.390.629.259	265.846.825.000	269.583.989.517	269.270.983.755	244.191.047.228,00	285.491.192.000,00	285.491.192.000
	b.	Transfer antar Daerah	151.917.958.079	136.990.809.634	136.423.483.140	184.948.058.912	86.426.973.536,00	81.314.329.937,00	81.314.329.937
		1) Pendapatan Bagi Hasil	114.087.366.818	117.486.242.600	123.749.375.637	125.426.694.912	76.688.377.736,00	81.314.329.937,00	81.314.329.937
		2) Bantuan Keuangan	37.830.591.261	15.975.000.000	12.674.107.503	59.521.364.000	9.738.595.800,00	0	0

URAIAN			TAHUN ANGGARAN					PROYEKSI 2027	
			REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025		APBD 2026
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		70.031.052.000	1.000.000.000	0	0		0	39.940.684.571
	a.	Hibah	571.300.000	1.000.000.000	0	0	0	0	0
	b.	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0
	c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	69.459.752.000	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Dari gambar 3.7 terlihat bahwa pendapatan transfer memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan daerah yaitu rata-rata sebesar 80,72%, kemudian dari sektor PAD rata-rata sebesar 18,20% dan sisanya berupa Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 1,08%. Pada tahun 2025 realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan, baik di sektor Pendapatan Asli Daerah maupun dari sektor Pendapatan Transfer. Peningkatan yang tinggi pada proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2025 di komponen pajak daerah adalah adanya pendapatan opsen PKB dan opsen BBNKB. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Sedangkan peningkatan sektor Retribusi Daerah disebabkan pengalihan pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan BLUD yang semula pada rekening Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke rekening Retribusi Daerah.

Penurunan target tahun 2027 dibanding realisasi tahun 2025 dikarenakan pemasangan target BPHTB yang biasanya dapat diketahui potensi transaksi bernilai besar pada tahun berjalan, sehingga tahun 2025 target dinaikan saat APBD perubahan, meskipun tidak tercapai 100% namun telah mendekati perhitungan potensi, hal ini disebabkan karena objek pajak yang berpotensi batal transaksi di tahun 2025 atau wajib pajak menunda pembayaran dokumen yang telah terverifikasi. Dasar Perhitungan Penurunan Target Pendapatan Tahun 2027 adalah dengan menghitung rata-rata realisasi pendapatan setiap bulan, dari setiap mata pajak dan retribusi yang dihitung selama jangka waktu 3 tahun terakhir.

3.2.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Pengelolaan belanja daerah pada tahun 2027 akan dilaksanakan secara proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Adapun Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2027 diarahkan pada prioritas sebagai berikut :

- a. Belanja daerah diprioritaskan pada pos belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- b. Kebijakan Belanja diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), berupa :
 - 1) Belanja pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dari total belanja daerah, berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49);
 - 2) Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa, berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024;
 - 3) Belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk TPG, TKG, Tamsil Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya;

- 4) paling rendah 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PKB dan Opsen PKB digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
- 5) paling rendah 10% (sepuluh persen) dari penerimaan penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum, pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha;
- 6) paling rendah 50% (lima puluh persen) Pajak Rokok bagian kabupaten untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok;
- 7) paling rendah 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Pajak Air Tanah digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi : penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur serapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah;
- 8) mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi;
- 9) Pemerintah Kabupaten/kota yang APBD-nya diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), tidak termasuk gaji dan tunjangan, serta TPP ASN pada SKPD inspektorat. Adapun pemenuhan *mandatory spending* untuk 2026 adalah

sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 8
Komposisi Anggaran untuk pemenuhan *Mandatory Spending*

No	Unsur Mandatory	Minimal	Posisi 2026	Keterangan
1	Pendidikan	20%	29,74%	Terpenuhi
2	Infrastruktur	40%	31,68%	Belum Terpenuhi
3	Belanja Pegawai	Max 30%	33,69 %	Belum Terpenuhi
4	Jalan dari Opsen PKB	10%	13,62%	Terpenuhi
5	PPJU dari PBJT Listrik	10%	36,05%	Terpenuhi
6	Pelkes dr Pajak Rokok	50%	50%	Terpenuhi
7	Diklat ASN	0,10%	0%	Belum Terpenuhi
8	Pengawasan	0,50%	0,72%	Terpenuhi

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

- c. Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri dari 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pemenuhan program prioritas bupati yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029;
- e. Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah;
- f. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN)
- g. Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dalam mendukung pencapaian keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*benefit/impact*) pembangunan daerah;
- h. Melakukan perbaikan tata kelola dan penguatan disiplin belanja daerah dalam APBD yakni penyusunan belanja daerah berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja.
- i. Optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis kinerja.

Anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025, Anggaran Belanja Tahun 2026, dan proyeksi Belanja Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 9
Target dan Realisasi Tahun 2023-2025, APBD 2026 dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027

URAIAN			TAHUN ANGGARAN							PROYEKSI 2027
			2023		2024		2025		2026	
ANGGARAN			REALISASI		ANGGARAN		REALISASI		APBD	
BELANJA DAERAH			2.156.455.999.239	2.042.295.812.083	2.150.008.472.410	2.082.224.159.824	2.124.690.575.218	1.904.863.599.974	2.091.301.918.712	2.076.034.585.664
1	Belanja Operasi		1.545.029.674.070	1.460.421.030.081	1.565.313.945.783	1.512.987.691.753	1.595.817.398.614	1.442.464.681.531	1.483.116.018.014	1.473.015.857.315
	a.	Belanja Pegawai	803.840.649.421	889.665.000.241	851.323.591.147	835.414.435.528	977.338.529.883	902.974.638.901	863.576.794.628	824.899.108.405
	b.	Belanja Barang dan Jasa	584.018.730.999	500.030.196.074	589.905.506.383	555.355.516.548	489.112.324.831	448.115.305.283	525.232.012.886	556.934.269.750
	c.	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0	0
	d.	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
	e.	Belanja Hibah	152.954.275.650	147.097.157.985	113.120.840.253	111.467.431.677	125.467.412.900	88.157.994.847	88.464.079.500	84.234.093.660
	f.	Belanja Bantuan Sosial	4.216.018.000	12.772.580.000	10.964.008.000	10.750.308.000	3.899.131.000	3.216.742.500	5.843.131.000	6.948.385.500
2	Belanja Modal		202.902.736.362	174.714.127.567	178.154.179.502	164.561.497.546	133.570.669.730	90.927.981.288	235.088.421.251	232.726.377.493
	a.	Tanah	1.028.850.000	0	0	0	0	0	160.000.000	0
	b.	Peralatan dan Mesin	61.726.992.797	39.043.136.469	84.985.660.884	77.286.656.183	63.172.098.728	54.325.324.635	13.637.457.697	39.401.502.279
	c.	Bangunan dan Gedung	54.577.028.997	46.317.439.145	40.775.159.380	37.465.772.157	14.970.671.400	5.584.442.140	181.729.293.554	122.078.291.714
	d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.837.411.000	28.446.629.250	44.433.046.542	41.954.115.310	50.360.754.000	29.184.507.901	34.561.670.000	63.585.194.500
	e.	Aset tetap lainnya	7.691.853.568	3.279.550.391	7.892.317.696	7.796.173.009	4.971.395.602	1.829.706.612	5.000.000.000	7.657.389.000
	f.	Aset lainnya	40.600.000	97.150.000	67.995.000	58.780.887	95.750.000	4.000.000	0	4.000.000
3	Belanja Tidak Terduga		800.000.000	-	1.150.000.000	-	1.000.000.000	0	1.598.339.000	1.198.339.000
4	Belanja Transfer		397.911.846.807	407.160.654.435	397.781.031.125	404.674.970.525	394.302.506.874	371.470.937.155	371.499.140.447	372.482.540.447
	a.	Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000	14.988.600.364	8.777.498.770	8.753.922.170		13.659.810.224	15.076.916.490	15.452.741.490
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	389.914.042.807	392.152.666.000	389.003.532.355	395.921.048.355	8.800.736.874	357.811.126.931	356.422.223.957	353.241.270.366

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbandingan data anggaran dengan realisasi belanja daerah Tahun 2023-2025. Realisasi belanja mengalami kenaikan setiap tahunnya. Proyeksi belanja Tahun 2027 terbesar pada belanja operasi di mana belanja pegawai menjadi salah satu penyebabnya. Besaran proyeksi belanja pegawai terhadap total belanja operasi tahun 2027 sebesar 58,57 %. Belanja transfer juga mengalami kenaikan karena penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2.2.1. Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Persentase realisasi belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Temanggung dari tahun 2021–2025, anggaran belanja operasi tahun 2026 dan proyeksi tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 10
Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Persentase
2023	1.460.421.030.081	2.042.295.812.083	71,51
2024	1.565.313.945.783	2.042.295.812.083	76,64
2025	1.595.817.398.614	2.124.690.575.218	75,11
2026	1.483.116.018.014	2.091.301.918.712	70,92
2027	1.473.015.857.315	2.076.034.585.664	70,95

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Proporsi belanja operasional Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah selama tahun 2023 s.d 2027 rata-rata adalah 73,03%. Persentase belanja operasi tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2024 yaitu sebesar 76,64% dan terendah pada tahun 2026 yaitu sebesar 70,92%.

3.2.2.2. Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Tabel 3. 11
Persentase Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase
2023	174.714.127.567	2.042.295.812.083	8,55
2024	164.561.497.546	2.042.295.812.083	8,06
2025	133.570.669.730	2.124.690.575.218	6,29
2026	235.088.421.251	2.091.301.918.712	11,24
2027	232.726.377.493	2.076.034.585.664	11,21

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Proporsi belanja modal Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata- rata sebesar 9,07%. Persentase belanja modal tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2026 yaitu sebesar 11,24 % dan terendah pada tahun 2025 yaitu sebesar 6,29 %.

3.2.2.3. Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 3. 12
Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Transfer	Belanja Daerah	Persentase
2023	407.160.654.435	2.042.295.812.083	19,94
2024	404.674.970.525	2.042.295.812.083	19,81
2025	394.302.506.874	2.124.690.575.218	18,56
2026	371.499.140.447	2.091.301.918.712	17,76
2027	372.482.540.447	2.076.034.585.664	17,94

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Proporsi belanja transfer Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata-rata sebesar 18,80%. Persentase belanja transfer tertinggi selama lima tahun terakhir adalah tahun 2023 yaitu sebesar 19,94% dan terendah pada tahun 2026 yaitu sebesar 17,76%.

3.2.2.4. Persentase Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3. 13
Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Tidak Terduga	Belanja Daerah	Persentase
2023	-	2.042.295.812.083	0,00
2024	-	2.042.295.812.083	0,00
2025	1.000.000.000	2.124.690.575.218	0,05
2026	1.598.339.000	2.091.301.918.712	0,08
2027	1.198.339.000	2.076.034.585.664	0,06

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Proporsi belanja tidak terduga Kabupaten Temanggung terhadap Belanja Daerah mencapai rata-rata sebesar 0,04%.

3.2.2.5. Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja Seluruh Perangkat Daerah

Konsistensi rencana belanja daerah dengan total belanja seluruh perangkat daerah adalah konsistensi antara belanja pada dokumen RKPD dengan total belanja yang ada di APBD.

Tabel 3. 14
Konsistensi Rencana Belanja Daerah dengan Total Belanja

Tahun	Rencana Belanja (RKPD)	Total Belanja (ABPD)	Persentase
2023	2.486.811.750.195	2.024.952.814.557	81,43
2024	2.504.411.660.270	2.098.911.972.717	83,81
2025	2.076.390.105.919	2.124.690.575.218	100,00
2026	2.330.929.130.615	2.091.301.918.712	89,72
2027	2.063.517.369.250	2.076.034.585.664	100

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Pada tahun 2023, tingkat konsistensi mencapai 81,43%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar rencana belanja dalam RKPD telah terakomodir dalam APBD, meskipun masih terdapat selisih yang cukup signifikan. Kondisi ini sedikit membaik pada tahun 2024 dengan persentase 83,81%, mencerminkan adanya upaya peningkatan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.

Pada tahun 2025, konsistensi mencapai 100%, yang berarti seluruh rencana belanja dalam RKPD selaras dengan total belanja dalam APBD. Hal ini menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang sangat baik.

Namun demikian, pada tahun 2026 tingkat konsistensi kembali menurun menjadi 89,72%. Meskipun masih tergolong tinggi, penurunan ini mengindikasikan adanya perbedaan antara rencana dan penganggaran yang perlu menjadi perhatian, baik dari sisi perencanaan program maupun penyesuaian kebijakan fiskal.

Sementara itu, tahun 2027 konsistensi mencapai 100%, yang berarti seluruh rencana belanja dalam RKPD selaras dengan total belanja dalam APBD. Hal ini menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang sangat baik.

3.2.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

3.2.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2027 adalah sebagai berikut.

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
2. Penerimaan pinjaman daerah dilakukan manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman ini dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Penerimaan Pembiayaan ini dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

3.2.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dilakukan dalam rangka mempersiapkan pemilukada (sesuai RPJMD).

2. Penyertaan modal pemerintah daerah;

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;

3. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

Merupakan pengeluaran pembiayaan berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pembiayaan Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2027 Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 15
Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2021 s.d 2025, Anggaran Pembiayaan Tahun 2026 dan Proyeksi 2027 Kabupaten Temanggung

URAIAN			TAHUN ANGGARAN					PROYEKSI 2027	
			REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025		APBD 2026
PEMBIAYAAN DAERAH			161.211.637.352	243.671.402.772	180.203.716.352	137.543.103.766	99.628.418.838	207.700.000.000	157.283.485.589
1	Penerimaan Pembiayaan		162.455.516.962	254.301.081.892	182.011.130.352	137.543.103.766	99.628.418.838	207.700.000.000	183.783.485.589
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	162.448.209.105	254.248.460.087	180.406.907.044	134.088.073.766	99.533.115.228	77.700.000.000	183.783.485.589
	b.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	7.307.857,00	52.621.805	59.253.308	0	95.303.610	0	0
	c.	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0
	d.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	1.544.970.000	3.455.030.000	0	130.000.000.000,00	0
2	Pengeluaran Pembiayaan		1.243.879.610	10.629.679.120	1.807.414.000	0	68.249.999.994	0	26.500.000.000
	a.	Pembentukan Dana Cadangan	0	5.000.000.000	0	0	68.249.999.994	0	10.000.000.000
	b.	Penyertaan Modal Daerah	0	0	1.807.414.000	0	0	0	5.000.000.000
	c.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.243.879.610	5.629.679.120	0	0	0	0	11.500.000.000
PEMBIAYAAN NETTO			161.211.637.352	243.671.402.772	180.203.716.352	137.543.103.766	31.378.418.844	207.700.000.000	157.283.485.589

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa proyeksi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2027 proyeksi besaran SiLPA tahun sebelumnya adalah sebesar Rp.183.783.485.589,00 atau lebih kecil dibandingkan besaran SiLPA pada APBD Tahun Anggaran 2026. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 26.500.000.000,00 terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pembentukan Dana Cadangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Informasi dan data sebagai suatu sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah tertuang dan telah dilaksanakan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Kerangka pendanaan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 16
Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2027

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2027
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.913.575.369.463
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	431.566.739.526
4.1.01	Pajak Daerah	143.568.034.896
4.1.02	Retribusi Daerah	225.281.403.256
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.776.616.803
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	39.940.684.571
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.482.008.629.937
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.400.694.300.000
4.2.01.05	Dana Desa	205.149.783.000
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	34.918.875.000
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	835.558.578.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	311.862.942.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.314.329.937
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	81.314.329.937
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.913.575.369.463
5	BELANJA DAERAH	2.076.034.585.664
5.1	BELANJA OPERASI	1.473.015.857.315
5.1.01	Belanja Pegawai	824.899.108.405
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.934.269.750
5.1.05	Belanja Hibah	84.234.093.660
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.948.385.500
5.2	BELANJA MODAL	232.726.377.493

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2027
1	2	3
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.401.502.279
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.078.291.714
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.585.194.500
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.657.389.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.598.339.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.598.339.000
5.4	BELANJA TRANSFER	368.694.011.856
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.452.741.490
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	353.241.270.366
	Jumlah Belanja	2.076.034.585.664
	Total Surplus/(Defisit)	(162.459.216.201)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	157.283.485.589
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	183.783.485.589
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	183.783.485.589
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.500.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah	5.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.500.000.000
	Pembiayaan Netto	157.283.485.589
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-5.175.730.612
	TOTAL APBD	2.097.358.855.052

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2026

3.3. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan prestasi yang bagus karena memperoleh WTP sebanyak 15 kali pada tahun 2012-2026.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Visi dan misi ini telah disampaikan dalam masa kampanye yang kemudian menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Visi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah:

Temanggung untuk Semua
(Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman)

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Sejahtera : Masyarakat yang sehat, terpelajar dan berkecukupan
- Berkelanjutan : Pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial
- Mudah : Kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital
- Inklusif : Komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya pembangunan
- Aman : Terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan

Visi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Misi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal

ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

3. Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Kesehatan

Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan

Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif

Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya telah dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan ditingkat nasional, provinsi maupun daerah. Sinkronisasi Visi dan Misi Kabupaten Temanggung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Nasional dan Provinsi Tahun 2025-2029 terdapat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Sinkronisasi Visi dan Misi RPJP/RPJM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	RPJM Nasional 2025-2029	RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029	RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045	RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
Visi	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan	Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang Maju, Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045	Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera pada Tahun 2045	TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman)
Misi	1. Transformasi Sosial	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1. Transformasi Sosial	1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif, dan berwawasan global	1. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya	1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas
	2. Transformasi Ekonomi	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Transformasi Ekonomi	2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan	2. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas	2. Diversifikasi perekonomian untuk penghidupan yang stabil
	3. Transformasi Tata Kelola	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	3. Transformasi Tata Kelola	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas	3. Mewujudkan lingkungan yang memiliki daya dukung memadai, berketahanan dan berkelanjutan	3. Pemberdayaan melalui pendidikan dan kesehatan

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	RPJM Nasional 2025-2029	RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029	RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045	RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
	4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	4. Mewujudkan perekonomian yang produktif, adaptif dan berdaya saing	4. Mempromosikan kelestarian lingkungan
	5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	5. Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	5. Mengembangkan pemanfaatan kemajuan teknologi digital dan peningkatan konektivitas wilayah	5. Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif
	6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	6. Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan	6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.	6. Mewujudkan masyarakat sejahtera	

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	RPJM Nasional 2025-2029	RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029	RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045	RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
	7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkobo, judi dan penyelundupan	7. Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan			
	8. Kestinambungan Pembangunan	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	8. Kestinambungan Pembangunan			

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SERTA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Perumusan **tujuan** pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, yaitu **Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman**. Guna mengetahui pencapaian tujuan pembangunan daerah digunakan indikator kinerja yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sebagai keberhasilan masyarakat sejahtera, indek kepuasan masyarakat sebagai keberhasilan kelestarian lingkungan, keberhasilan kemudahan akses infrastruktur, pelayanan publik, partisipasi, kesetaraan dan rasa aman.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ditetapkan **sasaran** pembangunan daerah yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

Dalam rangka menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan peningkatan produktivitas sektor PDRB, perwujudan stabilitas ekonomi daerah dan perwujudan ketahanan pangan. Selain itu juga menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan dengan mengedepankan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesehatan), penurunan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan budi pekerti dan keagamaan. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia.

2. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan

Dalam rangka melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, meningkatkan kesehatan masyarakat, keberlanjutan pembangunan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berketahanan iklim, dan penurunan resiko bencana. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup.

3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta menjamin keadilan sosial dengan mengedepankan pemerataan kualitas infrastruktur di perkotaan, perdesaan dan kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyelenggaraan konektivitas wilayah serta penataan ruang kewilayahan yang berkualitas. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing. Selain itu juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan peningkatan reformasi birokrasi, perwujudan kohesi sosial, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan peningkatan profesionalitas ASN. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing, indeks reformasi birokrasi dan indeks integritas nasional.

4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi maka dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, selain itu juga pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pemenuhan hak anak. Indeks gini memperlihatkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan yang berhasil bisa dikatakan apabila sebagian besar masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan secara merata atau ketimpangan minimal. Keberhasilan

pencapaian diukur dengan indikator indeks pembangunan gender dan indeks gini.

5. Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya

Kondisi dimana masyarakat tanpa rasa takut atau khawatir dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perlindungan rasa aman melibatkan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindakan kriminal, yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks harmoni.

Berdasarkan penjelasan masing-masing tujuan dan sasaran, maka disajikan keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah diukur dengan indikator tujuan dan sasaran, dimana untuk target indikator kinerja RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 mempertimbangkan proyeksi target dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 untuk tahun 2027 yang secara rinci dijabarkan pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027
Visi: TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman) Misi: 1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas 2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang yang Stabil 3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan 4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan 5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif	Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman		Pertumbuhan Ekonomi	%	6,10 – 7,30
			Tingkat Kemiskinan	%	7,00 – 6,78
			Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	88,17
		1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	PDRB Perkapita (Rupiah)	juta rupiah	41,47
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,18 – 1,88
			Indeks Pembangunan Manusia	angka	73,98
		2. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	75,54
		3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	75,88
			Indeks Integritas Nasional	angka	79,35
			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,33
		4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	angka	0,360-0,357
			Indeks Pembangunan Gender	angka	97,37
		5. Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	angka	6,86

Sumber: RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Penetapan Target Indikator Makro Pembangunan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Adapun penyelarasan target indikator makro pembangunan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 3
Kesesuaian Penetapan Target Indikator Makro Pembangunan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target Provinsi Sesuai RKP	Target RKPD Provinsi	Target Kabupaten Temanggung pada RKPD Provinsi	Target RKPD Kabupaten Temanggung
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,30-7,40	5,60 -7,40	6,10 – 7,30	6,10 – 7,30
2	PDRB Per Kapita	Rp		56,0 – 59,8		41,47
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Rp		8,00		
4	Tingkat Kemiskinan	%	7,50 - 8,50	8,50 – 7,50	7,00 – 6,78	7,00 – 6,78
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,08 - 4,42	4,42 – 4,08	2,18 – 1,88	2,18 – 1,88
6	Rasio Gini	Rasio	0,350– 0,358	0,358– 0,363		0,360-0,357
7	Indeks Pembangunan Manusia* (Indeks Modal Manusia)	Angka	0,628-0,643	0,63	73,98	73,98
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%		6,69		73,72
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks		75,78		75,54

Sumber: RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Penetapan Indikator Utama Pembangunan (IUP) adalah sebagai alat ukur pencapaian kinerja pembangunan jangka panjang daerah, yang ditetapkan selaras dengan ssaran pokok dan arah pembangunan. Penetapan IUP kabupaten/kota merujuk pada indikator hasil penyelarasan dengan IUP RPJPD Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan analisis masing-masing kabupaten/kota dalam rangka mengukur pencapaian kinerja pembangunan daerah. Persandingan Keselarasan IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dengan RKP Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 4
Persandingan Keselarasan IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dengan RKP Tahun 2027 dan
RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2027 RKPD Kabupaten Temanggung
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	
I	Transformasi Sosial	1	Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	4. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	76,84
				2. Kesehatan Ibu dan anak:	2. Kesehatan Ibu dan Anak		
				a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	5. Jumlah kematian ibu (kasus)	5
				b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	6. Prevalensi Stunting (%)	22,2
				3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3. Insidensi Tuberkulosis		
					a) Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	7. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	74
					b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	8. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	88
				4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	9. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96
		2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil Pembelajaran	5. Hasil Pembelajaran		
				a) Rata-rata nilai PISA	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	10. Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Nasional (Seluruh Jenjang) (%) :	
				a-i Membaca	i) literasi membaca (%)	Literasi SD/Sederajat (%)	78,35
				a-ii Matematika	ii) numerasi (%)	Literasi SMP/Sederajat (%)	78,14
				a-iii Sains		Numerasi SD/Sederajat (%)	72,79
						Numerasi SMP/Sederajat (%)	73,36
				b) Rata-rata nilai asesmen nasional	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	15. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan	100

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2027
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	RKPD Kabupaten Temanggung
						mengarusutamakan kebudayaan (%)	
				b-i Literasi Membaca	i) literasi membaca (%)	19. Tingkat pemanfaatan perpustakaan (angka)	0,25
				b-ii Numerasi	ii) numerasi (%)		
				c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	c) Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun (tahun)	8,09
				d) Harapan Lama Sekolah	d) Harapan Lama Sekolah	12. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,43
						14. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	96,16
				6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (%)	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	13. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	6,76
				7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
		3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	8. Tingkat Kemiskinan (%)	1. Tingkat Kemiskinan (%)	7,4-7,5
						56. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	21,37
				9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	38. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	63,45
				10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	-	Tidak ada
II	Transformasi Ekonomi	4	IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Produktivitas Industri dan Pertanian	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	23. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	27,8
				a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)			

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan	Indikator			Target Tahun 2027 RKPD Kabupaten Temanggung
			IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	
			b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)			
			12) Pengembangan Pariwisata	12. Pengembangan Pariwisata		
			a) Rasio PDB Pariwisata (%)	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (%)	24. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,93
			b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	25. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	95
			13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	18. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%)	51,82
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	a) i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi		
				ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi		
			b) Rasio Kewirausahaan (%)	b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	26. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,28
			c) Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	27. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	1,89
			d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	d) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	28. Return on Asset (RoA) BUMD (%)	4,29
			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
			a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	36. Tingkat Pengangguran Terbuka (angka)	2,18 - 1,88
			b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)		
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	37. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	70,17

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan	Indikator			Target Tahun 2027 RKPD Kabupaten Temanggung
			IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	
			17. Tingkat Penguasaan IPTEK	17. Tingkat Penguasaan IPTEK		
			a) Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% PDB)	- Kapabilitas Inovasi (Angka)	34. Kapabilitas Inovasi (Angka)	2,7
			b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)			
		5	Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
			a) Indeks Ekonomi Hijau	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Angka)		
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
		6	Transformasi Digital	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Angka)	39. Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	92
		7	Integrasi Ekonomi Domestik & Global	20. Biaya Logistik (% PDB)	29. Disparitas Harga (%)	±10
				21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	18,4
				22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	
		8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		
			a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	55. PDRB Per Kapita (juta rupiah)	41,47
			b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	40. Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak (%)	96,49

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2027 RKPD Kabupaten Temanggung
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	
				c) Persentase Desa Mandiri (%)	c) Persentase Desa Mandiri (%)	35. Persentase desa mandiri (%)	43,23
					d) Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap (%)	41. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	43,48
					e) Indeks Pelayanan Transportasi (Angka)	42. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	43,48
					f) Persentase keterwujudan penataan ruang (%)		
III	Transformasi Tata Kelola	9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	24. Indeks Reformasi Hukum (Angka)	51. Indeks Reformasi Hukum (Angka)	97,18
				25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Angka)	52. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (nilai)	3,8
				26. Indeks Pelayanan Publik	26. Indeks Pelayanan Publik	53. Indeks Pelayanan Publik (angka)	3,9
						50. Indeks Reformasi Birokrasi (angka)	86,33
				27. Anti Korupsi	27. Anti Korupsi		
				a) Indeks Integritas Nasional	a) Indeks Integritas Nasional	54. Indeks Integritas Nasional (angka)	79,35
				b) Indeks Persepsi Korupsi			
IV	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	10	Hukum Berkeadilan dan Keamanan Nasional	28. Indeks Pembangunan Hukum	28. Indeks Pembangunan Hukum - Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (Angka)		
				29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2027 RKPD Kabupaten Temanggung
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	
		11	Tangguh, dan Demokrasi Substansial	30. Indeks Demokrasi Indonesia	30. Indeks Demokrasi Indonesia		
		12	Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,46
				32. Tingkat Inflasi (%)	32. Tingkat Inflasi (%)	Tingkat Inflasi (%)	1,50 - 2,50
				33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
				a) Aset Perbankan/PDB (%)	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	32. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	2,77
				b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)		
				c) Aset Asuransi /PDB (%)	c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)		
				d) Kapitalisasi Pasar Modal /PDB (%)	d) Total Kredit/PDRB (%)	33. Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	2,29
				e) Total Kredit /PDB (%)			
				34. Inklusi Keuangan (%)	34. Inklusi Keuangan (%)		
		13	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35. Asia Power Index (Diplomatic Influence)	35. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Kategori)		
				36. Asia Power Index (Military Capability)	36. Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah (Kategori)		
V	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	14	Beragama Masalahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	16. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan (%)	22,72
						17. Jumlah pengunjung tempat bersejarah (orang)	31,191
				38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	20. Jumlah kejadian konflik SARA (kejadian)	8
		15	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Angka)	21. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (angka)	65,6

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2027 RKPD Kabupaten Temanggung
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	
			Gender, dan Masyarakat Inklusif				
				40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	40. Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	22. Indeks Ketimpangan Gender (angka)	0,191
		15	Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)		
				42. Kualitas Lingkungan Hidup	42. Kualitas Lingkungan Hidup		
				a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Angka)	46. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka)	75,54
				a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	43. Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	18,06
				a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	c) Pengelolaan Sampah		
				a.iv. Indeks Kualitas Air Laur (IKAL)	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	47. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (%)	34,94
				b) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)		
				c) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)			
		16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju Kedaulatan Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
				i. Ketahanan energi	a) Ketahanan Energi		
				- Indeks Ketahanan Energi	- Konsumsi Listrik (kWh)		
					- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)		
					b) Kemandirian pangan		
				ii. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	- Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	8,88

No	Agenda / Misi Pembangunan	Arah Pembangunan		Indikator			Target Tahun 2027
				IUP RKP Tahun 2027	IUP RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	IUP RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	RKPD Kabupaten Temanggung
					- Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	3. Indeks Ketahanan Pangan (%)	79,9
				iii. Ketahanan air	c) Ketahanan Air		
				- Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)		
				- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	- Akses rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	44. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	35,62
					- Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampungan Air Kewenangan Provinsi (Angka)		
					- Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi (%)	45. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (angka)	59,77
					- Persentasi Sungai Kondisi baik Kewenangan Provinsi (%)		
		17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	44. Indeks Risiko Bencana (Angka)	48. Indeks Risiko Bencana (angka)	97,93
				45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	45. Persentase Penurunan Emisi GRK	49. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (TonCO2eq)	1.464.403,55
				a. Kumulatif	a. Kumulatif (%)		
				b. Tahunan	b. Tahunan (%)		

Sumber: RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045.

Berdasarkan tabel 4.4, Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 sudah selaras dengan IUP pada RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 karena telah mengacu pada SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

4.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, maka dirumuskan penyesuaian strategi dan arah kebijakan pada tiap tahun dalam periode tersebut. Strategi untuk mencapai misi dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan misi **Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas**, adalah:
 - a. Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan
 - b. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah
2. Strategi untuk mewujudkan misi **Diversifikasi Perekonomian Untuk Penghidupan yang Stabil**, adalah:
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian
 - b. Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian
3. Strategi untuk mewujudkan misi **Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan**, adalah:
 - a. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan
 - b. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan kesehatan
 - c. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat
 - d. Peningkatan daya saing pemuda dan olah raga
 - e. Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin
 - f. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin
 - g. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin
 - h. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak
 - i. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 - j. Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, agama dan keluarga berencana)
4. Strategi untuk mewujudkan misi **Mempromosikan Kelestarian Lingkungan**, adalah meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap iklim dan bencana.
5. Strategi untuk mewujudkan misi **Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif**, adalah:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi

- b. Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat
- c. Peningkatan keterbukaan informasi publik
- d. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik
- e. Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi
- f. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik
- g. Peningkatan pendapatan asli daerah
- h. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
- i. Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN
- j. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah

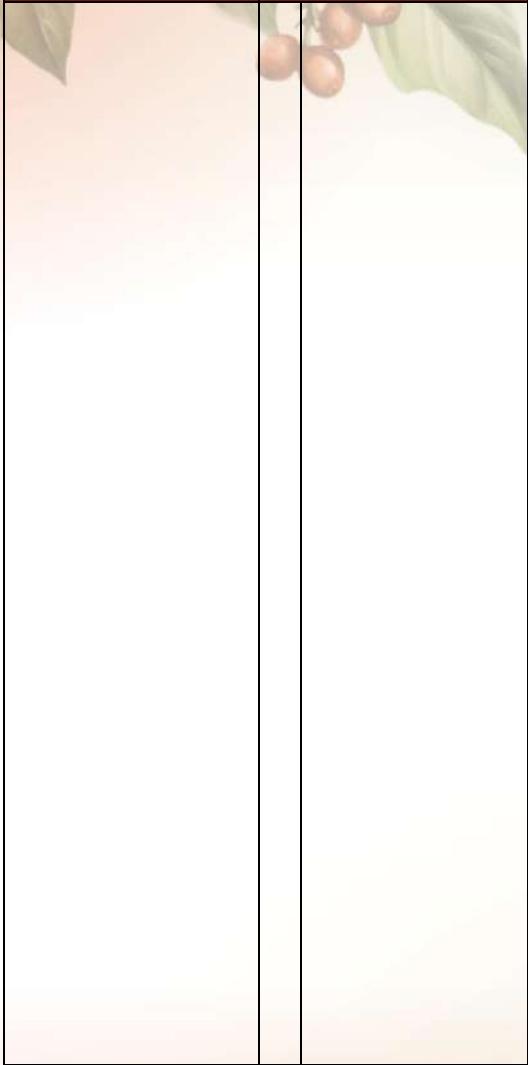
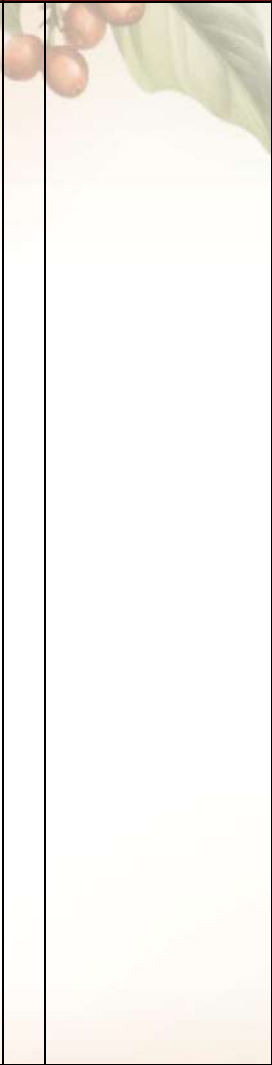
Sementara itu, arah kebijakan untuk menjabarkan strategi dari masing-masing misi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 5
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)	1 Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas	Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman Sasaran: 1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan 2. Terwujudnya peningkatan penerapan	1.1 Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	1.1.1 penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	✓	✓	✓	✓	✓
				1.1.2 penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	✓	✓	✓	✓	✓
				1.1.3 penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	✓		✓		✓
			1.2 Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1.2.1 penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	✓				
				1.2.2 Penyediaan akses internet di seluruh wilayah	✓	✓	✓	✓	✓
				1.2.3 pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi		✓	✓	✓	
	2 Diversifikasi Perekonomian Untuk Penghidupan Yang Stabil		2.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas	2.1.1 Peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi			✓		
				2.1.2 Peningkatan nilai usaha perdagangan			✓		

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		2.1.3 Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM	✓		✓		
		3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		2.1.4 peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	✓	✓	✓		
				2.1.5 Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan	✓	✓	✓	✓	
				2.1.6 Pembentukan ekosistem ekonomi syariah		✓			
		4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	2.2. Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian	2.2.1 Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja	✓			✓	
				2.2.2 Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan	✓		✓		
		5. Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam		2.2.3 Peningkatan produksi perikanan	✓		✓	✓	
				2.2.4 peningkatan pemajuan kebudayaan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan SDM/lembaga kebudayaan	✓		✓		✓
				2.2.5 Peningkatan investasi	✓	✓	✓		
				2.2.6 Peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik		✓		✓	

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			menjalankan kehidupan dan aktivitasnya				(Mal Pelayanan Perizinan)					
	3	Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan		3.1.	Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan	3.1.1	Peningkatan mutu layanan pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
						3.1.2	Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	✓	✓	✓	✓	✓
						3.1.3	Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
						3.1.4	Penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal	✓	✓	✓	✓	✓
						3.1.5	Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	✓	✓	✓	✓	✓

Visi	Misi		Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
					3.1.6	Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal	✓	✓	✓	✓	✓
					3.1.7	Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan	✓	✓	✓	✓	✓
			3.2.	Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan Kesehatan	3.2.1	Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓
					3.2.2	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan jiwa	✓	✓	✓	✓	✓
					3.2.3	Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat	✓	✓	✓	✓	✓
					3.2.4	Penguatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan serta pembiayaan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
				3.2.5	Peningkatan kesehatan lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	
				3.2.6	Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	
				3.2.7	Peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	
			3.3.	Peningkatan pembangunan literasi masyarakat	3.3.1	Peningkatan pemanfaatan perpustakaan		✓			
					3.3.2	Peningkatan minat gemar membaca untuk masyarakat		✓			
			3.4.	Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga	3.4.1	Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda	✓			✓	
					3.4.2	Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga	✓			✓	
					3.4.3	Peningkatan pembudayaan olahraga	✓			✓	
			3.5.	Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	3.5.1	Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat miskin			✓		
					3.5.2	Fasilitasi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin			✓		

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			3.6. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin	3.6.1 Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial			✓		
				3.6.2 Penyediaan data yang akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran			✓		
				3.6.3 Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	✓		✓		
			3.7. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	3.7.1 Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dan multisektor	✓	✓	✓	✓	✓
			3.8. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	3.8.1 Peningkatan pemenuhan hak anak		✓		✓	
				3.8.2 Peningkatan perlindungan terhadap perempuan		✓		✓	
				3.8.3 Peningkatan perlindungan khusus anak		✓		✓	
				3.8.4 Pencegahan perkawinan anak		✓		✓	
			3.9. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	3.9.1 Peningkatan pengarusutamaan gender		✓		✓	
				3.9.2 Peningkatan pemberdayaan perempuan	✓		✓		

Visi		Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
				3.10. Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, keagamaan, dan keluarga berencana	3.10.1	Peningkatan kualitas pembangunan keluarga		✓				✓
					3.10.2	Peningkatan pengendalian penduduk		✓				✓
					3.10.3	Peningkatan pembinaan keluarga berencana		✓				✓
					3.10.4	Penguatan pendidikan budi pekerti dan keagamaan		✓				✓
	4	Mempromosikan kelestarian lingkungan		4.1 Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap iklim dan bencana	4.1.1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui integrasi hulu-hilir sistem pengelolaan persampahan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pengendalian pencemaran yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	✓	✓	✓			
					4.1.2	Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana		✓			✓	✓
	5	Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan		5.1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	5.1.1	Peningkatan kualitas kebijakan	✓					

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
	dan efektif										
				5.1.2	Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah	✓					
				5.1.3	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	✓					
				5.1.4	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui digitalisasi kearsipan				✓		
				5.1.5	Peningkatan tata kelola Pemerintah Desa	✓					
			5.2.	Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat	5.2.1	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	✓		✓		
					5.2.2	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	✓		✓		
					5.2.3	Peningkatan kerukunan umat beragama	✓		✓		
					5.2.4	Pemberdayaan organisasi masyarakat	✓		✓		
			5.3.	Peningkatan keterbukaan informasi publik	5.3.1	Peningkatan layanan pengaduan dan konsultasi	✓			✓	

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
				5.3.2 Peningkatan tata kelola dan layanan informasi public	✓			✓	
			5.4. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik	5.4.1 Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik	✓		✓		
				5.4.2 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	✓		✓		
			5.5. Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	5.5.1 Peningkatan infrastruktur pendukung TIK	✓			✓	
				5.5.2 Peningkatan ketersediaan jaringan internet ke seluruh rumah tangga	✓			✓	
				5.5.3 Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi	✓			✓	
			5.6. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik	5.6.1 Peningkatan digitalisasi pelayanan publik	✓			✓	
			5.7. Peningkatan pendapatan asli daerah	5.7.1 Peningkatan pengelolaan pajak yang akuntabel	✓	✓	✓		
				5.7. Pemenuhan target pajak	✓	✓	✓		
			5.8. Peningkatan kualitas pengelolaan	5.8.1 Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah	✓	✓	✓		

Visi	Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			keuangan dan asset daerah	5.8.2 Peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan	✓	✓	✓		
			5.9. Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN	5.9.1 Peningkatan pelayanan kepegawaian				✓	
				5.9.2 Peningkatan kualitas ASN				✓	
				5.9.3 Peningkatan ketepatan penempatan ASN				✓	
			5.10 Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah	5.10.1 Penguatan kebijakan yang mendukung budaya riset dan inovasi daerah	✓			✓	
				5.10.2 Peningkatan kemitraan riset dan inovasi antar lembaga	✓			✓	
				5.10.3 Peningkatan sumber daya pendukung riset dan inovasi daerah	✓			✓	

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dirumuskan pentahapan RPJMD, dimana pada tahun 2027 yaitu **Pengembangan Sektor Pertanian Dan Pariwisata Untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan**. Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata secara terpadu menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pertanian yang produktif dan inovatif menyediakan bahan baku berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan petani sebagai salah satu pilar utama ekonomi daerah. Di sisi lain, pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, termasuk agrowisata dan ekowisata, membuka peluang baru untuk diversifikasi ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Integrasi antara pertanian dan pariwisata memungkinkan terciptanya sinergi yang memperkuat nilai tambah produk pertanian sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Fokus pembangunan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Tahun 2027 merupakan tahun ketiga dalam kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itu perlu penyelarasan kebijakan antara RKPD tahun 2027 dengan RPJPD Tahun 2025-2045. Arah kebijakan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 6
Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027
Penguatan nilai budaya di dalam aktivitas kehidupan masyarakat	Pengembangan Sektor Pertanian Dan Pariwisata Untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan
Pemerataan dan penguatan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung pelayanan publik	
Penguatan kualitas pelayanan lingkungan, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim	
Penguatan produktivitas dan skala ekonomi untuk seluruh sektor ekonomi	
Penguatan akses dan konektivitas wilayah untuk menunjang sistem keterkaitan wilayah	
Penguatan dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.3. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2027

4.3.1.Tema Pembangunan Tahun 2027

Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 bersumber dari tema pembangunan/arrah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan”. Adapun keselarasan antara tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dengan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dan RKP Nasional Tahun 2027 tercantum pada tabel.

Tabel 4. 7
Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027

Tema RKP Nasional Tahun 2027 ¹⁾	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi	Pengembangan Sektor Pertanian Dan Pariwisata Untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Berdasarkan tabel 4.5, tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2027 selaras dengan tema pembangunan baik RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. **Tema RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2027** bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPJMD 2025-2029 yaitu **“Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan.”**

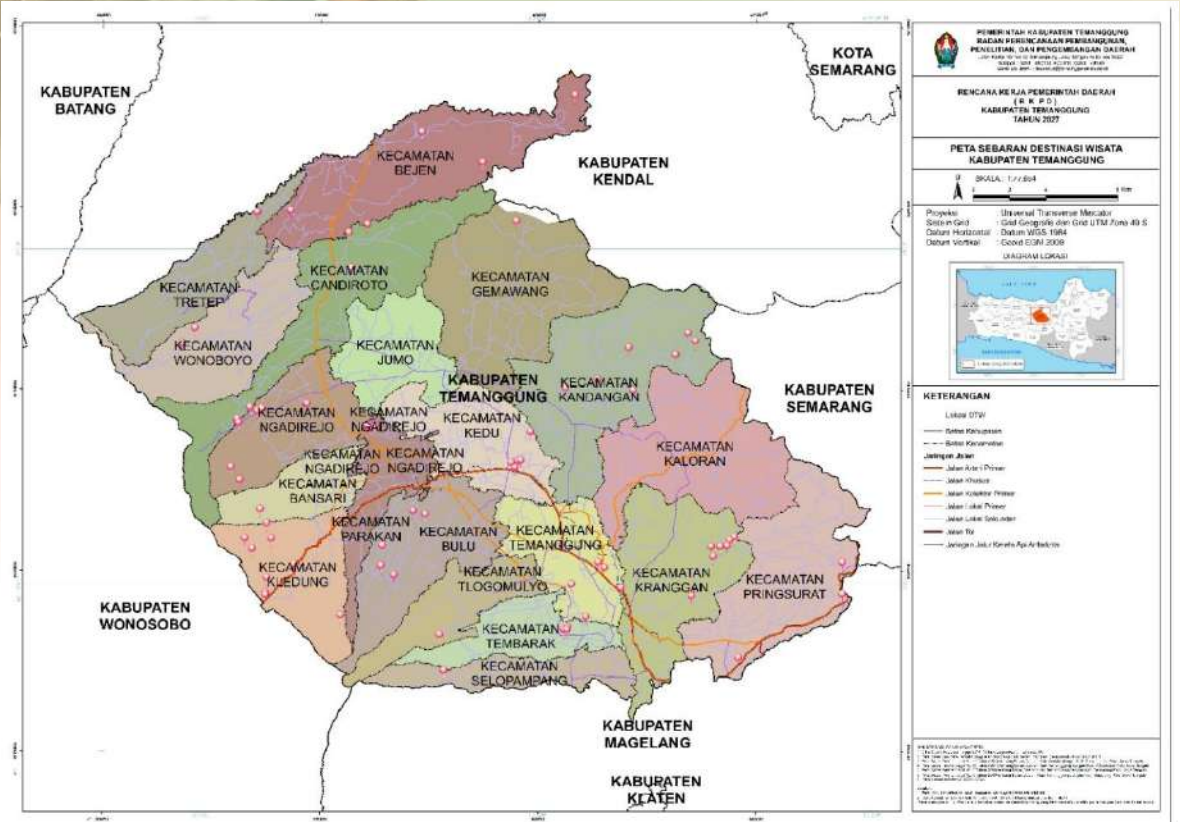
Dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dilakukan dengan menerapkan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Gambar 4.1 **Konsep THIS dalam Kebijakan Pembangunan Kabupaten Temanggung**

Tematik dalam hal ini ditunjukkan dengan proses perumusan prioritas yang memperhatikan tema pembangunan tahun berkenaan. Selanjutnya, penjabaran tema pembangunan menjadi program dan kegiatan pembangunan dalam rangkaian proses perencanaan serta penyelarasan dengan penganggaran menunjukkan penerapan pendekatan Holistik dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2027 melibatkan berbagai pemangku kepentingan meliputi Pemerintah Daerah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha serta Media (*pentahelix*) yang menggambarkan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung juga menerapkan pendekatan Integratif. Sedangkan pendekatan Spasial ditunjukkan dengan adanya lokasi program prioritas yang telah ditetapkan secara jelas.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Gambar 4.2
Implementasi Konsep THIS dalam Kebijakan Pembanguna Sesuai Tema Pembangunan Tahunan

Oleh karena itu, pembangunan tahun 2027 ditujukan untuk Pengembangan Sektor Pertanian Dan Pariwisata Untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan dengan prioritas dan fokus pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Tema/Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027

No	Tema/Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Program Daerah	Perangkat Daerah
1	Pengembangan Sektor Pertanian Dan Pariwisata Untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan	Penguatan infrastruktur pertanian dan pariwisata melalui peningkatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang seperti jalan, irigasi dan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINHUB
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	DKPPP
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPPP

No	Tema/Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Program Daerah	Perangkat Daerah
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPPP
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP
			Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DINKOPDAG
			Program Pengembangan Ekspor	DINKOPDAG
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DINKOPDAG
		Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya Lokal melalui pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINBUDPAR
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
			Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DINBUDPAR
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DINBUDPAR
		Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pembinaan petani, pelaku UMKM, dan pelaku wisata secara profesional dan berkelanjutan	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	DINSOS
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
			Program Penempatan Tenaga Kerja	DINPERINAKER
			Program Hubungan Industrial	DINPERINAKER
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DINPERMADES
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DINKOPDAG

No	Tema/Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan	Program Daerah	Perangkat Daerah
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DINKOPDAG
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
		Promosi dan Pemasaran Terintegrasi	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DINPERINAKER
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DINPERINAKER
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.3.2.Prioritas Pembangunan

A. Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terdapat 8 prioritas nasional pembangunan (Asta Cita) dengan uraian sebagai berikut.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa
2. Pesantren Obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren
3. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim
4. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana
5. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional
6. Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis Pantai
7. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di kawasan industri
8. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan
9. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin
10. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja
11. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agam dan beasiswa untuk siswa miksin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, pembangunan daerah tahun 2027 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD diarahkan pada tema pembangunan daerah “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”. Dengan tema ini maka pada tahun 2027 pembangunan daerah Jawa Tengah difokuskan lebih besar pada sektor pariwisata berkelanjutan dan pengembangan ekonomi syariah. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan hasil Rakortek Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 beberapa indikator yang mendukung pencapaian tema tersebut antara lain:

Tabel 4.9
Indikator dan Target Tematik Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	Satuan	Target 2027 (dari Provinsi)	Perangkat Daerah	Hasil Rakortek
1	Jumlah DTW Alam yang Dikembangkan	Unit	5	5	5
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	718,359	660.095.	718,359
3	Jumlah Desa/Kampung Wisata Baru yang Dicanangkan	Unit	30	4	30
4	Jumlah Konten Kreator yang dilatih	Orang	25	25	25
5	Jumlah Usaha Pariwisata Ramah Muslim yang ditetapkan		5	1	5
6	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	9,079	9,079	9,079
7	Jumlah Tukang Jagal yang Tersertifikat Halal	Orang	2	2	2
8	Jumlah Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang Dihimpun	Rupiah	11,562,851,960	11,562,851,960	11,562,851,960

Sumber: Rakortek Provinsi Jawa Tengah, 2026

C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung

Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diwujudkan dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Penataan garis imajiner, dengan program aksi:
 - 1) Pembangunan *city walk* Jalan Jalan S. Parman, Jalan R. Suprpto, Jalan M.T. Haryono dan Jenderal Sudirman
 - 2) Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman
 - 3) Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun
 - 4) Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Phala
 - 5) Revitalisasi Taman Kartini
 - 6) Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala

- 7) Pemeliharaan Pasar Kliwon
2. Penataan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi:
 - 1) Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi
 - 2) Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik
 - 3) Penerapan *merit system* dan *talent poll*
 - 4) Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi
 - 5) Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati
 - 6) Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, Amanah)
 - 7) Peningkatan kesejahteraan ketua RT dan RW
 - 8) Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (tata kelola kelurahan)
3. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, dengan program aksi:
 - 1) Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan
 - 2) Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian
 - 3) Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk
 - 4) Regenerasi petani
 - 5) Penyediaan bibit ternak dan ikan
 - 6) Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan
 - 7) Pembangunan *greenhouse*
4. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan, dengan program aksi:
 - 1) Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten
 - 2) Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)
 - 4) Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik
 - 5) Penyediaan air bersih dan sanitasi
 - 6) Penyediaan rumah layak huni
 - 7) Pembangunan *citywalk* Parakan (Jalan Diponegoro dan Jalan Brigjen Katamso)
 - 8) Pembangunan *citywalk* Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)
5. Optimalisasi pasar daerah, dengan program aksi:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
- 2) Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional
6. Penguatan dan pelestarian seni budaya, dengan program aksi:
 - 1) Pembentukan dewan kesenian di Kecamatan
 - 2) Pertemuan pegiat seni dan budaya
 - 3) Penghargaan pada seniman dan budayawan
 - 4) Pentas seni di ruang publik
 - 5) Pelaku seni dan budaya lokal go to school
 - 6) Regulasi dan pemakaian baju adat khas Temanggung
 - 7) Festival seni dan budaya tahunan Temanggung
 - 8) Informasi dan promosi pariwisata
 - 9) Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif
 - 10) Rebranding Temanggung
7. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dengan program aksi:
 - 1) Pembentukan Satgas PPA di Kecamatan dan Desa
 - 2) Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan
 - 3) Pembentukan desa ramah perempuan dan anak
 - 4) Pemberdayaan ekonomi perempuan
 - 5) Penyediaan *hotline/panic button*
8. Pelayanan dasar bidang pendidikan, dengan program aksi:
 - 1) Akses pendidikan untuk semua warga
 - 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru
 - 3) Pimpinan daerah sambang sekolah
 - 4) Penguatan database pendidikan
 - 5) Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan
 - 6) Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK
 - 7) Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP
 - 8) Pemberdayaaan PAUD
 - 9) Insentif kepada Guru Keagamaan
 - 10) Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah
 - 11) Peningkatan literasi membaca melalui perpustakaan daerah
9. Pelayanan dasar bidang kesehatan, dengan program aksi:
 - 1) Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan
 - 2) Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)
 - 3) Pemeriksaan kesehatan gratis
 - 4) Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa
 - 5) Peningkatan kualitas pelayanan RSUD

- 6) Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Jamak
- 7) Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonobojo
10. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan, dengan program aksi:
 - 1) Penataan data program perlindungan sosial
 - 2) Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang
 - 3) Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marginal
 - 4) Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat
11. Pelayanan perijinan dan administrasi, dengan program aksi:
 - 1) Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik
12. Integrasi data, dengan program aksi:
 - 1) Penyepakatan protokol *interoperabilitas* data antar perangkat daerah
 - 2) Sinkronisasi dan integrasi data
13. Pencegahan dan mitigasi bencana alam, dengan program aksi:
 - 1) Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana
 - 2) Pembentukan desa tangguh bencana
 - 3) Peningkatan kapasitas relawan destana
 - 4) Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam
 - 5) Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana
 - 6) Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan
 - 7) Penyediaan *early warning system*
 - 8) Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten
14. Digitalisasi dan *smart city*, dengan program aksi:
 - 1) Digitalisasi dan integrasi layanan digital
 - 2) Laporan Bupati
 - 3) Penyediaan dan peningkatan SDM
 - 4) Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa
 - 5) Pembuatan *superapps mobile*
 - 6) Penyediaan infrastruktur jaringan internet di perdesaan
 - 7) Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis
15. Pelestarian lingkungan hidup, dengan program aksi:

- 1) Perlindungan sumber mata air
 - 2) Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air
 - 3) Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat
 - 4) Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah
 - 5) Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST
 - 6) Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas
 - 7) Aksi bersih lingkungan
 - 8) Penghijauan di lokasi lahan kritis
 - 9) Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis
 - 10) Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis
16. Pembangunan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi, dengan program aksi:
- 1) Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
 - 2) Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
 - 3) Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
 - 4) Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi
 - 5) BUMD Sehat
17. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah, dengan program aksi:
- 1) Peningkatan optimalisasi peran kelompok masyarakat dan dunia swasta dengan melibatkan akademisi dalam pembangunan daerah
 - 2) Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dunia swasta dan akademisi
18. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga, dengan program aksi:
- 1) Pemajuan cabang olahraga unggulan
 - 2) Peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas atlet
 - 3) Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional
19. Peningkatan kualitas tenaga kerja, dengan program aksi:
- 1) Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
 - 2) Peningkatan hubungan industri
 - 3) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)

Perumusan prioritas pembangunan/program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD Tahun 2027 mempertimbangkan konsistensi/keselarasan/keterkaitan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, strategi dan arah kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2027

Permasalahan pembangunan Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kabupaten Temanggung memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan isu strategis yang ada.

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah mulai dilibatkan sejak awal, yaitu adanya penggalian masalah dan isu strategis dalam Murenbang RKPD di kelurahan, kecamatan dan kabupaten dengan menghadirkan masyarakat secara langsung. Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung juga memanfaatkan media informasi kreatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desiminasi inofrmasi dan aspirasi masyarakat bisa dilakukan melalui media tersebut. Bentuk media yang digunakan antara lain melalui media sosial, yang menampilkan link materi , link saran masukan dan lain sebagainya melaui aplikasi Lintang Asmara (<https://linktr.ee/lintangasmaraBapperidatmg>) termasuk aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui link tersebut.

Adapun permasalahan pembangunan/isu strategis telah tertuang pada bab II RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Selanjutnya, permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan kembali menurut masing-masing isu strategis yang ada guna pemetaan konsistensi terhadap prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 10
Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan/Isu Strategis,
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2027

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1	Penanganan Kemiskinan	Masih tingginya angka kemiskinan	- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan - Pelayanan dasar bidang pendidikan - Pelayanan dasar bidang kesehatan	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	- Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum - Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
				Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	- penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan - Penyediaan akses internet di seluruh wilayah - pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi
				Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	- Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat miskin - Fasilitasi pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin
				Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin	- Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial - Penyediaan data yang akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran - Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
				Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi secara kolaboratif dan multisektor
2	Konektivitas dan Aksesibilitas	- Rendahnya kualitas dan pemerataan infrastruktur - Rendahnya pemenuhan akses air siap minum perpipaan - Belum optimalnya kondisi permukaan jalan mantap pada ruas-ruas jalan kewenangan kabupaten - Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur pada urusan pekerjaan umum - Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas - Rendahnya pemenuhan akses air minum aman bagi rumah tangga	- Penataan garis imajiner - Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	- Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum - Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
				Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	- Penyediaan akses internet di seluruh wilayah - Pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Belum optimalnya penyelesaian layanan perizinan PBG dan SLF • Belum optimalnya penanganan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jembatan • Belum optimalnya pemenuhan target penetapan rencana detail tata ruang • Rendahnya pemenuhan akses sanitasi aman bagi rumah tangga • Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman • Rendahnya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi rumah tangga			
3	Ketahanan Pangan	• Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kalori masyarakat • Belum optimalnya ketahanan pangan daerah • Belum terjaminnya stabilitas dan kontinuitas ketersediaan pangan pokok daerah • Belum terjaminnya kualitas konsumsi masyarakat • Masih rendahnya minat dan budaya konsumsi ikan di tingkat keluarga • Belum optimalnya produktivitas padi • Belum optimalnya produktivitas jagung • Belum terpenuhinya kebutuhan sarana alat mesin pertanian pangan utama	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian	• Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan • Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan • Peningkatan produksi perikanan
4	Diversifikasi perekonomian untuk kehidupan stabil	• Belum optimalnya peran dan kontribusi sektor koperasi dalam menggerakkan perekonomian daerah • Rendahnya akselerasi penumbuhan wirausaha daerah • Belum bertumbuhnya ekosistem kesenian sebagai bagian dari ekonomi kreatif • Belum optimalnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap struktur PDRB daerah	1. Optimalisasi pasar daerah 2. Penguatan dan pelestarian seni budaya 3. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi 4. Pelayanan perijinan dan administrasi	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian	• Peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi • Peningkatan nilai usaha perdagangan • Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM • Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif • Peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan • Pembentukan ekosistem ekonomi syariah

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		• Belum optimalnya pertumbuhan nilai ekspor daerah • Belum optimalnya kondisi fisik sarana perdagangan daerah • Belum optimalnya perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan • Belum optimalnya upaya hilirisasi komoditas unggulan daerah • Masih rendahnya rasio total kredit bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB • Rendahnya total dana pihak ketiga pada bank milik daerah dibandingkan dengan PDRB • Tingkat Pengangguran Terbuka relatif rendah namun rentan terhadap fluktuasi ekonomi • Belum optimalnya penyerapan penduduk usia kerja ke dalam pasar kerja • Belum optimalnya penyiapan tenaga kerja yang kompeten • Masih tingginya kerentanan struktur investasi daerah terhadap dinamika ekonomi eksternal	5. Peningkatan kualitas tenaga kerja	Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian	• Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja • Peningkatan pemajuan kebudayaan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan SDM/lembaga kebudayaan • Peningkatan investasi • Peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)
5	Kualitas Hidup dan Sumber Daya Manusia	• Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia • Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah • Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) • Tingginya anak tidak sekolah (putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan) • Masih terbatasnya sarana prasarana pendidikan jenjang SD dan SMP yang layak dan dalam kondisi baik	1. Pelayanan dasar bidang pendidikan 2. Pelayanan dasar bidang kesehatan 3. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan 4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak 5. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	Peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan	• Peningkatan mutu layanan pendidikan • Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal • Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan • Penguatan pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan kurikulum yang berbasis potensi/kearifan lokal • Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) • Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan literasi

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		- Belum optimalnya cakupan kepesertaan dan keaktifan jaminan kesehatan nasional (JKN) - Masih ditemukan kasus kematian ibu, kematian neonatal, kematian bayi, dan kematian balita - Masih tingginya kasus permasalahan gizi pada balita - Masih tingginya penemuan kasus penyakit tidak menular (TBC, Hipertensi, dll)		Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan dan jaminan kesehatan	serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan - Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas - Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan jiwa - Peningkatan budaya berperilaku hidup sehat - Penguatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan serta pembiayaan kesehatan - Peningkatan kesehatan lingkungan - Peningkatan kemajuan teknologi kesehatan - Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan
		Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat		Peningkatan pembangunan literasi masyarakat	- Peningkatan pemanfaatan perpustakaan - Peningkatan minat gemar membaca untuk masyarakat
		- Masih rendahnya jumlah wirausaha muda dibanding jumlah pemuda - Masih minimnya prestasi yang diraih pada event olahraga yang diikuti		Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga	- Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda - Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga - Peningkatan pembudayaan olahraga
		- Belum optimalnya pembangunan dan pemberdayaan gender - Masih rendahnya tingkat perlindungan terhadap anak - Masih rendahnya penggunaan KB pasca persalinan		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	- Peningkatan pemenuhan hak anak - Peningkatan perlindungan terhadap perempuan - Peningkatan perlindungan khusus anak - Pencegahan perkawinan anak
				Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	- Peningkatan pengarusutamaan gender - Peningkatan pemberdayaan perempuan
				Peningkatan kualitas keluarga (pendidikan, keagamaan, dan keluarga berencana)	- Peningkatan kualitas pembangunan keluarga - Peningkatan pengendalian penduduk - Peningkatan pembinaan keluarga berencana - Penguatan pendidikan budi pekerti dan keagamaan
		Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		Peningkatan kerukunan hidup bermasyarakat	- Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum - Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
6	Kelestarian Lingkungan	• Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup • Belum optimalnya upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) daerah • Belum optimalnya pengendalian pencemaran udara • Belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan dokumen lingkungan hidup • Masih tingginya tingkat risiko bencana	1. Pelestarian lingkungan hidup 2. Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap iklim dan bencana	• Peningkatan kerukunan umat beragama • Pemberdayaan organisasi masyarakat • Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim • Peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana
7	Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	• Belum maksimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dari nilai EPPD • Belum optimalnya capaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) • Belum optimalnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) • Belum optimalnya manajemen dan pengawasan kearsipan • Belum maksimalnya integrasi dan tata kelola SPBE	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi 2. Integrasi Data 3. Digitalisasi dan smart city 4. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	• Peningkatan kualitas kebijakan • Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah • Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah • Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui digitalisasi kearsipan • Peningkatan tata kelola Pemerintah Desa
				Peningkatan keterbukaan informasi publik	• Peningkatan layanan pengaduan dan konsultasi • Peningkatan tata kelola dan layanan informasi public
				Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	• Peningkatan infrastruktur pendukung TIK • Peningkatan ketersediaan jaringan internet ke seluruh rumah tangga • Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi
				Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik	• Peningkatan digitalisasi pelayanan publik
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dari IPKD		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	• Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah • Peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan
				Peningkatan pendapatan asli daerah	• Peningkatan pengelolaan pajak yang akuntabel • Pemenuhan target pajak
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	• Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
					• Peningkatan kualitas perbendaharaan akuntansi dan pelaporan
		• Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian		Peningkatan kebijakan dan manajemen ASN	• Peningkatan pelayanan kepegawaian • Peningkatan kualitas ASN • Peningkatan ketepatan penempatan ASN

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

2. Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2027

Berdasarkan amanat Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, selanjutnya hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan. Adapun keterkaitan isu strategis, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2027 sebagaimana tabel 4.13 berikut.

Tabel 4. 11
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2027

No.	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD
1.	Penanganan Kemiskinan	• Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan • Pelayanan dasar bidang pendidikan • Pelayanan dasar bidang kesehatan	1. Penguatan Layanan Dasar yang Berkeadilan dan Merata a. Penyusunan peta wilayah prioritas berbasis data sanitasi, air bersih, dan kesehatan lingkungan. b. Integrasi program kesehatan lingkungan, sanitasi, dan pengendalian penyakit menular lintas perangkat daerah. c. Penguatan peran puskesmas, kader kesehatan desa, dan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif. d. Optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, dana desa, serta sumber pendanaan lainnya untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal. 2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia
2.	Konektivitas dan Aksesibilitas	• Penataan garis imajiner • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	
3.	Ketahanan Pangan	• Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	
4.	Diversifikasi perekonomian untuk kehidupan yang stabil	• Optimalisasi pasar daerah • Penguatan dan pelestarian seni budaya • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Pelayanan perijinan dan administrasi	

No.	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD
		• Peningkatan kualitas tenaga kerja	a. Revitalisasi fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat berbasis literasi, inklusivitas, dan teknologi informasi. b. Penyesuaian jam layanan, peningkatan koleksi, serta penguatan SDM pengelola perpustakaan. Revitalisasi fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat berbasis literasi, inklusivitas, dan teknologi informasi. c. Penyesuaian jam layanan, peningkatan koleksi, serta penguatan SDM pengelola perpustakaan. 3. Penguatan Struktur dan Daya Saing Ekonomi Daerah a. Pengembangan wirausaha baru melalui program inkubasi, pendampingan usaha, dan kemudahan perizinan. b. Peningkatan kapasitas UMKM untuk masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor. c. Fasilitasi akses pembiayaan usaha dan penguatan kemitraan antara UMKM, BUMD, dan sektor swasta. d. Penguatan klaster ekonomi unggulan daerah sesuai karakteristik wilayah Kabupaten Temanggung. 4. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Budaya dan Pariwisata Daerah a. Penyusunan strategi pengelolaan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. b. Penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, pengelola situs budaya, desa wisata, dan pelaku usaha. c. Pengembangan event budaya dan promosi pariwisata terintegrasi. d. Peningkatan kualitas amenities, aksesibilitas, dan atraksi untuk mendorong lama tinggal dan belanja wisatawan. 5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Hukum a. Peningkatan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan daerah berbasis
5.	Kualitas Hidup dan Sumber Daya Manusia	• Pelayanan dasar bidang pendidikan • Pelayanan dasar bidang kesehatan • Pelayanan sosial dan bidang keagamaan • Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak • Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	
6.	Kelestarian Lingkungan	• Pencegahan dan mitigasi bencana alam • Pelestarian lingkungan hidup	
7.	Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	• Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi • Integrasi data • Digitalisasi dan <i>smart city</i> • Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	

No.	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD
			data, evaluasi, dan dampak kebijakan b. Penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi daerah. c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan produk hukum daerah. d. Harmonisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. 6. Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan a. Penguatan mekanisme penajaman prioritas Pembangunan daerah berbasis isu strategis dan kemampuan keuangan daerah. b. Sinkronisasi antara hasil reses DPRD, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan dokumen perencanaan daerah. c. Penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sumber: Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027.

3. Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Prioritas Nasional

Sebagaimana penjelasan terkait arah kebijakan dan strategi pembangunan secara nasional dituangkan ke dalam 8 Prioritas Nasional yang secara rinci dijabarkan di sasaran pada masing-masing PN. Dalam perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 perlu memperhatikan keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dengan prioritas nasional RPJMN Tahun 2025-2029. Keselarasan antara sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan prioritas nasional RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 12
Persandingan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dengan Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Sasaran Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
1	PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM Indikator: • Indeks Demokrasi Indonesia • Indeks HAM	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	6,86	• Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah • Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak • Pelayanan sosial dan bidang keagamaan • Pelayanan dasar bidang pendidikan • Pelayanan dasar bidang kesehatan
				Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	97,37	
				Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,72	
2	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2	Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Indikator: • <i>Asia Power Index (Military Capability)</i> • <i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	6,86	• Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah • Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			- Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya <i>Global Cybersecurity Index</i> - Indeks Keamanan Laut Nasional					
		3	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (<i>FEW Nexus</i>) Indikator: - Indeks Ketahanan Pangan - Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB Perkapita (Juta Rupiah /tahun)	41,47 juta rupiah	- Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan - Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
		4	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan,	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	-	-	-	-

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			Energi, dan Air (<i>FEW Nexus</i>) Indikator: - Indeks Ketahanan Energi - Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer					
		5	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (<i>FEW Nexus</i>) Indikator: - Indeks Ketahanan Air Nasional - Kapasitas Tampung Air - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan - Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	75,88%	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
		6	Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan	Indeks Pembangunan Manusia (angka)	73,72	Pengembangan kerjasama pembangunan

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			Indikator: - Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global - Indonesia Blue Economy Index (IBEI) - Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB Perkapita (Juta Rupiah /tahun)	41,47	dan peningkatan investasi - Pelayanan perijinan dan administrasi - Digitalisasi dan Smart City
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,18-1,88	
		7	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau Indikator: - Indeks ekonomi hijau - Indeks kualitas pengelolaan sampah (IKPS) - Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah - Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif - Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks kualitas lingkungan hidup	75,54	Pelestarian lingkungan hidup

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			- Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati - Indeks kualitas lingkungan hidup					
3	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	8	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan Indikator: Stok infrastruktur terhadap PDB	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	75,88	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
		9	Meningkatkan Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB Indikator: - Total aset sektor keuangan/PDB - Aset perbankan/PDB - Aset dana pensiun/PDB - Aset asuransi/PDB - Kapitalisasi pasar modal/PDB - Total kredit/PDB - Inklusi keuangan	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	41,47 juta rupiah	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini / Gini Rasio	0,360-0,357	
		10	Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif,	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,18 - 1,88	Pengembangan kerjasama pembangunan

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			Indikator: - Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal - Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB - Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah - Rasio kewirausahaan	dan Berbasis Lingkungan Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan			dan peningkatan investasi Peningkatan kualitas tenaga kerja
		11	Meningkatnya nilai tambah pariwisata Indikator: - Rasio PDB pariwisata - Devisa pariwisata	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	41,47 juta rupiah	- Penguatan dan pelestarian seni budaya - Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
		12	Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif Indikator: Proporsi PDB ekonomi kreatif	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	PDRB per kapita Indeks Gini / Gini Rasio	41,47 juta rupiah 0,360-0,357	- Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi - Optimalisasi Pasar Daerah - Digitalisasi dan Smart City - Penataan garis imajiner

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
4	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	13	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata Indikator: • Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun • Harapan Lama Sekolah • Rata-rata nilai PISA : membaca, matematika, sains • Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional : literasi membaca numerasi • Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi • Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi • Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,72	Pelayanan dasar bidang pendidikan
						Tingkat Pengangguran Terbuka	2,18-1,88	
				Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	97,37	

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
		14	Terwujudnya kesehatan untuk semua Indikator: - Usia Harapan Hidup - Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) - Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita - Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk) - Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,72	Pelayanan dasar bidang kesehatan
				Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	97,37	
		15	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	97,37	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			Indikator: • Indeks pembangunan kualitas keluarga • Indeks perlindungan anak • Indeks pembangunan pemuda • Indeks ketimpangan gender • Indeks pembangunan gender • Mobilitas penduduk lanjut usia • Mobilitas penduduk penyandang disabilitas					• Pelayanan sosial dan bidang keagamaan
		16	Memperkuatnya iptek, inovasi dan produktivitas tenaga kerja Indikator: • Peringkat indeks inovasi global • Tingkat pengangguran terbuka	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,18 - 1,88	Peningkatan kualitas tenaga kerja

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			- Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) - Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan					
		17	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat Indikator: - Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games - Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games - Peringkat pada Asian Games - Peringkat pada Asian Para Games - Peringkat pada SEA Games - Peringkat pada ASEAN Para Games - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,72	Pengembangan atlet dan prestasi olahraga

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
5	PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	18	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan Indikator: • Rasio PDB industri pengolahan	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	41,47 juta rupiah	• Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi • Peningkatan kualitas tenaga kerja • Digitalisasi dan <i>smart city</i>
		19	Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global Indikator: • Biaya logistik • Pembentukan modal tetap bruto (%PDB) • Ekspor barang dan jasa (%PDB)	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	41,47 juta rupiah	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
6	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	20	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan Indikator: • Tingkat kemiskinan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	73,72	• Pelayanan sosial dan bidang keagamaan • Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan		PDRB per kapita	41,47 juta rupiah	

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			- Tingkat kemiskinan ekstrem - Proporsi penduduk kelas menengah - Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan - Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,18 - 1,88	- Peningkatan kualitas tenaga kerja - Pelayanan dasar bidang pendidikan - Pelayanan dasar bidang kesehatan
				Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	0,360-0,357	
		21	Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan Indikator: Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	75,88	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
		22	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Terwujudnya Perekonomian Yang	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	86,33	- Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi - Digitalisasi dan Smart City - Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
						Persentase infrastruktur	75,88	

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			Indikator: • Persentase desa mandiri	Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan		kewilayahan yang berdaya saing (%)		
		23	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indikator: • Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional • Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	PDRB per kapita Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing (%)	41,47 juta rupiah 75,88	- Optimalisasi pasar daerah - Pelayanan perijinan dan administrasi - Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi - Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan
7	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	24	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional Indikator: • Indeks pembangunan hukum • Indeks persepsi korupsi • Indeks Materi Hukum	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Indeks integritas nasional	79,35	- Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi - Integrasi Data - Digitalisasi dan Smart City

No	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
		- Indeks Integritas Nasional - Indeks integritas partai politik					
		25 Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani Indikator: - Indeks reformasi birokrasi nasional - Indeks Pelayanan Publik - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Indeks pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	86,33	- Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi - Integrasi data - Digitalisasi dan <i>smart city</i>
		26 Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba Indikator: Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Indeks integritas nasional	79,35	- Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi - Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah
		27 Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	41,47 juta rupiah	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			Indikator: Return on asset (RoA) BUMN					
		28	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal sesuai potensi perekonomian dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan Indikator: - Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB - Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	41,47 juta rupiah	- Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi - Pelayanan perijinan dan administrasi
		29	Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Indikator: Tingkat inflasi	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif,	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh	PDRB per kapita Indeks Gini / Gini Rasio	41,47 juta rupiah 0,360-0,357	- Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi - Optimalisasi pasar daerah - Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Provinsi	Sasaran Pembangunan Kabupaten	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
				dan Berbasis Lingkungan	masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan			dasar kewilayahan
8	PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	30	Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju Indikator: • Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) • Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) • Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	6,86	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah
		31	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Indikator: • Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks kualitas lingkungan hidup	75,54	Pencegahan dan mitigasi bencana alam
		Jumlah Sasaran PN				31		
		Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah				5		

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung dan RPJMN 2025-2029, 2026.

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Temanggung 2027 dengan sasaran prioritas nasional, akan tetapi terdapat 1 (satu) sasaran prioritas nasional yang tidak bisa ada keterkaitan secara langsung oleh sasaran dan prioritas pembangunan daerah dikarenakan urusan energi tidak menjadi kewenangan kabupaten yaitu Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus).

Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 13
Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung 2025-2029

No	Prioritas Nasional RPJMN	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
1	PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Bakesbangpol
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
2	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Bakesbangpol
		2. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
		3. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
		4. Optimalisasi pasar daerah	• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinkopdag
		5. Pelestarian lingkungan hidup	• Program Pengelolaan Persampahan • Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH

No	Prioritas Nasional RPJMN	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
3	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
		2. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
		3. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Hubungan Industrial	Dinperinaker
		4. Penguatan dan pelestarian seni budaya	- Program Pemasaran Pariwisata - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinbudpar
		5. Optimalisasi pasar daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinkopdag
4	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	1. Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
		2. Pelayanan dasar bidang kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		3. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	- Program Perlindungan Perempuan - Program Pemenuhan Hak Anak - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPAPPKB
		4. Peningkatan kualitas tenaga kerja	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinperinaker
		5. Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dindikpora
5	PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1. Pelayanan perijinan dan administrasi	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		2. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
6	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
		2. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Hubungan Industrial	Dinperinaker
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		3. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
		4. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	- Program Penataan Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermades

No	Prioritas Nasional RPJMN	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
			• Program Peningkatan Kerjasama Desa	
7	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi Setda
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		2. Integrasi Data	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinkominfo
		3. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Bakesbangpol
8	PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	1. Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Bakesbangpol
		2. Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Sementara itu, keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2027 dengan sasaran Prioritas Nasional dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 14
Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dengan Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	angka	73,72	Pelayanan dasar bidang pendidikan	1. Akses pendidikan untuk semua warga 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru 3. Pimpinan daerah sambang sekolah 4. Penguatan database pendidikan 5. Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan 6. Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK 7. Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP 8. Pemberdayaan PAUD 9. Insentif kepada Guru Keagamaan 10. Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah 11. Peningkatan Literasi membaca melalui perpustakaan daerah	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-rata nilai PISA : membaca, matematika, sains 4. Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional : literasi membaca numerasi 5. Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi 6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi 7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi
				Pelayanan dasar bidang kesehatan	1. Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas) 3. Pemeriksaan kesehatan gratis 4. Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa 5. Peningkatan kualitas layanan RSUD 6. Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Jamak 7. Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonobojo		Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup 2. Angka Kelahiran Total (Total 3. Fertility Rate) (rata-rata 4. kelahiran per wanita usia 5. subur 15–49 tahun) 6. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 7. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 8. Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk) 9. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	1. Pemajuan cabang olahraga unggulan 2. Peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas atlet 3. Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional		Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	1. Peringkat pada Asian Games 2. Peringkat pada Asian Para Games 3. Peringkat pada ASEAN Para Games 4. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga
PDRB Perkapita	Juta rupiah	41,47		Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan Perkebunan 2. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian 3. Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk 4. Regenerasi petani 5. Penyediaan bibit ternak dan ikan 6. Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan 7. Pembangunan <i>greenhouse</i>	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan 3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan	1. Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global 2. Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (IBEI) 3. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan	PN 3: Melanjutkan pengembangan	Meningkatnya Total Aset Sektor	1. Total aset sektor keuangan/PDB 2. Aset perbankan/PDB

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				peningkatan investasi	2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Keuangan terhadap PDB	3. Aset dana pension/PDB 4. Aset asuransi/PDB 5. Kapitalisasi pasar modal/PDB 6. Total kredit/PDB 7. Inklusi keuangan
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
				Penguatan dan pelestarian seni budaya	1. Pembentukan dewan kesenian di Kecamatan 2. Pertemuan pegiat seni dan budaya 3. Penghargaan pada seniman dan budayawan 4. Pentas seni di ruang publik 5. Pelaku seni dan budaya lokal go to school 6. Regulasi dan pemakaian baju adat khas Temanggung 7. Festival seni dan budaya tahunan Temanggung 8. Informasi dan promosi pariwisata 9. Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif 10. Rebranding Temanggung		Meningkatnya nilai tambah pariwisata	1. Rasio PDB pariwisata 2. Devisa pariwisata
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala		Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi PDB ekonomi kreatif

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjangkau multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjangkauan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	Rasio PDB industri pengolahan
							Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	1. Biaya logistik 2. Pembentukan modal tetap bruto (%PDB) 3. Ekspor barang dan jasa (%PDB)
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	1. Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional 2. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional
				Pelayanan perijinan dan administrasi	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjangkau multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjangkauan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjangkau multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjangkauan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM		Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	1. Tingkat kemiskinan ekstrem 2. Tingkat kemiskinan ekstrem 3. Proporsi penduduk kelas menengah

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat			4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 5. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan	Return on asset (RoA) BUMN
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	1. Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB 2. Rasio Perpajakan terhadap PDB
				Pelayanan perijinan dan administrasi	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM		Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan	Tingkat inflasi

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat		Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,18 – 1,88	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjangkaran investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB 3. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 4. Rasio kewirausahaan
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri 3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjangkaran investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala			

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat			
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri 3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)			
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri 3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Menguatnya iptek, inovasi dan produktivitas tenaga kerja	1. Peringkat indeks inovasi global 2. Tingkat pengangguran terbuka 3. Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) 4. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri 3. Penyusunan Rencana Kerja Tenaga Kerja (RTKD)	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan ekstrem 3. Proporsi penduduk kelas menengah 4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 2. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	75,54	Pelestarian lingkungan hidup	1. Perlindungan sumber mata air 2. Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air 3. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi,	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	1. Indeks ekonomi hijau 2. Indeks kualitas pengelolaan sampah (IKPS) 3. Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
aspek pembangunan					4. Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah 5. Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST 6. Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas 7. Aksi bersih lingkungan 8. Penghijauan di lokasi lahan kritis 9. Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis 10. Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis	Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		4. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif 5. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan 6. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati 7. Indeks kualitas lingkungan hidup
				Pencegahan dan mitigasi bencana alam	1. Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana 2. Pembentukan desa tangguh bencana 3. Peningkatan kapasitas relawan destana 4. Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam 5. Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana 6. Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan 7. Penyediaan early warning system 8. Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten	PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	75,88	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	1. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten 2. Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi,	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan,	1. Indeks Ketahanan Air Nasional 2. Kapasitas Tampung Air 3. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik					dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung) 4. Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik 5. Penyediaan air bersih dan sanitasi 6. Penyediaan rumah layak huni 7. Pembangunan <i>citywalk</i> Parakan (Jalan Diponegoro dan Jalan Brigjen Katamso) 8. Pembangunan <i>citywalk</i> Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)	Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Energi, dan Air (FEW Nexus)	
				Penataan garis imajiner	1. Pembangunan city walk Jalan Jalan S. Parman, Jalan R. Suprpto, Jalan M.T. Haryono dan Jenderal Sudirman 2. Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman 3. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun 4. Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Phala 5. Revitalisasi Taman Kartini 6. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala 7. Revitalisasi Pasar Kliwon	PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Stok infrastruktur terhadap PDB
				Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten 2. Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					4. Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik 5. Penyediaan air bersih dan sanitasi 6. Penyediaan rumah layak huni 7. Pembangunan <i>citywalk</i> Parakan (Jalan Diponegoro dan Jalan Brigjen Katamso) 8. Pembangunan <i>citywalk</i> Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)			
	Indeks Integritas Nasional	angka	79,35	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	1. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi 2. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik 3. Penerapan merit system dan talent poll 4. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi 5. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati 6. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah) 7. Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW 8. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Terwujunya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	1. Indeks pembangunan hukum 2. Indeks persepsi korupsi 3. Indeks integritas partai politik Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika
	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	86,33	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	1. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi 2. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pendorong pertumbuhan	Persentase desa mandiri

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					3. Penerapan merit system dan talent poll 4. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi 5. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati 6. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah) 7. Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW 8. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)		ekonomi yang berkelanjutan	
				Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	1. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi 2. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik 3. Penerapan merit system dan talent poll 4. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi 5. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati 6. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah) 7. Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW 8. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	1. Indeks reformasi birokrasi nasional 2. Indeks pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
				Integrasi data	1. Penyepakatan protokol interoperabilitas data antar perangkat daerah 2. Sinkronisasi dan integrasi data			
				Digitalisasi dan <i>smart city</i>	1. Digitalisasi dan integrasi layanan digital 2. Lapor Bupati 3. Penyediaan dan peningkatan SDM 4. Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa 5. Pembuatan superapps mobile 6. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di perdesaan 7. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis			
Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini/Gini Rasio	angka	0,360 – 0,357	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan Perkebunan 2. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian 3. Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk 4. Regenerasi petani 5. Penyediaan bibit ternak dan ikan 6. Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan 7. Pembangunan <i>greenhouse</i>	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan 3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah		Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan	1. Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global 2. Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (IBEI) 3. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat			
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjangkaran investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM 3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	1. Total aset sektor keuangan/PDB 2. Aset perbankan/PDB 3. Aset dana pension/PDB 4. Aset asuransi/PDB 5. Kapitalisasi pasar modal/PDB 6. Total kredit/PDB 7. Inklusi keuangan
				Optimalisasi pasar daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif 2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional			
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri 3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)		Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB 3. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 4. Rasio kewirausahaan
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan 2. Penjangkaran investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM		Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi PDB ekonomi kreatif

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala 4. Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi 5. BUMD sehat			
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan hubungan industri 3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan ekstrem 3. Proporsi penduduk kelas menengah 4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 5. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
	Indeks Pembangunan Gender	Angka	97,37	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	1. Pembentukan Satgas PPA di Kecamatan dan Desa 2. Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan 3. Pembentukan desa ramah perempuan dan anak 4. Pemberdayaan ekonomi perempuan 12. Penyediaan <i>hotline/panic button</i>	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1. Indeks pembangunan kualitas keluarga 2. Indeks perlindungan anak 3. Indeks pembangunan pemuda 4. Indeks ketimpangan gender 5. Indeks pembangunan gender 6. Mobilitas penduduk lanjut usia 7. Mobilitas penduduk penyandang disabilitas
				Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	1. Penataan data program perlindungan sosial 2. Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang 3. Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal 4. Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan ekstrem 3. Proporsi penduduk kelas menengah 4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 8. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas (Program Aksi)	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	angka	6,86	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	1. Peningkatan optimalisasi peran kelompok masyarakat dan dunia swasta dengan melibatkan akademisi dalam pembangunan daerah 2. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, dunia swasta dan akademisi	PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
						PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	1. Indeks Demokrasi Indonesia 2. Indeks HAM
						PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan	1. Asia Power Index (Military Capability) 2. Asia Power Index (Diplomatic Influence) 3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 4. <i>Global Cybersecurity Index</i> 5. Indeks Keamanan Laut Nasional

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Berdasarkan tabel terdapat konsistensi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dengan sasaran Prioritas Nasional (termasuk ke dalam indikator kinerjanya). Selain itu, dapat dilihat bahwa indikator dampak digunakan sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Selain itu, keseluruhan program prioritas mempunyai indikator kinerja di mana indikator tersebut menggunakan indikator hasil.

4. Keterkaitan dan Konsistensi antara Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung

Perumusan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan konsistensi dengan program prioritas, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 15
Keterkaitan dan Konsistensi antara Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1.	Penataan garis imajiner	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Pembangunan city walk Jalan Jalan S. Parman, Jalan R. Suprpto, Jalan M.T. Haryono dan Jenderal Sudirman	Persentase trotoar kondisi baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
		Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	Rehabilitasi dan penataan kawasan alun-alun dan pendopo pengayoman	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DPRKPLH
		Persentase trotoar kondisi baik	Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alun-alun	Jumlah Produk Hukum Kelembagaan Pengelolaan Alun-alun	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum SETDA
			Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Phala	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
			Revitalisasi Taman Kartini	Jumlah Fasilitas Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Phala	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
			Revitalisasi Pasar Kliwon	Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
2.	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Indek pelayanan publik	Peningkatan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi SETDA
		Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi SETDA
		Persentase AKIP PD berpredikat BB	Penerapan <i>merit system</i> dan <i>talent poll</i>	Indeks Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Indek sistem merit	Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPERIDA

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Program Penelitian dan Pengembangan	BAPPERIDA
					Program Riset dan Inovasi	BAPPERIDA
					Program Pendaftaran Penduduk	DINDUKCAPIL
					Program Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINDUKCAPIL
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT
					Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pembangunan SETDA
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi SETDA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Bagian Kesra dan Bina Mental SETDA
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	KECAMATAN
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati	Persentase penyusunan dokumen perencanaan Desa tepat waktu	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
			Desa Ceria (pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, Amanah)	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
			Peningkatan kesejahteraan ketua RT dan RW	Presentasi laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,PKK,Posyandu, LPMD dan Karang Taruna)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DINPERMADES
			Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (tata kelola Kelurahan)	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan SETDA
3.	Peningkatan produktivitas pertanian,	Indek ketahanan pangan	Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan	Produktivitas Padi Produktivitas jagung Produktivitas bawang putih Produktivitas bawang merah Produktivitas cabe rawit	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	peternakan dan perikanan			Produktivitas cabe keriting Produktivitas tembakau Produktivitas kopi robusta Produktivitas kopi arabika		
				Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama Persentase prasarana yang digunakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
				Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP
				Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
			Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian	Persentase ketersediaan pangan pokok Indek ketahanan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
				Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DINKOPDAG
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINPERINAKER
			Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama Persentase prasarana yang digunakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
			Regenerasi petani	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
			Penyediaan bibit ternak dan ikan	Jumlah produksi daging ternak besar Jumlah produksi daging ternak kecil Jumlah produksi ternak unggas Jumlah produksi telur	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Persentase kelahiran pedet		
				Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama Persentase prasarana yang digunakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
				Persentase penanganan penyakit hewan Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPPP
				Jumlah produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
			Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
				Jumlah produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
			Pembangunan <i>greenhouse</i>	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama Persentase prasarana yang digunakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
4.	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten	Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi	Persentase trotoar kondisi baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
		Persentase saluran drainase kondisi baik	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar	Persentase prasarana yang digunakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			pertanian (JUT dan Kereta Gantung)			
		Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Penyediaan air bersih dan sanitasi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak		- Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman - Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
			Penyediaan rumah layak huni	- Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak - Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
			Pembangunan city walk Parakan (Jln. Diponegoro dan Jl. Brigjen Katamsa)	Persentase trotoar kondisi baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Pembangunan citywalk Ngadirejo (perkotaan Ngadirejo)	Persentase trotoar kondisi baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
5.	Optimalisasi pasar daerah	Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik	Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif	- Persentase pedagang yang menggunakan transaksi digital - Persentase pelaku usaha informal yang difasilitasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
			Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional	Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
6.	Penguatan dan pelestarian seni budaya	Jumlah festival seni dan budaya tahunan	Pembentukan dewan kesenian di Kecamatan	Jumlah Kelompok kesenian	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
		Jumlah desa wisata	Pertemuan pegiat seni dan budayawan	- Jumlah Kelompok kesenian - Jumlah Pelaku Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Penghargaan pada seniman dan budayawan	- Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan - Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dan dipelihara	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Pentas seni di ruang publik	- Jumlah Fasilitas Pengelolaan Daya tarik Wisata - Jumlah Fasilitas destinasi pariwisata	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Pelaku seni dan budaya lokal <i>go to school</i>	- Jumlah Kelompok kesenian - Jumlah Pelaku Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DINBUDPAR
			Regulasi dan Pemakaian baju adat khas Temanggung	Jumlah Pelaku Budaya	program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Festival seni dan budaya tahunan Temanggung	Jumlah destinasi tujuan wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Informasi dan promosi pariwisata	Jumlah destinasi tujuan wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar	Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
			Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif	Jumlah destinasi tujuan wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
			Rebranding Temanggung	- Jumlah Ekonomi Kreatif yang berpotensi mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual - Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
7.	Pemberdayaan perempuan,		Pembentukan satgas PPA	Rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak	Program Perlindungan	DPPPPAPKB

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	perlindungan perempuan dan anak			- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani - Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan - Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani - Rasio kasus kekerasan terhadap anak	Perempuan	
			Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan	- Kabupaten Layak Anak - Prosentase terbentuknya DRPPA	Program Pemenuhan Hak Anak	DPPPAPPKB
			Pembentukan desa ramah perempuan dan anak	- Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender - Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB
			Pemberdayaan ekonomi perempuan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
			Penyediaan <i>hotline/panic button</i>	- Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender - Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB
			Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang	- Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - Presentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marginal	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
				- Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - Presentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
8.	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	Akses pendidikan untuk semua warga	- Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun - Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun	Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru	- Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional - Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Rata-rata lama sekolah	Pimpinan daerah sambang sekolah	- Proporsi PAUD terakreditasi minimal B - Persentase SD terakreditasi minimal B - Persentase SMP terakreditasi minimal B - Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Harapan Lama Sekolah	Penguatan database pendidikan	- Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Fasilitasi usulan pembangunan Gedung SMA/SMK	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Rehabilitasi ruang kelas dan Gedung sekolah SD dan SMP	- Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SD/ sederajat - Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SMP/ sederajat - Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SD/ sederajat - Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SMP/ sederajat	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Pemberdayaan PAUD	- Proporsi PAUD terakreditasi minimal B - Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Insentif kepada Guru Keagamaan	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah	Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Peningkatan literasi membaca melalui perpustakaan daerah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Kegemaran Membaca Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	DINPUSIP
9.	Pelayanan dasar bidang kesehatan	Angka harapan hidup	Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan	Cakupan penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Angka kematian ibu	Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)	Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	DINAS KESEHATAN

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Pemeriksaan kesehatan gratis	Cakupan penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	Peningkatan pelayanan Posyandu di tingkat desa	Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan kualitas layanan RSUD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan prasarana rumah sakit Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah sakit	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD
			Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung Tahu Jamak	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan prasarana rumah sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
			Penambahan fasilitas rawat inap Puskesmas Wonoboyo	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
			Fasilitasi penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat	Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Presentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
10.	Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Penataan data program perlindungan sosial	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
11.	Pelayanan perijinan dan administrasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di Mall Pelayanan Publik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPSTP
12.	Integrasi data	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Penyepakatan protokol interoperabilitas data antar PD	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
		Persentase layanan publik secara elektronik	Sinkronisasi dan integrasi data	Persentase layanan publik secara elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik		Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINDUKCAPIL
13.	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Jumlah desa tangguh bencana	Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Pembentukan desa tangguh bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Peningkatan kapasitas relawan destana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Penyediaan <i>early warning system</i>	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Pencegahan longsor pada ruas jalan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
14.	Digitalisasi dan <i>smart city</i>	Persentase layanan publik secara elektronik	Digitalisasi dan integrasi layanan digital	Persentase layanan publik secara elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
			Lapor Bupati	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
			Penyediaan dan peningkatan SDM	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
			Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
			Pembuatan <i>superapps mobile</i>	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
			Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
			Penyediaan infrastruktur jaringan internet di ruang public strategis	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
15.	Pelestarian lingkungan hidup	Indek kualitas air	Perlindungan sumber mata air	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
		Indek kualitas udara	Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
		Cakupan pelayanan persampahan	Peningkatan pengelolaan sampah	- Timbulan sampah terolah difasilitas pengolah sampah - Persentase sampah yang terkelola	Program Pengembangan Sistem dan	DPRKPLH

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			berbasis desa dan masyarakat	Cakupan Pelayanan persampahan	Pengelolaan Persampahan Regional	
		Persentase jumlah TPS 3 R	Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah	Persentase jumlah TPS 3R	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH
			Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST	- Timbulan sampah terolah difasilitas pengolah sampah - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
			Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas		Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
			Aksi bersih lingkungan	- Timbulan sampah terolah difasilitas pengolah sampah - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
			Penghijauan di lokasi lahan kritis	Persentase luas lahan kritis tertangani	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis tertangani	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola Persentase luas lahan kritis tertangani	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
16.	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Jumlah fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan Perusahaan ber skala besar	Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan	- Jumlah fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan Perusahaan perskala besar - Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM	- Jumlah fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan Perusahaan perskala besar - Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala	- Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal - Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Pengembangan brand Temanggung dengan produk unggulan daerah antara lain pusat tembakau dan kopi	- Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal - Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			BUMD Sehat	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian SETDA
			Peningkatan hubungan industrial	- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Persentase perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan - Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK - Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja - Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	Program Hubungan Industrial	Dinperinaker

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
17.	Pengembangan kerjaasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Persentase ormas yang mendapat pembinaan	Peningkatan optimalisasi peran kelompok masyarakat dan dunia swasta dengan melibatkan akademisi dalam pembangunan daerah	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	BANKESBANGPOL
			Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, dunia swasta dan akademisi	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BANKESBANGPOL
18.	Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	Persentase Atlet Unggulan	Pemajuan cabang olahraga unggulan	Persentase Cabang Olah Raga Unggulan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
			Kesejahteraan dan profesionalitas atlet	Persentase Atlet Unggulan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
			Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional	- Cakupan pelatih yang bersertifikat - Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
19.	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Program Penempatan Tenaga Kerja	DINPERINAKER

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Peningkatan hubungan industri	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	• Program Hubungan Industrial	• DINPERINAKER
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan		DINPERINAKER

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Berdasarkan tabel terdapat konsistensi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dengan sasaran Prioritas Nasional (termasuk ke dalam indikator kinerjanya). Selain itu, dapat dilihat bahwa indikator dampak digunakan sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Selain itu, keseluruhan program prioritas mempunyai indikator kinerja di mana indikator tersebut menggunakan indikator hasil.

5. Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Janji Tahunan Kepala Daerah

Perumusan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan konsistensi dengan janji tahunan Kepala Daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 16
Persandingan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Janji Tahunan Kepala Daerah

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Janji Tahunan Kepala Daerah (Program Aksi Tahun 2027)
1	Pelayanan dasar bidang pendidikan	1. Akses pendidikan untuk semua warga
		2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru
		3. Pimpinan daerah sambang sekolah
		4. Penguatan database pendidikan
		5. Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan
		6. Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK
		7. Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP
		8. Pemberdayaan PAUD
		9. Insentif kepada Guru Keagamaan
		10. Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah
		11. Peningkatan Literasi Membaca melalui perpustakaan daerah
2	Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	1. Pemajuan cabang olahraga unggulan
		2. Kesejahteraan dan profesionalitas atlet
		3. Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional
3	Pelayanan dasar bidang kesehatan	1. Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan
		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Puskesmas
		3. Pemeriksaan kesehatan gratis
		4. Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa
		5. Peningkatan kualitas layanan RSUD
		6. Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten temanggung
		7. Penambahan fasilitas rawat inap puskesmas wonobojo

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Janji Tahunan Kepala Daerah (Program Aksi Tahun 2027)
		8. Fasilitas Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat
4	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	1. Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan
		2. Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian
		3. Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk
		4. Regenerasi petani
		5. Penyediaan bibit ternak dan ikan
		6. Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan
5	Optimalisasi Pasar Daerah	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif
		2. Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional
6	Penguatan dan pelestarian seni budaya	1. Informasi dan promosi pariwisata
		2. Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif
		3. Rebranding Temanggung
7	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
8	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	1. Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana
		2. Pembentukan desa tangguh bencana
		3. Peningkatan kapasitas relawan bencana
		4. Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten
9	Pelestarian lingkungan hidup	1. Perlindungan sumber mata air
		2. Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air
		3. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat
		4. Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah
		5. Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST
		6. Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas
		7. Aksi bersih lingkungan
		8. Penghijauan di lokasi lahan kritis
		9. Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis
		10. Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis
10	Penataan Garis Imajiner	1. Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprpto, Jl M.T. Haryono
		2. Rehabilitasi dan penataan kawasan alon-alon dan pendopo pengayoman
		3. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alon-alon
		4. Revitalisasi Pasar Kliwon
11	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten
		2. Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Janji Tahunan Kepala Daerah (Program Aksi Tahun 2027)
		3. Penyediaan air bersih dan sanitasi
		4. Penyediaan rumah layak huni
		5. Pembangunan city walk Parakan (Jln Diponegoro dan Jl Brigjen Katamso)
12	Pelayanan perijinan dan administrasi	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perizinan di mall pelayanan publik
13	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	1. Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan
		2. Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM
		3. Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala
		4. BUMD Sehat
		5. Peningkatan hubungan industrial
14	Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	1. Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi
		2. Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik
		3. Penerapan merit system dan talent poll
		4. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi
		5. Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati
		6. Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah)
		7. Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT dan RW
		8. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)
15	Integrasi Data	1. Penyepakatan protokol interoperabilitas data antar PD
		2. Sinkronisasi dan integrasi data
16	Digitalisasi dan Smart City	1. Digitalisasi dan integrasi layanan digital
		2. Lapor Bupati
		3. Penyediaan dan peningkatan SDM
		4. Pembuatan superapps mobile
		5. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan
		6. Penyediaan infrastruktur jaringan internet di ruang publik strategis
17	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	1. Pembentukan Satgas PPA di desa dan kecamatan
		2. Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan
		3. Pembentukan desa ramah perempuan dan anak
		4. Pemberdayaan ekonomi perempuan
		5. Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang
		6. Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal
18	Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	Penataan data program perlindungan sosial

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Janji Tahunan Kepala Daerah (Program Aksi Tahun 2027)
19	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	1. Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah
		2. Pembinaan dan pemberdayaan ormas

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

6. Keselarasan prioritas pembangunan dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029

Keselaranan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4. 17
Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran Prioritas Nasional RPJMN

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
1	PN 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manRKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027usia (HAM)	
	Sasaran 1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.
	Indikator	Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Hak Asasi Manusia	Indeks Harmoni
2	PN 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	
	Sasaran 1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.
	Indikator	Asia Power Index (Military Capability)	Indeks Harmoni
		Asia Power Index (Diplomatic Influence)	
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	
		Global Cybersecurity Index	
		Indeks Keamanan Laut Nasional	
	Sasaran 2	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Indeks Ketahanan Pangan	PDRB per kapita
		Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	
	Sasaran 3	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	-
	Indikator	Indeks Ketahanan Energi	--
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	
	Sasaran 4	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
		berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Indeks Ketahanan Air Nasional	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing
		Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	
		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	
	Sasaran 5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	PDRB per kapita
		Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	
		Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	
	Sasaran 6	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks kualitas lingkungan hidup
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		Indeks Kualitas Udara	
		Indeks Kualitas Air	
		Indeks Kualitas Lahan	
		Indeks Kualitas Air Laut	
3	PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
	Sasaran 1	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing
	Sasaran 2	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	PDRB per kapita
		Aset Perbankan/PDB (%)	
		Aset Dana Pensiun/PDB (%)	
		Aset Asuransi/PDB (%)	
		Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	
		Total Kredit/PDB (%)	
		Inklusi Keuangan (%)	

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
	Sasaran 3	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	
		Rasio Kewirausahaan (%)	
	Sasaran 4	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Rasio PDB Pariwisata (%)	PDRB per kapita
		Devisa Pariwisata (Miliar USD)	
	Sasaran 5	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	• Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan • Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	PDRB per kapita Indeks Gini
4	PN 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	
	Sasaran 1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Indeks Pembangunan Manusia
		Harapan lama sekolah (tahun)	
		Rata-rata nilai PISA	
		(a) Membaca	
		(b) Matematika	
		(c) Sains	
		Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:	
		(a) Literasi Membaca	
		(b) Numerasi	
		Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	
		Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	
		Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	
	Sasaran 2	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
			kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Indeks Pembangunan Manusia
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)	
		Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)c	
	Sasaran 3	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Gender
		Indeks Perlindungan Anak	
		Indeks Pembangunan Pemuda	
		Indeks Ketimpangan Gender	
		Indeks Pembangunan Gender	
		Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	
		Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	
	Sasaran 4	Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Peringkat Indeks Inovasi Global	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	
	Sasaran 5	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	Indeks Pembangunan Manusia
		Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games	
		Peringkat pada Asian Games	
		Peringkat pada Asian Para Games	
		Peringkat pada SEA Games	
		Peringkat pada ASEAN Para Games	
		Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	
5	PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	
	Sasaran 1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	PDRB per kapita

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
6		Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
	Sasaran 2	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Biaya Logistik (% PDB)	PDRB per kapita
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	
	PN 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
	Sasaran 1	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan - Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan
	Indikator	Tingkat kemiskinan (%)	Indeks Pembangunan Manusia PDRB per kapita Tingkat pengangguran terbuka Indeks Gini
		Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	
		Proporsi penduduk kelas menengah (%)	
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	
		Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	
	Sasaran 2	Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
7	Indikator	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing
	Sasaran 3	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Persentase desa mandiri (%)	Indeks Reformasi Birokrasi
	Sasaran 4	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	PDRB per kapita
		Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	
	PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	
	Sasaran 1	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks integritas nasional

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
		Indeks Persepsi Korupsi	
		Indeks Materi Hukum	
		Indeks Integritas Nasional	
		Indeks Integritas Partai Politik	
	Sasaran 2	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Pelayanan Publik	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
		Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	
	Sasaran 3	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
	Indikator	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	Indeks integritas nasional
	Sasaran 4	Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	PDRB per kapita
	Sasaran 4	Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	PDRB per kapita
		Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	
	Sasaran 5	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
	Indikator	Tingkat Inflasi (%)	PDRB per kapita
8	PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
	Sasaran 1	Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya
	Indikator	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks Harmoni
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	
	Sasaran 2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029
	Indikator	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Indeks kualitas lingkungan hidup

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Persandingan program prioritas dan program nomenklatur, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 18
Persandingan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan Program Nomenklatur

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		• Indeks Pembangunan Manusia (angka) • Tingkat Pengangguran Terbuka • PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Pelayanan dasar bidang pendidikan	
		1) Tidak adanya pungutan yang dibebankan pada peserta didik 2) Meningkatkan akses pendidikan anak usia sekolah SD dan SMP (partisipasi murni) sebesar 100%.	- Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun - Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun - Harapan Lama Sekolah	Akses pendidikan untuk semua warga	Program Pengelolaan Pendidikan
		1) Meningkatnya kualitas pendidikan guru. Misal strata pendidikan S1 2) Meningkatnya Jumlah guru yg sdh bersertifikasi (persentasenya dilihat dari baseline terakhir) 3) Meningkatnya kapasitas guru dalam menggunakan metode pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan kapasitas tumbuh kembang anak	- persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik - persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik - Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatnya kedekatan antara siswa dan pimpinan daerah, terutama dalam penyampaian gagasan pembangunan	- Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan	Pimpinan daerah sambang sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
		1) Data pendidikan yang akurat, terpilah, akuntabel, dan andal 2) Meningkatnya Pemanfaatan data oleh PD dalam mendorong pengembangan pendidikan maupun non pendidikan	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	Penguatan database pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		1) Sistem informasi yang terbaru dan mudah diakses oleh siswa 2) Meningkatnya jumlah siswa yang menerima beasiswa dari pemerintah maupun non pemerintah	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	Fasilitasi desiminasi informasi terkait pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		1) Adanya usulan dan pengawalan usulan pembangunan SMA pada pemerintah provinsi	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Fasilitasi usulan Pembangunan gedung SMA/SMK	

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		2) Terbangunnya SMA/SMK di kecamatan yang belum ada sekolahnya; Adanya pembangunan SMKI 1 unit, atau SMK yang memiliki pelatihan khusus.			
		1) Berkurangnya jumlah ruang kelas pada SD & SMP yang rusak atau tidak layak digunakan 2) Meningkatnya kualitas infrastruktur pendidikan pada tingkat SD dan SMP	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	Rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatnya kelembagaan PAUD	- Proporsi PAUD terakreditasi minimal B - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD kondisi baik - Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik - Rasio Siswa/Guru PAUD - APM PAUD (5-6 tahun) - Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD (Mendukung Wajar Dikdas 13 Tahun)	Pemberdayaan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan
		Tersedianya anggaran untuk pembayaran pengajar keagamaan	- Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun - Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan	Insentif kepada Guru Keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Tersedianya air bersih dan sanitasi di Satuan Pendidikan	- Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik - Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	Penyediaan air bersih dan sanitasi di sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatnya literasi membaca melalui perpustakaan daerah	- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat - Tingkat Kegemaran Membaca - Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Peningkatan Literasi Membaca melalui perpustakaan daerah	Program Pembinaan Perpustakaan
				Pengembangan atlet dan prestasi olahraga	
		- Kompetisi Rutin Olahraga Unggulan yang tidak hanya mencetak atlet tetapi juga menarik kunjungan wisatawan- Meningkatnya kerjasama dengan multipihak yg terkait dengan	- Persentase Atlet Unggulan- Persentase Cabang Olah Raga Unggulan- Cakupan pelatih yang bersertifikat- Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Pemajuan cabang olahraga unggulan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		pengembangan cabang olahraga unggulan			
		- Pemberian Insentif & Pembinaan untuk Atlet Berprestasi secara berkelanjutan - Fasilitas/peralatan olahraga unggulan yang memenuhi standar nasional		kesejahteraan dan profesionalitas atlet	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		- Manajemen klub olahraga unggulan yang profesional dan mandiri - Temanggung dipercaya untuk menyelenggarakan event olahraga unggulan ditingkat provinsi		Pembinaan tata kelola pengelolaan klub dan penyelenggaraan event olahraga secara profesional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				Pelayanan dasar bidang kesehatan	
		Meningkatnya kepesertaan BPJS dan akses layanan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Peningkatan kualitas layanan kesehatan (Puskesmas)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Cakupan Penduduk Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya pelayanan posyandu di tingkat desa	Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan	Peningkatan pelayanan posyandu di tingkat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Peningkatan kualitas layanan RSUD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Pembangunan gedung poliklinik RSUD Kabupaten temanggung	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Proporsi fasilitas kesehatan sesuai standar	Penambahan fasilitas rawat inap puskesmas wonoboyo	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Tersedianya lokasi tanah untuk Sekolah Rakyat	-	Fasilitasi Penyediaan tanah Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat	-

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertaniann serta peningkatan efisiensi produksi pertanian		Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	
			Produktivitas Padi	Optimalisasi produksi hasil pertanian dan perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Produktivitas jagung		
			Produktivitas bawang putih		
			Produktivitas bawang merah		
			Produktivitas cabai rawit		
			Produktivitas cabai keriting		
			Produktivitas tembakau		
			Produktivitas kopi robusta		
			Produktivitas kopi arabika		
			Jumlah produksi daging ternak besar		
			jumlah produksi daging ternak kecil		
			jumlah produksi ternak unggas		
			jumlah produksi telur		
			Persentase kelahiran pedet		
			Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama		
		Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian yang sesuai dengan fungsinya	Persentase Prasarana yang digunakan	Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya fasilitasi pengendalian dan penanggunlan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM petani dan penyuluh	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi		Program Penyuluhan Pertanian
		Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangans	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		Meningkatnya promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	- Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri - Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota		
		Meningkatnya industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	- Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten - Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas Padi	Penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Produktivitas jagung		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Produktivitas bawang putih		
			Produktivitas bawang merah		
			Produktivitas cabai rawit		
			Produktivitas cabai keriting		
			Produktivitas tembakau		
			Produktivitas kopi robusta		
			Produktivitas kopi arabika		
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan	Regenerasi petani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya penyuluhan pertanian	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi		Program Penyuluhan Pertanian
			Persentase Peningkatan kelas kelp tani		
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah produksi daging ternak besar	Penyediaan bibit ternak dan ikan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			jumlah produksi daging ternak kecil		
			jumlah produksi ternak unggas		
			jumlah produksi telur		
			Persentase kelahiran pedet		
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan		Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
			Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat		

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	Peningkatan kapasitas petani dan peternak ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Meningkatnya penyuluhan pertanian	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi		Program Penyuluhan Pertanian
			Persentase Peningkatan kelas kelp tani		
		Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	Pembangunan greenhouse	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Optimalisasi Pasar Daerah	
		Meningkatnya Pemerataan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian	Persentase pedagang yang menggunakan transaksi digital	Optimalisasi pemanfaatan ruang pasar untuk ekonomi kreatif	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Persentase pelaku usaha informal yang difasilitasi		
			Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik	Rehabilitasi dan penataan pasar tradisional	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Penguatan dan pelestarian seni budaya	
		Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Budaya	Pembentukan dewan kesenian di Kecamatan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Jumlah Kelompok kesenian	Pertemuan pegiat seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Penghargaan pada seniman dan budayawan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dan dipelihara	Pentas seni di ruang publik	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Daya tarik Wisata	Pelaku seni dan budaya lokal go to school	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Jumlah Fasilitasi destinasi pariwisata	Regulasi dan Pemakaian baju adat khas Temanggung	program Pengembangan Kebudayaan
				Festival seni dan budaya tahunan Temanggung	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatnya pemasaran pariwisata	Jumlah destinasi tujuan wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar	Informasi dan promosi pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
		Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Ekonomi Kreatif yang berpotensi mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Desa wisata seni dan budaya pendukung ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	Rebranding Temanggung	
				Peningkatan kualitas tenaga kerja	
		Tersedianya tenaga kerja terampil dan siap kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	- Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan - Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan - Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	
2	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pembentukan desa tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Peningkatan kapasitas relawan destana	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar	Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Meningkatnya jumlah Pos Pemadam Kebakaran dan SDM untuk respon bencana	Meningkatnya luas wilayah manajemen kebakaran	Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Tersedianya sumber air untuk penanganan kebencanaan	Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar	Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
					Penyelamatan Non Kebakaran
		Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan early warning system	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	Persentase layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	Pencegahan longsor pada ruas jalan kabupaten	Program Penanggulangan Bencana
				Pelestarian lingkungan hidup	
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	Perlindungan sumber mata air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R	Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R	Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan	Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST	Program Pengelolaan Persampahan
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan	Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas	Program Pengelolaan Persampahan
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (IUP) - Persentase sampah yang terkelola - Cakupan Pelayanan persampahan	Aksi bersih lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase luas lahan kritis tertangani	Penghijauan di lokasi lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
					Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase luas lahan kritis tertangani	Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase luas lahan kritis tertangani	Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		- Persentase Infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing - Indeks Integritas Nasional - Indeks Reformasi Birokrasi		
				Penataan Garis Imajiner	
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	Pembangunan city walk Jl. Jenderal Sudirman, Jl S. Parman, Jl R. Suprpto, Jl M.T. Haryono	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	Rehabilitasi dan penataan kawasan alon-alon dan pendopo pengayoman	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun	Jumlah Produk Hukum Kelembagaan Pengelolaan Alun-alun	Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alon-alon	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya keteraturan tata ruang kota yang inklusif	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Revitalisasi dan penataan kawasan stadion Bhumi Pala	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Fasilitas Destinasi Pariwisata	Revitalisasi Taman Kartini	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Meningkatnya keteraturan tata ruang kota yang inklusif	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan stadion Bhumi Pala	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian	Persentase pasar daerah kondisi baik/cukup baik	Revitalisasi Pasar Kliwon	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan dan pemeliharaan jalan kewenangan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	Koordinasi untuk pemeliharaan jalan kewenangan nasional dan provinsi	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian yang sesuai dengan fungsinya	Persentase prasarana yang digunakan	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar pertanian (JUT dan Kereta Gantung)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	Penataan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
		Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Penyediaan air bersih dan sanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman - Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Meningkatnya Kawasan Permukiman	- Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak - Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Penyediaan rumah layak huni	Program Kawasan Permukiman
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	Pembangunan citywalk Parakan (Jln. Diponegoro dan Jl. Brigjen Katamso)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	Pembangunan citywalk Ngadirejo (Perkotaan Ngadirejo)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
				Pelayanan perijinan dan administrasi	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan jumlah dan kecepatan pelayanan perijinan di mall pelayanan publik	Program Promosi Penanaman Modal
				Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Promosi dan menjaring multipihak dalam kerjasama pembangunan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Terlaksananya kemitraan Usaha antara UMKM dengan perusahaan berskala besar	Jumlah fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan Perusahaan perskala besar	Penjaringan investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi	Penyelenggaraan forum promosi dan investasi secara berkala	Program Promosi Penanaman Modal

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya jangkauan dan Strategi promosi penanaman modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan brand Temanggung sebagai pusat tembakau dan kopi	Program Promosi Penanaman Modal
		Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	BUMD Sehat	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (IUP)- Persentase perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan- Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK - Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja - Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	Peningkatan hubungan industrial	Program Hubungan Industrial
				Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daeah	Persentase AKIP Perangkat Daearah berpredikat BB	Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Kepegawaian yang adil sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang dari ASN	Indeks Sistem Merit	Penerapan merit system dan talent poll	Program Kepegawaian Daerah
		1. Meningkatkan Pelayanan pendaftaran penduduk 2. Meningkatkan pelayanan Pencatatan Sipil 3. Meningkatkan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian Dan Pengembangan 4. Program Riset Dan Inovasi 1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Meningkatnya Kepuasan Obyek Pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan Inspektorat			1. Program penyelenggaraan pengawasan 2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
		Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah			1. Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Birokrasi			1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi Dprd Secara Optimal			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
		Meningkatnya kinerja kecamatan dan kepuasan masyarakat			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Terwujudnya fasilitasi antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Desa	Presentase penyusunan dokumen perencanaan Desa tepat waktu	Fasilitasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program unggulan Bupati	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Terwujudnya pelayanan di desa yang nyaman dan memuaskan masyarakat	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Berkinerja baik	Desa Ceria (Pelayanan perangkat desa yang cerdas, gembira, amanah)	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Terwujudnya SDM (RT dan RW) yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa	Presentase laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,PKK,Posyandu, LPMD dan Karang Taruna)	Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT & RW	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat
		Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Integrasi Data	
		Terwujudnya keselarasan dan keterpaduan pertukaran data antar PD guna mendukung efisiensi layanan publik berbasis data	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Penyepakatan protokol interoperabilitas data antar PD	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Terciptanya satu sumber data terintegrasi yang akurat dan dapat diakses lintas instansi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making)	Persentase layanan publik secara elektronik	Sinkronisasi dan integrasi data	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Terwujudnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Digitalisasi dan Smart City	
		Peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan	Persentase layanan publik secara elektronik	Digitalisasi dan integrasi layanan digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Terselenggaranya sistem pelaporan masyarakat yang responsif dan transparan, serta meningkatnya partisipasi warga dalam pengawasan dan pembangunan daerah berbasis digital	Persentase layanan publik secara elektronik	Lapor Bupati	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya kompetensi SDM di lingkungan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan inisiatif digital dan smart city secara berkelanjutan	Persentase layanan publik secara elektronik	Penyediaan dan peningkatan SDM	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya akses masyarakat desa terhadap layanan internet yang andal untuk mendukung layanan publik secara digital	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Peningkatan kapasitas operator layanan digital di tingkat perangkat daerah dan pemerintah desa	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Tersedianya satu platform digital terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara cepat, efisien, dan user-friendly	Persentase layanan publik secara elektronik	Pembuatan superapps mobile	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya akses masyarakat desa terhadap layanan internet yang andal untuk mendukung layanan publik secara digital	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Penyediaan infrastruktur jaringan internet di pedesaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
		Tersedianya akses internet gratis dan merata di ruang publik strategis guna memperluas inklusi digital dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Penyediaan infrastruktur jaringan internet di Ruang publik strategis	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan		Indeks Gini Indeks Pembangunan Gender		
				Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	
		Meningkatnya Akses terhadap Layanan Perlindungan perempuan dan anak	- Rasio peningkatan pelayanan dampak kekerasan pada perempuan dan anak - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani - Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan - Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani - Rasio kasus kekerasan terhadap anak	Pembentukan Satgas PPA	Program Perlindungan Perempuan
		Tersedianya Tempat Perlindungan yang Aman dan Layak bagi korban kekerasan	- Kabupaten Layak Anak - Prosentase terbentuknya DRPPA	Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan	Program Pemenuhan Hak Anak
		1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dlm Kewirausahaan yg Berperspektif Gender 2) Meningkatnya Peran Ibu & Keluarga dlm Pendidikan/Pengasuhan Anak 3) Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan & Anak	- Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender - Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	Pembentukan desa ramah perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perempuan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Pemberdayaan ekonomi perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Meningkatnya Akses Korban terhadap Bantuan Darurat	- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani - Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	Penyediaan hotline/panic button	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Tersedianya rumah singgah pasien rujukan dari kabupaten	Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan rumah sakit di Yogyakarta dan Semarang	Program: Rehabilitasi Sosial

No	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
5	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.	- Meningkatnya kualitas data Fakir Miskin - Meningkatnya kualitas hidup lansia	- Presentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti - Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	Peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan marjinal	Program: Rehabilitasi Sosial Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	
		Meningkatnya kualitas data Fakir Miskin	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Indeks Harmoni	Penataan data program perlindungan sosial	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya ormas yang berdaya	Persentasae ormas yang mendapat pembinaan	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	
				Peningkatan optimalisasi peran kelompok masyarakat dan dunia swasta dengan melibatkan akademisi dalam pembangunan daerah Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, dunia swasta dan akademisi	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4. DUKUNGAN SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH

4.4.1.Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) oleh
Pemerintah Kabupaten Temanggung

Program Strategis Nasional merupakan penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prloritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Temanggung mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional melalui program dan aktivitas riil sebagai berikut:

Tabel 4. 19
Dukungan Program Rill terhadap Program Strategis Nasional

No	ProSN	Dukungan Program Riil
1	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	- bantuan sosial, bantuan siswa miskin, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, bantuan dan rehabilitasi kelompok berkebutuhan khusus, - pelayanan kesehatan dan pendidikan - peningkatan akses pekerjaan, peningkatan keterampilan dengan vokasi dan pelatihan, padat karya, pengembangan UMKM, pemberian dan penguatan modal untuk perorangan maupun kelompok - peningkatan akses pelayanan dasar infrastruktur, pendidikan, kesehatan dll, - peningkatan konektivitas antar wilayah
2	Sekolah Rakyat	- Fasilitasi kesiapan lahan - Fasilitasi penyediaan guru dan tenaga kependidikan - Fasilitasi calon siswa/murid melalui data kemiskinan daerah
3	Pembangunan Tiga Juta Rumah	- Penyediaan regulasi tentang pembebasan BPHTB bagi MBR melalui Perbup Temanggung Nomor 48 Tahun 2024 - Penyediaan regulasi tentang pembebasan retribusi PBG bagi MBR melalui Perbup Nomor 49 Tahun 2024 - Pembebasan BPHTB bagi MBR di Kabupaten Temanggung - Pembebasan retribusi PBG untuk MBR di Kabupaten Temanggung - Pemberian subsidi pembangunan rumah baru bagi MBR
4	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Penyediaan regulasi terkait pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah melalui Perbup Temanggung Nomor 11 Tahun 2021
5	Jaminan Kesehatan Nasional	- Penyediaan regulasi tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten temanggung melalui instruksi bupati temanggung Nomor 5 tahun 2023 - Penyediaan regulasi tentang pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan melaui Perbup Temanggung Nomor 21 tahun 2025 - Penyediaan regulasi tentang sistem kesehatan kabupaten temanggung melalui Perda Kabupaten

No	ProSN	Dukungan Program Riil
		Temanggung Nomor 2 tahun 2022 - Pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional
6	Makan Bergizi Gratis	- Pembentukan Satgas MBG Kabupaten Temanggung - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala oleh Tim Satgas MBG Kabupaten di Dapur SPPG - Rapat koordinasi pelaksanaan tindak lanjut permasalahan SPPG - Pelatihan penjamah makanan, Sertifikat SLHS (88 SPPG) Pengambilan sampel Air Dan makanan di SPPG, Pemeriksaan Kualitas Lingkungan, Monitoring dan Evaluasi Menu Program dan AKG program MBG
7	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	- Pemberian bantuan interaktif flat pannel (IFP) pada pendidikan dasar dan menengah - Pemenuhan akreditasi sekolah pada pendidikan dasar dan menengah - Penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi - Penyediaan regulasi SPM pendidikan di daerah (perbup temanggung nomor 11 tahun 2024) - Penyediaan regulasi SPM pendidikan PAUD (Perbup Temanggung nomor 81 tahun 2021) - Penyediaan regulasi penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD (Perbup Temanggung nomor 121 tahun 2021) - Penyediaan regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan (Perda Temanggung Nomor 3 tahun 2025)
8	Pengendalian Inflasi	- Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Temanggung - Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Pangan Murah - Penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Kabupaten Temanggung
9	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	- Pelaksanaan sosialisasi KDKMP pada 289 desa/kelurahan - Pelaksanaan mandatory declare oleh 289 desa/kelurahan - Fasilitasi penyediaan lahan - Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dalam pembangunan KDKMP di Kabupaten Temanggung - Pembentukan Satgas Percepatan pembentukan dan penyelenggaraan KDKMP kabupaten Temanggung
10	Kemudahan Perizinan di Daerah	- Penyediaan regulasi tentang penyelenggaraan perizinan berusaha melalui Perda Temanggung Nomor 6 tahun 2022 - Penyediaan layanan dan penerbitan PKKPR

Sumber: Bapperida Temanggung, 2026.

Adapun mendukung implementasi Program Strategis Nasional (ProSN) dalam program nomenklatur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 20
Dukungan terhadap Program Strategis Nasional
oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
1	Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINSOS
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
			1.06.05.2.02.0009 - Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin		
			2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		DKPPP
			2.09.04.2.02. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
			2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Sekolah Rakyat	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINSOS
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			1.06.05.2.02.0008 – Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		DPRKPLH
			2.11.06.2.01- Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
			2.11.06.2.01.0001- Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	
		Pembangunan 3 juta rumah	1.03.08 – PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		DPUPR
			1.03.08.2.01 – Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			Laik Fungsi Bangunan Gedung		
			1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		DPRKPLH
			1.04.02.2.03 – Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	
			1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.04 – PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		DPRKPLH
			1.04.04.2.01 – Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki	
			1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		DPRKPLH
			1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Tumbuh	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	
2	Ketahanan Pangan	Swasembada Panan (Irigasi untuk mendukung swasembada pangan)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		DPUPR
			1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		
			1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.02.2.02.0026 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	
		Operasionalisasi BPP	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		DKPPP
			3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
			3.27.07.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		
			3.27.07.2.01.0016 - Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
		Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/ Lumbung Pangan/ <i>Food Estate</i>)	1 03 12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		DPUPR
			1.03.12.2.01. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
			1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	
			2.09.02- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		DKPPP
			2 09 02 2.01- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot		
			2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	
			2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	
			3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		DKPPP
			3.27.03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		
			3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	
			3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
		Pangan Akuatik	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		DKPPP
			3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
			3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			3 25 03 2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana PEMBERDAYAAN Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah PEMBERDAYAAN Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
			3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		
			3.25.05.2.01.0012 - Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	
		Kampung Nelayan Merah Putih	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		DKPPP
			3.25.03.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			3.25.03.2.02.0001- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	
			3.25.03.2.02.0002- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	
			3.25.03.2.02.0004- Penyediaan Sarana dan Prasarana PEMBERDAYAAN Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana PEMBERDAYAAN Usaha nelayan Skala Kecil	
3	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	1.02.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINKES
			1.02.02.2.02- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.02.0015- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0046- Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			1.03.03- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		DPUPR
			1.03.03.2.01- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
			1.03.03.2.01.0028- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	
			2.09.03- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DKPPP
			2.09.03.2.01- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
			2.09.03.2.01.0007- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			2.14.04- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		DPPPAPPKB
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
			2.14.04.2.02.0005- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINKES
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0056- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	
			1.02.02.2.02.0057- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	
			2.12.04- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DINDUKCAPIL
			2.12.04.2.04- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
			2.12.04.2.03.0004- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
	Jaminan Kesehatan Nasional		1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.06.05- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINSOS
			1.06.05.2.02- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	-	
			2.12.04- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DINDUKCAPIL
			2.12.04.2.04- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
			2.12.04.2.03.0004- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINKES

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.02.0011- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0040- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			1.06.05- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINSOS
			1.06.05.2.02- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		
			1.06.05.2.02.0003- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.12.04- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DINDUKCAPIL
			2.12.04.2.04- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
			2.12.04.2.03.0004- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/ Kota	1.02.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINKES DAN RSUD
			1.02.02.2.01- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.01.0022- Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
				1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	
			1.02.03- PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		DINKES
			1.02.03.2.02- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		
			1.02.03.2.02.0002- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	
		Makan Bergizi Gratis	1.01.02- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		DINDIKPORA
			1.01.02.2.01- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			1.01.02.2.01.0049- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
			1.02.04- PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		DINKES
			1.02.04.2.04- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
			1.02.04.2.04.0001- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			2.09.05- PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		DKPPP
			2.09.05.2.01- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			Segar Daerah Kabupaten/Kota		
			2.09.05.2.01.0007- Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	
			3.25.06- PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		DKPPP
			3.25.06 2.02- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
			3.25.06.2.02.0002- Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		DINDIKPORA
			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			1.01.02.2.01.0038- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			1.01.02.2.02.0051- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
			1.01.02.2.03.0025- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
		Digitalisasi Pembelajaran	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		DINDIKPORA
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			1.01.02.2.02.0060- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
			1.01.02.2.03.0039- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
			1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	2.09.03- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DKPPP
			2.09.03.2.01- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
			2.09.03.2.01.0008- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.01.0020- Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-	
			3.30.04- PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		DINKOPDAG
			3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah
			3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
		Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		DINKOPDAG
			2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Adapun dukungan Pemerintah dalam mendukung Tematik Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4. 21
Dukungan terhadap Tematik Pembangunan
oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No.	Tematik	Indikator Tematik	Satuan	Leading Sector	Sub Kegiatan
1	Pengarusutamaan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai		1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
					2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
					2.08.02.2.01.0015 Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
					2.17.07.2.01.0021 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha
2	Perlindungan Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks		1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
					1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
					2.08.06.2.02.0012 Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan

No.	Tematik	Indikator Tematik	Satuan	Leading Sector	Sub Kegiatan
					Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota
					5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
3	Masyarakat Adat	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui	%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
					2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4	Ekonomi Syariah	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	Sekretariat Daerah	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin		2.17.07.2.01.0027 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk
					3.26.02.2.04.0019 Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha
					3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
					4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
6	Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Persentase	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai		1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

4.4.2.Dukungan terhadap Program Prioritas dan Program Delegasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung program prioritas dan Program Delegasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Program delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 34 program/kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, antara lain:

Tabel 4. 22
Dukungan terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah
oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas Provinsi	Perangkat Daerah
1	Melahirkan Pemerintahan yang <i>good clear government</i> dan <i>collaborative governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SETDA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
2	Pesantren obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
3	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	
4	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan <i>go international</i> , Sistem Informasi Desa (SID) dan tim tanggap bencana	Program Peningkatan Kerjasama Desa	DINPERMADES
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
5	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan dan gelanggang olahraga internasional	Program Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
		Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
6	Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui “Mageri Segoro” untuk mengamankan garis pantai	Kabupaten Temanggung tidak memiliki pantai	
7	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan <i>day care</i> untuk buruh di kawasan industri	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
8	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BANKESBANGPOL
9	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
10	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk lapangan kerja	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DINDIKPORA
11	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghala quran untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Program Kesejahteraan Rakyat	SETDA
		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 4. 23
Dukungan terhadap Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah
oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Intervensi Provinsi	Perangkat Daerah
1	Integrasi Aplikasi Pelayanan kedalam “Jateng Ngopeni”	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO
2	Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 Jam “Jateng Nglakoni”	-	-
3	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	-	-
4	Digitalisasi Manajemen Arsip	Program Pengelolaan Arsip	DINPUSIP
5	Penetapan Zona Integritas/Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Program Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT
6	Penguatan APIP dengan Menambah Anggaran dan Personil untuk Pengawasan mulai dari Tingkat Provinsi sampai Tingkat Desa	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
7	Riset Potensi Daerah secara Sukarela berbasis Potensi Wilayah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
8	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan Pemberdayaan Ekonomi bagi Disabilitas, Perempuan, Pelaku Ekonomi Kreatif dan Sport Center)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
		Program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	DINBUDPAR
9	Membangun 1.000 Desa/Kampung Wisata Baru	Program Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	DINBUDPAR
10	Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Religi berdasarkan Potensi Wilayah		
	a. Pengembangan Wisata Alam 1. Dieng – Wonosobo 2. Geopark Karangsambung – Kebumen	-	-
	b. Pengembangan Wisata Budaya 1. Rambut Gimbal – Dieng 2. Desa Adat Bamokeling – Banyumas	-	-
	c. Pengembangan Wisata Religi 1. Kyai Soleh Darat – Kota Semarang 2. Sunan Kalijaga – Demak 3. Sunan Muria – Kudus 4. Klenteng Liong Hok Bio – Kota Magelang 5. Gereja Salib Putih – Salatiga 6. Prambanan dan Borobudur – Magelang	-	-
11	Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Global dengan Prioritas Pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng dan Rawa Pening	-	-
12	Mendorong Pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai Sentra Ekonomi Jawa	-	-
13	Pengembangan Kebudayaan dan Cagar Budaya untuk Pertumbuhan Ekonomi serta		

No	Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Intervensi Provinsi	Perangkat Daerah
	Dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal		
	a. Pembinaan Kebudayaan Lokal Bekerjasama dengan ISI Surakarta	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
	b. Revitalisasi Taman Cagar Budaya	-	-
14	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
15	Percepatan Penanganan Stunting melalui Pemberian Suplemen dan Pemenuhan Gizi bagi Balita dan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
16	Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran dan Akses Internet)	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
17	Peningkatan Bantuan Keuangan Desa	-	-
18	Jambanisasi 100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
19	Pembelian Hasil Panen Petani dan Nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
		Program Penyuluhan Pertanian	
20	Program Asuransi Gagal Panen bagi Petani dan Nelayan melalui Jamkrida	-	-
21	Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang)	-	-
22	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	-	-

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Tabel 4. 24
Dukungan terhadap Program Aksi Provinsi Jawa Tengah
oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Perangkat Daerah
1	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah	-	-
2	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	BAGIAN HUKUM
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
3	Pengembangan <i>Sister Province</i>	-	-
4	Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “ <i>Cyber Security Jawa Tengah</i> ” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK	Program Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINKOMINFO
5	Program Kerjasama Forkopimda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BAGIAN HUKUM

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Perangkat Daerah
6	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT
7	Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C	-	-
8	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
9	Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD	Program Perekonomian dan Pembangunan	BAGIAN PEREKONOMIAN
10	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	BAPPERIDA
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
11	Pemenuhan dan Peningkatan akses internet di desa (102 desa <i>blankspot</i>)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	DINKOMINFO
12	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
13	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter	-	-
14	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)	-	-
15	Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi	-	-
16	Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global	-	-
17	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api	-	-
18	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	
19	Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau)	-	-
20	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya	-	-
21	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	-	-
22	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian	-	-
23	Pendirian Koperasi Buruh	-	-
24	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	DINBUDPAR
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
25	Event olahraga memancing terbesar di Asia	-	-

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Perangkat Daerah
26	Mendukung dan menjadikan Kegiatan Tarkam (Pertandingan Antar Kampung) masuk ke dalam Kalender Olahraga Provinsi	-	-
27	Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	
28	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	
29	Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional	-	-
30	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DINKOPDAG
31	Mendorong Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa	-	-
32	Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah	-	-
33	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
34	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika/Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	DINKOMINFO/ DINBUDPAR
35	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
36	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
37	Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja	-	-
38	Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sosial	-	-
39	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPKB
		Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
40	Mengusulkan Lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO	-	-
41	Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	-
42	Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri	-	-
43	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BANKESBANGPOL

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Perangkat Daerah
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
44	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES
		Program Penunjang (BLUD)	DINKES (Puskesmas)
		Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES (Puskesmas)
		Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES (Puskesmas)
45	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Program Penunjang (BLUD)	DINKES
		Program Pemenuhan UKM dan UKP	
46	Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD
47	BOSDa Madrasah Aliyah	-	-
48	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	-	-
49	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
50	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
51	Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir	-	-
52	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional	-	-
53	Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)	-	-
54	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	-	-
55	Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp.1000 untuk Buruh, Lansia, Veteran, dan Pelajar	-	-
56	Petani milenial gaji	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
57	Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPERIDA
58	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
59	Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali	-	-
60	Mendorong pembangunan <i>Giant Sea Wall</i> (Tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah)	-	-
61	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DPRKPLH

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Tabel 4. 25
Dukungan terhadap Program Delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah
oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Delegasi Kabupaten	Aktivitas Rill yang Dilaksanakan	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan <i>sport center</i>)	Pelatihan Keterampilan Kuliner: Meningkatkan Ekonomi Keluarga melalui Pembuatan Kue	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
		Pendataan Pelaku Subsektor Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	DINBUDPAR
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Sosialisasi Antikorupsi kepada ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa, Memasukkan Materi tentang Antikorupsi dalam Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT
		Pendampingan Pembangunan Desa Antikorupsi di Kabupaten Temanggung		
		Penilaian/Evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) ZI kepada Perangkat Daerah yang akan diusulkan Penilaian oleh TPN		
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Mengkoordinir Pelaksanaan Pelayanan <i>Spelling</i> di Desa	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES
		Memaksimalkan Puskesmas Keliling	Program Penunjang (BLUD)	DINKES (Puskesmas)
		Memanfaatkan Pustu/PKD yang Ada dan Berfungsi	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES (Puskesmas)
		Memanfaatkan PKD dan Posyandu yang Ada di Setiap Desa	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES (Puskesmas)
5	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Bukan Kewenangan Kabupaten		
6	Mendorong pembentukan Rumah	Pembentukan Satgas PPA di Tingkat	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPAPPKB

No	Program Delegasi Kabupaten	Aktivitas Rill yang Dilaksanakan	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Perangkat Daerah
	Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Kecamatan, Kelurahan dan Desa		
		Rumah Singgah yang Berfungsi untuk Perlindungan Sosial Sementara bagi PMKS/PPKS Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
7	Membangun 1.000 Desa/Kampung wisata baru	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Program Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	DINBUDPAR
8	BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Pendampingan Pembentukan Badan Hukum untuk BUMDes	Program Penataan Desa	DINPERMADES
		Penyusunan Regulasi Daerah tentang BUMDes		
9	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
10	Cek Kesehatan Gratis	Melakukan Skrining Kesehatan melalui Cek Kesehatan Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan di Posyandu secara Berkala	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES
11	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Penugasan Bidan untuk Pelayanan di Desa	Program Penunjang (BLUD)	DINKES
			Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES
12	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government dan Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Kesejahteraan, Profesionalitas dan Kualitas ASN dan Perangkat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
		Pendidikan dan Pelatihan ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
13	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	BAGIAN HUKUM
		Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
14	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Bukan Kewenangan Kabupaten		
15	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Penguatan Anggaran dan Perubahan Manajemen Balai Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPPAPPKB
		Kolaborasi Perlindungan dan Pemberdayaan Anak		

No	Program Delegasi Kabupaten	Aktivitas Rill yang Dilaksanakan	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Perangkat Daerah
		Terlantar dan Fakir Miskin		
16	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Mengembangkan Wisata Ramah Muslim	Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
		Penyusunan Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah	Program Perekonomian dan Pembangunan	BAGIAN PEREKONOMIAN
17	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Pendampingan Sertifikasi HAKI bagi UMKM	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	BAPPERIDA
		Pendampingan Sertifikasi P-IRT bagi UMKM	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
18	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
		Operasional RPH sesuai dengan Standar		
19	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan <i>go internasional</i> , Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Sistem Informasi Desa (SID)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DINPERMADES
		Penguatan Tim Tanggap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
20	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, <i>hydro</i> , maupun tenaga surya	Bukan Kewenangan Kabupaten		
21	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Peningkatan SDM dan Kelembagaan Kelompok Wanita	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	DKPPP
22	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan dan Pendampingan untuk Menciptakan 1000 Konten Kreator di Desa Wisata	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika/Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	DINKOMINFO/ DINBUDPAR
23	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Gelar Produk UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
		Pendampingan Perizinan		
		Pelatihan Pengusaha UMKM		
24	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Menyusun Regulasi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	BAPPERIDA
		Menyusun RAD tentang Ekonomi Hijau		
25	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang	RTH Perkotaan	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin	DPRKPLH
		RTH Pedesaan		

No	Program Delegasi Kabupaten	Aktivitas Rill yang Dilaksanakan	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Perangkat Daerah
	Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa		Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
26	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	BANKESBANGPOL
27	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Penanaman Nilai Universal dan Nilai Kebangsaan pada Siswa SMP/SMA Dialog Tokoh Lintas Agama	Program Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	BANKESBANGPOL
28	Peningkatan operasional kader Posyandu	Pendampingan pada Kader Posyandu	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES
29	Peningkatan kualitas hidup lansia	Pemberian Makan kepada Lansia Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
		Melakukan Skrining Kesehatan Lansia melalui CKG	Program Pemenuhan UKM dan UKP	DINKES
30	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Identifikasi Partner Kerjasama Pengembangan Cafe Berdaya di setiap Kecamatan	Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
31	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di Masing-Masing Desa/ Kelurahan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DINKOPDAG
32	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
		Penyusunan Peraturan Bupati Desain Olahraga Daerah		
		Pemberian Hibah kepada KONI		
33	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Penyusunan SK Penyelenggaran Sekolah Inklusi (1 Kecamatan 1 Sekolah)	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Penyusunan Perbup tentang Penyelenggaran Pendidikan Inklusif		
		Penyelenggaraan Bimtek Peningkatan Kapasitas Guru Inklusi		
		Pembentukan Tim KKG (Kelompok Kerja Guru Inklusif)		
34	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana	Penyusunan Pembuatan Peta Rawan Bencana tingkat Desa	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

No	Program Delegasi Kabupaten	Aktivitas Rill yang Dilaksanakan	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Perangkat Daerah
	berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana			

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.3.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur dalam beberapa regulasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selain sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Daerah, implementasi SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh pelayanan yang layak dan merata sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat 6 jenis SPM yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah sasaran dan prioritas daerah. Prioritas daerah dalam mendukung pencapaian SPM diarahkan pada pemenuhan layanan dasar tidak hanya dalam hal jenis tetapi juga mutu pelayanan. Secara lebih rinci, sasaran dan prioritas daerah Kabupaten Temanggung dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 26
Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM
di Kabupaten Temanggung Tahun 2027

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
1	Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Literasi dan Numerasi			
		Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas			
		Kekhususan PAUD			
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
		Pelayanan kesehatan balita			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar			
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			
		Pelayanan kesehatan penderita DM			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis			
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan - Pelestarian lingkungan hidup	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Pengembangan Perumahan
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/ kota			
5	Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Pelayanan informasi rawan bencana			
		Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	• Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak • Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	• Program Rehabilitasi Sosial • Program Penanganan Bencana
		Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan		
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota			

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional dan menjadi salah satu tahapan dalam proses perencanaan sekaligus instrumen yang penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 juga telah memperhatikan hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

Beberapa usulan yang disampaikan dalam forum Musrenbang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 sebagai berikut:

- Perlunya fasilitasi untuk penyerapan tenaga kerja disabilitas pada perusahaan yang ada di Kabupaten Temanggung.
- Diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap program penanaman pohon yang telah dilaksanakan.

Adapun hasil Musrenbang di Kecamatan untuk perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 27
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	Lokasi	Perangkat Daerah	Kecamatan
1	Pengembangan Sektor Pertanian Dan Pariwisata Untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jembatan Nglarangan Jalan Kabupaten Pare - Nguwet	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dilebarkan	Jembatan Kali Nglarangan, Ruas Jalan Pare - Nguwet - Desa Nguwet	DPUPR	Kranggan
2				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyediaan Sanitasi Air Minum		Tersedianya Air Bersih	Desa Nampirejo	DPUPR	Temanggung
3				Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Jembatan Pengilon - Wonosari	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dilebarkan	Jembatan Kalisemen, Ruas Jalan Pengilon - Wonosari (Desa Pakurejo	DPUPR	Bulu
4				Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Aspal Jalan Candioto - Bandarejo (Jalan Antar Kecamatan Candioto - Gemawang)	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Direhabilitasi	Ruas Jalan Candioto - Bandarharjo	DPUPR	Candioto
5				Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Pelebaran Jalan Raya Kaloran - Kranggan	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan Yeng Dilebarkan Menuju Standar	Ruas Jalan Kranggan - Kaloran	DPUPR	Kaloran
6				Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Dan Peningkatan Jalan Lempuyangan - Tretep	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan Yang Dilebarkan Menuju Standar	Ruas Jalan Lempuyangan - Tretep	DPUPR	Tretep
7				Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Wonoboyo - Campurejo	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Ruas Jalan Wonoboyo-Campurejo	DPUPR	Wonoboyo
8				Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan Kabupaten (Tleter-Wonokerso) No 33-23-186	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Direkonstruksi	Ruas Jalan Tleter - Wonokerso	DPUPR	Pringsurat

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	Lokasi	Perangkat Daerah	Kecamatan
9	Pengembangan Sektor Pertanian Dan Pariwisata Untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Di Pelihara Secara Berkala	Ruas Jalan Caturanom - Glapansari	DPUPR	Parakan
10				Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Banjarsari - Kataan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Di Rehabilitasi	Ruas Jalan Banjarsari - Kataan	DPUPR	Ngadirejo
11				Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Lanjutan Braman - Gemawang)	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Berkala	Ruas Jalan Kebraman - Gemawang	DPUPR	Gemawang
12				Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Dan Pelebaran Jalan Setretes Desa Campuranom	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Berkala	Ruas Jalan Caturanom - Campuranom	DPUPR	Bansari
13				Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaen Ruas Jalan Tlogomulyo - Delok	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Berkala	Ruas Jalan Tlogomulyo - Delok	DPUPR	Tlogomulyo
14				Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Ruas Jalan Aspal Bejen - Ngaliyan	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan Yang Dilebarkan Menuju Standar	Ruas Jalan Bejen - Ngaliyan	DPUPR	Bejen
15				Program penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jalan Dan Jembatan	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dilebarkan	Ruas Jalan Parakan Wonosroyo (Jembatan Kali Ngerancang)	DPUPR	Kedu
16				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum Botoputih Gandu Banaran	Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Terbangun	Ruas Jalan Greges - Banaran	DINHUB	Tembarak
17				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerangan Jalan Umum Jalan Muntung - Jumo	Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Terbangun	Ruas Jalan Muntung - Jumo Ruas Jalan Jumo - Ketitang Ruas Jalan	DINHUB	Jumo

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	Lokasi	Perangkat Daerah	Kecamatan
								Ngadirejo - Tegong		
18				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum, Jalan Nasional Ruas Jalan Paponan – Kledung	Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Terbangun	Batas Kabupaten Wonosobo / Temanggung-Parakan	DINHUB	Kledung
19	Pengembangan Sektor Pertanian Dan Pariwisata Untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Tembarak Gambasan (Dusun Koripan Desa Kacepit), Ruas Jalan Bengkal - Gambasan (Tanjakan Suruh Desa Plumbon) Ruas Jalan Dalangan Bagusan (Jembatan Pertigaan Plumbon - Bumiayu - Bagusan), Ruas Jalan Setugu - Ngaditirto (Komplek Gedung KDKMP Jambanan Desa Ngaditirto), Ruas Jalan Gatak - Ngaditirto (Tanjakan Tompak Desa Jetis)	Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Terbangun	Ruas Jalan Tembarak - Gambasan Ruas Jalan Bengkal - Gambasan Ruas Jalan Dalangan - Bagusan Ruas Jalan Setugu - Ngaditirto Ruas Jalan Gatak - Ngaditirto	DINHUB	Selopampang
20				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan Lampu Jalan Umum	Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Terbangun	Ruas Jalan Kandangan - Rowoseneng	DINHUB	Kandangan

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.5.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Ekstrem yang menargetkan angka kemiskinan 0%. Adapun dalam penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan mempedomani Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan 3 strategi penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, stabilitas harga dan program lain yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program peningkatan produktivitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses pekerjaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil dan program lain yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c. Mengurangi wilayah kantong kemiskinan melalui program Peningkatan Infrastruktur Jalan, Peningkatan Akses Sanitasi Lingkungan dan Akses Air Bersih, Peningkatan Sarana Transportasi, Peningkatan Akses Komunikasi dan Informasi, Peningkatan Akses dan Layanan Sarana Pendidikan dan Kesehatan, dan program lain yang dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Strategi tersebut dilakukan dengan peningkatan validitas data yang memanfaatkan infrastruktur teknologi komunikasi dan pendataan secara bottom up untuk menjadi dasar intervensi yang akan dilakukan. Intervensi berbasis individu dan kewilayahan yang dilakukan secara kolaboratif, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada. Fokus intervensi yang dilakukan adalah pemberian bantuan secara tepat sasaran, peningkatan akses layanan dan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan pengembangan wisata dan pemberdayaan produk lokal.

Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan, hal tersebut ditunjukkan

dengan arah kebijakan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2027 yang juga sebagai penerapan dari 3 strategi penanggulangan kemiskinan.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4. 28
Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan

No	Strategi Penanggulangan	Sasaran/ Prioritas Pembangunan	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
1.	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, stabilitas harga dan program lain yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DINKES
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
			Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPAPPKB
			Program Perlindungan Perempuan	DPPPAPPKB
			Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
			Program Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
			Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
			Program Penanganan Bencana	DINSOS
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	DINSOS

No	Strategi Penanggulangan	Sasaran/ Prioritas Pembangunan	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
			Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran	SATPOL PP DAMKAR
2.	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program peningkatan produktivitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses pekerjaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil dan program lain yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DINKES
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
			Program Hubungan Industrial	DINPERINAKER
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
			Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
			Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DINKOPDAG
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
3.	Mengurangi wilayah kantong kemiskinan melalui program Peningkatan Infrastruktur Jalan, Peningkatan Akses Sanitasi Lingkungan dan Akses Air Bersih, Peningkatan Sarana Transportasi, Peningkatan Akses Komunikasi dan Informasi, Peningkatan Akses dan Layanan Sarana Pendidikan dan Kesehatan, dan program lain yang dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB

No	Strategi Penanggulangan	Sasaran/ Prioritas Pembangunan	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
			Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
			Program Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
			Program Penanganan Bencana	DINSOS

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Pemerintah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten bersinergi dengan berbagai pihak seperti lembaga amal zakat, CSR dan TJSLP dalam membantu intervensi percepatan penghapusan kemiskinan.

4.4.6.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung

Pemerintah telah menetapkan stunting menjadi isu prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahun 2024 prevalensi stunting Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai angka sebesar 27,3%. Capaian tersebut masih jauh dari target nasional yang telah ditetapkan sebesar 18,8%. Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

Berikut merupakan sasaran, prioritas daerah, dan program dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Temanggung, sebagaimana dalam tabel.

Tabel 4. 29
Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		Optimalisasi produksi pertanian dan perkebunan	Program Peningkatan Diversifikasi dan	DKPPP

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
			Ketahanan Pangan Masyarakat	
2	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	• Program Pengendalian Penduduk • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPPAPKKB
3	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik	• Program Kawasan Permukiman • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
		Pembangunan infrastruktur dan konektivitas transportasi publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.7.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17 tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bapperida Kabupaten Temanggung. Ada satu tujuan yaitu tujuan 10 yang tidak secara langsung berkontribusi karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat.

Tabel 4. 30
Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Temanggung

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, <u>dengan prioritas pembangunan daerah:</u> 1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan 2. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermades
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinpermades
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinkopdag

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah:</u> 1. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan 2. Optimalisasi Pasar Daerah 3. Peningkatan kualitas tenaga kerja 4. Pelayanan dasar bidang pendidikan 5. Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinsos
		Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah:</u> 1. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak 2. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
			Program Penanganan Bencana	Dinsos
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPPAPPKB
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPPAPPKB
		Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah:</u> 1. Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah:</u> 1. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan 2. Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah:</u> 1. Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah:</u> 1. Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
		Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, <u>dengan prioritas pembangunan daerah:</u> 1. Integrasi data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinkominfo
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, <u>dengan prioritas pembangunan daerah:</u> 1. Integrasi data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinkominfo
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, <u>dengan prioritas pembangunan daerah:</u> 1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah:</u> 1. Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	tidak ada indikator di Pemerintah Kabupaten Temanggung karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota		
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> :	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian Setda
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> :		
			1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	
			2. Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	
			Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> :	
			1. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	
			2. Peningkatan kualitas tenaga kerja	
			3. Penguatan dan pelestarian seni budaya	
			4. Optimalisasi pasar daerah	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinbudpar
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinbudpar
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> :	Program Peningkatan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinbudpar
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> :	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinkopdag
			1. Integrasi data	
			Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> :	
			1. Peningkatan kualitas tenaga kerja	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinkominfo
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> : 1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan 2. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermades
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinpermades
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> : 1. Pelayanan dasar bidang pendidikan 2. Pelayanan dasar bidang kesehatan 3. Optimalisasi pasar daerah 4. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinkopdag
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
			Program Jaminan dan Perlindungan Sosial	Dinsos
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPPAPPKB
		Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> : 1. Pelayanan sosial dan bidang keagamaan 2. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPPAPPKB
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> : 1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Kawasan permukiman	DPRKPLH
		Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		seluruh aspek pembangunan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> : 1. Pencegahan dan mitigasi bencana alam		
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> : 1. Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Hubungan Industrial	Dinperinaker
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> : 1. Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> : 1. Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena tidak mempunyai laut		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada indikator berikut karena bukan merupakan indikator di tingkat kabupaten/kota		
16	Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, <u>dengan prioritas pembangunan daerah</u> : 1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKPAD
			Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi Setda
			Program Pencatatan Sipil	Dindukcapil
17	Menguatkan sarana	Terwujudnya peningkatan kualitas	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BKPAD

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, <u>dengan prioritas pembangunan daerah:</u> 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.8.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsif gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan teknik analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*). Penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 4. 31
Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
		Pelayanan dasar bidang kesehatan	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	RSUD
		Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
		Optimalisasi Pasar Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
		Penguatan dan pelestarian seni budaya	• Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinbudpar
		Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
2.	Terwujudnya peningkatan	Pencegahan dan mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	alam	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Damkar
		Pelestarian lingkungan hidup	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
			Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
		Pelayanan perijinan dan administrasi	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Pembangunan Setda
		Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Setda
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	INSPEKTORAT
			• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Riset Dan Inovasi Program Penelitian dan Pengembangan	Bapperida
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BPKPAD
			• Program Kepegawaian Daerah • Program Pendidikan dan Pelatihan	BPKSDM
			Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan
			• Program Peningkatan Kerjasama Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat • Program Administrasi Pemerintahan Desa • Program Penataan Desa	Dinpermades
			Program Pengelolaan Arsip	Dinpusip
		Digitalisasi dan Smart City	Program Pengelolaan dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
4	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	• Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Perlindungan Perempuan	DPPAPPPKB
		Pelayanan sosial dan bidang keagamaan	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pemberdayaan Sosial • Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
5.	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah	• Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan • Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	BANKESBANGPOL

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.9.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary* crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Sebagai respon terhadap kondisi diatas, Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya melalui Sasaran dan Prioritas Daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 32
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH
			Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
		Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
2	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang, salah satu Kawasan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi di Jawa Tengah adalah Kawasan Pendukung Pengembangan Kawasan Strategis.

Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Sekitarnya. Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan *Cultural Heritage Masterpiece* - Mahakarya Budaya Dunia, diharapkan menjadi magnet dan daya tarik wisatawan manca negara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan DI Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung.

Pengembangan kawasan Borobudur tersebut selaras dengan Kegiatan Prioritas dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan untuk meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Selain itu, berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Gelangmanggung dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DIY. Berdasarkan hal tersebut, Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur sebagai berikut.

Tabel 4. 33
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Penataan Garis Imajiner	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DPRKPLH
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINDIKPORA
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
		Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	DINHUB
2	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Penguatan dan pelestarian seni budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
			Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.11. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, program unggulan dan program strategis dalam mengimplementasikan WP Gelangmanggung sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DIY melalui:

a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata.

b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara.

2. Pengembangan Ekonomi Kreatif (Kriya) melalui:

a. Pengembangan inovasi pada desa-desa wisata melalui pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas BUMDes dan UMKM guna mendukung ekosistem kreatif WP Gelangmanggung;

- b. Mendorong kerjasama UMKM dan/atau BUMDes dengan IKM unggulan di WP Gelangmanggung

3. Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, sapi potong, kerbau, domba, itik, ayam buras, dan perikanan budidaya) melalui:

a. Peningkatan produksi pertanian

b. Hilirisasi pertanian

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Temanggung telah berkontribusi dalam mendukung Pengembangan WP Gelangmanggung melalui:

1. Penguatan Kabupaten Temanggung sebagai penghubung menuju destinasi pariwisata super prioritas Borobudur dan Dieng diharapkan dapat sekaligus menjadi simpul wisata alam dari Gunung Sindoro Sumbing maupun wisata Posong.

2. Penguatan komoditas perkebunan unggulan (kopi dan tembakau srintil) menjadi komoditas ekspor unggulan.

3. Pengembangan agrowisata kopi yang terintegrasi dengan ekosistem pariwisata borobudur, dieng, sindoro sumbing.

4. Penguatan dalam pengembangan ekraf berbasis potensi lokal seperti kerajinan bambu dll.

5. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas Kabupaten Temanggung sebagai simbol wisata di WP Gelangmanggung.

6. Penguatan keterhubungan ekonomi dan integrasi rantai pasok di WP Gelangmanggung.

Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung sebagai berikut:

Tabel 4. 34

Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung

SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAAERAH
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINHUB
	Penguatan dan pelestarian seni budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	DINBUDPAR
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINBUDPAR
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINBUDPAR
		Program Pemasaran Pariwisata	DINBUDPAR

SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAAERAH
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DINBUDPAR
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DINBUDPAR
	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPPP
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPPP
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPPP
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	DKPPP
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPPP
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPPP
		Program Penyuluhan Pertanian	DKPPP
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.12. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

Berdasarkan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang

merata, terarah, fokus, terukur, dan strategi yang tepat dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang -Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 35 usulan program/ kegiatan di Kawasan Purwomanggung mencakup Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung dengan mayoritas usulan program/ kegiatan berada pada sektor jalan/jembatan dan pariwisata. Total estimasi nilai investasi dari seluruh usulan tersebut sebesar Rp45.280,5 Miliar yang dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 28 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp4.280,5 M; (2) KPBU terdiri dari 6 (enam) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp32.500 M; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/ kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp8.500 M.

Adapun usulan program/ kegiatan dengan lokus Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 35
Usulan Program/ Kegiatan Kawasan Purwomanggung di Lokasi Kabupaten Temanggung Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN PERPRES 79/2019	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
1	Pembangunan prasarana konservasi SDA Sungai 'Bodri, Kab. Kendal dan Kab. Temanggung	150	APBN
2	Pembangunan Jalan Lingkar Parakan, Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo	350	APBN
3	Peningkatan Jalan 25,0 APBN Pringsurat - Secang - Batas Yogya, Kab. Temanggung	25	APBN
4	Pengembangan Kawasan Kopi dan Pengembangan Kawasan Agropolitan PRING KRAKAL (Pringsurat, Kranggan, Kaloran), Kab. Temanggung	100	APBN

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.

Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

Tabel 4. 36
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	DINHUB
2	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.13. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung secara umum dibentuk dari pemerataan penyediaan infrastruktur dasar pada kawasan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan dan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dimaksud mencakup penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum, penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan perwujudan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dimaksud mencakup penyediaan sarana prasarana pendukung keselamatan jalan dan pelayanan transportasi yang sesuai standar dan terkoneksi untuk memastikan pemerataan perkembangan wilayah di Kabupaten Temanggung.

Selain penyediaan infrastruktur fisik sebagaimana disebutkan diatas, terdapat infrastruktur lintas sektor yang turut berperan dalam yang peningkatan kualitas kesejahteraan dan pembangunan manusia serta pengembangan wilayah melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kesehatan, sarana prasarana pencegahan kebencanaan dan perlindungan lingkungan, serta infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan pertanian.

Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tabel 4. 37
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM NOMENKLATUR	PERANGKAT DAERAH
	merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	DINHUB
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
			Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
2	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP
		Optimalisasi Pasar Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
3	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pelayanan dasar bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
		Pelayanan dasar bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
4	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Pencegahan dan mitigasi bencana alam	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP DAMKAR
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Pelestarian lingkungan hidup	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPRKPLH
			Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
5	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Digitalisasi dan Smart City	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINKOMINFO

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.14. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta

Salah satu usulan program/kegiatan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 yaitu Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Kabupaten Magelang sepanjang 71 km. Kabupaten Temanggung yang posisinya dilalui oleh ruas tersebut direncanakan akan menjadi salah satu lokasi pintu tol yang berada di Kecamatan Pringsurat. Dukungan

dalam implementasi pintu tol Bawen-Yogyakarta tersebut dituangkan dalam sasaran dan prioritas daerah sebagai berikut.

Tabel 4. 38
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	DINHUB
2	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Diversifikasi dan hilirisasi produk unggulan pertanian	Program Pengembangan Ekspor	DINKOPDAG
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOPDAG
3	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
			Program Penempatan Tenaga Kerja	DINPERINAKER
			Program Hubungan Industrial	DINPERINAKER

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

4.4.15. Penyelenggaran Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 sebagai landasan bagi instansi pemerintah untuk menyusun, mengelola, dan berbagi data secara lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dengan standar yang telah ditetapkan, data yang dihasilkan akan memiliki format yang seragam, meta data yang jelas, serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Temanggung ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten

Temanggung serta SK Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, di mana Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas sebagai Wali Data yang bertanggung jawab mengadakan Forum Satu Data, termasuk menyelenggarakan forum pengumpulan data statistik sektoral pada tahun 2023 dengan mengundang BPS Kabupaten Temanggung dan perangkat daerah sebagai produsen data. Portal data daerah Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dapat diakses melalui laman <https://data.temanggungkab.go.id/> dan telah terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia dengan kode akun yaitu 330562.

Dalam rangka mengintegrasikan kebijakan pusat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, Kabupaten Temanggung telah menyusun Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Temanggung yang ditetapkan melalui SK Bupati Temanggung Nomor 050/291 Tahun 2023. Di sisi lain, dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Wali Data berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Temanggung sebagai pembina data, menetapkan data prioritas, standar data, dan meta data. Hal ini dituangkan dalam SK Kepala Bapperida Kabupaten Temanggung Nomor 050/004.1/2023 tentang Data Prioritas Statistik Sektoral, Standar Data, dan Metadata Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung memiliki kemanfaatan besar untuk berbagai kepentingan dan pihak, salah satunya dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang efektif harus didasarkan pada data yang akurat, valid, dan terintegrasi. Pemanfaatan Satu Data Indonesia dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung salah satunya terlihat dari penggunaan portal <https://gis.temanggungkab.go.id/> yang merupakan portal Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menyediakan data-data sektoral. Dengan ketersediaan data yang akurat, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran serta menentukan prioritas pembangunan sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien.

4.4.16. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah

Pengendalian pemerintahan daerah merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, serta prinsip tata kelola yang baik. Dengan sistem pengendalian yang efektif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kinerja, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada sistem pengendalian pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung didukung dengan adanya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keberadaan dan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menjalankan fungsi pengawasan internal didukung oleh Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/363 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Program ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Program tersebut juga menjadi acuan dan pedoman dalam pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024. Selain APIP, keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran yang juga penting dalam mendukung penyelenggaraan pengendalian pemerintahan di Kabupaten Temanggung. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPIP secara berkelanjutan, diperlukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 712/0000825 Tahun 2023 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang memiliki tugas untuk menilai dan memastikan kualitas penyelenggaraan SPIP.

Dalam rangka memperkuat penerapan SPIP dan mencapai tujuan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah. Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung selanjutnya menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam mengelola risiko, sehingga manajemen risiko dapat dijalankan secara efektif dan sistematis.

4.4.17. Manajemen Risiko

Risiko menurut *ISO 31000:2018* adalah **dampak ketidakpastian terhadap sasaran dan tujuan**. Risiko dapat muncul pada seluruh aspek organisasi, baik pada aspek operasional level kegiatan, atau level strategis dan kebijakan. Sehingga organisasi harus mengelola risiko yang diprediksi akan muncul agar pencapaian tujuan tidak terhambat, yang dikenal sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan rangkaian proses meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko suatu organisasi.

Upaya mewujudkan *good governance* yang baik dalam lingkungan Pemerintahan meningkatkan pentingnya implementasi manajemen risiko di tingkat instansi pemerintah. Kewajiban penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah mulai berlaku sejak diterbitkannya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana pada Pasal 13 disebutkan bahwa Pimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risiko. *Good governance* yang baik sejalan dengan manajemen risiko yang efektif.

Sejalan dengan diterbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional dan daerah. Dalam mengawal RKPD, pengelolaan risiko pembangunan daerah dilakukan secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam mencapai sasaran pembangunan.

Penerapan manajemen risiko pada RKPD Tahun 2027 akan difokuskan pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dan selanjutnya akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi tiap semester.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. RENCANA KERJA DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 serta selaras dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. RKPD disusun dengan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran melalui tiga langkah yaitu pertama, melanjutkan implementasi *money follows* program, dengan cara mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi.

Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Seiring dengan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 menyelaraskan program sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas sesuai dengan RKP Tahun 2027.

5.1.1. Dukungan Program Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 terhadap Prioritas Nasional (PN)

5.1.1.1. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 Terhadap Arah Kebijakan RKP Tahun 2027

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung terhadap 8 Prioritas Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP tahun 2027 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan di dalam RKP Tahun 2027 telah diidentifikasi Kegiatan Prioritas Utama pada tiap poin Prioritas Nasional.

Dukungan program dan anggaran dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 terhadap Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional (PN) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. 1
Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Temanggung Tahun 2027
Terhadap Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2027

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2027	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2027	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	535,000,000	Bankesbangpol
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru	9	42,926,700,408	Bankesbangpol
				DKPPP
				DPUPR
				DPRKPLH
				Dinkopdag
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7	2,759,628,568	BKPAD
				DPUPR
				Dinhub
				Dinperinaker
				Dinbudpar
				Dinkopdag
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas	10	1,666,630,201,857	Dindikpora
				Dinkes
				DPPPAPPKB
				Dinperinaker
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	2		DPMPTSP
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	7	9,989,109,728	Dinsos
				Dinperinaker
				DPMPTSP
				DPRKPLH
				Dinpermades
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan	5	744,393,531,782	Bagian Organisasi Setda

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2027	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2027	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
	Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan			Bapperida
				Inspektorat
				Dinkominfo
				Bankesbangpol
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	2	3,475,550,000	Bankesbangpol
				BPBD
TOTAL			2,470,709,722,343	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional melalui integrasi program dan kegiatan daerah yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penganggaran, pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna memastikan tercapainya target-target pembangunan nasional.

A. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tabel 5. 2
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional 1

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia							
	Kegiatan Prioritas Utama. Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	535,000,000	Kesatuan Bangsa dan Politik	Bankesbangpol

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

B. Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Tabel 5. 3
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional 2

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
2	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru							
	Kegiatan Prioritas Utama Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest	Program perekonomian dan Pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95 - 100	%	584,096,750	Penanaman Modal	DPMPSTP
			Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	100	%			
			Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%			
			Persentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	100	%			
			Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non	10	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa					
			Persentase Pendampingan proses PBJ	100	%			
			Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%			
			Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%			
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%			
	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah	-						
	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan	-						
	Pengembangan kawasan sentra produks pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan	-						
	Pengembangan kawasan sentra produksipangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase penanganan kerawanan pangan	100	%	80,000,000	Pangan	DKPPP
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	100	%	50,000,000	Pangan	DKPPP
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	100	%	50,000,000	Pangan	DKPPP
		program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,33	Angka	50,000,000	Pangan	DKPPP

RKPD
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2027

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian	Produktivitas Padi	6,17	ton/ha	10,169,036,439	Pertanian	DKPPP
			Produktivitas jagung	5,6	ton/ha			
			Produktivitas bawang putih	6,16	ton/ha			
			Produktivitas bawang merah	7,11	ton/ha			
			Produktivitas cabai rawit	7,02	ton/ha			
			Produktivitas cabai keriting	7,02	ton/ha			
			Produktivitas tembakau	0,645	ton/ha			
			Produktivitas kopi robusta	0,7025	ton/ha			
			Produktivitas kopi arabika	0,4150	ton/ha			
			Jumlah produksi daging ternak besar	809.172	kg			
			jumlah produksi daging ternak kecil	268637	kg			
			jumlah produksi ternak unggas	6.255.823	kg			
			jumlah produksi telur	6.874.713	kg			
			Persentase kelahiran pedet	48	%			
			Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	38,17	%			
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan	100	%	3,303,625,000	Pertanian	DKPPP
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	81	%	50,000,000	Pertanian	DKPPP
	Pembangunan pangan akuatik (<i>blue food</i>)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	140,50	ton	0	Peternakan dan Perikanan	DKPPP

RKPD
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2027

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	10.673,61	ton	265,750,000	Peternakan dan Perikanan	DKPPP
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	10	%	30,000,000	Peternakan dan Perikanan	DKPPP
		Program pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan ikan	395760	ton	10,000,000	Peternakan dan Perikanan	DKPPP
	Pembangunan pangan hewani	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	87	%	250,000,000	Peternakan dan Perikanan	DKPPP
			Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77	%			
	Pembangunan pangan lokal dan nabati	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	100	%	80,000,000	Pangan	DKPPP
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	100	%	50,000,000	Pangan	DKPPP
	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,33	Angka	50,000,000	Pangan	DKPPP
	Peningkatan penyediaan energi	-						
	Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi	-						
	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan	-						
	Konservasi sumberdaya air	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	59,77	Angka	3,743,000,000	Pekerjaan Umum	DPUPR
	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%	4,528,239,000	Pekerjaan Umum	DPUPR

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	59,03	%			
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	35,63	%			
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	35,62	%			
	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	18,06	%	2,558,961,000	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%			
	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa	-						
	Penguatan faktor pendukung ekonom digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik secara elektronik	85,00	%	1,340,735,168	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
			Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	66,67	%			
			Persentase rumah tangga dengan akses internet	92,00	%			
	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	83,00	%	1,963,564,375	Perdagangan	Dinkopdag
			Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2,40	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	6,85	%			
	Pengelolaan susut dan sisa pangan	-						
	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	100	%	50,000,000	Pangan	DKPPP
	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	60,04	angka	331,500,000	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Luas Lahan kritis tertangani	4,25	Ha			
			Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	7,71	%			
			Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	25,6	%			
			Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	15,7	%			
	Peningkatan kualitas ekosistem gambut	-						
	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan regional	Persentase jumlah TPS 3R	17,65	%		Lingkungan Hidup	DPRKPLH
		Program Pengelolaan persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	34,94	%	6,669,096,338	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Persentase sampah yang terkelola	64,87	%			
			Cakupan Pelayanan persampahan	79,58	%			
	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Program Pengembangan Sisem dan pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R	17,65	%		Lingkungan Hidup	DPRKPLH

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	34,94	%	6,669,096,338	Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Persentase sampah yang terkelola	64,87	%			
			Cakupan Pelayanan persampahan	79,58	%			
	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	-						

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

C. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Tabel 5. 4
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 3

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	Prioritas Nasional: 03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi							
	Kegiatan Prioritas Utama	-						
	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya							
	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik secara elektronik	85,00	%	1,340,735,168	Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
			Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	66,67	%			
			Persentase rumah tangga dengan akses internet	92,00	%			
	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas BorobudurYogyakarta-Prambanan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang	17	DTW	828,893,400	Pariwisata	Dinbudpar

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			mendapatkan fasilitas					
			Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	600	orang			
		Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	%	395,000,000	Pariwisata	Dinbudpar
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	95	orang			
			Jumlah pengunjung tempat bersejarah	31.191	orang			
	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena	-						
	Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	-						
	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo	-						
	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	-						
	Pengembangan koperasi sektor produksi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	0,38	%	195,000,000	Perdagangan, dan UMKM	Dinkopdag

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

D. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Tabel 5. 5
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 4

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
4	PRIORITAS NASIONAL: 04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas							
	Kegiatan Prioritas Utama							
	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	60,59	%	142,937,129,209	Pendidikan	Dindikpora
			Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	66,22	%			
			Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	75	%			
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	70,74	%			
			Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	74	%			
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	86,69	%			
			Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	24,9	%			
			Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	33,33	%			
			Iklim Inklusivitas SD	58,19	nilai			
			Iklim Keamanan SD	73,8	nilai			
			Iklim Kebhinekaan SD	72,08	nilai			
			Iklim Inklusivitas SMP	64,44	nilai			
			Iklim Keamanan SMP	71,06	nilai			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkp Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Iklm Kebhinekaan SMP	71,75	nilai			
			Rasio Guru/Siswa SD	1:28	angka			
			Rasio Guru/Siswa SMP	1:32	angka			
			Rasio Guru/Siswa PAUD	1:15	angka			
			Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	100	%			
			APK SD Sederajat	99,77	%			
			APM SD Sederajat	93,66	%			
			APK SMP Sederajat	100	%			
			APM SMP Sederajat	86,69	%			
			APM PAUD (5-6)	86,9	%			
			Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	100	%			
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	239	angka			
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	558	angka			
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	699	angka			
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	2141	angka			
			Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	192	angka			
			Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	230	angka			

RKPD
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2027

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkp Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	60,59	%	142,937,129,209	Pendidikan	Dindikpora
			Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	66,22	%			
			Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	75	%			
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	70,74	%			
			Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	74	%			
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	86,69	%			
			Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	24,9	%			
			Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	33,33	%			
			Iklim Inklusivitas SD	58,19	nilai			
			Iklim Keamanan SD	73,8	nilai			
			Iklim Kebhinekaan SD	72,08	nilai			
			Iklim Inklusivitas SMP	64,44	nilai			
			Iklim Keamanan SMP	71,06	nilai			
			Iklim Kebhinekaan SMP	71,75	nilai			
			Rasio Guru/Siswa SD	1:28	angka			
			Rasio Guru/Siswa SMP	1:32	angka			
			Rasio Guru/Siswa PAUD	1:15	angka			
			Persentase satuan pendidikan yang	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RkpD Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan					
			APK SD Sederajat	99,77	%			
			APM SD Sederajat	93,66	%			
			APK SMP Sederajat	100	%			
			APM SMP Sederajat	86,69	%			
			APM PAUD (5-6)	86,9	%			
			Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	100	%			
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	239	angka			
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	558	angka			
			Angka Putus SMP Sederajat	699	angka			
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	2141	angka			
			Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	192	angka			
			Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	230	angka			
	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	60,59	%	142,937,129,209	Pendidikan	Dindikpora
			Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	66,22	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkp Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	75	%			
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	70,74	%			
			Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	74	%			
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	86,69	%			
			Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	24,9	%			
			Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	33,33	%			
			Iklim Inklusivitas SD	58,19	nilai			
			Iklim Keamanan SD	73,8	nilai			
			Iklim Kebhinekaan SD	72,08	nilai			
			Iklim Inklusivitas SMP	64,44	nilai			
			Iklim Keamanan SMP	71,06	nilai			
			Iklim Kebhinekaan SMP	71,75	nilai			
			Rasio Guru/Siswa SD	1:28	angka			
			Rasio Guru/Siswa SMP	1:32	angka			
			Rasio Guru/Siswa PAUD	1:15	angka			
			Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	100	%			
			APK SD Sederajat	99,77	%			
			APM SD Sederajat	93,66	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			APK SMP Sederajat	100	%			
			APM SMP Sederajat	86,69	%			
			APM PAUD (5-6)	86,9	%			
			Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	100	%			
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	239	angka			
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	558	angka			
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	699	angka			
			Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	2141	angka			
			Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	192	angka			
			Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	230	angka			
	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul		-					
	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, inservice training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan potensi ASN	27,21	%	2,079,830,070	Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM
	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	-						
	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam	70	%	27,000,000	Riset dan Inovasi daerah	Bappeda

RKPD
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2027

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			dokumen perencanaan					
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	50	%	158,000,000	Riset dan Inovasi daerah	Bappeda
			Persentase inovasi yang dimanfaatkan	70	%			
	Penurunan kematian ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	154,220,294,620	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%			
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH			
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%			
			Prevalensi wasting balita	7	%			
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	2,3	%			
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,1	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RkpD Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%			
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	30	%			
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	85	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	86	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	88	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%			
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM)	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RkpD Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
			Persentase penderita Hipertensi	100	%			
			mendapatkan pelayanan kesehatan					
			sesuai standar					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%			
			Prevalensi Obesitas	15	%			
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	76,92	%			
			Insidensi Hepatitis B	15 per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk			
			Prevalensi kusta	< 0.1	per 1000 penduduk			
			Eliminasi Rabies	0	%			
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,3	%			
			Eliminasi Malaria	100	%			
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%			
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%			
			Cakupan kepesertaan aktif	69,68	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			jaminan kesehatan nasional					
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%			
			Persentase Desa /Kelurahan STBM	28	%			
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	22,8	%			
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%			
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	21	%			
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	7,25	%			
	Pencegahan dan penurunan stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	154,220,294,620	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RkpD Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH			
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%			
			Prevalensi wasting balita	7	%			
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	2,3	%			
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,1	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%			
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	30	%			
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	85	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	86	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	88	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%			
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Hipertensi	100	%			
			mendapatkan pelayanan kesehatan					
			sesuai standar					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkp Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			kesehatan jiwa sesuai standar					
			Prevalensi Obesitas	15	%			
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	76,92	%			
			Insidensi Hepatitis B	15 per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk			
			Prevalensi kusta	< 0.1	per 1000 penduduk			
			Eliminasi Rabies	0	%			
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,3	%			
			Eliminasi Malaria	100	%			
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%			
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%			
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,68	%			
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%			
			Persentase Desa/Kelurahan STBM	28	%			
			Persentase tempat pengelolaan pangan	22,8	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			memenuhi syarat kesehatan					
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%			
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	21	%			
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	7,25	%			
	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	154,220,294,620	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%			
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH			
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RkpD Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Prevalensi wasting balita	7	%			
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	2,3	%			
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,1	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%			
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	30	%			
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	85	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	86	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	88	%			
			Persentase fasilitas pelayanan	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkp Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			kesehatan dengan SPA sesuai standar					
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Hipertensi	100	%			
			mendapatkan pelayanan kesehatan					
			sesuai standar					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%			
			Prevalensi Obesitas	15	%			
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	76,92	%			
			Insidensi Hepatitis B	15 per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk			
			Prevalensi kusta	< 0.1	per 1000 penduduk			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Eliminasi Rabies	0	%			
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,3	%			
			Eliminasi Malaria	100	%			
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%			
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%			
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,68	%			
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%			
			Persentase Desa /Kelurahan STBM	28	%			
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	22,8	%			
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			fasilitas pelayanan kesehatan					
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	21	%			
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	7,25	%			
	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	154,220,294,620	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%			
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH			
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%			
			Prevalensi wasting balita	7	%			
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	2,3	%			
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,1	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RkpD Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			s.d 59 tahun) sesuai standar					
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%			
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	30	%			
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	85	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	86	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	88	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%			
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RkpD Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%			
			Prevalensi Obesitas	15	%			
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	76,92	%			
			Insidensi Hepatitis B	15 per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk			
			Prevalensi kusta	< 0.1	per 1000 penduduk			
			Eliminasi Rabies	0	%			
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,3	%			
			Eliminasi Malaria	100	%			
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%			
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan	80	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			yang berpotensi KLB/wabah					
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,68	%			
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%			
			Persentase Desa/Kelurahan STBM	28	%			
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	22,8	%			
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%			
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	21	%			
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	7,25	%			
	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	154,220,294,620	Kesehatan	Dinkes

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RkpD Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%			
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH			
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%			
			Prevalensi wasting balita	7	%			
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	2,3	%			
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,1	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%			
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	30	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	85	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	86	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	88	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%			
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Hipertensi	100	%			
			mendapatkan pelayanan kesehatan					

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			sesuai standar					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%			
			Prevalensi Obesitas	15	%			
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	76,92	%			
			Insidensi Hepatitis B	15 per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk			
			Prevalensi kusta	< 0.1	per 1000 penduduk			
			Eliminasi Rabies	0	%			
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,3	%			
			Eliminasi Malaria	100	%			
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%			
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%			
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,68	%			
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Desa/Kelurahan STBM	28	%			
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	22,8	%			
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%			
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	21	%			
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	7,25	%			
	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	154,220,294,620	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%			
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH			
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			kesehatan bayi baru lahir					
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%			
			Prevalensi wasting balita	7	%			
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	2,3	%			
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,1	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%			
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	30	%			
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	85	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	86	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan	88	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			perbekalan kesehatan sesuai standar					
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%			
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Hipertensi	100	%			
			mendapatkan pelayanan kesehatan					
			sesuai standar					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%			
			Prevalensi Obesitas	15	%			
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	76,92	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Insidensi Hepatitis B	15 per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk			
			Prevalensi kusta	< 0.1	per 1000 penduduk			
			Eliminasi Rabies	0	%			
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,3	%			
			Eliminasi Malaria	100	%			
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%			
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%			
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,68	%			
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%			
			Persentase Desa/Kelurahan STBM	28	%			
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	22,8	%			
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%			
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	21	%			
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	7,25	%			
	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	154,220,294,620	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%			
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH			
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%			
			Prevalensi wasting balita	7	%			
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	2,3	%			
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,1	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	100	%			
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	30	%			
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	85	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	86	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	88	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%			
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Hipertensi	100	%			
			mendapatkan pelayanan kesehatan					
			sesuai standar					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%			
			Prevalensi Obesitas	15	%			
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	76,92	%			
			Insidensi Hepatitis B	15 per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk			
			Prevalensi kusta	< 0.1	per 1000 penduduk			
			Eliminasi Rabies	0	%			
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,3	%			
			Eliminasi Malaria	100	%			
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RkpD Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%			
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,68	%			
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	50	%			
			Persentase Desa /Kelurahan STBM	28	%			
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	22,8	%			
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%			
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	21	%			
			Persentase pekerja mendapatkan	7,25	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam RkpD Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			elayanan kesehatan kerja					
	Investasi pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	154,220,294,620	Kesehatan	Dinkes
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%			
			Angka kematian bayi	11,84	Per 1.000 KH			
			Angka kematian neonatal	8,24	Per 1.000 KH			
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%			
			Prevalensi wasting balita	7	%			
			Insiden Stunting balita (kasus baru)	2,3	%			
			Persentase anemia pada ibu hamil	11,1	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	100	%			
			Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkp Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			elayanan kesehatan					
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	30	%			
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	85	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	86	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	96,67	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	88	%			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	100	%			
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%			
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			Persentase penderita Hipertensi	100	%			
			mendapatkan pelayanan kesehatan					
			sesuai standar					
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%			
			Prevalensi Obesitas	15	%			
			Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	76,92	%			
			Insidensi Hepatitis B	15 per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk			
			Prevalensi kusta	< 0.1	per 1000 penduduk			
			Eliminasi Rabies	0	%			
			Penurunan Angka Kematian Dengue	0,3	%			
			Eliminasi Malaria	100	%			
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100	%			
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	80	%			
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	69,68	%			
			Persentase masyarakat yang	50	%			

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan					
			Persentase Desa/Kelurahan STBM	28	%			
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	22,8	%			
			Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	100	%			
			Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%			
			Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	21	%			
			Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	7,25	%			
	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan esehatan bergerak dan daerah sulit akses	-						
	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	2,32	per 1000	1,791,627,200	Kesehatan	Dinkes
	Pengembangan Manajemen Talenta							
	Nasional (MTN) seni budaya							
	Pengembangan Manajemen Talenta							

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Nasional (MTN) riset dan inovasi							
	Pengembangan Manajemen Talenta							
	Nasional (MTN) olahraga							

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

E. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Tabel 5. 6
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 5

No	Prioritas Nasional/Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah Dalam Rkpd Yang Mendukung Pn	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	PRIORITAS NASIONAL: 05-MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI							
	Kegiatan Prioritas Utama	-						
	Pengembangan hilirisasi Nikel	-						
	Pengembangan hilirisasi Tembaga	-						
	Pengembangan hilirisasi Bauksit	-						
	Pengembangan hilirisasi Timah	-						
	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	-						
	Pengembangan hilirisasi Kelapa	-						
	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut	-						
	Pengembangan hilirisasi Kimia	-						
	Pengembangan industri semikonduktor							
	Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil							
	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja							
	Pengembangan industri dirgantara							
	Pengembangan KEK Sei Mangke							
	Pengembangan KIT Batang							
	Pengembangan KI Weda bay							

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

F. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Tabel 5. 7
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 6

NO	PRIORITAS NASIONAL/KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM DAERAH DALAM RKPD YANG MENDUKUNG PN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	BIDANG	PERANGKAT DAERAH
6	PRIORITAS NASIONAL: 06-MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN							
	Kegiatan Prioritas Utama							
	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100	%	9,984,109,728	Sosial	Dinsos
			Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	86	%			
	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	-						
	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif	-						
	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	-						
	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	-						
	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	Program Penataan Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	100	%	5,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinprmdes

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

G. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Tabel 5. 8
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 7

NO	PRIORITAS NASIONAL/KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM DAERAH DALAM RKPD YANG MENDUKUNG PN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	BIDANG	PERANGKAT DAERAH
3	PRIORITAS NASIONAL: 07-MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN							
	Kegiatan Prioritas Utama							
	Pencegahan tindak pidana korupsi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	535,000,000	Kesatuan Bangsa dan Politik	Bankesbangpol
	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Program Pengembangan Sumber daya Manusia	Persentase pengembangan potensi ASN	%	27,21	2,079,830,070	Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM
	Transformasi digital layanan publik prioritas	-						
	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	Program Pengelolaan keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	75	%	370,889,350,856	Keuangan	BKPAD
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%			
			Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%			
			Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100	%			
			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%			
	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak	Program Pengelolaan keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian	75	%	370,889,350,856	Keuangan	BKPAD

NO	PRIORITAS NASIONAL/KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM DAERAH DALAM RKPD YANG MENDUKUNG PN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	BIDANG	PERANGKAT DAERAH
			anggaran belanja mandatory spending dalam APBD					
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%			
			Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%			
			Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100	%			
			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%			

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

H. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

Tabel 5. 9
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Kegiatan Prioritas Utama PN 8

NO	PRIORITAS NASIONAL/KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM DAERAH DALAM RKPD YANG MENDUKUNG PN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	BIDANG	PERANGKAT DAERAH
8	PRIORITAS NASIONAL: 08-MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR							
	Kegiatan Prioritas Utama							
	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	535,000,000	Kesatuan Bangsa dan Politik	Bankesbangpol
	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	1	Obyek	2,940,550,000	Kebudayaan	Dinbudpar

NO	PRIORITAS NASIONAL/KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM DAERAH DALAM RKPD YANG MENDUKUNG PN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	BIDANG	PERANGKAT DAERAH
			Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	10	Kelompok			
			Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	10	Orang			
	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut							

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dukungan program daerah dalam RKPD 2027 untuk mendukung Kegiatan Prioritas Utama pada 8 Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang secara rekapitulasi dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 5. 10
Dukungan Program Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing Prioritas Nasional

No	Jumlah Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2027			Dukungan Program Daerah RPD/ RKPD Tahun 2027			
	Prioritas Nasional	Program Pembangunan	Kegiatan Prioritas	RPJMD Tahun 2025- 2029		RKPD Tahun 2027	
				Program Daerah	Persentase	Program Daerah	Persentase
1	PN 1	5	10	1	100%	1	100%
2	PN 2	24	143	22	100%	22	100%
3	PN 3	8	36	4	100%	4	100%
4	PN 4	19	70	6	100%	6	100%
5	PN 5	5	23	0	0%	0	0%
6	PN 6	9	44	2	100%	2	100%
7	PN 7	14	36	3	100%	3	100%
8	PN 8	4	25	2	100%	2	100%

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

5.1.1.2. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 Terhadap Tema Tahunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Visi dan Misi dilaksanakan secara bertahap. Fokus tahapan dalam setiap tahunnya ditetapkan melalui tema tahunan pembangunan. Tema tahunan pembangunan merupakan fokus kebijakan serta upaya yang dilakukan pada setiap tahun selama 5 tahun periode RPJMD. Adapun tema tahunan pembangunan Tahun 2027 dalam RPJMD Kabupaten Temanggung adalah **“Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan”**.

Dukungan kebijakan pembangunan daerah dalam mendukung tema tahunan pembangunan tahun 2027 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. 11

Dukungan Program Daerah terhadap Tema Tahunan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan

No	Bidang Urusan/Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	59,77	Angka	3,743,000,000	DPUPR	
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	90,19	%	56,128,596,000		
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	94,38	%			
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	22,64	%			
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	43,48	%	16,904,216,700	DINHUB	
		Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	67,33	%			
		Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	37,1	%			
		Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	66,14	%			
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	99,67	%			
		Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	100	%			
		Persentase Layanan Perhubungan	100	%			
		Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	82,22	%			
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	89,5	%			
Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%					
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	140,5	Ton	0		
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	10.673,61	Ton	265,750,000		
6	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	10	Ton	30,000,000		
7	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan ikan	395,76		10,000,000		
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	6,17	ton/ha	10,169,036,439	DKPPP	
		Produktivitas jagung	5,6	ton/ha			
		Produktivitas bawang putih	6,07	ton/ha			
		Produktivitas bawang merah	6,82	ton/ha			
		Produktivitas cabai rawit	5,10	ton/ha			
		Produktivitas cabai keriting	5,10	ton/ha			
		Produktivitas tembakau	0,645	ton/ha			
Produktivitas kopi robusta	0,7025	ton/ha					

No	Bidang Urusan/Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah	Keterangan
		Produktivitas kopi arabika	0,4075	ton/ha			
		Jumlah produksi daging ternak besar	809.172	kg			
		jumlah produksi daging ternak kecil					
		jumlah produksi ternak unggas	6.255.823	kg			
		jumlah produksi telur	6.874.713	kg			
		Persentase kelahiran pedet	48	%			
		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	38,17	%			
		9	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan			
10	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	87	%	250,000,000		
		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77	%			
11	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	81	%	50,000,000		
12	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	58	%	50,000,000		
		Persentase Peningkatan kelas kelp tani	1,30	%			
13	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	83	%	1,963,564,375	Dinkopdag	
		Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	2,4	%			
		Persentase Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	6,85	%			
14	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	90	%	50,000,000		
15	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	131.327.193	US\$	100,000,000		
16	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	95	%	30,000,000		
17	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	21,25	%	75,000,000		
18	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	15,15	%	98,750,000		
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	0,38	%	195,000,000		
20	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	1	Obyek	2,940,550,000	Dinbudpar	
		Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	10	Kelompok			
		Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	10	Orang			

No	Bidang Urusan/Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah	Keterangan
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah	31.191	Orang			
21	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	3	Obyek	42,000,000		
22	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitas	17	DTW	828,893,400		
		Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	600	orang			
23	Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	%	395,000,000		
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	95	orang			
24	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1	orang	12,000,000		
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	135	orang	11,625,000		
26	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100	%	9,984,109,728	DINAS SOSIAL	
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	86	%			
27	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	54	%	305,000,000		
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	83	%			
28	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	37,5	%	30,625,000	DINPERINAKER	
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	33	%			
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	37,5	%			
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	94,5	%			
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	70,17	%			
29	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	42,97	%	60,000,000		
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	75	%			
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	47	%			
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	100	%			
30	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	2,2	%	12,500,000		

No	Bidang Urusan/Program	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah	Keterangan
31	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	16,67	%	315,000,000	Dinpermades	
		Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	42,85	%			
32	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	94	%	51,000,000	DPMPTSP	
33	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	94	%	118,502,000		
34	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	94	%	117,000,000		
35	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	94	%	50,000,000		

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

5.1.2. Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Konsep Tematik

Penerapan konsep tematik telah diterapkan dalam pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari adanya prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

Konsep tematik juga diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2027 adalah 1) Penguatan infrastruktur pertanian dan pariwisata melalui peningkatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang seperti jalan, irigasi dan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. 2) Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya Lokal melalui pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal. 3) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pembinaan petani, pelaku UMKM, dan pelaku wisata secara profesional dan berkelanjutan. 4) Promosi dan Pemasaran Terintegrasi.

Konsep Holistik

Tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain gerakan penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, gerakan penanganan kemiskinan, dan gerakan penanganan stunting.

Konsep Integratif

Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain kegiatan penanganan kemiskinan melalui 1 perangkat daerah 1 desa dampingan, penanganan stunting yang melibatkan semua perangkat daerah, kegiatan SDGs yang didukung banyak program dan anggaran di semua perangkat daerah.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, pelaksanaan kabupaten sehat, TMMD dan masih banyak lainnya. Penerapan konsep integratif terkait pelibatan stakeholders di luar OPD di daerah Kabupaten Temanggung diantaranya aktor non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, lembaga amal zakat, BAZNAS, komunitas tertentu, kelompok masyarakat, media massa, TJSLP dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pula pemanfaatan media informasi kreatif dalam proses perencanaan dengan melibatkan media sosial/media massa.

Konsep Spasial

Penerapan konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur yang dilaksanakan di semua kecamatan dengan salah satu tujuannya tidak ada kesenjangan antarwilayah, dan hasilnya pemetaan juga dapat dilihat dalam bentuk peta/spasial.

Tabel 5. 12
Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2027 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2027: Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan				
1	Penguatan infrastruktur pertanian dan pariwisata melalui peningkatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang seperti jalan, irigasi dan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	DPUPR
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	DPUPR
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Dinhub
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Dinbudpar
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DKPPP
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
2	Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya Lokal melalui pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata, baik Dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
		Program Pengembangan	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	Dinbudpar
		Daya Tarik Destinasi Wisata	Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Dinbudpar
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	DPRKPLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	DPRKPLH
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DPRKPLH
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	
			Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	DPRKPLH
3	Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pembinaan petani, pelaku UMKM, dan pelaku wisata secara profesional dan berkelanjutan		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	Dinkopdag
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Dinkopdag
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	
		Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Dinkopdag
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Dinkopdag
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata, baik Dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
		Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	Dinbudpar
			Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	
4	Promosi dan Pemasaran Terintegrasi	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	
		Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Dinkopdag
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Dinkopdag

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

5.1.3. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah

1. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif. Dukungan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rancangan Kerja Pemerintah (RKP)

Tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 13
Dukungan terhadap Program Strategis Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINSOS
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100,000,000	
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9,027,478,728	
			1.06.05.2.02.0009 - Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	-	
			2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		DKPPP
			2.09.04.2.02. Penanganan Kerawanan Pangan		
			Kewenangan Kabupaten/Kota		
			2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000	
		Sekolah Rakyat	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINSOS
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
			1.06.05.2.02.0008 – Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000	
			2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		DPRKPLH
			2.11.06.2.01- Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
			2.11.06.2.01.0001- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30,000,000	
		Pembangunan 3 juta rumah	1.03.08 – PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		DPUPR
			1.03.08.2.01 – Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
			1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	75,000,000	
			1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		DPRKPLH
			1.04.02.2.03 – Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	
			1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	
			1.04.04 – PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		DPRKPLH
			1.04.04.2.01 – Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
			1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		DPRKPLH

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
			1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		
2	Ketahanan Pangan	Swasembada Panan (Irigasi untuk mendukung swasembada pangan)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		DPUPR
			1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) DaerahSungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	-	
			1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	-	
			1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		
			1.03.02.2.02.0026 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	-	
		Operasionalisasi BPP	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		DKPPP
			3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
			3.27.07.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	-	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
			3.27.07.2.01.0016 - Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	-	
		Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/ Lumbung Pangan/ <i>Food Estate</i>)	1 03 12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		DPUPR
			1.03.12.2.01. Penetapan Rencana Tata Ruang		
			Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci		
			Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
			1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	-	
			2.09.02- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		DKPPP
			2 09 02 2.01- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot		
			2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	-	
			2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	50,000,000	
			3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		DKPPP
			3.27.03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		
			3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	-	
			3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/ Kota	-	
		Pangan Akuatik	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		DKPPP
			3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
			(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
			3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	-	
			3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	-	
			3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
			3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		
			3.25.05.2.01.0012 - Pengawasan Ekstraksi Garam		
		Kampung Nelayan Merah Putih	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		DKPPP
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
			3.25.03.2.02.0001- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		
			3.25.03.2.02.0002- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	-	
			3.25.03.2.02.0004- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		
3	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	1.02.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINKES
			1.02.02.2.02- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.02.0015- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7,025,691,000	
			1.02.02.2.02.0046- Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	
			1.03.03- PROGRAM PENGELOLAAN DAN		DPUPR

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
			PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
			1.03.03.2.01- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
			1.03.03.2.01.0028- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	
			2.09.03- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DKPPP
			2.09.03.2.01- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
			2.09.03.2.01.0007- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	
			2.14.04- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		DPPPAPPKB
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
			2.14.04.2.02.0005- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,278,900,000	
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINKES
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21,185,711,320	
			1.02.02.2.02.0056- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	371,751,500	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
			1.02.02.2.02.0057- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1,388,944,000	
			2.12.04- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DINDUKCAPIL
			2.12.04.2.04- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
			2.12.04.2.03.0004- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		
		Jaminan Kesehatan Nasional	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21,185,711,320	
			1.06.05- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINSOS
			1.06.05.2.02- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000	
			2.12.04- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DINDUKCAPIL
			2.12.04.2.04- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
			2.12.04.2.03.0004- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	11,498,500	
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINKES
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			1.02.02.2.02.0011- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2,446,876,500	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
			1.02.02.2.02.0040- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7,200,000	
			1.06.05- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINSOS
			1.06.05.2.02- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		
			1.06.05.2.02.0003- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9,027,478,728	
			2.12.04- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DINDUKCAPIL
			2.12.04.2.04- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
			2.12.04.2.03.0004- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	11,498,500	
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kabupaten/ Kota	1.02.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINKES DAN RSUD
			1.02.02.2.01- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
			1.02.02.2.01.0022- Pengembangan Rumah Sakit		
			1.02.03- PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		DINKES
			1.02.03.2.02- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota		
			1.02.03.2.02.0002- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	
		Makan Bergizi Gratis	1.01.02- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		DINDIKPORA
			1.01.02.2.01- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			1.01.02.2.01.0049- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	50,000,000	
			1.02.04- PROGRAM SEDIAAN FARMASI,		DINKES

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
			ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
			1.02.04.2.04- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
			1.02.04.2.04.0001- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
			2.09.05- PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		DKPPP
			2.09.05.2.01- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
			2.09.05.2.01.0007- Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	
			3.25.06- PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		DKPPP
			3.25.06 2.02- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
			3.25.06.2.02.0002- Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-	
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		DINDIKPORA
			1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			1.01.02.2.01.0038- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25,000,000	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			1.01.02.2.02.0051- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	176,000,000	

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
			dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
			1.01.02.2.03.0025- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20,000,000	
		Digitalisasi Pembelajaran	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		DINDIKPORA
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			1.01.02.2.02.0060- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100,000,000	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
			1.01.02.2.03.0039- Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	20,000,000	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		
			1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30,000,000	
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	2.09.03- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DKPPP
			2.09.03.2.01- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
			2.09.03.2.01.0008- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	-	
			2.09.03.2.01.0020- Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/ Kota		
			3.30.04- PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		DINKOPDAG
			3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di		

No	Program Strategis Nasional	Kegiatan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
			Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
			3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	40,000,000	
		Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		DINKOPDAG
			2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	1,250,000	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

2. Dukungan terhadap Program Prioritas dan Program Delegasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program prioritas serta program delegasi Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta pengintegrasian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Program delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 34 program/kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, antara lain:

Tabel 5. 14
Dukungan terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah
oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Melahirkan Pemerintahan yang <i>good clear government</i> dan <i>collaborative governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa	Program Kepegawaian Daerah	1,443,013,500	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,079,830,070	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28,667,278,119	SETDA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	4,408,729,424	DINPERMADES
2	Pesantren obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren	Program Pengelolaan Pendidikan	142,937,129,209	DINDIKPORA
3	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Program Perekonomian dan Pembangunan	584,096,750	SETDA
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	828,893,400	DINBUDPAR
		Program Pemasaran Pariwisata	395,000,000	
4	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan <i>go international</i> , Sistem Informasi Desa (SID) dan tim tanggap bencana	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4,408,729,424	
		Program Penanggulangan Bencana	1,627,414,000	BPBD
5	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan dan gelanggang olahraga internasional	Program Pengembangan Perumahan	619,699,844	DPRKPLH
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	370,889,350,856	BKPAD
		Program Perekonomian dan Pembangunan	584,096,750	SETDA
		Program Penataan Bangunan Gedung	2,995,000,000	DPUPR
		Program Pengelolaan Pendidikan	142,937,129,209	DINDIKPORA
6	Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui “Mageri Segoro” untuk mengamankan garis pantai	Kabupaten Temanggung tidak memiliki pantai		
7	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan <i>day care</i> untuk buruh di kawasan industri	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,303,625,000	DKPPP
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	
8	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan	Program Pemerintahan dan	14,143,875,350	SETDA

No	Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi	Anggaran	Perangkat Daerah
	melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Kesejahteraan Rakyat		
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535,000,000	BANKESBANGPOL
9	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	154,220,294,620	DINKES
10	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk lapangan kerja	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3,023,250,000	DINDIKPORA
11	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghala quran untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	142,937,129,209	DINDIKPORA
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14,143,875,350	SETDA
		Program Kepegawaian Daerah	1,443,013,500	BKPSDM

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 5. 15
Dukungan terhadap Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Intervensi Provinsi	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Integrasi Aplikasi Pelayanan kedalam “Jateng Ngopeni”	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,340,735,168	DINKOMINFO
2	Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 Jam “Jateng Nglakoni”	-	-	-
3	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	-	-	-
4	Digitalisasi Manajemen Arsip	Program Pengelolaan Arsip	8,000,000	DINPUSIP
5	Penetapan Zona Integritas/Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3,752,625,000	INSPEKTORAT
6	Penguatan APIP dengan Menambah Anggaran dan Personil untuk Pengawasan mulai dari Tingkat Provinsi sampai Tingkat Desa	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5,047,375,000	INSPEKTORAT
7	Riset Potensi Daerah secara Sukarela berbasis Potensi Wilayah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	370,889,350,856	BPKPAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	304,250,000	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	373,109,622	
8	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan Pemberdayaan Ekonomi bagi Disabilitas, Perempuan, Pelaku	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	5,000,000	DPPPAPPKB

No	Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Intervensi Provinsi	Anggaran	Perangkat Daerah
	Ekonomi Kreatif dan Sport Center)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11,625,000	DINBUDPAR
9	Membangun 1.000 Desa/Kampung Wisata Baru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	828,893,400	DINBUDPAR
10	Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Religi berdasarkan Potensi Wilayah			
	a. Pengembangan Wisata Alam	-		-
	1. Dieng – Wonosobo			
	2. Geopark Karangsambung – Kebumen			
	b. Pengembangan Wisata Budaya	-		-
	1. Rambut Gimbal – Dieng			
	2. Desa Adat Bamokeling – Banyumas			
	c. Pengembangan Wisata Religi	-		-
	1. Kyai Soleh Darat – Kota Semarang			
	2. Sunan Kalijaga – Demak			
	3. Sunan Muria – Kudus			
	4. Klenteng Liong Hok Bio – Kota Magelang			
	5. Gereja Salib Putih – Salatiga			
	6. Prambanan dan Borobudur – Magelang			
11	Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Global dengan Prioritas Pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng dan Rawa Pening	-		-
12	Mendorong Pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai Sentra Ekonomi Jawa	-		-
13	Pengembangan Kebudayaan dan Cagar Budaya untuk Pertumbuhan Ekonomi serta Dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal			
	a. Pembinaan Kebudayaan Lokal Bekerjasama dengan ISI Surakarta	Program Pengembangan Kebudayaan	2,940,550,000	DINBUDPAR
	b. Revitalisasi Taman Cagar Budaya	-		-
14	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	305,000,000	DINPERINAKER
		Program Penempatan Tenaga Kerja	30,625,000	
15	Percepatan Penanganan Stunting melalui Pemberian Suplemen dan Pemenuhan Gizi bagi Balita dan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	154,220,294,620	DINKES
16	Menyediakan Paket Pendidikan Gratis	Program Pengelolaan Pendidikan	142,937,129,209	DINDIKPORA

No	Program Intervensi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Intervensi Provinsi	Anggaran	Perangkat Daerah
	(Seragam, Buku Pembelajaran dan Akses Internet)			
17	Peningkatan Bantuan Keuangan Desa	-		-
18	Jambanisasi 100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,558,961,000	DPRKPLH
19	Pembelian Hasil Panen Petani dan Nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10,169,036,439	DKPPP
		Program Penyuluhan Pertanian	50,000,000	
20	Program Asuransi Gagal Panen bagi Petani dan Nelayan melalui Jamkrida	-		-
21	Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang)	-		-
22	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	-		-

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 5. 16
Dukungan terhadap Program Aksi Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah	-		-
2	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14,143,875,350	BAGIAN HUKUM
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9,984,109,728	DINSOS
3	Pengembangan <i>Sister Province</i>	-		-
4	Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “ <i>Cyber Security Jawa Tengah</i> ” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	277,499,190	DINKOMINFO
5	Program Kerjasama Forkopimda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,044,534,914	BAGIAN HUKUM
6	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3,752,625,000	INSPEKTORAT

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Anggaran	Perangkat Daerah
	Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK			
7	Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C	-		-
8	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	370,889,350,856	BPKPAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	304,250,000	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	373,109,622	
9	Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD	Program Perekonomian dan Pembangunan	584,096,750	BAGIAN PEREKONOMIAN
10	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	400,604,000	BAPPERIDA
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,822,855,000	DINKES
11	Pemenuhan dan Peningkatan akses internet di desa (102 desa <i>blankspot</i>)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	753,500,000	DINKOMINFO
12	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	195,000,000	DINKOPDAG
13	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter	-		-
14	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)	-		-
15	Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi	-		-
16	Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global	-		-
17	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api	-		-
18	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	51,000,000	DPMPSTP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	117,000,000	
19	Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau)	-		-
20	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya	-		-
21	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	-		-
22	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan	-		-

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Anggaran	Perangkat Daerah
	menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian			
23	Pendirian Koperasi Buruh	-		-
24	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	12,000,000	DINBUDPAR
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	42,000,000	
25	Event olahraga memancing terbesar di Asia	-		-
26	Mendukung dan menjadikan Kegiatan Tarkam (Pertandingan Antar Kampung) masuk ke dalam Kalender Olahraga Provinsi	-		-
27	Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	51,000,000	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	118,502,000	
28	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10,169,036,439	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,303,625,000	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	250,000,000	
29	Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional	-		-
30	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	98,750,000	DINKOPDAG
31	Mendorong Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa	-		-
32	Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah	-		-
33	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	275,302,000	BAPPERIDA
34	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,340,735,168	DINKOMINFO/
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	11,625,000	DINBUDPAR

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Anggaran	Perangkat Daerah
35	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta	Program Pengelolaan Pendidikan	142,937,129,209	DINDIKPORA
36	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10,169,036,439	DKPPP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,303,625,000	
37	Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja	-	-	-
38	Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sosial	-	-	-
39	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	40,000,000	DPPPAPPKB
		Program Rehabilitasi Sosial	914,750,000	DINSOS
40	Mengusulkan Lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO	-	-	-
41	Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	-	-
42	Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri	-	-	-
43	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535,000,000	BANKESBANGPOL
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	90,000,000	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25,000,000	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	526,321,081	
44	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	154,220,294,620	DINKES dan Puskesmas
45	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	154,220,294,620	DINKES dan Puskesmas
46	Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	380,121,867,886	
47	BOSDa Madrasah Aliyah	-	-	-

No	Program Aksi Provinsi Jawa Tengah	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Aksi Provinsi	Anggaran	Perangkat Daerah
48	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	-		-
49	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7,039,227,000	DINDIKPORA
50	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Program Pengelolaan Pendidikan	142,937,129,209	DINDIKPORA
51	Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir	-		-
52	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional	-		-
53	Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)	-		-
54	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	-		-
55	Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp.1000 untuk Buruh, Lansia, Veteran, dan Pelajar	-		-
56	Petani milenial gaji	Program Penyuluhan Pertanian	50,000,000	DKPPP
57	Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	27,000,000	BAPPERIDA
58	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	1,627,414,000	BPBD
59	Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali	-		-
60	Mendorong pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah)	-		-
61	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	43,000,000	DPRKPLH

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 5. 17
Dukungan terhadap Program Delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

No	Program Delegasi Kabupaten	Rencana Aktivitas	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi	Pelatihan Keterampilan Kuliner: Meningkatkan Ekonomi Keluarga	Program Pengarusutamaan Gender dan	5,000,000	DPPPAPPKB

No	Program Delegasi Kabupaten	Rencana Aktivitas	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Anggaran	Perangkat Daerah
	disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan <i>sport center</i>)	melalui Pembuatan Kue	Pemberdayaan Perempuan		
		Pendataan Pelaku Subsektor Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11,625,000	DINBUDPAR
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Program Kawasan Permukiman	2,124,300,000	DPRKPLH
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Sosialisasi Antikorupsi kepada ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa, Memasukkan Materi tentang Antikorupsi dalam Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3,752,625,000	INSPEKTORAT
		Pendampingan Pembangunan Desa Antikorupsi di Kabupaten Temanggung			
		Penilaian/Evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) ZI kepada Perangkat Daerah yang akan diusulkan Penilaian oleh TPN			
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Memaksimalkan Puskesmas Keliling	Program Penunjang	380,121,867,886	DINKES
		Mengkoordinir Pelaksanaan Pelayanan <i>Spelling</i> di Desa	Program Pemenuhan UKM dan UKP	154,220,294,620	DINKES
		Memanfaatkan Pustu/PKD yang Ada dan Berfungsi			
		Memanfaatkan PKD dan Posyandu yang Ada di Setiap Desa			
5	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap	Bukan Kewenangan Kabupaten			

No	Program Delegasi Kabupaten	Rencana Aktivitas	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Anggaran	Perangkat Daerah
	Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta				
6	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Pembentukan Satgas PPA di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	40,000,000	DPPPAPPKB
		Rumah Singgah yang Berfungsi untuk Perlindungan Sosial Sementara bagi PMKS/PPKS Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	914,750,000	DINSOS
7	Membangun 1.000 Desa/Kampung wisata baru	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	828,893,400	DINBUDPAR
8	BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Pendampingan Pembentukan Badan Hukum untuk BUMDes	Program Penataan Desa	5,000,000	DINPERMADES
		Penyusunan Regulasi Daerah tentang BUMDes			
9	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1,627,414,000	BPBD
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana	1,627,414,000	BPBD
10	Cek Kesehatan Gratis	Melakukan Skrining Kesehatan melalui Cek Kesehatan Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan di Posyandu secara Berkala	Program Pemenuhan UKM dan UKP	154,220,294,620	DINKES
11	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Penugasan Bidan untuk Pelayanan di Desa	Program Penunjang	380,121,867,886	DINKES
			Program Pemenuhan UKM dan UKP	154,220,294,620	DINKES
12	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government dan Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Kesejahteraan, Profesionalitas dan Kualitas ASN dan Perangkat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4,408,729,424	DINPERMADES
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
		Pendidikan dan Pelatihan ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,079,830,070	BKPSDM

No	Program Delegasi Kabupaten	Rencana Aktivitas	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Anggaran	Perangkat Daerah
13	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14,143,875,350	BAGIAN HUKUM
		Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9,984,109,728	DINSOS
14	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Bukan Kewenangan Kabupaten			
15	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Penguatan Anggaran dan Perubahan Manajemen Balai Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4,292,306,825	DPPPAPPKB
		Kolaborasi Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Terlantar dan Fakir Miskin			
16	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Mengembangkan Wisata Ramah Muslim	Program Pemasaran Pariwisata	395,000,000	DINBUDPAR
		Penyusunan Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah	Program Perekonomian dan Pembangunan	584,096,750	BAGIAN PEREKONOMIAN
17	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Pendampingan Sertifikasi HAKI bagi UMKM	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	275,302,000	BAPPERIDA
		Pendampingan Sertifikasi P-IRT bagi UMKM	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,822,855,000	DINKES
18	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10,169,036,439	DKPPP
		Operasional RPH sesuai dengan Standar			
19	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan <i>go internasional</i> , Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Sistem Informasi Desa (SID)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4,408,729,424	DINPERMADES
		Penguatan Tim Tanggap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1,627,414,000	BPBD

No	Program Delegasi Kabupaten	Rencana Aktivitas	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Anggaran	Perangkat Daerah
20	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, <i>hydro</i> , maupun tenaga surya	Bukan Kewenangan Kabupaten			
21	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Peningkatan SDM dan Kelembagaan Kelompok Wanita	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	50,000,000	DKPPP
22	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan dan Pendampingan untuk Menciptakan 1000 Konten Kretaor di Desa Wisata	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,340,735,168	DINKOMINFO/
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11,625,000	DINBUDPAR
23	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Gelar Produk UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	11,625,000	DINKOPDAG
		Pendampingan Perizinan			
		Pelatihan Pengusaha UMKM			
24	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Menyusun Regulasi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	275,302,000	BAPPERIDA
		Menyusun RAD tentang Ekonomi Hijau			
25	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	RTH Perkotaan	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	43,000,000	DPRKPLH
		RTH Pedesaan			
26	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	90,000,000	BANKESBANGPOL
27	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Penanaman Nilai Universal dan Nilai Kebangsaan pada Siswa SMP/SMA Dialog Tokoh Lintas Agama	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535,000,000	BANKESBANGPOL

No	Program Delegasi Kabupaten	Rencana Aktivitas	Program Nomenklatur Yang Mendukung Program Delegasi Kabupaten	Anggaran	Perangkat Daerah
28	Peningkatan operasional kader Posyandu	Pendampingan pada Kader Posyandu	Program Pemenuhan UKM dan UKP	154,220,294,620	DINKES
29	Peningkatan kualitas hidup lansia	Pemberian Makan kepada Lansia Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	914,750,000	DINSOS
		Melakukan Skrining Kesehatan Lansia melalui CKG	Program Pemenuhan UKM dan UKP	154,220,294,620	DINKES
30	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Identifikasi Partner Kerjasama Pengembangan Cafe Berdaya di setiap Kecamatan	Program Pemasaran Pariwisata	395,000,000	DINBUDPAR
31	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di Masing-Masing Desa/Kelurahan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	98,750,000	DINKOPDAG
32	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7,039,227,000	DINDIKPORA
		Penyusunan Peraturan Bupati Desain Olahraga Daerah			
		Pemberian Hibah kepada KONI			
33	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Penyusunan SK Penyelenggaraan Sekolah Inklusi (1 Kecamatan 1 Sekolah)	Program Pengelolaan Pendidikan	142,937,129,209	DINDIKPORA
		Penyusunan Perbup tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif			
		Penyelenggaraan Bimtek Peningkatan Kapasitas Guru Inklusi			
		Pembentukan Tim KKG (Kelompok Kerja Guru Inklusif)			
34	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Penyusunan Pembuatan Peta Rawan Bencana tingkat Desa	Program Penanggulangan Bencana	1,627,414,000	BPBD

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

3. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Temanggung didukung oleh program, pagu anggaran dan perangkat daerah pengampu sebagai berikut:

Tabel 5. 18
Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2027

No	Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Pendidikan	142,937,129,209	DINDIKPORA
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	154,220,294,620	DINKES
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4,528,239,000	DPUPR
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,558,961,000	DPRKPLH
5	Program Pengembangan Perumahan	2,124,300,000	DPRKPLH
6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,125,000,000	SATPOL PP dan DAMKAR
7	Program Penanggulangan Bencana	1,627,414,000	BPBD
8	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	50,000,000	SATPOL PP dan DAMKAR
9	Program Rehabilitasi Sosial	7,500,000	DINSOS
10	Program Penanganan Bencana	914,750,000	DINSOS

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2027

Implementasi Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Kabupaten Temanggung didukung oleh program, pagu anggaran dan perangkat daerah pengampu sebagai berikut:

Tabel 5. 19
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2027

No	Program	Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah	Kecamatan
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jembatan Nglarangan Jalan Kabupaten Pare - Nguwet	1.414.092.000	DPUPR	Kranggan
2	Program Pengelolaan Dan	Penyediaan Sanitasi Air Minum Desa Nampirejo	997.706.000	DPUPR	Temanggung

No	Program	Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah	Kecamatan
	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Jembatan Pengilon - Wonosari	1.518.367.000	DPUPR	Bulu
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Aspal Jalan Candiroto - Bandarejo (Jalan Antar Kecamatan Candiroto - Gemawang)	604.915.000	DPUPR	Candiroto
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Pelebaran Jalan Raya Kaloran - Kranggan	679.685.000	DPUPR	Kaloran
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Dan Peningkatan Jalan Lempuyangan - Tretep	405.749.000	DPUPR	Tretep
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Kapasitas Ruas Jalan Wonobojo - Campurejo	494.032.000	DPUPR	Wonobojo
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan Kabupaten (Tleter-Wonokerso)	1.542.601.000	DPUPR	Pringsurat
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Caturanom - Glapansari	689.998.000	DPUPR	Parakan
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Banjarsari - Kataan	1.557.316.000	DPUPR	Ngadirejo
11	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Lanjutan Braman - Gemawang)	522.621.000	DPUPR	Gemawang
12	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Dan Pelebaran Jalan Setretes Desa Campuranom	1.218.788.000	DPUPR	Bansari
13	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaen Ruas Jalan Tlogomulyo - Delok	364.813.000	DPUPR	Tlogomulyo
14	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Ruas Jalan Aspal Bejen - Ngaliyan	530.021.000	DPUPR	Bejen
15	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jalan Dan Jembatan Ruas Jalan Parakan Wonosroyo (Jembatan Kali Ngerancang)	750.967.000	DPUPR	Kedu
16	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum Botoputih Gandu Banaran	607.478.000	DINHUB	Tembarak
17	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	Penerangan Jalan Umum Jalan Muntung - Jumo	468.801.000	DINHUB	Jumo

No	Program	Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah	Kecamatan
	Angkutan Jalan (LLAJ)				
18	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum, Jalan Nasional Ruas Jalan Paponan - Kledung	468.250.000	DINHUB	Kledung
19	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Tembarak Gambasan (Dusun Koripan Desa Kacepit), Ruas Jalan Bengkal - Gambasan (Tanjakan Suruh Desa Plumbon) Ruas Jalan Dalangan Bagus an (Jembatan Pertigaan Plumbon - Bumiayu - Bagus an), Ruas Jalan Setugu - Ngaditirto (Komplek Gedung KDKMP Jambanan Desa Ngaditirto), Ruas Jalan Gatak - Ngaditirto (Tanjakan Tompak Desa Jetis)	361.471.000	DINHUB	Selopampang
20	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengadaan Lampu Jalan Umum Ruas Jalan Kandangan - Rowoseneng	816.338.000	DINHUB	Kandangan

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

5. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung didukung oleh program, pagu anggaran dan perangkat daerah pengampu sebagai berikut:

Tabel 5. 20
Program Daerah yang Mendukung Penanganan Kemiskinan

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	5,000,000
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	60,000,000
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	125,000,000
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	60,000,000
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	44,500,000

RKPD

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2027

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1,217,914,000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10,000,000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	100,000,000
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	353,241,270,366
10	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1,169,563,000
11	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	90,000,000,000
12	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Puskesmas	6,996,945,000
13	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	719,468,000
14	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	10,011,562,500
15	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	282,521,000
16	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1,555,220,800
17	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	261,480,000
18	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25,000,000
19	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25,000,000

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
20	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25,000,000
21	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25,000,000
22	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	134,960,000
23	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2,446,876,500
24	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	25,000,000
25	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	50,000,000
26	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	371,751,500
27	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Tidak Menular	1,388,944,000
28	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	80,000,000
29	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	5,000,000
30	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	65,063,000
31	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	242,944,000

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		MAKANAN MINUMAN	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
32	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,701,098,000
33	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25,000,000
34	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25,000,000
35	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7,025,691,000
36	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	973,630,000
37	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1,085,808,000
38	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21,185,711,320
39	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10,000,000
40	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	250,258,000
41	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Layanan Imunisasi	474,891,000
42	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan	161,026,000

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		MAKANAN MINUMAN	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
43	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	653,292,000
44	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000
45	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20,000,000
46	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50,000,000
47	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50,000,000
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	7,700,000,000
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	-
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	314,902,600
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	80,000,000
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3,290,533,000
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	75,000,000
54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1,783,000,000
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1,695,000,000
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	150,000,000

RKPD

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2027

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
57	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5,624,451,680
58	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	85,000,000
59	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50,000,000
60	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	290,000,000
61	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	610,000,000
62	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6,834,869,200
63	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	176,000,000
64	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	360,000,000
65	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5,495,168,080
66	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11,840,250,000
67	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	470,000,000
68	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6,043,850,000
69	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	65,000,000
70	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	110,000,000
71	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,690,000,000
72	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	44,258,720,000
73	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	55,000,000
74	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	260,000,000
75	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,405,000,000
76	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	37,111,040,000
77	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	306,000,000
78	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	60,000,000

RKPD

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2027

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
79	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Perluasan Kesempatan Kerja	6,500,000
80	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	8,125,000
81	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5,000,000
82	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja	4,500,000
83	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	4,500,000
84	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	7,000,000
85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	10,000,000
86	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	604,699,844
87	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5,000,000
88	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,924,300,000
89	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000
90	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Makanan	21,000,000
91	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Sandang	20,000,000
92	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1,500,000
93	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pelayanan Dukungan Psikososial	1,000,000
94	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7,500,000
95	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	799,131,000
96	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN	Rujukan Anak-Anak Terlantar	7,500,000

RKPD

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2027

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		DAN JAMINAN SOSIAL		
97	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000
98	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9,027,478,728
99	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000
100	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Permakanan	2,000,000
101	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Sandang	5,000,000
102	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penyediaan Alat Bantu	10,000,000
103	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5,000,000
104	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5,000,000
105	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25,000,000
106	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2,500,000
107	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	8,000,000
108	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Layanan Kedaruratan	494,000,000
109	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4,000,000
110	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	1,000,000
111	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2,000,000
112	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemberian Layanan Rujukan	5,000,000
113	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	5,000,000
114	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000

No	Perangkat Daerah	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
115	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000
116	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100,000,000
117	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	5,000,000
118	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	41,500,000
119	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	129,641,050
120	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50,000,000
121	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	26,250,000
122	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	98,750,000
123	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	7,000,000
124	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	6,000,000

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

6. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung

Penanganan stunting di Kabupaten Temanggung Tahun 2027 diarahkan pada penguatan keberlanjutan hasil percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, dengan fokus pada peningkatan kualitas intervensi dan ketepatan sasaran. Upaya ini merupakan bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga mengarahkan penguatan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) secara berjenjang hingga tingkat desa, serta optimalisasi pemanfaatan data *by name by address* untuk memastikan ketepatan intervensi. Kolaborasi lintas sektor

dan kemitraan dengan swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat terus ditingkatkan guna memperluas cakupan dan efektivitas program. Guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud, maka dukungan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5. 21
Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting
Tahun 2027

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	10,011,562,500	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,701,098,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1,555,220,800	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	261,480,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25,000,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7,025,691,000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	973,630,000	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	484,161,000	
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	250,258,000	
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	474,891,000	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1,169,563,000	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
3	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	173,400,000	DPPPAPPKB
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1,448,737,000	DPPPAPPKB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	15,000,000	
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Ketahanan dan Kesejahteraan (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	169,966,000	DPPPAPPKB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,278,900,000	
			Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2,740,500,000	
6	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3,290,533,000	DPUPR

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	2,558,961,000	DPRKPLH
8	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,924,300,000	DPRKPLH
9	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50,000,000	DKPPP
10	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37,500,000	Bapperida
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5,000,000	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

7. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target
SDGs Kabupaten Temanggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen dalam mendukung keberhasilan program pembangunan berkelanjutan/SDGs, pengarusutamaan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender dan didukung oleh sebagian besar perangkat daerah serta lembaga non pemerintah. Program daerah yang mendukung pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 22
Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

No	Tujuan SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinhub
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa		Dinpermades
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	5.000.000	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Dinpermades
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	250.000.000	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		DPUPR
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	80.000.000	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	997.706.000	
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.290.533.000	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		DPRKPLH
		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	-	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		Dinkopdag
		Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	20.000.000	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Dinperinaker
		Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	300.000.000	
		Program Penempatan Tenaga Kerja		Dinperinaker

No	Tujuan SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Pelayanan antar Kerja	4.500.000	
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Dinperinaker
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.500.000	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		DKPPP
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.000.000	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan		DKPPP
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.000.000	
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan		Dindikpora
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.690.000.000	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	44.258.720.000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	350.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	290.000.000	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.405.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	610.000.000	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	37.111.040.000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	480.000.000	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.840.250.000	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.043.850.000	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	110.000.000	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinkes
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.185.711.320	
		Program Pemberdayaan Sosial		Dinsos
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	10.000.000	

No	Tujuan SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	5.000.000	
		Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	
		Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Dinsos
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.500.000	
		Program Rehabilitasi Sosial		Dinsos
		Penyediaan Permakanan	2.000.000	
		Penyediaan Sandang	20.000.000	
		Penyediaan Alat Bantu	10.000.000	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.000.000	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.000.000	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.500.000	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	8.000.000	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	494.000.000	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.000.000	
		Pemberian Layanan Rujukan	5.000.000	
		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Dinsos
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	799.131.000	
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	7.500.000	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	

No	Tujuan SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100.000.000	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.027.478.728	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
		Program Penanganan Bencana		Dinsos
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Makanan	21.000.000	
		Penyediaan Sandang	20.000.000	
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.500.000	
		Pelayanan Dukungan Psikososial	1.000.000	
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.000.000	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		DPPPAPPKB
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.700.000	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.448.737.000	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		DPPPAPPKB
		Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagraha, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	169.966.000	
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.278.900.000	
		Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	102.940.825	
		Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.740.500.000	
		Program Penanggulangan Bencana		BPBD
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	44.500.000	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	44.500.000	
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		DKPPP
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.000.000	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan		DKPPP
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinkes

No	Tujuan SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.025.691.000	
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.701.098.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.000.000	
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	250.258.000	
		Pengembangan Puskesmas	6.996.945.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.000.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	371.751.500	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1.388.944.000	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.185.711.320	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	476.407.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dinkes
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.315.220.200	
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Program Pengelolaan Pendidikan		Dindikpora
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.690.000.000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	350.000.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	170.000.000	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	119.445.649	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	44.258.720.000	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10.000.000	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	55.000.000	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	290.000.000	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.405.000.000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	480.000.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	40.000.000	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	50.000.000	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	610.000.000	

No	Tujuan SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	37.111.040.000	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13.000.000	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	55.000.000	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Dinkominfo
		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	62.920.000	
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Dinkominfo
		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	62.920.000	
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		DPUPR
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	80.000.000	
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.290.533.000	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinkes
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	973.630.000	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10.000.000	
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	Program Perekonomian dan Pembangunan		
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	26.250.000	
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	Program Perekonomian dan Pembangunan		Bagian Perekonomian Setda
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	26.250.000	
		Program Pelayanan Penanaman Modal		DPMPTSP
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Dinbudpar
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	25.000.000	

No	Tujuan SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	44.180.500	
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	49.100.000	
		Program Pemasaran Pariwisata		Dinbudpar
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	395.000.000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Dinbudpar
		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	6.000.000	
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11.625.000	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Dinperinaker
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15.000.000	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.500.000	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		DKPPP
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	-	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	-	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		DKPPP
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	210.000.000	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	210.000.000	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.750.000	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		DKPPP
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.723.381.439	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.155.655.000	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		

No	Tujuan SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.265.000.000	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	25.000.000	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Dinkopdag
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Dinkominfo
		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	62.920.000	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Dinperinaker
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinhub
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa		Dinpermades
		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	5.000.000	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Dinpermades
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	55.000.000	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	250.000.000	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		DPUPR
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	80.000.000	
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.290.533.000	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		DPRKPLH
		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-	
		Program Pengelolaan Pendidikan		Dindikpora

No	Tujuan SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.690.000.000	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	44.258.720.000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	350.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	290.000.000	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.405.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.000.000	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	610.000.000	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	37.111.040.000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	480.000.000	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.840.250.000	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.043.850.000	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	55.000.000	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinkes
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21.185.711.320	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		Dinkopdag
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		DKPPP
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.000.000	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan		DKPPP
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	
		Program Jaminan dan Perlindungan Sosial		Dinsos
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	

No	Tujuan SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		DPPPAPPKB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.700.000	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.448.737.000	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		DPPPAPPKB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
		Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	169.966.000	
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.278.900.000	
		Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	102.940.825	
		Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.278.900.000	
		Program Kawasan permukiman		DPRKPLH
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.924.300.000	
		Program Penanggulangan Bencana		BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	44.500.000	
		Program Hubungan Industrial		Dinperinaker
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Persampahan		DPRKPLH
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester,	5.429.096.775	

No	Tujuan SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.239.999.563	
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		DPRKPLH
		Pelaksanaan rehabilitasi	95.000.000	
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan			
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan			
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		BPKPAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	170.000.000	
		Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Bagian Organisasi Setda
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.000.000	
		Program Pencatatan Sipil		Dindukcapil
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	5.996.500	
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		BPKPAD
		Pengelolaan Pendapatan Daerah		
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	75.000.000	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data pajak Daerah	175.000.000	
		Penagihan Pajak Daerah	12.000.000	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	15.000.000	
		Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	96.109.622	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah		BPKPAD
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	18.000.000	

No	Tujuan SDGs	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	15.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	90.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	95.000.000	
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	159.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	170.000.000	
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	353.241.270.366	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.598.339.000	
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	15.452.741.490	
		TOTAL	807.840.611.942	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 5. 23
Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
I	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	tujuan 1	V	V
		tujuan 2		
		tujuan 4		
II	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	tujuan 1	V	V
		tujuan 2		
		tujuan 3		
		tujuan 6		
		tujuan 13		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	tujuan 3	V	V
3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	tujuan 3	V	V
III	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	tujuan 6	V	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	tujuan 1		V
		tujuan 6		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	tujuan 1	V	
4	Program Pengembangan Permukiman	tujuan 1	V	V
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Tujuan 9	V	
6	Program Penyelenggaraan Jalan	tujuan 9	V	
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tujuan 9	V	
		Tujuan 11		
		Tujuan 13		
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tujuan 9	V	
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tujuan 9	V	
IV	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
1	Program Pengembangan Perumahan	tujuan 1		V
		tujuan 6		
2	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	tujuan 1		V
		tujuan 6		
		tujuan 11		
V	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Program Penanggulangan Bencana	tujuan 1	V	
		tujuan 11		
		tujuan 13		
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			V
3	Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum			V
VI	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	tujuan 1	V	V
		tujuan 2		
		tujuan 3		
2	Program Rehabilitasi Sosial	tujuan 3	V	
3	Program Pemberdayaan Sosial			V
VII	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	tujuan 1	V	V
		tujuan 8		
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	tujuan 8	V	V
3	Program Hubungan Industrial	tujuan 8	V	
		tujuan 10		
VIII	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
1		tujuan 5	V	V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	tujuan 16		
2	Program Perlindungan Perempuan	tujuan 16	V	V
		tujuan 5		
		tujuan 10		
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	tujuan 3		V
4	Program Pemenuhan Hak Anak	tujuan 16	V	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	tujuan 10	V	
IX	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	tujuan 2	V	
		tujuan 13		
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	tujuan 2	V	
		tujuan 8		
		tujuan 13		
X	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tujuan 6	V	
		tujuan 9		
		tujuan 12		
		tujuan 13		
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	tujuan 13	V	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	tujuan 6	V	
		tujuan 11		
		tujuan 13		
		tujuan 15		
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	tujuan 6	V	
		tujuan 12		
		tujuan 13		
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tujuan 6	V	
6	Program Pengelolaan Persampahan	tujuan 1	V	V
		tujuan 12		
		tujuan 11		
		tujuan 13		
XI	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
1	Program Pencatatan Sipil	tujuan 1	V	V
		tujuan 16		
		tujuan 17		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	tujuan 16	V	V
3	Program Pendaftaran Penduduk	tujuan 16	V	V
XII	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
1	Program Penataan Desa	tujuan 10	V	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	tujuan 10	V	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	tujuan 10	V	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	tujuan 10	V	
5	Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa			V
6	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat			V
XIII	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
1	Program Pengendalian Penduduk	tujuan 1		V
		tujuan 3		
		tujuan 5		
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	tujuan 1		V
		tujuan 3		
		tujuan 5		
3	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	tujuan 3	V	V
XIV	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
1	Program Pengembangn Iklim Penanaman Modal	tujuan 8	V	
		tujuan 9		
2	Program Pengembangan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	tujuan 8	V	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal			V
XV	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Publik			

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	tujuan 16	V	V
2	Program Aplikasi Informatika	tujuan 4	V	V
		Tujuan 9		
XVI	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tujuan 3	V	
		Tujuan 11		
XVII	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi			
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Tujuan 8		V
XVIII	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	tujuan 1	V	
		tujuan 4		
		tujuan 8		
XIX	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
1	Program Pengembangan Kebudayaan	tujuan 8	V	
2	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Tujuan 11	V	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		V	
4	Program Pembinaan Perpustakaan			V
XX	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	tujuan 2	V	
		tujuan 8		
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tujuan 8	V	
XXI	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	tujuan 8	V	
2	Program Pemasaran Pariwisata	tujuan 8	V	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	tujuan 8	V	
XXII	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	tujuan 2	V	
		tujuan 13		
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tujuan 13	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
3	Program Pengendalian bencana Pertanian	Tujuan 13	V	
4	Program Penyuluhan Pertanian	Tujuan 13	V	
XXIII	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
1	Program Pengembangan Ekspor	tujuan 17	V	
2	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Tujuan 12	V	
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			V
XXIV	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	tujuan 8		V
XXV	Sekretariat Daerah			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tujuan 1	V	
		tujuan 4		
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tujuan 12	V	V
		tujuan 16		
		tujuan 17		
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	tujuan 16	V	V
		tujuan 8		
4	Program Administrasi Umum	tujuan 16	V	
XXVI	Perencanaan			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tujuan 11	V	V
2	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tujuan 1	V	V
		tujuan 11		
		tujuan 17		
3	Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam			V
XXVII	Keuangan			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	tujuan 16	V	
		tujuan 17		
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tujuan 16	V	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tujuan 16	V	
		Tujuan 17		
XXVIII	Kepegawaian			
1	Program Kepegawaian Daerah		V	
XXIX	Pendidikan Dan Pelatihan			
1		tujuan 5	V	V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	tujuan 16		
XXX	Penelitian Dan Pengembangan			
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	tujuan 1	V	
		tujuan 9		
XXXI	Inspektorat Daerah			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan		V	V
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		V	
XXXII	Kecamatan			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		V	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		V	
XXXIII	Kesatuan Bangsa Dan Politik			
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	tujuan 5		V
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	Tujuan 3	V	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan pemetaan Indikator SDG’s dalam dokumen perencanaan daerah terdapat indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program, dan indikator yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Beberapa indikator SDG’s yang bukan merupakan kewenangan daerah otomatis tidak ada dukungannya di Renja maupun RKPD. Hasil pemetaan indikator SDG’s sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 24
Pemetaan Indikator SDGs dalam Dokumen Perencanaan Daerah

No	Spesifikasi Indikator	Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola	Jumlah Indikator
1	Indikator Kinerja Tujuan	2	1	0	0	3

No	Spesifikasi Indikator	Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola	Jumlah Indikator
2	Indikator Kinerja Sasaran	0	4	0	3	7
3	Indikator Kinerja Program	24	7	16	10	57
4	Indikator Pada Renstra PD	34	3	0	2	39
5	Indikator Bukan Kewenangan	7	3	0	1	11
Jumlah		67	18	16	16	117

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsif gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan Teknik analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 5. 25
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Pendidikan	142,937,129,209	Dindikpora
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	154,220,294,620	Dinkes
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,822,855,000	Dinkes
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	380,121,867,886	RSUD
5	Program Penyuluhan Pertanian	50,000,000	DKPPP
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,963,564,375	Dinkopdag
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,835,474,966	Dinbudpar
8	Program Pengembangan Kebudayaan	2,940,550,000	Dinbudpar
9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	828,893,400	Dinbudpar
10	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	305,000,000	Dinperinaker
11	Program Penanggulangan Bencana	1,627,414,000	BPBD
12	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,125,000,000	Satpol PP dan Damkar
13	Program Kawasan Permukiman	2,124,300,000	DPRKPLH
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4,528,239,000	DPUPR
15	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16,904,216,700	Dinhub

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
16	Program Promosi Penanaman Modal	118,502,000	DPMPTSP
17	Program Perekonomian dan Pembangunan	584,096,750	Bagian Pembangunan Setda
18	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14,143,875,350	Bagian Hukum Setda
19	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	13,240,922,000	Sekretariat DPRD
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	14,321,405,724	INSPEKTORAT
21	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	250,000,000	Bapperida
22	Program Riset Dan Inovasi Daerah	158,000,000	Bapperida
23	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	27,000,000	Bapperida
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,044,534,914	BPKPAD
25	Program Kepegawaian Daerah	1,443,013,500	BPKSDM
26	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,079,830,070	BPKSDM
27	Program Pendaftaran Penduduk	68,337,000	Dindukcapil
28	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12,969,915	Kecamatan
29	Program Peningkatan Kerja sama Desa	5,000,000	Dinpermades
30	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	315,000,000	Dinpermades
31	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4,408,729,424	Dinpermades
32	Program Penataan Desa	5,000,000	Dinpermades
33	Program Pengelolaan Arsip	8,000,000	Dinpusip
34	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	753,500,000	Dinkominfo
35	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	40,000,000	DPPAPPPKB
36	Program Perlindungan Perempuan	20,000,000	DPPAPPPKB
37	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	9,984,109,728	DINSOS
38	Program Pemberdayaan Sosial	50,000,000	DINSOS
39	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	7,500,000	DINSOS
40	Program Rehabilitasi Sosial	914,750,000	DINSOS
41	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	535,000,000	BANKESBANGPOL
42	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1,832,819,500	BANKESBANGPOL

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

9. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen **mendukung** proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 26
Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi
Perubahan Iklim

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	331,500,000	DPRKPLH
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	DPRKPLH
3	Program Pengelolaan Persampahan	6,669,096,338	DPRKPLH
4	Program Penanggulangan Bencana	1,627,414,000	BPBD
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,558,961,000	DPRKPLH

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Destinasi Pariwisata
Super Prioritas Borobudur

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam kawasan. Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat mendukung kegiatan tersebut dan mengalokasikan program kegiatan terhadap pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 27
Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap
Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur
Tahun 2027

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7,700,000,000	DPUPR
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	16,314,340,000	DPRKPLH
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14,143,875,350	Bagian Hukum
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7,039,227,000	DINDIKPORA
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	828,893,400	DINBUDPAR
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,963,564,375	DINKOPDAG
7	Program Penyelenggaraan Jalan	56,128,596,000	DPUPR
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7,700,000,000	DPUPR
9	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	16,904,216,700	DINHUB
10	Program Pengembangan Kebudayaan	2,940,550,000	DINBUDPAR
11	Program Pemasaran Pariwisata	395,000,000	DINBUDPAR
12	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	828,893,400	DINBUDPAR

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Pengembangan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas selain mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, juga membutuhkan dukungan dari daerah sekitarnya, salah satunya adalah Kabupaten Temanggung. Potensi yang mendukung pengembangan Borobudur yang berada di Kabupaten Temanggung salah satunya adalah

event yang dilaksanakan secara rutin di Kawasan Borobudur yaitu pengambilan air suci, persemayaman air suci di Candi Mendut dan perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Sejumlah Biksu yang berasal dari 11 majelis agama Buddha di Indonesia, mengikuti ritual pengambilan air suci (berkah) untuk perayaan Hari Raya Waisak di Mata Air Jumprit Temanggung persisnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Air berkah tersebut akan disemayamkan di Candi Mendut dan akan digunakan dalam perayaan detik-detik Waisak di Candi Borobudur. Air di Umbul Jumprit memang bukan air biasa. Bagi Umat Budha, air Umbul Jumprit dianggap sebagai air suci pembersih jiwa manusia. Harapan pengambilan air suci ini untuk seluruh manusia di dunia agar sadar bahwa jiwa ini bagaikan jiwa Sang Buddha. Penuh cinta kasih tanpa memandang aliran dan agama. Salah seorang Wakil Bhikkhu, Dwi Virya, mengatakan dalam agama Buddha air suci mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi.

11.Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan WP Gelang Manggung

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kota Wilayah Pengembangan magelang-Kabupaten Magelang- Kabupaten Temanggung (WP Gelang Manggung). Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 28
Dukungan Program Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Kewilayahan WP Gelangmanggung

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16,904,216,700	DINHUB
2	Program Pengembangan Kebudayaan	2,940,550,000	DINBUDPAR
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	42,000,000	DINBUDPAR
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	828,893,400	DINBUDPAR
5	Program Pemasaran Pariwisata	395,000,000	DINBUDPAR
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	12,000,000	DINBUDPAR
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11,625,000	DINBUDPAR
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	50,000,000	DKPPP
9	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	50,000,000	DKPPP
10	Program Penanganan Kerawanan Pangan	80,000,000	DKPPP
11	Program Pengawasan Keamanan Pangan	50,000,000	DKPPP

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
12	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	DKPPP
13	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	265,750,000	DKPPP
14	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	30,000,000	DKPPP
15	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10,000,000	DKPPP
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10,169,036,439	DKPPP
17	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,303,625,000	DKPPP
18	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	250,000,000	DKPPP
19	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	50,000,000	DKPPP
20	Program Penyuluhan Pertanian	50,000,000	DKPPP

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun, 2026

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Gelangmanggung diperlukan Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan Trans Jateng Koridor Borobudur-Kutoarjo yang terhubung dengan moda transportasi kereta api Prameks rute Kutoarjo-Yogyakarta dan inisiasi proses rencana pengembangan koridor baru Trans Jateng Koridor Temanggung- Borobudur dengan peningkatan peran dan keterlibatan pemerintahan kabupaten/kota di WP Gelang Manggung. Program strategis penggerak pertumbuhan ekonomi pada WP Gelang Manggung meliputi pengembangan ekonomi kreatif (kriya) dan peningkatan produksi serta hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, sapi potong, kerbau, domba, itik, ayam buras, dan perikanan budidaya).

12.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Pemerintah Daerah menetapkan sasaran pembangunan yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penguatan daya saing daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

Tabel 5. 29
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan
Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Penyelenggaraan Jalan	56,128,596,000	DPUPR
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7,700,000,000	DPUPR
3	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	16,904,216,700	DINHUB
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	331,500,000	DPRKPLH

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

13.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan
Infrastruktur pada Tahun 2027

Program pembangunan infrastruktur pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 difokuskan untuk mendukung terwujudnya program prioritas bupati yaitu “Penataan Garis Imajiner”. Garis Imajiner perkotaan diharapkan akan memberikan kemudahan akses dan meningkatkan konektivitas bagi masyarakat.

Tabel 5. 30
Dukungan Program Kabupaten Temanggung terhadap Pembangunan
Infrastruktur Tahun 2027

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Penyelenggaraan Jalan	56,128,596,000	DPUPR
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7,700,000,000	DPUPR
3	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	16,904,216,700	DINHUB
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,303,625,000	DKPPP
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4,528,239,000	DPUPR
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,558,961,000	DPRKPLH
7	Program Kawasan Permukiman	2,124,300,000	DPRKPLH
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3,303,625,000	DKPPP
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,963,564,375	DINKOPDAG
10	Program Pengelolaan Pendidikan	142,937,129,209	DINDIKPORA
11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	154,220,294,620	DINKES
12	Pencegahan, Penanggulangan,	524,038,950	SATPOL PP DAMKAR

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
13	Program Penanggulangan Bencana	1,627,414,000	BPBD
14	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	DPRKPLH
15	Program Pengelolaan Persampahan	6,669,096,338	DPRKPLH
16	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,340,735,168	DINKOMINFO

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

14.Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen – Yogyakarta

Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah memiliki agenda pembangunan jalan tol ruas Bawen-Yogyakarta dengan pintu tol di Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Peluang tersebut ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui kegiatan penataan ruang yaitu peninjauan kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2011-2031 agar keberadaan pintu tol ini memungkinkan tumbuhnya ekonomi baru serta mendukung pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Harapannya Kabupaten Temanggung tidak sebatas dilewati tetapi bisa menjadi daerah tujuan.

Tabel 5. 31
Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Pintu Tol Bawen-Yogyakarta

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Penyelenggaraan Jalan	56,128,596,000	DPUPR
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7,700,000,000	DPUPR
3	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	16,904,216,700	DINHUB
4	Program Pengembangan Ekspor	100,000,000	DINKOPDAG
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	195,000,000	DINKOPDAG
6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	51,000,000	DPMPSTSP
7	Program Promosi Penanaman Modal	118,502,000	DPMPSTSP
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	305,000,000	DINPERINAKER
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	30,625,000	DINPERINAKER
10	Program Hubungan Industrial	60,000,000	DINPERINAKER

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

5.1.4. Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 Terhadap Satu Data Indonesia

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 32
Program Daerah yang Mendukung Satu Data Indonesia

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	753,500,000	Dinkominfo
2	Program pengelolaan aplikasi informatika	1,340,735,168	Dinkominfo
3	Program penyelenggaraan statistik Sektoral	62,920,000	Dinkominfo
4	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	250,000,000	Bapperida

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

5.2. PENDANAAN DAERAH

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah Tahun 2027 memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, isu strategis daerah, serta kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pendekatan perencanaan dilakukan secara holistik-tematik, integratif, dan berbasis kinerja untuk memastikan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung disusun dalam rangka memenuhi sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025- 2029 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional. Selain itu juga berpedoman pada tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2027 yaitu “Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan”.

5.2.1.Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diprioritaskan pada beberapa capaian Bidang Pendidikan yang belum sesuai target yang ditetapkan oleh Pusat dan hasil Rakortek Provinsi mengenai arahan Kemendikbud untuk pencapaian SPM Pendidikan yang tertuang dalam Rapor Pendidikan sebagaimana Surat Kemdikbudristekdikti Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota yaitu melalui kegiatan peningkatan angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, angka partisipasi sekolah 7-15 tahun dan angka partisipasi sekolah 7-18 tahun, peningkatan satuan PAUD terakreditasi minimal B, peningkatan kemampuan numerasi dan literasi SD dan SMP. Terkait implementasi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan karakter juga menjadi perhatian semua pihak baik perangkat daerah terkait, sekolah, Lembaga terkait Pendidikan dan masyarakat.

Identifikasi pemetaan dan kebutuhan guru juga secara berkala dilakukan dan dikoordinasikan dengan BKPSDM terkait formasi dan pengadaannya.

PAUD juga menjadi salah satu prioritas karena menjadi pijakan dasar terkait SDM generasi masa depan, yaitu melalui peningkatan kualitas dalam perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi. Tidak hanya PAUD, berdasarkan data masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah maka juga diprioritaskan untuk peningkatan kualitas layanan Pendidikan kesetaraan melalui perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, adanya layanan pendampingan sehingga mampu mencegah perundungan, kekerasan dan intoleransi.

Berdasarkan hasil evaluasi, program di bidang Pendidikan juga diarahkan pada kegiatan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, pengurangan angka putus sekolah SD dan SMP sederajat, peningkatan kondisi fasilitas pendidikan ruang kelas, pencapaian target SMP dengan akreditasi minimal, pencapaian target kelulusan peserta pendidikan kesetaraan, peningkatan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau

menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, pengurangan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dan peningkatan APK PAUD.

2) Bidang Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian balita; penurunan angka kematian neonatal,; dan penurunan jumlah rumah tidak sehat.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan akreditasi utama fasilitas kesehatan tingkat pertama

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan keamanan pangan sebagai langkah untuk peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor serta peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai upaya meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman.

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan penambahan jalan kabupaten yang dilengkapi dengan Drainase agar meminimalisir resiko kerusakan jalan.

Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung serta rehabilitasi bangunan gedung.

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas trotoar di sejumlah titik di Temanggung.

Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di sejumlah titik di Temanggung.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), penyusunan dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah serta dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan rumah susun. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah susun yang bersih, sehat dan layak huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan akses sanitasi layak

5) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan; penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran agar sesuai dengan jangkauan wilayah.

Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam upaya meningkatkan kinerja dalam merespon laporan kejadian bencana pada saat waktu tanggap.

6) Bidang Sosial

Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan fasilitasi program-program kegiatan PSM.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada penjemputan masyarakat yang termasuk warga migrant korban tindak kekerasan dan pemberian stimulan bagi korban.

Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial pada masyarakat yang membutuhkan

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan pelayanan pemerlu jaminan dan perlindungan sosial dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait siap siaga jika terjadi bencana.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

b. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan beberapa pelatihan untuk memperkaya skill bagi tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga mampu bersaing dalam mencari lapangan kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan penyuluhan dan bimbingan serta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja guna ikut serta menekan angka TPT.

Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan mediasi apabila ada perselisihan hubungan industrial dan pembinaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten untuk menggaungkan potensi perempuan dan mengurangi paham atau budaya patriarki, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan

Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan dan mediasi bagi perempuan korban kekerasan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan pelayanan, pengaduan dan penjangkauan korban.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga guna meningkatkan ketahanan keluarga.

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak serta pemenuhan hak anak sesuai dengan kebutuhannya baik secara fisik maupun psikis.

Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak dengan sosialisasi dan advokasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

3) Bidang Pangan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan seperti lumbung pangan, lantai jemur dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya, pemanfaatan teknologi pangan serta diversifikasi pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan informasi terkait kerentanan dan ketahanan pangan, serta dan mencukupi ketersediaan pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kelembagaan keamanan pangan serta peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan.

4) Bidang Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyusunan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya sehingga sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup yang meliputi media tanah, air dan udara kemudian hasilnya akan dituangkan dalam dokumen hasil uji yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan arah kebijakan terutama dalam penanganan lahan kritis, mitigasi adanya fenomena perubahan iklim, serta menjaga kualitas lingkungan hidup

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan hutan kota, taman kota, dan terpenuhinya RTH

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi izin penyimpanan sementara limbah B3 sehingga mencegah pencemaran lingkungan

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini difokuskan untuk pengawasan terhadap usaha yang harus memiliki Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi sehingga tidak merusak lingkungan dan mencegah sengketa lingkungan

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan

Program ini difokuskan pada kegiatan yang penjagaan kelestarian lingkungan hidup oleh berbagai stakeholders serta fasilitasi sarana prasarana kegiatan adiwiyata (tempat sampah, biopori, tanaman)

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini difokuskan pada kegiatan penilaian terhadap kinerja stakeholders yang berperan dalam pelestarian lingkungan hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap PPLH

Program Pengelolaan Persampahan

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kinerja pengelola persampahan, dan pemilahan sampah yang selanjutnya akan diolah.

5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pendaftaran Penduduk

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi penerbitan KTP dan KIA di Kabupaten Temanggung.

Program Pencatatan Sipil

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini difokuskan untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan catatan sipil.

6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Penataan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan desa sehingga terwujud desa berpredikat mandiri

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya pengelola/lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) guna identifikasi potensi desa swasembada dalam rangka pembangunan desa.

7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Pengendalian Penduduk

Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta data-data dan pelayanannya terhadap masyarakat

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB serta batasan PUS melalui pemberian advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta publikasi dan promosi program melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan BIB KIT pada 20 *locus stunting* serta Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR.

8) Bidang Perhubungan

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sosialisasi

SOP berkendara dan peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan terminal tipe C.

9) Bidang Komunikasi dan Informatika

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat, fasilitasi akses internet di area publik yang ada, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku PPID.

Program Aplikasi Informatika

Program ini difokuskan pada kegiatan Pembangunan jaringan fiber optik antar kecamatan, pengelolaan pusat data pemerintah daerah, dan pengembangan aplikasi.

10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan koperasi terutama koperasi yang tidak sehat.

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi.

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pembiayaan serta pemasaran usaha koperasi.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini difokuskan pada kegiatan pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan kelas UMKM melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, pemasaran dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro.

Program Pengembangan UMKM

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM sehingga terwujud peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

11) Bidang Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal.

Program Promosi Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan menginformasikan tentang potensi dan peluang investasi penanaman modal yang ada pada daerah guna menarik investor.

Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem yang terintegrasi.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal

12) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan pembinaan pemuda sehingga terwujud peningkatan kapasitas pemuda

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan olahraga, pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif, pembinaan cabang olah raga dan sistem informasi pendataan keolahragaan dan kepemudaan.

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

13) Bidang Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengelolaan data statistik sektoral, peningkatan validitas data produsen, dan fasilitasi koordinasi pemerintah daerah dan BPS guna sinkronisasi data.

14) Bidang Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengamanan sistem informasi supaya terwujud kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah sesuai standar dan meningkatkan jumlah sistem elektronik sudah teruji keamanannya.

15) Bidang Kebudayaan

Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya yang produktif melalui pengembangan kualitas SDM, serta kegiatan pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung melalui penggalian sejarah lokal temanggung melalui narasumber ahli.

16) Bidang Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan perpustakaan daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan peminjam di perpustakaan.

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini difokuskan pada kegiatan monitoring dalam rangka pengumpulan naskah kuno penambahan koleksi nasional di wilayah Kabupaten Temanggung.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini difokuskan pada kegiatan swasembada pada ikan konsumsi, pengembangan kapasitas kelompok pembudidaya ikan kecil, dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini difokuskan pada penyusunan dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di dilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko, penyediaan ikan untuk

konsumsi dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.

2) Bidang Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan destinasi wisata dan kegiatan pembinaan atau pendampingan desa wisata serta peningkatan kapasitas pelaku wisata.

3) Bidang Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, penyediaan peta lahan LP2B dan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, kegiatan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner untuk meningkatkan produktivitas hasil peternakan.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) penyebab bencana pertanian.

Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan pembentukan sekolah lapang kelompok tani.

4) Bidang Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di pasar daerah, perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan dinas dan penertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah dan penyusunan laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, kegiatan pengendalian pengawasan pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga/inflasi bahan pokok di masyarakat serta pelaksanaan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

Program Pengembangan Ekspor

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha produk ekspor unggulan.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini difokuskan pada kegiatan metrologi legal berupa tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan maupun terukur sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Kabupaten, Perangkat Daerah, hingga individu dan penyusunan SAKIP.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pendokumentasian perundangan di JDIH secara tepat waktu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah,

dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memenuhi standar.

Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan dari OPD serta kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan, pengoptimalan dalam penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan, pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, kerjasama yang efektif dengan dewan pengawas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD.

2) Sekretariat DPRD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD, serta pemenuhan kegiatan tertib administrasi.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini difokuskan pada kegiatan percepatan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, optimalisasi kegiatan aspirasi DPRD, serta fasilitasi Tugas DPRD.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi ketercapaian kinerja pembangunan daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, serta fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di semua perangkat daerah agar terwujud konsistensi perencanaan pembangunan.

2) Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM penelitian dan pengembangan, kegiatan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah, kegiatan penjaringan dan fasilitasi serta pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi, serta kegiatan pemetaan daya saing daerah, serta penguatan kelembagaan kelitbangan

3) Keuangan

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan IKPD, kegiatan penyusunan dan pengelolaan keuangan serta perbendaharaan daerah sehingga dokumen penganggaran tepat waktu, serta kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait dalam mewujudkan konsistensi penganggaran dengan perencanaan.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan inventarisasi dan penataan barang milik daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah.

4) Kepegawaian

Program Kepegawaian Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan pegawai di semua perangkat daerah, kegiatan fasilitasi dan motivasi pegawai perempuan dalam beberapa jabatan struktural, kegiatan optimalisasi updating pegawai secara mandiri, dan kegiatan fasilitasi sistem merit di lingkungan pegawai.

5) Pendidikan dan Pelatihan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kepesertaan pegawai dalam pengembangan kompetensi manajerial dan non manajerial

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pemerintah dan kegiatan pencegahan korupsi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan dan asistensi terhadap semua pelaksana program pemerintah

g. Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi pelayanan publik di kecamatan, pengadaan sarana dan prasarana kecamatan, serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM kecamatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini difokuskan pada kegiatan penguatan kelembagaan desa, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kelurahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini difokuskan pada kegiatan penegakan Perda, dan kegiatan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan KPT-Elektronik dan pembayaran PBB.

h. Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaan pada masyarakat semua elemen.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini difokuskan pada kegiatan pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan pencegahan perkembangan aliran sesat, kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kegiatan pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan, kegiatan monitoring dan evaluasi

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan penanganan konflik sosial.

5.2.2.Pagu Indikatif per Program berdasarkan Urusan dan Bidang

Berikut adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program berdasarkan urusannya di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagunya dituangkan dalam lampiran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

Tabel 5. 33
Rekapitulasi Anggaran per Urusan dan per Bidang

No	Urusan	Total Anggaran
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	369.384.788.079
1	PENDIDIKAN	111.912.969.506
2	KESEHATAN	213.253.809.820
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.417.375.000
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	454.999.775
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.226.274.250
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11.119.359.728
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	34.377.740.005
1	TENAGA KERJA	395.625.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	92.500.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	170.000.000
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.883.700.000
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	700.261.225
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.079.066.924
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.403.527.825
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.399.878.700
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.064.218.800

No	Urusan	Total Anggaran
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	143.139.375
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	255.500.000
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3.412.500.000
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	15.000.000
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	317.499.800
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	435.500.000
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	605.322.356
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4.500.000
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13.503.881.439
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	170.750.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	227.625.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	10.204.506.439
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.006.000.000
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	895.000.000
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	15.466.294.100
1	SEKRETARIAT DAERAH	2.645.372.100
2	SEKRETARIAT DPRD	12.820.922.000
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	335.461.381.178
1	PERENCANAAN	375.302.000
2	KEUANGAN	334.236.998.578
3	KEPEGAWAIAN	444.080.600
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	275.000.000
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	130.000.000
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.800.000.000
1	INSPEKTORAT DAERAH	8.800.000.000
VII	UNSUR KEWILAYAHAN	8.801.641.362
1	KECAMATAN	8.801.641.362
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.009.140.581
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.009.140.581
IX	NON URUSAN	1.155.699.592.688

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 5. 34
Rencana Pembiayaan per Urusan dan Program

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				318,380,751,551	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				142,937,129,209	
	Program Pengelolaan Pendidikan				142,937,129,209	DINDIKPORA
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	%	60,59		
		Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	%	66,22		
	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	75		
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	70,74		
		Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	%	74		
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	86,69		
		Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	%	24,9		
		Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	%	33,33		
	Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	Iklim Inklusivitas SD	nilai	58,19		
		Iklim Keamanan SD	nilai	73,8		
		Iklim Kebhinekaan SD	nilai	72,08		
		Iklim Inklusivitas SMP	nilai	64,44		
		Iklim Keamanan SMP	nilai	71,06		
		Iklim Kebhinekaan SMP	nilai	71,75		
	Tercukupinya kebutuhan pendidik	Rasio Guru/Siswa SD	angka	1:28		
		Rasio Guru/Siswa SMP	angka	1:32		
		Rasio Guru/Siswa PAUD	angka	1:15		
		Persentase satuan pendidikan yang	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan				
	Meningkatnya Kesempatan bersekolah	APK SD Sederajat	%	99,77		
		APM SD Sederajat	%	93,66		
		APK SMP Sederajat	%	100		
		APM SMP Sederajat	%	86,69		
		APM PAUD (5-6)	%	86,9		
		Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	%	100		
	Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	angka	239		
		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	angka	558		
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	angka	699		
		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	angka	2141		
		Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	angka	192		
		Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	angka	230		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				158,303,809,820	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				154,220,294,620	DINAS KESEHATAN
	Menurunnya kasus kematian ibu	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		
	Menurunnya kasus kematian balita	Angka kematian bayi	Per 1.000 KH	11,84		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		Angka kematian neonatal	Per 1.000 KH	8,24		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		
	Menurunnya kasus dan faktor resiko stunting	Prevalensi wasting balita	%	7		
		Insiden Stunting balita (kasus baru)	%	2,3		
		Persentase anemia pada ibu hamil	%	11,1		
	Terpenuhinya pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	%	100		
		Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	%	100		
	Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	30		
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	85		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	%	86		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	%	96,67		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	88		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		dengan SPA sesuai standar				
	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		
		Persentase penderita Hipertensi	%	100		
		mendapatkan pelayanan kesehatan				
		sesuai standar				
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		
		Prevalensi Obesitas	%	15		
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	%	76,92		
		Insidensi Hepatitis B	per 100.000 penduduk	15 per 100.000 penduduk		
		Prevalensi kusta	per 1000 penduduk	< 0.1		
		Eliminasi Rabies	%	0		
		Penurunan Angka Kematian Dengue	%	0,3		
		Eliminasi Malaria	%	100		
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	100		
		Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor	%	80		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah				
	Meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	69,68		
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	%	50		
	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Persentase Desa/Kelurahan STBM	%	28		
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	%	22,8		
	Meningkatnya fasilitas pelayanan di RSUD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	100		RSUD
		Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	%	100		RSUD
		Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	%	100		RSUD
	Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup sehat	Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	%	21		
		Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	7,25		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				1,791,627,200	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1000 penduduk	2,32		
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				469,033,000	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan	%	65		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		pelayanan kefarmasian sesuai standar				
		Persentase sarana IRTTP yang memenuhi ketentuan	%	62		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				1,822,855,000	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase posyandu aktif bidang kesehatan	%	88		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				78,643,698,600	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				3,743,000,000	DPUPR
	Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	59,77		
	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				4,528,239,000	DPUPR
	Meningkatnya kualitas dan akses layanan air bersih	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100		
		Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	59,03		
		Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	35,63		
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	35,62		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				2,558,961,000	DPRKPLH
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	18,06		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				314,902,600	DPUPR
	Meningkatnya kualitas jaringan drainase perkotaan	Presentase saluran drainase kondisi baik	%	69,3		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
	Program penataan bangunan gedung				2,995,000,000	DPUPR
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80,50		
		Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	65		
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya				7,700,000,000	DPUPR
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68,64		
		Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	%	10,14		
	Program Penyelenggaraan Jalan				56,128,596,000	DPUPR
	Meningkatnya kualitas infrastruktur kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	90,19		
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	94,38		
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	22,64		
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi				50,000,000	DPUPR
	Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	%	100		
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				625,000,000	DPUPR
	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	%	90,48		
		Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	%	66,68		
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				-	DPRKPLH
	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R	%	17,65		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				2,743,999,844	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
	Program Pengembangan Perumahan				619,699,844	DPRKPLH
	Meningkatnya Hunian Layak	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100		
	Program Kawasan Permukiman				2,124,300,000	DPRKPLH
	Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,49		
		Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,82		
		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	71,24		
		Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	80,14		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3,276,452,950	
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1,125,000,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
						SATPOL PP DAN DAMKAR
	Meningkatnya kapasitas SDM satlinmas	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	48,09		
	Meningkatnya layanan aduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	100		
	Meningkatnya penegakan pelanggaran perda dan perbup	Persentase penegakan Pelanggaran Perda/Perbup	%	100		
	Meningkatnya layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		penegakan hukum Perda dan Perkada				
	Program Penanggulangan Bencana				1,627,414,000	BPBD
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100		
	Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100		
	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
	Meningkatnya koordinasi penanganan pasca bencana	Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	%	100		
	Meningkatnya layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				524,038,950	SATPOL PP DAN DAMKAR
	Meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap layanan respon time sesuai aturan yang berlaku	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100		
	Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100		
	Meningkatnya layanan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh relawan kebakaran	Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah				
	Meningkatnya luas wilayah manajemen kebakaran	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	%	81,4		
	Meningkatnya jumlah inspeksi bangunan/gedung/lingkungan yang menjadi prioritas	Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi	%	9,23		
	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manuasia (operasi penyelamatan non Kebakaran)	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)	%	100		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				11,119,359,728	
	Program Pemberdayaan Sosial				50,000,000	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100		
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				7,500,000	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100		
	Program Rehabilitasi Sosial				914,750,000	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100		
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100		
		Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				9,984,109,728	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial					DINAS SOSIAL
		Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100		
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	%	86		
	Program Penanganan Bencana				87,000,000	
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100		
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				76,000,000	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100		
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				70,215,326,121	
2.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				395,625,000	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				877,500,000	DINPERINAKER
	Meningkatnya implementasi pelaksanaan program sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1,05		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				305,000,000	DINPERINAKER
	Meningkatnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri					DINPERINAKER
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	54,00		
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	83,00		
	Program Penempatan Tenaga Kerja				30,625,000	DINPERINAKER
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di dunia kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	37,50		
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	33,00		
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	37,50		
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	94,50		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	%	70,17		
	Program Hubungan Industrial				60,000,000	DINPERINAKER
	Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	42,97		
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	75,00		
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	47,00		
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100,00		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
2.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				124,162,751	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				5,000,000	DPPPAPPKB
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	10,00		
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,40		
	Program Perlindungan Perempuan				20,000,000	DPPPAPPKB
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100		
		Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	angka	4,9		
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga				40,000,000	DPPPAPPKB
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	84,61		
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)				32,000,000	DPPPAPPKB
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif	Kabupaten Layak Anak	kategori	Madya		
		Presentase terbentuknya DRPPA	%	43,94		
	Program Perlindungan Khusus Anak				27,162,751	DPPPAPPKB
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	angka	64.7		
		Persentase pernikahan usia anak	%	0,084		
		Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	100		
		Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	8,03		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
2.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				230,000,000	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				50,000,000	DKPPP
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	%	100		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat				50,000,000	DKPPP
	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,33		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan				80,000,000	DKPPP
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat	Presentase penanganan kerawanan pangan	%	100		
	Program Pengawasan Keamanan Pangan				50,000,000	DKPPP
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	%	100		
2.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				-	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				-	DPRKPLH
	Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	100		
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum				-	DPRKPLH
	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100		
2.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				23,527,936,338	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				85,000,000	DPRKPLH
	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100		
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		kelayakan Lingkungan Hidup				
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				331,500,000	DPRKPLH
	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	angka	60,04		
		Luas Lahan kritis tertangani	Ha	4,25		
		Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,71		
		Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	25,6		
		Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	15,7		
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				16,314,340,000	DPRKPLH
	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	%	85		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				43,000,000	DPRKPLH
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100		
		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100		
		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100		
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				50,000,000	DPRKPLH

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
	Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	31,60		
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				20,000,000	DPRKPLH
	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100		
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				15,000,000	DPRKPLH
	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100		
	Program Pengelolaan Persampahan				6,669,096,338	DPRKPLH
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	34,94		
		Persentase sampah yang terkelola	%	64,87		
		Cakupan Pelayanan persampahan	%	79,58		
2.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				184,594,725	
	Program Pendaftaran Penduduk				68,337,000	DINDUKCAPIL
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	97,30		
	Program Pencatatan Sipil				5,996,500	DINDUKCAPIL
	Meningkatnya Pelayanan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,98		
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				110,261,225	DINDUKCAPIL
	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	%	72,00		
		Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	32,50		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	15,00		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4,733,729,424	
	Program Penataan Desa				5,000,000	DINPERMADES
	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	%	100		
	Program Peningkatan Kerja sama Desa				5,000,000	
	Meningkatnya Kerja Sama Desa	Persentase kerjasama antar Desa	%	100		
		Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	%	100		
	Program Administrasi Pemerintahan Desa				4,408,729,424	DINPERMADES
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel	Presentase Desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu	%	100		
		Presentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				315,000,000	DINPERMADES
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	%	16,67		
		Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	%	42,85		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6,911,127,825	
	Program Pengendalian Penduduk				264,000,000	DPPPAPPKB
	Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	58,9		
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	7,57		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		Median usia kawin pertama (MUKP)	angka	20,20		
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR 15-19 tahun)	%	9,09		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				2,354,821,000	DPPPAPPKB
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	47,2		
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	%	78,25		
		Persentase KB pasca persalinan	%	62,90		
		Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	16,60		
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				4,292,306,825	DPPPAPPKB
	meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,95		
		Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,50		
		Indeks lansia berdaya	angka	58,10		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				16,904,216,700	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				16,904,216,700	DINHUB
	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	%	43,48		
		Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	67,33		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	%	99,67		
	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	%	37,10		
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	66,14		
	Meningkatnya pengelolaan perparkiran	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	%	100,00		
		Persentase Layanan Perhubungan	%	100,00		
	Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	%	89,50		
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	82,22		
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100,00		
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2,094,235,168	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik				753,500,000	DINKOMINFO
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	86,00		
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	100		
		Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	100		
		Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan	%	20,00		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		informasi komunikasi publik				
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				1,340,735,168	DINKOMINFO
	Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase layanan publik secara elektronik	%	85,00		
		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	%	66,67		
		Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	92,00		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				368,750,000	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi				75,000,000	DINKOPDAG UKM
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	%	21,25		
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian				98,750,000	DINKOPDAG UKM
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	%	15,15		
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)				195,000,000	DINKOPDAG UKM
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	0,38		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				336,502,000	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				51,000,000	DPMPPTSP
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	%	94		
	Program Promosi Penanaman Modal				118,502,000	DPMPPTSP
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	94		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
	Program Pelayanan Penanaman Modal				117,000,000	DPMPTSP
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	%	94		
		Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	94		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				50,000,000	DPMPTSP
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	%	94		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				10,312,477,000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				3,023,250,000	DINDIKPORA
	Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	%	6		
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	89		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				7,039,227,000	DINDIKPORA
	Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	%	68		
		Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	%	80		
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				250,000,000	DINDIKPORA
	Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	%	98,66		
2.14	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				62,920,000	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				62,920,000	DINKOMINFO
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	angka	55,00		
		Ketersediaan data statistik sektoral	%	100		
2.15	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				277,499,190	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				277,499,190	DINKOMINFO
	Meningkatnya keamanan siber dan sandi dilingkungan pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	320		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2,982,550,000	
	Program Pengembangan Kebudayaan				2,940,550,000	DINBUDPAR
	Meningkatnya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	Obyek	1		
		Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	Kelompok	10		
		Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	Orang	10		
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				42,000,000	DINBUDPAR
	peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya	Obyek	3,00		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				761,000,000	
	Program Pembinaan Perpustakaan				752,790,000	DINPUSIP
	Terlaksananya pembinaan perpustakaan	Persentase pengunjung di perpustakaan	%	30		
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	37		
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno				8,210,000	DINPUSIP
	Terselenggaranya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase penelusuran naskah kuno	%	100		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				8,000,000	
	Program Pengelolaan Arsip				8,000,000	DINPUSIP
	Meningkatnya pengelolaan arsip	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	70		
		Persentase pembinaan kearsipan	%	80		
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18,409,494,214	
3.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				305,750,000	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					DKPPP
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	140,50		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				265,750,000	DKPPP
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	ton	10.673,61		
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				30,000,000	DKPPP
	Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	%	10		
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				10,000,000	DKPPP
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi pengolahan ikan	ton	395.76		
3.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1,247,518,400	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				828,893,400	DINBUDPAR
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitas	DTW	17		
		Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	orang	600		
	Program Pemasaran Pariwisata				395,000,000	DINBUDPAR
	Meningkatnya pemasaran pariwisata	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	100		
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	orang	95		
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	31,191		
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				12,000,000	DINBUDPAR
	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	orang	1		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				11,625,000	DINBUDPAR
	Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	orang	135		
3.03	URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PERTANIAN				13,822,661,439	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				10,169,036,439	DKPPP
	Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian	Produktivitas Padi	ton/ha	6,17		
		Produktivitas jagung	ton/ha	5,6		
		Produktivitas bawang putih	ton/ha	6,16		
		Produktivitas bawang merah	ton/ha	7,11		
		Produktivitas cabai rawit	ton/ha	7,02		
		Produktivitas cabai keriting	ton/ha	7,02		
		Produktivitas tembakau	ton/ha	0,645		
		Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0,7025		
		Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0,4150		
		Jumlah produksi daging ternak besar	kg	809,172		
		jumlah produksi daging ternak kecil	kg	268637		
		jumlah produksi ternak unggas	kg	6.255.823		
		jumlah produksi telur	kg	6.874.713		
		Persentase kelahiran pedet	%	48		
		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	38,17		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				3,303,625,000	DKPPP
	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan	%	100		
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				250,000,000	DKPPP
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	%	87		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	77		
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				50,000,000	DKPPP
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	81		
	Program Penyuluhan Pertanian				50,000,000	DKPPP
	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	58		
		Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	%	1,30		
3.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2,143,564,375	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				1,963,564,375	DINKOPDAG UKM
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	83,00		
		Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	2,40		
		Persentase Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	6,85		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				50,000,000	DINKOPDAG UKM
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	90,00		
	Program Pengembangan Ekspor				100,000,000	DINKOPDAG UKM
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor	US\$	131.327.193,00		
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				30,000,000	DINKOPDAG UKM
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	95,00		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
3.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				890,000,000	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				877,500,000	DINPERINAKER
	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	51,55		
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri				5,000,000	DINPERINAKER
	Meningkatnya komitmen perizinan berusaha sektor industri	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	%	1,00		
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				12,500,000	DINPERINAKER
	Meningkatnya Pemanfaatan informasi industri	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	2,20		
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				27,968,894,100	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				14,727,972,100	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				14,143,875,350	
	Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	80		BAG. KESRA DAN BINA MENTAL
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	89		BAG. KESRA DAN BINA MENTAL
		Indeks Zakat Nasional	Angka	0,82		
	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik	%	100		BAG. PEMERINTAHAN
	Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100		BAG. PEMERINTAHAN
	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100		BAG. HUKUM
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100		BAG. HUKUM
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100		BAG. HUKUM

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100		BAG. HUKUM
		Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	%	100		BAG. HUKUM
	Program Perekonomian dan Pembangunan				584,096,750	
	Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	95 - 100		BAG. PEMBANGUNAN
		Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100		
		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100		
	Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Persentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	%	100		BAG. PBJ
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	10		
		Persentase Pendampingan proses PBJ	%	100		
	Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100		BAG. PEREKONOMIAN
		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100		
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33		
4.02	SEKRETARIAT DPRD				13,240,922,000	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				13,240,922,000	SEKRETARIAT DPRD
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	%	100		
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100		
		Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	%	100		
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	%	92		
		Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran	%	92		
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				375,799,856,048	
5.01	PERENCANAAN				525,302,000	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				250,000,000	BAPPERIDA
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	92		
		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	%	60		
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	80		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				275,302,000	BAPPERIDA
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	91		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	%	91		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja	%	91		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		pada bidang infrastruktur				
5.02	KEUANGAN				371,566,710,478	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				370,889,350,856	BPKPAD
	Meningkatnya Kualitas Penganggaran	Cakupan pengalokasian anggaran belanja <i>mandatory spending</i> dalam APBD	%	75		
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100		
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	%	100		
	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban & pelaporan keuangan daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	100		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				304,250,000	BPKPAD
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100		
		Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	98,5		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				373,109,622	BPKPAD
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	%	4,57		
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	%	98,36		
5.03	BIDANG KEPEGAWAIAN				1,443,013,500	
	Program Kepegawaian Daerah				1,443,013,500	BKPSDM
	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
	Meningkatnya keterisian jabatan	Persentase keterisian jabatan	%	85,34		
	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Persentase Kebutuhan ASN	%	100		
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	99,31		
	Meningkatnya kedisiplinan ASN	Persentase kedisiplinan ASN	%	99,55		
5.04	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2,079,830,070	
	Program Pengembangan Sumber daya Manusia				2,079,830,070	BKPSDM
	Meningkatnya kualitas pengembangan potensi ASN	Persentase pengembangan potensi ASN	%	27,21		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				185,000,000	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				27,000,000	BAPPERIDA
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	%	70,00		
	Program Riset dan Inovasi Daerah				158,000,000	BAPPERIDA
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	%	50		
		Persentase inovasi yang dimanfaatkan	%	70		
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				8,800,000,000	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				8,800,000,000	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				5,047,375,000	INSPEKTORAT
	Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus)	%	100		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Peesentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100		
	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				3,752,625,000	INSPEKTORAT
	Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	%	100		
	Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100		
	Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100		
	Meningkatnya identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100		
VII	UNSUR KEWILAYAHAN				66,991,750,048	
7.01	KECAMATAN				66,991,750,048	
	Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik				1,998,053,390	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan	%	100		Kecamatan Temanggung
			%	100		Kecamatan Tembarak
			%	100		Kecamatan Pringsurat
			%	100		Kecamatan Kaloran
			%	100		Kecamatan Parakan
			%	100		Kecamatan Bulu
			%	100		Kecamatan Kedu
			%	100		Kecamatan Kandangan
			%	100		Kecamatan Candioto
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Jumo
			%	100		Kecamatan Wonoboyo
			%	100		Kecamatan Kranggan

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
			%	100		Kecamatan Bejen
			%	100		Kecamatan Kledung
			%	100		Kecamatan Bansari
			%	100		Kecamatan Tlogomulyo
			%	100		Kecamatan Selopampang
			%	100		Kecamatan Gemawang
			%	100		Kecamatan Tretep
		Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	%			
			%	96		Kecamatan Temanggung
			%	97,82		Kecamatan Tembarak
			%	96		Kecamatan Pringsurat
			%	98,53		Kecamatan Kaloran
			%	95		Kecamatan Parakan
			%	95,08		Kecamatan Bulu
			%	96		Kecamatan Kedu
			%	97		Kecamatan Kandangan
			%	95,5		Kecamatan Candiroto
			%	97,75		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Jumo
			%	100		Kecamatan Wonoboyo
			%	96,5		Kecamatan Kranggan
			%	95,5		Kecamatan Bejen
			%	97		Kecamatan Kledung
			%	97		Kecamatan Bansari
			%	100		Kecamatan Tlogomulyo
			%	100		Kecamatan Selopampang
			%	100		Kecamatan Gemawang
			%	96,5		Kecamatan Tretep
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				12,684,006,267	
	Meningkatnya sarana dan prasarana serta lembaga kemasyarakatan di kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	%			SEMUA KELURAHAN
			%	84,5		Kecamatan Temanggung
			%	85		Kecamatan Parakan
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	95		Kecamatan Kranggan
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	%			SEMUA KELURAHAN
			%	100		Kecamatan Temanggung

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
			%	100		Kecamatan Parakan
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Kranggan
	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum				264,000,000	
	Meningkatnya koordinasi penanganan gangguan kamtibmas dan bencana alam	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam	%			
			%	100		Kecamatan Temanggung
			%	100		Kecamatan Tembarak
			%	100		Kecamatan Pringsurat
			%	100		Kecamatan Kaloran
			%	100		Kecamatan Parakan
			%	100		Kecamatan Bulu
			%	100		Kecamatan Kedu
			%	100		Kecamatan Kandangan
			%	100		Kecamatan Candioto
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Jumo
			%	100		Kecamatan Wonobojo
			%	100		Kecamatan Kranggan
			%	100		Kecamatan Bejen
			%	100		Kecamatan Kledung
			%	100		Kecamatan Bansari
			%	100		Kecamatan Tlogomulyo
			%	100		Kecamatan Selopampang
			%	100		Kecamatan Gemawang
			%	100		Kecamatan Tretep
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				272,574,402	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	%			
			%	100		Kecamatan Temanggung
			%	100		Kecamatan Tembarak
			%	100		Kecamatan Pringsurat
			%	100		Kecamatan Kaloran
			%	100		Kecamatan Parakan
			%	100		Kecamatan Bulu
			%	100		Kecamatan Kedu
			%	100		Kecamatan Kandangan
			%	100		Kecamatan Candioto

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Jumo
			%	100		Kecamatan Wonoboyo
			%	100		Kecamatan Kranggan
			%	100		Kecamatan Bejen
			%	100		Kecamatan Kledung
			%	100		Kecamatan Bansari
			%	100		Kecamatan Tlogomulyo
			%	100		Kecamatan Selopampang
			%	100		Kecamatan Gemawang
			%	100		Kecamatan Tretep
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%			
			%	100		Kecamatan Temanggung
			%	100		Kecamatan Tembarak
			%	100		Kecamatan Pringsurat
			%	100		Kecamatan Kaloran
			%	100		Kecamatan Parakan
			%	100		Kecamatan Bulu
			%	100		Kecamatan Kedu
			%	100		Kecamatan Kandangan
			%	100		Kecamatan Candiroto
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Jumo
			%	100		Kecamatan Wonoboyo
			%	100		Kecamatan Kranggan
			%	100		Kecamatan Bejen
			%	100		Kecamatan Kledung
			%	100		Kecamatan Bansari
			%	100		Kecamatan Tlogomulyo
			%	100		Kecamatan Selopampang
			%	100		Kecamatan Gemawang
			%	100		Kecamatan Tretep
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%			
			%	100		Kecamatan Temanggung
			%	100		Kecamatan Tembarak
			%	100		Kecamatan Pringsurat
			%	100		Kecamatan Kaloran
			%	100		Kecamatan Parakan
			%	100		Kecamatan Bulu
			%	100		Kecamatan Kedu

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
			%	100		Kecamatan Kandangan
			%	100		Kecamatan Candiroto
			%	100		Kecamatan Ngadirejo
			%	100		Kecamatan Jumo
			%	100		Kecamatan Wonobojo
			%	100		Kecamatan Kranggan
			%	100		Kecamatan Bejen
			%	100		Kecamatan Kledung
			%	100		Kecamatan Bansari
			%	100		Kecamatan Tlogomulyo
			%	100		Kecamatan Selopampang
			%	100		Kecamatan Gemawang
			%	100		Kecamatan Tretep
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				3,009,140,581	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3,009,140,581	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				535,000,000	BANKESBANGPOL
	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100		
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				1,832,819,500	BANKESBANGPOL
	Meningkatnya demokrasi melalui pendidikan politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	100,00		
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				25,000,000	BANKESBANGPOL
	Meningkatnya ormas yang berdaya	Persentasae ormas yang mendapat pembinaan	%	23,00		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				90,000,000	BANKESBANGPOL
	Meningkatnya kerukunan agama, budaya, suku, dan kondisi sosial ekonomi yang kondusif	Jumlah kejadian konflik SARA	kejadian	8,00		
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				526,321,081	BANKESBANGPOL
	Meningkatnya koordinasi dalam deteksi dini	Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	%	100,00		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
XX	NON URUSAN				1,285,942,279,303	
xx	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota				1,159,581,040,391	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		SEMUA PERANGKAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%			BAG. UMUM
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	76,25		BAG. UMUM
	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100		BAG. UMUM
	Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	%	100		BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	3,9		BAG. ORGANISASI
		Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100		BAG. ORGANISASI
	Meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD	Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	nilai	Paripurna Nilai 92		RSUD
		Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target	%	82		RSUD
		Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	%	82		RSUD
		Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target	%	83		RSUD
		Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD	nilai	Peringkat AA Nilai 94,5		RSUD
		Persentase kecukupan SDMK sesuai standar	%	80		RSUD

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH
				TARGET	PAGU	
		Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar	%	82		RSUD
		Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan	%	80		RSUD
		Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	75		RSUD
		Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target	%	85		RSUD
		Jumlah			2,076,034,585,665	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang dibentuk untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi yang berfungsi untuk memperoleh informasi kinerja yang dinilai penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja serta ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis (Permen PAN, 2007). Kedua fungsi tersebut dapat digunakan untuk evaluasi dalam rangka memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Aspek akuntabilitas kinerja ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan khususnya di Kabupaten Temanggung. Pengimplementasian indeks kinerja utama di Kabupaten Temanggung dalam perencanaan akan menghasilkan dampak secara simultan baik positif maupun negatif.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran pada tahun 2027. Penyajian Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada bab ini meliputi: indikator kinerja, satuan, dan penetapan target kinerja Tahun 2027.

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk memberikan Gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada akhir periode perencanaan pembangunan. Adapun Indikator Kinerja Utama Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027
1	Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing	%	75,88
2	Pertumbuhan ekonomi	%	6,10 – 7,30
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,18 – 1,88
4	Indeks Gini/Gini Rasio	Angka	0,360 – 0,357

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027
5	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	41,47
6	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	73,98
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,00 – 6,78
8	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,54
9	Indek Kepuasan Masyarakat	angka	88,17
10	Indeks Integritas Nasional	angka	79,35
11	Indek Reformasi Birokrasi	Angka	86,33
12	Indeks Pembangunan Gender	Angka	97,37
13	Indeks Harmoni	Angka	6,86

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Penentuan target indikator utama kinerja daerah (IKD) adalah langkah penting dalam perencanaan dan pengelolaan kinerja pemerintahan daerah. IKD digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah tercapai. Selain itu dalam penentuan target IKD juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan lokal, serta dapat diukur secara transparan dan akuntabel. Dengan begitu, pemerintahan Kabupaten Temanggung dapat lebih efektif dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja pembangunan.

6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro Pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6. 2
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	8,88	IUP
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	35,62	IUP
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	22,41	IUP
4	Disparitas Harga	%	±10	IUP
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,54	IKU
6	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	1.464.403,55	IUP
7	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	18,06	IUP
8	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	34,94	IUP
9	Cakupan pelayanan persampahan	%	79,58	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	97,93	IUP
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,62	
12	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	79,9	IUP
13	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,33	
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,77	
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Tingkat kemiskinan	%	7,00 – 6,78	IKU & IUP
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,98	IKU
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,84	• IUP • RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)
4	Jumlah kematian ibu	Kasus	5	• IUP • RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)
5	Jumlah kematian balita	Kasus	156	RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)
6	Prevalensi Stunting	%	22,2	• IUP • RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)
7	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	64	RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	96	IUP
9	Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	15	RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	84,5	RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)
11	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	%	88,2	
12	Net Death Rate (NDR)	per mill	20,15	
13	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	%	4	RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)
14	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	74	IUP
15	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	88	• IUP • RIBK (Surat Sekjen Kemenkes PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025)
16	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	21,37	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
17	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,62	
18	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,43	IUP
19	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 tahun	Tahun	8,09	IUP
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Sederajat dan SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional			
20	Literasi SD/Sederajat	Angka	62,9	
21	Literasi SMP/Sederajat	Angka	72,65	
22	Numerasi SD/Sederajat	Angka	52,91	
23	Numerasi SMP/Sederajat	Angka	66,13	
	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Nasional (Seluruh Jenjang): (%)			IUP
24	Literasi SD/Sederajat	%	78,35	
25	Literasi SMP/Sederajat	%	78,14	
26	Numerasi SD/Sederajat	%	72,79	
27	Numerasi SMP/Sederajat	%	73,36	
28	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,76	IUP
29	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	96,16	- IUP - Penentuan target berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025
30	Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun	%	99,08	
31	Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	58,89	
32	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	IUP
33	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	60,86	
34	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	angka	0,25	IUP
35	Jumlah kejadian konflik SARA (IUP)	kejadian	8	IUP
36	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	65,6	IUP
37	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	63,45	IUP
38	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,10-7,30	IKU
39	Indeks Pembangunan Gender	angka	97,37	
40	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,191	IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
41	Indeks Pemberdayaan Gender	angka	74,5	
42	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	Persen	100	
43	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate</i> /TFR) per WUS usia 15-49 tahun	Angka	2.16	
44	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	41,47	IKU IUP
45	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	2,18-1,88	IKU IUP
46	Indeks Gini/Gini Rasio	Angka	0,360-0,357	IKU
III	ASPEK DAYA SAING			
1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	1,89	IUP
2	<i>Return on Asset</i> (RoA) BUMD	%	4,29	IUP
3	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	2,29	IUP
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,28	IUP
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	70,17	IUP
6	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,7	IUP
7	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	74	
8	Nilai realisasi Investasi PMA dan PMDN	Milyar Rp	2,155	
9	Nilai Ekspor	US \$	131.327.193	
10	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	90,19	IUP
11	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	43,48	IUP
12	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	angka	59,77	IUP
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,49	IUP
14	Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	92	IUP
15	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	75,88	IKU
16	Persentase desa mandiri	%	43,23	IUP
17	Tingkat Inflasi (%)	%	1,50-2,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
18	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	95	IUP
19	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	51,82	IUP
20	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan	%	22,72	IUP
21	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	31.191	IUP
22	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,80	IUP
23	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,93	IUP
24	Rasio PDRB Perdagangan	%	20,98	
25	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22,30	
26	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	Persen	2,77	IUP
27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	%	78,74-79,12	
28	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	18,40	IUP
29	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,46	IUP
30	Persentase Pemuda Berprestasi	%	27,5	
31	Persentase Atlet Berprestasi	%	84,12	
32	Persentase Olahraga Prestasi	%	94,99	
33	Persentase Wirausaha Muda	%	16	
34	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	15	
35	Persentase Atlet Unggulan	%	35	
36	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	60	
37	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,82	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,18	IUP
2	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,35	IKU IUP
3	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektron	nilai	3,80	IUP
4	Indeks pelayanan publik	angka	3,9	IUP
5	Indeks reformasi birokrasi	angka	86,33	IKU IUP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
6	Indeks kualitas kebijakan	angka	67	
7	Indeks Harmoni	angka	6,86	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	88,17	
V INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH				
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar				
1	Pendidikan			
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	tahun	8,09	DINDIKPORA
2	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun	Tahun	7,62	DINDIKPORA
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,43	DINDIKPORA
4	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	6,76	DINDIKPORA
5	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SD/ sederajat	%	78,35	DINDIKPORA
6	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca SMP/ sederajat	%	78,14	DINDIKPORA
7	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SD/ sederajat	%	72,79	DINDIKPORA
8	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SMP/ sederajat	%	73,36	DINDIKPORA
9	Rata-ata Kemampuan Literasi Siswa SD/ Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional	angka	62,9	DINDIKPORA
10	Rata-ata Kemampuan Literasi Siswa SMP/ Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional	angka	72,65	DINDIKPORA
11	Rata-ata Kemampuan Numerasi Siswa SD/ Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional	angka	52,91	DINDIKPORA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
12	Rata-ata Kemampuan Numerasi Siswa SMP/Sederajat berdasarkan Asesmen Nasional	angka	66,13	DINDIKPORA
13	Proporsi PAUD terakreditasi minimal B	%	84	DINDIKPORA
14	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	100	DINDIKPORA
15	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	97	DINDIKPORA
16	Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	80,76	DINDIKPORA
17	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	%	96,16	DINDIKPORA
18	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun	%	99,08	DINDIKPORA
19	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	58,89	DINDIKPORA
2	Kesehatan			
1	Usia Harapan Hidup	tahun	76,84	DINKES dan/atau RSUD
2	Jumlah kematian ibu	kasus	5	DINKES
3	Jumlah kematian balita	kasus	156	DINKES
4	Prevalensi stunting	%	22,20	DINKES
5	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	64	DINKES
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	96	DINKES
7	Persentase kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	15	DINKES
8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	84,5	DINKES
9	Net Death Rate (NDR)	per mill	20,15	DINKES
10	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD	angka	88,20	RSUD
11	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik yang cukup	%	4	DINKES
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	%	63,63	DPUPR
2	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	%	78,58	DPUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan	%	73,24	DPRKPLH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
	perumahan dan kawasan permukiman			
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
1	Indeks risiko bencana	Angka	97,93	BPBD
2	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,62	BPBD
3	Persentase desa tangguh bencana	%	21,19	BPBD
4	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	SATPOL PP DAMKAR
5	Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	SATPOL PP DAMKAR
6	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	%	100	SATPOL PP DAMKAR
6	Sosial			
1	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	85,10	DINAS SOSIAL
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	70,20	DINAS SOSIAL
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
7	Tenaga Kerja			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	78,74-79,12	DINPERINAKER
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	63,45	DINPERINAKER
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Indeks Pemberdayaan Gender	%	0,191	DPPPAPPKB
2	Indeks Ketimpangan Gender	angka	74,5	DPPPAPPKB
3	Rasio pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak	%	100	DPPPAPPKB
9	Pangan			
1	Indeks Ketahanan pangan	angka	79,9	DKPPP
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	8,88	DKPPP
10	Lingkungan Hidup			
1	Indeks Kualitas Air	Angka	74,37	DPRKPLH
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	85,02	DPRKPLH
3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	1.464.403,55	DPRKPLH
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Persentase Peningkatan	%	98,56	DINDUKCAPIL

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
	Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	%	91	DINDUKCAPIL
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Persentase desa mandiri	%	43,23	DINPERMADES
2	Nilai Skor Indeks desa	%	94,36	DINPERMADES
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	65,6	DPPPAPPKB
2	TFR (<i>Total Fertility Rate</i> /Angka Kelahiran Total)	angka	2,16	DPPPAPPKB
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0,77	DPPPAPPKB
14	Perhubungan			
1	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	%	81,98	DINHUB
2	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	73,39	DINHUB
3	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	90,57	DINHUB
15	Komunikasi dan Informatika			
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,80	DINKOMINFO
2	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	nilai	4,7	DINKOMINFO
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	1,89	DINKOPDAG
2	Rasio Kewirausahaan daerah	%	3,28	DINKOPDAG
17	Penanaman Modal			
1	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Milyar	2,155	DPMPTSP
2	Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	%	93	DPMPTSP
3	Jumlah proyek investasi PMA dan PMDN	Proyek	5.030	DPMPTSP
4	Peningkatan jumlah jenis layanan di MPP	Layanan	3	DPMPTSP
18	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Persentase pemuda berprestasi	%	27,5	DINDIKPORA
2	Persentase atlet berprestasi	%	84,12	DINDIKPORA
3	Persentase prestasi olahraga	%	94,99	DINDIKPORA
4	Persentase wirausaha muda	%	16	DINDIKPORA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	15	DINDIKPORA
6	Persentase Atlet Unggulan	%	35	DINDIKPORA
7	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	60	DINDIKPORA
19	Statistik			
1	Nilai keterbukaan informasi publik	nilai	97	DINKOMINFO
20	Persandian			
1	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	nilai	3,4	DINKOMINFO
21	Kebudayaan			
1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	22,72	DINBUDPAR
2	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	%	51,82	DINBUDPAR
22	Perpustakaan			
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	60,86	DINPUSIP
2	Tingkat Kegemaran Membaca	nilai	69,79	DINPUSIP
3	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,25	DINPUSIP
23	Kearsipan			
1	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	73,57	DINPUSIP
2	Nilai pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten	Angka	59,60	DINPUSIP
Urusan Pemerintahan Pilihan				
24	Kelautan dan Perikanan			
1	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	22,41	DKPPP
25	Pariwisata			
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,93	DINBUDPAR
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	orang	610.637	DINBUDPAR
3	Jumlah Desa Wisata Aktif	desa	31	DINBUDPAR
4	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	%	90	DINBUDPAR
26	Pertanian			
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22,3	DKPPP
27	Perdagangan			
1	Rasio PDRB sektor perdagangan	%	20,98	DINKOPDAG
2	Disparitas Harga	%	±10	DINKOPDAG
28	Perindustrian			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,80	DINPERINAKER
2	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	%	0,41	DINPERINAKER
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
29	Sekretariat Daerah			
1	Indeks Kualitas Kebijakan	angka	67	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Pemda)	angka	68,5	
3	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	angka	3,47	
4	Indeks Reformasi Hukum	angka	97,18	
5	Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spiritual	%	100	
6	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terfasilitasi	%	100	
7	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	angka	3,97	
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	angka	86	
30	Sekretariat DPRD			
1	Tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	%	87	
2	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	86	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
31	Perencanaan			
1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	angka	83,40	
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	indeks	3,015	
3	Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	89	
4	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	21,40	
32	Keuangan			
1	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	angka	74,1	
2	Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	20,20	
3	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	
33	Kepegawaian			
1	Indeks Sistem Merit	angka	0,73	
34	Pendidikan dan Pelatihan			
1	Indeks Profesionalitas ASN	angka	81	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
35	Penelitian dan Pengembangan			
1	Indeks Inovasi Daerah	nilai	74	
2	Kapabilitas Inovasi	angka	2,7	
Unsur Pengawasan Pemerintahan				
36	Inspektorat Daerah			
1	Maturitas SPIP	level	3,15	
2	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,006	
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3,006	
Unsur Kewilayahan				
37	Kecamatan			
1	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			
		%	85,33	Kecamatan Temanggung
		%	84,11	Kecamatan Tembarak
		%	85,16	Kecamatan Pringsurat
		%	84,19	Kecamatan Kaloran
		%	85,33	Kecamatan Parakan
		%	84,83	Kecamatan Bulu
		%	83,50	Kecamatan Kedu
		%	83,30	Kecamatan Kandangan
		%	83,50	Kecamatan Candiroto
		%	86	Kecamatan Ngadirejo
		%	87,42	Kecamatan Jumo
		%	84,23	Kecamatan Wonobooyo
		%	83,30	Kecamatan Kranggan
		%	83,50	Kecamatan Bejen
		%	83,83	Kecamatan Kledung
		%	83,50	Kecamatan Bansari
		%	84,35	Kecamatan Tlogomulyo
		%	84,50	Kecamatan Selopampang
%	83,50	Kecamatan Gemawang		
%	83,50	Kecamatan Tretep		
2	Nilai capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan			
		Angka	100	Kecamatan Temanggung
		Angka	97,40	Kecamatan Tembarak
		Angka	99,33	Kecamatan Pringsurat
		Angka	98,53	Kecamatan Kaloran
		Angka	100	Kecamatan Parakan
		Angka	99,18	Kecamatan Bulu
		Angka	97,50	Kecamatan Kedu
		Angka	99,19	Kecamatan Kandangan
		Angka	97,50	Kecamatan Candiroto
		Angka	100	Kecamatan Ngadirejo
		Angka	97,50	Kecamatan Jumo
		Angka	96,40	Kecamatan Wonobooyo
		Angka	96.50	Kecamatan Kranggan
		Angka	98	Kecamatan Bejen
		Angka	99,50	Kecamatan Kledung
		Angka	97,50	Kecamatan Bansari
		Angka	100	Kecamatan Tlogomulyo
		Angka	97,50	Kecamatan Selopampang
		Angka	97,50	Kecamatan Gemawang
		Angka	97,50	Kecamatan Tretep
Unsur Pemerintahan Umum				
38	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	
2	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	%	100	

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

6.3 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merupakan hasil akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*). Keberhasilan capaian kinerja program Perangkat Daerah secara langsung mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6.3 berikut.

Tabel 6. 3
Indikator Kinerja Program Kabupaten Temanggung Tahun 2027

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	%	60,59	
		Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	%	66,22	
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	75	
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	70,74	
		Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	%	74	
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	86,69	
		Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	%	24,9	
		Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	%	33,33	
		Iklim Inklusivitas SD	nilai	58,19	
		Iklim Keamanan SD	nilai	73,8	
		Iklim Kebhinekaan SD	nilai	72,08	
		Iklim Inklusivitas SMP	nilai	64,44	
		Iklim Keamanan SMP	nilai	71,06	
		Iklim Kebhinekaan SMP	nilai	71,75	
		Rasio Guru/Siswa SD	angka	1:28	
		Rasio Guru/Siswa SMP	angka	1:32	
		Rasio Guru/Siswa PAUD	angka	1:15	
		Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	
		APK SD Sederajat	%	99,77	
		APM SD Sederajat	%	93,66	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB	
		APK SMP Sederajat	%	100		
		APM SMP Sederajat	%	86,69		
		APM PAUD (5-6)	%	86,9		
		Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	%	100		
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	angka	239		
		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	angka	558		
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	angka	699		
		Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	angka	2.141		
		Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	angka	192		
		Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	angka	230		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah				
		Peringkat Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	nilai	92		RSUD
		Persentase indikator mutu pelayanan medis yang mencapai target	%	82		RSUD
		Persentase indikator mutu penunjang medis dan nonmedis yang mencapai target	%	82		RSUD
		Persentase indikator mutu keperawatan yang mencapai target	%	83		RSUD
		Peringkat Penilaian Kinerja BLUD RSUD	nilai	94,5		RSUD
		Persentase kecukupan SDMK sesuai standar	%	80		RSUD
		Persentase capaian ketersediaan sarpras dan alkes sesuai standar	%	82		RSUD
		Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan	%	80		RSUD
		Persentase SIMRS yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	75		RSUD
		Persentase indikator kinerja keuangan BLUD yang mencapai target	%	85		RSUD
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
		Angka kematian bayi	Per 1.000 KH	11,84		
		Angka kematian neonatal	Per 1.000 KH	8,24		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		
		Prevalensi <i>wasting</i> balita	%	7		
		Insiden Stunting balita (kasus baru)	%	2,3		

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase anemia pada ibu hamil	%	11,1	
		Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun) sesuai standar	%	100	
		Cakupan pelayanan kesehatan pada warga usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan kesehatan	%	100	
		Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	30	
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	85	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi SIKN	%	86	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi Paripurna	%	96,67	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	88	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan SPA sesuai standar	%	100	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	
		Prevalensi Obesitas	%	15	
		Persentase Puskesmas menyelenggarakan skrining PTM prioritas	%	76,92	
		Insidensi Hepatitis B	per 100.000 penduduk	15	
		Prevalensi kusta	per 10000 penduduk	1	
		Eliminasi Rabies	%	0	
		Penurunan Angka Kematian Dengue	%	0,3	
		Eliminasi Malaria	%	100	
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	100	
		Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor	%	80	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
		risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah			
		Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	69,68	
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pendanaan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	%	50	
		Persentase Desa/Kelurahan STBM	%	28	
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat kesehatan	%	22,8	
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	100	RSUD
		Persentase Capaian Pengembangan Rumah Sakit	%	100	RSUD
		Persentase Capaian Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	RSUD
		Persentase penduduk yang menerapkan hidup sehat	%	21	
		Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	7,25	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1000 penduduk	2,32	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	65	
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	62	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase posyandu aktif bidang kesehatan	%	88	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	59,77	
1.03.03					

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	59,03	
		Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	35,63	
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	35,62	
1.03.04	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	18,06	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Presentase saluran drainase kondisi baik	%	69,3	
1.03.06	Program penataan bangunan gedung				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80,50	
		Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG	%	65	
1.03.07	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68,64	
		Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	%	10,14	
1.03.08	Program Penyelenggaraan Jalan				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	90,19	
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	94,38	
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	22,64	
1.03.09	Program Pengembangan Jasa konstruksi				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina	%	100	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang	%	90,48	
		Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan	%	66,68	
1.03.11	Program Pengembangan Sistem dan				DPRKPLH
		Persentase jumlah TPS 3R	%	17,63	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Persampahan Regional				
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah			
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,49	
		Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,82	
		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	71,24	
		Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	80,14	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah			
1.05.02	Program Peningkatan Ketentrman dan Ketertiban Umum				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Satlinmas yang terlatih	%	48,09	
		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	
		Persentase penegakan Pelanggaran Perda/Perbup	%	100	
		Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentrman dan Ketertiban Umum serta
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	Perlindungan Masyarakat
		Persentase koordinasi penanganan pasca bencana	%	100	
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	
		Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	%	100	
		Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	%	81,4	
		Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi	%	9,23	
		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)	%	100	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas	%	100	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
		yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	
		Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	%	86	
1.06.06	Program Penanganan Bencana				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1,05	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	54	
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	83	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	37,5	
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	33	
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	37,5	
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	94,5	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	%	70,17	
2.07.05	Program Hubungan Industrial				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	42,97	
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	75	
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	47	
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	10	
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,4	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor dan tertangani	%	100	
		Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	angka	4,9	
2.08.04	Program Peningkatan kualitas Keluarga				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Persentase pelayanan ramah anak di puskesmas	%	84,61	
2.08.05	Program Pemenuhan Hak Anak				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Kabupaten Layak Anak	kategori	Madya	
		Presentase terbentuknya DRPPA	%	43,94	
2.08.06	Program Perlindungan Khusus Anak				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Indeks Perlindungan Anak	angka	64,7	
		Persentase pernikahan usia anak	%	0,084	
		Persentase kasus kekerasan anak yang melapor dan ditangani	%	100	
		Rasio kasus kekerasan terhadap anak	angka	8,03	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	%	86	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	74,9	
2.09.02					

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,33	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase penanganan kerawanan pangan	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	angka	60,04	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Luas Lahan kritis tertangani	Ha	4,25	
		Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,71	
		Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab. Temanggung	%	25,6	
		Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab. Temanggung	%	15,7	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	%	85	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	
		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	
2.11.06					

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	31,6	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	34,94	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Persentase sampah yang terkelola	%	64,87	
		Cakupan Pelayanan persampahan	%	79,58	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	97,3	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,98	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan Sarpras SIAK dalam kondisi baik untuk pelayanan Administrasi	%	72	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	%	32,5	
		Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	%	15	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2.13.01					

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	Program Penataan Desa				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	%	100	
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase kerjasama antar Desa	%	100	
		Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	%	100	
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Presentase Desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu	%	100	
		Presentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase laporan LKD	%	16,67	
		Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	%	42,85	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	58,9	
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi {Unmetneed}	%	7,57	
		Median usia kawin pertama (MUKP)	angka	20,2	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19 tahun)	%	9,09	
2.14.03	Program Pembinaan KB				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	47,2	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (MCPR)	%	78,25	
		Persentase KB pasca persalinan	%	62,9	
		Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	%	16,6	
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan				Perangkat Daerah Pengampu Urusan
		Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan bina keluarga balita	%	45,95	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	angka	87,5	Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
		Indeks lansia berdaya	angka	58,1	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	84,98	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	70,62	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	%	43,48	
		Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	67,33	
		Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	%	99,67	
		Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	%	37,1	
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	66,14	
		Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	%	100	
		Persentase Layanan Perhubungan	%	100	
		Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	%	89,5	
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	82,22	
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100	
		2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	75,5	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
		Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	86	
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	100	
		Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	100	
		Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	%	20	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran	%	81	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
		penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo	%	100	
		Persentase layanan publik secara elektronik	%	85	
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	%	90	
		Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	%	66,67	
		Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	92	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	
2.17.02	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan	%	21,25	
2.17.03	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase pendidikan dan pelatihan koperasi	%	15,15	
2.17.04	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi, pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	0,38	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	95,5	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
		Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	%	94	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan
		Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	94	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
					Bidang Penanaman Modal
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal				Perangkat Daerah
		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	%	94	Pengampu Urusan
		Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	94	Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				Perangkat Daerah
		Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	%	94	Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				Perangkat Daerah
		Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	%	6	Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	89	
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				Perangkat Daerah
		Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	%	68	Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	%	80	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				Perangkat Daerah
		Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	%	98,66	Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.20	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				Perangkat Daerah
		Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
		Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	
		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	angka	55	
		Ketersediaan data statistik sektoral	%	100	
2.21	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				Perangkat Daerah
		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100	Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
		Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks	320	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan				Perangkat Daerah
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	Obyek	1	Pengampu

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	Kelompok	10	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
		Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	Orang	10	
		Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	31.191	
2.22.03	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
		Jumlah Cagar Budaya	Obyek	3	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat	%	100	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung di perpustakaan	%	30	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	37	
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional & Naskah Kuno				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
		Persentase penelusuran naskah kuno	%	100	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
		Persentase arsip yang dialihmediakan	%	70	
		Persentase pembinaan kearsipan	%	80	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.25.02	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	140,5	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	10.673,61	
3.25.04	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	%	10	
3.25.05	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi pengolahan ikan	ton	395,76	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan
		Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	DTW	17	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
		Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	orang	600	Bidang Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	100	
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	orang	95	
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	orang	1	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	orang	135	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PERTANIAN				
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Produktivitas Padi	ton/ha	6,17	
		Produktivitas jagung	ton/ha	5,6	
		Produktivitas bawang putih	ton/ha	6,16	
		Produktivitas bawang merah	ton/ha	7,11	
		Produktivitas cabai rawit	ton/ha	7,02	
		Produktivitas cabai keriting	ton/ha	7,02	
		Produktivitas tembakau	ton/ha	0,645	
		Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0,703	
		Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0,415	
		Jumlah produksi daging ternak besar	kg	809.172	
		jumlah produksi daging ternak kecil	kg	268.637	
		jumlah produksi ternak unggas	kg	6.255.823	
		jumlah produksi telur	kg	6.874.713	
		Persentase kelahiran pedet	%	48	
		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	38,17	
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Persentase Prasarana yang digunakan	%	100	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Persentase penanganan penyakit hewan	%	87	
		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	77	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	81	
3.27.06					

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	58	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	%	1,3	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
3.30.02	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	83	
		Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	2,4	
		Persentase Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	6,85	
3.30.03	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	90	
3.30.04	Program Pengembangan Ekspor				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		Nilai Ekspor	US\$	131.327.193	
3.30.05	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	95	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
		Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	51,55	
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
		Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	%	1	
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
		Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	2,2	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Pemerintahan
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	BAG. UMUM
		Persentase AKIP Sekretariat Daerah berpredikat BB	%	76,25	BAG. UMUM
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	BAG. UMUM

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	BAG. PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	3,9	BAG. ORGANISASI
		Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100	BAG. ORGANISASI
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Pemerintahan
		Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	80	BAG. KESRA DAN BINA MENTAL
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	89	BAG. KESRA DAN BINA MENTAL
		Indeks Zakat Nasional	Angka	0,82	
		Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik	%	100	BAG. PEMERINTAHAN
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100	BAG. PEMERINTAHAN
		Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100	BAG. HUKUM
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	BAG. HUKUM
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	BAG. HUKUM
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	BAG. HUKUM
		Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	%	100	BAG. HUKUM
		4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan		
Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%			100	Bagian Pembangunan
Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%			100	
Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%			100	
Persentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	%			100	Bagian PBJ
Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%			100	
Persentase Pendampingan proses PBJ	%			100	
Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%			100	Bagian Perekonomian
Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%			100	
Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%			83,33	
4.02	SEKRETARIAT DPRD				

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
		Persentase jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	100	
		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	%	100	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100	
		Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	%	100	
		Persentase Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	%	92	
		Persentase Laporan Pembahasan kebijakan Anggaran	%	92	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN				
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pembangunan Daerah				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
		Persentase Keselarasan Perencaaan Pembangunan Daerah	%	92	
		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	%	60	
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	80	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemeritahan dan pembangunan manusia	%	91	
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	%	91	
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur	%	91	
5.02	KEUANGAN				
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja <i>mandatory spending</i> dalam APBD	%	75	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	%	100	
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	%	100	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
		Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	%	100	
		Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	98,5	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
		Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	%	4,57	
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	%	98,36	
5.03	BIDANG KEPEGAWAIAN				
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
		Persentase layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	
		Persentase keterisian jabatan	%	85,34	
		Persentase Kebutuhan ASN	%	100	
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	%	99,31	
		Persentase kedisiplinan ASN	%	99,55	
5.04	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase pengembangan potensi ASN	%	27,21	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	%	70	
5.05.03	Program Riset dan Inovasi				Perangkat Daerah Pengampu Unsur
		Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	%	50	

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase inovasi yang dimanfaatkan	%	70	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
		Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irbn (I, II, III,IV, Khusus)	%	100	
		Peesentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100	
		Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
		Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	%	100	
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100	
		Persentase tindak lanjut aduan <i>Whistle Blowing</i> , Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah			Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan
			%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Tembarak
			%	100	Kecamatan Pringsurat
			%	100	Kecamatan Kaloran
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Bulu
			%	100	Kecamatan Kedu
			%	100	Kecamatan Kandangan
			%	100	Kecamatan Candiroto
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonobojo
			%	100	Kecamatan Kraggan

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
			%	100	Kecamatan Bejen
			%	100	Kecamatan Kledung
			%	100	Kecamatan Bansari
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	100	Kecamatan Tretep
7.01.02	Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan			Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan
			%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Tembarak
			%	100	Kecamatan Pringsurat
			%	100	Kecamatan Kaloran
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Bulu
			%	100	Kecamatan Kedu
			%	100	Kecamatan Kandangan
			%	100	Kecamatan Candiroto
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonoboyo
			%	100	Kecamatan Kranggan
			%	100	Kecamatan Bejen
			%	100	Kecamatan Kledung
			%	100	Kecamatan Bansari
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	100	Kecamatan Tretep
		Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan			
			%	90,40	Kecamatan Temanggung
			%	97,82	Kecamatan Tembarak
			%	96	Kecamatan Pringsurat
			%	98,53	Kecamatan Kaloran
			%	95	Kecamatan Parakan
			%	95,08	Kecamatan Bulu
			%	96	Kecamatan Kedu
			%	96	Kecamatan Kandangan
			%	95,5	Kecamatan Candiroto
			%	97,75	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonoboyo

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
			%	96,5	Kecamatan Kranggan
			%	95,5	Kecamatan Bejen
			%	97	Kecamatan Kledung
			%	97	Kecamatan Bansari
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	96,5	Kecamatan Tretep
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak			Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan
					SEMUA KELURAHAN
			%	85	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	84,5	Kecamatan Kranggan
					SEMUA KELURAHAN
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif			
			%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Kranggan
7.01.04	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam			Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan
			%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Tembarak
			%	100	Kecamatan Pringsurat
			%	100	Kecamatan Kaloran
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Bulu
			%	100	Kecamatan Kedu
			%	100	Kecamatan Kandangan
			%	100	Kecamatan Candiroto
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonoboyo
			%	100	Kecamatan Kranggan
			%	100	Kecamatan Bejen
			%	100	Kecamatan Kledung
			%	100	Kecamatan Bansari

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	100	Kecamatan Tretep
7.01.05	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa			Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan
			%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Tembarak
			%	100	Kecamatan Pringsurat
			%	100	Kecamatan Kaloran
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Bulu
			%	100	Kecamatan Kedu
			%	100	Kecamatan Kandangan
			%	100	Kecamatan Candiroto
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonoboyo
			%	100	Kecamatan Kranggan
			%	100	Kecamatan Bejen
			%	100	Kecamatan Kledung
			%	100	Kecamatan Bansari
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	100	Kecamatan Tretep
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu			
			%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Tembarak
			%	100	Kecamatan Pringsurat
			%	100	Kecamatan Kaloran
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Bulu
			%	100	Kecamatan Kedu
			%	100	Kecamatan Kandangan
			%	100	Kecamatan Candiroto
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonoboyo
			%	100	Kecamatan Kranggan
			%	100	Kecamatan Bejen
			%	100	Kecamatan Kledung

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
			%	100	Kecamatan Bansari
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	100	Kecamatan Tretep
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu			
			%	100	Kecamatan Temanggung
			%	100	Kecamatan Tembarak
			%	100	Kecamatan Pringsurat
			%	100	Kecamatan Kaloran
			%	100	Kecamatan Parakan
			%	100	Kecamatan Bulu
			%	100	Kecamatan Kedu
			%	100	Kecamatan Kandangan
			%	100	Kecamatan Candirotto
			%	100	Kecamatan Ngadirejo
			%	100	Kecamatan Jumo
			%	100	Kecamatan Wonoboyo
			%	100	Kecamatan Kranggan
			%	100	Kecamatan Bejen
			%	100	Kecamatan Kledung
			%	100	Kecamatan Bansari
			%	100	Kecamatan Tlogomulyo
			%	100	Kecamatan Selopampang
			%	100	Kecamatan Gemawang
			%	100	Kecamatan Tretep
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentasae ormas yang mendapat pembinaan	%	23	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
8.01.05					

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET TAHUN 2027	PD PENANGGUNG JAWAB
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Jumlah kejadian konflik SARA	kejadian	8	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	%	100	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

6.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel 6.4 dan tabel 6.5 berikut ini.

Tabel 6. 4
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Temanggung Tahun 2027

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB							
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar	%	93,41	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan			
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	%	99,88	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan			DINDUKCAPIL
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	%	98,29	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan			DINDUKCAPIL
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	%	58,89	DINDIKPORA

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
2	Kesehatan		pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan			
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan			
		5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	per 1000 penduduk	0,97	DINAS KESEHATAN dan DINDUKCAPIL
				Jumlah Penduduk di Kabupaten			
		6	Persentase RS dan atau Puskesmas Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS dan atau Puskesmas Rujukan yang terakreditasi	%	100	DINAS KESEHATAN
				Jumlah RS dan atau Puskesmas di Kabupaten			
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	DINAS KESEHATAN
				Jumlah ibu hamil di Kabupaten			
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	DINAS KESEHATAN
				Jumlah ibu bersalin di Kabupaten			
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
				Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten			
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
				Jumlah balita di Kabupaten			
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten			
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten			
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun keatas di Kabupaten			
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
				Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten			
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
				Jumlah penderita DM di Kabupaten			
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
				Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten			
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
				Jumlah penderita TBC di Kabupaten			
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi danelihara (ha) di tahun eksisting	%	98,7	DPUPR
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten			
		20	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	%	97,07	DPUPR
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di Kabupaten			
		21	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang	%	100	DPRKPLH

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
				memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD			
				Jumlah rumah di Kabupaten/Kota			
		22	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya	%	100	DPUPR
				Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku			
		23	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah panjang jalan kewenangan kab/kota yang mantap	%	89,8	DPUPR
				Jumlah panjang jalan keseluruhan di wilayah kab/kota			
		24	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	%	100	DPUPR
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten			
		25	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	DPUPR
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	%	48,83	DPRKPLH
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha			
		27	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	%	3,51	DPRKPLH
				Jumlah total unit rumah Kabupaten			
		28	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	%	100	DPRKPLH
				Jumlah unit rumah kabupaten			
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	29	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	%	100	SATPOL PP DAMKAR
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk			
		30	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	%	100	SATPOL PP DAMKAR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi			
		31	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	BPBD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan			
		32	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	BPBD
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			
		33	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	BPBD
				Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana			
		34	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/ kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah	%	100	SATPOL PP DAMKAR
				Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten			
		35	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	menit	15	SATPOL PP DAMKAR
6	Sosial	36	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	DINSOS
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis			

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
		37	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	%	100	DINSOS
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten			
7	Tenaga Kerja	38	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	%	1,05	DINPERINAKER
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten			
		39	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	21,70	DINPERINAKER
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan			
		40	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	%	3.508.642,93	DINPERINAKER
				Jumlah tenaga kerja			
		41	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	28,45	DINPERINAKER
				Jumlah Perusahaan			
		42	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	%	37,5	DINPERINAKER
				Jumlah pencaker yang terdaftar			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD	%	10	DPPPAPPKB
				Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD			BKPAD
		44	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi	%	8,03	DPPPAPPKB
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaen/kota			DINDUKCAPIL
		45	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan		4,9	DPPPAPPKB

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
			(per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah penduduk perempuan			DINDUKCAPIL
9	Pangan	46	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah	%	25,16	DKPPP
				Jumlah target cadangan pangan yang ditetapkan			
10	Pertanahan	47	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ KKPR	%	90,48	DPUPR dan DPMPTSP
				Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR			
		48	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	DPRKPLH
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			
		49	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	%	100	DPUPR
				Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan			
		50	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	%	100	DPRKPLH
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan			
11	Lingkungan Hidup	51	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,54	DPRKPLH
				Indeks Kualitas Pencemaran Air (37,6%)			
				Indeks Kualitas Pencemaran Udara (40,5%)			
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan (21,9%)			
		52	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat dikelola	%	64,87	DPRKPLH
				Total vol timbulan sampah Kabupaten			
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	53	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	%	99,74	DINDUKCAPIL
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas			
		54	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	%	94,50	DINDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0 – 17 tahun			

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
		55	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	%	99,76	DINDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0 – 18 tahun			
		56	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	12	DINDUKCAPIL
				Jumlah OPD			
13	Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	57	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	%	100	DINPERMADES
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)			
		58	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	%	4,00	DINPERMADES
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	59	TFR (Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$ $ASFR_i = (bi/pi)k$ dimana bi: jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi: jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i: kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, 1=2 untuk kelompok 20-21,...., 1=7 untuk kelompok umur 45-49) k: bilangan konstanta biasanya 100	Angka	2,16	DPPPAPPKB
		60	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	%	78,25	DPPPAPPKB
				Jumlah Pasangan Usia Subur			
		61	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Jumlah PUS yang ingin berKB tetapi tidak terlayani	%	7,57	DPPPAPPKB
				Jumlah pasangan usia subur			
15	Perhubungan	62	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ o $IK1 (\text{angkutan jalan}) = (\text{Jumlah trayek yg dilayani di kabupaten} \times \text{bobot trayek}) \div \text{jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten}$	Indeks	0,82	DINHUB

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
				o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah Jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah Jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi adalah Jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah Jumlah kebutuhan lintas Penyeberangan baik lintas Penyeberangan perintis maupun komersial untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas:			

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
				a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			
		63	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten		0,338	DINHUB
16	Komunikasi dan Informatika	64	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	DINKOMINFO
				Jumlah OPD			
		65	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	90	DINKOMINFO
				Jumlah Layanan Publik			
		66	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	81	DINKOMINFO
				Jumlah penduduk			
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	67	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset (jumlah koperasi sehat)	%	14,38	DINKOPDAG
				Jumlah seluruh koperasi			
		68	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	0,80	DINKOPDAG
				Jumlah usaha mikro keseluruhan			
18	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten	%	0,20	DPMPTSP
				Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten			
19	Kepemudaan dan Olahraga	70	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten	%	16	DINDIKPORA
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten			DINDUKCAPIL
		71	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten	%	15	DINDIKPORA

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten			DINDUKCAPIL
		72	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	57	DINDIKPORA
20	Statistik	73	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	DINKOMINFO
				Jumlah OPD			
		74	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	DINKOMINFO
				Jumlah OPD			
21	Persandian	75	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	%	50	DINKOMINFO
				Jumlah area penilaian			
22	Kebudayaan	76	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	%	13,99	DINBUDPAR
				Jumlah cagar budaya yang terdata (terinventarisasi)			
23	Perpustakaan	77	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Nilai	43	DINPUSIP
		78	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) $(UPLM / AM) \times 100$ UPLM (Unsur Pembangun Literasi Masyarakat) : 1. Pemerataan layanan perpustakaan 2. Ketercukupan koleksi 3. Ketercukupan tenaga perpustakaan 4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari 5. Jumlah perpustakaan ber-SNP 6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi 7. Anggota perpustakaan AM (Jumlah penduduk)	Angka	60,54	DINPUSIP
24	Kearsipan	79	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UU 43/2009 tentang Kearsipan)	$T = (a + i + s + j) / 4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	69,50	DINPUSIP

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
				j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			
		80	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	%	22	DINPUSIP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
25	Kelautan dan Perikanan	81	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: <i>one data</i> KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	%	70	DKPPP
				target produksi perikanan (tangkap dan budidaya) yang ditetapkan)			
26	Pariwisata	82	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	%	0,06	DINBUDPAR
				Jumlah wisatawan tahun n-1			
		83	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	%	0,06	DINBUDPAR
				Jumlah wisatawan tahun n-1			
		84	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	%	17,90	DINBUDPAR
				Jumlah kamar yang tersedia			
		85	kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,93	DINBUDPAR dan BPS
				Total PDRB Harga Berlaku			
		86		Total realisasi PAD dari sektor pariwisata	%	1,30	DINBUDPAR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	Jumlah total PAD (realisasi)			BPKPAD
27	Pertanian	87	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Ton/ha	6,17	DKPPP
				Luas Panen			
28	Perdagangan	88	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	%	0,15	DPMPTSP dan DINKOPDAG
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten			
		89	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera yang berlaku pada tahun berjalan	%	95	DINKOPDAG
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten			
29	Perindustrian	90	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	%	0,41	DINPERINAKER
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1			
		91	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	%	85,8	DINPERINAKER
		92	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	%	1,22	DINPERINAKER
				Jumlah izin yang dikeluarkan			
		93	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan		100	DINPERINAKER
				Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan			
				Informasi produksi dan kapasitas produksi			
				Informasi bahan baku dan bahan penolong			
				Informasi bahan bakar/energi			
				Informasi tenaga kerja			
				Informasi investasi			

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

Tabel 6. 5
Indikator Kinerja Kunci Penunjang Kabupaten Temanggung Tahun 2027

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	%	10,90	BPKPAD
				Jumlah APBD			
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD	%	19,52	BPKPAD
				Jumlah Pendapatan pada APBD			
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	BAGIAN PEMBANGUNAN
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	INSPEKTORAT
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – <i>transfer expenditures</i>	%	70,89	BPKPAD
				Jumlah belanja APBD			
		6	Opini laporan keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP	WTP	BPKPAD
					WDP		
					TW		
					TMP		
2	Pengadaan	7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	80	BAGIAN PBJ
				Jumlah seluruh pengadaan			
		8	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan	%	31	BAGIAN PBJ
				Total belanja modal dan operasional			
		9	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	Jumlah niai PBJ yang menggunakan Produk dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tahun n-1	%	15	BAGIAN PBJ
				Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, Produk			

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
				Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi n-1			
3	Kepegawaian	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76,23	BKPSDM
				seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
		11	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	%	32,01	BKPSDM
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan)	%	22,78	BKPSDM
				Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
4	Manajemen Keuangan	13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	%	0,60	BPKPAD
				Total belanja APBD			
		14	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi	%	17,84	BPKPAD
				total belanja PAD dalam APBD			
		15	Manajemen aset	Jumlah <i>Asset Management</i>	Jumlah	4	BPKPAD
				1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	4	ya	
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		ya	
				3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		ya	
				4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);		ya	
		16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	%	5	BPKPAD
				Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya			
5	Transparasi dan Partisipasi Publik	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	%	92	BPKPAD
				Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda			

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	TARGET 2027	SUMBER DATA
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	%	100	BPKPAD
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci			

Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2026.

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan daerah selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Dokumen RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 mengacu pada dokumen RKP Nasional Tahun 2027 serta RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 yaitu **“Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata untuk Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan”**.

Dokumen RKPD mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu: (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2027; (2) sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2027; (3) menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan; (4) sebagai dokumen perencanaan strategis dalam pencapaian indikator kinerja daerah.

Pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Temanggung dilihat dari capaian 3 indikator kinerja utama tahun 2025 sebagai berikut:

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** mencapai 72,52. Capaian pada tahun 2025 tersebut mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
2. **Pertumbuhan Ekonomi** mencapai 5,57% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan daya dorong ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah dijalankan.
3. **Indeks Reformasi Birokrasi** mencapai 87,27 pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pencapaian indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja program/kegiatan dengan melalui serangkaian program dan kegiatan

prioritas dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas *pentahelix* guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 rekapitulasi capaian kinerja indikator sebagai berikut:

1. Capaian **Indikator Tujuan** Kabupaten Temanggung ada 3 indikator dengan 3 indikator tersebut berpredikat Sangat Tinggi (100%);
2. Capaian **Indikator Sasaran** Kabupaten Temanggung ada 10 indikator dengan semua indikator berpredikat Sangat Tinggi (100%);
3. Capaian **Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah** Kabupaten Temanggung ada 251 indikator dengan 240 indikator berpredikat Sangat Tinggi (95,62%) dan 11 indikator berpredikat Tinggi (4,38%);
4. Capaian **Indikator Program** Kabupaten Temanggung ada 480 indikator dengan 446 indikator berpredikat Sangat Tinggi (92,92%), 16 indikator berpredikat Tinggi (3,33%), 8 indikator berpredikat Sedang (1,67%), 1 indikator berpredikat Rendah (0,21%) dan 9 indikator berpredikat Sangat Rendah (1,88%).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi bagi semua pihak terutama Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


BUPATI TEMANGGUNG,
AGUS SETYAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027



www.temanggungkab.go.id



info@temanggungkab.go.id